



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2021**



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-

2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 178);

28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 127);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021-2026.

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sumatera Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026; dan
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan;
- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- i. BAB IX : Penutup.

(2) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 7

- (1) Gubernur melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan;
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 September 2021



Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 September 2021



LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026
(6-149/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021–2026

I. UMUM

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. Perencanaan pembangunan daerah disusun atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur terpilih harus menyusun RPJMD sebagai penjabaran dari visi dan misinya. Bahkan dalam ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD

wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan dengan menggunakan lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Selanjutnya RPJMD nantinya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: penjabaran RPJMD yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah, dan perubahan RPJMD yang tata caranya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemangku Kepentingan” adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, Tentara Nasional Indonesia,

Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Akademisi, representasi Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat di Daerah dan kabupaten/kota serta Nagari/Desa/Kelurahan, pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Sistematika RPJMD merujuk pada ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 195

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 LATAR BELAKANG	I.1
1.2 DASAR HUKUM	I.2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I.5
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	I.5
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	I.6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II.1
2.1.1 Kondisi Geografi dan Administrasi	II.1
2.1.2 Topografi	II.3
2.1.3 Kondisi Klimatologi	II.6
2.1.4 Kondisi Geologi	II.7
2.1.5 Kondisi Hidrologi	II.8
2.1.6 Penggunaan Lahan	II.9
2.1.7 Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah	II.12
2.1.8 Wilayah Rawan Bencana	II.29
2.1.9 Demografi	II.32
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II.37
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi	II.37
2.2.2 Laju Inflasi	II.40
2.2.3 PDRB Per kapita	II.40
2.2.4 Ketimpangan Pendapatan	II.43
2.2.5 Ketimpangan Wilayah	II.44
2.2.6 Tingkat Kemiskinan	II.44
2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia	II.47
2.2.8 Angka Kriminalitas	II.51

2.2.9	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	II.52
2.3	ASPEK PELAYANAN UMUM	II.58
2.3.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II.58
2.3.2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II.82
2.3.3	Urusan Pilihan	II.106
2.3.4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II.115
2.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH	II.121
2.4.1	Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan	II.121
2.4.2	Produktifitas Total Daerah	II.123
2.4.3	Nilai Tukar Petani	II.123
2.5	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	II.124
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1	KINERJA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2016-2020	III.1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III.1
3.1.2	Neraca Daerah	III.28
3.2	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III.34
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III.34
3.2.2	Analisis Pembiayaan	III.35
3.3	KERANGKA PENDANAAN	III.37
3.3.1	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama dan Earmark	III.37
3.3.2	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Earmark	III.39
3.3.3	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III.46
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV.1
4.1	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV.1
4.1.1	Permasalahan Pembangunan Secara Makro	IV.1
4.1.2	Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	IV.9
4.2	ISU STRATEGIS	IV.19
4.2.1	Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat	IV.19
4.2.2	Isu Regional Antar Kabupaten/Kota	IV.25

4.2.3 Isu Regional Antar Provinsi yang berbatasan	IV.26
---	-------

BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V.1
5.1	VISI RPJPD 2005-2025	V.1
5.2	MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	V.1
5.3.	ARAH KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024.	V.3
5.4	RPJMD PROVINSI TETANGGA	V.5
5.5	RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026	V.6
5.5.1	Visi	V.6
5.5.2	Misi	V.7
5.5.3	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021-2026	V.12
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI.1
6.1	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MENURUT TUJUAN DAN SASARAN	VI.1
6.2	PROGRAM UNGGULAN	VI.68
6.3	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN	VI.70
6.3.1	Pengembangan Sistem Perkotaan	VI.73
6.3.2	Kawasan Lindung	VI.73
6.3.3	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	VI.76
6.3.4	Kawasan Rawan Bencana	VI.78
6.3.5	Kawasan Lindung Geologi	VI.79
6.3.6	Pengembangan Kawasan Budidaya	VI.81
6.3.7	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	VI.90
6.3.8	Wilayah Perbatasan dengan Provinsi Lain	VI.90
6.3.9	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten/Kota	VI.92
6.4	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINTAS PEMERINTAH DAERAH	VI.99
6.5	RENCANA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN	VI.100
6.6	PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	VI.101
6.7	RENCANA PENGEMBANGAN SEKTOR STRATEGIS	VI.104
6.7.1	Pertanian	VI.104
6.7.2	Peternakan	VI.113

	6.7.3 Industri	VI.116
	6.7.4 Pariwisata	VI.124
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII.1
	7.1 KERANGKA PENDANAAN	VII.1
	7.2 PENYELARASAN RPJMN TAHUN 2020-2024 DENGAN RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026	VII.42
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII.1
	8.1 INDIKATOR KINERJA	VIII.1
	8.2 MAKRO INDIKATOR KINERJA UTAMA	VIII.1
	8.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH	VIII.3
BAB IX	PENUTUP	IX.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Nagari, dan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	II.1
Tabel 2.2	Karakteristik Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	II.3
Tabel 2.3	Luas Sawah Beririgasi Provinsi Sumatera Barat	II.9
Tabel 2.4	Luas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat 2020	II.10
Tabel 2.5	Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Di Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.13
Tabel 2.6	Luas Tanam dan Produksi Beberapa Komoditi Perkebunan di Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.13
Tabel 2.7	Perkembangan Produksi Perikanan di Sumatera Barat Tahun 2016 - 2020 (Ton)	II.15
Tabel 2.8	Luas Terumbu Karang di Provinsi Sumatera Barat	II.17
Tabel 2.9	Luas Hutan Mangrove di Sumatera Barat	II.17
Tabel 2.10	Luas Padang Lamun Sumatera Barat	II.18
Tabel 2.11	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dalam 5 Tahun Terakhir	II.19
Tabel 2.12	Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	II.20
Tabel 2.13	Sebaran Pulau - Pulau Kecil Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat	II.21
Tabel 2.14	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.22
Tabel 2.15	Perkembangan IKM Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.23
Tabel 2.16	Nilai Ekspor Non Migas Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Nilai FOB Juta US\$)	II.24
Tabel 2.17	Negara Tujuan Eksport Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Nilai FOB Juta US\$)	II.25
Tabel 2.18	Kinerja Pelindungan Konsumen Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.25
Tabel 2.19	Potensi Panas Bumi Provinsi Sumatera Barat	II.27
Tabel 2.20	Perwilayahan Pariwisata Sumatera Barat	II.29
Tabel 2.21	Wilayah Daerah Rawan Bencana di Provinsi Sumatera Barat	II.30
Tabel 2.22	Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Kab/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2020 (jiwa)	II.34
Tabel 2.23	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persen)	II.38

Tabel 2.24	Struktur Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)	II.39
Tabel 2.25	Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Menurut Penggunaan di Sumatera Barat, Tahun 2018-2020	II.40
Tabel 2.26	Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (%)	II.40
Tabel 2.27	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota	II.41
Tabel 2.28	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Juta Rupiah)	II.41
Tabel 2.29	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Juta Rupiah)	II.42
Tabel 2.30	Persentase Kontribusi Terhadap Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen)	II.42
Tabel 2.31	Indeks Gini Rasio Seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.43
Tabel 2.32	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Maret 2016 – September 2020	II.45
Tabel 2.33	Persentase Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Maret)	II.46
Tabel 2.34	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.47
Tabel 2.35	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.48
Tabel 2.36	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota Se Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.48
Tabel 2.37	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/kota Se Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Tahun)	II.49
Tabel 2.38	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/kota Se Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Tahun)	II.49
Tabel 2.39	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Tahun)	II.50
Tabel 2.40	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Ribu Rp/Org/Th)	II.50
Tabel 2.41	Jumlah Peristiwa Tindak yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan di Sumatera Barat, 2016-2020	II.51
Tabel 2.42	Capaian Indikator TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat	II.54
Tabel 2.43	Jumlah Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Provinsi Sumatera Barat	II.55
Tabel 2.44	Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Provinsi Sumatera Barat	II.56

Tabel 2.45	Jumlah Indikator Pada Setiap TPB/SDGs yang Tidak Memiliki Data di Provinsi Sumatera Barat	II.57
Tabel 2.46	Perkembangan Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020	II.59
Tabel 2.47	Kebutuhan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	II.61
Tabel 2.48	Tenaga Kependidikan di daerah 3T	II.61
Tabel 2.49	Data sarana dan prasarana pendidikan Tahun 2020	II.62
Tabel 2.50	Jumlah dan sebaran sekolah menengah kejuruan provinsi Sumatera barat tahun 2020	II.63
Tabel 2.51	Jumlah Bidang Keahlian pada SMK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	II.64
Tabel 2.52	Daftar Sekolah Blankspot Internet SMA, SMK, SLB Provinsi Sumatera Barat	II.65
Tabel 2.53	Pencapaian Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020	II.66
Tabel 2.54	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Provinsi Dibandingkan Dengan Jumlah Penduduk Sumatera Barat	II.67
Tabel 2.55	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Pemerintah Provinsi dan Swasta Dibandingkan Dengan Jumlah Penduduk Sumatera Barat	II.68
Tabel 2.56	Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	II.68
Tabel 2.57	Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	II.69
Tabel 2.58	Persentase Wasting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.70
Tabel 2.59	Jumlah Kejadian Penyakit Tidak Menular Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020	II.71
Tabel 2.60	Jumlah Kejadian Penyakit Menular Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020	II.71
Tabel 2.61	Perkembangan Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.75
Tabel 2.62	Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.77
Table 2.63	Rekapitulasi Luasan Dan Lokasi Kawasan Kumuh Provinsi Sumatera Barat	II.77
Table 2.64	Rekapitulasi Luasan Dan Lokasi Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	II.78
Tabel 2.65	Pencapaian Indikator Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020	II.80
Tabel 2.66	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.81
Tabel 2.67	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke Atas di Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.82

Tabel 2.68	Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021	II.83
Tabel 2.69	Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020	II.83
Tabel 2.70	Jumlah Angkatan Kerja dan Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke Atas Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.84
Tabel 2.71	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.84
Tabel 2.72	Perkembangan Indikator Urusan Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.86
Tabel 2.73	Pelaksanaan Indikator Urusan Wajib Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (%)	II.87
Tabel 2.74	Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.87
Tabel 2.75	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020	II.89
Tabel 2.76	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.90
Tabel 2.77	Data Perkembangan Bumdes/Bumnag Kondisi Desember 2020	II.91
Tabel 2.78	Rekapitulasi Perkembangan Status Desa dan Kelurahan	II.91
Tabel 2.79	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)	II.92
Tabel 2.80	Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.94
Tabel 2.81	Angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Sumatera Barat (19 Kab/kota) pada Tahun 2016 sampai Tahun 2020	II.96
Tabel 2.82	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.97
Tabel 2.83	Perkembangan Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.98
Tabel 2.84	Perkembangan Indikator Urusan Usaha Kecil, Dan Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.98
Tabel 2.85	Pemanfaatan Teknologi dan Standarisasi Produk UMKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.99
Tabel 2.86	Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.100
Tabel 2.87	Perkembangan Indikator Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.101

Tabel 2.88	Data Sarana dan Prasarana Olah Raga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	II.101
Tabel 2.89	Data Binaan Atlet PPLP Sumatera Barat Tahun 2021/2022	II.102
Tabel 2.90	Data Atlet Berprestasi PPLP Sumatera Barat yang Diterima Pada Perguruan Tinggi Negeri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020/2021	II.103
Tabel 2.91	Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.104
Tabel 2.92	Kinerja Persandian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)	II.104
Tabel 2.93	Perkembangan Indikator Urusan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)	II.104
Tabel 2.94	Perkembangan Indikator Urusan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.105
Tabel 2.95	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.106
Tabel 2.96	Perkembangan Indikator Urusan Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.107
Tabel 2.97	Perkembangan Indikator Urusan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.108
Tabel 2.98	Wisman Yang Berkunjung ke Sumatera Barat Menurut Kebangsaan Tahun 2016-2020 (Orang)	II.109
Tabel 2.99	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang dan Non Bintang di Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.109
Tabel 2.100	Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik di Hotel Berbintang di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Hari)	II.109
Tabel 2.101	Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Pertanian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.110
Tabel 2.102	Perkembangan Produksi Komoditi Unggulan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2020	II.111
Tabel 2.103	Perkembangan Indikator Urusan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.111
Tabel 2.104	Perkembangan Indikator Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.112
Tabel 2.105	Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.113
Tabel 2.106	Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.114
Tabel 2.107	Perkembangan Indikator Urusan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.114
Tabel 2.108	Indikator Urusan Penunjang Pemerintahan (Perencanaan) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)	II.115

Tabel 2.109	Perkembangan Indikator Penunjang Pemerintahan (Keuangan) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	II.116
Tabel 2.110	Perkembangan Indikator Unsur Kepegawaian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.117
Tabel 2.111	Perkembangan Indikator Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.118
Tabel 2.112	Perkembangan Indikator Unsur Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.119
Tabel 2.113	Perkembangan Indikator Unsur Pengawasan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.120
Tabel 2.114	Rekapitulasi Perkembangan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumbar Tahun 2016 S.D 2020	II.120
Tabel 2.115	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.121
Tabel 2.116	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.122
Tabel 2.117	Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan di Sumatera Barat 2016-2020	II.122
Tabel 2.118	Produktifitas Total Daerah Per Kabupaten/kota Se Sumatera Barat juta rupiah/orang	II.123
Tabel 2.119	Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016-2020 Provinsi Sumatera Barat	II.124
Tabel 2.120	Nilai Tukar Petani dan Sub Sektor Pendukungnya di Sumatera Barat 2016-2020 (%)	II.124
Tabel 2.121	Pencapaian SPM di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	II.125
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III.3
Tabel 3.2	Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah, Proporsi Jenis Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)	III.5
Tabel 3.3	Realisasi Surplus/Defisit, Pembiayaan dan SiLPA Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III.18
Tabel 3.4	Rasio Pendapatan Daerah Per Kapita Menurut Provinsi Tahun 2017-2019 (Rp Juta)	III.19
Tabel 3.5	Rasio Kemandirian Daerah Menurut Provinsi Tahun 2017-2019 (%)	III.20
Tabel 3.6	Rasio Ruang Fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)	III.22
Tabel 3.7	Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Menurut Provinsi Tahun 2017-2019 (%)	III.23

Tabel 3.8	Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)	III.24
Tabel 3.9	Rasio Belanja Modal Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2019 (%)	III.25
Tabel 3.10	Proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2019 (%)	III.26
Tabel 3.11	Rasio Kemampuan Membayar Pokok Pinjaman dan Bunga Hutang Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2019 (%)	III.27
Tabel 3.12	Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III.29
Tabel 3.13	Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 (%)	III.32
Tabel 3.14	Nilai Perolehan Aset Tetap Tahun 2020 (Rp juta)	III.33
Tabel 3.15	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III.34
Tabel 3.16	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 (Rp juta)	III.35
Tabel 3.17	Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 (Rp juta)	III.36
Tabel 3.18	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 (Rp juta)	III.37
Tabel 3.19	Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan <i>Earmark</i> Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 (Rp juta)	III.38
Tabel 3.20	Potensi Aset Idle Untuk Peningkatan PAD (Rp juta)	III.42
Tabel 3.21	Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Rp juta)	III.44
Tabel 3.22	Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Rp juta)	III.45
Tabel 3.23	Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat, Serta Prioritas Utama dan <i>Earmark</i> Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Rp juta)	III.45
Tabel 3.24	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021–2026 (Rp juta)	III.46
Tabel 4.1	Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 2016-2020 (%)	IV.1
Tabel 4.2	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi se Sumatera Tahun 2016-2020 (Rp. Juta)	IV.3
Tabel 4.3	IPM Pulau Sumatera Tahun 2020	IV.4
Tabel 4.4	Pemetaan Permasalahan (Pohon Masalah)	IV.8

Tabel 5.1	Keselarasan Visi Dan Misi RPJPD 2005 – 2025 Dan RPJMD 2021 – 2026	V.11
Tabel 5.2	Keselarasan Visi Dan Misi RPJMN 2020 – 2024 Dan RPJMD 2021 – 2026	V.11
Tabel 5.3	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026	V.12
Tabel 5.4	Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	V.15
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	VI.2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan	VI.24
Tabel 6.3	Program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif tahun 2021-2026	VI.35
Tabel 6.4	Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RTRW 2012-2032	VI.73
Tabel 6.5	Luas dan Perubahan Luas Hutan Lindung Provinsi Sumatera Barat Menurut RTRW 2012-2032 per Kabupaten/Kota	VI.74
Tabel 6.6	Sebaran Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi Sumatera Barat Dirinci Menurut Kabupaten /Kota	VI.75
Tabel 6.7	Kawasan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	VI.82
Tabel 6.8	Kawasan Pengembangan Komoditi Unggulan Perkebunan	VI.83
Tabel 6.9	Kawasan Pengembangan Komoditi Peternakan	VI.84
Tabel 6.10	Kawasan Pengembangan dan Komoditi Perikanan Budidaya	VI.86
Tabel 6.11	Kawasan Pengembangan Agribisnis	VI.87
Tabel 6.12	Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri di Provinsi Sumatera Barat	VI.88
Tabel 6.13	Kabupaten/Kota dan Jumlah Kecamatan Yang berbatasan dengan Provinsi Tetangga	VI.91
Tabel 6.14	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (%)	VI.92
Tabel 6.15	Proyeksi PDRB per Kapita ADHK Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (Rp. Juta)	VI.92
Tabel 6.16	Proyeksi PDRB per Kapita ADHB Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (Rp. Juta)	VI.93
Tabel 6.17	Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (%)	VI.94
Tabel 6.18	Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026	VI.94
Tabel 6.19	Proyeksi Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (tahun)	VI.95
Tabel 6.20	Proyeksi Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (tahun)	VI.95

Tabel 6.21	Proyeksi Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (tahun)	VI.96
Tabel 6.22	Proyeksi Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (Rp. ribu)	VI.96
Tabel 6.23	Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (%)	VI.97
Tabel 6.24	Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (Ribu jiwa)	VI.98
Tabel 6.25	Proyeksi Gini Ratio Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 ¹	VI.98
Tabel 6.26	Rencana Penumbuhan <i>Milenial Entrepreneur</i> dan <i>Women Entrepreneur</i>	VI.100
Tabel 6.27	Nilai baseline dan perkiraan penurunan emisi pada tahun 2030	VI.103
Tabel 6.28	Kawasan Pertanian Tanaman Padi, Jagung Dan Ubi Jalar	VI.104
Tabel 6.29	Kawasan Pertanian Hortikultura	VI.106
Tabel 6.30	Kawasan Pertanian Perkebunan	VI.109
Tabel 6.31	Kawasan Pengembangan Peternakan Provinsi Sumatera Barat	VI.113
Tabel 6.32	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2038	VI.116
Tabel 6.33	Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	VI.124
Tabel 7.1	Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Rp juta)	VII.1
Tabel 7.2	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 (Rp juta)	VII.1
Tabel 7.3	Uraian Pendapatan dan Belanja SKPD Tahun 2021	VII.2
Tabel 7.4	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai KebutuhanPendanaan Provinsi Sumatera Barat	VII.8
Tabel 7.5	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat	VII.43
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	VIII.1
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	VIII.2
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	VIII.4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	I.5
Gambar 2.1	Persentase Penggunaan Lahan terhadap Luasan Wilayah Sumatera Barat	II.2
Gambar 2.2	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat	II.3
Gambar 2.3	Peta Geologi Provinsi Sumatera Barat	II.8
Gambar 2.4	Peta Sebaran Potensi Panas Bumi Provinsi Sumatera Barat	II.27
Gambar 2.5	Tingkat Prioritas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	II.32
Gambar 2.6	Sebaran Penduduk Provinsi Sumatera Barat	II.33
Gambar 2.7	Komposisi Penduduk Sumatera Barat Menurut Kelompok Umur, 1971-2020	II.34
Gambar 2.8	Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Pilar Pembangunan	II.54
Gambar 2.9	Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs Terhadap Target Nasional	II.55
Gambar 2.10	Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Provinsi Sumatera Barat	II.56
Gambar 2.11	Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Provinsi Sumatera Barat	II.57
Gambar 2.12	Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Tidak Memiliki Data di Provinsi Sumatera Barat	II.58
Gambar 6.1	Nilai Indek Moran UMKM dan PDRB Sektor Pariwisata Sumatera Barat	VI.71

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Produksi Beberapa Komoditi Peternakan di Sumatera Barat Tahun 2016-2020	II.14
Grafik 2.2	Luas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat 2020	II.19
Grafik 2.3	Pelaksanaan Perhutanan Sosial	II.20
Grafik 2.4	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Sumatera Barat Dibandingkan Industri Pengolahan Nasional (%) Tahun 2016-2020	II.23
Grafik 2.5	Pertumbuhan Kategori Perdagangan Sumatera Barat Dibandingkan Kategori Perdagangan Nasional (%) Tahun 2015-2019	II.24
Grafik 2.6	Sebaran hotspot Perkabupaten/kota tahun 2015-2020	II.31
Grafik 2.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Barat dari 1971 - 2020	II.33
Grafik 2.8	Persentase Penduduk Lansia Sumatera Barat, 1971-2020	II.35
Grafik 2.9	Rasio Jenis Kelamin Sumatera Barat menurut Kelompok Umur, 2020	II.36
Grafik 2.10	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/kota, 2020	II.37
Grafik 2.11	Indeks Williamson Sumatera Barat 2016-2019	II.44
Grafik 2.12	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah Tempat Tinggal, Maret dan September 2016-2020	II.45
Grafik 2.13	Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2020	II.77
Grafik 2.14	Angka Kecelakaan di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2016 - 2020	II.96
Grafik 2.15	Realisasi Tingkat Konsumsi Ikan Sumatera Barat Tahun 2016 - 2020	II.108
Grafik 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III.8
Grafik 3.2	Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)	III.8
Grafik 3.3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III.10
Grafik 3.4	Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)	III.11
Grafik 3.5	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III.13
Grafik 3.6	Kontribusi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III.14
Grafik 3.7	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III.14
Grafik 3.8	Kontribusi Sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)	III.15
Grafik 3.9	Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III.16
Grafik 3.10	Proporsi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)	III.16

Grafik 3.11	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III.17
Grafik 3.12	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)	III.18
Grafik 4.1	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional	IV.2
Grafik 4.2	Perbandingan PDRB per Kapita (ADHB) Sumatera Barat dengan Nasional Tahun 2015-2020	IV.2
Grafik 4.3	Perbandingan Persentase angka Kemiskinan Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 -2020	IV.4
Grafik 4.4	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Dibandingkan dengan Nasional Tahun 2016-2020	IV.5
Grafik 4.5	Perkembangan Umur Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)	IV.5
Grafik 4.6	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)	IV.6
Grafik 4.7	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)	IV.6
Grafik 4.8	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rp/Org/Th)	IV.7
Grafik 6.1	Aglomerasi Industri Utama Sumatera Barat Relatif Terhadap provinsi lain di Sumatera tahun 2020	VI.72
Grafik 6.2	Kumulatif Emisi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2020	VI.103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, maka daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. RPJMD disusun sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik dengan berpedoman pada Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan dilantiknya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 25 Februari 2021 oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, maka H.Mahyeldi, S.P dan Ir.Audy Joinaldy, S.Pt, M.Sc, MM, IPM, ASEAN, Eng. resmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk periode 2021-2024. Salah satu target oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat setelah dilantik adalah segera menyusun RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 meskipun perodesasi masa pemerintahan adalah 2021-2024. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, yang menyatakan bahwa perodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga perodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah 2021-2026.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom up*. Secara sosiologis penyusunan RPJMD ini juga menggambarkan bagaimana sesungguhnya kondisi riil masyarakat suatu daerah yang tidak hanya bertindak sebagai subjek pembangunan sekaligus yang terkena dampak dari kebijakan pembangunan yang disusun tersebut. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD ini memang sudah

sepatutnya melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Apalagi dalam konteks masyarakat Sumatera Barat yang mayoritas dihuni oleh etnis Minangkabau yang kaya dengan kearifan lokal berdasarkan sistem sosial dan budayanya dapat menjadi modal dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan tersebut.

RPJMD juga memperhatikan pemenuhan pendekatan secara holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah serta melalui pendekatan spasial yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Selain itu dalam RPJMD juga menerapkan kebijakan anggaran belanja yang diprioritaskan untuk program strategis atau *money follow programme priority*.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

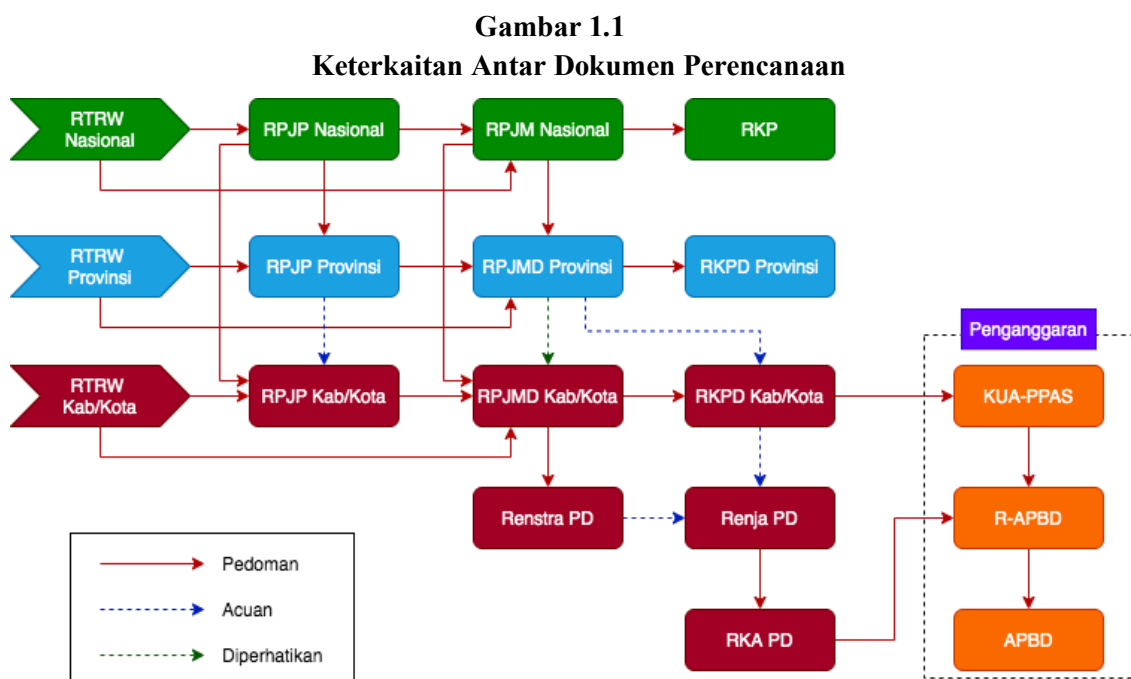
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 178);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 127);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lainnya yang berbatasan. Dokumen RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi lainnya yang berbatasan, dan RTRW Provinsi Sumatera Barat. RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Secara diagram hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut :



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut;

a. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat Visi dan Misi Kepala Daerah, Arah Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun terpilih tahun 2021-2026
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta program pembangunan yang terarah dan terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2021-2026
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penyusunan KUA dan PPAS serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinkron dan sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional, regional dan kabupaten/kota

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Provinsi Sumatera Barat meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum daerah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah serta memuat tentang arah kebijakan pengembangan kewilayahan, disertai sasaran pembangunan untuk seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.

Bab IX Penutup

Bab ini menguraikan tentang pentingnya RPJMD bagi pembangunan daerah Sumatera Barat lima tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Kondisi Geografi dan Administrasi

Secara Geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0° 54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 3° 30' Lintang Selatan (LS), dan 98° 36' sampai 101° 53' Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat ± 42.012,89 km² dan luas perairan (laut) ± 37.355,46 km², dengan panjang pantai termasuk Kepulauan Mentawai ± 2.285,96 km.

Perairan laut Sumatera Barat memiliki 185 pulau-pulau kecil dengan jumlah pulau terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 98 pulau. Secara administratif, wilayah Sumatera Barat berbatasan sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi.

Secara administratif wilayah Sumatera Barat terbagi atas 19 (sembilan belas) kabupaten/kota meliputi 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota, dimana Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu km² atau sekitar 14,21% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yaitu 23,0 km² (0,05%). Wilayah Sumatera Barat juga memiliki 179 kecamatan, 230 kelurahan, 803 nagari, dan 126 desa, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Nagari, dan Desa
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

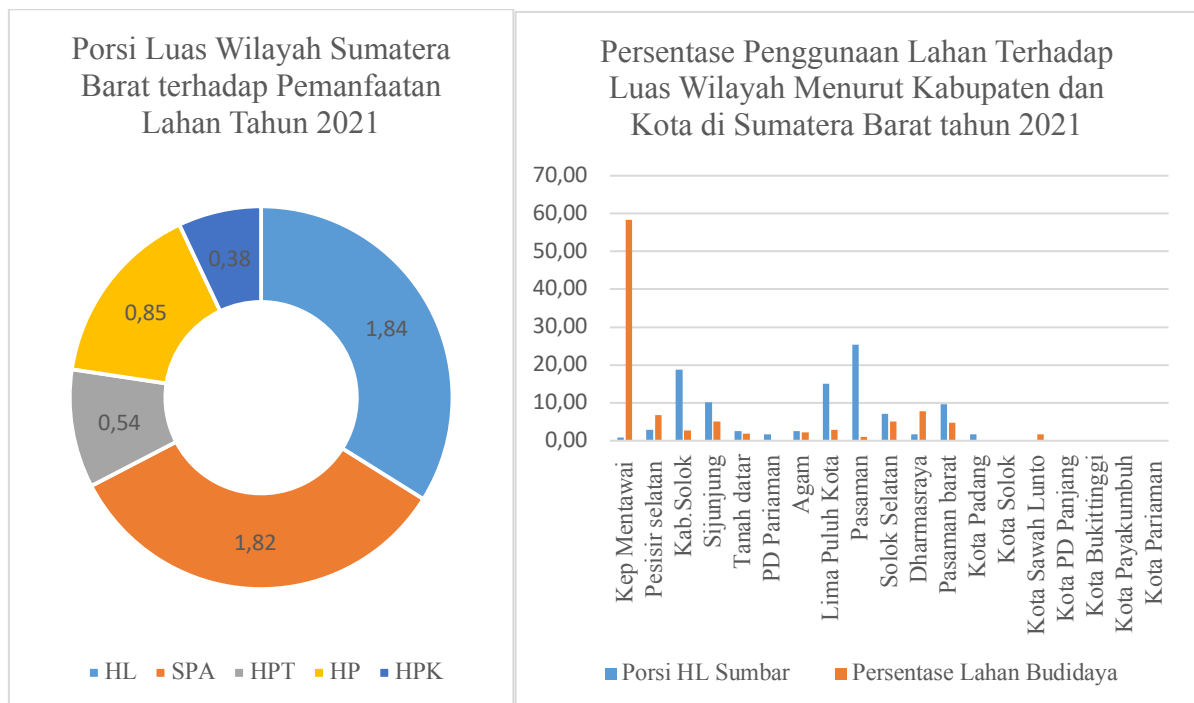
No	Kabupaten/kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Kelurahan	Nagari	Desa
1.	Kab. Kep. Mentawai	6.011,35	10	-	-	43
2.	Kab. Pesisir Selatan	5.749,89	15	-	182	-
3.	Kab. Solok	3.738,00	14	-	74	-
4.	Kab. Sijunjung	3.130,40	8	-	61	1
5.	Kab. Tanah Datar	1.336,10	14	-	75	-
6.	Kab. Padang Pariaman	1.332,51	17	-	103	-
7.	Kab. Agam	1.804,30	16	-	82	-
8.	Kab. Lima Puluh Kota	3.571,14	13	-	79	-
9.	Kab. Pasaman	3.947,63	12	-	37	-
10.	Kab. Solok Selatan	3.346,20	7	-	39	-
11.	Kab. Dharmasraya	2.961,13	11	-	52	-
12.	Kab. Pasaman Barat	3.887,77	11	-	19	-
13.	Kota Padang	693,66	11	104	-	-
14.	Kota Solok	71,29	2	13	-	-
15.	Kota Sawahlunto	231,93	4	10	-	27
16.	Kota Padang Panjang	23,00	2	16	-	-
17.	Kota Bukittinggi	25,24	3	24	-	-

No	Kabupaten/kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Kelurahan	Nagari	Desa
18.	Kota Payakumbuh	85,22	5	47	-	-
19.	Kota Pariaman	66,13	4	16	-	55
	Jumlah	42.012,89	179	230	803	126

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka

Luasan wilayah Sumatera Barat di atas, apabila dikaitkan dengan keberadaan lahan lindung dan suaka perlindungan alam, serta penggunaan lahan untuk produksi, ternyata persentase hutan lindung masih dominan di setiap wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Luasan hutan lindung paling dominan terdapat pada Kabupaten Pasaman mencapai 25,32% dari total luas Sumatera Barat, disusul oleh Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota masing masing mencapai 18,76% dan 15,05%.

Gambar 2.1
Persentase Penggunaan Lahan terhadap Luasan Wilayah Sumatera Barat

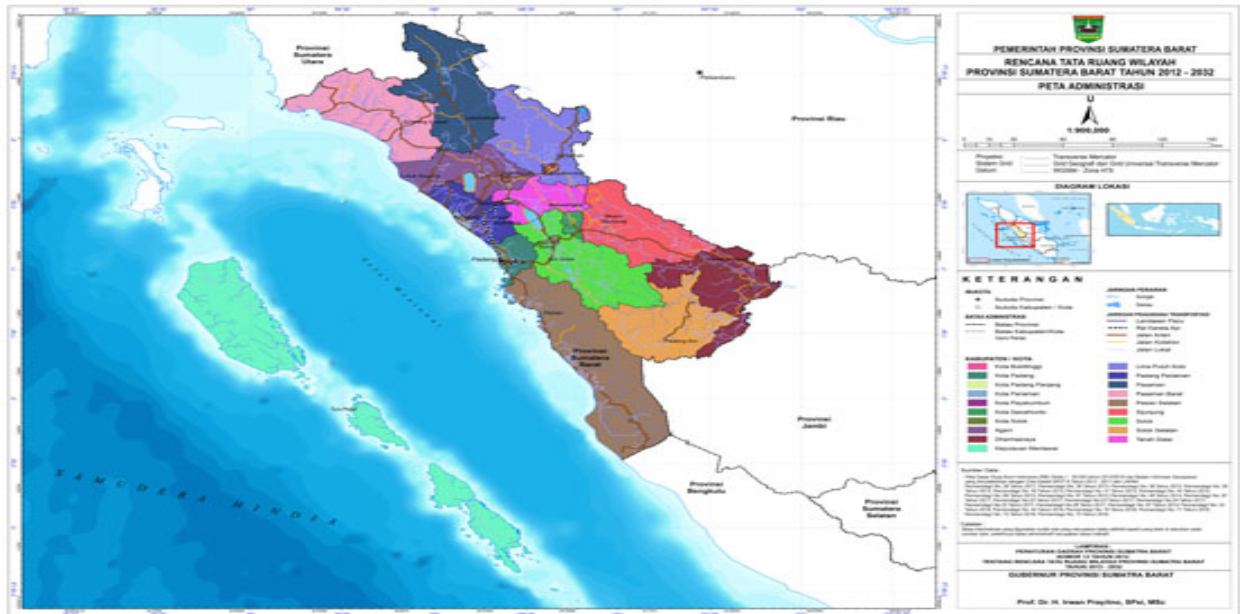


Sumber : Hasil analisis

Gambar 2.1 di atas juga memperlihatkan bahwa porsi penggunaan lahan Sumatera Barat didominasi oleh hutan lindung, sedangkan lahan untuk hutan produk dan hutan produksi yang dapat dikonversi, relatif lebih kecil porsinya dari luasan wilayah yang ada. Artinya, dalam pembangunan Sumatera Barat ke depan, tekanan terhadap penggunaan lahan ini akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, pertimbangan kelestarian lingkungan sangat penting di dalam menyusun program pembangunan berkelanjutan ke depan.

Letak geografis Sumatera Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Oleh sebab itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara 25,35⁰C dan rata-rata kelembaban udara yang tinggi yaitu 83,79% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 975,19 mb. Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi, sebagian daerahnya berada pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang.

Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat



Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032

Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhan. Sedangkan kawasan yang sudah dimanfaatkan untuk budi daya tercatat sebesar 23.190,11 Km² atau sekitar 54,83% dari seluruh kawasan. Sumatera Barat juga memiliki empat danau besar, yaitu Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Diatas, dan Danau Dibawah. Daratan Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung yang terdapat pada kabupaten/kota. Gunung yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 mdpl yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat.

2.1.2. Topografi

Kondisi Topografi wilayah Sumatera Barat beragam, meliputi daerah pegunungan, dataran rendah, dan dataran tinggi. Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian > 3.000 mdpl. Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 – 100 mdpl meliputi 1.286.793 ha (30,41%), daerah dengan ketinggian 100 – 500 mdpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500 – 1.000 mdpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 – 1.500 mdpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 mdpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%) dan daerah lainnya dengan ketinggian di atas 2.500 mdpl. Gambaran karakteristik daerah kabupaten/kota se Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel berikut.

Karakteristik Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

NO	NAMA KAB/ KOTA	LUAS (KM ²)	KONDISI/KAWASAN	GEOGRAFIS
1	Kepulauan Mentawai	6.011,35	Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah daerah tertinggal yang terletak 82 mil laut di sebelah Barat Provinsi Sumatera Barat yang merupakan gugusan pulau-pulau besar dan kecil dengan jumlah pulau 113, 4 buah pulau besar (Siberut, Sipora, Pagai Utara & Pagai Selatan) dan 2 buah pulau terluar (Sibaru-baru dan Sinvaunvau)	0° 50' LS – 03° 30' LS 97° 30' BT – 100° 30' BT

NO	NAMA KAB/ KOTA	LUAS (KM ²)	KONDISI/KAWASAN	GEOGRAFIS
2	Pesisir Selatan	5.749,89	Kabupaten Pesisir Selatan terletak di Selatan Barat Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur Padang Provinsi Sumbar dengan Kota Bengkulu, topografi memiliki kemiringan lereng antara 0% - >40% dengan pegunungan setinggi 2.000 meter, juga memiliki Garis Pantai sepanjang sekitar 234 Km yang memiliki 48 pulau-pulau kecil	0° 59' LS – 2° 28' LS 100° 19' – 100° 18' BT
3	Solok	3.738,00	Kabupaten Solok terletak dibagian tengah Prov. Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur utama Padang Prov. Sumbar dengan Provinsi Jambi (lintas tengah Sumatera) yang mempunyai topografi yang bervariasi berlembah-lembah dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 329 mtr dpl sampai dengan 1.458 m dpl, Kabupaten Solok juga memiliki 1 buah Gunung Berapi yaitu Gunung Talang, serta memiliki beberapa danau (D. Singkarak, D. Di atas, D. Dibawah, D. Talang)	0° 31' LS – 01° 19' LS 100° 27' BT – 101° 15' BT
4	Sijunjung	3.130,40	Kabupaten Sijunjung terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Barat dilalui oleh jalur utama antara Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi, topografi Kabupaten Sijunjung daerah yang berbukit-bukit pada ketinggian antara 100 - 1.250 m dpl	0° 18' LS – 1° 42' LS 100° 42' BT – 100° 52' BT
5	Tanah Datar	1.336,10	Kabupaten Tanah Datar terletak bagian tengah arah ke timur Provinsi Sumbar yang dilalui oleh jalur Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Pekanbaru Provinsi Riau serta jalur-jalur yang menghubungkan beberapa kabupaten, dengan topografi yang datar, bergelombang, berbukit, dengan ketinggian antara 200 m dpl sampai dengan 1.000 mtr dpl, memiliki 3 buah gunung yaitu Gunung Merapi, Gunung Singalang, Gunung Sago, Tanah Datar memiliki Danau yaitu Danau Singkarak.	0° 17' LS – 03° 39' LS 100° 19' BT – 100° 51' BT
6	Padang Pariaman	1.332,51	Kabupaten Padang Pariaman terletak di bagian barat tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh 2 jalur utama yaitu jalur yang menghubungkan antara Pekanbaru Provinsi Riau dengan Padang Provinsi Sumatera Barat dan jalur yang menghubungkan Madina Provinsi Sumatera Utara dengan Padang Sumatera Barat, Padang Pariaman memiliki 2 buah gunung (Gunung Tandikek dan Gunung Sago) dengan panjang garis pantai 60,0 km dan memiliki 2 buah Pulau (Pulau Pieh dan Pulau Bando)	0° 11' LS – 03° 30' LS 98° 36' BT – 101° 53' BT
7	Agam	1.804,30	Kabupaten Agam pada bagian tengah Sumatera Barat dilalui jalur lintas tengah Sumatera dan jalur lintas barat, Agam juga memiliki dua buah gunung (gunung merapi=2.891 mtr) dan (gunung singalang=2.877 mtr), panjang garis pantai 43 meter dan 2 buah pulau	0° 02' LS - 00° 29' LS 99° 52' BT – 100° 33' BT
8	Lima Puluh Kota	3.571,14	Kabupaten Lima Puluh Kota terletak di timur bagian utara Provinsi Sumatera Barat yang dilalui jalur yang menghubungkan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat dengan kelerengan antara 0% / 1 m - 40% >300 m dan memiliki 3 buah gunung (Gunung Sago = 2.261, Gunung Bungsu=1.253, Gunung Sanggul = 1.495,)	00° 22' LU – 00° 23' LS 100° 16' BT – 100° 51' BT
9	Pasaman	3.947,63	Kabupaten Pasaman terletak paling utara Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur lintas Medan-Provinsi Sumatera Utara dengan Padang Provinsi Sumatera	0° 55' LU – 0° 06' LS 99° 45' BT – 100° 21' BT

NO	NAMA KAB/ KOTA	LUAS (KM ²)	KONDISI/KAWASAN	GEOGRAFIS
			Barat dengan topografi ketinggian antara 50 m sampai dengan 2.240 meter yang memiliki 5 buah pegunungan (Gunung Ambun, Gunung Sigapuak, Gunung Kalabu, Gunung Malenggang, Gunung Tambian)	
10	Solok Selatan	3.346,20	Kabupaten Solok Selatan di bagian tengah paling selatan Provinsi Sumatera Barat dilalui oleh jalur Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Kerinci Provinsi Jambi, kabupaten ini memiliki topografi dengan ketinggian 350 - 430 meter dpl, dimana 60 % dari wilayah Solok Selatan berada pada kemiringan di atas 40 % yang tergolong sangat curam dan rawan terhadap bahaya longsor.	0°43' LS – 01° 43' LS 101°01' BT – 101°30' BT
11	Dharmasraya	2.961,13	Kabupaten Dharmasraya terletak di timur Sumatera Barat berjarak sekitar 196 km dari Ibukota Provinsi dan dilalui oleh jalur lintas Sumatera yang menghubungkan langsung Provinsi Jambi-Provinsi Sumatera Barat Dharmasraya mempunyai topografi yang sebagian besar landai antara 0%-40%.	0° 47' LS – 03°42' LS 101° 09' BT – 101° 54' BT
12	Pasaman Barat	3.877,77	Kabupaten Pasaman Barat terletak di utara Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Madina Provinsi Sumatera Utara yang dilalui oleh Jalur yang menghubungkan antara Madina Provinsi Sumatera Utara dengan Padang Provinsi Sumatera Barat, topografi Pasaman Barat dengan ketinggian antara 0-2.912 m (Gunung Malintang, Gunung Talamau). Kabupaten Pasaman Barat memiliki 26 buah pulau.	0° 30' LS – 0° 11' LS 99° 10' BT – 100° 04' BT
13	Kota Padang	693,66	Kota Padang adalah Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Barat yang memiliki 3 jalur utama arah Selatan ke Bengkulu, Arah Utara Medan dan Pekanbaru, Arah timur menuju Lintas Sumatera bagian tengah, topografi Kota Padang dengan kelerengan 0-40% dengan ketinggian 0 m dpl sampai dengan >1000 m dpl, dengan garis pantai ± 84 Km dan mempunyai 21 pulau-pulau kecil.	0° 44' LS – 01° 08' LS 100° 05' BT – 100° 34' BT
14	Kota Solok	71,29	Kota Solok mempunyai posisi yang strategis karena terletak pada lintasan regional antara Kota Padang dan Provinsi Jambi, serta dari Jakarta menuju Bukittinggi. Ketinggian Kota Solok berada pada 390 m dpl dengan kelerengan 0 - > 45%.	0°32' LS – 0°42' LS 100°32' – 101° 41' BT
15	Kota Sawahlunto	231,93	Kota Sawahlunto merupakan Kota Tambang dengan cadangan batubara sebanyak 73 juta ton dan terletak di tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui jalur antar kabupaten – kota di Sumatera Barat. Ketinggian Kota Sawahlunto berada pada 250 – 650 M dpl, kemiringan 0 - > 40%. Kota Sawahlunto merupakan pusat dari Ombilin <i>Coal Mining Heritage</i> (OCMH) yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan Dunia	0° 33' LS – 0° 43' LS 100° 43' BT – 100°50' BT
16	Kota Padang Panjang	23,00	Kota Padang Panjang terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur utama menuju Padang – Pekanbaru dan jalur lainnya yang menghubungkan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat. Topografi Kota Padang Panjang memiliki kemiringan lereng 0 – 40% dengan ketinggian berkisar antara 550 m dpl – 900 m dpl.	0° 27' LS – 0° 30' LS 100° 20' BT – 100° 27' BT

NO	NAMA KAB/ KOTA	LUAS (KM ²)	KONDISI/KAWASAN	GEOGRAFIS
17	Kota Bukittinggi	25,24	Kota Bukittinggi terletak dibagian tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh beberapa jalur strategis diantaranya Padang ke Medan, Padang Pekanbaru, serta persimpangan antar kabupaten, Kota Bukittinggi mempunyai kemiringan lereng antara 0% sampai dengan 8% dengan ketinggian 756 - 960 m dpl.	01° 16' LS – 00° 19' LS 100° 21' – 100° 25' BT
18	Kota Payakumbuh	85,22	Kota Payakumbuh berada pada bagian timur Provinsi Sumatera Barat yang merupakan daerah strategis jalur utama Padang (Provinsi Sumbar) – Pekanbaru (Provinsi Riau). Letak Kota Payakumbuh berada di utara Gunung Api Podam (Gunung Malintang) pada ketinggian 500m dpl, dengan kemiringan 0 - > 40%.	0° 10' LS – 0° 17' LS 100° 35' BT – 100° 45' BT
19	Kota Pariaman	66,13	Kota Pariaman terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh beberapa jalur strategis antara Padang – Madina Sumatera Utara, dengan kemiringan antara 0 – 40% dan ketinggian 2 – 35 m dpl. Kota Pariaman memiliki 4 buah pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai 12,7 Km.	0° 33' LU – 0° 40' LS 100° 04' BT – 100° 10' BT

Ket : Perda I/2020 tentang Perubahan RTRW Kab. Pessel 2010-2030

Dengan kondisi topografi di atas, potensi sumberdaya alam yang terdapat di Sumatera Barat memiliki berbagai variasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah intensitas penggunaan lahan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaan lahannya akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Untuk pemanfaatan lahan secara optimal, harus terlebih dahulu secara seksama memperhatikan kondisi lahan dan lingkungan. Sehingga tidak terjadi kerusakan berdampak negatif untuk masa kini dan yang akan datang. Dataran tinggi di wilayah Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk rantai Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari utara hingga selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut dengan kelerengannya di atas 40% tercatat 1.017.000 Ha.

Secara geologis, Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan gempa bumi, terutama di jalur gunung berapi. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatera sebagai *Great Sumatera Fault* di sepanjang pesisir barat Sumatera dan *Mentawai Fault* di kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Sumatera Barat rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, dan gempa bumi yang berpotensi terjadinya gelombang tinggi dan/atau tsunami.

Lahan daratan Provinsi Sumatera Barat yang luas termasuk pulau-pulau kecil menjadi modal pembangunan yang sangat potensial dimanfaatkan, tidak saja untuk kegiatan pertanian dan kehutanan, tetapi juga pada beberapa bagian wilayahnya dapat dikembangkan untuk permukiman maupun industri. Secara umum pemanfaatan lahan di provinsi ini cukup intensif untuk pengembangan perekonomian, sementara daratan kepulauan seperti Kepulauan Mentawai pemanfaatannya masih terbatas.

2.1.3. Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.980 sampai lebih dari 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian timur. Keadaan yang lebih basah dibagian barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan gunung sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air yang cukup banyak di bagian barat provinsi

ini sehingga sangat menunjang untuk budidaya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan hortikultura.

Suhu udara ditentukan oleh tinggi rendahnya daratan dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum daerah Sumatera Barat pada tahun 2019 beriklim panas dengan suhu udara berkisar dari 24,4⁰C sampai 26,1⁰C serta tekanan udara minimum 980,2 mbar dan maksimum 1.006,0 mbar dengan kelembaban udara relatif minimum 81% dan kelembaban relatif maksimum 86%.

Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim tropika basah. Klasifikasi iklim berdasarkan sistem *Schmidt-Fergusson* daerah ini dapat dibagi menjadi 3 tipe iklim yaitu tipe A, B dan C. Daerah sepanjang pantai barat tergolong kepada tipe A dengan luas wilayah cakupannya mencapai 2.672.000 Ha. Daerah lereng timur Bukit Barisan yang merupakan daerah bayangan hujan menerima curah hujan lebih kecil tergolong kepada tipe B dengan 265.700 Ha dan tipe C dengan luas wilayah cakupannya 100.800 Ha terdapat di lereng timur Gunung Merapi yaitu sekitar Danau Singkarak di Kabupaten Tanah Datar dan di selatan Gunung Talang meliputi di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Suhu di Sumatera Barat tercatat antara 18⁰ – 34⁰ C dengan suhu rata-rata lebih kurang 25,5⁰ C. Perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5⁰ – 7⁰ C. Suhu terendah biasanya terjadi antara bulan Oktober sampai dengan Desember dan suhu tertinggi terjadi antara bulan Juli dan Agustus. Pada umumnya daerah dataran tinggi mempunyai suhu 4⁰ – 6⁰ C lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah pesisir barat. Lebih rendahnya suhu di daerah pegunungan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata potensial terutama dipegunungan yang terdapat di wilayah Agam, Tanah Datar, Bukittinggi dan Padang Panjang serta pada kawasan Kayu Aro sampai ke Pantai Cermin di Kabupaten Solok. Kelembaban udara antara 79% – 87% dengan kecepatan angin antara 1,25 – 7,72 knot. Daerah dengan kelembaban yang tinggi terjadi di daerah pesisir dan Kepulauan Mentawai.

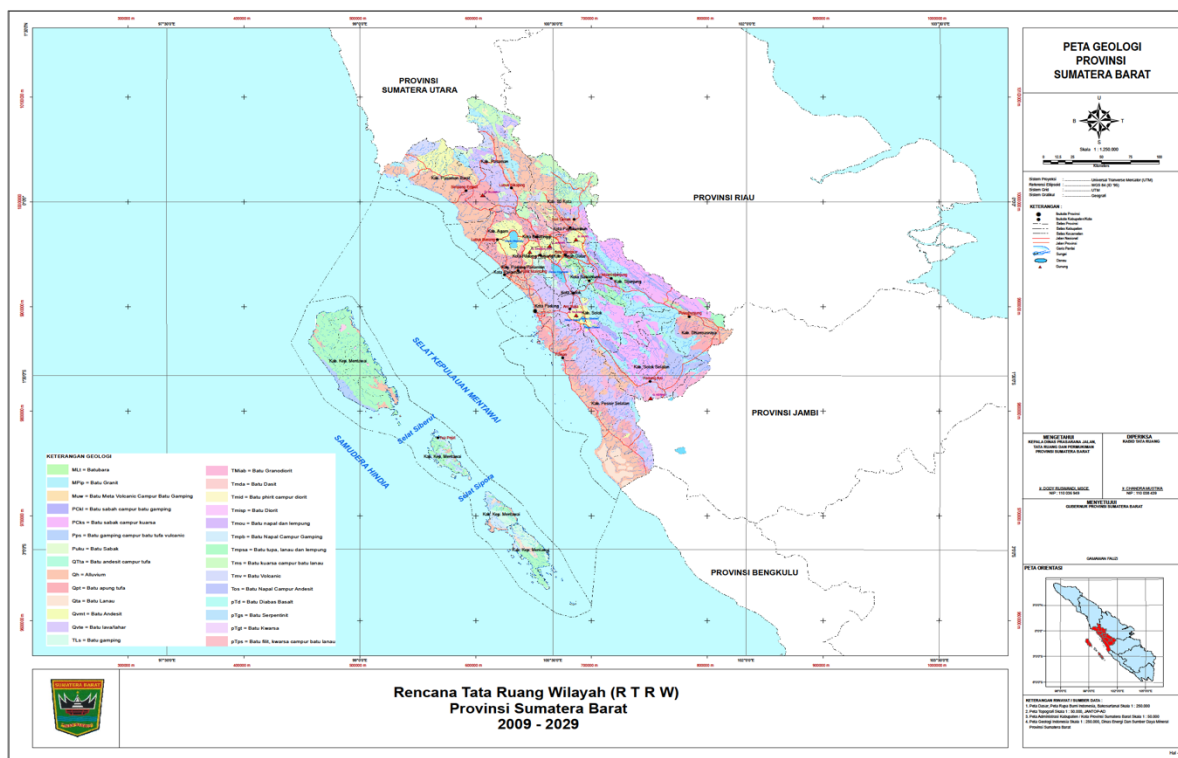
2.1.4. Kondisi Geologi

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tatanan **geologi** kompleks. Kondisi ini disebabkan letaknya yang berbeda pada daerah tumbukan dua lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan dan lempeng Euroasia di bagian utara yang ditandai dengan terdapatnya pusat-pusat gerakan tektonik di Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Akibat tumbukan kedua lempeng besar ini selanjutnya muncul gejala tektonik lainnya yaitu busur magmatik yang ditandai dengan munculnya rangkaian pegunungan Bukit Barisan beserta gunung apinya dan sesar/patahan besar Sumatera yang memanjang searah dengan zona tumbukan kedua lempeng yaitu utara-selatan.

Pada sisi lain, tatanan geologi ini berdampak positif bagi Provinsi Sumatera Barat. Dampak positif tersebut berupa munculnya mineral-mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian dan lain-lain; tanah yang subur dan banyak sumber air bersih maupun air panas yang berasal dari kawasan geomorfologi struktural namun dekat dengan sumber panas bumi yang berasal dari magma dangkal. Dengan demikian Sumatera Barat merupakan provinsi yang mempunyai potensi sumber daya alam yang memadai untuk dieksploitasi bagi pembangunan.

Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang tinggi. Gambar 2.3 memperlihatkan peta geologi Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.3
Peta Geologi Provinsi Sumatera Barat



Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Barat 2012-2032

2.1.5. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Provinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya air yang cukup besar jika dilihat dari jumlah sungai dan danau. Kebijakan pengelolaan sumber daya air tidak dapat dilakukan secara terpisah, akan tetapi perlu dilaksanakan secara terpadu sebagai salah satu upaya dalam rangka mendukung pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu dalam suatu wilayah sungai. Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dialiri sungai terbagi dalam 9 (sembilan) Wilayah Sungai, yaitu Wilayah Sungai Masang-Pasaman (5.653 km²), Wilayah Sungai Silaut-Tarusan (7.074 km²), Wilayah Sungai Rokan (2.190 km²), Wilayah Sungai Kampar (2.591 km²), Wilayah Sungai Inderagiri (7.592 km²), Wilayah Sungai Akuaman (2.953 km²), Wilayah Sungai Batang Hari (8.264 km²), Wilayah Sungai Siberut-Pagai-Sipora (7.338 km²), Wilayah Sungai Natal-Batahan (380 km²). Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2015 serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, wilayah sungai yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat adalah Wilayah Sungai Masang-Pasaman dan Wilayah Sungai Silaut-Tarusan.

Sumber air sungai tersebut berasal dari pegunungan dan danau (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau Singkarak). Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar mempunyai luas 107,8 km², Danau Maninjau terdapat di Kabupaten Agam mempunyai luas 99,5 km², sedangkan Danau Diatas (12,3 km²), Danau Dibawah (11,2 km²), dan Danau Talang (5 km²) terdapat di Kabupaten Solok.

Peraturan Menteri PUPR nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, menjelaskan tentang luasan sawah yang menjadi kewenangan pemerintah yang berada pada wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Luas Sawah Beririgasi Provinsi Sumatera Barat

No.	Prov/Kab/Kota	Luas Baku (Ha) Permenpu No. 14 th 2015	Luas Potensial (Ha)	Luas Fungsional (Ha)
I	Kewenangan Pusat	74,471	98,004	26,361
II	Kewenangan Provinsi	65,007	50,646	33,884
III	Kewenangan Kab/Kota	222,828	147,800	105,830
1	Kab. Mentawai		468	468
2	Kab. Pasaman		10,620	10,620
3	Kab. Pasaman Barat		12,138	5,024
4	Kab. Again		19,842	10,974
5	Kab. 50 Kota		16,061	16,061
6	Kab. Tanah Datar		17,404	17,404
7	Kab. Padang Pariaman		8,555	6,519
8	Kab. Solok		21,119	10,272
9	Kab Solok Selatan		4,263	4,263
10	Kab. Sijunjung		6,069	4,440
11	Kab. Dharmasraya		1,499	1,499
12	Kab. Pesisir Selatan		20,907	10,092
13	Kota Bukittinggi		214	214
14	Kota Payakumbuh		1,270	1,270
15	Kota Padang Panjang		492	492
16	Kota Pariaman		1,495	1,517
17	Kota Solok		479	479
18	Kota Padang		4,240	3,558
19	Kota Sawahlunto		663	663
Jumlah		362,306	296,450	166,075

Catatan :

TOTAL SAWAH SUMBAR 199,048 Ha
 SAWAH BERIRIGASI 166,075 Ha
 SAWAH NON KEWENANGAN 32,972 Ha

2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan manifestasi dari kegiatan sosial-budaya dan sosial-ekonomi dalam upaya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ada. Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Barat secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung dibedakan menjadi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, dan kawasan perlindungan setempat, sedang kawasan budidaya diantaranya berupa kawasan permukiman, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan perikanan dan kelautan, dan kawasan hutan.

Kawasan hutan berdasarkan peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8089/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2017, luas kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat 2.286.883,10 Ha dengan rincian : Kawasan Konservasi Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) seluas ± 765.623,24 Ha, Hutan Lindung (HL) ± 775.304,94 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 228.665,68 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas ± 357.088,97 Ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 160.200,27 Ha, seperti pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Luas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat 2020

No	Kabupaten/Kota	Fungsi Hutan					Jumlah
		KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	
1	Kab. Agam	27.678,96	20.010,18	7.324,89	2.510,69	8.767,04	66.291,76
2	Kab. Dharmasraya	5.471,88	14.054,65	28.250,51	26.544,69	15.878,97	90.200,70
3	Kab. Kep. Mentawai	183.269,43	7.212,13	-	250.842,65	50.301,00	491.625,21
4	Kab. Lima Puluh Kota	20.140,75	116.686,98	20.509,61	3.899,11	11.164,83	172.401,28
5	Kab. Padang Pariaman	14.948,68	12.734,38	-	-	-	27.683,06
6	Kab. Pasaman	32.822,25	196.275,04	29.744,35	-	4.888,78	263.730,42
7	Kab. Pasaman Barat	263,20	74.575,28	4.580,26	18.202,33	6.258,29	103.879,36
8	Kab. Pesisir Selatan	279.947,87	22.226,08	45.212,59	4.260,89	31.136,24	382.783,67
9	Kab. Sijunjung	41.489,07	78.135,94	28.527,96	19.437,54	4.477,50	172.068,01
10	Kab. Solok	47.275,30	144.716,40	11.535,85	4.468,88	9.869,91	217.866,34
11	Kab. Solok Selatan	65.925,45	54.882,96	52.607,78	12.982,08	13.206,66	199.604,93
12	Kab. Tanah Datar	20.310,85	19.397,09	-	9.164,62	34,32	48.906,88
13	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-
14	Kota Padang	25.191,65	12.942,85	245,33	-	-	38.379,83
15	Kota Padang Panjang	4,21	601,77	-	-	-	605,98
16	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-
17	Kota Payakumbuh	-	347,29	-	-	-	347,29
18	Kota Sawahlunto	-	206,89	126,55	4.775,49	4.216,73	9.325,66
19	Kota Solok	883,69	299,03	-	-	-	1.182,72
	JUMLAH	765.623,24	775.304,94	228.665,68	357.088,97	160.200,27	2.286.883,10

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

KSA/KPA : Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam
 HL : Hutan Lindung
 HPT : Hutan Produksi Terbatas
 HP : Hutan Produksi Tetap
 HPK : Hutan Produksi yang dapat dikonversi
 APL : Areal Penggunaan Lain

Kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang berada di wilayah perkotaan dan pedesaan Provinsi Sumatera Barat, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis.

Selanjutnya untuk **kawasan pertanian**, potensi sumberdaya lahan tanaman pangan dan hortikultura meliputi lahan sawah dan lahan bukan sawah yang terdiri dari pekarangan, ladang, dan tegalan/kebun. Potensi luas lahan pertanian sawah dan bukan sawah pada tahun 2019 seluas 979.824,03 Ha. Dari potensi tersebut 79,56% dimanfaatkan dan sisanya 20,44% belum dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih tersedia lahan yang cukup luas untuk pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat.

Kawasan agribisnis pertanian di Sumatera Barat tersebar di 8 Kabupaten yaitu : Kab. 50 Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pessel, Kab. Agam, Kab. Pasaman, dan Kab. Pasaman Barat.

Kawasan perkebunan di Provinsi Sumatera Barat dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing dan memiliki prospek ekonomi cepat tumbuh.

Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya, dan menghindarkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dengan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri, dan kawasan permukiman.

Sedangkan **Kawasan Peternakan** untuk pembangunan peternakan di Provinsi Sumatera Barat merupakan usaha untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam upaya menyediakan protein hewani baik untuk konsumsi sendiri, pemasokan ke wilayah provinsi lain maupun ekspor. Usaha pengembangan peternakan di provinsi ini ditunjang dengan ketersediaan pakan ternak dan prasarana penunjang peternakan. Pakan ternak untuk ternak besar dan kecil tersedia cukup banyak, yang terdiri dari rumput alam maupun rumput unggul, sisa pertanian (daun jagung dan jerami), dan limbah industri. Prasarana penunjang yang lain meliputi Rumah Potong Hewan sebanyak 13 unit, pasar ternak 21 unit, TPH 24 unit, poskeswan 68 unit, pos Inseminasi Buatan (IB) 176 unit, dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) 1 unit.

Pengembangan usaha peternakan dilakukan dengan pendekatan agribisnis melalui pengembangan kawasan sentra komoditi unggulan ternak. Kawasan peternakan di Sumatera Barat antara lain Kawasan Sentra Produksi Sapi, Kerbau dan Unggas dan Kawasan Terintegrasi Ternak Sapi dan Tanaman Perkebunan yang tersebar di Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Sijunjung.

Selanjutnya untuk **kawasan industri** membutuhkan areal cukup luas, dan berpengaruh terhadap perubahan lingkungan, baik bentang alam, maupun kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya. Kawasan industri diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan. Disamping itu ditetapkan juga untuk pengembangan industri dengan pendekatan sentra yang tersebar pada hampir semua kabupaten kota, seperti sentra industri makanan dan minuman di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok dan industri kerajinan di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Sawahlunto.

Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah yang juga kaya akan hasil pertambangan, terutama batubara dan berbagai pertambangan mineral lainnya. Dalam mengelola usaha pertambangan, pemerintah menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), yang terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WUP ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi. Wilayah yang telah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang selanjutnya disebut WIUP di Provinsi Sumatera Barat terdapat di seluruh kabupaten kecuali Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kota Pariaman.

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) tempat dilakukannya usaha pertambangan rakyat. WPR ditetapkan oleh Pemerintah pusat, sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Kegiatan pertambangan tanpa izin yang selama ini dilakukan rakyat/masyarakat di Provinsi Sumatera Barat cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota. Lokasi ini sebagian besar belum ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Selanjutnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi akan Mangajukan

Perubahan Wilayah Pertambangan (WP) dengan memprioritaskan perubahan untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai dengan usulan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Wilayah Pencadangan Negara (WPN), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan aspirasi daerah sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan sebagian luasnya, sedangkan WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktunya. WPN yang diusahakan sebagian luasnya statusnya berubah menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).

Hampir semua wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat merupakan Wilayah pertambangan, karena mempunyai potensi bahan galian tambang yang bernilai ekonomis untuk diusahakan. Untuk pengembangan potensi minyak dan gas bumi wilayah provinsi Sumatera Barat terdapat menjadi : (1) Blok North Kuantan; (2) Blok Bukit Barisan Barat Daya.

Sementara untuk pengembangan **kawasan perikanan** di Sumatera Barat terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk kawasan perikanan tangkap dikembangkan di 2 kota dan 5 kabupaten yang mempunyai wilayah pesisir dan laut. Masing-masing daerah tersebut adalah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan. Zona perikanan tangkap komersil (pelagis) terdapat di perairan Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengarah ke lautan Hindia dan perairan Kabupaten Pesisir Selatan.

Beberapa kawasan pesisir kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat disamping dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut juga untuk pertambakan, keramba dan budidaya rumput laut, serta kerang-kerangan. Selain itu, juga dialokasikan untuk membangun konstruksi infrastruktur di lahan pantai guna kepentingan penyimpanan (gudang), pengolahan hasil dan transportasi sarana/input produksi budidaya laut.

2.1.7 Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

A. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor pertanian masih menjadi sektor strategis bagi perekonomian Sumatera Barat meskipun kontribusi sektor pertanian ini dari tahun ke tahun memperlihatkan penurunan yang diiringi dengan peningkatan sektor lainnya, hal ini sejalan dengan pergeseran perekonomian yang semakin mengarah ke sektor sekunder dan tersier. Secara umum, tidak berarti bahwa kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan terus mengecil, karena yang dicatat dalam sektor pertanian adalah aspek produknya saja, sedangkan pengolahan/industri hasil pertanian yang terus meningkat nilainya tercatat dalam sektor industri.

Luas lahan sawah di Sumatera Barat tahun 2020 tercatat seluas 218.440 hektar (Ha), yang terdiri dari lahan sawah irigasi 182.235 Ha dan sawah tadah hujan 35.723 Ha, yang tersebar pada 19 (sembilan belas) kabupaten/kota. Potensi lahan sawah di Sumatera Barat tahun 2020 adalah 521.677 Ha, yang terdiri dari lahan sawah irigasi 451.615 Ha dan sawah tadah hujan 67.343 Ha. Jumlah produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Sumatera Barat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Di Sumatera Barat Tahun 2016-2020

KOMODITI	2016	2017	2018	2019	2020
Poduksi					
Padi (Ton)	2.503.452	2.824.509	2.993.752	2.874.006	2.934.835
Palawija (Ton)	1.058.689	1.312.556	1.341.745	1.219.689	1.232.907
Sayuran dan Buah Semusim (Ton)	639.384	720.981	849.017	1.011.850	1.383.869
Buah-Buahan (Ton)	538.000	584.234	494.829	532.593	748.103
Tanaman Hias (pohon, kg, tangkai)	671.114	403.380	447.721	318.059	477.416
Tanaman Biofarmaka (Kg)	11.921.026	10.082.101	10.215.313	14.813.554	20.110.650
Produktifitas					
Padi (Kw/Ha)	50,90	52,47	51,57	51,17	51,11
Palawija (Kw/Ha)	92,19	84,95	84,30	86,05	84,60
Sayur-sayuran (Kw/Ha)	133,11	139,26	150,41	146,57	202,68
Buah-Buahan (Kw/Ha)	30,91	33,94	32,92	33,95	
Tanaman Hias (Tangkai/Kg/M ²)	5,91	3,97	7,82	6,76	10,42
Tanaman Biofarmaka (Kg/M ²)	4,01	2,79	2,53	2,22	3,69

Sumber :Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 2.5 terlihat bahwa produksi utama tanaman pangan dan hortikultura setiap tahun mengalami peningkatan seperti padi, pada tahun 2016 sebesar 2.503.452 ton menjadi 2.934.835 ton pada tahun 2020, palawija pada tahun 2016 sebesar 1.058.689 ton menjadi 1.232.907 ton pada tahun 2020, Sayuran dan Buah Semusim dari 639.384 ton pada tahun 2016 menjadi 1.383.869 ton pada tahun 2020.

Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura di Sumatera Barat tahun 2016 – 2020 diiringi dengan peningkatan produktivitas komoditi seperti padi pada tahun 2016 produktivitasnya sebesar 50,90 kuintal per hektar menjadi 51,11 kuintal per hektar pada tahun 2020, Sayuran dan Buah Semusim dari 133,11 kuintal per hektar menjadi 202,68 kuintal per hektar pada tahun 2020.

B. Perkebunan

Menurut jenis komoditasnya, pengembangan perkebunan meliputi kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kelapa dalam, pinang, casiavera, gambir dan lain-lain. Luas tanam dan produksi perkebunan di Sumatera Barat sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan komoditi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Luas Tanam dan Produksi Beberapa Komoditi Perkebunan di Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

NO	KOMODITI PERKEBUNAN	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Tanam (Ha)						
1	Kelapa Sawit	409.986	411.314	418.420	423.314	324.968
2	Karet	182.765	181.017	182.130	182.348	182.348
3	Kelapa Dalam	87.298	86.493	87.415	87.615	87.572
4	Kakao	159.413	147.784	132.555	108.464	114.719
5	Kopi Arabica	18.168	15.881	14.879	12.452	12.472
6	Kopi Robusta	20.196	18.291	17.646	17.178	17.174
7	Gambir	31.791	27.758	29.433	28.740	28.016
8	Cassiavera	38.966	36.276	32.891	30.370	30.342
Produksi (Ton)						

NO	KOMODITI PERKEBUNAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kelapa Sawit	1.205.301	1.184.259	1.269.926	1.278.245	1.246.989
2	Karet	166.318	156.476	186.197	186.393	167.754
3	Kelapa Dalam	78.902	69.538	80.351	80.380	78.348
4	Kakao	69.535	61.212	61.223	58.579	53.070
5	Kopi Arabica	12.484	9.335	9.272	8.598	8.598
6	Kopi Robusta	10.288	8.697	9.660	9.225	9.186
7	Gambir	17.057	6.157	7.574	7.582	7.582
8	Cassiavera	16.022	9.049	12.065	11.930	8.636

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

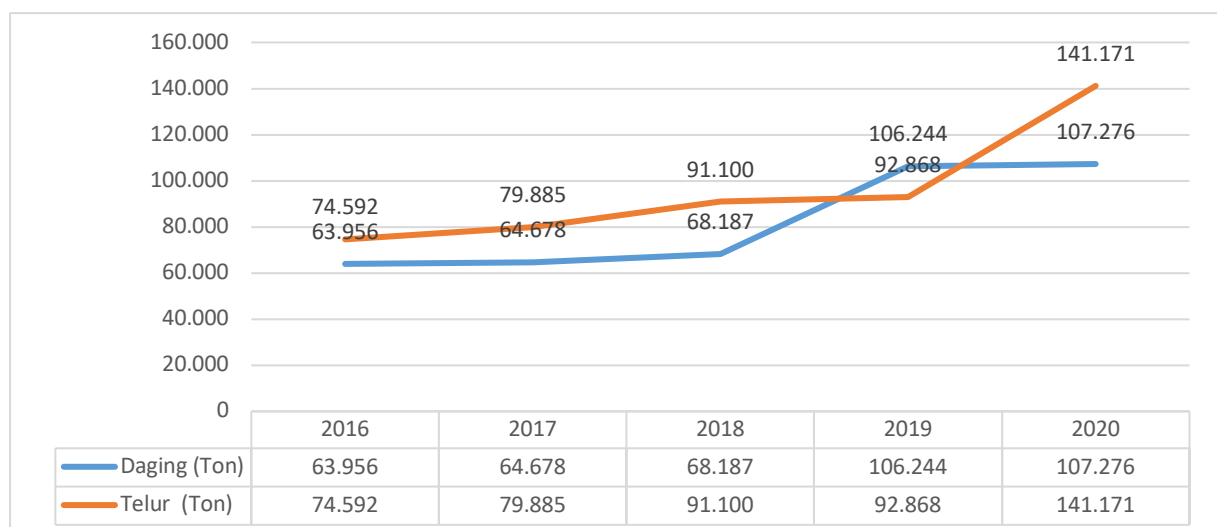
Luas Tanam komoditi perkebunan Tahun 2020 memperlihatkan peningkatan untuk komoditi kakao yaitu 114.719 Ha dibandingkan dengan luas tanam Tahun 2019 sebesar 108.464 Ha, dengan peningkatan 6.255 ha. Untuk peningkatan produksi perkebunan beberapa komoditi menunjukkan penurunan seperti penurunan produksi kelapa sawit, hal ini disebabkan karena berdasarkan pemetaan kebun kelapa sawit rakyat di Provinsi Sumatera Barat seluas 98.727 ha perlu diremajakan karena umur tanaman sudah melewati umur produktif, dan beberapa tanaman rusak karena terserang hama dan penyakit yang menyebabkan penurunan produksi.

Terkait dengan Produksi kakao Tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 53.070 Ton, bila dibandingkan Tahun 2019 sebanyak 58.579. Penurunan produksi disebabkan banyak tanaman kakao yang sudah tua dan rusak, disamping minat petani dalam melakukan pemeliharaan kakao juga menurun sehingga produksi menjadi tidak maksimal.

C. Peternakan

Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk pembangunan peternakan. Produksi peternakan di Sumatera Barat sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan komoditi terlihat pada Grafik 2.1.

Grafik 2.1
Produksi Beberapa Komoditi Peternakan di Sumatera Barat Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Produksi komoditi peternakan Tahun 2020 memperlihatkan peningkatan 107.276 Ton bila dibandingkan dengan produksi Tahun 2019 sebanyak 106.244 Ton, terjadi peningkatan produksi Tahun 2020 sebanyak 1.032 Ton. Peningkatan Produksi Daging Tahun 2020 walaupun mengalami peningkatan tapi tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan pada masa pandemi

COVID-19 terjadinya penurunan permintaan pasar dimana pelaku usaha peternakan hanya menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar.

Bila dibandingkan peningkatan produksi daging pada Tahun 2019 sebanyak 106.244 Ton bila dibandingkan dengan Tahun 2018 sebanyak 68.187 Ton terjadi peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan karena seiring dengan peningkatan populasi ternak, terutama pada ternak ayam ras pedaging dan ayam ras petelur melalui program kemitraan serta adanya peningkatan fasilitasi pembiayaan dari pemerintah.

Untuk produksi telur di Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 141.171 Ton dibandingkan Tahun 2019 yang produksinya 92.868 Ton.

D. Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) tahun 2017 Sumatera Barat memiliki panjang garis pantai 2.285,96 km sudah termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), maka perairan laut Sumatera Barat diperluas lagi 200 mil, sehingga total luas perairan Sumatera Barat menjadi 186.580 km². Dengan kondisi laut tersebut maka potensi perikanan laut lebih besar dari pada Perikanan Lepas Pantai dan Samudera. Sumatera Barat termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) - 572: Samudera Hindia bagian barat Sumatera Barat dan Selat Sunda.

Potensi perikanan dan kelautan Sumatera Barat (perairan laut dan perairan umum) menyimpan potensi yang cukup besar untuk kepentingan ekonomi produktif maupun konservasi dan dapat dijadikan andalan pembangunan masa depan. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kedepan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan IPTEK, sumberdaya manusia yang berkualitas, kerja sama antar instansi / lembaga pemerintah lainnya, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan. Dengan potensi yang besar, kelautan dan perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan dengan pelaku usaha perikanan lainnya dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan.

Tabel 2.7
Perkembangan Produksi Perikanan di Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (Ton)

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
a	Produksi perikanan tangkap (termasuk perikanan perairan umum) (ton)	218.082,80	222.604,40	223.445	226.253,0	218.581,78
b	Produksi perikanan budidaya (ton)	269.837,92	266.991,30	270.440,87	284.320,0	245.498,40
c	Peningkatan Produksi budidaya laut (ton)	310,24	233,369	233,20	233,00	61,43

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa kegiatan perikanan tangkap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah melalui penyediaan peluang kerja dan ekspor hasil perikanan. Pada Tahun 2020 diketahui produksi perikanan sebesar 217.958,72 ton yang terdiri dari produksi perairan laut sebesar 207.100,57 ton dan perairan umum sebesar 10.898,15 ton. Komoditi perikanan yang bernilai ekonomi penting dari hasil tangkapan laut antara lain adalah ikan tuna, cakalang, dan udang, tenggiri, kakap, kuwe dan kerapu. Produksi komoditi ini yang diperoleh pada *fishing ground* utama perairan laut Sumatera Barat Diantara komoditi ekonomi penting tersebut ada beberapa yang merupakan komoditi ekspor antara lain: tuna, udang dan kerapu.

Berdasarkan tingkat produksi perikanan laut untuk masing-masing daerah, Kabupaten Pasaman Barat merupakan wilayah pemasok ikan terbesar dan menjadi sentra produksi perikanan laut terpenting di Sumatera Barat. Diikuti oleh enam sentra produksi perikanan laut lainnya seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sumatera Barat juga memiliki potensi untuk pengembangan perikanan budidaya, baik perikanan air tawar, payau maupun laut. Hal ini didukung oleh adanya empat danau yang menyebar di kabupaten/kota diantaranya Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Ditas dan Danau Di bawah, ditambah dengan kolam, waduk, embung dan sungai. Selain itu ada potensi budidaya payau dan laut yang terbentang dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan. Potensi perikanan budidaya di Sumatera Barat yaitu potensi budidaya laut 323.524 Ha, potensi lahan budidaya di kolam 24.300 Ha, potensi budidaya ikan di sawah seluas 55.140 Ha, potensi lahan budidaya tambak 7.700 Ha, potensi keramba jaring apung 27.500 Ha dan potensi kolam air deras 3.000 ha. Komoditi utama untuk budidaya air tawar adalah ikan mas, nila, gurami dan lele. Pada Tahun 2020 produksi perikanan budidaya laut sebesar 64,01 ton dan jumlah produksi budidaya air tawar pada tahun 2020 sebesar 247.413,84 ton dengan jumlah pembudidaya ikan sebanyak 85.718 orang.

Daerah potensial untuk menjadi sentra produksi perikanan budidaya air tawar ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota yaitu antara lain: Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tanah Datar. Bentuk kegiatan perikanan budidaya air tawar yang dilakukan umumnya adalah budidaya pada kolam air tenang, kolam air deras, keramba jaring apung, dan budidaya ikan pada lahan sawah yang dikenal dengan istilah minapadi.

Provinsi Sumatera Barat juga bisa menjadi lokasi pengembangan budidaya Rumput laut dengan lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan pada daerah :

- a) Kabupaten Pesisir Selatan
- b) Kabupaten Kepulauan Mentawai
- c) Kabupaten Pasaman Barat

Hasilnya juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi industri pengolahan rumput laut menjadi produk-produk turunannya yang bernilai tambah tinggi.

Keanekaragaman hayati laut Sumatera Barat yang terdapat di wilayah pesisir (ekosistem *mangrove*, terumbu karang dan rumput laut) memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Ekosistem pesisir berupa hutan bakau (*mangrove*), terumbu karang (*coral reef*) dan padang lamun memiliki fungsi ekologis yang vital bagi kelestarian sumberdaya hayati di wilayah pesisir dan laut, karena berfungsi sebagai habitat bagi berbagai populasi organisme laut selama hidupnya juga merupakan daerah pemijahan (*spawning ground*) dan pembesaran (*nursery ground*) dari populasi lain yang

membentuk struktur komunitas sumberdaya perikanan laut sebelum populasi tersebut baik secara individual maupun komunal bermigrasi ke perairan samudera. Di samping fungsi bioekologi, keberadaan ekosistem bakau dan terumbu karang sangat penting pula perannya dalam melindungi pantai dari pengikisan oleh gelombang laut.

Terumbu karang di Sumatera Barat banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh proses yang berlangsung secara alami dan dampak aktifitas manusia seperti tergerus oleh jangkar kapal, pemboman ikan, pengambilan karang, dan sebagainya. Usaha-usaha untuk menanggulangi keadaan ini telah dilakukan melalui berbagai proyek pelestarian terumbu karang mencakup kegiatan pengembangan mata pencarian alternative bagi masyarakat pesisir dan kegiatan melibatkan masyarakat dalam penanaman terumbu karang (*coral farming*).

Sebaran terumbu karang di Sumatera Barat disajikan pada Tabel 2.8. Terumbu karang yang terdapat di perairan laut Sumatera Barat pada umumnya adalah jenis terumbu karang tepi (*fringing reef*). Terumbu karang ini menyebar sepanjang garis pantai walaupun terdapat juga beberapa koloni terumbu karang yang tersebar secara mengelompok (*patch reef*).

Tabel 2.8
Luas Terumbu Karang di Provinsi Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (Ha)
1.	Kabupaten Pasaman Barat	1.2557,94
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	2.238,15
3.	Kabupaten Padang Pariaman	268,47
4.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	34.515,43
5.	Kabupaten Agam	120,48
6.	Kota Padang	957,23
7.	Kota Pariaman	261,72
	Jumlah	39.619,42

Sumber: DKP Provinsi Sumatera Barat, 2020 (One Map Data Badan Informasi Geospasial Tahun 2016)

Hutan *Mangrove* di Sumatera Barat juga mengalami tekanan perubahan. Sumber utama tekanan hutan mangrove adalah akibat dampak pemanfaatan hutan *mangrove* secara langsung dan secara tidak langsung. Diantaranya adalah pemanfaatan hutan *mangrove* yang dikonversi menjadi areal pemukiman, perkebunan, lokasi pertambangan dan lain-lain. Upaya pelestarian hutan *mangrove* dilakukan dengan cara memberi kesadaran kepada masyarakat arti penting hutan bakau secara ekologi dan dengan melakukan penanaman bakau sekaligus juga dengan memanfaatkan mangrove untuk kegiatan budidaya ikan dan kepiting bakau. Sebaran luas hutan *mangrove* di Sumatera Barat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Luas Hutan Mangrove di Sumatera Barat

NO.	KABUPATEN/KOTA	LUAS (Ha)
1.	Kabupaten Pasaman Barat	2.756,09
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	2.251,00
3.	Kabupaten Padang Pariaman	204,78
4.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	13.997,60
5.	Kabupaten Agam	469,87
6.	Kota Padang	403,88
7.	Kota Pariaman	37,49
	Total	20.120,71

Sumber: DKP Provinsi Sumatera Barat, 2020 (One Map Data Badan Informasi Geospasial Tahun 2016)

Ekosistem padang lamun dan rumput laut antara lain tersebar di Kabupaten Pasaman Barat yakni di Pulau Panjang, Pulau Tamiang, Teluk Tapang. Spesies yang ditemui mayoritas 5 jenis antara lain: *Cymodocea semulata*, *Enhalus acocoides*, *Halodule universis*, *Halophila ovalis*, dan *Thalassia hemphrichii*. Di Kabupaten Pesisir Selatan banyak ditemukan di Desa Mandeh, Sungai Nyalo, Pulau Setan, Pulau Sironjong Besar dan Pulau Cubadak dengan spesies mayoritas *Enhalus acoroides* dan *Thalassia hemphrichii*. Penyebaran di Kabupaten Kepulauan Mentawai terutama ditemukan di Pagai Utara Selatan dan Siberut dengan spesies yang dominan adalah *Thalassia hemphricii* di Kota Padang banyak terdapat di sungai pisang dan Pulau Pisang dengan mayoritas jenis *Enhalus acoroides* dan *Thalassia hemphricii*. Budidaya rumput laut di Provinsi Sumatera Barat diusahakan masih dalam taraf skala rumah tangga, sehingga besaran tingkat pemanfaatan rumput laut masih sulit terdata. Jenis rumput laut yang diambil adalah jenis *Grasillaria sp* dan *Gellidum sp*. Luas padang lamun berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.10
Luas Padang Lamun Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/ KOTA	LUAS (Ha)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	17
2	Kota Padang	4
3	Kabupaten Padang Pariaman	50
4	Kota Pariaman	-
5	Kabupaten Agam	-
6	Kabupaten Pasaman Barat	75
7	Kabupaten Kepulauan Mentawai	452,85
	Jumlah	598,85

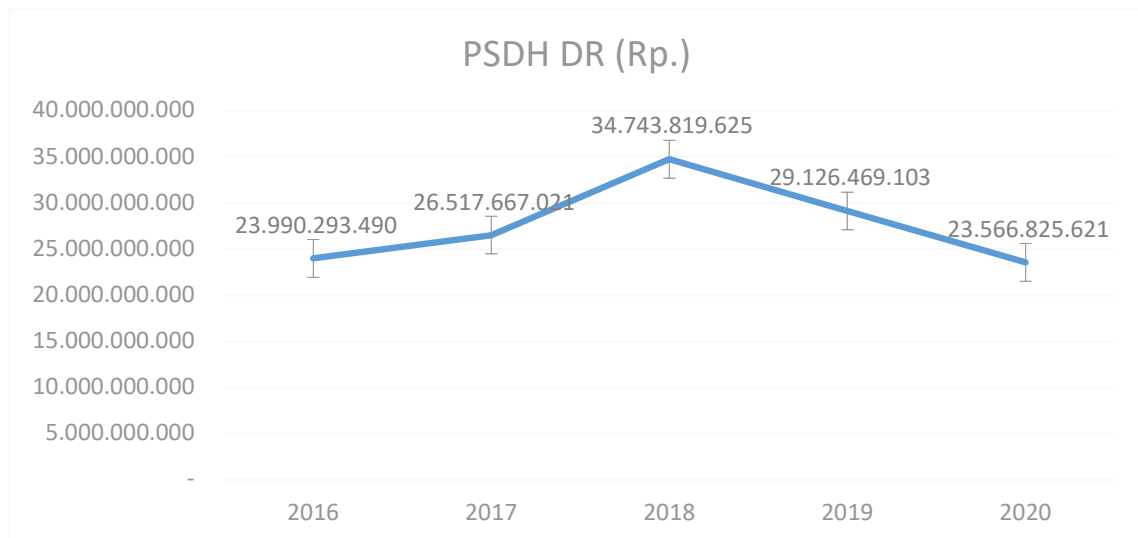
Sumber : Universitas Bung Hatta (2016)

E. Kehutanan

Sekitar 54,43 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat merupakan kawasan hutan. Sumber daya hutan memiliki sejumlah hasil hutan, baik kayu maupun bukan kayu. Sejumlah kawasan hutan tersebut juga telah dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan dan korporasi (perusahaan), terutama untuk kawasan hutan dengan fungsi lindung (Hutan Lindung) dan kawasan hutan dengan fungsi produksi (Hutan Produksi). Pemanfaatan hutan tersebut memberikan manfaat bagi perekonomian Sumatera Barat dan mendatangkan penerimaan negara dalam bentuk iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) ke kas negara.

Grafik dibawah menyajikan penerimaan negara dalam bentuk PSDH dan DR dalam 5 tahun terakhir 2016-2020. Penerimaan negara tersebut berasal dari produksi kayu dan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti getah, rotan, manau, tabu-tabu, dan getah karet. Dari data tersebut dari tahun 2018 ke tahun 2020 pendapatan dari PSDH dan DR mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan para pemegang hak belum melakukan kegiatan secara optimal, dan pada tahun 2020 ditambah dengan adanya pandemi COVID-19.

Grafik 2.2
Luas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat 2020



Sumber: Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2021

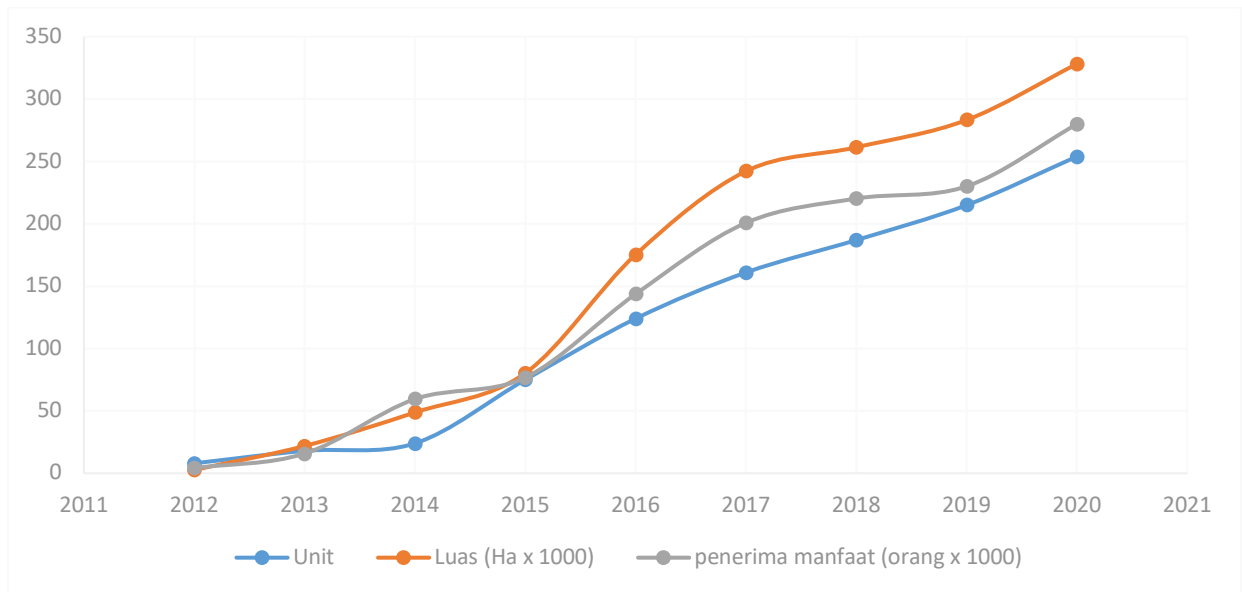
Tabel 2.11.
Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	JENIS/Types (Kg, btg/ton)						
		Getah Pinus (kg)	Damar (kg)	Rotan (btg)	Manau (btg)	Tabu-tabu (btg)	Semambu (btg)	Getah Karet (Kg)
1	2020	1.082.530,00	-	25.828,00	345.358,00	42.472,00	-	77.120,00
2	2019	1.329.741,00	92.452,00	127.883,00	635.121,00	218.408,00	1,276	-
3	2018	890.600,00		-	207.773,00	36.985,00	-	116,470
4	2017	1.187.241,00		-	213.000,00	30.000,00	-	31,756
5	2016	3.880.199,00		250,00	212.207,00	41.017,00	-	

Sumber Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Upaya pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan di Sumatera Barat mulai meluas dengan pemberian hak kelola kepada masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan dan melindungi sumber daya hutan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil mendorong perluasan skema-skema perhutanan sosial, terutama untuk hutan nagari dan hutan kemasyarakatan. Pada grafik dibawah dijelaskan pelaksanaan Perhutanan Sosial dari tahun 2012 – 2020, dimana terjadi peningkatan yang signifikan dari sisi unit dan para penerima manfaat dari perhutanan sosial ini.

Grafik 2.3
Pelaksanaan Perhutanan Sosial



Sumber: Dinas Kehutanan tahun 2020

F. Kawasan Konservasi Perairan

Provinsi Sumatera Barat saat ini sudah menetapkan tujuh lokasi sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang tersebar di beberapa kabupaten. KKLD tersebut berada di Pulau Kerabak Ketek dan Pulau Penyu (Kabupaten Pesisir Selatan), Pulau Kasiak dan Pulau Talua (Kabupaten Pasaman Barat), Pulau Saibi dan Saliguma (Kabupaten Kepulauan Mentawai) dan daerah Gasan Kabupaten Padang Pariaman.

Organisme laut yang menjadi salah satu tujuan utama konservasi dan sangat menjadi perhatian internasional adalah penyu. Sumatera Barat memiliki potensi penyu yang cukup besar terutama di Kabupaten Pesisir Selatan. Penyu biasa mendarat di pulau-pulau kecil dengan kondisi yang landai dan bersih. Eksploitasi penyu di Sumatera Barat terutama untuk diambil telurnya telah menyebabkan hewan ini berkurang populasinya. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat melalui dana APBN lima tahun terakhir telah melakukan berbagai kegiatan, terkait dengan pelestarian penyu seperti bantuan MPA (Mata Pencanharian Alternatif), memberikan sarana pendukung penangkaran seperti (Bak pemeliharaan dan rumah jaga).

Tabel 2.12
Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) per Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat

No.	Lokasi KKPD	Nama Kawasan	Jenis Yang Dilindungi	Luas Kawasan (Ha)	Jumlah Populasi (ekor)	No. SK
1	Kab. Pesisir Selatan	Suaka Alam Perairan	Penyu, kerumbu karang	174.899,3	400	523/311/Kpts/BPT-PS/2011
2	Kota Padang	Taman Pulau Kecil	Penyu, Kima, Kuda Laut	2.274,96	-	224/2011
3	Padang Pariaman	Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Kec. Batang Gasan	Penyu, ikan hias	684,0	-	02/Kep/BPP-2010
4	Kota Pariaman	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penyu	11.525,89	750	334/523/2010
5	Kab. Agam	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	-	12.000,0	-	520/2012

No.	Lokasi KKPD	Nama Kawasan	Jenis Yang Dilindungi	Luas Kawasan (Ha)	Jumlah Populasi (ekor)	No. SK
6	Pasaman Barat	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penyu dan ikan tertentu	6.795,8	-	188.45/456/2012
7	Mentawai	Kawasan Perairan Selat Bunga Laut dan sekitar KKPD	Ekosistem Terumbu karang	129.566,95	-	188-45-142/2012
	Jumlah			337.645,95	1.150,0	

Sumber data : DKP Provinsi Sumatera Barat

Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan Laut Pulau Pieh dan Sekitarnya dengan Luas 39.900 Ha. Total Jumlah Kawasan Konservasi di Sumatera Barat 377.545,95 Ha.

G. Pulau-Pulau Kecil dan Pariwisata Bahari

Pulau-pulau kecil di Sumatera Barat memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk keperluan usaha perikanan, pengembangan hutan *mangrove*, terumbu karang dan wisata bahari. Pada saat ini pemerintah menetapkan kawasan Mandeh sebagai ikon wisata bahari Sumatera Barat. Perairan laut Sumatera Barat memiliki aset pulau-pulau kecil. Sebagian dari pulau-pulau tersebut dikelola untuk keperluan wisata seperti Pulau Cubadak, Pulau Sikuai, sementara itu ada yang dikelola untuk keperluan konservasi laut seperti Pulau Sikuai, Pulau Penyu, Pulau Pieh dan Pulau Karabak Ketek. Jumlah pulau-pulau kecil di Sumatera Barat sebanyak 185 buah pulau.

Dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 47 pulau-pulau kecil. Di sebelah utara terdapat Pulau Semangki Besar, Pulau Semangki Kecil, Pulau Marak, Pulau Cubadak, Pulau Setan Terusan, Pulau Karao, dan beberapa pulau lainnya. Pada umumnya pulau-pulau ini memiliki potensi menjadi kawasan wisata bahari, dan salah satunya Kawasan Mandeh yang sudah menjadi kawasan pengembangan wisata bahari secara nasional.

Selanjutnya potensi wisata bahari yang sangat besar dan bersifat mendunia terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu wisata bahari untuk tujuan berselancar. Setiap tahun Seri Kejuaraan Dunia (*World Champions Surfing Series*) dilaksanakan di Mentawai karena potensi surfing area dengan gulungan, ketebalan, tinggi, dan panjang gelombangnya yang terbaik di dunia. Tiap tahun ± 3.000 wisatawan asing datang ke Kepulauan Mentawai. Rata-rata wisatawan mancanegara tersebut menghabiskan US\$ 2.500 per orang selama kunjungan.

Tabel 2.13
Sebaran Pulau - Pulau Kecil Menurut Kabupaten/kota
di Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah
	Kabupaten	
1	Kep. Mentawai	98
2	Pesisir Selatan	47
3	Agam	2
4	Pasaman Barat	12
5	Padang Pariaman	1
	Kota	
1	Padang	19
2	Pariaman	3
	Provinsi Sumatera Barat (P. Bando, Sironjong, Bintangua)	3
	Jumlah	185

Sumber data: DKP Provinsi Sumatera Barat

H. Industri

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Sumatera Barat. Sebagaimana diketahui Provinsi Sumatera Barat memiliki berbagai potensi di sektor industri, terutama industri hilir dari produk pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya. Hilirisasi produk sektor-sektor utama tersebut perlu dilakukan agar tidak selalu memasarkan bahan baku. Pembinaan dan pengembangan sektor industri di Sumatera Barat telah disusun melalui Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat (RPIP) untuk kurun waktu 2018-2038 melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018.

Pertumbuhan sektor industri dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami perlambatan bahkan penurunan. Hal ini dapat kita lihat dari sumbangan Sektor industri terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat atas dasar harga berlaku Tahun 2016 adalah sebesar 10,09 %, dan terakhir Tahun 2020 menjadi 8,64 %. Demikian juga halnya dengan laju pertumbuhan industri dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terus mengalami perlambatan hingga tumbuh negatif pada tahun 2020 sebesar -0,54%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor industri di Sumatera Barat kurang menggembirakan. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut antara lain SDM sentra industri, sarana prasarana, kelembagaan, kerjasama dan pengembangan wilayah industri, baik faktor internal maupun eksternal. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.14 sementara itu laju pertumbuhan sektor industri dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri nasional dapat dilihat pada Grafik 2.4.

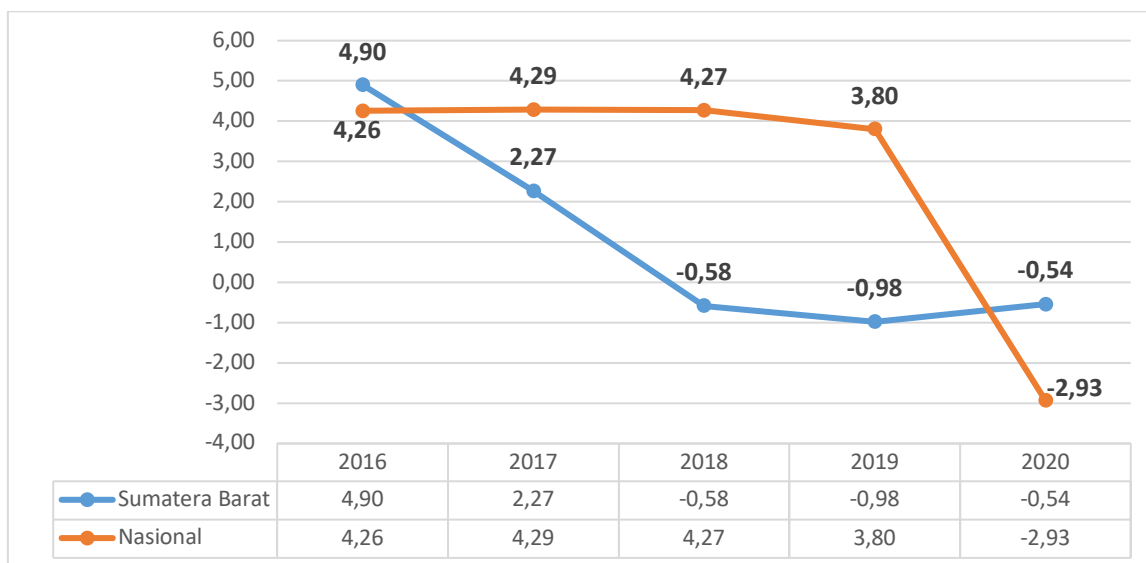
Tabel 2.14
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	10,09	9,74	9,10	8,38	8,64
Laju Pertumbuhan Industri (%)	4,90	2,27	-0,58	-1,98	-0,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Sumatera Barat dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terus mengalami perlambatan hingga tumbuh negatif pada tahun 2020 sebesar -0,54%. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa sektor industri belum mampu tumbuh seperti yang di harapkan. Grafik 2.4 memperlihatkan pertumbuhan industri pengolahan di Sumatera Barat dibandingkan dengan Nasional selama periode 2016-2020.

Grafik 2.4
Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Sumatera Barat
Dibandingkan Industri Pengolahan Nasional (%) Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya nilai produksi Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2019 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Tahun 2018. Nilai Produksi Tahun 2019 sebesar 14,83 Triliun bila dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp. 14,81 Triliun, walaupun nilai investasi turun menjadi Rp. 548.852 juta dengan peningkatan tenaga kerja 118.685 orang serta unit usaha sebanyak 36.009 Unit. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.15. Data Tahun 2020 belum tersedia, karena masih dalam proses perhitungan.

Tabel 2.15
Perkembangan IKM Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Tahun	Unit Usaha	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Nilai Produksi (Rp. Juta)
2016	21.944	79.030	1 342 150	14 070 893,29
2017	28.174	95.315	1 191 637	14 323 800,04
2018	35.987	120.060	325.723	14.819.846,36
2019	36.009	118.685	548.852	14.836.288,99
2020	NA	NA	NA	NA

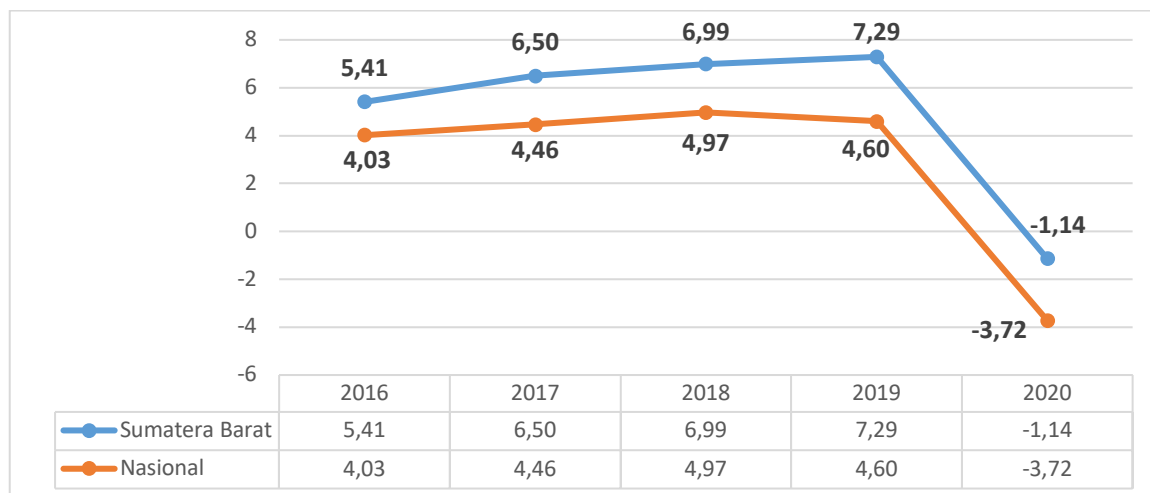
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Untuk masa mendatang usaha industri kecil menengah di Sumatera Barat lebih dapat meningkatkan produktifitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah secara terpadu, komprehensif, intensif, dan berkelanjutan. Dengan demikian peranan sektor industri akan semakin besar dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

I. Perdagangan

Pertumbuhan lapangan usaha perdagangan di Sumatera Barat pada periode 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari 5,41% pada tahun 2016 menjadi -1,14% pada tahun 2020. Pertumbuhan ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan usaha kategori perdagangan di tingkat nasional dalam kurun waktu yang sama, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.5.

Grafik 2.5
Pertumbuhan Kategori Perdagangan Sumatera Barat
Dibandingkan Kategori Perdagangan Nasional (%) Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya total nilai ekspor non migas cenderung meningkat di Tahun 2020. Peranan golongan barang yang terbesar terhadap total ekspor Sumatera Barat tahun 2020 adalah golongan lemak & minyak hewan/nabati sebesar US\$ 1.213,58 juta (79,22%), diikuti golongan karet dan barang dari karet sebesar US\$ 163,75 juta (10,69%) dan golongan bahan-bahan nabati sebesar US\$ 51,06 juta (3,33%) sebagaimana terlihat pada Tabel 2.16 berikut ini.

Tabel 2.16
Nilai Ekspor Non Migas Sumatera Barat Tahun 2016-2020
(Nilai FOB Juta US\$)

No	Golongan Barang	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lemak & Minyak/Nabati	1.092,18	1.416,44	1.139,83	967,45	1.213,58
2	Karet dan Barang dari Karet	192,82	443,48	290,43	230,11	163,75
3	Bahan-bahan Nabati	-	24,00	23,64	31,85	51,06
4	Garam, Belerang, Kapur	-	41,26	65,01	71,40	50,22
5	Berbagai produk kimia	-	38,06	29,90	18,20	33,10
6	Buah-buahan	7,80	3,11	0,14	1,00	0,48
7	Ikan dan Udang	-	0,25	0,26	0,47	0,13
8	Lak, Getah dan Damar	-	0,03	0,16	0,11	-
9	Daging dan Ikan Olahan	-	0,11	0,16	0,14	-
10	Perangkat Musik	-	0,51	-	-	-
	Total 10 Golongan Barang	1.543,80	1.967,25	1.549,54	1.320,61	1.512,31
	Lainnya	164,30	79,02	49,07	18,42	19,53
	Total Ekspor	1.708,10	2.046,27	1.598,61	1.339,03	1.531,84

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan negara tujuan ekspor, periode Januari-Desember 2020 ekspor non migas Sumatera Barat terbesar adalah ke negara India yaitu sebesar US\$ 345,20 juta, selanjutnya ke negara

Amerika Serikat sebesar US\$ 259,39 juta, Bangladesh sebesar US\$ 161,50 juta dan Cina sebesar US\$ 147,90 juta dengan persentase peran terhadap total ekspor Sumatera Barat, sebagaimana Tabel 2.17 berikut ini.

Tabel 2.17
Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020
(Nilai FOB Juta US\$)

No	Negara Tujuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	India	712,00	758,02	442,45	281,92	345,20
2	Amerika Serikat	425,12	460,48	393,07	266,36	259,39
3	Singapura	212,25	219,27	121,67	139,67	62,99
4	Cina	56,82	101,04	46,06	131,03	147,90
5	Pakistan	14,02	16,09	49,69	88,13	126,41
6	Belanda	38,25	49,17	55,49	17,62	2,01
7	Malaysia	35,12	40,92	55,35	25,07	13,90
8	Spanyol	60,12	77,26	78,33	46,84	97,17
9	Jepang	2,12	30,04	14,58	25,78	39,29
10	Bangladesh	42,48	62,48	131,56	174,88	161,50
	Total 10 negara Tujuan	1.621,30	1.814,77	1.388,27	1.197,18	1.255,75
	Lainnya	86,80	231,50	210,34	141,84	276,09
	Total Ekspor	1.708,10	2.046,27	1.598,61	1.339,03	1.531,84

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Nilai ekspor non migas Sumatera Barat tahun 2020 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2019 ini disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Terjadinya kenaikan harga sawit dunia sehingga ekspor CPO meningkat ke Negara India dan Pakistan sehingga terjadi peningkatan permintaan CPO.
2. Peningkatan Ekspor non migas seiring dengan meningkatnya nilai dan volume komoditas utama seperti CPO, karet, dan sari bahan samak dan celup (gambir).
3. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama Sumatera Barat mengalami peningkatan seperti Amerika Serikat, China, India dan Singapura.

Dalam rangka pelaksanaan konsumen cerdas, dimana diharapkan konsumen dapat untuk memperoleh barang atau jasa sesuai dengan mutu dan kualitas maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan kabupaten/kota melakukan upaya perlindungan terhadap konsumen. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen, Pemerintah Sumatera Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Disamping itu, jika terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang pembinaannya berada dibawah provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Kinerja perlindungan terhadap konsumen ini diukur melalui jumlah kasus sengketa konsumen yang diselesaikan oleh BPSK kabupaten/kota dan persentase produk dan jasa yang diawasi sesuai dengan ketentuan dengan perkembangan selama tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Kinerja Pelindungan Konsumen Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kab/Kota	11	11	11	10	10

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
2	jumlah kasus sengketa konsumen yang diselesaikan oleh BPSK kabupaten/kota (kasus)	125	64	34	103	102
3	Persentase produk dan jasa yang diawasi sesuai dengan ketentuan (%)	72,60	76,72	65,77	71,37	73,84

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Dari Tabel 2.18 di atas, bahwa jumlah BPSK yang ada di Provinsi Sumatera Tahun 2020 berjumlah 10 BPSK yang tersebar di kabupaten/kota antara lain Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Solok dan Kabupaten Sijunjung. Semula jumlah BPSK Tahun 2018 sebanyak 11 BPSK, dari data terlihat bahwa terjadi pengurangan 1 BPSK di Kota Padang Panjang. Pengurangan BPSK di Kota Padang Panjang mengacu pada tidak ditemukannya kasus sengketa konsumen, maka kebijakan yang diambil adalah jika terjadi kasus, maka penyelesaiannya adalah di BPSK Bukittinggi.

Tahun 2020 jumlah kasus sengketa konsumen yang diselesaikan oleh BPSK tahun 2020 adalah sebanyak 102 kasus. Dari Tabel 2.18 terlihat perkembangan frekwensi penanganan kasus yang diselesaikan setiap tahun, bila dibandingkan dengan Tahun 2019 jumlah kasus yang ditangani oleh BPSK sebanyak 103 kasus, cukup banyak dibandingkan dengan tahun 2020.

Meningkatnya Persentase produk dan jasa yang diawasi sesuai dengan ketentuan tahun 2020 sebanyak 73,84 %, tergambar kejujuran dan ketaatan para pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang dihasilkan. Tahun 2020, Kementerian Perdagangan menganugerahkan Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi terbaik yang peduli dalam perlindungan konsumen pada acara puncak Hari Konsumen Nasional (Harkonas) di Transmart Cibubur pada tanggal 12 November 2020.

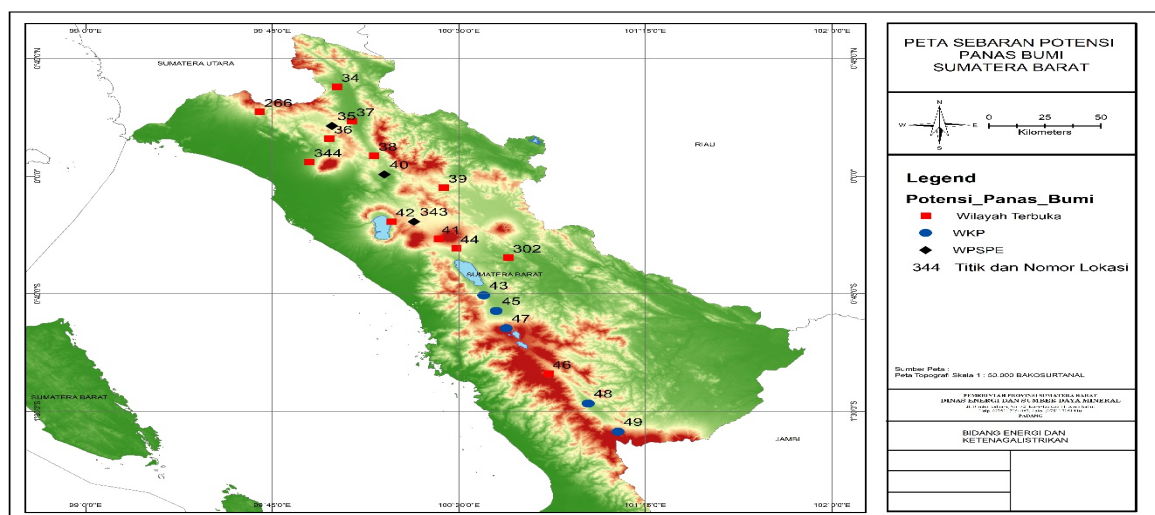
J. Panas Bumi

Potensi panas bumi di Sumatera Barat sejumlah 1.705 MWe yang terdiri dari potensi sumber daya spekulatif 496 MWe, sumber daya hipotesis 579 MWe, dan potensi cadangan terduga sebesar 495 MWe, cadangan mungkin 50 MWe dan Cadangan terbukti 85 MWe. Potensi tersebut berlokasi tersebar di 7 (tujuh) kabupaten, yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok serta Kabupaten Solok Selatan, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Potensi Panas Bumi Provinsi Sumatera Barat

No.	No. Titik	Area	Kota/ Kabupaten	Resources (MWe)						Status Wilayah
				Spec	Hipo	Reserves			Total	
						Poss	Prob	Prov		
1	34	Simisuh	Pasaman	-	40	57	-	-	97	Wilayah Terbuka
2	35	Cubadak	Pasaman Barat	-	-	66	-	-	66	WPSPE Cubadak
3	36	Talu	Pasaman Barat	-	8	-	-	-	8	Wilayah Terbuka
4	37	Panti	Pasaman	120	-	30	-	-	150	Wilayah Terbuka
5	38	Lubuk Sikaping	Pasaman	100	-	-	-	-	100	Wilayah Terbuka
6	39	Situjuh	Lima Puluh Koto	25	-	-	-	-	25	Wilayah Terbuka
7	40	Bonjol	Pasaman	-	140	48	-	-	188	WPSPE Bonjol
8	41	Kota Baru Merapi	Agam	50	-	-	-	-	50	Wilayah Terbuka
9	42	Maninjau	Agam	25	-	-	-	-	25	Wilayah Terbuka
10	43	Sumani	Solok	48	-	52	-	-	100	WKP Sumani
11	44	Pariangan	Tanah Datar	44	30	-	-	-	74	Wilayah Terbuka
12	45	Bukit Kili/G. Talang	Solok	-	24	66	-	-	90	WKP G. Talang/B. Kili
13	47	G. Talang	Solok							
14	46	Surian	Solok	10	-	-	-	-	10	Wilayah Terbuka
15	48	Muaralaboh	Solok Selatan	35	-	-	-	-	310	WKP Liki Pinangawan Muaralaboh
16	49	Liki - Pinangawan	Solok Selatan	-	86	54	50	85		
17	266	Pincurak	Pasaman Barat	39	11	-	-	-	50	Wilayah Terbuka
18	302	Talagobiru	Tanah Datar	-	27	-	-	-	27	Wilayah Terbuka
19	343	Tandikat	Tanah Datar	-	213	65	-	-	278	WPSPE Tandikat Singgalang
20	344	Talamau	Pasaman	-	-	57	-	-	57	Wilayah Terbuka
TOTAL				496	579	495	50	85	1705	

Gambar 2.4
Peta Sebaran Potensi Panas Bumi Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Dari 20 (dua puluh) titik lokasi potensi panas bumi tersebut telah ditetapkan 6 (enam) lokasi menjadi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan Wilayah Penugasan Survey Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) oleh Kementerian ESDM, yaitu WKP Gunung Talang/Bukit Kili, WKP Liki Pinangawan Muaralabuh, WKP Sumani, WPSPE Cubadak, WPSPE Bonjol dan WPSPE Tandikat Singgalang. Satu-satunya potensi yang sudah berproduksi adalah WKP Liki Pinangawan Muaralaboh di Kabupaten Solok Selatan sebesar 85 WM yang dikembangkan oleh PT. Supreme Energy Muara Laboh, yang beroperasi pada bulan Desember 2019.

K. Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi :

- a) Pusat Pelayanan Primer (Kota Padang) dan Sekunder (Bukittinggi, Batusangkar dan Sawahlunto) Pariwisata;
- b) Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) terdiri dari :
 1. DPP Padang dan sekitarnya mencakup wilayah Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman dengan tema utama kawasan pengembangan destinasi Pantai dan Pulau (*Marine Tourism*);
 2. DPP Bukittinggi dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Taman Bumi (*Geopark*);
 3. DPP Tanah Datar dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Minangkabau Tempo Dulu (*Ancient Minangkabau Tourism*);
 4. DPP Sawahlunto dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Wisata Warisan Budaya Tambang Batu Bara (*Coal Mining Heritage Tourism*);
 5. DPP Kepulauan Mentawai dan sekitarnya yang mencakup wilayah Sipora, Siberut, Pagai Utara dan Pagai Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Destinasi Selancar dan Ombak (*Whitesand Tourism*).
- c) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), meliputi : KSPP Mandeh dan sekitarnya, KSPP Bukittinggi dan Sekitarnya, KSPP Maninjau dan sekitarnya, KSPP Singkarak dan sekitarnya, KSPP Danau Kembar dan sekitarnya, KSPP Siberut dan sekitarnya; dan KSPP Sawahlunto dan sekitarnya.
- d) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), meliputi :
 1. Kawasan Warisan Budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto dan sekitarnya.
 2. Kawasan pariwisata bahari dan budaya Pantai Padang – Kota Tua dan sekitarnya;
 3. Kawasan pariwisata bahari Bungus – Mandeh – Carocok Painan dan sekitarnya;
 4. Kawasan pariwisata bahari Pantai Gandoriah – Tiram dan sekitarnya;
 5. Kawasan geowisata Ngarai Sianok – Maninjau – Tarusan Kamang dan sekitarnya;
 6. Kawasan geowisata dan budaya Silokek – Kampung Padang Ranah – Candi Padang Roco dan sekitarnya;
 7. Kawasan geowisata Harau – Kelok Sembilan – Ngalau Indah dan sekitarnya;
 8. Kawasan geowisata dan budaya Pantai Sasak – Talamau dan sekitarnya;
 9. Kawasan geowisata dan budaya Saribu Rumah Gadang- Goa Batu Kapal – TNKS dan sekitarnya;
 10. Kawasan ekowisata Malibo Anai – Nyarai dan sekitarnya;
 11. Kawasan heritage Istano Basa Pagaruyung – Nagari Tuo Pariangan – PDIKM dan sekitarnya;
 12. Kawasan pariwisata alam dan geowisata Singkarak – Pulau Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya;
 13. Kawasan pariwisata alam dan sains Taman Equator – Rimbo Panti dan sekitarnya;
 14. Kawasan gastrowisata Payakumbuh dan sekitarnya;

Potensi sumberdaya kepariwisataan Sumatera Barat sangat besar terutama dalam jumlah destinasi wisata termasuk anugerah keindahan alam dan budaya masyarakat Sumatera Barat, hampir disetiap wilayah kabupaten dan Kota di Sumatera Barat terdapat berjenis dan beragam daya tarik wisata yang masih bersifat natural, sehingga perlu usaha untuk meningkatkan daya tariknya menjadi destinasi wisata yang layak dikunjungi wisatawan nusantara dan mancanegara.

Tabel 2.20
Perwilayahan Pariwisata Sumatera Barat

NO	NAMA DUPP	Wilayahnya	Tema Pengembangan Pariwisata
1	Padang dan sekitarnya	Kota Padang Kota Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Pesisir Selatan	"Marine adventure tourism"
2	Bukittinggi dan sekitarnya	Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kabupaten Agam Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Kabupaten Lima Puluh Kota	"Geopark Tourism"
3	Tanah datar dan sekitarnya	Kota Solok Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Solok Kabupaten Solok Selatan Kota Padang Panjang	"Ancient Minangkabau Tourism"
4	Sawahlunto dan sekitarnya	Kota Sawahlunto Kabupaten Sijunjung Kabupaten Dharmasraya	"Colonial the Old Mining Town Tourism"
5	Kepulauan Mentawai	Kepulauan Mentawai	"Whitesand Tourism"

Sumber: RIPPAPROV Sumatera Barat, 2014-2025

2.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan gempa bumi, terutama di jalur gunung berapi. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatera sebagai *Great Sumatera Fault* di sepanjang Pesisir Barat Sumatera dan *Mentawai Fault* di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan lempeng kecil. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Sumatera Barat rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, dan gempa bumi yang berpotensi terjadinya gelombang tinggi dan/atau tsunami.

Sementara dari sisi iklim, Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan berdasarkan curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar 1.980 sampai lebih dari 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian timur. Keadaan yang lebih basah di bagian barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan gunung sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan Barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air yang cukup banyak di bagian Barat provinsi ini sehingga sangat menunjang untuk budi daya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan hortikultura. Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim tropika basah yang didukung oleh kondisi hidrologi yang melimpah menyebabkan Provinsi Sumatera Barat juga memiliki potensi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

Tabel 2.21
Wilayah Daerah Rawan Bencana di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten / Kota	Daerah Rawan Bencana / Potensi Bencana			
		Potensi Gerakan Tanah/ Longsor	Potensi Banjir Bandang / Banjir	Potensi Tsunami	Potensi Gempa Darat / Laut
	Kabupaten :				
1	Kepulauan Mentawai	Menengah	Menengah - Tinggi	Tinggi	Gempa Darat dan Laut
2	Pesisir Selatan	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	Menengah-Tinggi	Gempa Laut
3	Solok	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
4	Sijunjung	Menengah	-	-	-
5	Tanah Datar	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	-	Gempa Darat
6	Padang Pariaman	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	Tinggi	Gempa Darat
7	Agam	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	Tinggi	Gempa Darat
8	Lima Puluh Kota	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	-	
9	Pasaman	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	-	Gempa Darat
10	Solok Selatan	Menengah – Tinggi	-	-	Gempa Darat
11	Dharmasraya	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
12	Pasaman Barat	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	-	Gempa Darat
	Kota :				
13	Padang	Menengah - Tinggi	Menengah - Tinggi	Tinggi	Gempa Laut
14	Solok	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
15	Sawahlunto	Menengah – Tinggi	-	-	-
16	Padang Panjang	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
17	Bukittinggi	Menengah	Menengah	-	Gempa Darat
18	Payakumbuh	-	Menengah - Tinggi	-	-
19	Pariaman	-	-	Menengah-Tinggi	Gempa Laut

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat

Keterangan :

1. Menengah – Tinggi

Daerah yang mempunyai potensi menengah hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah, banjir, dan longsor. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan, maka pergerakan tanah yang lama dapat aktif kembali.

2. Menengah

Daerah yang mempunyai potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah, banjir, dan longsor. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.

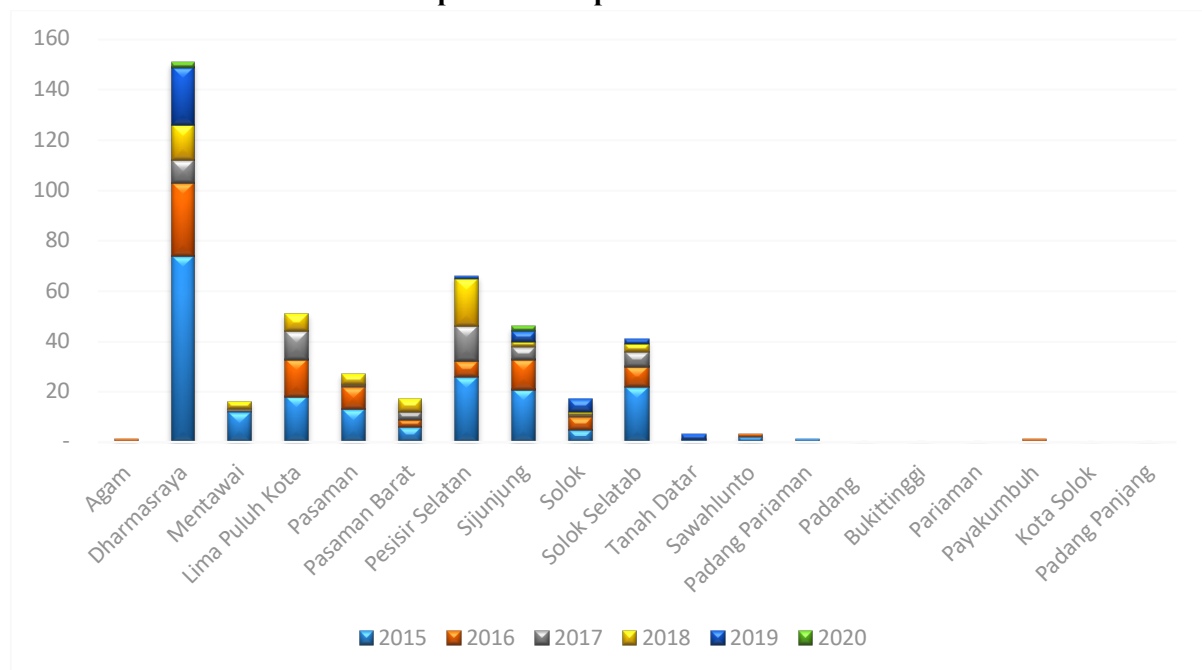
3. Tinggi

Daerah yang mempunyai potensi tinggi untuk terjadi bencana tsunami, pergerakan tanah, banjir, dan longsor. Pada zona ini dapat terjadi bencana tsunami yang sangat tinggi akibat adanya megathrust Mentawai, yang berdampak terutama pada daerah kabupaten/ Kota yang berada di Pesisir Pantai.

Berdasarkan Tabel 2.21 semua Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat mempunyai wilayah yang berpotensi untuk terjadinya bencana. Oleh sebab itu kegiatan pencegahan dan program penyiapan menghadapi bencana perlu mendapat perhatian oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Potensi bencana lainnya adalah kebakaran hutan dan lahan. Grafik 2.6 menyajikan potensi kebakaran hutan dan lahan berdasarkan jumlah titik panas (*hotspot*) yang terpantau melalui satelit NOAA. Dari grafik diatas, terlihat kabupaten Dharmasraya, Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Sijunjung memperlihatkan sebaran titik api yang cukup banyak dari tahun 2015 sampai 2020. Kejadian kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan atau kelalaian masyarakat dalam beraktifitas di hutan dan lahan.

Grafik 2.6
Sebaran hotspot Perkabupaten/kota tahun 2015-2020



Sumber : Portal Si Pongi, Satellite NOAA dengan Tingkat Kepercayaan > 80% tahun 2020

Berdasarkan Tabel 2.21 dan Grafik 2.6 , semua Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat mempunyai wilayah yang berpotensi untuk mengalami bencana. Oleh sebab itu kegiatan pencegahan dan program penyiapan menghadapi bencana perlu mendapat perhatian oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Prioritas Penanganan Bencana

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat mengakibatkan pemerintah daerah harus menentukan tingkat prioritas terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Prioritas pilihan tindakan ditentukan berdasarkan tingkat prioritas bencana dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan terjadinya bencana tersebut. Penentuan tingkat risiko didapatkan dari hasil pengkajian risiko bencana, sedangkan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian didapatkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan DIBI BNPB.

Gambar 2.5
Tingkat Prioritas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



Bencana yang menjadi prioritas untuk ditangani ditingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah: Banjir, Banjir Bandang, Gempa bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Api.

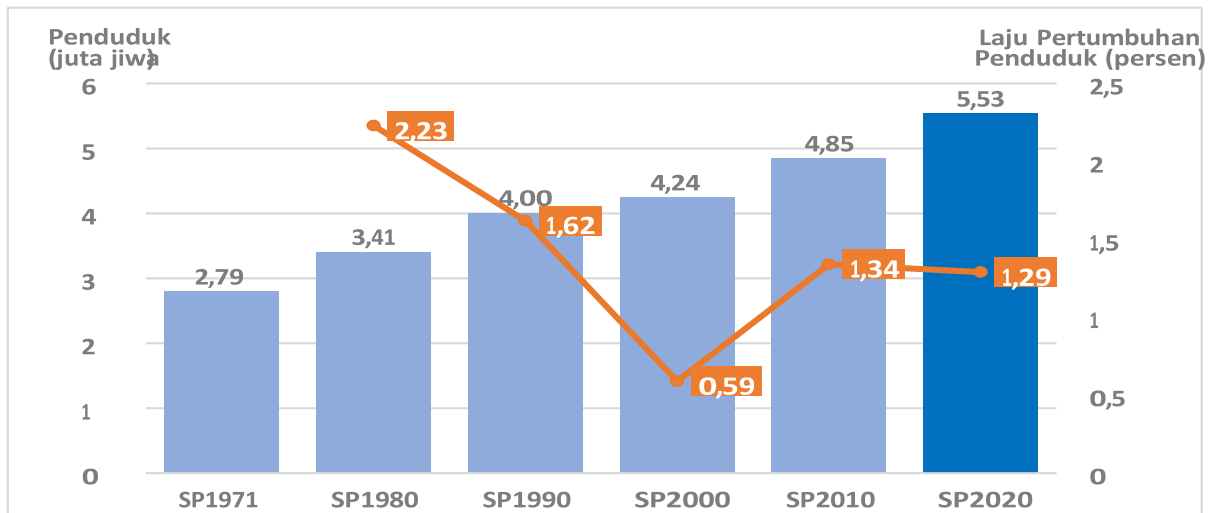
Bencana-bencana tersebut perlu penanganan segera dan menyeluruh dengan pendekatan dan pilihan tindakan, baik pencegahan, mitigasi, maupun kesiapsiagaan. Sedangkan untuk bencana lain (gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor), pilihan tindakan dengan pendekatan kesiapsiagaan belum perlu dilakukan, atau penanganannya difokuskan kepada pemerintah kabupaten/kota maupun *stakeholders* lainnya diluar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2.1.9 Demografi

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah sebanyak 5.534.472 jiwa.

Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Sumatera Barat mengalami penambahan sekitar 687.563 jiwa. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat sebesar 1,29 persen per tahun. Terdapat pengurangan laju pertumbuhan penduduk hampir satu persen jika dibandingkan dengan periode 1971-1980 yang sebesar 2,23 persen.

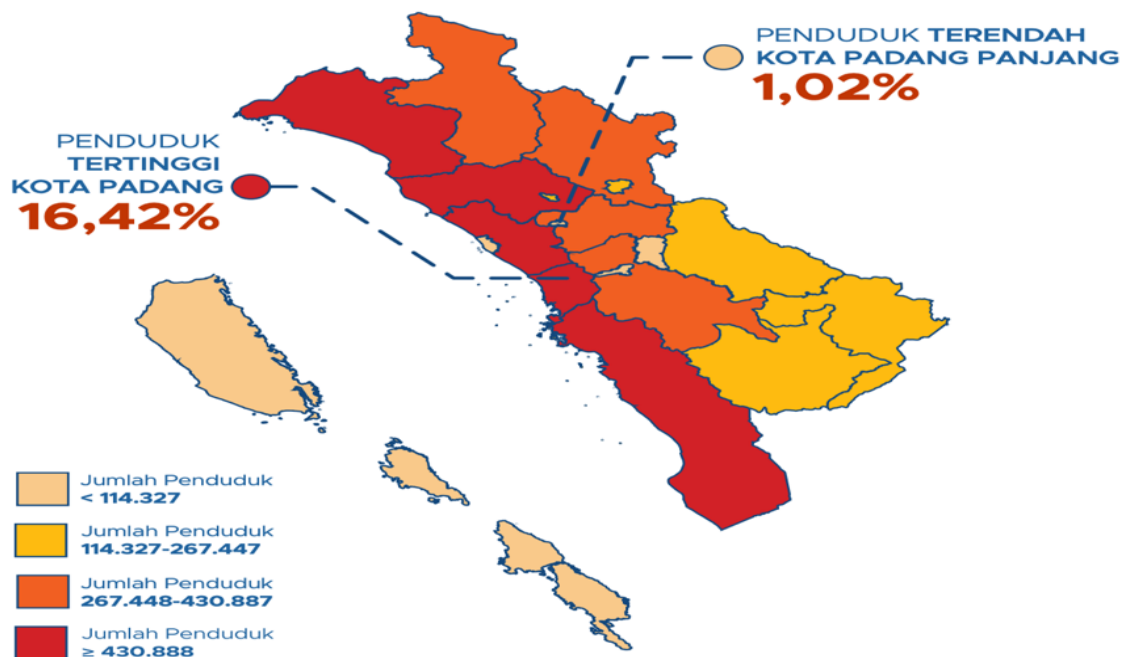
Grafik 2.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Barat dari 1971 - 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dengan luas daratan Sumatera Barat sebesar 42 ribu kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Sumatera Barat sebanyak 132 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP2000 yang mencatat kepadatan penduduk Sumatera Barat sebanyak 100 jiwa per kilometer persegi dan hasil SP2010 yang mencapai 115 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Sumatera Barat menyebar di seluruh kabupaten/kota, dengan distribusi penduduk terendah adalah di Kota Padang Panjang sebesar 1,02 persen hingga yang tertinggi adalah di Kota Padang sebesar 16,43 persen. Kota padang sebagai ibukota provinsi Sumatera Barat, memiliki penduduk terbanyak yaitu 909 ribu jiwa, menempati 1,65% luas Sumatera Barat.

Gambar 2.6
Sebaran Penduduk Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

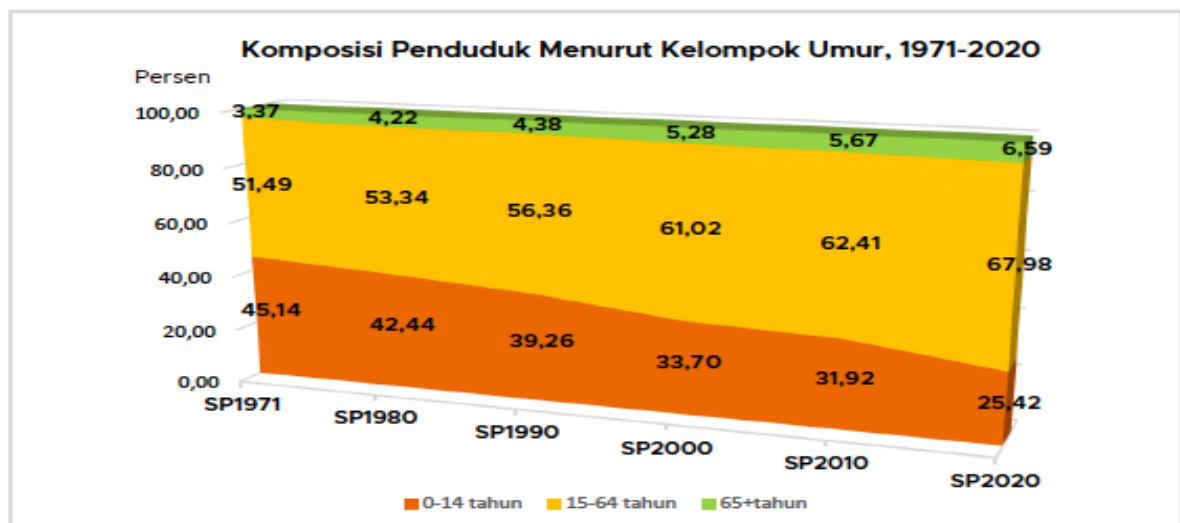
Tabel 2.22
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Kab/Kota dan Jenis Kelamin
Tahun 2020 (jiwa)

KABUPATEN/ KOTA	JENIS KELAMIN		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN
Kepulauan Mentawai	45.477	42.146	87.623
Pesisir Selatan	253.854	250.564	504.418
Kabupaten Solok	196.899	194.598	391.497
Sijunjung	119.126	115.919	235.045
Tanah Datar	186.134	185.570	371.704
Padang Pariaman	215.038	215.588	430.626
Agam	266.848	262.290	529.138
Lima Puluh Kota	191.736	191.789	383.525
Pasaman	150.798	149.053	299.851
Solok Selatan	92.859	89.168	182.027
Dharmasraya	116.310	112.281	228.591
Pasaman Barat	218.573	213.099	431.672
Padang	456.329	452.711	909.040
Kota Solok	36.990	36.448	73.438
Sawahlunto	32.767	32.371	65.138
Padang Panjang	28.286	28.025	56.311
Bukittinggi	60.515	60.513	121.028
Payakumbuh	70.250	69.326	139.576
Pariaman	47.571	46.653	94.224
SUMATERA BARAT	2.786.360	2.748.112	5.534.472

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 51,49 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 67,98 persen di tahun 2020. Perbedaan yang tajam antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Sumatera Barat masih berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 68,65 persen penduduknya masih berada di usia produktif

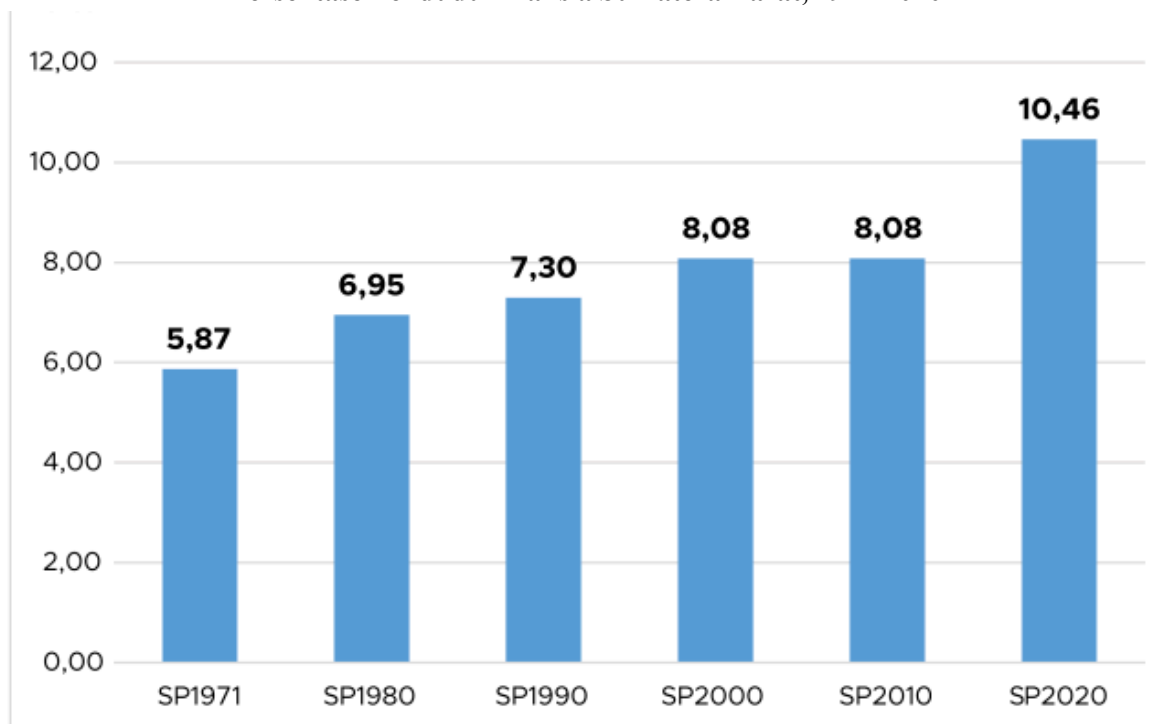
Gambar 2.7
Komposisi Penduduk Sumatera Barat Menurut Kelompok Umur, 1971-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Pembangunan yang telah dicapai oleh Indonesia selama ini memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, salah satunya tercermin dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Indonesia. Konsekuensi dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia adalah terjadinya peningkatan persentase penduduk lanjut usia atau lansia (60 tahun ke atas). Persentase penduduk lansia Indonesia meningkat menjadi 10,46 persen di tahun 2020 dari 8,08 persen pada 2010 berdasarkan hasil SP2010 (Gambar 6). Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia berada dalam masa transisi menuju era *ageing population* yaitu ketika persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai lebih dari 10 persen. Grafik 2.8 Persentase Penduduk Lansia Sumatera Barat, 1971-2020.

Grafik 2.8
Persentase Penduduk Lansia Sumatera Barat, 1971-2020

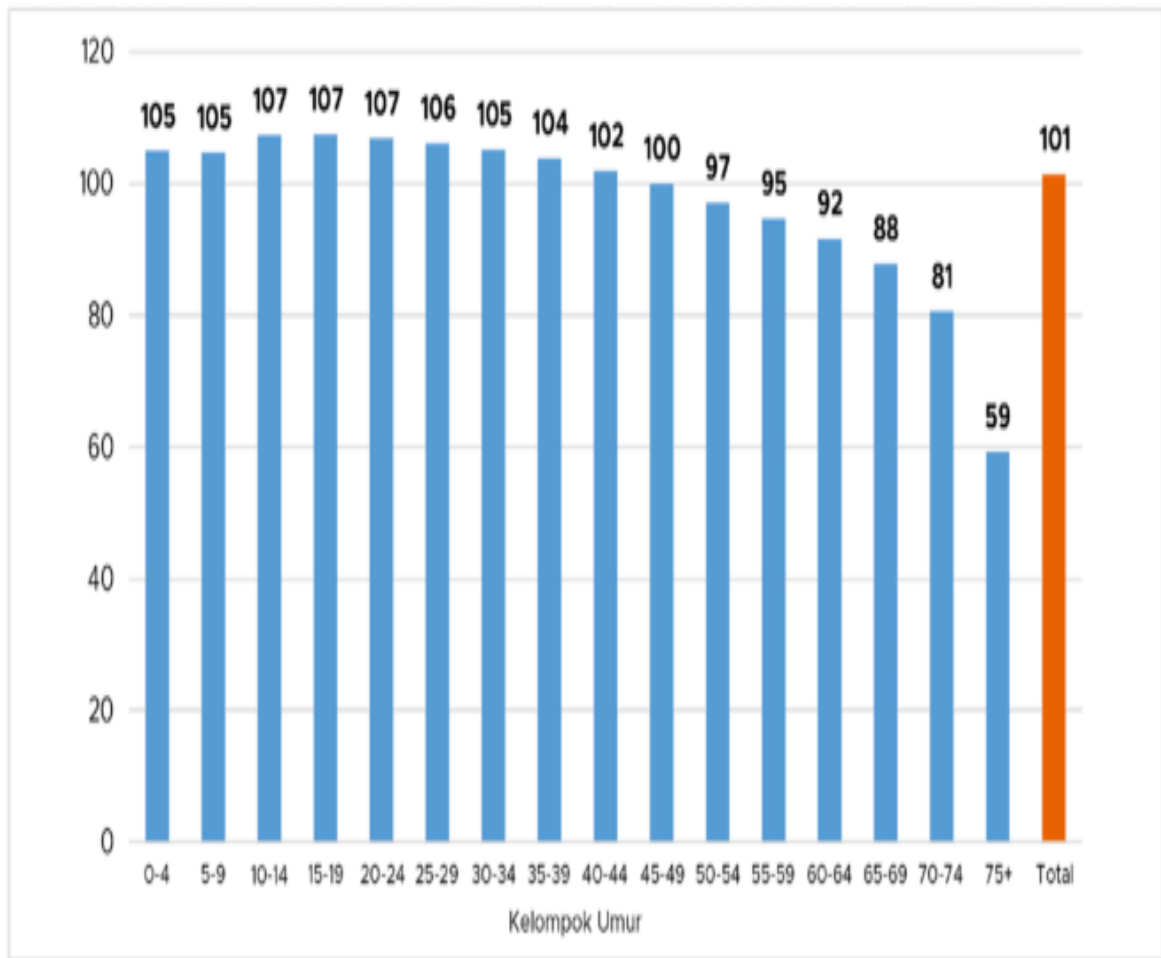


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

SP2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Sumatera Barat sebanyak 2,79 juta jiwa, atau 50,35 persen dari penduduk Sumatera Barat. Sementara, jumlah penduduk perempuan di Sumatera Barat sebanyak 2,75 juta orang, atau 49,65 persen dari penduduk Sumatera Barat. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Sumatera Barat sebesar 101, yang artinya terdapat 101 laki-laki per 100 perempuan di Sumatera Barat pada tahun 2020.

Rasio jenis kelamin bervariasi menurut kelompok umur (Grafik 2.9). Secara umum, rasio jenis kelamin di Sumatera Barat tahun 2020 menunjukkan pola yang semakin menurun dengan bertambahnya umur. Rasio jenis kelamin tertinggi pada kelompok umur 10-24 tahun sebesar 107 dan terendah pada kelompok umur 75 tahun ke atas yaitu sebesar 59. Rasio jenis kelamin pada umur 75 tahun ke atas yang sebesar 59 mengindikasikan bahwa jumlah penduduk lansia perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk lansia laki-laki.

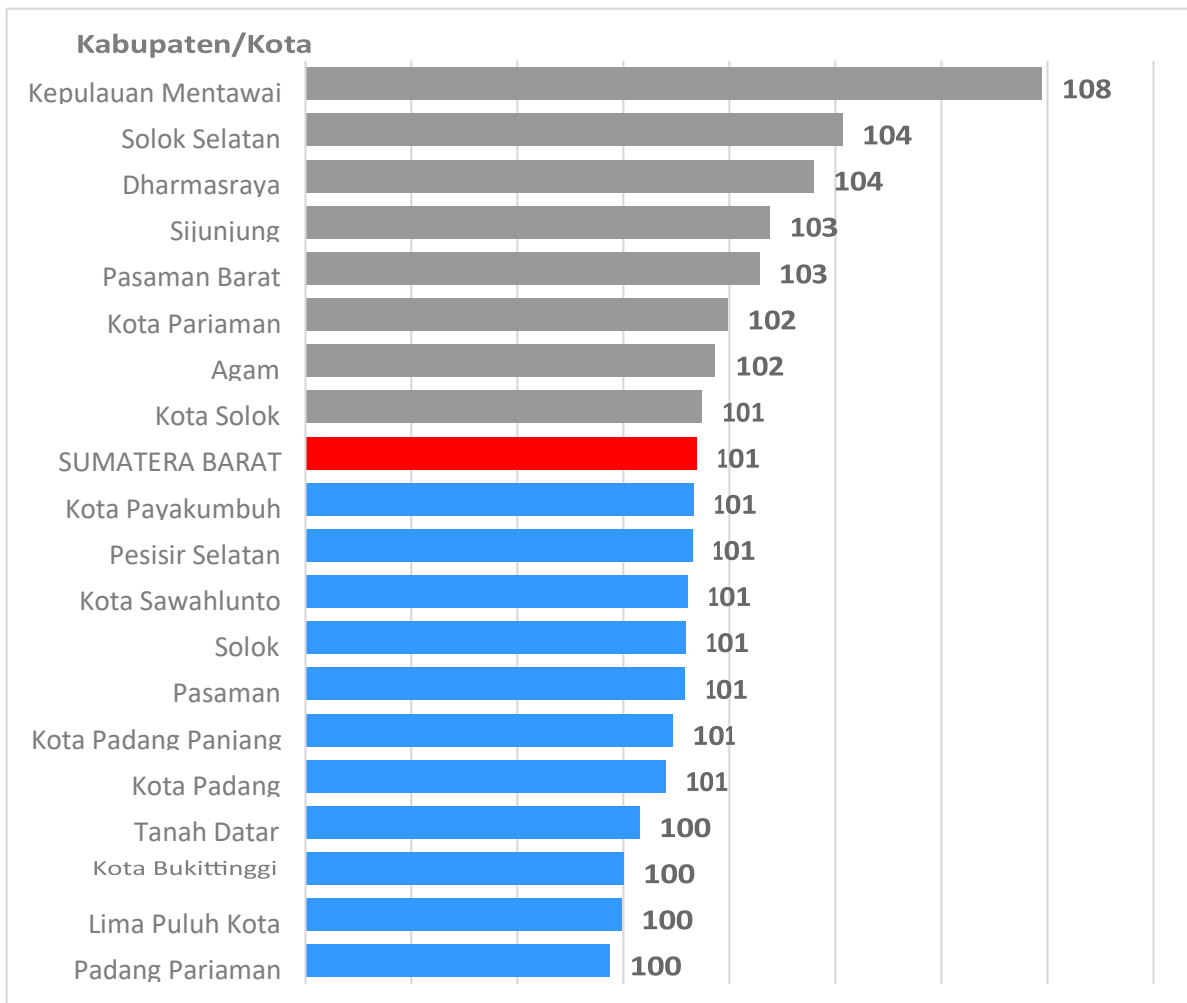
Grafik 2.9
Rasio Jenis Kelamin Sumatera Barat menurut Kelompok Umur, 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Hasil SP2020 menunjukkan rasio jenis kelamin di level kabupaten/kota secara umum selaras dengan level provinsi, yaitu penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan (Grafik 2.10). Namun demikian, terdapat beberapa kabupaten/kota yang penduduk perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Kabupaten/kota dengan rasio jenis kelamin tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 108 dan yang terendah adalah Kabupaten Padang Pariaman sebesar 100.

Grafik 2.10
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/kota, 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan paripurna (*ultimate goals*) dari pembangunan suatu wilayah. Ukuran ketercapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang disepakati, baik secara global maupun nasional. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD ini, aspek kesejahteraan masyarakat ini meliputi indikator-indikator makro yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, ketimpangan pendapatan (*Gini Ratio*), ketimpangan wilayah (*Indeks Williamson*), tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta komponen pendukungnya seperti Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita.

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat diamati dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penghitungan PDRB disajikan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan produksi atau menurut lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran. Penghitungan PDRB juga disajikan dengan dua acuan harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. Perkembangan ekonomi dapat ditunjukkan pula oleh pertumbuhan lapangan usaha pada PDRB serta distribusi yang menggambarkan perkembangan struktur ekonomi.

Nilai PDRB Sumatera Barat menurut harga berlaku telah mengalami peningkatan selama rentang tahun 2016 hingga 2020, dari Rp. 196,009 trilyun menjadi Rp. 242,118 trilyun. Adapun PDRB atas harga konstan meningkat dari Rp. 148,134 trilyun pada tahun 2016 menjadi Rp. 169,458 trilyun pada tahun 2020. Berdasarkan PDRB harga konstan ini diperoleh pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebelum terjadi pandemi COVID-19 terus mengalami pertumbuhan. Namun demikian menunjukkan kecenderungan perlambatan yaitu dari 5,27 persen pada tahun 2016 menjadi 5,01 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 sebagaimana kecenderungan internasional dan nasional akibat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat minus -1,6 persen.

Dari sisi produksi, lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh secara konsisten melebihi 8 (delapan) persen dalam 5 tahun terakhir bahkan saat pandemi pertumbuhannya semakin meningkat mencapai 9,76 persen. Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh melebihi 8 persen antara 2016-2019, namun mengalami kontraksi terbesar sebesar -15,95 persen pada tahun 2020, setelah Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan. Pertumbuhan lapangan usaha ini secara lebih rinci disajikan pada tabel 2.22.

Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2020 menunjukkan sejumlah sektor yang mampu bertahan dari pengaruh pandemi. Kinerja lapangan usaha pertanian yang merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian tetap tumbuh 1,19 persen pada tahun 2020. Angka ini mengalami perlambatan dari 3,52 % tahun 2018 dan 2,51% di tahun 2019. Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang semakin meningkat. Lapangan Usaha Jasa Pendidikan juga tetap tumbuh cukup tinggi pada tahun 2020 sebesar 5,03 persen dibandingkan empat tahun sebelumnya dengan angka di atas 7 persen.

Tabel 2.23
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2020 (Persen)

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,01	3,43	3,52	2,51	1,19
2. Pertambangan dan Penggalian	2,00	1,13	5,79	6,22	-1,31
3. Industri Pengolahan	4,90	2,27	-0,58	-1,98	-0,54
4. Pengadaan Listrik & Gas	10,94	4,06	4,09	4,20	-6,81
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	6,40	3,96	2,24	6,10	-1,28
6. Konstruksi	6,59	7,23	7,00	8,47	-2,92
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,41	6,50	6,99	7,29	-1,14
8. Transportasi dan Pergudangan	7,67	7,17	6,43	4,75	-16,10
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,62	8,76	8,23	8,11	-15,95
10. Informasi dan Komunikasi	9,40	8,74	8,52	8,73	9,76
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,03	2,11	0,99	2,29	1,34
12. Real Estate	5,37	4,49	4,67	6,78	0,22
13. Jasa Perusahaan	4,94	5,19	5,45	6,20	-3,98
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,96	4,49	5,97	6,96	-0,69
15. Jasa Pendidikan	7,85	9,94	7,19	7,94	5,03
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,47	8,58	7,28	7,54	8,83
17. Jasa Lainnya	9,35	7,95	7,86	7,50	-10,10
PDRB SUMATERA BARAT	5,27	5,30	5,14	5,01	-1,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Struktur perekonomian Sumatera Barat menurut lapangan usaha pada tahun 2020 ditunjukkan oleh distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kontributor terbesar mencapai 22,38%. Diikuti oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,76%, dan transportasi dan pergudangan 10,44%. Sumbangan ketiga lapangan usaha ini menunjukkan struktur perekonomian Sumatera sebagai daerah agraris yang ditunjang dan terkait dengan struktur perdagangan dan jasa transportasi. Gambaran struktur ekonomi ini ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Struktur Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	24,06	23,61	23,17	22,15	22,38
2. Pertambangan dan Penggalian	4,53	4,27	4,27	4,30	4,27
3. Industri Pengolahan	10,09	9,74	9,10	8,38	8,64
4. Pengadaan Listrik & Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
5. Pengadaan Air	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6. Konstruksi	9,29	9,35	9,63	10,09	10,19
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,76	14,91	15,30	15,78	15,76
8. Transportasi dan Pergudangan	12,46	12,65	12,65	12,60	10,44
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,29	1,33	1,37	1,43	1,24
10. Informasi dan Komunikasi	4,99	5,28	5,46	5,81	6,44
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	3,10	3,01	2,91	3,04
12. Real Estate	2,01	1,97	1,96	2,01	2,06
13. Jasa Perusahaan	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,82	5,83	5,92	6,13	6,71
15. Jasa Pendidikan	3,84	4,13	4,20	4,35	4,70
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,28	1,34	1,39	1,42	1,62
17. Jasa Lainnya	1,77	1,84	1,93	2,00	1,88
PDRB SUMATERA BARAT	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dari sisi pengeluaran, stimulus fiskal pemerintah baik berupa konsumsi maupun investasi pemerintah menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan tahun 2019, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami penurunan yaitu -2,47% dan -8,50% pada tahun 2020, begitu pula halnya dengan pengeluaran konsumsi lembaga non profit mengalami penurunan menjadi -4,39 % pada tahun 2020.

Dilihat dari pola distribusi penggunaan tahun 2020, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 54,06%, mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 54,40%. Penyumbang kedua adalah pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 30,00% dan Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 11,92%. Laju pertumbuhan dan struktur ekonomi menurut penggunaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi
Menurut Penggunaan di Sumatera Barat, Tahun 2018-2020

KOMPONEN PENGGUNAAN	PERTUMBUHAN EKONOMI			STRUKTUR EKONOMI		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,62	4,74	-2,47	53,23	54,40	54,06
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	6,54	11,85	-4,39	1,06	1,14	1,12
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,40	5,13	-8,50	12,59	12,64	11,92
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,52	5,16	-2,62	29,82	30,10	30,00
Perubahan Inventori	-	-	-	0,11	0,04	0,15
Net Ekspor Barang dan Jasa	16,56	5,99	17,57	3,19	1,67	2,76
PDRB SUMATERA BARAT	5,14	5,01	-1,60	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2.2.2. Laju Inflasi

Daya beli sebagai salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh stabilitas harga-harga barang dan jasa. Stabilitas harga ini diindikasikan oleh tingkat inflasi yang turut mempengaruhi perekonomian. Penghitungan tingkat inflasi berupa indeks harga konsumen di Sumatera Barat diwakili oleh Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Laju inflasi Kota Padang pada tahun 2020 adalah sebesar 2,12 %. Sedangkan di Kota Bukittinggi laju sebesar 2,02 %. Dari inflasi kedua kota tersebut maka inflasi Sumatera Barat Tahun 2020 sebesar 2,07 %.

Inflasi di Sumatera Barat sangat dipengaruhi antara lain oleh kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Secara umum inflasi di Sumatera Barat cenderung berada di bawah nasional, kecuali pada tahun 2016 dan tahun 2020 yang berada di atas inflasi nasional, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (%)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Padang	5,02	2,11	2,55	1,72	2,12
Kota Bukittinggi	3,93	1,37	2,99	1,31	2,02
Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2.2.3. PDRB Per kapita

Kesejahteraan masyarakat dapat ditunjukkan oleh PDRB per kapita yang mengindikasikan rata-rata pendapatan masyarakat Sumatera Barat. PDRB per kapita Sumatera Barat atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan meningkat dalam 5 tahun terakhir, meskipun sedikit terkoreksi pada tahun 2020 yaitu dari Rp. 37,29 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 44, 03 juta pada tahun 2020.

Tabel 2.27
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
SUMATERA BARAT (Provinsi)	5,27	5,30	5,16	5,05	-1,60
Kepulauan Mentawai	5,02	5,12	4,91	4,76	-1,85
Pesisir Selatan	5,33	5,41	5,35	4,81	-1,11
Kab.Solok	5,31	5,32	5,22	5,07	-1,12
Sijunjung	5,26	5,26	5,09	4,83	-1,10
Tanah Datar	5,03	5,11	5,07	5,01	-1,13
Padang Pariaman	5,52	5,58	5,46	2,51	-10,46
Agam	5,51	5,51	5,26	4,81	-1,38
Lima Puluh Kota	5,32	5,53	5,26	5,10	-1,16
Pasaman	5,07	5,08	5,00	4,84	-0,87
Solok Selatan	5,14	5,15	5,03	4,89	-1,24
Dharmasraya	5,42	5,44	5,31	4,98	-1,39
Pasaman Barat	5,34	5,34	5,24	4,49	-1,34
Padang	6,17	6,23	6,09	5,68	-1,86
Kota Solok	5,76	5,76	5,68	5,53	-1,42
Sawahlunto	5,72	5,74	5,52	5,34	-1,27
Padang Panjang	5,80	5,80	5,73	5,59	-1,44
Bukittinggi	6,05	6,08	6,02	5,88	-1,74
Payakumbuh	6,08	6,12	6,05	5,92	-1,66
Pariaman	5,59	5,61	5,50	5,33	-1,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.28
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di
Sumatera Barat (Juta Rupiah)

Wilayah	Harga Konstan 2010				
	2016	2017	2018	2019	2020
SUMATERA BARAT (Provinsi)	148.134.243,89	155.984.364,13	163.996.189,04	172.213.791,39	169.458.114,32
Kepulauan Mentawai	2.608.127,05	2.741.550,40	2.875.664,08	3.011.724,37	2.956.007,63
Pesisir Selatan	8.232.592,61	8.678.053,24	9.139.972,32	9.576.666,52	9.470.783,59
Kab.Solok	8.511.654,80	8.964.874,30	9.430.224,93	9.905.142,36	9.794.236,02
Sijunjung	5.829.043,58	6.135.755,76	6.446.992,48	6.757.042,94	6.683.022,09
Tanah Datar	8.355.071,58	8.782.098,09	9.224.518,53	9.684.476,43	9.575.503,02
Padang Pariaman	11.697.039,96	12.350.186,95	13.021.887,79	13.334.921,66	11.939.475,18
Agam	12.567.018,09	13.249.246,53	13.942.516,42	14.608.895,90	14.407.138,02
Lima Puluh Kota	9.611.264,54	10.123.647,61	10.653.261,47	11.192.425,99	11.062.311,08
Pasaman	5.342.903,64	5.614.284,67	5.893.340,23	6.176.328,21	6.122.756,76
Solok Selatan	3.435.698,41	3.612.641,03	3.793.185,19	3.977.409,14	3.928.031,94
Dharmasraya	6.490.285,83	6.843.182,09	7.204.465,92	7.560.324,96	7.454.968,15
Pasaman Barat	9.857.619,49	10.384.391,53	10.925.625,62	11.411.833,24	11.259.452,26
Padang	37.350.197,47	39.675.728,60	42.081.536,73	44.459.301,23	43.631.433,48
Kota Solok	2.440.126,88	2.580.783,66	2.726.707,11	2.876.462,68	2.835.750,79
Sawahlunto	2.380.518,78	2.517.150,16	2.655.619,77	2.796.538,21	2.760.934,37

Wilayah	Harga Konstan 2010				
	2016	2017	2018	2019	2020
Padang Panjang	2.186.011,57	2.312.713,05	2.444.773,80	2.580.605,64	2.543.404,42
Bukittinggi	5.168.975,87	5.483.398,44	5.812.391,14	6.152.082,50	6.045.093,28
Payakumbuh	3.767.272,54	3.997.854,36	4.238.662,76	4.488.204,49	4.413.625,08
Pariaman	3.062.313,74	3.234.234,59	3.411.294,75	3.592.023,08	3.544.660,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.29

Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Juta Rupiah)

Wilayah	Harga Berlaku				
	2016	2017	2018	2019	2020
SUMATERA BARAT (Provinsi)	196.099.176,57	213.893.468,18	230.367.222,04	245.982.643,67	242.118.758,01
Kepulauan Mentawai	3.725.729,38	4.001.871,06	4.252.824,00	4.641.481,07	4.628.648,82
Pesisir Selatan	11.271.401,87	12.069.519,39	13.045.984,64	14.035.655,39	13.995.043,66
Kab.Solok	11.053.489,50	11.783.867,88	12.653.858,53	13.578.369,12	13.511.124,12
Sijunjung	7.439.227,39	7.927.672,63	8.489.458,37	9.129.618,78	9.122.730,19
Tanah Datar	10.734.514,88	11.428.081,54	12.202.819,78	13.086.687,00	13.027.340,94
Padang Pariaman	17.532.873,46	19.038.379,57	20.438.318,45	21.252.415,29	17.941.900,08
Agam	16.693.045,25	17.834.986,34	19.145.918,50	20.537.075,21	20.371.334,30
Lima Puluh Kota	12.677.544,49	13.531.194,73	14.525.483,21	15.613.495,46	15.533.057,18
Pasaman	7.335.785,21	7.801.982,13	8.318.765,11	8.902.839,00	8.891.361,50
Solok Selatan	4.598.219,45	4.893.871,25	5.214.850,48	5.571.732,28	5.528.507,31
Dharmasraya	8.437.660,72	9.054.276,65	9.697.640,71	10.344.514,24	10.242.190,77
Pasaman Barat	12.794.249,97	13.699.696,35	14.603.178,20	15.390.742,58	15.245.614,66
Padang	49.386.263,76	53.091.095,10	57.506.842,01	62.424.554,79	62.222.357,93
Kota Solok	3.241.245,94	3.469.035,58	3.728.256,36	4.047.921,37	4.041.650,72
Sawahlunto	2.937.954,38	3.165.214,99	3.404.518,84	3.679.764,93	3.656.585,65
Padang Panjang	2.774.050,10	2.974.350,89	3.198.031,98	3.474.765,68	3.473.238,63
Bukittinggi	6.783.086,09	7.453.106,84	8.011.062,02	8.695.100,58	8.627.587,69
Payakumbuh	5.203.120,37	5.639.684,44	6.134.700,30	6.824.430,16	6.823.641,86
Pariaman	4.036.741,93	4.309.010,19	4.615.745,62	5.005.432,39	4.994.102,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.30

Persentase Kontribusi Terhadap Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen)

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
SUMATERA BARAT (Provinsi)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kepulauan Mentawai	1,87	1,88	1,88	1,88	1,91
Pesisir Selatan	5,67	5,77	5,85	5,70	5,79
Kab.Solok	5,56	5,52	5,48	5,51	5,59
Sijunjung	3,74	3,68	3,65	3,71	3,77
Tanah Datar	5,40	5,36	5,31	5,31	5,39
Padang Pariaman	8,83	8,84	8,84	8,64	7,42
Agam	8,40	8,40	8,36	8,34	8,42
Lima Puluh Kota	6,38	6,35	6,32	6,34	6,42
Pasaman	3,69	3,69	3,65	3,62	3,68

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Solok Selatan	2,31	2,30	2,27	2,26	2,29
Dharmasraya	4,25	4,28	4,25	4,20	4,23
Pasaman Barat	6,44	6,48	6,43	6,25	6,30
Padang	24,86	24,83	24,97	25,35	25,72
Kota Solok	1,63	1,64	1,64	1,64	1,67
Sawahlunto	1,48	1,48	1,48	1,49	1,51
Padang Panjang	1,40	1,40	1,40	1,41	1,44
Bukittinggi	3,41	3,43	3,46	3,53	3,57
Payakumbuh	2,62	2,65	2,72	2,77	2,82
Pariaman	2,03	2,02	2,04	2,03	2,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2.2.4. Ketimpangan Pendapatan

Pemerataan pendapatan merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana kinerja pembangunan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Gini Ratio atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan atau pemerataan pendapatan masyarakat. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Angka Gini Ratio di Sumatera Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan semakin membaiknya distribusi pendapatan masyarakat. Koefisien Gini pada tahun 2016 sebesar 0,312 telah menurun menjadi 0,301 pada tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Indeks Gini Rasio Seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Sumatera Barat	0,330	0,318	0,321	0,306	0,305
Kab.Kep.Mentawai	0,310	0,319	0,306	0,336	0,273
Kab.Pesisir Selatan	0,270	0,299	0,255	0,246	0,264
Kab.Solok	0,310	0,294	0,303	0,285	0,277
Kab.Sijunjung	0,330	0,333	0,300	0,293	0,269
Kab.Tanah Datar	0,300	0,262	0,288	0,278	0,273
Kab.Padang Pariaman	0,260	0,280	0,296	0,297	0,257
Kab.Agam	0,290	0,279	0,257	0,251	0,278
Kab.Lima Puluh Kota	0,270	0,262	0,283	0,238	0,222
Kab.Pasaman	0,300	0,260	0,266	0,330	0,310
Kab.Solok Selatan	0,310	0,299	0,309	0,295	0,307
Kab.Dharmasraya	0,300	0,252	0,264	0,278	0,280
Kab.Pasaman Barat	0,310	0,286	0,290	0,283	0,258
Kota Padang	0,350	0,338	0,344	0,312	0,312
Kota Solok	0,340	0,299	0,296	0,271	0,286
Kota Sawahlunto	0,320	0,299	0,310	0,289	0,300
Kota Padang Panjang	0,380	0,300	0,290	0,322	0,394
Kota Bukittinggi	0,330	0,313	0,337	0,267	0,265

Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Payakumbuh	0,340	0,303	0,302	0,276	0,325
Kota Pariaman	0,340	0,301	0,316	0,300	0,310

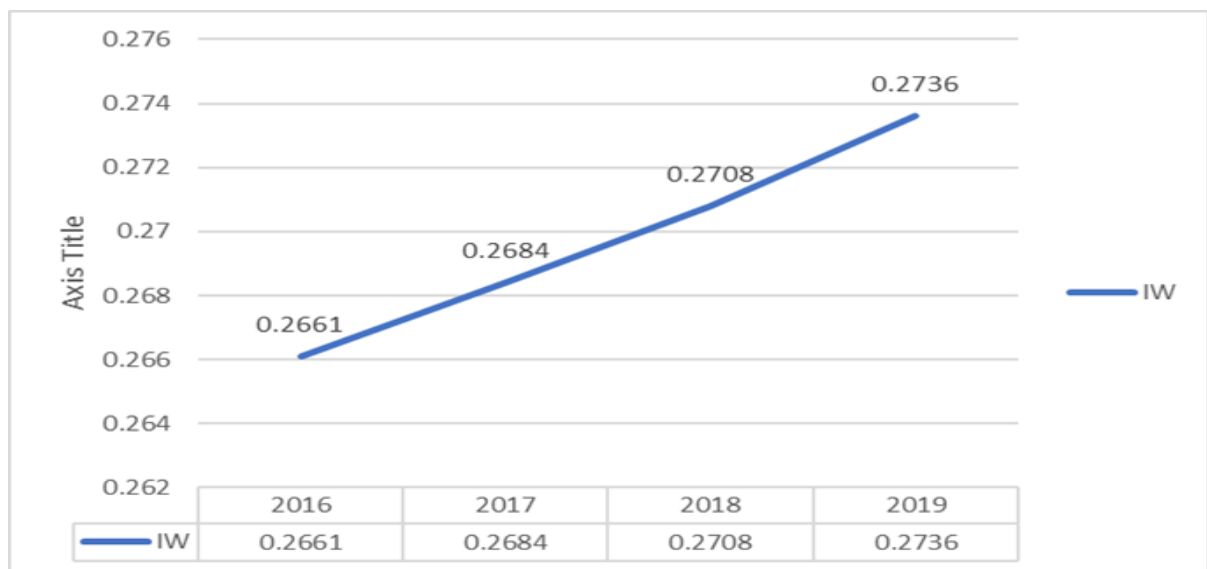
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2.2.5. Ketimpangan Wilayah

Pemerataan atau ketimpangan pembangunan antar wilayah, dalam hal ini antar kota/kabupaten di Sumatera Barat dapat diukur menggunakan *Indeks Williamson*. *Indeks Williamson* mengukur derajat ketimpangan antarwilayah berdasarkan nilai variasi PDRB per kapita antar daerah. Berdasarkan nilai indeksinya, ketimpangan wilayah dikategorikan rendah jika *indeks Williamson* $<0,3$, tingkat ketimpangan sedang jika nilainya $0,3 - 0,7$, dan tingkat ketimpangan tinggi jika indeksinya $>0,7$.

Indeks Williamson Sumatera Barat antara tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan peningkatan dari 0,2661 menjadi 0,2736. Peningkatan *Indeks Williamson* ini menandakan terjadinya peningkatan ketimpangan wilayah di Sumatera Barat. Namun demikian secara kategori, ketimpangan wilayah Provinsi Sumatera tergolong rendah. Perkembangan indeks ini diilustrasikan oleh Grafik 2.14 Perkembangan penting dalam pembangunan daerah di Sumatera Barat yaitu telah berkurangnya daerah tertinggal. Sampai dengan tahun 2015 Sumatera Barat masih memiliki tiga daerah kabupaten tertinggal yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. Pada tahun 2020 hanya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tergolong sebagai daerah tertinggal yang perlu mendapat prioritas pembangunan.

Grafik 2.11
Indeks Williamson Sumatera Barat 2016-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2.2.6. Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

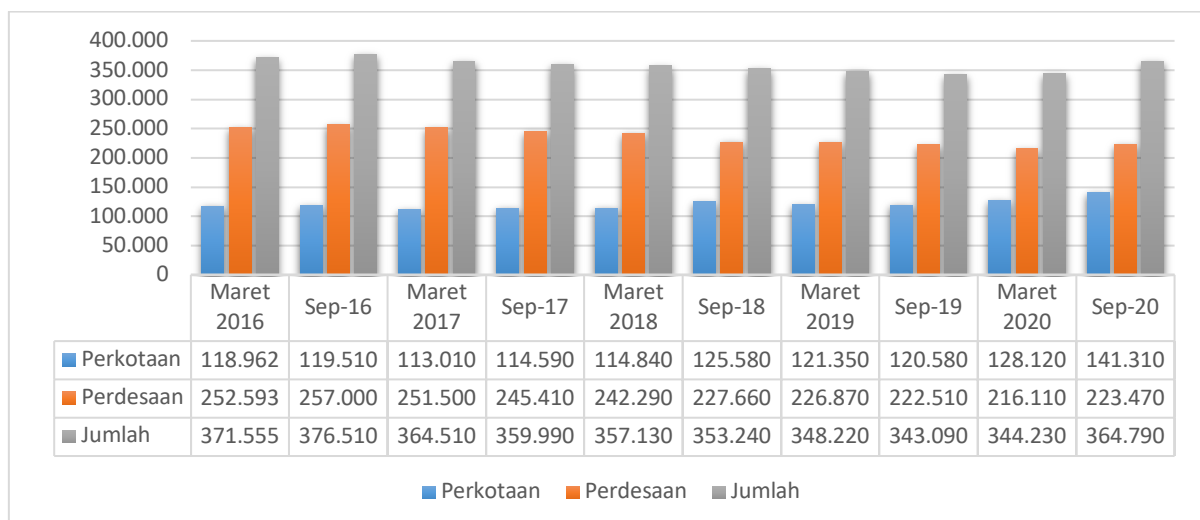
Berdasarkan data berita release BPS, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat pada kondisi September 2020 adalah 364,79 ribu jiwa, bertambah sebesar 20,6 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 343,09 ribu orang. Walaupun secara umum, pada periode 2016 – September 2020 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Dari Tabel 2.28 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin Sumatera Barat telah dapat ditekan dari 371.555 jiwa (tahun 2016), menjadi 364.790 jiwa (tahun 2020).

Tabel 2.32
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Maret 2016 – September 2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
Maret 2016	118.962	252.593	371.555	5,54	8,16	7,09
September 2016	119.510	257.000	376.510	5,52	8,27	7,14
Maret 2017	113.010	251.500	364.510	5,14	8,10	6,87
September 2017	114.590	245.410	359.990	5,11	7,94	6,75
Maret 2018	114.840	242.290	357.130	4,86	8,07	6,65
September 2018	125.580	227.660	353.240	4,99	7,9	6,55
Maret 2019	121.350	226.870	348.220	4,76	7,88	6,42
September 2019	120.580	222.510	343.090	4,71	7,69	6,29
Maret 2020	128.120	216.110	344.230	4,97	7,43	6,28
September 2020	141.310	223.470	364.790	5,22	7,83	6,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Grafik 2.12
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Menurut Daerah Tempat Tinggal, Maret dan September 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Jika dilihat dari diatas, jumlah penduduk miskin pada September 2020 di Provinsi Sumatera Barat menurut daerah tempat tinggal, selama periode Maret 2020-September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 13,19 ribu orang (dari 128,12 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 141,31 ribu orang pada September 2020), sementara di daerah perdesaan juga mengalami kenaikan sebanyak 7,36 ribu orang (dari 216,11 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 223,47 ribu orang pada September 2020)

Tabel 2.33
Persentase Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (Maret)

NO	KAB/KOTA PROVINSI/NASIONAL	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Kep. Mentawai	15.12	14.67	14.44	14.43	14,35
2	Kabupaten Pesisir Selatan	7.92	7.79	7.59	7.88	7,61
3	Kabupaten Solok	9.32	9.06	8.88	7.98	7,81
4	Kabupaten Sijunjung	7.60	7.35	7.11	7.04	6,78
5	Kabupaten Tanah Datar	5.68	5.56	5.32	4.66	4,40
6	Kabupaten Padang Pariaman	8.91	8.46	8.04	7.10	6,95
7	Kabupaten Agam	7.83	7.59	6.76	6.75	6,75
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	7.59	7.15	6.99	6.97	6,86
9	Kabupaten Pasaman	7.65	7.41	7.31	7.21	7,16
10	Kabupaten Solok Selatan	7.35	7.21	7.07	7.33	7,15
11	Kabupaten Dharmasraya	7.16	6.68	6.42	6.29	6,23
12	Kabupaten Pasaman Barat	7.40	7.26	7.34	7.14	7,04
13	Kota Padang	4.68	4.74	4.70	4.48	4,40
14	Kota Solok	3.86	3.66	3.30	3.24	2,77
15	Kota Sawahlunto	2.21	2.01	2.39	2.17	2,16
16	Kota Padang Panjang	6.75	6.17	5.88	5.60	5,24
17	Kota Bukittinggi	5.48	5.35	4.92	4.60	4,54
18	Kota Payakumbuh	6.46	5.88	5.77	5.68	5,65
19	Kota Pariaman	5.23	5.20	5.03	4.76	4,10
	Sumatera Barat	7.09	6.87	6.65	6.42	6,28
	Nasional	10,86	10,64	9,82	9,41	9,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dari 19 Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat, persentase angka kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Persentase Kemiskinan Kabupaten Mentawai berada di angka 14,35 % dari jumlah penduduk sebanyak 87.623 orang pada september 2020. Sedangkan angka kemiskinan terendah berada di Kota Sawahlunto dengan persentase penduduk miskin sebesar 2,16% dengan jumlah penduduk sebanyak 65.138 orang.

Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan merupakan dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

TAHUN	KOTA	DESA	KOTA+DESA
P1			
Maret 2016	0,752	1,334	1,096
September 2016	1,038	1,180	1,122
Maret 2017	0,752	1,175	1,000
September 2017	0,599	1,275	0,990
Maret 2018	0,663	1,329	1,035
September 2018	0,884	1,025	0,959
Maret 2019	0,771	1,093	0,942
September 2019	0,538	0,993	0,779
Maret 2020	0,742	1,068	0,915
September 2020	0,803	1,171	0,992
P2			
Maret 2016	0,153	0,304	0,242
September 2016	0,249	0,299	0,278
Maret 2017	0,157	0,278	0,228
September 2017	0,107	0,324	0,233
Maret 2018	0,142	0,320	0,242
September 2018	0,212	0,214	0,213
Maret 2019	0,196	0,225	0,211
September 2019	0,096	0,191	0,147
Maret 2020	0,164	0,223	0,201
September 2020	0,242	0,278	0,261

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada periode Maret 2019 – September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga cenderung mengalami penurunan. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 0,803 sementara di daerah perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,171.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan bahwa penduduk miskin di perdesaan memiliki rata-rata pengeluaran dengan garis kemiskinan yang lebih besar dibandingkan penduduk miskin perkotaan. Kondisi penduduk miskin di perkotaan sedikit lebih baik, dilihat dari nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang lebih kecil dibanding penduduk perdesaan. Artinya, diperlukan usaha yang lebih besar untuk mengentaskan penduduk perdesaan dari kemiskinan daripada di perkotaan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Di perdesaan, nilai indeks ini masih lebih tinggi di banding di perkotaan. Pada September 2020, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan sebesar 0,278 dibandingkan perkotaan 0,242 di periode yang sama.

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator tentang upaya-upaya dalam menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan. Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2016-2020 terus menunjukkan peningkatan. Didukung oleh peningkatan dalam

komponen-komponen penghitungan IPM. Angka IPM Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mencapai 72,38 dari sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 70,73 seperti disajikan pada table berikut.

Tabel 2.35
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

NO	KOMPONEN IPM	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	68,73	68,78	69,01	69,31	69,47
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79	13,94	13,95	14,01	14,02
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rp/ Org/Th	10.126	10.306	10.638	10.925	10.733
IPM PROV. SUMATERA BARAT			70,73	71,24	71,73	72,39	72,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Secara umum terdapat kecenderungan meningkatnya IPM pada seluruh daerah antara 2016 hingga 2019. Pada tahun 2020 terjadi dinamika dalam kinerja pembangunan manusia dibandingkan tahun 2019, terdapat daerah yang IPM meningkat namun juga beberapa daerah yang mengalami penurunan IPM. Perbandingan IPM antar kabupaten/kota pada tahun 2020, IPM tertinggi adalah Kota Padang sebesar 82,82 dan IPM terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 61,09. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota se Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.36
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota Se Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

NO.	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	58,27	59,25	60,28	61,26	61,09
2	Kabupaten Pesisir Selatan	68,39	68,74	69,40	70,08	69,90
3	Kabupaten Solok	67,67	67,86	68,60	69,08	69,08
4	Kabupaten Sijunjung	66,01	66,60	66,97	67,66	67,74
5	Kabupaten Tanah Datar	70,11	70,37	71,25	72,14	72,33
6	Kabupaten Padang Pariaman	68,44	68,90	69,71	70,59	70,61
7	Kabupaten Agam	70,36	71,10	71,70	72,37	72,46
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	68,37	68,69	69,17	69,67	69,47
9	Kabupaten Pasaman	64,57	64,94	65,60	66,46	66,64
10	Kabupaten Solok Selatan	67,47	67,81	68,45	68,94	69,04
11	Kabupaten Dharmasraya	70,25	70,40	70,86	71,52	71,51
12	Kabupaten Pasaman Barat	66,03	66,83	67,43	68,21	68,49
13	Kota Padang	81,06	81,58	82,25	82,68	82,82
14	Kota Solok	77,07	77,44	77,89	78,38	78,29
15	Kota Sawahlunto	70,67	71,13	71,72	72,39	72,64
16	Kota Padang Panjang	76,50	77,01	77,30	78,00	77,93
17	Kota Bukittinggi	79,11	79,80	80,11	80,71	80,58
18	Kota Payakumbuh	77,56	77,91	78,23	78,95	78,90
19	Kota Pariaman	75,44	75,71	76,26	76,70	76,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan UHH Kabupaten/kota Se Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.37
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/kota Se Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (Tahun)

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	64,36	64,37	64,49	64,68	64,73
2	Kabupaten Pesisir Selatan	70,11	70,23	70,45	70,73	70,86
3	Kabupaten Solok	67,50	67,65	67,95	68,34	68,58
4	Kabupaten Sijunjung	65,33	65,44	65,69	66,02	66,21
5	Kabupaten Tanah Datar	68,93	69,11	69,38	69,73	69,94
6	Kabupaten Padang Pariaman	67,80	67,96	68,23	68,58	68,79
7	Kabupaten Agam	71,44	71,57	71,83	72,17	72,37
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	69,27	69,31	69,47	69,70	69,79
9	Kabupaten Pasaman	66,40	66,54	66,82	67,18	67,40
10	Kabupaten Solok Selatan	66,78	66,92	67,21	67,58	67,81
11	Kabupaten Dharmasraya	70,30	70,44	70,73	71,10	71,33
12	Kabupaten Pasaman Barat	67,09	67,15	67,37	67,67	67,82
13	Kota Padang	73,19	73,20	73,35	73,57	73,65
14	Kota Solok	72,83	72,92	73,14	73,45	73,61
15	Kota Sawahlunto	69,33	69,39	69,59	69,87	70,00
16	Kota Padang Panjang	72,45	72,46	72,58	72,77	72,82
17	Kota Bukittinggi	73,60	73,69	73,91	74,22	74,38
18	Kota Payakumbuh	73,03	73,13	73,33	73,61	73,74
19	Kota Pariaman	69,63	69,67	69,87	70,15	70,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Sementara untuk perbandingan perkembangan UHH antar kabupaten/kota tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat, angkanya berkisar dari 74,38 tahun di Kota Bukittinggi hingga yang terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 64,73 tahun.

Perbandingan HLS antar kabupaten/kota tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat, HLS tertinggi berada di Kota Padang yaitu sebesar 16,52 tahun lebih tinggi dari HLS provinsi dan nasional, dan terendah di Kabupaten Sijunjung yaitu sebesar 12,7 Tahun. Perkembangan HLS Kabupaten/kota Se Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.38
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/kota Se Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (Tahun)

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	11,74	12,07	12,39	12,76	12,82
2	Kabupaten Pesisir Selatan	13,05	13,06	13,30	13,31	13,32
3	Kabupaten Solok	13,00	13,01	13,02	13,03	13,04
4	Kabupaten Sijunjung	12,27	12,34	12,35	12,36	12,37
5	Kabupaten Tanah Datar	13,46	13,59	13,88	14,32	14,33
6	Kabupaten Padang Pariaman	13,55	13,56	13,57	13,62	13,67
7	Kabupaten Agam	13,73	13,94	13,85	13,86	13,87
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	13,25	13,26	13,27	13,28	13,29
9	Kabupaten Pasaman	12,71	12,72	12,78	12,79	12,80
10	Kabupaten Solok Selatan	12,51	12,68	12,69	12,70	12,71
11	Kabupaten Dharmasraya	12,39	12,40	12,41	12,42	12,43
12	Kabupaten Pasaman Barat	12,67	13,06	13,22	13,40	13,61
13	Kota Padang	15,87	16,15	16,50	16,51	16,52
14	Kota Solok	14,28	14,29	14,30	14,31	14,32

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
15	Kota Sawahlunto	13,05	13,14	13,15	13,16	13,17
16	Kota Padang Panjang	15,02	15,03	15,04	15,05	15,06
17	Kota Bukittinggi	14,93	14,94	14,95	14,96	14,97
18	Kota Payakumbuh	14,22	14,23	14,24	14,25	14,26
19	Kota Pariaman	14,50	14,51	14,52	14,53	14,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Perbandingan RLS antar kabupaten/kota tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat, RLS tertinggi berada di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 11,62 tahun lebih tinggi dari RLS provinsi dan nasional, dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 7,09 Tahun. Perkembangan RLS Kabupaten/kota Se Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (Tahun)

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	6,52	6,69	6,95	7,08	7,09
2	Kabupaten Pesisir Selatan	8,12	8,13	8,14	8,25	8,26
3	Kabupaten Solok	7,58	7,60	7,84	7,85	7,86
4	Kabupaten Sijunjung	7,50	7,72	7,77	8,10	8,11
5	Kabupaten Tanah Datar	8,12	8,14	8,44	8,45	8,61
6	Kabupaten Padang Pariaman	7,00	7,21	7,50	7,86	7,87
7	Kabupaten Agam	8,18	8,39	8,69	8,85	8,96
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	7,92	7,96	7,97	7,98	7,99
9	Kabupaten Pasaman	7,64	7,65	7,66	7,86	8,09
10	Kabupaten Solok Selatan	7,99	8,00	8,15	8,16	8,28
11	Kabupaten Dharmasraya	8,23	8,24	8,25	8,46	8,47
12	Kabupaten Pasaman Barat	7,84	7,85	7,86	8,06	8,19
13	Kota Padang	11,24	11,32	11,33	11,34	11,58
14	Kota Solok	10,79	10,95	11,01	11,02	11,03
15	Kota Sawahlunto	9,92	9,93	9,94	9,97	10,17
16	Kota Padang Panjang	11,42	11,43	11,44	11,45	11,62
17	Kota Bukittinggi	10,98	11,30	11,31	11,32	11,33
18	Kota Payakumbuh	10,30	10,45	10,46	10,72	10,73
19	Kota Pariaman	10,09	10,10	10,36	10,37	10,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Perbandingan pengeluaran per kapita disesuaikan antar kabupaten/kota tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat, tertinggi berada di Kota Padang yaitu sebesar 14.481(Ribu Rp/Org/Th) lebih tinggi dari angka provinsi dan nasional, dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 6.281 (Ribu Rp/Org/Th). Perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan kabupaten/kota se Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Ribu Rp/Org/Th)

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	5.771	6.010	6.211	6.429	6.281
2	Kabupaten Pesisir Selatan	8.605	8.819	9.089	9.444	9.212
3	Kabupaten Solok	9.664	9.743	10.035	10.309	10.171
4	Kabupaten Sijunjung	9.895	10.093	10.277	10.395	10.361
5	Kabupaten Tanah Datar	10.296	10.331	10.417	10.709	10.588
6	Kabupaten Padang Pariaman	10.455	10.579	10.919	11.158	10.998

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
7	Kabupaten Agam	9.111	9.388	9.489	9.780	9.651
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	8.936	9.151	9.500	9.842	9.596
9	Kabupaten Pasaman	7.678	7.882	8.238	8.599	8.425
10	Kabupaten Solok Selatan	9.802	9.891	10.199	10.505	10.325
11	Kabupaten Dharmasraya	10.781	10.851	11.189	11.431	11.273
12	Kabupaten Pasaman Barat	8.393	8.704	8.979	9.180	9.047
13	Kota Padang	13.721	13.957	14.312	14.728	14.481
14	Kota Solok	11.519	11.673	11.968	12.337	12.117
15	Kota Sawahlunto	9.051	9.343	9.765	10.238	10.182
16	Kota Padang Panjang	9.804	10.240	10.440	11.013	10.734
17	Kota Bukittinggi	12.475	12.816	13.035	13.586	13.282
18	Kota Payakumbuh	12.705	12.858	13.114	13.464	13.281
19	Kota Pariaman	12.141	12.425	12.611	12.958	12.796

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2.2.8. Angka Kriminalitas

Penurunan angka kriminalitas terus diupayakan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan menurut jenis kejahatan di Sumatera Barat selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Jumlah Peristiwa Tindak yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan
di Sumatera Barat, 2016-2020

NO	KASUS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kejahatan terhadap Ketertiban	4	4	1	1	3
2	Kebakaran/Pembakaran	148	96	66	80	67
3	Perkosaan/melanggar kesopanan	57	53	32	30	31
4	Perjudian	245	202	177	145	107
5	Merusak	600	465	433	265	192
6	Pembunuhan	20	15	17	16	20
7	Penganiayaan	2.305	2.193	1.994	1.782	1.648
8	Penculikan	8	1	4	-	2
9	Pemerasan	336	305	149	131	98
10	Penggelapan	1.118	1.018	934	798	589
11	Penipuan	1.158	1.085	1.060	590	415
12	Penadahan	7	2	-	1	5
	Jumlah	6.006	5.439	4.867	3.839	3.177

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat (Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2021)

Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan menurut jenis kejahatan cenderung menurun, dari tahun 2016 yang tercatat sebanyak 6.006 kasus, menjadi 5.439 pada tahun 2017, turun menjadi 4.867 pada tahun 2018, dan terus menurun pada tahun 2019 dan 2020, yang masing-masing menjadi 3.839 dan 3.177 kasus. Jenis kejahatan terbanyak di Sumatera Barat setiap tahunnya adalah kasus penganiayaan yaitu lebih dari 40 persen selama periode 2016-2020, kecuali pada tahun 2016 sebesar 38,38%. Kasus penipuan merupakan kasus kedua terbanyak di Sumatera Barat, selanjutnya diikuti oleh kasus penggelapan. Sementara kasus yang paling sedikit di Provinsi Sumatera Barat adalah kasus penadahan dan kasus penculikan.

Untuk menurunkan angka kriminalitas, selain upaya kerja keras aparat keamanan juga dibutuhkan peran serta dari masyarakat. Berdasarkan jumlah kasus yang dilaporkan terus mengalami

penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, bisa diterjemahkan dengan dua kemungkinan; yaitu angka kriminalitas yang berhasil ditekan atau masyarakat yang tidak mau untuk melaporkan ke aparat terkait. Dengan demikian, dalam upaya menjaga kestabilan keamanan dan menekan jumlah kasus tersebut dibutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta melaporkannya.

2.2.9. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini terdiri atas 17 tujuan, yaitu:

Tujuan 1

Tanpa kemiskinan – Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat.

Tujuan 2

Tanpa kelaparan – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

Tujuan 3

Kehidupan sehat dan sejahtera – menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.

Tujuan 4

Pendidikan berkualitas – Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

Tujuan 5

Kesetaraan gender – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.

Tujuan 6

Air bersih dan sanitasi layak – Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

Tujuan 7

Energi bersih dan terjangkau – Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.

Tujuan 8

Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi – Mempromosikan pertumbuhan ekonom berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua.

Tujuan 9

Industri, inovasi dan infrastruktur – Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi.

Tujuan 10

Berkurangnya kesenjangan – Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.

Tujuan 11

Kota dan komunitas berkelanjutan – Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.

Tujuan 12

Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab – Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Tujuan 13

Penanganan perubahan iklim – Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.

Tujuan 14

Ekosistem laut – Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Tujuan 15

Ekosistem darat – Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

Tujuan 16

Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh – Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.

Tujuan 17

Kemitraan untuk mencapai tujuan – Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan secara umum dimaksudkan untuk menganalisis ketercapaian Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Implementasi TPB/SDGs di Indonesia untuk pencapaian 17 *goals* dengan pengembangan indikator TPB/SDGs 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

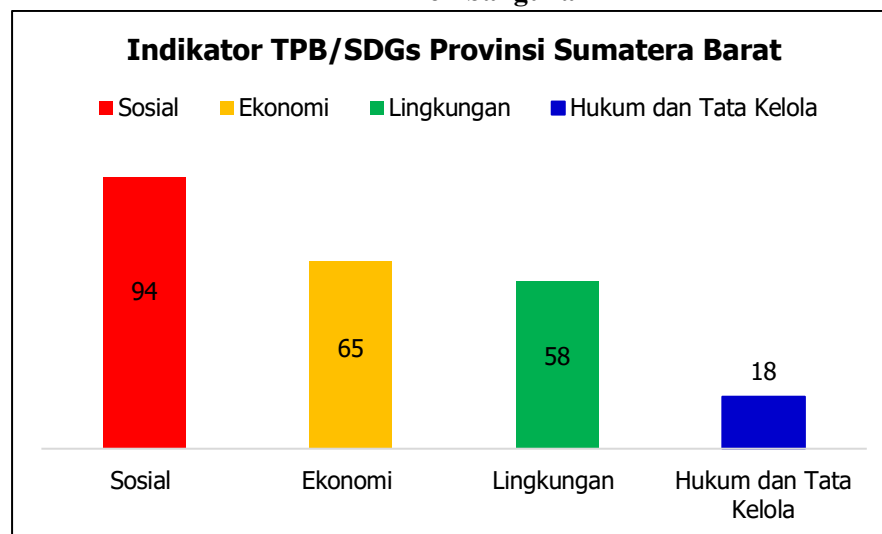
Analisis pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori:

a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS

- b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
- c. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA

Berdasarkan hasil analisis, capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan provinsi adalah 17 TPB. Jumlah indikator dari 17 TPB yang menjadi kewenangan provinsi adalah 235 indikator. Indikator-indikator ini kemudian dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar pembangunan yaitu: pilar sosial; pilar ekonomi; pilar lingkungan; dan pilar hukum dan tata kelola. Adapun indikator-indikator TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pilar pembangunan dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 2.8
Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Pilar Pembangunan



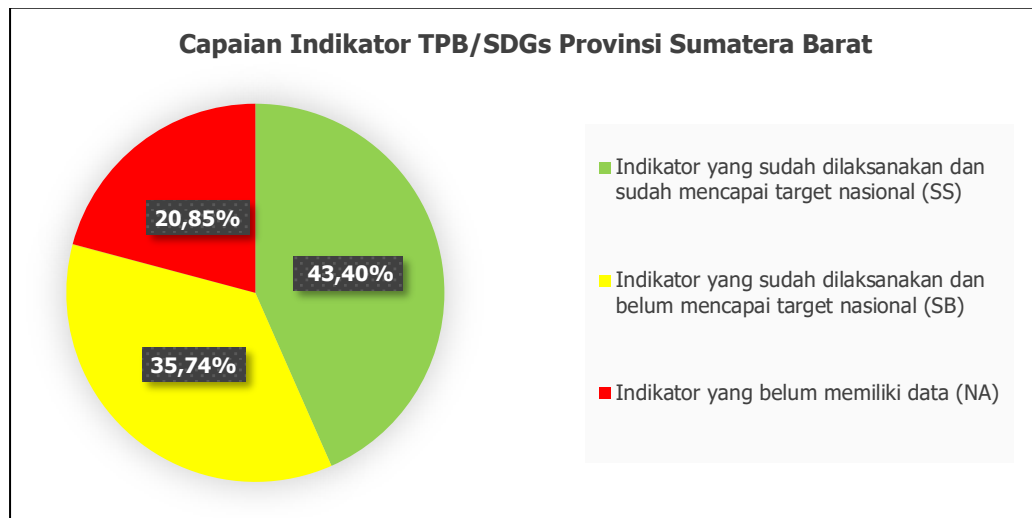
Kondisi Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) menghadapi berbagai tantangan. Berikut dapat dilihat capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan terhadap data indikator TPB/SDGs pada OPD yang berwenang dapat dilihat bahwa indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target adalah sebanyak 102 indikator (43,40%), indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target adalah sebanyak 84 indikator (35,74%), dan indikator yang belum memiliki data adalah sebanyak 49 indikator (20,85%). Pada tabel dan gambar berikut dapat dilihat proporsi capaian indikator TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.42
Capaian Indikator TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat

No	Kondisi Data	Jumlah	Persentase
1.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)	102	43,40%
2.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB)	84	35,74%
3.	Indikator yang belum memiliki data (NA)	49	20,85%
TOTAL		235	100%

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Prov. Sumbar 2021 - 2026, 2021

Gambar 2.9
Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs Terhadap Target Nasional



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Prov. Sumbar 2021 - 2026, 2021

2.2.9.1 Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS)

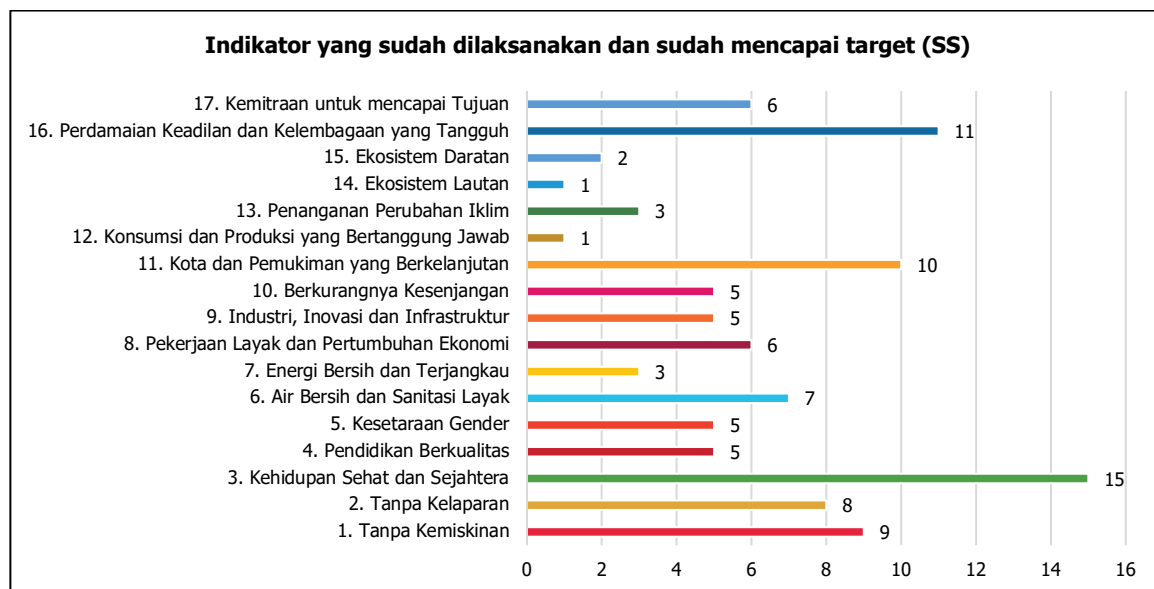
Berdasarkan hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target di Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 102 indikator atau dengan persentase 43,40%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.43
Jumlah Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Provinsi Sumatera Barat

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
1	Tanpa Kemiskinan	9	Sosial
2	Tanpa Kelaparan	8	Sosial
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	15	Sosial
4	Pendidikan Berkualitas	5	Sosial
5	Kesetaraan Gender	5	Sosial
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	7	Lingkungan
7	Energi Bersih dan Terjangkau	3	Ekonomi
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	6	Ekonomi
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	5	Ekonomi
10	Berkurangnya Kesenjangan	5	Ekonomi
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	10	Lingkungan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1	Lingkungan
13	Penanganan Perubahan Iklim	3	Lingkungan
14	Ekosistem Lautan	1	
15	Ekosistem Daratan	2	Lingkungan
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	11	Hukum dan Tata Kelola
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	6	Ekonomi
	Jumlah	102	

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Prov. Sumbar 2021 - 2026, 2021

Gambar 2.10
Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Provinsi Sumatera Barat



2.2.9.2 Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB)

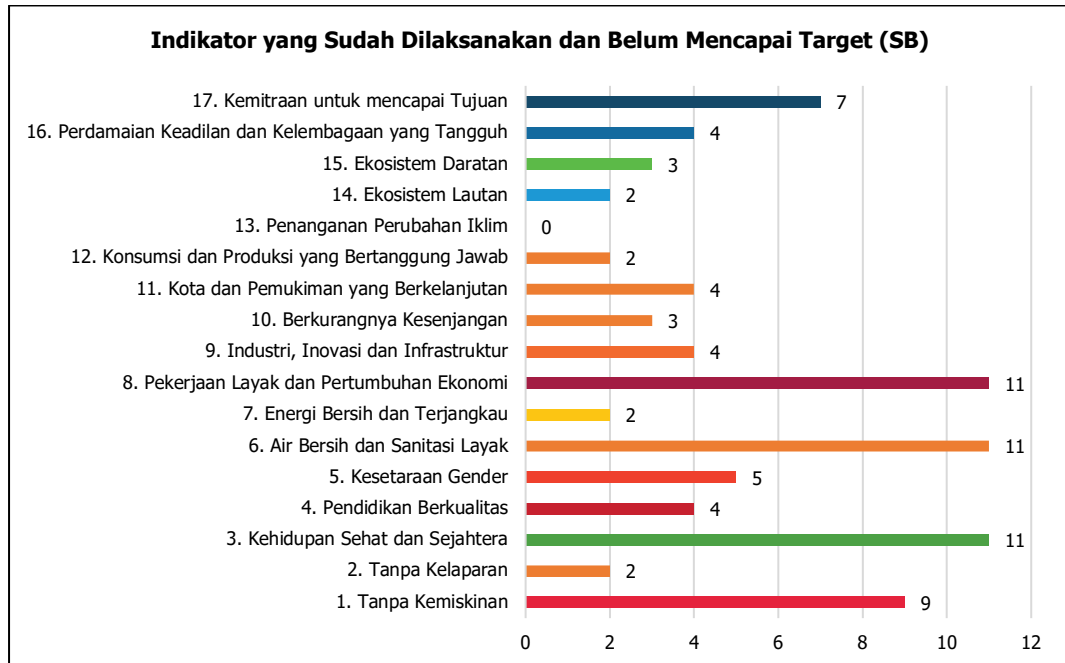
Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB) di Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 84 indikator atau dengan persentase 35,74%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 2.44
Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Provinsi Sumatera Barat

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
1	Tanpa Kemiskinan	9	Sosial
2	Tanpa Kelaparan	2	Sosial
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	11	Sosial
4	Pendidikan Berkualitas	4	Sosial
5	Kesetaraan Gender	5	Sosial
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	11	Lingkungan
7	Energi Bersih dan Terjangkau	2	Ekonomi
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	11	Ekonomi
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4	Ekonomi
10	Berkurangnya Kesenjangan	3	Ekonomi
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	4	Lingkungan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	2	Lingkungan
13	Penanganan Perubahan Iklim	0	Lingkungan
14	Ekosistem Lautan	2	Lingkungan
15	Ekosistem Daratan	3	Lingkungan
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	4	Hukum dan Tata Kelola
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	7	Ekonomi
	Jumlah	84	

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Prov. Sumbar 2021 - 2026, 2021

Gambar 2.11
Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Provinsi Sumatera Barat



2.2.9.3 Indikator yang Belum Memiliki Data (NA)

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang tidak memiliki data adalah sebanyak 50 indikator atau 23,40%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang tidak memiliki data dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut:

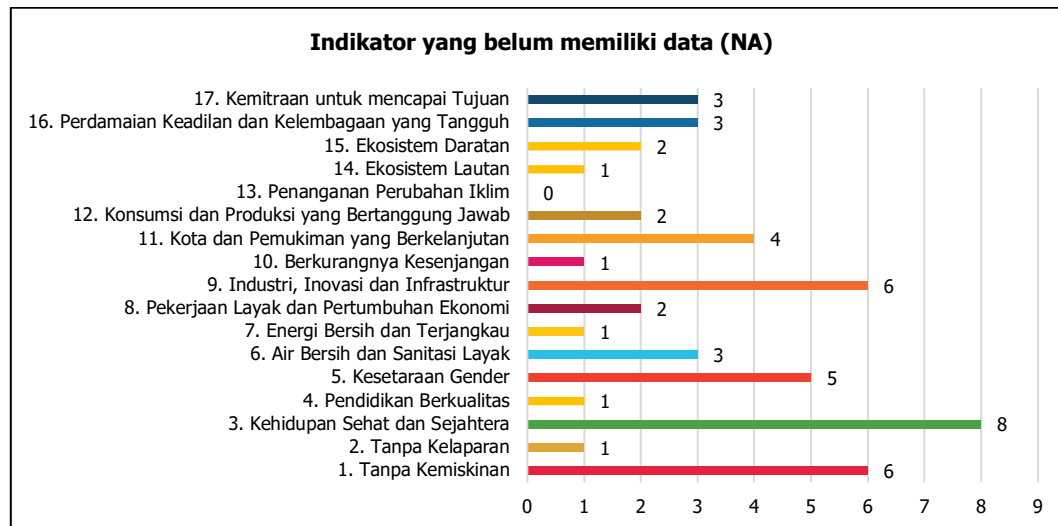
Tabel 2.45
Jumlah Indikator Pada Setiap TPB/SDGs yang Tidak Memiliki Data di Provinsi Sumatera Barat

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
1	Tanpa Kemiskinan	6	Sosial
2	Tanpa Kelaparan	1	Sosial
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	8	Sosial
4	Pendidikan Berkualitas	1	Sosial
5	Kesetaraan Gender	5	Sosial
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	3	Lingkungan
7	Energi Bersih dan Terjangkau	1	Ekonomi
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	2	Ekonomi
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	6	Ekonomi
10	Berkurangnya Kesenjangan	1	Ekonomi
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	4	Lingkungan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	2	Lingkungan
13	Penanganan Perubahan Iklim	0	Lingkungan
14	Ekosistem Lautan	1	Lingkungan
15	Ekosistem Daratan	2	Lingkungan
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	3	Hukum dan Tata Kelola

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	3	Ekonomi
	Jumlah	49	

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Prov. Sumbar 2021 - 2026, 2021

Gambar 2.12
Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Tidak Memiliki Data
di Provinsi Sumatera Barat



2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan serta unsur penunjang, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat sebanyak 6 (enam) urusan dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 18 (delapan belas) urusan, urusan pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

Hasil pelaksanaan pembangunan berdasarkan fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar selama kurun waktu 2016-2020 Provinsi Sumatera Barat secara umum memperlihatkan perkembangan kemajuan dan peningkatan yang cukup berarti. Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan :

2.3.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Perkembangan indikator pendidikan dari tahun 2016-2020 di Sumatera Barat antara lain diukur berdasarkan indikator Angka Partisipasi kasar (PUD/TK), Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A, APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B, APM SMA/SMLB/MA/Paket C, Angka

Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK, Angka Kelulusan SMA/SMK, SMA/SMALB/SMK yang terakreditasi, kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut

Perkembangan indikator capaian urusan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 adalah sebagaimana disajikan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.46
Perkembangan Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020

No	Aspek/fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
a	APK PAUD/TK (%)	68,15	43,61	70,25	43,61	72,18	75,33	74,6	35,89	76,2	40,4
b	APM SD/SDLB/MI/ Paket A (%)	99,58	95,72	99,59	93,69	99,6	89,13	99,61	88,25	99,62	83,47
c	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%)	81,2	79,74	81,25	79,39	81,3	71,73	81,35	70,65	81,5	75,58
d	APM SMA/SMALB/MA/Paket C (%)	73,15	66,74	73,2	72,45	73,25	71,53	73,25	71,67	73,3	73,13
e	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK (%)	0,81	1,08	0,78	0,77	0,73	0,70	0,68	0,65	0,63	0,65
f	Angka Kelulusan SMA(%)	99,05	99,14	97,35	99,24	97,42	99,33	97,57	99,15	98,25	98,58
g	Angka Kelulusan SMK (%)	98,70	98,94	97,30	99,30	97,35	98,91	97,52	99,16	98,15	95,98
h	SMA/SMALB/SMK yang terakreditasi (%)	72,23	52,40	73,67	53,90	75,14	74,10	76,65	75,75	78,18	77,16
i	Kompetensi tenaga pendidik (Guru SMA, SMK, PLB)(%)	59,93	63,62	65,18	65,18	70,43	68,74	75,68	78,02	80,93	89,50
j	Kompetensi tenaga kependidikan (Kepala sekolah dan pengawas sekolah, laboran, pustakawan dan pegawai TU Sekolah)(%)	16,67	17,82	19,17	19,17	22,05	21,78	25,35	50,65	33,53	53,50

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan APK PAUD/TK (%) terjadi penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan diantaranya karena masih kurangnya Sarpras PAUD di tingkat Kabupaten/kota, belum maksimalnya penataan kelembagaan PAUD dan rendahnya kesejahteraan GTT dan PTT di tingkat lembaga PAUD dan belum dilaksanakannya pendidikan ke-orangtuaan/ pendidikan keluarga sebagai implementasi kebijakan nasional. Selanjutnya, perkembangan APM SD/SDLB/MI/Paket A (%) juga menunjukan tren penurunan dan di tahun 2020 menjadi 83.47. Hal ini disebabkan karena kondisi seperti daerah

asal siswa sekolah, usia siswa saat mendaftar di sekolah, siswa tidak naik kelas/DO dan faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu.

Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa perkembangan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%) dari Tahun 2016-2020 terjadi fluktuasi naik dan turun. Namun pada Tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 75,58. Hal ini disebabkan antara lain karena faktor ekonomi keluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya, terjadinya perbedaan usia yang jauh dari usia ideal untuk siswa usia SMP sederajat dan putus sekolah atau DO (*drop out*). Untuk perkembangan APM SMA/SMALB/MA/Paket C (%) menunjukkan fluktuasi dan di tahun 2020 menjadi 73.13. Penurunan APM Pendidikan Menengah ini hanya terjadi di tahun 2018. Penyebab penurunan ini adalah adanya siswa putus sekolah atau DO (*drop out*) dalam masa pendidikannya faktor kesadaran masyarakat dan faktor kondisi ekonomi keluarga.

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK (%) dari Tahun 2016-2020 adalah terjadi penurunan setiap tahunnya, ini menandakan sudah adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi masih adanya angka putus sekolah adalah faktor ekonomi dari keluarga yang tidak mampu dan faktor kesadaran dari keluarga (yang masih mengutamakan faktor lain di luar pendidikan).

Sedangkan Angka Kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan, angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Perkembangan Angka Kelulusan SMA (%) yang terjadi dari Tahun 2016-2020 adalah terjadi kenaikan sampai tahun 2018, kemudian turun di tahun 2019 dan 2020, yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain standar kelulusan minimal tahun tersebut masih terlalu tinggi.. Untuk angka Kelulusan SMK (%), terjadi fluktuasi juga dan penurunan terjadi di tahun 2018 dan 2020, hal ini bisa disebabkan karena faktor standar kelulusan minimal masih tinggi. Sementara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, untuk Ujian Nasional terakhir dilaksanakan pada Tahun 2019 untuk pendidikan menengah dan ditiadakan untuk tahun berikutnya.

Guna mengukur mutu layanan pendidikan yang diberikan maka indikator SMA/SMALB/SMK yang terakreditasi. Akreditasi merupakan sebuah pengakuan yang diberikan oleh Badan yang berwenang bahwa layanan pendidikan yang diberikan telah memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Namun demikian, penilaian akreditasi juga merupakan evaluasi yang dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk perlu fokus pada investasi perbaikan sekolah yang belum terakreditasi maupun yang belum mencapai nilai maksimal dalam pencapaian akreditasi. Dan kepada masyarakat juga dapat memberikan informasi mengenai kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang berkualitas dengan didorong oleh manajemen sekolah serta kelengkapan sarana dan prasarana. Perkembangan SMA/SMALB/SMK yang terakreditasi (%) dari Tahun 2016-2020 menunjukkan tren kenaikan setiap tahun, dan menjadi 77.16 di tahun 2020. Harapan ke depan terjadinya peningkatan sekolah terakreditasi Tingkat SMA/SMALB/SMK.

Selanjutnya juga dapat dilihat perkembangan kualifikasi Tenaga Pendidik (Guru SMA, SMK, PLB) (%) dari Tahun 2016-2020 menunjukkan tren kenaikan dan di tahun 2020 mencapai 89.50. Terjadi kenaikan kualifikasi Tenaga Pendidik (Guru SMA, SMK, PLB) setiap tahunnya. Harapan ke depan untuk tahun-tahun berikutnya terjadi kenaikan yang signifikan untuk dapat memacu mutu pendidikan di sekolah. Sedangkan untuk perkembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Laboran, Pustakawan, dan pegawai TU sekolah) (%) dari Tahun

2016-2020 juga menunjukkan tren peningkatan dan di tahun 2020 sebesar menjadi 53.50. Kenaikan terjadi setiap tahunnya. Harapan ke depan terjadi peningkatan setiap tahunnya yang nantinya juga akan terdapat korelasi dengan operasional sekolah sesuai Standar Pendidikan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diterapkan di Satuan Pendidikan.

Sedangkan kuantitas dan distribusi tenaga pendidik untuk pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 dapat digambarkan pada tabel berikut dibawah :

Tabel 2.47
Kebutuhan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

No	Kabupaten/Kota	Kekurangan Guru
1	Kabupaten Agam	192
2	Kabupaten Dharmasraya	147
3	Kabupaten Kep. Mentawai	134
4	Kabupaten Limapuluh Kota	82
5	Kabupaten Padang Pariaman	122
6	Kabupaten Pasaman	107
7	Kabupaten pasaman Barat	136
8	Kabupaten Pesisir Selatan	281
9	Kabupaten Sijunjung	87
10	Kabupaten Solok	202
11	Kabupaten Solok Selatan	135
12	Kabupaten Tanah Datar	158
13	Kota Bukittinggi	69
14	Kota Padang	172
15	Kota Padang Panjang	8
16	Kota Pariaman	70
17	Kota Payakumbuh	102
18	Kota Sawahlunto	13
19	Kota Solok	3
TOTAL		2.220

Sumber : Analisis Kebutuhan Guru Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan guru di Provinsi Sumatera Barat untuk jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus adalah sebanyak 2.220 orang.

Tabel 2.48
Tenaga Kependidikan di daerah 3T

NO	Kabupaten/Kota	PNS		NON PNS		JUMLAH
		Guru	Tenaga Kependidikan	Guru	Tenaga Kependidikan	
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	256	0	114	3	373
2	Kabupaten Sijunjung	36	0	20	0	56
3	Kabupaten Pasaman	45	0	32	1	78
4	Kabupaten Pasaman Barat	43	0	26	0	69
5	Kabupaten Solok	37	0	11	0	48
6	Kabupaten Solok Selatan	73	3	34	4	114

NO	Kabupaten/Kota	PNS		NON PNS		JUMLAH
		Guru	Tenaga Kependidikan	Guru	Tenaga Kependidikan	
7	Kabupaten Dharmasraya	19	0	16	1	36
	Total	509	3	253	9	774

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Kondisi di Sumatera Barat saat ini masih terbatasnya sarana dan prasarana Pendidikan untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan standar akreditasi. Standar Sarana dan Prasarana (Standar Sarpras) adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Sarana dan prasarana sekolah yang menjadi kewenangan provinsi yakni SMA, SMK dan SLB, untuk menampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah masih terkendala dalam ketersediaan ruang kelas yang ber kondisi rusak berat, rusak ringan dan keterbatasan ruang kelas, melihat aturan dalam zonasi masih terbatanya ruang kelas sesuai dengan aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Data Sarana Dan Prasarana Pendidikan Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	RUANG KELAS/ RUANG KEPALA SEKOLAH/TU				RUANG PERPUSTAKAAN				LABOR KOMPUTER/ BAHASA/IPA/BIOLOGI/ FISIKA			
		Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total
1	Kabupaten Agam	496	0	0	0	24	0	0	0	73	0	0	0
2	Kabupaten Dharmasraya	457	0	0	0	17	0	0	0	36	0	0	0
3	Kabupaten Kep. Mentawai	445	0	0	0	10	0	0	0	27	0	0	0
4	Kabupaten Limapuluh Kota	460	0	0	0	17	0	0	0	40	0	0	0
5	Kabupaten Padang Pariaman	473	0	0	0	22	1	0	0	69	1	0	0
6	Kabupaten Pasaman	445	0	0	0	6	0	0	0	24	0	0	2
7	Kabupaten pasaman Barat	503	0	0	0	25	1	0	0	66	0	0	0
8	Kabupaten Pesisir Selatan	495	0	0	0	32	0	0	0	86	0	0	0
9	Kabupaten Sijunjung	446	0	0	0	9	0	0	0	32	0	0	0
10	Kabupaten Solok	482	0	0	0	20	0	2	0	50	0	2	0
11	Kabupaten Solok Selatan	450	0	2	0	10	0	0	0	21	0	2	0
12	Kabupaten Tanah Datar	462	0	0	0	19	0	0	0	58	0	0	0
13	Kota Bukittinggi	468	0	0	0	21	0	0	0	50	0	0	0
14	Kota Padang	541	0	1	0	49	0	0	0	150	0	0	0
15	Kota Padang Panjang	440	0	0	0	5	0	0	0	13	0	0	0
16	Kota Pariaman	457	0	0	0	12	0	0	0	37	0	0	0
17	Kota Payakumbuh	476	0	0	0	12	0	0	0	48	0	0	0
18	Kota Sawahlunto	432	0	0	0	3	0	0	0	7	0	0	0

No	Kabupaten/Kota	RUANG KELAS/ RUANG KEPALA SEKOLAH/TU				RUANG PERPUSTAKAAN				LABOR KOMPUTER/ BAHASA/IPA/BIOLOGI/ FISIKA			
		Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total
19	Kota Solok	452	0	0	0	10	0	0	0	25	0	1	0
TOTAL		8880	0	3	0	323	2	2	0	912	1	5	2

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Untuk itu perlu adanya perencanaan kebutuhan sarana prasarana pada satuan pendidikan secara valid dan penerapan skala prioritas dalam alokasi anggaran yang bertujuan untuk pemerataan sarana prasarana pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, terutama peningkatan mutu sarana sanitasi, pembangunan laboratorium, perpustakaan, ruang komputer, ruang ibadah dan penyediaan sarana pendukung ibadah.

Sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan satuan Pendidikan yang berada dibawah kewenangan provinsi. Dalam rangka mendukung pendidikan vokasi di Sumatera Barat maka jumlah SMK yang berada di Sumatera Barat sebanyak 211 SMK yang terdiri dari 111 SMK Negeri dan 100 SMK Swasta dengan rincian sebaran pada masing-masing Kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Jumlah dan Sebaran Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Sumatera barat tahun 2020

No	Kab/Kota	Sekolah SMK		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kab. Agam	10	3	13
2	Kab. Dharmasraya	8	1	9
3	Kab. Lima Puluh Koto	6	1	7
4	Kab. Pasaman	6	2	8
5	Kab. Pasaman Barat	9	10	19
6	Kab. Pesisir Selatan	9	8	17
7	Kab. Sijunjung	8	3	11
8	Kab. Solok	9	4	13
9	Kab. Solok Selatan	5	1	6
10	Kab. Tanah Datar	5	3	8
11	Kota Bukittinggi	2	9	11
12	Kota Padang	12	30	42
13	Kota Padang Panjang	2	2	4
14	Kota Pariaman	4	4	8
15	Kota Payakumbuh	4	5	9
16	Kota Sawah Lunto	2	1	3
17	Kota Solok	3	2	5
18	Kab. Kep. Mentawai	3	0	3
19	Kab. Padang Pariaman	4	11	15
Total		111	100	211

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa daerah-daerah yang perlu peningkatan jumlah SMK adalah Kab. Mentawai, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Dharmasraya, Kab. Lima Puluh

Kota, Kab. Pasaman, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan dan Kab. Tanah Datar. Sedangkan data bidang keahlian yang ada pada SMK di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.51
Jumlah Bidang Keahlian pada SMK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Bidang Keahlian	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Program Keahlian
1. Teknologi dan Rekayasa	102
2. Teknik Informasi dan Komunikasi	2
3. Kesehatan	89
4. Agribisnis dan Agroteknologi	9
5. Perikanan dan Kelautan	22
6. Bisnis dan Manajemen	10
7. Pariwisata	99
8. Seni Rupa dan Kriya	31
9. Seni Pertunjukan	10

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel diatas, sebaran Spektrum Keahlian pada SMK yang ada di Sumatera Barat tidak merata dan lebih banyak menumpuk pada satu bidang saja yakni Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa. Data diatas juga memperlihatkan bahwa SMK yang ada belum banyak yang bidang keahliannya berbasis potensi daerah seperti masih kurangnya SMK dibidang Agribisnis dan Agro teknologi. Sedangkan untuk jurusan Pendidikan yang ramah dunia kerja juga masih kurans seperti Teknik informasi dan komunikasi, bisnis dan manajemen dan Seni rupa dan kriya.

Dalam era revolusi industri 4.0 saat ini serta dengan adanya pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 maka proses pembelajaran melalui media elektronik (digitalisasi pendidikan) merupakan hal yang mutlak untuk dimanfaatkan sebagai adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Integrasi antara pendidikan dengan teknologi akan memberikan revolusi terhadap proses belajar mengajar. Digitalisasi pendidikan merupakan upaya untuk menunjang proses ajar-mengajar secara virtual tanpa mengurangi esensi dalam penyampaian materi pembelajaran. Pemanfaatan berbagai macam platform online dianggap sebagai fasilitas yang dapat digunakan secara fleksibel. Situasi Pandemi Covid-19 mempercepat transformasi pendidikan ke arah digital. Pembelajaran daring telah menumbuhkan ekosistem pembelajaran digital secara signifikan.

Meskipun digitalisasi pendidikan diharapkan sebagai terobosan baru di masa pandemi seperti saat ini, akan tetapi banyak permasalahan yang muncul, sehingga memberikan hambatan saat proses pembelajaran tersebut seperti kemampuan SDM guru dan murid dalam menerapkan informasi teknologi dan paling penting adalah ketersediaan infrastruktur internet. Untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat masih terdapat kendala jaringan internet sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut di bawah:

Tabel 2.52
Daftar Sekolah Blankspot Internet SMA, SMK, SLB Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Nama Sekolah
1	Kab. Kepulauan Mentawai	Pagai Selatan	SMA NEGERI 1 PAGAI SELATAN
2	Kab. Kepulauan Mentawai	Pagai Utara	SMA NEGERI 1 PAGAI UTARA
3	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	SMA NEGERI 1 SIBERUT BARAT
4	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat Daya	SMA NEGERI 1 SIBERUT BARAT DAYA
5	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Selatan	SMA LENTERA MENTAWAI
6	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Selatan	SMAN 1 SIBERUT SELATAN
7	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Selatan	SMK NEGERI 2 KEPULAUAN MENTAWAI
8	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Tengah	SMAN 1 SIBERUT TENGAH
9	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Utara	SMAN 1 SIBERUT UTARA
10	Kab. Kepulauan Mentawai	Sikakap	SMA NEGERI 2 SIKAKAP
11	Kab. Kepulauan Mentawai	Sikakap	SMAN 1 PAGAI UTARA SELATAN
12	Kab. Kepulauan Mentawai	Sikakap	SMK NEGERI 3 KEPULAUAN MENTAWAI
13	Kab. Kepulauan Mentawai	Sipora Selatan	SMAN 1 SIPORA
14	Kab. Kepulauan Mentawai	Sipora Selatan	SMK NEGERI 1 KEPULAUAN MENTAWAI
15	Kab. Kepulauan Mentawai	Sipora Utara	SLB BINA LAGGAI MENTAWAI
16	Kab. Kepulauan Mentawai	Sipora Utara	SLB MUTIARA BANGSA PRATAMA MENTAWAI
17	Kab. Kepulauan Mentawai	Sipora Utara	SMAN 2 SIPORA
18	Kab. Kepulauan Mentawai	Sipora Utara	SMAS PLUS SETIA
19	Kab. Pasaman	Mapat Tunggul Selatan	SMAN MAPAT TUNGGUL SELATAN
20	Kab. Solok	Tigo Lurah	SMAN 1 TIGO LURAH
21	Kab. Solok	Hiliran Gumanti	SMAN 2 HILIRAN GUMANTI

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera barat

Berdasarkan tabel diatas terlihat masih terdapat sekolah yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal transformasi digital pendidikan di Sumatera Barat yaitu 11 SMA Negeri, 2 SMA Swasta, 3 SMK Negeri dan 2 SLB Swasta untuk daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 1 SMA di Kabupaten Pasaman dan 2 sekolah di Kabupaten Solok.

2.3.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan layanan dasar kesehatan yang berkualitas. Untuk mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas tersebut dilakukan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan. Peningkatan layanan kesehatan yang dilakukan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat difokuskan kepada tindakan promotif dan preventif sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan lebih bersifat kuratif dan rehabilitatif.

Salah satu faktor pendukung capaian layanan kesehatan berkualitas adalah tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai standar di berbagai tingkat layanan sehingga bisa memberikan jaminan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat seperti: rumah sakit, Puskesmas, Poskesdes, Posyandu, maupun klinik/praktek. Untuk mewujudkan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar dilakukan melalui akreditasi sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit, salah satunya akreditasi rumah sakit Provinsi Sumatera Barat dan mendorong masing-masing kabupaten/kota untuk memiliki 1 (satu) rumah sakit yang terakreditasi

Dari tabel 2.39 memperlihatkan pencapaian rumah sakit provinsi yang terakreditasi sudah memenuhi target yang ditetapkan dengan telah terakreditasinya 4 (empat) rumah sakit Provinsi Sumatera Barat untuk tingkat paripurna pada tahun 2020 yakni: Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir Solok, Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, dan Rumah Sakit Jiwa HB. Saanin Padang.

Pemenuhan layanan kesehatan ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial yang dilakukan melalui peningkatan cakupan *Universal Health Coverage*. Peningkatan cakupan ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Provinsi Sumatera Barat.

Perkembangan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015-2020 menunjukkan persentase peningkatan walaupun secara target tahunan belum terpenuhi. Berdasarkan data capaian tahun 2020 menunjukkan persentase kepesertaan masyarakat dalam sistem jaminan sosial nasional adalah 81,25%.

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat adalah melalui Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS) dengan mentargetkan kepada masyarakat kurang mampu dan miskin. Penduduk yang masuk kategori kurang mampu dan miskin di subsidi melalui *sharing* (atau "bagi") pendanaan antara APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBD kabupaten/kota. Pada APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 telah di alokasi anggaran sebesar Rp. 55.763.390.731 dengan realisasi sebesar Rp. 50.774.953.900 atau 91,05%

Perkembangan capaian layanan kesehatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Pencapaian Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
a	Rumah sakit provinsi terakreditasi (rumah sakit)	1 RSAM	0	4 RSAM, RSUD Solok, Pariaman RSJ HB Saanin	4 RSAM, RSUD Solok, Pariaman RSJ HB Saanin	4 RSAM, RSUD Solok, Pariaman RSJ HB Saanin	4 RSAM, RSUD Solok, Pariaman RSJ HB Saanin	4 RSAM, RSUD Solok, Pariaman, RSJ HB Saanin	4 RSAM, RSUD Solok, Pariaman RSJ HB Saanin	4 RSAM, RSUD Solok, Pariaman RSJ HB Saanin	4 RSAM, RSUD Solok, Pariaman RSJ HB Saanin
b	Kepesertaan sistem jaminan sosial nasional BPJS Kesehatan (%)	73,96	73,96	81,72	70,56	89,48	80,1	100	80,76	100	81.25

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
c	Persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (%)	87	79,64	88	80,36	89	80,89	90	81,18	90	76,30
d	Kunjungan neonatal (KN1) (%)	76	84,35	87	85,99	88	85,48	89	85,21	90	79,80
e	Prevalensi gizi kurang (berat badan / tinggi badan)	4,8	8,9	4,7	10,1	4,65	11,3	4,6	6,22	4,55	6,1
f	Sarana air minum yang dilakukan pengawasan (%)	50	71,71	54	72,68	54	35,03	56	70,7	58	63,2
g	Anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (%)	91	78,3	91,5	81,3	92	74,2	92,5	78,9	93	56,2
h	Jumlah Kabupaten/kota dengan API (Annual Parasite Index)	18	18	18	18	18	18	19	18	19	19
i	Kabupaten/kota dengan incident rate DBD < 49 per 100.000 penduduk (%)	42	15,79	64	47,7	66	63,16	68	57,89	70	89,47
j	Jumlah puskesmas yang terakreditasi minimal 1 per kecamatan	1	56	56	106	96	247	131	271	156	271
k	Jumlah rumah sakit pemerintah yang terakreditasi minimal 1 per kabupaten/kota	2	2	3	12	4	6	4	4	4	4

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Rasio ketersediaan tempat tidur pada 4 (empat) rumah sakit provinsi yang ada di Sumatera Barat per 1.000 penduduk sangat jauh dari ideal yaitu dengan rasio 1 : 1,17, sementara tren rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit provinsi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah rata-rata 0,20 tempat tidur per 1.000 penduduk, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Provinsi
Dibandingkan Dengan Jumlah Penduduk Sumatera Barat

No	Rumah Sakit	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Tempat Tidur	Rasio	Tempat Tidur	Rasio	Tempat Tidur	Rasio	Tempat Tidur	Rasio	Tempat Tidur	Rasio
1	Achmad Mochtar	402	0,08	402	0,07	402	0,07	402	0,07	402	0,07
2	M. Natsir	292	0,06	292	0,05	292	0,05	292	0,04	292	0,05
3	RSUD Pariaman	211	0,04	211	0,03	211	0,03	211	0,03	211	0,03
4	RSJ. HB. Saaanin	320	0,06	320	0,06	320	0,05	320	0,05	320	0,05
	Jumlah	1.225	0,24	1.225	0,21	1.225	0,2	1.225	0,19	1.225	0,2

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Rasio ketersediaan tempat tidur pada rumah sakit milik pemerintah di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah 32 Rumah Sakit per 1000 penduduk sangat mendekati ideal dari tahun 2016

sampai dengan tahun 2019 yaitu dengan rasio 1 : 1,17, sementara tren rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit pemerintah di tahun 2020 terjadi penambahan jumlah rumah sakit yaitu 3 rumah sakit sehingga pemenuhan tempat tidur per 1000 penduduk sudah mencapai ideal yaitu 1 : 1,3. Sedangkan rasio ketersediaan tempat tidur pada rumah sakit swasta di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah 44 Rumah Sakit per 1000 penduduk sangat jauh dari ideal yaitu dengan rasio 1 : 1,17, sementara tren rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit provinsi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah rata-rata 0,42 tempat tidur per 1000 penduduk, walaupun di tahun 2020 telah terjadi penambahan satu rumah sakit tetapi belum memenuhi ideal pemenuhan tempat tidur, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.55
Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Pemerintah Provinsi dan Swasta
Dibandingkan Dengan Jumlah Penduduk Sumatera Barat

No	Rumah Sakit	TAHUN									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Tempat Tidur	Rasio	Tempat Tidur	Rasio	Tempat Tidur	Rasio	Tempat Tidur	Rasio	Tempat Tidur	Rasio
1	Pemerintah	5.160	0,98	5.160	0,96	5.160	0,95	5.209	0,95	7.708	1,3
2	Swasta	2.299	0,43	2.299	0,43	2.299	0,42	2.299	0,42	2.349	0,42
	Jumlah	7.459	1,41	7.459	1,39	7.459	1,37	7.508	1,37	10.057	1,72

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Setelah pemenuhan peningkatan mutu layanan kesehatan tentu diharapkan adanya korelasi dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat seperti meningkatnya kesehatan ibu dan anak yang diperlihatkan oleh penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan mendorong peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, peningkatan Kunjungan Neonatal pertama (KN1). Dikarenakan tidak tersedianya data angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Sumatera Barat maka data yang digunakan adalah jumlah kasus kematian ibu terutama saat melahirkan serta jumlah kasus kematian bayi. Adapun perkembangan kasus tersebut sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.56
Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Kep Mentawai	6	6	5	3	6
2	kab. Pesisir Selatan	6	8	12	8	9
3	Kab. Solok	11	4	10	14	12
4	Kab. Sijunjung	4	6	5	6	7
5	Kab. Tanah Datar	6	6	11	5	6
6	Kab. Padang Pariaman	2	1	2	6	3
7	Kab. Agam	7	10	12	7	9
8	Kab. Lima Puluh Kota	6	8	2	11	6
9	Kab. Pasaman	5	9	7	10	4
10	Kab. Solok Selatan	5	3	8	4	6
11	Kab. Dharmasraya	4	8	4	6	3
12	Kab. Pasaman Barat	16	20	13	8	18
13	Kota Padang	20	16	17	16	21
14	Kota Solok	2	0	0	1	1

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
15	Kota Sawahlunto	3	0	0	3	2
16	Kota Padang Panjang	0	3	0	0	4
17	Kota Bukittinggi	3	1	2	2	6
18	Kota Payakumbuh	2	3	1	2	2
19	Kota Pariaman	0	1	0	4	0
	Sumatera Barat	108	113	111	116	125

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel tersebut diatas terlihat terdapat peningkatan kematian ibu, penyebab kematian secara langsung disebabkan oleh perdarahan *post partum*, dan hipertensi dalam kehamilan, sedangkan secara tidak langsung disebabkan oleh masih ada persalinan dilaksanakan oleh tenaga non Kesehatan dan kompetensi tenaga Kesehatan masih kurang serta akses pelayanan Kesehatan yang terbatas.

Tabel 2.57
Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Kep Mentawai	27	34	6	39	34
2	kab. Pesisir Selatan	48	54	94	78	65
3	Kab. Solok	80	83	63	60	66
4	Kab. Sijunjung	70	80	70	58	64
5	Kab. Tanah Datar	70	39	37	48	44
6	Kab. Padang Pariaman	31	27	18	30	27
7	Kab. Agam	84	64	70	75	70
8	Kab. 50 Kota	83	48	61	60	60
9	Kab. Pasaman	24	51	36	31	42
10	Kab. Solok Selatan	22	22	14	10	23
11	Kab. Dharmasraya	54	44	58	52	46
12	Kab. Pasaman Barat	102	78	74	94	95
13	Padang	111	89	91	106	78
14	Solok	13	10	8	7	8
15	Sawahlunto	20	14	15	14	19
16	Padang Panjang	13	12	13	7	3
17	Bukittinggi	12	5	2	10	6
18	Payakumbuh	19	13	16	9	19
19	Pariaman	25	13	25	17	6
	Sumatera Barat	908	780	771	805	775

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel diatas, terlihat dari tahun 2016-2018 terjadi penurunan angka kematian bayi yakni dari 908 bayi menjadi 771 bayi, sedangkan tahun 2019 terjadi kenaikan angka kematian bayi, hal ini disebabkan oleh Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia (Gangguan Pernafasan).

Realisasi capaian Provinsi Sumatera Barat terkait dengan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan cenderung berfluktuasi. Pada periode tahun 2016-2019 terdapat peningkatan

persalinan oleh tenaga kesehatan, sedangkan untuk capaian tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 81,18% menurun menjadi sebesar 76,30%.

Penurunan capaian persentase persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan disebabkan antara lain: Adanya situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2020, masih adanya persalinan di Polindes, kesulitan akses Ibu Bersalin ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang pada umumnya disebabkan oleh faktor geografis, tenaga kesehatan yang tidak berada ditempat, kompetensi tenaga kesehatan yang belum maksimal serta masih adanya persalinan yang dilakukan oleh dukun.

Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) adalah kunjungan bayi pasca kelahiran ke sarana layanan kesehatan untuk mendapatkan layanan dari tenaga medis. Capaian Kunjungan Neonatal akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan Angka Kematian Bayi (AKB). Persentase capaian Kunjungan Neonatal tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2019, yakni dari 85,21% turun menjadi 79,80%.

Beberapa faktor penghambat capaian Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) antara lain adalah: pandemi COVID-19, masih adanya persalinan dengan menggunakan tenaga non kesehatan, masih terdapatnya kesulitan akses ke Pelayanan Kesehatan yang pada umumnya disebabkan akibat kondisi geografis yang sulit, tenaga kesehatan tidak berada ditempat, kompetensi tenaga kesehatan yang belum maksimal serta pelayanan Neonatus yang belum memenuhi sesuai standar.

Dari sisi *stunting*, prevalensi *stunting* Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 yakni 27,47%. Capaian prevalensi *stunting* Provinsi Sumatera Barat ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan standar WHO sebesar 20% dan capaian nasional sebesar 27,67%. Untuk data prevalensi tahun 2020 secara nasional tidak tersedia karena Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2020 tidak melakukan pengukuran antropometri pada balita disebabkan adanya pandemi COVID-19, sehingga untuk data prevalensi dipakai data surveillance gizi dari aplikasi ePPGM.

Selain itu, dari sisi cakupan gizi bahwa capaian Prevalensi gizi kurang (berat badan/tinggi badan) di Sumatera Barat pada tahun 2020 mencapai 6,1%. Capaian ini menurun sedikit dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 6,22% disebabkan oleh beberapa faktor yaitu akses ke pelayanan kesehatan masih sulit pada beberapa wilayah dikarenakan kondisi geografis, masih rendahnya pengetahuan Ibu yang memiliki balita terkait dengan asupan gizi yang harus dipenuhi anak terutama pada 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), masih rendahnya capaian pemberian ASI eksklusif, pola asuh yang belum tepat dalam pengasuhan anak antara lain disebabkan dengan beban ganda perempuan yang juga turut bekerja/mencari nafkah yang menyebabkan pengasuhan anak diserahkan kepada pihak lain seperti pengasuh/nenek/kakek yang juga memiliki kemampuan terbatas terkait dengan pemberian gizi yang cukup dan seimbang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, yaitu masalah status gizi buruk dan gizi kurang disebut Wasting, adapun persentase wasting Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.58
Persentase Wasting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Tahun	Sumbar (%)	Sumber Data
2016	8.9	Pemantauan Status Gizi (PSG)
2017	10.1	Pemantauan Status Gizi (PSG)
2018	11.3	Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)

Tahun	Sumbar (%)	Sumber Data
2019*	6.0	Aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) 2019 (* data surveilans)
2020*	6.1	Aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) 2020 (* data surveilans)

Dari tabel tersebut, dapat dilihat terdapat kenaikan prevalensi wasting dari tahun 2016 sampai tahun 2018 yakni dari 8,9%-11,3%. Peningkatan ini disebabkan oleh praktek dan perilaku Pengasuhan Gizi pada Ibu dan Anak belum optimal, masalah lingkungan dimana masih belum terpenuhinya penyediaan air bersih dan sarana sanitasi di Rumah Tangga sehingga masalah penyakit infeksi masih terjadi, belum optimalnya koordinasi Lintas Sektor terkait di setiap tingkatan dalam intervensi gizi dan ketersediaan pangan bergizi di Rumah Tangga terutama keluarga tidak mampu. Pada tahun 2019 dan 2020 tidak dilaksanakan survei status gizi Indonesia sehingga data wasting didapatkan dari e-PPGBM (data surveilans).

Masih tingginya kejadian penyakit tidak menular disebabkan karena gaya hidup dan perilaku masyarakat yang tidak menerapkan pola hidup sehat. sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Jumlah Kejadian Penyakit Tidak Menular Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020

No	Jenis penyakit	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Stroke	11,453	10,947	7,249	11,514	9,854
2	Jantung	19,860	31,182	28,694	24,324	20,095
3	Hipertensi	17,274	21,064	26,284	21,011	18,272
4	Gagal Ginjal	4,200	9,757	12,916	13,732	7,202
5	Diabetes Melitus	17,158	17,603	21,991	21,758	13,689
6	Tyroid	1,723	2,293	2,491	2,648	2,157
7	Paru Kronik	7,595	12,093	14,389	10,999	7,054
8	Asma	3,821	4,181	4,639	6,606	4,076
9	Kanker	3,382	3,924	4,123	4,613	2,937
	Jumlah	86,466	113,044	122,776	117,205	85,336

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam pengendalian penyakit menular adalah pengendalian faktor resiko melalui upaya berhenti merokok dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Tabel 2.60
Jumlah Kejadian Penyakit Menular Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020

No	Indikator	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Malaria yang Diobati ACT (%)	>92	100	>93	100	>94	99,9	>95	100	>96	100
2	Persentase Kasus HIV Diobati	75	89	76	76	77	78	79	80	88	87
3	Persentase Penemuan Kasus Tuberkulosis(CDR)	46	45	50	32	55	46	60	53	65	26

No	Indikator	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
4	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB PARU BTA POSITIF (SUCCESS RATE)	68	68,42	75	80	>80	87	>85	90	>87	87

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian indikator Presentase Malaria yang diobati dengan ACT/pengobatan Malaria sesuai standar mulai tahun 2016 sampai 2020 sudah mencapai target. Pencapaian target dari program malaria ini disebabkan karena :

- 1) Kasus malaria sudah turun.
- 2) Pada tahun 2019 Kabupaten/Kota yang sudah Eliminasi malaria sebanyak 17 kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang belum eliminasi adalah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 3) Setiap ada kasus malaria dilakukan penyelidikan Epidemiologi.
- 4) Setiap tahun dilakukan pada Kabupaten/ Kota terpilih pemetaan vektor dan MBS.

Capaian indikator Presentase kasus HIV yang diobati mulai tahun 2016 sampai 2020 capaiannya sudah diatas target, hal ini disebabkan karena :

- 1) Adanya tenaga konselor disetiap rumah sakit Perawatan dan Pengobatan (PDP) HIV.
- 2) Adanya pendampingan Orang dengan HIV AIDS (ODHA) dari LSM peduli HIV.
- 3) Diperluasnya layanan PDP HIV sampai kefasilitas layanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Puskesmas.

Capaian indikator Persentase Penemuan Kasus Tuberkulosis / Case Detection Rate (CDR), indikator ini mulai tahun 2016 sampai 2020 belum tercapai dan capaian pada tahun 2020 sangat rendah hal ini disebabkan oleh:

- 1) Penyakit TBC masih menjadi stigma ditengah masyarakat dimana masyarakat menganggap penyakit TBC karena guna-guna.
- 2) Penemuan kasus masih bersifat pasif, dimana kesadaran masyarakat masih kurang untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini diperparah dengan terjadinya pandemic covid-19.

Capaian Persentase Keberhasilan Pengobatan/*Success Rate* dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sudah mencapai target. Pencapaian indikator ini dikarenakan adanya pelacakan oleh petugas puskesmas terhadap pasien TB yang mangkir dalam pengobatan.

Pencapaian realisasi indikator sarana air minum yang dilakukan pengawasan dari tahun ke tahun berfluktuatif. Pada tahun 2016 realisasi pengawasan yang dilakukan sebesar 71,1% sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi menjadi sebesar 63,2%. Penurunan pencapaian ini dapat disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk melakukan pemantauan dan pengawasan sedangkan objek sarana air minum yang diawasi yakni depot air isi ulang yang selama beberapa tahun terakhir cukup meningkat jumlahnya serta telah tersebar di hampir seluruh wilayah, sehingga dipandang perlu untuk terus melakukan pengawasan yang juga dilakukan secara bersama dengan Pemerintah Kabupaten/kota.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan ini adalah masih rendahnya kesadaran pengelola sarana seperti pemilik depot air minum untuk menindaklanjuti hasil inspeksi kesling yang dilakukan petugas sanitarian, rendahnya tingkat pengetahuan dan partisipasi warga masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap depot air isi ulang yang berada di

wilayahnya dengan membawa sampel air ke BPOM serta belum adanya tindakan tegas dari aparat untuk menindak pelanggaran yang terjadi.

Untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit salah satunya adalah melalui peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak umur 0-11 tahun. Realisasi cakupan anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap di Sumatera Barat pada tahun 2020 sebesar 56,2% mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang mencapai sebesar 78,90%. Penurunan capaian cakupan imunisasi dasar pada tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor berikut yaitu pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pelayanan imunisasi di beberapa fasilitas kesehatan terhenti, penerapan protokol kesehatan di fasilitas layanan kesehatan membuat masyarakat takut membawa anak untuk mendapatkan imunisasi, dukungan dana terhadap program imunisasi semakin berkurang, masih berkembangnya isu kandungan vaksin yang haram di beberapa wilayah sehingga menurunkan kepercayaan dan keinginan masyarakat untuk memberikan imunisasi dasar kepada bayi mereka, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama orang tua yang menganggap belum pentingnya pemberian imunisasi kepada anak dengan membandingkan kondisi orang yang tidak diberikan imunisasi tetapi tetap dalam kondisi sehat dan tidak jauh berbeda dengan yang memperoleh mendapatkan imunisasi lengkap.

Capaian indikator Jumlah Kabupaten/kota dengan API (*Annual Parasite Index*) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 18 Kabupaten/kota sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 19 Kabupaten.

Begitupun dengan capaian Kabupaten/kota dengan *incident rate* DBD < 49 per 100.000 penduduk (%) juga mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2016 sebesar 42,11% dan pada tahun 2020 dengan capaian 89,47%, beberapa faktor penyebab yakni 1). Meningkatnya potensi faktor risiko (lingkungan, iklim), resistensi insektisida. 2). Belum maksimalnya pelaksanaan PSN dengan program Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) 3). Belum semua Kabupaten/kota punya regulasi tentang pencegahan pengendalian demam berdarah baik berupa Perda atau Peraturan/Keputusan Kepala Daerah tentang kebijakan satu rumah satu Jumantik. 4). Koordinasi multi sektoral kurang optimal dalam upaya pengendalian yang lebih komprehensif dan terpadu. 5). Pemanfaatan potensi mitra (sektor pemerintah, swasta, masyarakat dan pasien) belum optimal.

Puskesmas sebagai ujung tombak dalam mengatasi tantangan kesehatan, dengan demikian keberadaan Puskesmas menjadi sangat penting sehingga perlu dipastikan bahwa Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang mengacu pada Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, aspek yang ditentukan sebagai standar, yaitu: (1) Lokasi, (2) Bangunan, (3) Prasarana, (4) Peralatan, (5) Ketenagaan, (6) Perizinan dan registrasi, dan (7) Penyelenggaraan. Untuk memenuhi pelayanan sesuai standar harus terpenuhi standar input dan standar proses. Standar tersebut diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan puskesmas yang bermutu mudah di akses dan terjangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan capaian tahun 2020 telah sebanyak 271 puskesmas yang telah terakreditasi di Sumatera Barat. Beberapa puskesmas yang belum mencapai akreditasi antara lain dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia, terbatasnya tenaga kesehatan serta akses puskesmas yang masih terdapat di daerah 3 T yang sulit terjangkau, serta belum seluruh Kabupaten/kota telah membentuk Tim Pembina ditingkat Kabupaten/kota untuk percepatan akreditasi Puskesmas.

Dalam rangka penanganan dan pengendalian Covid-19 beserta dengan dampaknya maka Rencana kontingensi dilakukan dengan melibatkan lintas sektor yang tergabung dalam Satgas Covid Provinsi. Kontingensi plan tersebut secara garis besar meliputi upaya penanggulangan mulai penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan

penyediaan dukungan pendanaan. Dalam strategi penanggulangan Covid tidak hanya menerapkan 3 T tetapi juga menerapkan Protokol kesehatan dengan 5 M di masyarakat yaitu :

1. Memakai masker
2. Menjaga jarak minimal 1,5 m
3. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
4. Menghindari kerumunan
5. Mengurangi mobilisasi

Untuk menegakkan Prokes tersebut maka keluar Perda Sumbar No. 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

2.3.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kabupaten/kota, serta kecamatan hingga desa yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Belum meratanya konektivitas jalan antar daerah kabupaten/kota, dengan provinsi tetangga, menuju kawasan strategis, dan konektivitas jalan lintas pantai pesisir barat pulau Sumatera dan masih banyaknya jalan provinsi dalam kondisi rusak berat karena muatan berlebih, bencana alam, dan tidak berimbangnya antara penanganan dengan pertambahan kerusakan jalan merupakan permasalahan yang harus diselesaikan. Jaringan jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 600-903.1-2015 tentang Penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsi dan statusnya diketahui bahwa total panjang jalan Provinsi Sumatera Barat adalah 1525,20 km. Kondisi kelayakan jalan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 berdasarkan pada data capaian terus mengalami peningkatan dari 70,14% tahun 2016 meningkat menjadi 73,92% pada tahun 2020. Berdasarkan hasil survey IRMS yang telah dilakukan, ditemukan bahwa persentase kelayakan jalan provinsi pada Tahun 2020 sebesar 73,92% lebih rendah dari target awal tahun 2020 yaitu 74,00 % dengan persentase capaian 99,89 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (i) keterbatasan anggaran pada tahun 2020 (refokusing anggaran untuk penanganan COVID-19), (ii) keterbatasan peralatan (iii) kondisi Alam berupa bukit dan jurang dan (iv) beban berlebih dari kendaraan.

Sedangkan rata-rata Indeks Kinerja Irigasi pada tahun 2016 dengan capaian sebesar 67,31% dan meningkat pada tahun 2020 dengan capaian 76,54%. dari sisi realisasi pada tahun 2020 terjadi kenaikan dari target yang telah ditetapkan sebesar 74,00%. Hal ini disebabkan antara lain karena 1). Semakin baiknya daerah irigasi 2). Semakin meningkatnya kapasitas petugas OP irigasi 3). Semakin berperan aktifnya kelembagaan petani 4). Sudah banyaknya infrastruktur yang rusak dan diperbaiki dan adanya dukungan pendanaan dari hibah melalui program IPDMIP.

Untuk kegiatan pengendalian banjir dan pengamanan pantai dengan panjang total infrastruktur yang telah terbangun dengan persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air tahun 2016 – 2020 yaitu sebesar 56,50 % - 64,29 %. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu normalisasi dan perkuatan tebing sungai serta pengamanan pantai. Selain itu, dalam rangka upaya konservasi sumber daya air, telah dilakukan pembangunan embung (bangunan penampung air) dengan persentase capaian dari tahun 2016 – 2020 yaitu 43,00 % - 51,78 %.

Selanjutnya cakupan sanitasi merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). Cakupan rumah tangga bersanitasi di Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Capaian rumah tangga bersanitasi pada tahun 2016 adalah 72,00% dan capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 81,68%. Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam capaian target ini disebabkan antara lain karena banyaknya dukungan

penganggaran dan program sanitasi dari Pemerintah Pusat seperti DAK fisik sanitasi serta program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) serta dukungan dari kabupaten/kota.

Sama halnya dengan sanitasi layak, cakupan air minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). Pada Tahun 2020 ini ditargetkan capaian sebesar 80,00% untuk cakupan air minum Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data persentase cakupan layanan air minum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 diperoleh dari Bidang Cipta Karya berupa "Rekapitulasi analisa data cakupan akses penyediaan layanan air minum dan daerah rawan air per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2020" yang bersumber dari data PDAM kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat dan PAMSIMAS diketahui capaian persentase cakupan air minum pada tahun 2020 adalah sebesar 80,04%, lebih besar dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 yaitu 80,00%. Keberhasilan ini tidak lepas dari pelaksanaan kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik dan dukungan dari layanan kabupaten/kota.

Masih belum memadainya ketersediaan bangunan strategis dan bangunan evakuasi sementara (shelter) pada kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, keterbatasan lahan untuk pembangunan TPA regional dan IPLT di beberapa kabupaten/kota merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan karena infrastruktur bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi dan infrastruktur persampahan regional adalah pelayanan dasar guna peningkatan perekonomian dan pelayanan publik.

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan pembangunan. Masih banyaknya Kabupaten/Kota yang belum menyusun RDTR memerlukan perhatian Provinsi dalam rangka melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk itu, perlu adanya peraturan dan/atau perbaikan peraturan guna mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota yang menjadi arah dalam pembangunan.

Terkait Progres Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat, telah dilakukan asistensi secara kontinu dengan Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN terkait evaluasi dan sinkronisasi RTRWP dengan RTRW kabupaten/kota, evaluasi muatan strategis, dan pengintegrasian RZWP3K dengan RTRWP. Selanjutnya akan dilakukan rapat pembahasan pada Forum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dan dilanjutkan dengan pembahasan forum Lintas Sektor di Kementerian ATR/BPN pada untuk mendapatkan Persetujuan Substansi oleh Menteri ATR/BPN. Sampai kondisi tahun 2020, RDTR yang telah diperdakan baru 2 (dua) RDTR yaitu RDTR Kota Payakumbuh dan RDTR Muara Sijunjung.

Tabel 2.61
Perkembangan Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	70,14	71,05	72,58	73,02	73,92
2	Rasio Jaringan Irigasi (Panjang jaringan (km) /luas sawah (ha)	%	1 : 89	1 : 89	1:89	1:89	1:89
3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	72,00	75,88	75,19	79,78	81,68
4	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,46	0,87	0,87	0,88	0,91
5	Rasio Permukiman layak huni	Rasio	32,90	33,20	33,60	34,00	35,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
6	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	63,32	65,68	68,72	76,19	76,54
7	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	55,35	58,05	59,75	63,88	64,29
8	Persentase Volume Tampungan Sumber-sumber air	%	41,26	45,13	48,90	51,78	51,78

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terdapat beberapa Proyek RPJMN yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat. Diantaranya adalah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Padang. Ruas ini dibagi menjadi 6 seksi yaitu Seksi Sicincin – Padang (36,6 km), Seksi Bukittinggi – Sicincin (39,9 km), Seksi Payakumbuh – Bukittinggi (32 km), Seksi Pangkalan – Payakumbuh (45 km), Seksi Bangkinang – Pangkalan (60,6 km) dan Seksi Pekanbaru – Bangkinang (40 km). Penanganan prioritas pada ruas sicincin - Padang dengan progress sampai pertengahan tahun 2021 sebesar 43,26%. Proyek RPJMN lainnya yang menjadi prioritas adalah pembangunan jalan Trans Mentawai untuk mendukung peningkatan konektivitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta jalan akses menuju Pelabuhan Teluk Tapang sepanjang 42,3 km dengan kebutuhan penanganan lanjutan sepanjang 19,95 km.

2.3.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu urusan wajib dalam penghitungan indikator kesejahteraan masyarakat. Dimana ketersediaan rumah yang layak huni dengan kondisi lingkungan yang memadai menjadi penunjang kesehatan masyarakat dalam menjapai hidup yang sejahtera. Semakin layak kualitas kehidupan masyarakat maka akan semakin baik kesejahteraan kehidupannya, begitupun sebaliknya.

Kondisi saat ini masih banyak terdapat lingkungan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan yang kurang memiliki infrastruktur dasar memadai sebagai penunjang aktivitas masyarakat. Rendahnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman berupa sarana, prasarana dan utilitas (PSU) antara lain berupa tidak tersedianya infrastruktur, akses PSU yang tidak dapat melayani seluruh kebutuhan masyarakat di permukiman dan kualitas infrastruktur yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Kondisi infrastruktur lingkungan yang demikian menimbulkan adanya kawasan permukiman kumuh yang mengalami penurunan kualitas lingkungan sehingga menjadi permukiman yang tidak layak untuk ditinggali. Kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 memiliki total luasan 5.226,19 hektar yang tersebar di 19 kabupaten/kota dengan kondisi kekumuhan sedang dan ringan. Untuk kawasan kumuh yang pengelolaannya menjadi kewenangan provinsi dengan luasan 15-10 hektar adalah 1.254,94 hektar berada pada 79 kawasan di beberapa kabupaten/kota yang sampai saat ini masih belum semua bisa ditangani karena keterbatasan anggaran. Umumnya kondisi permukiman dan kawasan kumuh belum seluruhnya memiliki kondisi prasarana, sarana dan utilitas yang layak seperti ketersediaan jalan lingkung, drainase, rumah layak huni, akses air minum dan akses sanitasi sehingga kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sulit untuk di capai.

Dilihat dari perkembangan indikator urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Sumatera Barat yang ditunjukkan pada tabel 2.41 menunjukkan terjadinya peningkatan pada beberapa indikator di setiap tahunnya. Pada indikator rumah layak huni di tahun 2020 rasio capaiannya sebesar 0,91%. Dimana peningkatan di tahun ini cukup besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,3%. Begitu juga dengan indikator permukiman layak huni yang rasionya

di tahun 2020 mencapai 35%, yang peningkatannya cukup besar dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 1%. Sedangkan untuk indikator penurunan kawasan kumuh mengalami penurunan di tahun ini yaitu menjadi 12%, dengan target tahun nya sebesar 13%. Hal ini terjadi karena masih banyaknya kawasan kumuh yang belum ditangani melihat dari total luas kawasan kumuh di provinsi tahun 2020 adalah 5.226,19 Ha. Kawasan kumuh permukiman yang ditangani dengan kewenangan provinsi sebesar 10-15 hektar. Penanganan kawasan kumuh dari tahun 2017, 2018 dan 2019 telah dilaksanakan pada 7 lokasi.

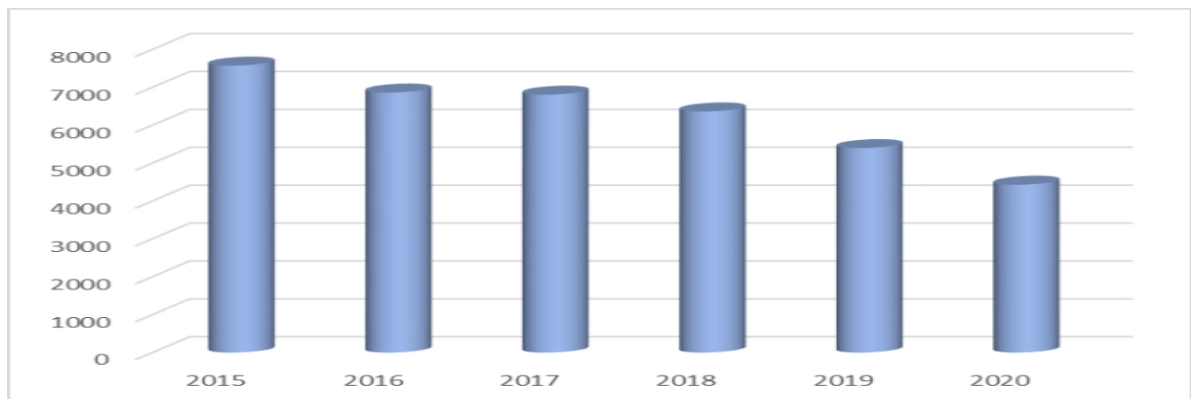
Tabel 2.62
Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Rumah Layak Huni	0,86	0,87	0,87	0,88	0,91
2	Rasio Permukiman Layak Huni	32,90	33,20	33,60	34,00	35,00
3	Penurunan Kawasan Kumuh (% akumulasi)	14,80	14,50	14,10	13,60	12,00

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Adapun luas kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut

Grafik 2.13
Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Table 2.63
Rekapitulasi Luasan Dan Lokasi Kawasan Kumuh Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Kewenangan Pusat		Kewenangan Provinsi		Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah	
		Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)
A	Kabupaten								
1	Kep. Mentawai	9	234,91	-	0,00	1	6,80	10	241,71
2	Pesisir Selatan	4	123,84	9	216,03	5	140,21	18	480,08
3	Solok	9	290,00	8	276,00	23	8,00	40	574,00
4	Sijunjung	10	254,03	4	64,24	14	96,93	28	415,20
5	Tanah Datar	5	86,81	8	76,82	35	156,33	48	319,96

No	Kabupaten/Kota	Kewenangan Pusat		Kewenangan Provinsi		Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah	
		Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)
6	Padang Pariaman	-	329,10	13	268,40	-	316,26	13	913,76
7	Agam	1	64,01	4	49,03	3	30,79	8	143,83
8	Lima Puluh Kota	11	586,89	4	88,71	32	25,26	47	700,86
9	Pasaman	-	0,00	3	44,40	5	20,00	8	64,40
10	Solok Selatan	-	0,00	1	11,32	-	0,00	1	11,32
11	Dharmasraya	7	195,48	5	61,44	22	109,19	34	366,11
12	Pasaman Barat	2	96,52	3	42,37	29	111,19	34	250,08
Sub Total A		58	1.583,86	62	1.034,60	169	773,78	289	4.481,31
B	Kota								
13	Padang	1	33,39	4	47,21	17	69,02	22	149,62
14	Solok	3	65,71	3	25,14	2	5,88	8	96,73
15	Sawahlunto	1	16,58	4	77,90	10	40,73	15	135,21
16	Padang Panjang	-	17,97	-	0,00	-	29,72	-	47,69
17	Bukittinggi	-	31,50	-	29,03	-	4,25	-	64,78
18	Payakumbuh	4	56,52	3	-	3	10,75	10	67,27
19	Pariaman	-	65,71	3	88,27	-	30,38	3	184,36
Sub Total B		9	287,38	17	220,34	32	190,73	58	745,66
Sumatera Barat (A+ B)		67	1.871,24	79	1.254,94	201	964,51	347	5.226,97

sumber data : Dinas Perkimtan (hasil survey lapangan) Tahun 2020

Luas kawasan kumuh 10-15 tahun 2020 adalah 1254,94 hektar

Table 2.64
Rekapitulasi Luasan Dan Lokasi Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

	Kabupaten Kota	2019		2020		Sisa Luasan 2020 (Ha)
		Total Luas Kws (Ha)	Pengurangan Luas (Ha)	Total Luas Kws (Ha)	Pengurangan Luas (Ha)	
A	Kabupaten					
1	Kep. Mentawai	241,71		241,71		
2	Pesisir Selatan	229,02		480,08		
3	Solok	412,24		574,00	27,00	547,00
4	Sijunjung	389,27		415,20	45,51	369,69
5	Tanah Datar	341,06		319,96	15,32	304,64
6	Padang Pariaman	167,93		913,76		913,76
7	Agam	134,30		143,83	70,62	73,21
8	Lima Puluh Kota	536,44		700,86		700,86
9	Pasaman	64,40	15,00	64,40		64,40
10	Solok Selatan	11,32		11,32		11,32

	Kabupaten Kota	2019		2020		Sisa Luasan 2020 (Ha)
		Total Luas Kws (Ha)	Pengurangan Luas (Ha)	Total Luas Kws (Ha)	Pengurangan Luas (Ha)	
11	Dharmasraya	366,11		366,11		366,11
12	Pasaman Barat	250,08		250,08		250,08
Sub Total A		3.143,88	15,00	4.481,31	158,45	3.601,07
B	Kota					-
13	Padang	122,35		149,62	10,29	139,33
14	Solok	103,66		96,73	23,89	72,84
15	Sawahlunto	107,87		135,21		135,21
16	Padang Panjang	-		47,69	2,62	45,07
17	Bukittinggi	-		64,78	-	64,78
18	Payakumbuh	142,10		67,27	37,34	29,93
19	Pariaman	42,28		184,36	6,59	177,77
Sub Total B		518,26	-	745,66	80,73	664,93
Sumatera Barat (A+ B)		3.662,14		5.226,97	478,36	4.748,61

Sumber : Dinas Perkimtan (hasil survey lapangan) Tahun 2020
13 Kabupaten Kota sudah mengeluarkan SK Terbaru Tahun 2020. Penanganan Kumuh Luasan 10-15 ha Tahun 2020 (kewenangan provinsi) : 25,29 hektar

2.3.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat stabilitas keamanan di Sumatera Barat adalah meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat. Dalam kurun waktu 2016-2019, nilai Indeks Demokrasi Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tingkat Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat secara umum dalam kurun waktu tersebut masih dalam kategori “sedang.” Untuk pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat pada tahun 2016 sebesar 54,41, pada tahun 2017 naik menjadi 69,50 kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar 67,06 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 67,69. Penurunan ini diakibatkan meningkatnya jumlah kasus intoleransi dan SARA di Sumatera Barat, serta semakin meningkatnya regulasi yang disusun oleh Pemerintahan Daerah yang bernuansa SARA. Hal ini merupakan salah satu indikator penilaian dalam penetapan capaian IDI.

Indikator lain yang menjadi penilaian dalam penetapan capaian IDI adalah jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Di Provinsi Sumatera Barat, angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu tahun 2017-2020 masih di bawah target nasional. Pada tahun 2017, angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Kota Payakumbuh sebesar 68,77% dan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 79,53%. Pada tahun 2018, telah dilaksanakan Pilkada di 4 Kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Padang Panjang, Sawahlunto dan Kota Pariaman, Angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Padang sebesar 63,76%, Pilkada Kota Padang Panjang sebesar 72,55%, Pilkada Kota Sawahlunto sebesar 77,65% dan Pilkada Kota Pariaman sebesar 74,90%. Pada tahun 2019, telah dilaksanakan Pilpres dan Pileg dengan angka partisipasi masyarakat sebesar 78,98% untuk Pilpres, 78,78% untuk Pemilihan Anggota DPR-RI, 78,82% untuk Pemilihan DPD-RI, dan 78,75% untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020,

telah dilaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan angka partisipasi masyarakat sebesar 61,50%. Masih rendahnya angka partisipasi masyarakat di Sumatera Barat disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan Pemilu/Pilkada.

Banyaknya konflik yang terjadi di Sumatera Barat juga menjadi indikator yang menentukan tingkat stabilitas keamanan di Sumatera Barat. Secara umum, konflik yang terjadi di Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 merupakan konflik perbatasan, lahan/tanah ulayat, konflik Sumber Daya Alam dan konflik Ipoleskosbud. Jumlah konflik di Sumatera Barat dari tahun 2016-2021 terdiri dari 4 konflik tahun 2016 (konflik lahan 1 kasus, konflik perbatasan 2 kasus, dan konflik sumber daya alam 1 kasus), 3 konflik tahun 2017 (konflik lahan 2 kasus dan konflik sumber daya alam 1 kasus), 2 konflik tahun 2018 (konflik sumber daya alam), 3 konflik tahun 2019 (konflik perbatasan 2 kasus, konflik sumber daya alam 1 kasus) dan 1 konflik tahun 2020 (konflik lahan). Konflik yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan permasalahan batas wilayah yang terjadi antar masyarakat nagari Sumpur dengan masyarakat Padang Laweh Malolo dan Malolo Tigo Jurai, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Masih banyaknya konflik yang terjadi di Sumatera Barat disebabkan masih terbatasnya jumlah intelijen untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di kabupaten/kota se-Sumatera Barat dan belum optimalnya peran forum-forum strategis Kesbangpol di daerah dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

Pada sub bidang kebencanaan, pencapaian indikator persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana pada tahun 2016 dengan capaian sebesar 51% yang kemudian meningkat setiap tahunnya dan hingga tahun 2020 mencapai 55%. Capaian ini cenderung lambat bila dibandingkan dengan kondisi sebagian besar wilayah di Sumatera Barat masuk dalam kategori daerah rawan bencana. Pencapaian ini juga dapat dilihat dari nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Sumatera Barat yang mengalami penurunan dari 153 pada tahun 2013 menjadi 149,53 pada tahun 2020. Beberapa permasalahan dalam hal ini yakni belum seluruh Pemerintah Kabupaten/kota yang memiliki dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan dokumen teknis penanggulangan bencana lainnya serta masih terdapat struktur kelembagaan BPBD Kabupaten/Kota yang berada pada level eselon 3 dan bergabung dengan Perangkat Daerah lainnya, sehingga pelaksanaan koordinasi menjadi tidak efektif.

Pencapaian indikator lainnya pada sub bidang kebencanaan yakni pencapaian indikator persentase Kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana. Pada tahun 2016 dengan capaian 71%, yang kemudian meningkat pada tahun 2017 sebesar 72%, tahun 2018 sebesar 73%, tahun 2019 sebesar 74% dan tahun 2020 sebesar 75%. Capaian yang meningkat ini salah satunya diakibatkan karena telah ada sistem penanganan bencana yang sesuai dengan standar penanggulangan bencana, namun demikian permasalahan mutasi dan rotasi SDM yang ada dan sudah terlatih yang belum berkontribusi maksimal juga menjadi penghambat dalam pencapaian indikator ini. Perkembangan pencapaian indikator urusan wajib ketentraman umum dan perlindungan masyarakat sudah sangat baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Pencapaian Indikator Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat	65,22	54,41	65,84	69,50	66,46	67,06	67,07	67,69	67,69	-

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Tingkat partisipasi pemilih	-	-	76	68,7 (Payakumbuh) 79,5 (Mentawai)	77	67,36 (Padang) 72,55 (PdG Pjg) 77,65 (Sawahlunto) 74,90 (Pariaman)	78	78,98 (Pilpres) 78,78 (DPR-RI) 78,82 (DPD-RI) 78,75 (DPRD Prov)	79	61,50
3	Konflik di Sumatera Barat	5	4	5	3	5	2	5	3	5	1
4	Lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana (%)	51	51	52	52	53	53	54	54	54	55
5	Kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	71	71	72	72	73	73	74	74	74	75
6	Jumlah kasus perbuatan maksiat yang ditangani	1.368	1.038	1.313	1.508	1.261	1.095	1.210	900	1.162	786

Sumber : Badan Kesbangpol dan BPBD Provinsi Sumatera Barat

Dari enam indikator kinerja utama Tahun 2020, menunjukkan bahwa capaian pada 4 (empat) indikator kinerja utama sudah masuk pada kategori tinggi. Pencapaian 4 (empat) IKU dengan kategori tinggi yaitu indikator yang pencapaiannya $\geq 90\%$.

2.3.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Perkembangan indikator urusan wajib sosial fokus pada pencapaian indikator peningkatan pelayanan terhadap penyandang kesejahteraan masyarakat, dilihat dari tahun 2016 hingga tahun 2020, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Sosial Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Peningkatan pelayanan PMKS (%)	16,99	1,10	16,99	1,40	16,99	2,62	16,99	4,06	16,99	5,06

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Penetapan Target Capaian Kerja Urusan Wajib Sosial Tahun 2020 mengikuti Capaian Kinerja tahun-tahun sebelumnya, target yang belum tercapai pada tahun 2020 dikarenakan ada beberapa kegiatan tidak berjalan (*Refocusing*) pada Tahun 2020

Secara capaian pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat dari tahun 2016 sebesar 1,10% menjadi 5,06% di tahun 2020. Hal ini dikarenakan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagian besar melakukan rehabilitasi sosial dalam panti selain dengan melakukan peningkatan kapasitas PPKS dan PSKS yang berada diluar panti.

Adapun program dan kegiatan yang paling memberikan kontribusi besar adalah pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk remaja, penyandang disabilitas, wanita tuna susila, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar, dan Bimbingan Sosial dan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dan peningkatan kapasitas Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan adalah ketenagakerjaan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Pada urusan Ketenagakerjaan tahun 2016-2020, indikator yang diukur pencapaiannya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke Atas sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke Atas di Sumatera Barat Tahun 2016-2020

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANGURUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	67,08	67,08	64,80	66,29	64,92	67,56	65,04	67,88	65,16	69,01
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,68	5,09	6,46	5,58	6,25	5,66	6,03	5,38	5,82	6,88
3	Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke Atas (%)	-	45,90	-	45,51	-	46,66	-	48,97	-	49,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf "U" terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (di atas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2016–2020 mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 67,08 persen menjadi 69,01 persen pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia di Sumatera Barat untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian semakin meningkat.

Beberapa faktor yang mendorong naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara lain karena adanya program-program peningkatan SDM calon pencari kerja melalui pelatihan, pemagangan, dan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri, melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi, penyiapan tenaga kerja ke luar negeri, pelaksanaan perekrutan tenaga kerja antar provinsi (AKAD).

Tabel 2.68
Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021

No.	Tahun	Penduduk Usia Kerja	Angkatan Kerja	TPAK
1.	2016	3.688.126	2.473.814	67,08
2.	2017	3.746.830	2.483.675	66,29
3.	2018	3.891.234	2.629.104	67,56
4.	2019	3.954.420	2.684.389	67,88
5.	2020	4.016.776	2.772.133	69,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Beberapa faktor yang mendorong naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara lain karena adanya program-program peningkatan SDM calon pencari kerja melalui pelatihan, pemagangan, dan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri, melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi, penyiapan tenaga kerja ke luar negeri, pelaksanaan perekrutan tenaga kerja antar provinsi (AKAD).

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja berhasil menekan tingkat pengangguran, ditunjukkan oleh TPT yang bergerak turun dari tahun 2017 sebesar 5,58 % menjadi 5,33 % pada Agustus tahun 2019. Pengangguran per Agustus tahun 2020 naik menjadi 6,68 % atau naik 1,50 % dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini sebagai akibat dampak COVID-19 yang menyebabkan PHK di berbagai sektor usaha menjadi penyebab naiknya angka pengangguran tersebut.

Tabel 2.69
Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020

No.	Tahun	Jumlah Penganggur (orang)	TPT (%)*
1	2016	125.903	5,09
2	2017	138.703	5,58
3	2018	148.699	5,66
4	2019	144.349	5,38
5	2020	190.609	6,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

*) data per Agustus 2020

c. Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke Atas di Sumatera Barat

Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke Atas di Sumatera Barat, menunjukkan peningkatan yang cukup baik, digambarkan dengan pencapaian tahun 2016 sebesar 28,94 %, selama kurun waktu 5 (lima) tahun meningkat menjadi 49,60 % tahun 2020. Namun hal ini, juga menggambarkan bahwa angkatan kerja yang tersedia di Sumatera Barat, masih lebih besar didominasi oleh pendidikan menengah ke bawah.

Tabel 2.70
Jumlah Angkatan Kerja dan Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke Atas Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Angkatan Kerja (orang)	Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke Atas (orang)	Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah ke Atas (%)
1	2016	2.473.814	1.135.516	45,90
2	2017	2.483.675	1.130.359	45,51
3	2018	2.629.104	1.226.782	46,66
4	2019	2.684.389	1.314.559	48,97
5	2020	2.772.133	1.374.941	49,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2.3.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari indeks pemberdayaan gender, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan untuk pembangunan di bidang anak diukur melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Tabel 2.71
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah kabupaten/ kota layak anak	7	6	8	9	9	9	10	14	11	14
2	Keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen(%)	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	6,15	10,77	10,77
3	Rasio perempuan korban kekerasan per 100,000 penduduk (usia 18 tahun keatas)	49	27	48	36	47	29	46	18	45	19
4	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100,000 anak (usia kandungan – 18 tahun)	392	331	390	380	388	609	386	427	384	351

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data pada di atas bahwa perkembangan urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan menunjukkan bahwa persentase jumlah kabupaten/kota layak anak mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dari jumlah kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2020 sebanyak 14 kabupaten/kota mendapat predikat kabupaten/kota layak anak melampaui target sebanyak 11 kabupaten/kota layak anak, Hal ini memperlihatkan bahwa begitu besar perhatian pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat kepada pemenuhan hak anak diwilayahnya. Beberapa faktor pendorong antara lain: 1). adanya pembinaan yang intens dari

provinsi langsung kepada Tim Gugus kabupaten/kota, 2). sosialisasi konvensi hak anak yang dilakukan secara masif kepada seluruh pengambil kebijakan, 3). adanya kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Ruang Anak Dunia (Ruandu) *Foundation* yang sangat intens membantu pemerintah provinsi dalam upaya mengadvokasi seluruh pihak dari tingkat provinsi hingga ke tingkat desa/nagari/kelurahan serta semakin meningkatnya kapasitas Forum Anak dan 4). tingginya komitmen kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pembentukan kabupaten/kota layak anak dan provinsi layak anak.

Untuk capaian persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen pada tahun 2020 sebesar 10,77 % mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 6,15 % dan sudah memenuhi target sebesar 10,77 %. Hal ini antara lain disebabkan oleh : 1 Adanya pergantian antar waktu yang menambah jumlah anggota Dewan yang perempuan karena Pemilu Kepala Daerah 2020, 2). Adanya kebijakan peningkatan representasi perempuan di Parlemen mulai dari tingkat pusat (KemenPPPA RI) sampai dengan Kab/Kota. Namun angka ini masih jauh dari komposisi yang ingin dicapai yaitu jumlah keterwakilan perempuan di parlemen minimal sebesar 30 %, hal ini sebagian besar masih disebabkan oleh : 1. masih rendahnya kesadaran perempuan pemilih terhadap pentingnya memilih perempuan untuk duduk sebagai anggota parlemen yang tentunya lebih peka dengan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan; 2. masih adanya persepsi masyarakat yang merugikan perempuan yang ingin maju menjadi calon legislative; 3. adanya kebijakan partai yang menempatkan perempuan sebagai calon legislative semata mata hanya untuk dapat lolos persyaratan untuk mengikuti pemilu sehingga perempuan yang dicalonkan tersebut terkesan seadanya; dan 4. masih adanya anggapan bahwa laki-laki dianggap lebih mampu dibandingkan perempuan dalam memimpin/mengambil keputusan.

Sedangkan capaian rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (dengan usia 18 tahun keatas) periode 2016-2019 mengalami fluktuasi meskipun pada periode yang sama mengalami penurunan. Pada tahun 2016 dengan capaian 27 dan tahun 2019 dengan capaian 18. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 19 pada tahun 2020. Berdasarkan target pada tahun 2020 sebesar 45 menunjukkan bahwa rasio terjadinya kekerasan terhadap perempuan jauh melampaui target (mengalami trend positif) artinya jumlah perempuan yang mengalami kekerasan lebih sedikit dibandingkan dengan target. Beberapa hal yang mendorong hal tersebut adalah 1). adanya kebijakan pemerintah daerah tentang perlindungan perempuan dan anak baik provinsi maupun kabupaten/kota 2). intensnya sosialisasi dan pelaksanaan pembinaan terkait pencegahan dan penanganan terjadinya kekerasan terhadap perempuan 3). adanya forum koordinasi lembaga layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak tingkat Provinsi serta 4). meningkatnya komitmen pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui program program pembangunan yang responsif gender terhadap penanganan permasalahan yang dialami oleh perempuan khususnya kekerasan

Untuk capaian rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100,000 anak (usia kandungan – 18 tahun) pada periode 2020 sebesar 351 lebih rendah dari target sebesar 384 yang artinya jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus lebih sedikit dari yang ditargetkan. Hal ini disebabkan oleh : 1) meningkatnya kinerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi dalam melakukan upaya penanganan, rehabilitasi, integrasi dan rehab sosial terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus. 2) koordinasi yang terbina dengan baik antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya. 3). meningkatnya kinerja lembaga layanan dalam rangka penurunan angka kasus kekerasan terhadap anak. Namun untuk lebih signifikannya angka penurunan tersebut maka perlu mendorong pembentukan lembaga UPTD khusus penanganan anak korban kekerasan serta konseling remaja di Kabupaten/kota.

2.3.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Pada urusan pangan terdapat beberapa indikator yang diukur dalam periode RPJMD 2016-2020 seperti ketersediaan pangan utama, penguatan cadangan pangan, penanganan daerah rawan pangan, ketersediaan pangan serta skor pola pangan harapan, seperti yang terlihat capaiannya pada tabel dibawah ini.

Perkembangan Indikator Urusan Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020, seperti pada Tabel berikut:

Tabel 2.72
Perkembangan Indikator Urusan Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama (ton beras)	Ton Beras	1,495,356	1,512,953	1,530,178	1,672,969	1.672.974
2	Penguatan cadangan pangan	Ton	22	100	100	210	0
3	Penanganan daerah rawan pangan	%	0	20	40	60	80
4	Ketersediaan Pangan	(Kkal/kapita /th)	284,25	284,31	284,31	151,71	304,69
5	Skor Pola Pangan Harapan	%	84,30	85,30	86,30	86	86,60

Sumber : Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel tersebut di atas, capaian indikator Ketersediaan Pangan Utama (ton beras) pada tahun 2020 sebesar 1.672.974 ton beras tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan, peningkatan hanya stagnan dibandingkan dengan realisasi capaian Tahun 2019 yaitu 1.672.969 Ton, hal ini berarti Pandemi COVID- 19 yang terjadi Tahun 2020 tidak berpengaruh terhadap peningkatan sektor pertanian.

Untuk capaian indikator penguatan cadangan pangan (ton) pada tahun 2020 yang ditargetkan 100 ton tidak dapat direalisasikan, karena pada Tahun 2020 terjadi *refocusing* anggaran, tapi hal ini tidak berpengaruh karena stok cadangan pangan Provinsi Sumatera Barat yang ada di Bulog Wilayah Sumatera Barat sampai dengan keadaan Desember 2020 masih tersedia sebanyak 506.660 ton.

Pencapaian penanganan daerah rawan pangan tahun 2020 mengalami peningkatan dengan bertambahnya nagari mandiri pangan yang semula ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebanyak 32 nagari/desa menjadi 80 nagari/desa. Pertambahan nagari mandiri pangan sebagai replikasi pada 8 Kabupaten/kota dalam rangka peningkatan ketahanan dan keamanan pangan di Sumatera Barat.

Sedangkan pencapaian skor pola pangan harapan di Sumatera Barat meningkat pada tahun 2020 yakni mencapai 86,6%. Peningkatan ini ditandai dengan Pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sudah memasyarakat dengan baik. Skor PPH penduduk Sumatera Barat sudah melebihi dari target yang ditetapkan tetapi belum memenuhi target PPH ideal sebesar 100 dan target nasional 90,4.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain dengan menetapkan regulasi ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mengatur ketersediaan dan distribusi bahan pangan di daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17

Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar.

2.3.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Pertanahan erat kaitannya dengan kepemilikan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut serta terkait dengan status tanah ulayat, sehingga permasalahan tanah cenderung menghambat masuknya investasi dari luar yang menginginkan kepastian lahan sebelum berinvestasi.

Sedangkan kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas merupakan kewenangan pusat sehingga upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi yakni dengan mengupayakan pembebasan lahan baik dalam mendukung investasi maupun pembangunan infrastuktur.

Berdasarkan data yang tersedia pada indikator urusan wajib pertanian bahwa persentase fasilitasi masalah tanah pada tahun 2020 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa telah berkurangnya sengketa terhadap tanah-tanah negara di daerah. Keberhasilan capaian ini didorong oleh koordinasi dan pendekatan baik dengan semua stakeholder terkait.

Tabel 2.73
Pelaksanaan Indikator Urusan Wajib Pertanian
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (%)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi		Capaian	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah	Persentase Fasilitasi Masalah Tanah	85	85	85	85	100	100

Sumber : Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

2.3.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam proses pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kinerja pengelolaan lingkungan hidup dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan/hutan.

Tabel 2.74
Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/ Bidangurusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,18	70,18	69,75	76,67	69,63	76,7	69,51	77,17	69,45	79,33
2	Indek Kualitas Air (IKA)	65,40	65,40	65,46	75,69	65,63	77,29	65,65	77,67	65,85	75,00
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,90	82,90	82,90	89,87	82,9	88,37	83,05	89,45	83,20	90,39
4	Indek Tutupan Hutan (ITH)	63,65	64,23	63,11	67,5	62,69	67,5	62,27	64,33	61,84	64,13

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sumatera Barat selama kurun waktu tahun 2016–2020 terus membaik. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya IKLH di tahun 2020 menjadi 79,33 dari 70,18 di tahun 2016. Dari ketiga komponen pembentuk IKLH, kesemuanya juga mengalami peningkatan. Indeks Kualitas Air (IKA) naik dari 65,4 di tahun 2016 menjadi 75 di tahun 2020. Indeks Kualitas Udara (IKU) sudah cukup baik meningkat dari 82,90 di tahun 2020 menjadi 90,39 di tahun 2020. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2020 sebesar 64,13 juga meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 63,65.

IKA dihitung berdasarkan hasil pengukuran beberapa parameter air di beberapa sungai dan danau/rawa dengan metode sampling. Hasil penghitungan IKA pada tahun 2020 diperoleh nilai sebesar 75 persen dari target tahun 2020 sebesar 65,85. Selain itu juga dilakukan pengukuran kualitas air melalui pengujian status mutu air untuk mengetahui tingkat pencemaran air sungai/danau dan media lingkungan hidup lainnya di Sumatera Barat. Dari hasil analisis kualitas mutu air tahun 2020 diketahui bahwa Indeks pencemaran Air (IPA) Sumatera Barat sebesar 2,52 yang artinya statusnya adalah cemar ringan.

Prioritas lain yang perlu menjadi perhatian adalah penanganan 2 danau yang termasuk dalam 15 Danau Prioritas Nasional yaitu Danau Maninjau dan Danau Singkarak. Danau Maninjau saat ini mengalami penurunan kualitas air akibat limbah yang berasal aktivitas budidaya keramba jaring apung dan juga kerusakan ekosistem alam di sekitar danau Maninjau. Kualitas air Danau Maninjau yang mulanya mesotrofik (kandungan unsur hara sedang) di tahun 2001 menjadi hipertrofik (tercemar berat) pada tahun 2018. Jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 17.417 petak pada tahun 2021, dan melebihi daya dukung dan daya tampung danau sebesar 6.000 KJA. Kondisi tersebut berdampak penurunan produksi ikan, terganggunya aktivitas ekonomi seperti pariwisata dan penurunan pendapatan masyarakat.

Kondisi serupa terjadi juga pada Danau Singkarak. Penurunan kualitas air ditandai dengan status tergolong eutrofik (tercemar tinggi). Penyebab buruknya kualitas air Danau Singkarak akibat banyaknya sampah yang masuk ke danau yang berasal dari rumah tangga dan penambahan jumlah KJA di Danau Singkarak. Di samping itu Penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan seperti setrum aki, bahan peledak dan bagan menurunkan kelestarian keanekaragaman hayati Danau Singkarak.

Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk meningkat tiap tahun akan memberikan kontribusi terhadap timbulan sampah apabila tidak dilakukan secara optimal dalam pengelolaan sampah akan memberikan dampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi timbulan sampah di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 timbulan sampah sebanyak 10.422 m³/hari dengan kondisi capaian pengelolaan persampahan sebesar 14,71 % pengurangan sampah dan 54 % penanganan sampah.

Di samping itu, potensi timbulan limbah B3 infeksius dari pelayanan kesehatan sebesar 7,2 ton/hari. Kondisi pandemi Covid 19 timbulan limbah infeksius meningkat \pm 30 % dari kondisi normal. Pengelolaan belum dilakukan secara optimal hal ini disebabkan belum adanya fasilitas pengelolaan limbah B3 berizin di Provinsi Sumatera Barat.

Hal lainnya yang juga menjadi perhatian adalah upaya untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terutama pada sektor-sektor prioritas yang berpengaruh besar yaitu sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, industri, transportasi dan pengolahan limbah. Berbagai upaya mitigasi harus dilakukan untuk mendukung komitmen Pemerintah Indonesia menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26% (dengan upaya sendiri) dan 41% (dengan dukungan internasional) pada tahun 2020 dibandingkan dengan garis dasar pada kondisi BAU (*Business as Usual*).

2.3.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Perkembangan indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selalu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2017 sd 2020 sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini. Perkembangan indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Tabel 2.75
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2017		2018		2019		2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kepemilikan KTP-El	%	88	92,23	89	97,20	90	95,57	92	97,17
2	Kepemilikan akte pencatatan sipil	%	50	92,4	65	86,47	75	88,44	85	90,85
3	Implementasi pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah SKPD	-	-	12	11	12	12	12	12

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan pencapaian indikator kepemilikan KTP elektronik di Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 97,17%, meskipun terdapat penurunan capaian pada tahun 2019 jika dibandingkan capaian tahun 2018. Capaian tahun 2019 sebesar 95,57%, sedangkan capaian tahun 2018 sebesar 97,20% dan capaian tahun 2017 sebesar 92,23%. Beberapa faktor pendorong capaian KTP elektronik ditahun 2020 salah satunya adalah inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di kabupaten/kota dalam pelayanan *online* yang difasilitasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, hal penghambat untuk pencapaian target yang lebih tinggi pada tahun 2020 adalah Pandemi COVID-19. Dalam pencapaian kepemilikan KTP-El di Provinsi Sumatera Barat secara data memang terlihat naik, dengan perkembangan jumlah penduduk yang dinamis maka jumlah Wajib KTP akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang berumur 17 tahun setiap harinya.

Sedangkan capaian kepemilikan akte pencatatan sipil pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 90,85 % dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 88,44%, jika dibandingkan dengan tahun 2018 juga mengalami kenaikan dengan capaian sebesar 86,47%, kenaikan capaian ini didorong dengan inovasi-inovasi yang dibuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota dengan pelayanan secara *online*. Akte Pencatatan sipil terdiri dari Akte Kelahiran, Akte Perkawinan/ Perceraian dan Akta Kematian. Permasalahan dengan data kepemilikan akta pencatatan sipil adalah pada akta kematian salah satunya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting terkait dengan kematian anggota keluarga mereka, kecuali adanya pengurusan terkait dengan administrasi ahli waris dalam satu keluarga, sehingga dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sulit mendapatkan data yang akurat terkait dengan jumlah kematian yang ada di Sumatera Barat, data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan data akta kematian yang dilaporkan saja. Hal ini akan berimbas terhadap Data Kependudukan secara keseluruhan seperti pada saat Pemilihan Presiden atau Pemilihan Kepala Daerah dan pelayanan publik lainnya.

Untuk capaian implementasi pemanfaatan data Kependudukan pada tahun 2020 dengan realisasi sebanyak 12 SKPD sehingga jika diakumulasikan dari tahun 2018, maka jumlah SKPD yang telah memanfaatkan data kependudukan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan

berjumlah 28 SKPD atau sekitar 56% dari jumlah SKPD Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 50 SKPD. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pemanfaatan data kependudukan tersebut antara lain : 1). Adanya regulasi perlindungan terhadap data sipil warga negara yang tidak dapat dipublikasikan serta dimanfaatkan untuk semua bentuk kerjasama, 2). Memanfaatkan data kependudukan membutuhkan proses perizinan yang cukup panjang dan lama ke Pemerintah Pusat sehingga mengakibatkan data kependudukan menjadi ditinggalkan jika urgensi pelaksanaan pekerjaan bersifat mendesak, 3). Keterbatasan jaringan yang dikoordinir oleh Dinas Kominfo sehingga menyebabkan belum seluruh SKPD memanfaatkan data admindukcapil secara *online*, 4). Belum tersedia aplikasi pada masing-masing OPD untuk memanfaatkan data admindukcapil sebagai salah satu syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan 5) Belum jelasnya batasan penggunaan data Adminduk yang dapat digunakan secara mudah serta 6). Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan tanggal 06 Desember 2019 yang menggantikan Permendagri Nomor 61 Tahun 2015, dimana wajib dilakukan penyesuaian nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama sesuai dengan aturan terbaru, maka pada tanggal 10 Desember 2020 telah dilakukan pembaruan naskah perjanjian kerja sama dengan 5 OPD.

2.3.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Dalam Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan data pada tabel di bawah ini memperlihatkan indikator-indikator pelaksanaan pembangunan selama tahun 2020 yang dapat dikatakan cukup berhasil. Secara kuantitatif, realisasi pencapaian sampai dengan tahun 2020 cenderung sama, hal ini dikarenakan target sasaran yang menjadi tujuan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya adalah kelompok/lembaga yang sama yang selalu ditingkatkan kapasitasnya. Sehingga diharapkan peranan dan kontribusi lembaga yang terbina dapat meningkat ditengah-tengah masyarakat.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian target antara lain yakni : 1). Tersedianya kecukupan anggaran dalam melakukan pembinaan kelembagaan sejak tahun 2016 sd 2020, 2). Intensnya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi baik kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau kepada PKK, 3). Sistem pengkaderan kelompok/lembaga binaan telah berjalan dengan baik, 4). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kelembagaan LPM 5). Tngginya partisipasi lembaga PKK dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam pelaksanaan pembinaan Posyandu.

Tabel 2.76
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat	LPM	1.139	1.139	1.139	1.139	1.158	1.158	1.356	1.356	1.356	1.356
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50
3	Jumlah LPM	Kelompok	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349
4	LPM Berprestasi	Lembaga	3	3	3	3	3	3	3	7	-	-
5	PKK aktif	Kelompok	1.338	1.338	1.338	1.338	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357
6	Posyandu aktif	%	96,80	96,80	96,80	96,80	96,26	97	96,80	98	98	98
7	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Rp.Jt	167.590	167.590	50.299	50.299	50.299	50.299	50.299	50.299	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.77
Data Perkembangan Bumdes/Bumnag Kondisi Desember 2020

No	Provinsi	Jumlah Total Desa Dan Bum Desa Se-Provinsi				Status Bum Desa			
		Jumlah Desa	Bumdes/Bumnag Belum Terbentuk	Bumdes/Bumnag Terbentuk	%	Rintisan/Persiapan	Tumbuh	Berkembang	Maju
1.	Pesisir Selatan	182	0	182	100%	15	156	11	0
2.	Solok	74	16	58	78%	17	25	9	7
3.	Sijunjung	61	0	61	100%	20	13	20	8
4.	Tanah Datar	75	3	72	96%	0	28	44	0
5.	Padang Pariaman	103	20	83	81%	0	9	65	9
6.	Agam	82	6	76	93%	8	26	37	5
7.	50 Kota	79	10	69	87%	2	11	52	4
8.	Pasaman	37	0	37	100%	5	30	2	0
9.	Kepulauan Mentawai	43	2	41	95%	34	4	3	0
10.	Dharmasraya	52	0	52	100%	4	7	37	4
11.	Solok Selatan	39	1	38	97%	0	16	21	1
12.	Pasaman Barat	19	0	19	100%	7	0	11	1
13.	Sawahlunto	27	4	23	85%	4	11	6	2
14.	Pariaman	55	8	47	85%	25	13	9	0
Sumatera Barat		928	70	858	92%	141	349	327	41

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.78
Rekapitulasi Perkembangan Status Desa dan Kelurahan

No	Kabupaten/Kota	Status Perkembangan Desa & Kelurahan			Jumlah	
		Kurang Berkembang	Berkembang	Cepat Berkembang	Nagari/Desa	Kelurahan
1	Kab Agam		61	21	82	-
2	Kota Padang Panjang		3	13	-	16
3	Kota Solok		2	11	-	13
4	Kota Padang			104	-	104
5	Kab. 50 Kota		56	23	79	-
6	Kota Bukittinggi		4	20	-	24
7	Kota Pariaman		38	33	55	16
8	Kota Sawahlunto	2	28	7	27	10
9	Kab. Sijunjung		49	22	61	-
10	Kab. Pesisir Selatan		119	63	182	-
11	Kab. Pasaman		21	16	37	-

No	Kabupaten/Kota	Status Perkembangan Desa & Kelurahan			Jumlah	
		Kurang Berkembang	Berkembang	Cepat Berkembang	Nagari/Desa	Kelurahan
12	Kab. Tanah Datar		71	4	75	
13	Kab. Mentawai	16	26	1	43	
14	Kab. Pasaman Barat	3	12	4	19	
15	Kab. Dharmasraya	15	31	6	52	
16	Kab. Solok	1	69	4	74	
17	Kab. Padang Pariaman	20	59	24	103	
18	Kab. Solok Selatan	3	31	5	39	
19	Kota Payakumbuh	7	34			41
Jumlah		67	714	381	928	224

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat

Saat ini Nagari/Desa dan Kelurahan yang optimal penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari dan Kelurahan adalah Nagari Desa dan Kelurahan yang klasifikasinya Cepat Berkembang, sedangkan nagari desa dan kelurahan yang klasifikasi Kurang Berkembang dan Berkembang penyelenggaraan pemerintah nya masih kurang optimal, hal ini berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan.

2.3.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Prevalensi pemakaian alat kontrasepsi diperoleh perbandingan dari peserta KB aktif dengan Pasangan Usia Subur, atau PA/PUS x 100 persen, hal ini karena Adanya layanan KB 1000 akseptor pada peringatan Harganas tahun 2020 dan tersedianya kontrasepsi yang dapat digunakan oleh Peserta KB aktif melalui dana BOKB dari pusat, sehingga capaian peserta KB aktif dibandingkan dengan Pasangan Usia Subur, sehingga angka capaian CPR menjadi tinggi.

Tabel 2.79

Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Contraceptive prevalence rate CPR (Prevalensi pemakaian alat kontrasepsi)	52,5	-	53,9	60,1	55,4	69,59	57	70,48	58,6	71,48
2	Unmet need (Kebutuhan ber KB)	8,3	-	7,6	9,10	7,0	7,62	6,6	6,66	6,2	6,61
3	LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	1,22	1,31	1,18	1,29	1,14	1,277	1,10	1,25	1,06	1,29

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumatera Barat dan Data BPS Provinsi Sumatera Barat

Angka *unmet need* (kebutuhan ber KB) belum mencapai target yang diharapkan. Realisasi angka *unmet need* juga diperoleh dari kabupaten/kota, sama dengan CPR, untuk capaian *unmet need* Provinsi juga tidak memiliki program/kegiatan untuk pencapaian target tersebut. Angka *unmet need* yang diperoleh dari kabupaten/kota dihitung dari Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dan Ingin Anak Tunda (IAT) dan diperoleh angka 13,32%. Namun Provinsi melakukan pendekatan untuk angka

unmet need, sebagian dari angka kabupaten/kota, sehingga diperoleh angka 6,61%. Pendekatan ini dilakukan dengan alasan bahwa dari hasil SUSENAS, bahwa kecenderungan penggunaan Alat / Obat Kontrasepsi (alokon) di Sumatera Barat baru mencapai 50%. Sehingga diasumsikan bahwa angka *unmet need* di Provinsi Sumatera Barat hanya sebagian dari data diperoleh dari kabupaten/kota.

Target Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) cenderung ambisius dengan realisasi yang cenderung *stuck* jika dibandingkan dari tahun ke tahunnya, untuk realisasi laju pertumbuhan penduduk dilihat dari data tabel di atas pada tahun 2020 lebih dari target yang ditetapkan salah satu disebabkan oleh dampak COVID-19 dengan peraturan PSBB membuat pasangan usia produktif memiliki waktu yang intens untuk berada di rumah. Hal ini juga ditandai dengan angka kelahiran total yang cenderung meningkat dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2016 sebesar 2,4, 2017 sebesar 2,58, tahun 2018 sebesar 2,68 dan tahun 2019 dan 2020 sebesar 2,74

2.3.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Jumlah penumpang Angkutan Umum merupakan salah satu indikator keberhasilan di dalam Penyelenggaraan/Pengelolaan Angkutan Umum. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah penumpang yang terangkut dengan menggunakan Angkutan Umum. Peningkatan Jumlah penumpang Angkutan umum sangat tergantung kemudahan akses layanan (jangkauan perjalanan) dan kehandalan (frekuensi perjalanan) dari angkutan umum itu tersendiri.

Perkembangan jumlah penumpang angkutan umum di Sumatera Barat sangat berfluktuasi, terutama pada Angkutan Darat, Laut dan Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP). Dengan memperhatikan Tabel 2.56 menunjukkan bahwa penumpang angkutan umum darat menunjukkan kecenderungan kenaikannya dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Kenaikan jumlah penumpang angkutan darat dari tahun 2015 - 2017 rata-rata sebesar 18,01% atau rata-rata 14.027.021 orang/tahun. Namun jumlah penumpang pada tahun 2018, terjadi penurunan sebesar 7.586.885 atau 7,5% dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan karena masyarakat beralih dari menggunakan angkutan umum ke kendaraan pribadi. Berkurangnya jumlah penumpang angkutan darat juga berpengaruh terhadap penurunan pengoperasian atau rit perjalanan angkutan umum. Pada tahun 2019, jumlah penumpang angkutan darat mulai mengalami peningkatan, dari 93.532.784 orang tahun 2018 menjadi 95.203.372 orang tahun 2019. Namun kondisi pandemi yang terjadi pada awal tahun 2020 berdampak terhadap penurunan signifikan jumlah penumpang angkutan umum darat menjadi 11.172.926 atau menurun 88%. Hal ini disebabkan akibat pemerintah daerah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga terjadinya keterbatasan pergerakan orang antar wilayah.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2020, terjadi kecenderungan penurunan izin yang dikeluarkan untuk Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP). Pada tahun 2018 izin yang dikeluarkan adalah sebanyak 121, Tahun 2019 naik sedikit menjadi 132, kemudian tahun 2020 turun kembali menjadi 117 izin. Penurunan ini terjadi karena penurunan jumlah kendaraan yang beroperasi, yaitu pada tahun 2018 sebanyak 115 kendaraan, pada tahun 2019 sebanyak 85 kendaraan dan pada tahun 2020 sebanyak 81 kendaraan.

Hal yang sama juga terjadi pada pelayanan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Jumlah kendaraan yang beroperasi pada tahun 2018 sebanyak 1877 kendaraan turun menjadi 1631, artinya terjadi penurunan jumlah layanan kendaraan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 246. Kondisi ini terjadi lagi pada tahun 2020, dimana jumlah kendaraan yang beroperasi kembali mengalami penurunan sebanyak 47 kendaraan.

Tabel 2.80
Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penumpang Angkutan Umum							
1	Angkutan darat	Orang	79.419.204	101.119.669	93.532.784	95.203.372	11.172.926
2	Angkutan Laut	Orang	78.043	93.176	110.177	113.886	105.502
3	Angkutan Udara	Domestik	3,340,818	3,663,448	3,886,541	2,728,597	1,209,126
		Internasional	202,089	231,097	289,187	341,993	62,715
4	Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan	Orang	77.125	77.759	79.554	65.650	37.568
5	Angkutan Kereta Api	Orang	1.593.930	1.088.236	1.389.171	1.474.934	595.509
Sarana Transportasi							
1	Pelabuhan Penyeberangan Padang – Mentawai	Unit	4	4	4	4	4
2	Bandara	Buah	3	3	3	4	4
3	Terminal Bus type B	Buah	11	11	5	5	5

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah penumpang yang cukup signifikan pada Angkutan Laut dan penurunan jumlah penumpang pada Angkutan SDP. Pada tabel tersebut, jumlah penumpang angkutan laut meningkat dari 110.177 orang untuk tahun 2018 menjadi 113.886 orang untuk tahun 2019 dan Angkutan SDP memiliki jumlah penumpang 79.554 orang untuk tahun 2018 menjadi 65.650 orang untuk tahun 2019. Gambaran tersebut dapat dijelaskan bahwa semenjak beroperasi Kapal Cepat Angkutan Laut ke Padang - Mentawai menyebabkan berkurangnya jumlah penumpang kapal SDP. Dan peningkatan frekuensi layanan pengoperasian Kapal Cepat menjadi salah satu faktor beralihnya penumpang dari menggunakan kapal SDP ke Kapal Cepat Angkutan Laut. Sama halnya dengan penumpang angkutan darat, pada tahun 2020 penumpang moda angkutan laut dan SDP juga menurun drastis akibat kebijakan pemerintah terhadap pembatasan pergerakan orang dimasa pandemi

Sektor Angkutan Udara tidak lagi menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat semenjak tahun 2014 namun Provinsi Sumatera Barat hanya sebagai Pengawas untuk Angkutan Udara. Untuk jumlah penumpang Angkutan Udara (Domestik) dari tahun 2015-2018 mengalami kenaikan dan untuk jumlah penumpang Angkutan Udara (Internasional) dari tahun 2015-2019 sangat berfluktuasi. Pada tahun 2020, angkutan udara juga terpengaruh akibat pandemi sehingga mengakibatkan penurunan penumpang yang signifikan

Sedangkan Angkutan Kereta Api, penumpang Angkutan Kereta Api dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16,90% per tahun atau sekitar 191.991 penumpang per tahun. Peningkatan tersebut di sebabkan karena peningkatan frekuensi layanan masing-masing angkutan. Penambahan frekuensi layanan disebabkan adanya kecenderungan dan keinginan masyarakat untuk menggunakan angkutan tersebut, karena angkutan tersebut memiliki waktu tempuh yang lebih cepat dan kenyamanan dibandingkan angkutan lain. Kondisi penumpang angkutan kereta api pada tahun 2020 mengalami penurunan tajam akibat pengaruh pandemi yang membatasi pergerakan orang.

Kemudian ketersediaan fasilitas Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal belum mengalami peningkatan. Penambahan fasilitas hanya terdapat pada fasilitas bandara yakni terbangunnya 1 (satu) fasilitas bandar udara di Pasaman Barat dan untuk fasilitas terminal mengalami pengurangan

dikarenakan terminal Type A sudah menjadi kewenangan pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan). Sedangkan untuk pelabuhan belum mengalami penambahan.

Berdasarkan Permenhub RI Nomor 132/2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan pasal 20 menyatakan bahwa setiap penyelenggara terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan, fasilitas terminal penumpang tersebut terdiri atas fasilitas utama (23 fasilitas) dan fasilitas penunjang (12 fasilitas). Untuk terminal Tipe B di Provinsi Sumatera Barat yang jumlahnya 5 terminal, yaitu Terminal Sawahlunto, Terminal Sago Painan, Terminal Koto Nan IV Payakumbuh, Terminal Koto Panjang Tanah Datar, dan Terminal Bukit Surungan Padang Panjang. Kondisi fasilitas utama dan fasilitas penunjangnya (kondisi tahun 2020) adalah sebagai berikut :

1. Terminal Sawahlunto fasilitas utama dengan kondisi baik 4,35 % (1 fasilitas) dan fasilitas penunjang 8,33 % (1 fasilitas).
2. Terminal Sago Painan fasilitas utama dengan kondisi baik 17,39 % (4 fasilitas) dan fasilitas penunjang 8,33 % (1 fasilitas).
3. Terminal Koto Nan IV Payakumbuh fasilitas utama dengan kondisi baik 8,7 % (2 fasilitas) dan fasilitas penunjang 25 % (3 fasilitas).
4. Terminal Koto Panjang Tanah Datar fasilitas utama dengan kondisi baik 13,04 % (3 fasilitas) dan fasilitas penunjang 8,33 % (1 fasilitas).
5. Terminal Bukit Surungan Padang Panjang fasilitas utama dengan kondisi baik 0 % (0 fasilitas) dan fasilitas penunjang 33,3 % (4 fasilitas).

Terkait dengan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelabuhan dapat diinformasikan bahwa keberadaan pelabuhan laut saat ini belum memenuhi standar sandar kapal tol laut. Perlu dilakukan pengembangan pelabuhan agar memenuhi standar pelayanan sandar kapal tol laut dengan panjang dermaga 120 meter. terkait hal tersebut akan dilakukan pengembangan sarana dan prasarana beberapa pelabuhan yang memenuhi standar untuk melayani sandar kapal tol laut sebagai berikut :

1. Pelabuhan Tua Pejat, dengan panjang dermaga saat ini 70 meter dan akan diperpanjang menjadi 120 meter.
2. Pelabuhan Muara Siberut dengan panjang dermaga saat ini 52 meter dan akan diperpanjang menjadi 120 meter.
3. Pelabuhan Labuhan Bajau, dengan panjang dermaga saat ini 70 meter dan akan diperpanjang menjadi 120 meter.

Sarana dan prasarana perhubungan tidak terlepas dari Fasilitas Keselamatan Jalan yang tersedia. Kebutuhan akan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri dari rambu, marka, guardrail, delineator, PJU, *warning light*, dan cermin tikung dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) kereta api berupa pita kejut dan rambu, adalah sebagai berikut :

A. Data kebutuhan dan realisasi perlengkapan jalan sampai dengan tahun 2020

1. Kebutuhan rambu untuk jalan provinsi adalah sebesar 93.343 Unit, yang sudah terpenuhi 0,64 %.
2. Kebutuhan marka untuk jalan provinsi adalah sebesar 1.139.697 Meter Unit, yang sudah terpenuhi 1,08 %.
4. Kebutuhan *Guardrail* untuk jalan provinsi adalah sebesar 30.654 Meter, yang sudah terpenuhi 2,6 %.
5. Kebutuhan delineator untuk jalan provinsi adalah sebesar 19.412 Unit, yang sudah terpenuhi 0,85 %.
6. Kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk jalan provinsi adalah sebesar 152 Unit, yang sudah terpenuhi 3,95%.

7. Kebutuhan *Warning Light* untuk jalan provinsi adalah sebesar 25 Unit, yang sudah terpenuhi 40 %.
8. Kebutuhan Cermin Tikung untuk jalan provinsi adalah sebesar 35 Unit, yang sudah terpenuhi 34,29 %.

B. Data kebutuhan dan realisasi perlengkapan MRLL Kereta Api sampai dengan tahun 2020

1. Kebutuhan pita kejut untuk jalan provinsi adalah sebesar 482 titik, yang sudah terpenuhi 21,58 %.
2. Kebutuhan rambu untuk jalan provinsi adalah sebesar 388 Unit, yang sudah terpenuhi 34,02 %.

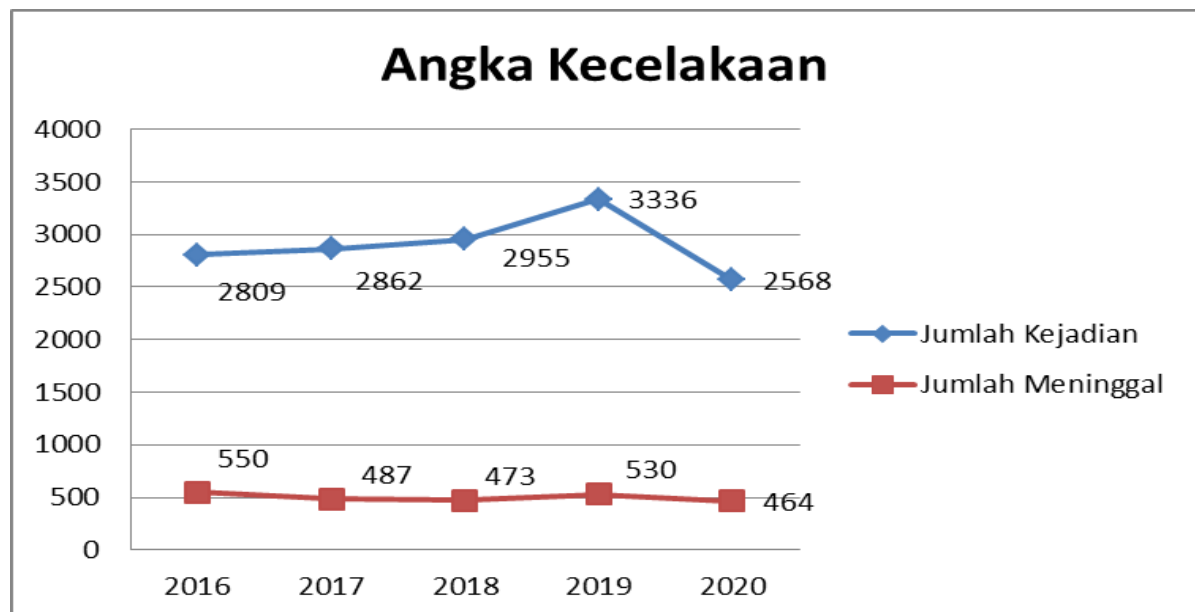
Angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Sumatera Barat (19 Kab/kota) pada Tahun 2016 sampai Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.81
Angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Sumatera Barat (19 Kab/kota) pada Tahun 2016 sampai Tahun 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kejadian	2809	2862	2955	3336	2568
Jumlah Meninggal	550	487	473	530	464

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2021

Grafik 2.23
Angka Kecelakaan di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2016 - 2020



Artinya rasio angka kecelakaan berdasarkan data dari tahun 2016 sampai tahun 2020 berfluktuasi. Kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan oleh *human error*, kondisi kendaraan dan jalan yang berlubang dan kurangnya fasilitas keselamatan jalan untuk jalan raya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terdapat beberapa Proyek RPJMN sektor perhubungan yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat, seperti pembangunan dan reaktivasi jalur Kereta Api, pengembangan bandara Rokot Kepulauan Mentawai, serta pengembangan beberapa Pelabuhan yang terletak di Kepulauan Mentawai seperti Pelabuhan Labuan Bajau, Pelabuhan Penyeberangan Sikabulan, Pelabuhan Penyeberangan Pagai Selatan.

Peningkatan jalur KA pada RPJMN 2020 – 2024 diprioritaskan pada jalur Padang - Pariaman; Padang- Bukit Putus; Kayu Tanam - Batu Tabal) dan reaktivasi diprioritaskan Reaktivasi Jalur KA Pariaman-Naras - Sungai Limau.

Bandara Rokot di Kabupaten Mentawai memiliki keterbatasan lahan dan geografis sehingga sulit untuk dapat dikembangkan lagi. Untuk mendukung konektivitas dan pengembangan wisata di Mentawai melalui Dana SBSN 2020 – 2024 dikembangkan bandara Mentawai Baru yang diharapkan dapat melayani pesawat ATR 72.

Progress Pembangunan fisik Pelabuhan Labuhan Bajau untuk sisi laut berupa dermaga telah selesai dikerjakan dan tahun 2021 dilaksanakan pekerjaan sisi darat berupa pekerjaan Talud. Pembangunan Pelabuhan penyeberangan Sikabulan masih terkendala dengan lahan pelabuhan yang berada dalam kawasan hutan lindung. Untuk Pelabuhan Penyeberangan Pagai Selatan direncanakan akan disusun Dokumen Perencanaan Studi Kelayakannya.

2.3.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa komitmen perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat untuk pemanfaatan teknologi dan informatika dalam penyelenggaraan pemerintah daerah masih cenderung fluktuatif. Capaian tahun 2019 tidak lebih baik dibandingkan capaian tahun 2018 baik dilihat dari Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengembangkan Teknologi Informasi serta dari Tingkat pemanfaatan teknologi informasi pada perangkat daerah.

Tabel 2.82
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Perangkat daerah yang mengembangkan teknologi informasi (%)	100	N/A	100	30	100	48	100	38	100	100
2	Tingkat pemanfaatan teknologi informasi pada perangkat daerah (%)	50	N/A	70	22	80	46	90	36	95	98

Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat

Sehubungan dengan ketersediaan akses Internet pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat hingga kondisi saat ini telah terhubung ke seluruh OPD yang data Jaringan Infrastruktur yang terpusat dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik kecuali RSUD. Achmad Muchtar, RSUD Pariaman dan RSUD M. Natsir dan Badan Penghubung, hal ini dikarenakan lokasi kantor tidak berada di Kota Padang sehingga penyediaan akses internet pada OPD tersebut dilakukan secara mandiri.

Sedangkan saat ini telah terdapat beberapa aplikasi generik yang dapat digunakan oleh semua OPD, misalnya Aplikasi Absensi Online, Aplikasi TPP, Aplikasi E Kinerja sudah menerapkan konsep berbagi pakai data yaitu database kepegawaian dan Aplikasi SDP2D (Sistem Database Perencanaan Pembangunan Daerah) yang sudah interoperabilitas atau berbagi pakai data yang sumber datanya dihimpun dari data data statistik sektoral OPD.

2.3.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Keberadaan koperasi di tengah-tengah masyarakat mampu memberikan nilai tambah terhadap pendapatan masyarakat khususnya anggota koperasi dari tahun ke tahun. Nilai tambah pendapatan masyarakat dalam bentuk PDRB koperasi tersebut berasal dari pendapatan koperasi yang

berasal dari usaha yang dijalankan oleh koperasi, baik dari usaha simpan pinjam maupun usaha sektor riil seperti pengadaan Sarana Produksi (SAPRODI) pada koperasi produsen, waserda pada koperasi konsumen, pemasaran hasil produksi anggotanya pada koperasi pemasaran dan jasa biro pariwisata, travel pada koperasi jasa dan usaha-usaha lainnya yang sesuai dengan jenis koperasi serta jenis usaha yang tercantum di dalam anggaran dasar masing-masing koperasi.

Perkembangan jumlah koperasi di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Saat ini koperasi sangat diminati oleh masyarakat sebagai sarana untuk menjalankan aktivitas keuangan. Minat masyarakat terhadap koperasi dilihat berdasarkan jumlah peningkatan masyarakat menjadi anggota koperasi, hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.83
Perkembangan Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase koperasi aktif	%	71,43	77,31	77,67	78,02	50,34
2.	Peningkatan nilai Asset Koperasi	Rp. Juta	3.750.833	4.277.051	4.769.705	5.225.355	5.426.381
3.	Persentase Peningkatan Omset Koperasi	%	11,18	9,10	10,61	8,55	15,58
4.	Jumlah Koperasi yang memiliki Sertifikat NIK	Koperasi	225	732	1.055	1.391	1,426
5.	Jumlah Koperasi	Unit	4.047	3.549	3.624	3.805	3.981
6.	Jumlah Anggota Koperasi	Orang	547.784	589.784	591.549	601.472	606.696

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Barat. Keberadaan UMKM diharapkan dapat menjadi daya ungkit bagi masyarakat Sumatera Barat yang memiliki jiwa berwirausaha. Aktivitas UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya. Untuk itu dibutuhkan perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM.

Berdasarkan Sensus ekonomi Tahun 2016, jumlah UMKM di Sumatera Barat sebanyak 593.100 unit dengan rincian Usaha Mikro 531.350 Unit (89,59%) dan Usaha Kecil 53.431 Unit (9,01%) yang mempunyai kontribusi dalam perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jumlah UMKM di Sumatera Barat yang mencapai lebih 90% dari total jumlah sektor usaha, menjadikan UMKM sebagai salah satu wadah paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian tinggi, seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.84
Perkembangan Indikator Urusan Usaha Kecil, Dan Menengah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	UMKM yang di bina	Unit	968	1.647	2.594	2.309	2.083
2	Perkuatan Produk UMKM	Unit	75	390	500	120	120
3	Pengembangan UMKM Kerajinan Unggulan Sumbar	Unit	80	223	522	124	40

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Seiring perkembangan zaman, pada saat ini teknologi digital memiliki pengaruh yang cukup besar pada pertumbuhan UMKM, terutama dalam persaingan secara global. Oleh sebab itu pelaku

UMKM didorong untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran produknya. Berdasarkan pencatatan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat telah tercatat 579 UMKM yang memanfaatkan teknologi digital.

Selain itu, berdasarkan program Kementerian Koperasi, UMKM juga dituntut untuk memiliki standarisasi produk yang memberikan beberapa keuntungan, yaitu antara lain adanya jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional dan global, dan perlindungan terhadap konsumen. Pada Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2021 telah tercatat 285 produk UMKM yang memiliki standarisasi. Hal ini tergolong cukup rendah dalam pengembangan UMKM. Sehingga perlu adanya tindakan pemerintah dalam mendukung standarisasi produk UMKM guna meningkatkan nilai saing UMKM di Sumatera Barat.

Tabel 2.85
Pemanfaatan Teknologi dan Standarisasi Produk UMKM
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Jenis Data	Satuan	Tahun					Jumlah
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah UMKM yang memanfaatkan teknologi digital	UMKM	0	0	529	50	0	579
2	Jumlah standarisasi produk UMKM	produk	55	100	40	45	45	285

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

2.3.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang melaksanakan kegiatan penanaman modal dari tahun 2016-2020, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Perusahaan PMDN yang melakukan realisasi penanaman modal meningkat dari 74 perusahaan di tahun 2016 menjadi 237 perusahaan pada tahun 2020. Sedangkan perusahaan PMA yang melakukan realisasi investasi menurun dari 63 perusahaan di tahun 2019 menjadi 55 perusahaan di tahun 2020.

Perkembangan realisasi investasi PMDN cukup berfluktuatif, dimana pada rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Namun kondisi tersebut mengalami perbaikan/peningkatan kembali mulai tahun 2018, 2019, dan 2020. Begitu juga dengan perkembangan realisasi investasi PMA yang berfluktuatif, dimana pada rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat baik. Namun kondisi tersebut mengalami kemunduran/penurunan pada tahun 2018, 2019, dan 2020.

Perkembangan realisasi investasi PMDN dan PMA yang cukup fluktuatif, dapat dilihat juga pada persentase kenaikan/penurunan nilai investasi. Pada realisasi investasi PMDN bahkan sempat turun sebesar -60,03% pada tahun 2017 dan meningkat hingga mencapai 52,24% pada tahun 2018. Sedangkan pada realisasi investasi PMA tahun 2016 dan 2017, kenaikannya mencapai 99,39% dan 145,28%, namun penurunannya juga cukup signifikan pada tahun 2020 sebesar -20,06%.

Untuk jumlah perusahaan PMDN yang merealisasikan investasi, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah perusahaan PMDN yang merealisasikan investasi, perkembangannya cukup berfluktuatif, dimana terjadi peningkatan dari mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, kemudian turun kembali pada tahun 2019 dan 2020.

Untuk rasio penyerapan tenaga kerja juga cukup berfluktuatif, yang paling signifikan adalah capaian pada tahun 2019 masing-masing PMDN dan PMA adalah 1 : 45 dan 1 : 93. Namun terjadi penurunan yang juga cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 1 : 19 dan 1 : 13.

Tabel 2.86
Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah/ Rekapitulasi Realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)						
	- PMDN	Rp. Juta	18.209.696,29	19.976.610,30	22.286.059,90	25,312,705.70	28,418,884.40
	- PMA	US\$ Ribu	1.312.538,00	1.485.457,73	1.666.257,43	1,823,371.33	1,948,960.73
2	Nilai Realisasi Investasi Tahunan						
	- PMDN	Rp. Juta	3.795.575,50	1.516.964,30	2.309.449,60	3.026.645,80	3.106.178,70
	- PMA	US\$ Ribu	79.268,10	194.425,20	180.799,70	157.113,90	125.589,40
3	Jumlah Perusahaan yang merealisasikan investasi						
	- PMDN	perusahaan	74	113	132	161	183
	- PMA	perusahaan	51	52	74	63	55
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi						
	a. PMDN						
	-Nilai	Rp. Juta	610.499,68	-2.278.611,20	792.485,30	717.196,20	79.532,90
	- (%)	%	19,17	-60,03	52,24	31,05	2,63
	b. PMA						
	- Nilai	000 US \$	39.513,78	115.157,10	-13.625,50	-23.685,80	- 31.524,50
	-(%)	%	99.39	145.28	-7.01	-13,10	-20,06
5	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja						
	- PMDN	Proyek : Orang	1 : 25	1 : 23	1 : 15	1 : 45	1 : 19
	- PMA	Proyek : Orang	1 : 23	1 : 8	1 : 39	1 : 93	1 : 13
6	Realisasi Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja dari Proyek PMDN Yang Telah Mendapat Persetujuan Tetap Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Barat						
	1). Jumlah Proyek	Proyek	81	122	142	175	237
	2). Investasi	Rp. Juta	3.795.575,50	1.516.964,30	2.309.449,60	3.026.645,80	3.106.178,70
	3). Tenaga Kerja	Orang	2.034	2.782	2.080	7.828	4.604
7	Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja dari Proyek PMA Yang Telah Mendapat Persetujuan Tetap Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Barat						
	1). Jumlah Proyek	Proyek	57	53	81	77	69
	2). Investasi	000 US \$	79.298,10	194.425,20	180.799,70	157.113,90	125.589,40
	3). Tenaga Kerja	Orang	1.303	404	3.198	7.140	873

Sumber: DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat (publikasi Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka)

Selain itu, berbagai bentuk pelayanan perizinan sekarang ini, cukup dilakukan pada satu pintu saja dengan berbagai kemudahan-kemudahan baik itu dari sisi persyaratan, proses dan waktu penyelesaian perizinan.

Saat ini DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570-422-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan melayani 247 jenis perizinan dan non perizinan dari 18 sektor. Berbagai perizinan tersebut telah dapat diproses secara *online* dengan menggunakan Aplikasi Pelayanan Perizinan secara Elektronik yang diberi nama Sistem Informasi Perizinan Sakato disingkat SIP SAKATO. Aplikasi ini memberikan pelayanan *online* untuk pendaftaran, *tracking* perizinan, laporan pengaduan, dan terdapat juga fitur GIS (*Geografic Information System*) dimana masyarakat dapat mengecek lokasi perizinan secara spasial. Hadirnya layanan perizinan "*online*" SIP Sakato merupakan salah satu langkah mewujudkan kemudahan yang didapat oleh masyarakat serta

mempersingkat waktu pengurusan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya izin.

Lamanya proses perizinan diatur dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.570-440/2017. Keputusan Gubernur Sumatera Barat terkait dengan lamanya proses perizinan mengacu ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2.3.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga

Capaian Urusan Pemerintahan Bidang kepemudaan dan olahraga, secara umum tergambar sebagaimana tabel dibawah ini. Capaian jumlah wirausaha muda baru di tahun 2019 sebanyak 376 orang dan sangat meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 240 orang, namun capaian persentase organisasi kepemudaan yang aktif di tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 dari sebesar 66% menjadi 40%. Beberapa hal menjadi penyebab hal ini antara lain, belum matangnya tata kelola organisasi, serta terbatasnya pendanaan organisasi untuk membiaya operasional dan kegiatan organisasi mengingat para anggota organisasi pemuda yang berusia 18 sampai dengan 30 tahun yang relatif mulai mapan secara ekonomi.

Tabel 2.87
Perkembangan Indikator Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang urus n/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah wirausaha muda baru	38	30	40	50	45	240	50	376		
2	Organisasi kepemudaan yang aktif (%)	12	63	14	62	16	66	18	40		

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi indikator jumlah wirausaha muda baru tahun 2020 tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan pada RPJMD. Hal ini disebabkan karena munculnya Pandemi COVID-19 yang membawa dampak signifikan pada berbagai aspek termasuk aspek ekonomi. Sehingga jumlah wirausaha muda baru tidak bisa terwujud.

Selain dari indikator urusan diatas, dalam 5 (lima) tahun terakhir Dinas Pemuda dan Olahraga telah menyelenggarakan even yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi kepemudaan diantaranya peningkatan kapasitas dan daya saing kepemudaan dalam rangka pemuda kader, pemuda pelopor, kepemimpinan, kepanduan/kepramukaan. Namun dalam pelaksanaan masih belum maksimal karena belum mengakomodir sebagian besar kebutuhan pemuda Sumatera Barat.

Tabel 2.88
Data Sarana dan Prasarana Olah Raga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Kabupaten/kota	Jumlah Sarana Olahraga	Standar Sarana		Keterangan
			Nasional	Internasional	
1.	Kab. Kep. Mentawai	2	1 Memenuhi Syarat	-	
2.	Kab. Pesisir Selatan	13	3 Memenuhi Syarat	-	
3.	Kab. Solok	7	2 Memenuhi Syarat	-	

No	Kabupaten/kota	Jumlah Sarana Olahraga	Standar Sarana		Keterangan
			Nasional	Internasional	
4.	Kab. Sijunjung	5	2 Memenuhi Syarat	-	
5.	Kab. Tanah Datar	5	2 Memenuhi Syarat	-	
6.	Kab. Padang Pariaman	10	1 Memenuhi Syarat	-	
7.	Kab. Agam	10	1 Memenuhi Syarat	-	
8.	Kab. Lima Puluh Kota	5	1 Memenuhi Syarat	-	
9.	Kab. Pasaman	5	1 Memenuhi Syarat	-	
10.	Kab. Solok Selatan	10	2 Memenuhi Syarat	-	
11.	Kab. Dharmasraya	15	2 Memenuhi Syarat	-	
12.	Kab. Pasaman Barat	6	2 Memenuhi Syarat	-	
13.	Kota Padang	40	20 Memenuhi Syarat	-	
14.	Kota Solok	10	1 Memenuhi Syarat	-	
15.	Kota Sawahlunto	6	1 Memenuhi Syarat	-	
16.	Kota Padang Panjang	13	1 Memenuhi Syarat	-	
17.	Kota Bukittinggi	20	1 Memenuhi Syarat	-	
18.	Kota Payakumbuh	15	1 Memenuhi Syarat	-	
19.	Kota Pariaman	10	1 Memenuhi Syarat	-	
	Jumlah	207			

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Sarana dan Prasarana Olahraga yang berada di Provinsi Sumatera Barat sebagian telah memenuhi standar nasional tetapi belum memenuhi syarat untuk mencapai standar internasional dikarenakan keterbatasan fasilitas yang dimiliki.

Perlu penguatan kerjasama Sekolah Kebakatan Olahraga dibawah Dinas Pendidikan Sumatera Barat dengan PPLP dibawah UPTD KBOR Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat terkait pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan peningkatan sarana dan prasarana di PPLP yang bisa mengakomodir cabang – cabang olahraga binaan PPLP Sumatera Barat. Dengan kondisi saat sekarang ini atlet binaan PPLP terdiri dari :

Tabel 2.89
Data Binaan Atlet PPLP Sumatera Barat Tahun 2021/2022

No	Cabang Olahraga	Jumlah Atlet	Dana Pembinaan
1	Sepak Bola	22 Orang	APBN
2	Atletik	12 Orang	APBN

No	Cabang Olahraga	Jumlah Atlet	Dana Pembinaan
3	Sepak Takraw	18 Orang	APBD
4	Gulat	14 Orang	APBD
5	Pencak Silat	14 Orang	APBD
6	Senam	12 Orang	APBD dan APBN
7	Tinju	7 Orang	APBD
8	Taekwondo	10 Orang	APBN
9	Judo	4 Orang	APBD
10	Karate	6 Orang	APBN
11	Panahan	4 Orang	APBD
12	Balap Sepeda	4 Orang	APBD
	Jumlah	127 Orang	

Sumber : PPLP / UPTD KBOR DISPORA PROV. SUMBAR

Jaminan atlet berprestasi termasuk mantan atlet telah diakomodir pada Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 86 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Pasal 18 dan 19 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Penguatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Sumatera Barat untuk memfasilitasi atlet PPLP Sumatera Barat melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi negeri seperti Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang. Pada saat sekarang ini telah terjalin kerjasama antara PPLP Sumatera Barat dengan UNP sehingga untuk atlet berprestasi dapat langsung meneruskan pendidikan ke jenjang berikutnya melalui rekomendasi dari PPLP dan ini diharapkan nantinya menjadi perhatian bagi perguruan tinggi swasta dalam menerima atlet berprestasi. Dengan rincian :

Tabel 2.90

Data Atlet Berprestasi PPLP Sumatera Barat yang Diterima Pada Perguruan Tinggi Negeri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020/2021

No	Jumlah Atlet	Perguruan Tinggi Negeri	Cabang Olahraga
1	5 Orang	UNAND	Gulat, Taekwondo, dan Senam
2	12 Orang	UNP	Athletik, Sepak takraw, Sepak Bola, dan Senam

Sumber Data : PPLP / UPTD KBOR Sumatera Barat

Setelah selesai menamatkan pendidikan diharapkan atlet PPLP dilanjutkan pembinaannya dibawah PPOPD (Pusat Pembinaan Olahraga Prestasi Daerah) yang membina atlet berprestasi tingkat Nasional.

2.3.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Perkembangan dari indikator urusan Pemerintahan Bidang statistik, secara umum dapat dikatakan sudah memenuhi standar pelayanan umum daerah, hal ini tercermin dari tersedianya Buku Provinsi Dalam Angka dan Buku PDRB Provinsi setiap tahunnya dari tahun 2016-2020.

Perkembangan Buku Sumbar Dalam Angka dan Buku PDRB masih dilaksanakan oleh BPS bekerja sama dengan Dinas Kominfo, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, pada dua peraturan tersebut dinyatakan jika OPD yang menangani statistik sektoral adalah sebagai wali data.

Tabel 2.91
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Buku Provinsi Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku PDRB Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat

2.3.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Pada tahun 2020 target dari pengaman informasi berupa Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk 40 Kepala OPD. Instruksi Gubernur tentang Izin Perjalanan Dinas bagi Pimpinan Tinggi Pratama melalui *e-Sign*, maka kepala Dinas pada 50 OPD termasuk Rumah Sakit sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Sertifikat Elektronik).

Tabel 2.92
Kinerja Persandian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi	0*	0*	20	17	40	36	60	100	80	100

Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat

*) Tahun 2016 kewenangan persandian belum dilaksanakan oleh Dinas Kominfo

2.3.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Capaian kinerja urusan wajib kebudayaan tahun 2020 pada indikator jumlah warisan budaya tak benda (*Intangible*) yang ditetapkan oleh pemerintah sudah baik yaitu sebanyak 34 jenis jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sebanyak 30 jenis, Capaian terbaiknya adalah ketika ditetapkan Ombilin *Coal Mining Heritage* (OCMH) sebagai warisan dunia, sedangkan untuk indikator jumlah warisan budaya benda (*tangible*) yang ditetapkan pemerintah belum dapat terpenuhi karena belum terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) tingkat provinsi.

Tabel 2.93
Perkembangan Indikator Urusan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (%)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Peningkatan jumlah warisan budaya tak benda (<i>intangible</i>) yang ditetapkan oleh pemerintah	10	80	15	6	20	5	25	65	30	34
2	Peningkatan jumlah warisan budaya benda (<i>tangible</i>) yang ditetapkan pemerintah	NA	0	10	0	15	0	20	0	25	0

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Faktor pendorong banyaknya warisan budaya tak benda yang ditetapkan pada tahun 2020 antara lain 1). meningkatnya kesadaran pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat pelaku budaya akan pentingnya pemajuan kebudayaan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang dibuktikan dengan mulai adanya anggaran untuk pelestarian nilai kebudayaan yang diawali dari perlindungan, pengembangan,

pemanfaatan dan pembinaan, serta 2). sebanyak 18 (delapan belas) pemerintah kabupaten/kota kecuali Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang baru menyusun tahun 2020 ini, telah memiliki dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang berisikan antara lain inventarisasi data-data 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan beserta dengan kondisi nya, permasalahan serta arah kebijakan.

Namun untuk warisan budaya benda masih nihil realisasi sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 hal ini disebabkan karena sebagian besar kabupaten/kota dan pemerintah provinsi belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Sejak tahun 2018, Penetapan Cagar Budaya/Warisan Budaya Benda dilakukan secara berjenjang oleh TACB kabupaten/kota yang kemudian diteruskan oleh TACB provinsi.

Berdasarkan hasil Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan BAPPENAS dan BPS pada tahun 2018 nilai IPK Sumatera Barat yakni 53,23 dengan rincian indeks masing-masing dimensi yakni:

- 1) Dimensi Ekonomi budaya dengan nilai indeks 33,82
- 2) Dimensi Pendidikan dengan nilai indeks 72,97
- 3) Dimensi Ketahanan sosial budaya dengan nilai indeks 62,78
- 4) Dimensi Warisan budaya dengan nilai indeks 43,30
- 5) Dimensi Ekspresi budaya dengan nilai indeks 31,37
- 6) Dimensi Budaya literasi dengan nilai indeks 57,40
- 7) Dimensi Gender dengan nilai indeks 59,90

2.3.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan wajib perpustakaan berdasarkan indikator yang ada, menunjukkan perkembangan yang baik terlihat dari meningkatnya rata-rata kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat dari 127.000 orang pertahun di tahun 2018 menjadi 152.864 orang pertahun di tahun 2019. Namun untuk peningkatan jumlah koleksi buku di tahun 2019 cenderung menurun dibandingkan tahun 2019, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran.

Tabel 2.94
Perkembangan Indikator Urusan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan (rata-rata)	57.000	86.189	58.000	103.463	59.000	127.220	60.000	152.864	61.000	38.578
2	Peningkatan jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan provinsi (eksemplar)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.906	13.000	330	13.000	750

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi indikator jumlah kunjungan perpustakaan tahun 2020 tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan pada RPJMD. Hal ini disebabkan karena munculnya Pandemi COVID-19 yang membawa dampak signifikan berbagai aspek. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali terhadap pelayanan perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berdampak terhadap jumlah kunjungan di perpustakaan.

Sedangkan pada indikator jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Provinsi juga tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh kurangnya anggaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat untuk menambah koleksi buku.

2.3.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Jumlah OPD yang telah menerapkan tertib arsip baru berkisar 48% dari 50 OPD (Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019). Hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan komitmen OPD dalam pengelolaan arsip yang baik. Sementara jumlah OPD yang menggunakan sistem kearsipan, jumlah Arsip yang diselamatkan dan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mencapai target pada Tahun 2020.

Beberapa permasalahan dalam mewujudkan tertib arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain : 1). Masih rendahnya komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan tertib arsip yang ditandai dengan tidak adanya ruangan arsip yang memadai; 2). Minimnya jumlah SDM Fungsional arsip yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan belum seluruh OPD yang memiliki fungsional arsip hal ini dikarenakan rendahnya minat ASN untuk menjadi Pengelola Arsip (Fungsional Arsiparis; 3). Tidak tersedianya nomenklatur kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kearsipan di masing-masing SKPD.

Tabel 2.95
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Pencipta Arsip yang tertib (perangkat daerah)	13	2	7	2	7	4	7	6	8	8
2	Jumlah SKPD yang menggunakan sistem kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
3	Jumlah Arsip yang diselamatkan (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

2.3.3. Urusan Pilihan

2.3.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, efisien, berkualitas. Kewenangan Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pengaturan tata ruang untuk mengelola sumber daya alam di laut, telah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Tahun 2018-2038 mempunyai kawasan laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 51.060,23 km² dengan panjang garis pantai Sumatera Barat yaitu 570,55 km ditambahkan dengan Kepulauan Mentawai menjadi 1.973,246 Km dan 185 pulau-pulau kecil.

Tabel 2.96
Perkembangan Indikator Urusan Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Produksi perikanan tangkap (ton)	217.950,10	218.082,80	220.586,80	222.604,40	223.256,40	223.445	225.957,10	226.253,0	228.691,40	208556,14
2	Produksi perikanan budidaya (ton)	318.249,85	269.837,92	354.084,79	266.991,30	398.444,21	270.440,87	444.265,29	284.320,0*	496422,04	245498,38
3	Peningkatan Produksi budidaya laut (ton)	220,00	310,24	224,00	233,369	228,00	233,20	233,00	233,00*	238	61,43
4	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita)	35,16	36,42	35,58	38,21	36,00	38,97	36,43	40,25	36,86	39,27
5	Kontribusi Lapangan usaha perikanan terhadap PDRB (%)	-	3,55	-	3,61	-	3,90	-	3,92	-	4,08

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Pengembangan produksi perikanan tangkap memiliki prospek yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penyiapan penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) Gross Ton (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT

Besarnya kebutuhan terhadap produksi perikanan tangkap tersebut belum didukung oleh penanganan mutu komoditas ekspor dengan *Cold Chain System* (CCS), pengolahan serta pemasaran produk kelautan dan perikanan. Armada penangkapan ikan Nelayan yang hingga saat ini masih didominasi oleh kapal berukuran kecil di bawah 10 gros ton (GT), dilihat dari pencapaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 208.556,14 ton menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 226.253,0 ton.

Produksi perikanan budidaya di tahun 2020 sebesar 245.498,38 ton juga menurun dibandingkan capaian tahun 2019 yang sebesar 284.320,00 ton. Hal ini disebabkan antara lain : 1). Kurangnya bantuan induk unggul, benih dan pakan baik dari APBN dan APBD Provinsi karena merupakan kewenangan kabupaten/kota, 2) Lemahnya penerapan teknologi budidaya, 3). Belum optimalnya pembinaan dan pelatihan cara berbudidaya ikan yang baik, 4). Masih adanya hama penyakit ikan.

Pencapaian produksi budidaya laut pada tahun 2020 sebesar 61,43 ton, menurun sangat tajam jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 233 ton.

Tingkat konsumsi ikan di tahun 2020 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan menjadi 39,27 kg/kapita/th dibanding tahun 2019 sebanyak 40,25 kg/kapita/th, namun tingkat konsumsi ikan di Sumatera Barat tahun 2020 dengan target 38 kg/kapita/th terelaisasi sebesar 39,27 kg/kapita/th dengan tingkat capaian sebesar 103,34%, hal ini karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan angka konsumsi makan ikan melalui antara lain: mempromosikan hasil-hasil olahan hasil perikanan Sumatera Barat kepada masyarakat dan kelompok pengolah hasil perikanan, memperkenalkan keanekaragaman produk perikanan, meningkatkan daya saing produk perikanan kepada masyarakat luas dan melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dan meningkatkan kemampuan SDM masyarakat pengolah. Hal ini tidak terlepas dari adanya kampanye secara masif dan kontinyu agar gemar makan ikan kepada seluruh elemen masyarakat yang didukung

oleh pemerintah melalui Forikan. Realisasi capaian tingkat konsumsi ikan tahun 2016-2020 dengan grafik dibawah ini:

Grafik 2.15
Realisasi Tingkat Konsumsi Ikan Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

2.3.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Perkembangan urusan pariwisata di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 diukur melalui dua indikator yaitu (a) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang) dan (b) kunjungan wisatawan nusantara (perjalanan) seperti terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.97
Perkembangan Indikator Urusan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	49.686	56.876	54.369	61.131	10.875
2.	Kunjungan wisatawan nusantara	Perjalanan	7.309.716	7.783.876	8.073.070	8.169.147	8.041.868

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat (Publikasi Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka)

Perkembangan urusan Pariwisata pada tahun 2016-2019 khususnya kunjungan wisatawan meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan kunjungan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara ke Sumatera Barat yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda dunia internasional termasuk Sumatera Barat. Tingginya angka penyebaran virus corona di Indonesia juga menyebabkan pemerintah mengeluarkan peraturan antara lain, larangan warga negara asing masuk ke Indonesia, pembatalan beberapa *event* pariwisata yang sudah direncanakan salah satunya adalah *event* berskala Internasional yaitu *Tour de Singkarak 2020*.

Wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat masuk melalui Bandar Udara Minangkabau, Pelabuhan Teluk Bayur. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan Pelabuhan Teluk Bayur pada tahun 2020 hanya sebanyak 10.875 orang, mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan Tahun 2019 sebanyak 61.131 orang .

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 81,20% (8.831 orang) berasal dari Malaysia, diikuti oleh Australia sebesar 2,72% (296 orang) dan Tiongkok sebesar 2,34% (255 orang), Seperti terlihat di tabel berikut:

Tabel 2.98
Wisman Yang Berkunjung ke Sumatera Barat Menurut Kebangsaan
Tahun 2016-2020 (Orang)

No	Kebangsaan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Malaysia	38.453	46.492	43.344	46.730	8.831
2	Australia	2.473	2.799	3.004	3.069	296
3	Singapura	235	481	1.729	598	88
4	Perancis	475	485	688	670	137
5	Amerika Serikat	399	554	562	707	86
6	Inggris	366	379	438	436	45
7	Tiongkok	390	439	359	416	255
8	Jerman	219	260	319	310	54
9	Jepang	180	276	295	290	60
10	India	130	402	251	176	19
11	Lainnya	6.366	4.309	3.380	7.729	1.004
TOTAL WISMAN		49.686	56.876	54.369	61.131	10.875

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) pada hotel berbintang menurun sebesar 23,22 poin dari 55,10 persen tahun 2019 menjadi 31,88 persen tahun 2020. Pada akomodasi lainnya TPK tahun 2020 tercatat sebesar 16,19 persen, atau mengalami penurunan sebesar 14,36 poin dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.99
Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang dan Non Bintang di Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	Tamu	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hotel Bintang	54,32	55,03	56,18	55,10	31,88
2	Hotel Non Bintang	33,71	32,86	32,18	30,55	16,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) pada hotel berbintang tahun 2020 selama 1,53 hari, mengalami penurunan 0,06 hari dibandingkan tahun 2019 yang tercatat 1,59 hari.

Tabel 2.100
Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik di Hotel Berbintang di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Hari)

No	Tamu	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tamu Asing	1,72	2,28	2,26	2,30	1,81

No	Tamu	2016	2017	2018	2019	2020
2	Tamu Domestik	1,39	1,50	1,45	1,56	1,52
TOTAL		1,40	1,53	1,47	1,59	1,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berupaya membenahi destinasi wisata, kesiapan masyarakat, sarana dan prasarana pendukung dan promosi. Selain itu pemerintah daerah juga mendukung *event* tahunan pariwisata berskala internasional seperti *Tour de Singkarak*, dan memperkenalkan kuliner serta budaya Minangkabau di pentas internasional. Upaya yang dilakukan ini masih tahap awal dan belum maksimal. Oleh karena itu upaya-upaya yang telah dilakukan perlu lebih diintensifkan untuk masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Sumatera Barat.

Pembangunan pariwisata tidak lepas dari peran serta stakeholder terkait, yang terdiri dari : pemerintah, perguruan tinggi, industri, komunitas, media, (disebut dengan Pentahelix Pariwisata) dan permodalan (disebut dengan Hexahelix Ekonomi Kreatif). Seluruh unsur Pentahelix Pariwisata dan Hexahelix Ekonomi Kreatif diharapkan dapat bekerjasama dengan baik agar dapat melakukan tindakan konkrit serta kebijakan yang efektif dan komprehensif dalam pengembangan pariwisata. Upaya kolaborasi yang telah dilakukan saat ini oleh masing-masing unsur Pentahelix Pariwisata dan Hexahelix Ekonomi Kreatif masih perlu dioptimalkan untuk kemajuan pariwisata Sumatera Barat ke depannya.

Selanjutnya untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Proyek nasional yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat, seperti KEK Mandeh dan KEK Mentawai tercantum pada misi 5 strategi meningkatkan daya saing destinasi pariwisata berbasis aglomerasi dengan arah kebijakan memfasilitasi usulan KEK Pariwisata.

2.3.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Kontribusi lapangan usaha tanaman pangan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi selama tahun 2016 sampai tahun 2020, namun kontribusi lapangan usaha hortikultura cenderung mengalami penurunan kecuali tahun 2020 kembali meningkat menjadi 2,98%. Selanjutnya, kontribusi lapangan usaha tanaman perkebunan selalu mengalami penurunan dari 6,67% tahun 2016 menjadi 5,25% tahun 2020, seperti tabel berikut:

Tabel 2.101
Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Pertanian Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi lapangan usaha tanaman pangan (padi dan palawija) terhadap PDRB	%	6,74	6,54	6,68	6,43	6,38
2	Kontribusi lapangan usaha tanaman hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan) terhadap PDRB	%	3,41	3,33	2,94	2,97	3,13
3	Kontribusi lapangan usaha tanaman perkebunan terhadap PDRB	%	6,67	6,64	6,12	5,85	5,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan Produksi Komoditi Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Tahun 2019. Peningkatan Produksi Padi Tahun 2020 sebesar 2.934.836 Ton didukung dengan kegiatan pendekatan peningkatan luas tanam, luas panen, peningkatan produktivitas, serta semakin lancarnya penyaluran pupuk bersubsidi, dan penyaluran alat mesin pertanian. Sedangkan Peningkatan Produksi Jagung Tahun 2020 sebesar 935.716 Ton bila dibandingkan dengan produksi Jagung Tahun 2019 sebesar 920.131 disebabkan adanya kegiatan pengembangan kawasan jagung seluas 208 Ha pada 24 kelompok tani yang ada di 4 (empat) di Sumatera Barat

Untuk Tanaman Hortikultura seperti peningkatan produksi manggis di Tahun 2020 sebesar 56.227 Ton disebabkan karena peningkatan jumlah tanaman produktif, peningkatan produksi komoditi cabe sebesar 146.654 Ton disebabkan adanya kegiatan pembinaan dan bantuan benih cabe dan mulsa plastik pada daerah-daerah sentra dan daerah penyangga, demikian juga dengan peningkatan produksi bawang merah Tahun 2020 sebesar 154.014 Ton disebabkan karena penggunaan varietas bawang merah unggul yang dilepas oleh Kementerian Pertanian yaitu varietas SS Sakato yang hasilnya sangat bagus dikembangkan di Sumatera Barat.

Tabel 2.102
Perkembangan Produksi Komoditi Unggulan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi	Ton	2,503,452	2,824,509	2,993,752	2,874,006	2,934,836
2	Jagung	Ton	711,532	985,847	993,161	920,131	935,716
3	Cabe	Ton	68,224	95,489	106,061	139,994	146,654
4	Bawang Merah	Ton	66,543	95,534	113,864	122,399	154,014
5	Manggis	Ton	23,289	34,422	23,303	28,833	56,227

Sumber : Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dan BPS Provinsi Sumatera Barat

2.3.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Beberapa indikator capaian urusan kehutanan memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan terutama untuk penurunan luas lahan kritis dari 0,18% tahun menjadi 2,18% di tahun 2020. Untuk penurunan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB, laju kerusakan hutan dan penurunan jumlah titik panas (hotspot) memperlihatkan hasil yang fluktuatif, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.103
Perkembangan Indikator Urusan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Penurunan luas lahan kritis (Ha/Th) (%)	0,18	0,18	0,43	0,43	1,09	1,10	2,00	2,13	2,21	2,18
2	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	1,35	1,50	1,28	1,34	1,25	1,35	1,22	1,36	1,19	1,43
3	Penurunan Laju Kerusakan hutan (%)	4,21	0,00	4,15	9,92	4,08	19,22	4,02	12,45	3,95	14,73
4	Penurunan jumlah titik panas (hotspot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (%)	5	82,82	5	10	82,21	15	20	88,68	25	99,10

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

2.3.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator yang menjadi perhatian khusus dalam pembangunan Energi dan Sumberdaya Mineral adalah pertambangan tanpa izin, rasio elektrifikasi, rasio desa berlistrik, kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dan Pemanfaatan Energi Terbarukan (EBT) terhadap potensi EBT, seperti ditunjukkan Tabel berikut:

Tabel 2.104
Perkembangan Indikator Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pertambangan tanpa izin (%)	4,88	4,50	4,18	4,70	3,47	4,50	2,85	4,50	4,50	3,51
2	Rasio elektrifikasi	85	86,42	88	89,41	93,63	93,83	99,17	95,82	99,30	99,33
3	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	4,92	4,53	5,07	4,27	5,20	4,27	5,29	4,30	5,37	3,27
4	Pemanfaatan EBT terhadap potensi EBT (%)	12,33	13,9	12,84	15,50	14,46	16,8	16,88	22,50	22,50	23,32

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

Ketersediaan energi listrik menjadi pendongkrak perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya fasilitas listrik untuk penerangan, aktifitas ekonomi di rumah tangga yang mengusahakan aktifitas ekonomi di rumah dapat lebih berlangsung sampai malam hari. Pengukuran pasokan listrik dapat diketahui melalui Rasio elektrifikasi yaitu merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah terlistriki dengan total rumah tangga. Di Sumatera Barat rasio elektrifikasi mengalami peningkatan sejak tahun 2016 sebesar 86,42% menjadi 99,33% tahun 2020, berada di atas rasio elektrifikasi nasional 99,20%. Kenaikan ini didorong oleh beberapa faktor antara lain, pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan dan program listrik pedesaan seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan mikro hidro, pemasangan instalasi listrik untuk rumah tangga sederhana. Capaian tidak sampai 100% karena di beberapa daerah (kepulauan Mentawai masih menunjukkan angka yang relatif cukup rendah yaitu 71%), demikian juga di beberapa nagari Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman.

Pemanfaatan energi dan terbarukan mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yakni dari 12,33% menjadi 23,32%. Kenaikan ini disebabkan adanya penggunaan energi. energi terbarukan seperti air, tenaga surya, biomassa dan panas bumi di beberapa daerah.

Untuk pertambangan tanpa izin persentasenya semakin berkurang dari tahun ke tahun yakni 4,50% tahun 2016 menurun menjadi 3,51% tahun 2020. Ini menunjukkan masih ada pertambangan tanpa izin yang terus berlangsung pada daerah-daerah berpotensi ada bahan tambang.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB juga cenderung menurun menjadi 23,32% tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa kontribusi sektor pertambangan belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah kualitas air tanah. Pemantauan Kualitas Air Tanah perlu dilakukan untuk mengetahui perubahan Kualitas Air Tanah dari tahun ke tahun sehingga tidak berdampak terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat pengguna air tanah tersebut. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air, digunakan mutu air Kelas I yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum sebagai pembanding, maka dari hasil analisis seluruh titik pantau sampel Air Bawah Tanah Daerah Provinsi Sumatera Barat, terhadap parameter yang dilakukan pengujian dapat diambil kesimpulan bahwa analisis kandungan kimia air tanah memenuhi standar bahan baku air minum kecuali beberapa titik pantau memiliki kandungan Besi (Fe) melebihi batas maksimum yang diperbolehkan antara lain di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Payakumbuh.

2.3.3.6. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa perdagangan merupakan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sub Urusan Perdagangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari : perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen.

Sektor perdagangan semenjak tahun 2016 hingga tahun 2020 memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian di Sumatera Barat, seperti terlihat dari indikator Tabel dibawah, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB persentasenya tahun 2016 sebesar 14,29% meningkat menjadi 15,76% tahun 2020. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan terhadap pendapatan daerah. Sementara itu, dilihat dari sisi indikator Neraca Perdagangan (perbandingan nilai ekspor terhadap nilai impor) sedikit mengalami fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 neraca perdagangan tercatat sebesar US\$ 1.363,03 juta menjadi US\$ 1.345,44 juta tahun 2020.

Tabel 2.105
Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,76	14,91	15,30	15,78	15,76
2	Neraca Perdagangan	US\$ Juta	1.363,03	1.600,01	1.052,27	900,95	1.345,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

2.3.3.7. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dijelaskan bahwa perindustrian merupakan tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Sedangkan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Peranan sektor industri terhadap perekonomian daerah dapat dilihat melalui indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan laju pertumbuhan industri. Selama periode 2016-2020, kedua indikator tersebut mengalami pertumbuhan yang melambat. Sebagaimana terlihat pada tabel 2.84, kontribusi sektor industri terhadap PDRB persentasenya tahun 2016 sebesar 10,11 % menurun menjadi 8,64% tahun 2020. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan terhadap pendapatan daerah. Begitu juga dengan indikator Laju pertumbuhan industri, hanya mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun 2016 yaitu sebesar 4,90% dan terus menurun, dimana pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,54%.

Tabel 2.106
Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Lapangan usaha Industri terhadap PDRB	%	10,09	9,74	9,10	8,38	8,64
2	Laju Pertumbuhan Industri	%	4,90	2,27	-0,58	-1,98	-0,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2.3.3.8. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Perkembangan pencapaian urusan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ditandai dengan indikator jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun dan indikator indeks kemandirian kawasan transmigrasi sebagaimana dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.107
Perkembangan Indikator Urusan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Indeks kemandirian kawasan transmigrasi	50	50	50	50	60	60	68	68	68	69

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun pada tahun 2020 di Sumatera Barat ada 2 kawasan yakni kawasan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dan Kawasan Padang Tarok Kabupaten Sijunjung. Beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan transmigrasi antara lain 1). Adanya pemenuhan kebutuhan dasar transmigran oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi seperti penyediaan fasilitas umum, jalan desa, jembatan dan gorong-gorong, pemberian jaminan hidup berupa beras dan non beras (minyak, sabun, sembako), 2). Tersedianya sarana produksi pertanian dari Tahun pertama sampai tahun kelima, serta dilengkapi dengan perbekalan dan listrik portable, 3). Adanya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh disnakertrans provinsi dan kabupaten seperti pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya di satuan permukiman dan pelatihan keterampilan warga transmigrasi.

Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi pada tahun 2020 terealisasi 69 dari target 68. Beberapa hal yang mendorong peningkatan Indeks kemandirian kawasan transmigrasi tersebut antara lain 1). Adanya pemenuhan kebutuhan dasar transmigran oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi seperti penyediaan fasilitas umum, jalan desa, jembatan dan gorong-gorong, pemberian jaminan hidup berupa beras dan non beras (minyak, sabun, sembako), sarana produksi pertanian dari Tahun pertama sampai tahun kelima, perbekalan dan listrik *portable*, di samping pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh disnakertrans provinsi dan kabupaten seperti pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya di satuan permukiman dan pelatihan keterampilan warga transmigrasi. 2). Adanya pengelolaan pengembangan usaha di kawasan transmigrasi Lunang Silaut. 3). Adanya kerjasama lintas sektor baik provinsi maupun kabupaten dalam pengembangan

kawasan transmigrasi baik untuk satuan permukiman maupun kawasan melalui tim Pokja KTM provinsi dan kabupaten.

Kawasan transmigrasi Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan merupakan 1 (satu) dari 52 kawasan yang menjadi prioritas Nasional, dimana didalam RPJMN 2021 sd 2024 kawasan ini diharapkan mampu berkembang dari kawasan yang MANDIRI menjadi kawasan yang BERDAYA SAING dengan diharapkan nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) diatas 75 pada akhir tahun 2024 (Target terlampir). Sementara nilai IPKTrans Tahun 2021 baru mencapai 64,05. Diperlukan sekali interfensi anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung target nasional tersebut (Kolaborasi Anggaran Lintas Sektor) sesuai amanat Perpres No. 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi pembangunan kawasan Transmigrasi.

Sedangkan 3 kawasan lainnya (kws Ranah Balingka Bremas, Kws. Muara Takung Kamang Baru dan Kws. Bumi Asri, merupakan 3 kawasan yang menjadi prioritas bidang / Kementerian, dimana nilai indeks perkembangan satuan permukiman (IPSP) nya masih rendah yaitu sebesar 36,04 do Tahun 2021 (Masih diposisi Berkembang, IPSP kecil dari 50), target terlampir, sehingga intervensi APBD Provinsi pun sangat diperlukan melalui kolaborasi anggaran dari lintas sektor terkait, sehingga target untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan yang MANDIRI dapat dicapai.

2.3.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.4.1. Unsur Perencanaan

Perkembangan capaian target indikator kinerja urusan perencanaan yang merupakan fungsi urusan Penunjang Pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas ditandai dengan indikator Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan indikator evaluasi dokumen perencanaan daerah dengan realisasi capaian 100% selama tahun 2016-2020, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.108
Perkembangan Indikator Urusan Penunjang Pemerintahan (Perencanaan)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Evaluasi dokumen perencanaan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Beberapa faktor pendorong tercapainya target 2 (dua) indikator diatas antara lain : 1) Adanya kepatuhan dan komitmen antara Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan OPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan perencanaan sesuai dengan kalender perencanaan yang sudah ditetapkan; 2) Meningkatnya kualitas pendampingan yang dilakukan oleh Bappeda bagi OPD dalam menyusun dokumen perencanaan melalui verifikasi Renja dan Renstra OPD; dan 3) meningkatnya pengendalian terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Guna terus menjaga keberhasilan pencapaian pada Urusan Perencanaan akan terus diupayakan peningkatan terhadap proses tahapan perencanaan, peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas terhadap pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan dengan meminimalisir permasalahan-permasalahan yang mungkin akan ditemui dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

2.3.4.2. Unsur Keuangan

Capaian target indikator kinerja penunjang pada urusan keuangan dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang meliputi Pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Belanja sebagaimana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan cerminan kemampuan Pemerintah Provinsi dalam membiayai pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menargetkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya dengan opini wajar tanpa pengecualian. Dalam upaya mencapai target dimaksud Pemerintah Daerah memegang teguh prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah berupa: a) tanggungjawab; b) mampu memenuhi kewajiban keuangan; c) kejujuran; d) daya guna dan hasil guna; dan e) pengendalian, sehingga berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Dilihat dari komposisi Pendapatan Daerah, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer akan terus berlangsung meskipun dalam kaitan tersebut diperkirakan peranan dana transfer dari Pemerintah dalam bentuk total perolehan Pendapatan Daerah akan tetap diatas peranan Pendapatan Asli Daerah. Hal yang cukup penting terkait dengan kinerja keuangan pemerintah provinsi adalah: 1) bahwa sektor Pajak Daerah dalam memberikan kontribusi pada PAD masih menjadi andalan daerah dan ini menjadi tantangan bagaimana bisa memberdayakan penerimaan sector lain agar lebih mengoptimalkan peranan kontribusinya terhadap PAD; 2) masih banyak terdapat asset *idle* yang belum dioptimalkan pemanfaatannya sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah; 3) belum seluruh sektor pendapatan daerah yang pengelolaannya secara maksimal memanfaatkan Teknologi Informasi.

Perkembangan capaian indikator kinerja urusan keuangan dapat dilihat dalam table di bawah:

Tabel 2.109
Perkembangan Indikator Penunjang Pemerintahan (Keuangan)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Realisasi PAD	1.894.690	1.964.149	2.062.775	2.134.010	2.343.569	2.275.090	2.375.931	2.328.433	2.174.615	2.255.073

2.3.4.3. Unsur Kepegawaian

Perkembangan realisasi target kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan (Kepegawaian) terlihat pada table 2.60, dimana Realisasi Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2017 s.d 2020. Namun secara series, data realisasi Indeks Profesionalitas ASN mengalami penurunan. Penurunan realisasi Indeks Profesionalitas

Aparatur Sipil Negara (ASN) disebabkan oleh perubahan metode pengukuran yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara yang berubah berdasarkan sampel dan sistem aplikasinya. Sementara indikator persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70% masih berada jauh di bawah target yang ditetapkan setiap tahunnya. Bahkan pada Tahun 2019 realisasi kinerja hanya mencapai setengah (50%) dari target yang ditetapkan. Rendahnya capaian realisasi disebabkan karena penataan pegawai belum dapat dilaksanakan secara optimal karena perubahan SOTK belum terlaksana dan jumlah pertumbuhan PNS yang *zero growth*, dimana jumlah CPNS tidak sebanding dengan jumlah PNS pensiun.

Beberapa permasalahan dalam urusan Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain : *database* kepegawaian yang belum *up to date*; manajemen ASN belum berjalan secara optimal; tingkat profesionalisme aparatur yang rendah; pelaksanaan tata kelola organisasi yang belum akuntabel; sistem merit belum diterapkan dengan sangat baik; minimnya jumlah jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang spesifik; penataan ASN belum dilaksanakan sesuai kebutuhan dan potensi daerah; sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN yang perlu terus diupayakan perbaikan; perlunya pengadaan ASN yang berkelanjutan karena adanya data/proyeksi tujuh tahun ke depan akan terjadi PNS pensiun dalam skala besar; kualitas sumber daya manusia yang kurang mendukung terhadap perkembangan teknologi terbaru; kompetensi PNS yang masih rendah dan belum merata; terdapatnya kesenjangan antara kompetensi ASN dengan kebutuhan instansinya; serta *database* dan sistem informasi ASN kurang lengkap dan tidak mutakhir serta tidak terintegrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Permenpan RB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, seluruh Pemerintah Daerah diamanahkan untuk menerapkan Sistem Merit dilingkungannya. Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan penerapan dan penilaian Sistem Merit dengan indikator Nilai Penerapan Sistem Merit. Penilaian tersebut didasarkan pada aspek antara lain: Perencanaan Kebutuhan ASN, Pengadaan ASN, Pengembangan Karir, Promosi dan Rotasi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan Serta Sistem Informasi. Penerapan Sistem Merit akan diukur dengan Penilaian Sistem Merit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya menjadi indikator dalam urusan penunjang kepegawaian menggantikan indikator Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%.

Tabel 2.110
Perkembangan Indikator Unsur Kepegawaian Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Profesionalitas ASN	N.A		68	88,43	70	76	72	76,69	74	53,75
2	Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%	N.A		87	82	89	80,39	92	46	95	39,21

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

2.3.4.4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Perkembangan indikator dalam urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan selalu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.111
Perkembangan Indikator Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase ASN Prov. Sumbar yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	1,10	5,03	1,15	1,80	1,17	1,04	1,43	5,20	2,0	3,57
2	Aparatur mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persyaratan jabatan	90	98,66	90	98,62	91	98,5	92	99,3	93	100

Sumber : BPSDM Provinsi Sumatera Barat

Pencapaian Persentase ASN Provinsi Sumatera Barat yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun capaian indikatornya cukup berfluktuasi, karena adanya penerimaan CPNS yang harus mengikuti diklat yang jumlahnya cukup besar dan angka kuotanya tidak bisa diprediksi pada awal penetapan target. Dan juga jumlah pelaksanaan pengembangan kompetensi yang sangat tergantung dengan jumlah anggaran yang tersedia. Untuk Aparatur Mengikuti Diklat Sesuai Tupoksi dan Persyaratan Jabatan dapat tercapai dengan baik dan melebihi dari target yang ditetapkan.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain yakni :

- 1). Perencanaan diklat yang sesuai dengan kebutuhan aparatur;
- 2). Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
- 3). Berjalannya evaluasi pelaksanaan diklat secara kontinu.

Beberapa permasalahan dalam urusan Pendidikan dan Pelatihan antara lain : belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang berjenjang dan berkelanjutan; belum dilakukannya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dinamika dan perubahan-perubahan regulasi dan peraturan dalam pelaksanaan tugas ASN; belum adanya regulasi yang jelas antara penjenjangan karir ASN dengan syarat pendidikan dan pelatihan yang harus diikuti, sehingga animo ASN masih rendah untuk mengikuti pengembangan kompetensi

2.3.4.5. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Urusan kelitbangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK terapan guna mendukung perumusan kebijakan, program/kegiatan pembangunan daerah agar kebijakan, program/kegiatan lebih tepat sasaran karena telah berdasarkan hasil penelitian. Dengan terlaksananya penelitian dan pengembangan serta tersedianya inovasi-inovasi baru diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Tabel 2.112
Perkembangan Indikator Unsur Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Penerapan Hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan	-	-	65	65	70	70	75	100	80	125
2	Persentase Pemanfaatan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	65	114,24	80	111,76
3	Persentase Pemanfaatan Inovasi Produk dan Teknologi	-	-	-	-	-	-	60	60,58	80	80

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tugas dan fungsi, tidak hanya terbatas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan saja, tetapi juga turut serta berperan dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan penelitian dan pengembangan melalui koordinasi serta implementasi hasil-hasil penelitian.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut: 1). Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan Rencana Aksi; 2). Adanya pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan. 3) Penyesuaian target kegiatan dengan pengurangan anggaran karena *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.

2.3.4.6. Unsur Pengawasan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibentuklah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, kebijakan dan strategi program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan prioritas pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.113
Perkembangan Indikator Unsur Pengawasan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase OPD yang bebas penyimpangan material	85%	100%	88%	100%	-	-	-	-	96%	100%
2	Persentase OPD yang bebas Penyimpangan Aset	85%	86%	88%	84%	-	-	-	-	96%	98%
3	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	7,75	7,66	7,70*)	7,50

*) Penetapan target Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda Tahun 2020 (7,70) lebih rendah dari target tahun sebelumnya (7,75), hal ini disebabkan realisasi tahun 2019 (7,66) berada dibawah target.

Perangkat Daerah dikatakan bebas dari penyimpangan material, apabila penyimpangan nilai keuangan yang terjadi kurang dari atau sama dengan 10% dari total anggaran Perangkat Daerah, dari Pemeriksaan tahun 2020 penyimpangan material tidak ada yang melebihi 10% dari total anggaran masing-masing perangkat daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa Perangkat Daerah yang bebas dari penyimpangan material ada 50 Perangkat Daerah (100%).

Indikator kinerja Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material dengan target 96% terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 104,17% termasuk berhasil dengan penilaian sangat baik. Realisasi indikator kinerja OPD yang bebas dari penyimpangan material diukur dengan membandingkan jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan material tahun 2020 dengan jumlah seluruh OPD tahun 2020. Perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material

OPD dikatakan bebas dari penyimpangan aset apabila tidak terdapat temuan dengan kode temuan 1.01.06, 1.01.12, 1.02.03, 1.02.04, 1.02.05, 1.02.07 dan 3.03.03. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset dihitung dari perbandingan jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan aset tahun 2020 dengan jumlah seluruh OPD tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.114
Rekapitulasi Perkembangan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi
Sumbar Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai Rekomendasi	Belum di Tindaklanjuti
1	2020	770	1894	1409	357	128
2	2019	783	1858	1521	280	57
3	2018	769	1818	1447	290	81
4	2017	715	1670	1235	303	132
5	2016	656	1501	1178	246	77

Sumber : Inspektorat Provinsi Tahun 2021

Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah dengan target 7,70, realisasi 7,50 dengan capaian 97,40% . Hal ini disebabkan karena : 1) masih kurangnya pemahaman OPD tentang evaluasi capaian kinerja karena yang dilaksanakan baru sebatas evaluasi capaian anggaran dan program kegiatan, dan 2) Masih kurangnya penerapan evaluasi kinerja internal yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD baik dalam bentuk evaluasi rencana aksi, evaluasi kinerja serta identifikasi dan manajemen risiko secara berkala.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing juga merefleksikan tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Untuk peningkatan daya saing ada dua strategi yang ditetapkan yaitu : **Strategi pertama** : Pemetaan dan optimalisasi sektor unggulan, yaitu sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Yang dikategorikan ke dalam sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya tinggi dan kontribusinya terhadap PDRB besar. Berdasarkan kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB Sumatera Barat, sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, transportasi dan pergudangan serta konstruksi merupakan sektor andalan bagi Provinsi Sumatera Barat dan **Strategi kedua** : penyediaan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah dan infrastruktur pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kemampuan finansial dan kesempatan kerja, dukungan kebijakan pemerintah, dan peningkatan stabilitas ekonomi makro. Faktor-faktor tersebut perlu menjadi prioritas dalam upaya peningkatan daya saing daerah.

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah, Kapasitas ekonomi daerah dapat dilihat dari pengeluaran per kapita atau konsumsi rata-rata perkapita (pangan dan non pangan), dan produktivitas total daerah.

Pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Sumatera Barat adalah pembangunan yang bersifat dinamis untuk kemajuan daerah. Pemerintah Sumatera Barat harus mencari, memetakan dan mengenal potensi yang dimiliki untuk dikembangkan melalui inovasi dan produktivitas. Berdasarkan pemetaan potensi tersebut Sumatera Barat memiliki berbagai sektor unggulan mulai dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan nilai tertinggi dari sisi PDRB untuk wilayah Sumatera Barat dengan nilai diatas 24 %, diikuti dengan unggulan lainnya Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Industri Pengolahan, konstruksi. sementara untuk sektor lainnya menempati besaran PDRB kurang dari 5 %.

2.4.1. Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan

Rata – rata pengeluaran per kapita dari tahun 2016 – 2020 mengalami kenaikan, yg terjadi akibat kenaikan pengeluaran komoditas makanan dan non makanan sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.115
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas
di Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Kelompok Komoditas	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		
Makanan	537.236	54,54	584.045	55,42	604.871	52,66	609.258	52,30	644.853	52,21
Bukan Makanan	447.789	45,46	469.758	44,58	543.759	47,34	555.621	47,70	590.197,	47,79
Jumlah	985.025	100,00	1.053.803	100,00	1.148.630	100,00	1.164.879	100,00	1.235.050	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Pengeluaran rata-rata perkapita/bulan menurut kelompok bukan makanan selama tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 Kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga mendominasi pengeluaran kelompok bukan makanan yaitu sebesar 44,14 %

diikuti oleh kelompok aneka Barang-barang dan Jasa sebesar 24,84 %, sedangkan pengeluaran kelompok non makanan terendah terdapat pada kelompok keperluan pesta dan upacara/kenduri sebesar 3,82 %, diikuti kelompok pajak, pungutan dan asuransi sebesar 6,77 % sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.116
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Bukan Makanan di Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Kelompok	2016		2017		2018		2019		2020	
	Nilai (Rupiah)	%	Nilai (Rupiah)	%	Nilai (Rupiah)	%	Nilai (Rupiah)	%	Nilai (Rupiah)	%
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	206.253,24	46,06	204.800,20	43,60	241.121,00	44,34	242.306	43,61	260.524	44,14
Aneka Komoditas dan Jasa	112.613,26	25,15	115.478,18	24,58	126.357,00	23,24	133.856	24,09	146.459	24,82
Pakaian, Alas Kaki dan Penutup Kepala	42.070,2	9,40	43.362,35	9,23	48.599,00	8,94	51.197	9,21	53.208	9,02
Barang Tahan Lama	50.126,66	11,19	61.280,32	13,05	71.500,00	13,15	73.395	13,21	67.511	11,44
Pajak, Pungutan dan Asuransi	17.625,57	3,94	28.523,64	6,07	32.866,00	6,04	35.461	6,38	39.955	6,77
Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	19.099,56	4,27	16.313,54	3,47	23.316,00	4,29	19.406	3,49	22.541	3,82
Jumlah	447.788,49	100,00	469.758,24	100,00	543.759,00	100,00	555.621	100,00	590.197	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Jika dilihat dari Pengeluaran riil per kapita atau angka konsumsi Rumah Tangga (RT) per kapita Sumatera Barat selama periode 2016-2020 trendnya meningkat. Pengeluaran riil per kapita terbesar berada di Kota Padang, yaitu sebesar 14.481 ribu rupiah dan terkecil berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu sebesar 6.281 ribu rupiah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.117
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan di Sumatera Barat 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita(Ribu Rupiah/Org/Thn)				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten						
1	Kep. Mentawai	5.771	6.010	6.211	6.429	6.281
2	Pesisir Selatan	8.605	8.819	9.089	9.444	9.212
3	Solok	9.664	9.743	10.035	10.309	10.171
4	Sijunjung	9.895	10.093	10.277	10.395	10.361
5	Tanah Datar	10.296	10.331	10.417	10.709	10.588
6	Padang Pariaman	10.455	10.579	10.919	11.158	10.998
7	Agam	9.111	9.388	9.489	9.780	9.651
8	Lima Puluh Kota	8.936	9.151	9.500	9.842	9.596
9	Pasaman	7.678	7.882	8.238	8.599	8.425
10	Solok Selatan	9.802	9.891	10.199	10.505	10.325
11	Dharmasraya	10.781	10.851	11.189	11.431	11.273
12	Pasaman Barat	8.393	8.704	8.979	9.180	9.047
Kota						
13	Padang	13.721	13.957	14.312	14.728	14.481
14	Solok	11.519	11.673	11.968	12.337	12.337
15	Sawah Lunto	9.051	9.343	9.765	10.238	10.182
16	Padang Panjang	9.804	10.240	10.440	11.013	10.734
17	Bukittinggi	12.475	12.816	13.035	13.586	13.282
18	Payakumbuh	12.705	12.858	13.114	13.464	13.281

No	Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita(Ribu Rupiah/Org/Thn)				
		2016	2017	2018	2019	2020
19	Pariaman	12.141	12.425	12.611	12.958	12.796
	Sumatera Barat	10.126	10.306	10.638	10.925	10.925

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2.4.2. Produktifitas Total Daerah

Di samping pengeluaran per kapita, ukuran lain yang dapat digunakan adalah Produktivitas total daerah, yang dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor, dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Produktifitas total daerah per kabupaten/kota se Sumatera Barat terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.118
Produktifitas Total Daerah Per Kabupaten/kota Se Sumatera Barat
juta rupiah/orang

No	Kab/Kota	2015	2016*	2017	2018**	2019***
	Kabupaten :					
1	Kep. Mentawai	80,46	87,09	92,31	100,79	98,38
2	Pesisir Selatan	65,41	64,85	62,96	64,61	67,11
3	Solok	61,91	67,83	72,86	77,04	77,74
4	Sijunjung	68,05	72,11	76,13	80,06	82,65
5	Tanah Datar	63,01	67,69	71,41	73,43	77,49
6	Padang Pariaman	100,31	106,99	112,14	117,75	124,84
7	Agam	74,69	79,34	82,31	85,22	88,99
8	Lima Puluah Kota	64,12	68,60	71,61	75,85	80,13
9	Pasaman	61,11	64,24	63,99	70,57	70,26
10	Solok Selatan	61,91	64,51	66,01	64,21	69,06
11	Dharmasraya	77,83	83,41	87,85	86,72	88,77
12	Pasaman Barat	66,21	70,28	73,18	78,36	83,08
	Kota :					
13	Padang	133,05	136,94	138,85	145,26	156,71
14	Solok	101,27	108,94	114,77	125,41	139,99
15	Sawahlunto	97,44	103,11	108,67	112,31	126,44
16	Padang Panjang	115,43	125,50	133,59	139,08	140,53
17	Bukittinggi	109,24	120,48	132,80	133,69	148,82
18	Payakumbuh	79,49	84,48	87,29	95,07	108,08
19	Pariaman	102,44	109,57	114,68	118,38	122,18
	SUMATERA BARAT	82,37	83,52	91,21	95,66	100,15

Catatan : * Angka kabupaten/kota merupakan angka estimasi

** Angka sementara

*** Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, data diolah

2.4.3. Nilai Tukar Petani

Kinerja sektor pertanian tercermin pada capaian indikator pertanian diantaranya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas tanaman pertanian. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. NTP

menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun 2016 – 2020, namun pada tahun 2020 NTP lebih tinggi dari angka 5 tahun terakhir.

Tabel 2.119
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016-2020 Provinsi Sumatera Barat

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks yang diterima petani (It)	119,62	122,64	125,39	130,55	106,55
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	122,48	126,47	131,56	136,00	105,92
3.	NTP	97,67	96,97	95,31	95,99	100,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Data perkembangan NTP secara keseluruhan selama 2019-2020 menunjukkan peningkatan pada sub sektor subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan rakyat. Pada tahun 2020 NTP peternakan berada pada posisi terendah dalam periode lima tahun, demikian pula dengan NTP sektor perikanan.

Tabel 2.120
Nilai Tukar Petani dan Sub Sektor Pendukungnya di Sumatera Barat 2016-2020 (%)

NTP SEKTOR/SUB SEKTOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
NTP	97,67	96,97	95,31	95,99	100,59
NTP Tanaman Pangan	95,00	92,66	92,02	94,79	99,06
NTP Hortikultura	92,74	86,33	82,44	81,45	96,80
NTP Perkebunan Rakyat	98,29	100,93	99,31	99,70	103,86
NTP Peternakan	103,71	104,82	103,59	103,87	102,32
NTP Perikanan	106,47	109,15	107,88	104,98	94,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Sub sektor yang mempunyai rata-rata NTP tertinggi tahun 2020 adalah subsektor perkebunan rakyat, yaitu sebesar 103,84. Dilihat dari rata-rata NTP subsektor peternakan dan subsektor perkebunan rakyat berada di atas 100, ini menunjukkan bahwa kehidupan petani yang berusaha pada subsektor tersebut relatif lebih sejahtera dibanding petani yang berusaha pada subsektor lainnya karena pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan pengeluarannya baik untuk biaya produksi maupun biaya pemenuhan kebutuhan dasar. Fluktuatifnya NTP ini menggambarkan bahwa derajat kesejahteraan petani belum baik yang terlihat dari masih rendahnya daya beli petani dipicu oleh faktor produktivitas yang belum stabil atau cenderung menurun, permintaan yang masih rendah dan belum terjaminnya produk pertanian.

Kondisi ini menggambarkan bahwa walau mayoritas penduduk bekerja disektor pertanian namun masih belum menguntungkan, Hal ini mengindikasikan perlunya upaya untuk peningkatan produktivitas dan peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui hilirisasi produk pertanian, yang ditunjang dengan distribusi dan pemasaran.

2.5. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 6 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 6 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020, seluruh Jenis Pelayanan Dasar dapat terlaksana dengan baik dengan pencapaian setiap Indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.121
Pencapaian SPM di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	1. Pendidikan Menengah;	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	242.100 orang	242.100 orang	100
		2. Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	6.848 orang	6.848 orang	100
2.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	337.148 orang	337.148 orang	100
		2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa provinsi.	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	57.523 orang	57.523 orang	100
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	100%	100
		2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	Persentase Pelayanan Pengolahan Air Limbah	100%	100%	100

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		domestik regional lintas kabupaten/kota.	Domestik oleh SPALD Regional (IPLT Regional / IPALD)			
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;	Jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi	50%	50%	100
			Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana	50%	50%	100
		2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.	Jumlah Fasilitasi Penyediaan Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi	50%	50%	100
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	100%	100%	100
6.	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;	Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	443 orang	443 orang	100
		2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;	Jumlah Anak Terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	4.192 orang	4.192 orang	100

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;	Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	250 orang	250 orang	100
		4. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	26.620 orang	26.620 orang	100

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk memahami kemampuan keuangan, perlu dicermati kondisi kinerja, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa datang.

3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2016-2020

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD berhubungan dengan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Sumber penerimaan Pemerintah Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan merupakan semua penerimaan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan merupakan semua pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilakukan terhadap capaian kinerja pengelolaan keuangan tahun 2016-2020. Dalam periode tersebut terjadi 3 (tiga) perubahan/kejadian mendasar yang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan APBD. Perubahan pertama sehubungan dengan tambahan kewenangan daerah provinsi sebagai implikasi dari pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain dalam urusan/bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelautan, Kehutanan, dan Pendidikan. Tambahan kewenangan urusan tersebut mengakibatkan peningkatan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari 7.854 orang tahun 2016 menjadi 20.942 orang tahun 2017. Perubahan kedua, Pandemi COVID-19 yang terjadi tahun 2020 berdampak besar terhadap pelaksanaan APBD, tidak hanya penyesuaian jumlah Dana Alokasi Umum tetapi juga kebijakan *refocusing* Belanja Daerah. Perubahan ketiga, pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan, antara lain dalam klasifikasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Penambahan jumlah pegawai Provinsi Sumatera Barat sebagai yang dijelaskan di atas mengakibatkan peningkatan Pendapatan Dana Alokasi Umum yang signifikan. Hal ini terjadi karena jumlah ASN merupakan salah satu indikator dalam penentuan besarnya Dana Alokasi Umum yang

dialokasikan ke daerah. Akibat penambahan jumlah pegawai tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, yang juga meningkat signifikan. Demikian juga dampak pandemi COVID-19 terhadap struktur Belanja Daerah; terjadi lonjakan yang signifikan terhadap Belanja Tidak Terduga. Dengan demikian, analisis pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempertimbangkan perubahan kondisi yang terjadi tahun 2017 dan tahun 2020. Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sesuai PP 12 tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1. Sedangkan Kontribusi setiap jenis Pendapatan Daerah dan proporsi setiap Belanja Daerah, serta Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (Rp juta)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
PENDAPATAN DAERAH	4.624.611,99	6.066.826,85	6.292.287,63	6.390.337,20	6.364.065,76	8,31
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.964.148,97	2.134.010,52	2.275.090,07	2.328.432,87	2.255.072,99	3,51
Pendapatan Pajak Daerah	1.522.119,23	1.626.923,37	1.797.677,16	1.872.933,99	1.809.809,96	4,42
Pendapatan Retribusi Daerah	19.362,26	22.906,56	19.506,41	19.475,96	7.926,60	(20,01)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	89.986,73	94.610,44	81.374,33	94.938,38	94.747,26	1,30
Lain-lain PAD Yang Sah	332.680,75	389.570,15	376.532,17	341.084,54	342.589,17	0,74
PENDAPATAN TRANSFER	2.618.608,27	3.917.012,19	4.002.064,21	4.045.668,56	4.046.890,19	11,50
Dana Perimbangan	2.576.754,99	3.866.663,23	3.930.814,21	4.027.349,12	4.002.468,88	11,64
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam	134.500,32	152.435,93	131.766,54	106.119,22	145.620,97	2,01
Dana Alokasi Umum	1.261.915,86	2.014.646,64	2.014.646,64	2.076.398,19	1.891.323,98	10,65
Dana Alokasi Khusus	1.180.338,81	1.699.580,67	1.784.401,03	1.844.831,70	1.965.523,94	13,60
Transfer Dari Pusat Lainnya	41.853,29	50.348,95	71.250,00	18.319,45	44.421,31	1,50
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41.853,29	50.348,95	71.250,00	18.319,45	44.421,31	1,50
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	41.854,74	15.804,15	15.133,35	16.235,77	62.102,58	10,37
Pendapatan Hibah	5.472,27	15.804,15	15.133,35	15.024,97	57.535,78	80,07
Bantuan Keuangan	12.499,95	-	-	1.210,80	4.566,80	(22,25)
Pendapatan Lainnya	23.882,52	-	-	-	-	
BELANJA DAERAH	4.504.037,26	5.759.818,39	6.267.376,23	6.551.278,88	6.408.293,79	9,22
Belanja Operasi	2.678.724,66	4.079.108,49	4.360.888,77	4.576.156,01	4.460.427,08	13,60
Belanja Pegawai	704.125,02	2.024.083,09	2.052.591,38	2.170.912,46	2.081.587,32	31,13
Belanja Barang dan Jasa	895.361,39	1.238.156,83	1.489.060,37	1.524.405,21	1.229.706,71	8,26
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
Belanja Hibah	1.079.238,25	816.868,57	819.237,02	880.838,34	1.149.133,05	1,58
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	
Belanja Modal	989.929,77	832.177,37	1.099.701,41	1.062.230,45	736.888,36	(7,11)
Belanja Tidak Terduga	1.363,58	1.228,78	2.168,89	1.945,91	455.660,79	325,19
Belanja Tidak Terduga	1.363,58	1.228,78	2.168,89	1.945,91	455.660,79	325,19
Belanja Transfer	834.019,25	847.303,76	804.617,17	910.946,51	765.317,56	(2,13)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	698.437,48	759.780,37	796.770,50	877.337,64	764.437,56	2,28
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	135.581,77	87.523,39	7.846,67	33.608,87	880,00	(71,62)
SURPLUS/(DEFISIT)	120.637,29	307.008,46	24.911,40	(160.941,68)	(44.228,03)	
PEMBIAYAAN DAERAH						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	251.496,99	297.134,28	530.424,08	563.774,67	337.485,66	7,63
Penggunaan SiLPA	251.496,99	297.134,28	530.424,08	502.062,67	332.762,66	7,25
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	61.712,00	4.723,00	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	75.000,00	73.000,00	53.430,00	74.441,10	32.407,00	(18,92)
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	75.000,00	73.000,00	53.430,00	20.413,10	20.000,00	(28,14)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	54.028,00	12.407,00	
PEMBIAYAAN NETTO	176.496,99	224.134,28	476.994,08	489.333,57	305.078,66	14,66
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) Sebelum Koreksi	297.134,28	531.142,74	501.905,48	328.391,90	260.850,62	(3,20)
Koreksi Silpa	(12.491,08)	(10.206,63)	-	-	-	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	284.643,20	520.936,11	501.905,48	328.391,90	260.850,62	(2,20)

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

Tabel 3.2
Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah, Proporsi Jenis Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
A	PENDAPATAN DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
A.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	42,47	35,18	36,16	36,44	35,43	(4,43)
A.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32,91	26,82	28,57	29,31	28,44	(3,59)
A.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	0,42	0,38	0,31	0,30	0,12	(26,15)
A.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,95	1,56	1,29	1,49	1,49	(6,47)
A.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	7,19	6,42	5,98	5,34	5,38	(6,99)
A.2	PENDAPATAN TRANSFER	56,62	64,56	63,60	63,31	63,59	2,94
A.2.1	Dana Perimbangan	55,72	63,73	62,47	63,02	62,89	3,07
A.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2,91	2,51	2,09	1,66	2,29	(5,82)
A.2.1.2	Dana Alokasi Umum	27,29	33,21	32,02	32,49	29,72	2,16
A.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	25,52	28,01	28,36	28,87	30,88	4,88
A.2.2	Transfer Dari Pusat Lainnya	0,91	0,83	1,13	0,29	0,70	(6,29)
A.2.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,91	0,83	1,13	0,29	0,70	(6,29)
A.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,91	0,26	0,24	0,25	0,98	1,90
A.3.1	Pendapatan Hibah	0,12	0,26	0,24	0,24	0,90	66,26
A.3.2	Bantuan Keuangan	0,27	-	-	0,02	0,07	(28,22)
A.3.3	Pendapatan Lainnya	0,52	-	-	-	-	
B	BELANJA DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
B.1	Belanja Operasi	59,47	70,82	69,58	69,85	69,60	4,01
B.1.1	Belanja Pegawai	15,63	35,14	32,75	33,14	32,48	20,06
B.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19,88	21,50	23,76	23,27	19,19	(0,88)
B.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
B.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
B.1.5	Belanja Hibah	23,96	14,18	13,07	13,45	17,93	(6,99)
B.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	
B.2	Belanja Modal	21,98	14,45	17,55	16,21	11,50	(14,95)
B.3	Belanja Tidak Terduga	0,03	0,02	0,03	0,03	6,95	289,31

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
B.3.1	Belanja Tidak Terduga	0,03	0,02	0,03	0,03	6,95	289,31
B.4	Belanja Transfer	18,52	14,71	12,84	13,90	11,94	(10,38)
B.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	15,51	13,19	12,71	13,39	11,93	(6,35)
B.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	3,01	1,52	0,13	0,51	0,01	(74,01)
	SURPLUS/(DEFISIT)		-	-	-	-	
C	PEMBIAYAAN DAERAH						
C.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
C.1.1	Penggunaan SiLPA	100,00	100,00	100,00	89,05	98,60	(0,35)
C.1.2	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	10,95	1,40	
C.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
C.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	100,00	100,00	100,00	27,42	61,72	(11,37)
C.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	72,58	38,28	

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 30 Pendapatan Daerah diklasifikasikan atas 3 kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, merupakan pendapatan yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tambahan kewenangan provinsi yang diikuti dengan penambahan ASN sebagaimana yang dijelaskan di atas mengakibatkan terjadi peningkatan Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang signifikan tahun 2017, yaitu dari Rp4.624.611,99 juta tahun 2016 menjadi Rp6.066.826,85 juta tahun 2017. Peningkatan pendapatan tersebut terutama berasal dari Pendapatan Transfer yang meningkat dari Rp2.618.608,27 juta tahun 2016 menjadi Rp3.917.012,19 juta tahun 2017. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang relatif stabil, tetapi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan dari Rp41.854,74 juta tahun 2016 menjadi Rp15.804,15 juta tahun 2017.

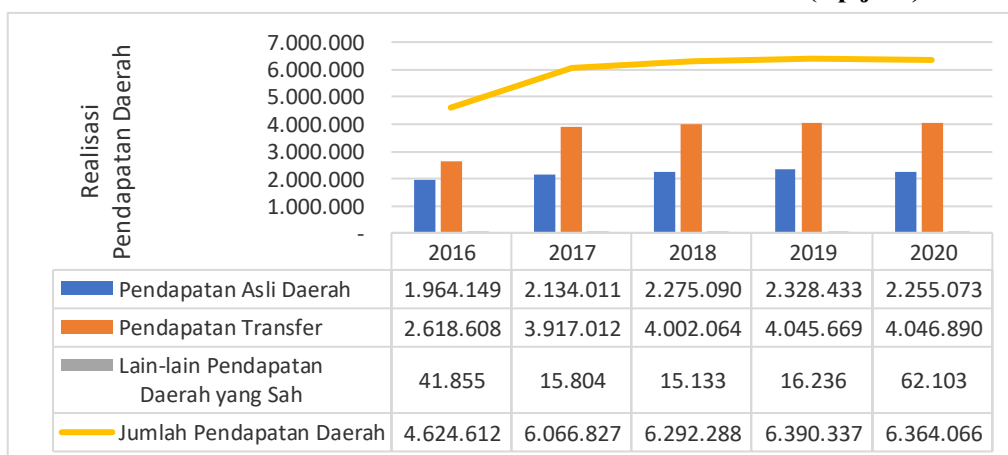
Pandemi COVID-19 yang terjadi tahun 2020 mengakibatkan penurunan Pendapatan Daerah sebesar Rp26.271,45 juta dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama berasal dari Pendapatan Asli Daerah, yaitu dari Rp2.328.432,87 juta tahun 2019 menjadi Rp2.255.072,99 juta tahun 2020. Sebaliknya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan dari Rp16.235,77 juta tahun 2019 menjadi Rp62.102,58 juta tahun 2020. Sedangkan Pendapatan Transfer relatif tidak mengalami perubahan yang berarti.

Analisis data tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan rata-rata yang rendah, hanya sebesar 2,63% per tahun, yaitu dari Rp 6.066.826,85 juta tahun 2017 menjadi Rp 6.390.337,20 juta tahun 2019. Dari 3 (tiga) sumber Pendapatan Daerah, pertumbuhan rata-rata per tahun yang lebih tinggi dihasilkan oleh Pendapatan Asli Daerah yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,46%, sedangkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masing-masing mengalami pertumbuhan 1,63% dan 1,36%.

Jika digunakan data tahun 2016-2020, pertumbuhan Pendapatan Transfer jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2 (dua) sumber Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lainnya. Pendapatan Transfer naik dari Rp2.618.608,27 juta tahun 2016 menjadi Rp4.046.890,19 juta tahun 2020, atau tumbuh 11,50% per tahun. Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari Rp1.964.148,97 juta tahun 2016 menjadi Rp 2.255.072,99 juta tahun 2020, atau tumbuh 3,51% per tahun. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan sedikit lebih rendah yaitu sebesar 10,37%; dari Rp41.854,74 juta tahun 2016 menjadi Rp 62.102,58 juta tahun 2020.

Perkembangan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)

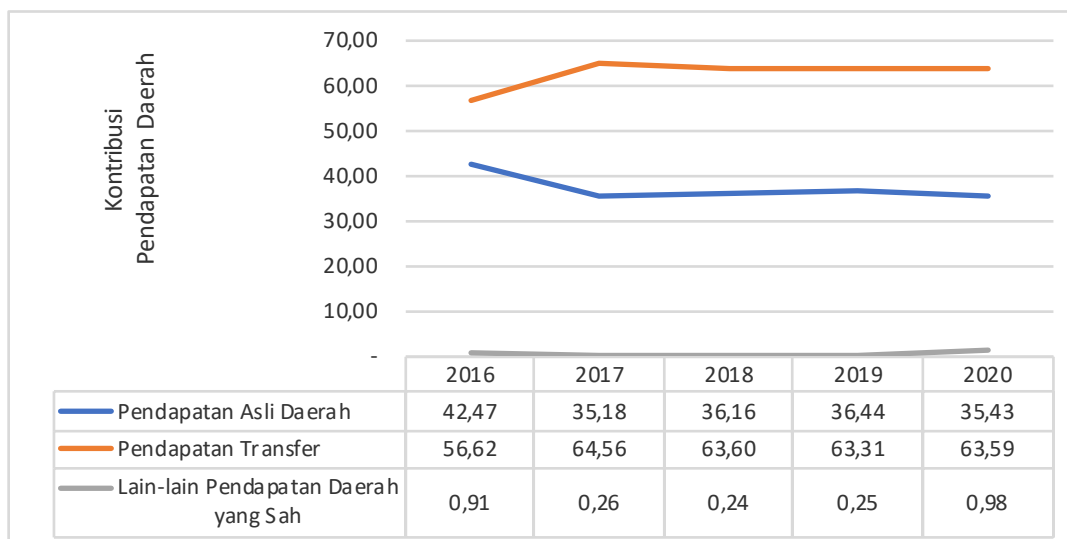


Sumber : BAPENDA Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

Tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2020 yang lebih rendah dibandingkan dengan 2 (dua) sumber Pendapatan Daerah lainnya, mengakibatkan ketergantungan sumber pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Pemerintah Pusat atau dari sumber lainnya semakin tinggi. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2016 adalah 42,47% dan mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 35,43% pada tahun 2020.

Sebaliknya, Pendapatan Transfer mengalami peningkatan dari 56,62% tahun 2016 menjadi menjadi 63,59% tahun 2020. Dengan demikian, perbedaan kontribusi PAD dengan Pendapatan Transfer tahun 2016 menjadi semakin melebar sampai tahun 2020, sebagaimana yang dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.2
Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)



Sumber BAPENDA Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi :

a. Pajak Daerah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat provinsi, meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari deviden Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat, antara lain PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Asuransi Askrida, PT Asuransi Jamkrida.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

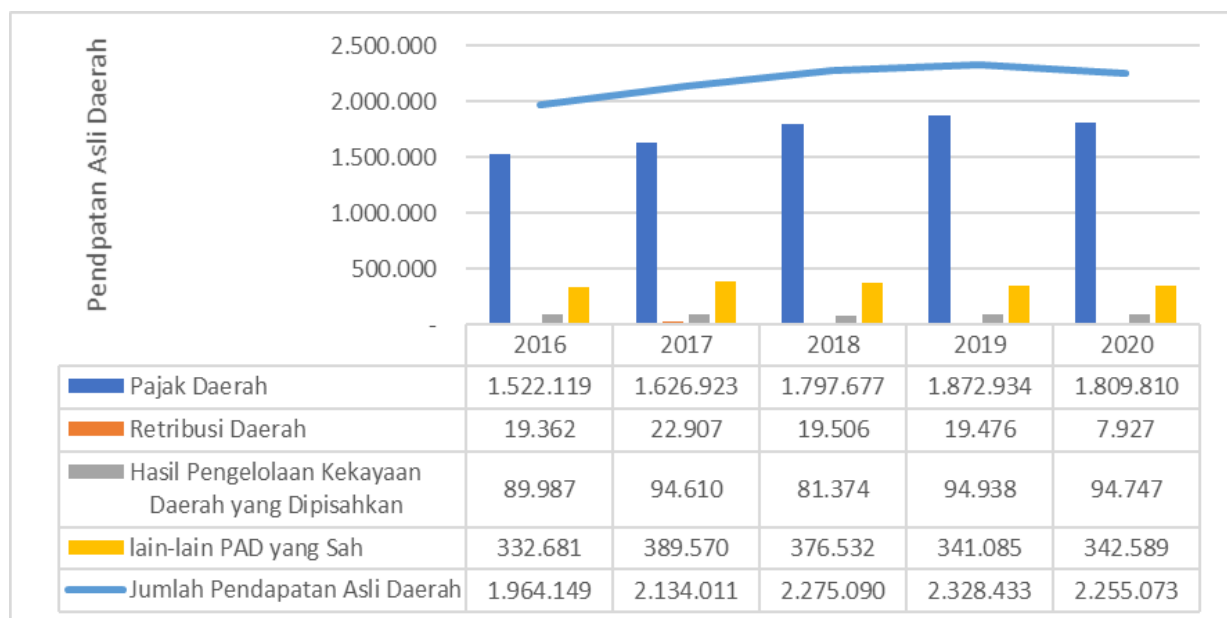
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain berasal dari Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Tuntutan Ganti rugi, Pendapatan Denda Kelambatan Pekerjaan, Pendapatan BLUD.

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berasal dari Pajak Daerah. Perkembangan Pajak Daerah dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Secara rata-rata selama periode 2016-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 4,42% per tahun dari Rp1.522.119,23 juta tahun 2016 menjadi Rp1.809.809,96 juta tahun 2020. Namun laju pertumbuhan Pajak Daerah ini cenderung mengalami tren penurunan. Laju pertumbuhan seperti ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang menunjukkan kecenderungan perlambatan dari 5,27 persen pada tahun 2016 menjadi 5,01 pada tahun 2019. Karena secara konseptual, perkembangan sumber pendapatan Pajak Daerah dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian; semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin tinggi pula pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah cenderung mengalami penurunan, dimana tahun 2016 berjumlah Rp19.362,26 juta dan meningkat menjadi Rp22.906,56 juta tahun 2017, tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Hal ini antara lain disebabkan perubahan pola pengelolaan keuangan pelayanan kesehatan menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Puncaknya tahun 2020 jumlah Pendapatan Retribusi turun sebesar 59,30% dari tahun sebelumnya, menjadi Rp7.926,60 juta tahun 2020. Penyebab utama penurunan tahun 2020 ini adalah kebijakan dan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengatasi dampak pandemi COVID-19.

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (BUMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih relatif kecil dan mengalami perkembangan yang tidak signifikan. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini mengalami peningkatan dari Rp89.986,73 juta tahun 2016 menjadi Rp94.747,26 juta tahun 2020, atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,30%. Sumber utama dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini berasal dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau lebih dikenal dengan Bank Nagari, PT Askrida, dan PT Jamkrida Sumatera Barat. Sedangkan BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lainnya belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh sebab itu, perlu strategi dan kebijakan khusus agar semua BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah Sumatera Barat umumnya dan meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)

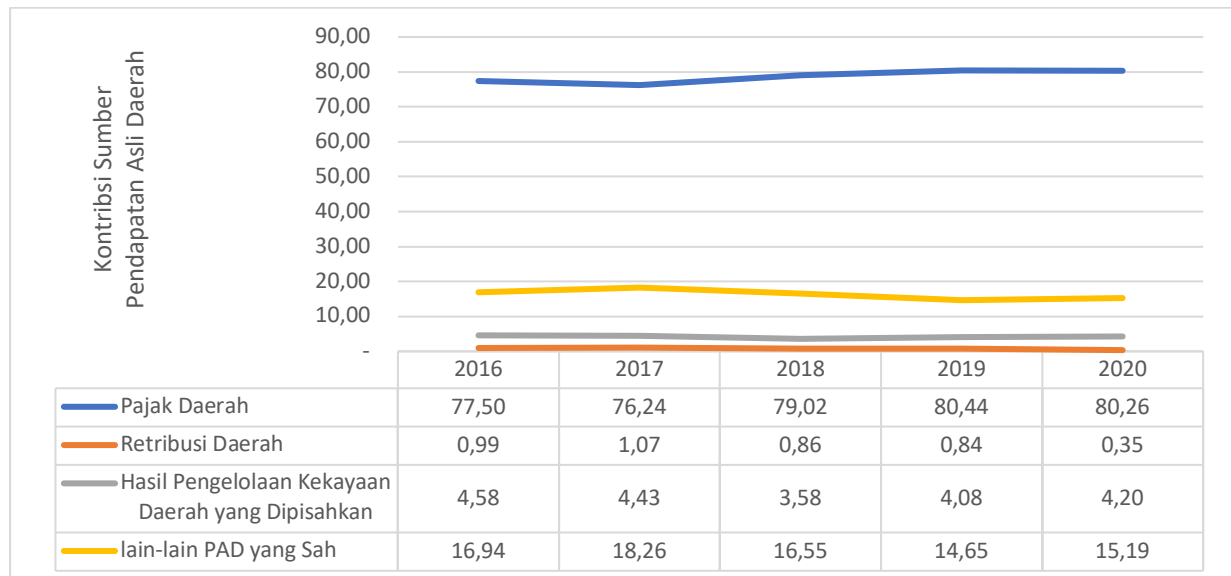


Sumber: BAPENDA Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

Kecenderungan jumlah Pajak Daerah yang mengalami tren peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya sebagaimana tergambar pada Grafik 3.3, mengakibatkan kontribusi Pajak Daerah mengalami peningkatan. Jika tahun 2016 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 77,50%, meningkat menjadi 80,26% tahun 2020. Kontribusi terbesar kedua adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, namun kontribusinya mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu dari 16,94% tahun 2016 menjadi 15,19% tahun 2020. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mengalami penurunan, yaitu dari 4,58% tahun 2016 menjadi 4,20% tahun 2020. Selain memberikan kontribusi terendah, Retribusi Daerah juga mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari 0,99% tahun 2016 menjadi 0,35% tahun 2020. Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan Retribusi Daerah selama ini belum berdampak signifikan. Oleh sebab itu, terobosan dan kebijakan yang lebih tegas harus dilakukan agar peningkatan Retribusi Daerah ke depan dapat dihasilkan.

Perkembangan kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.4
Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: BAPENDA Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

2. Pendapatan Transfer

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berbeda dengan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Transfer ke daerah dalam 2 kategori, yaitu Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
- 2) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 4) DAK dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- 5) Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
- 6) Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Transfer Antar-Daerah

Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

- 1) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota

Peningkatan jumlah ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari 7.854 orang tahun 2016 menjadi 20.942 orang tahun 2017 dikarenakan adanya pelimpahan pegawai (Guru SMA/SMK, penyuluh, staf kehutanan, pengawas ketenagakerjaan dan staf TU SMA/SMK) dari pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat ke pemerintah provinsi sebagai konsekuensi pemberlakuan kebijakan pengalihan kewenangan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014, mengakibatkan peningkatan Pendapatan Transfer dari Rp2.618.608,27 juta tahun 2016 dan menjadi Rp3.917.012,19 juta tahun 2017. Sedangkan peningkatan tahun-tahun berikutnya relatif sangat kecil sehingga tahun 2019 menjadi Rp4.045.668,56 juta. Dengan demikian, antara tahun 2017-2019, Pendapatan Transfer mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,63%.

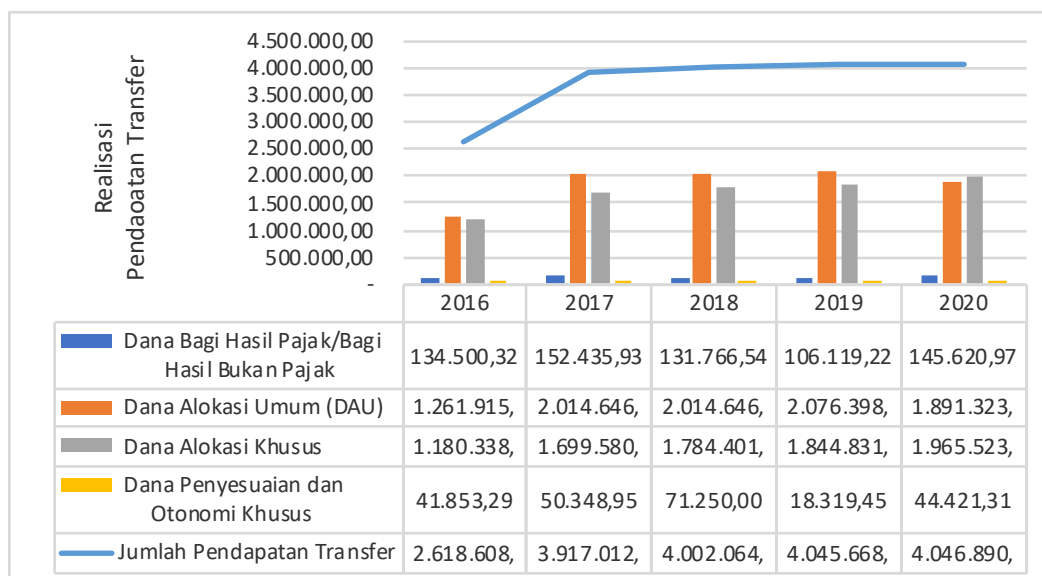
Sumber utama Pendapatan Transfer ini berasal dari DAU dan DAK. Perhitungan DAK dalam pembahasan ini termasuk DAK Fisik dan Non Fisik. Analisis laju pertumbuhan per tahun menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan DAK tertinggi dibandingkan dengan 3 (tiga) sumber Pendapatan Transfer lainnya. Pertumbuhan rata-rata per tahun DAU adalah 1,52%, yaitu dari Rp2.014.646,64 juta tahun 2017 menjadi Rp2.076.398,19 juta tahun 2019. Sedangkan DAK mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,19% per tahun, yaitu dari Rp1.699.580,67 juta tahun 2017 menjadi Rp1.844.831,70 juta tahun 2019.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengatasi Dampak Pandemi Covid-19, maka pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang berasal dari DAU mengalami penurunan Rp185.074,21 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi, pada tahun yang sama, DAK mengalami peningkatan Rp120.692,23 juta dari tahun sebelumnya.

Komponen Pendapatan Transfer lainnya adalah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang mengalami penurunan yang signifikan antara 2017-2019, yaitu dari Rp152.435,93 juta menjadi Rp106.119,22 juta. Tetapi, tahun 2020 kembali naik menjadi Rp145.620,97. Untuk meningkatkan pendapatan Bagi Hasil Pajak pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mengupayakan agar setiap pelaku ekonomi yang beroperasi di Sumatera Barat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan alamat di Sumatera Barat agar pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Pusat diterima kembali (Bagi Hasil) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pendapatan Transfer lainnya yang berasal dari Dana Penyesuaian mengalami peningkatan relatif kecil yaitu sebesar 1,50%, dari Rp41.853,29 juta tahun 2016 menjadi Rp44.421,31 tahun 2020. Perkembangan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

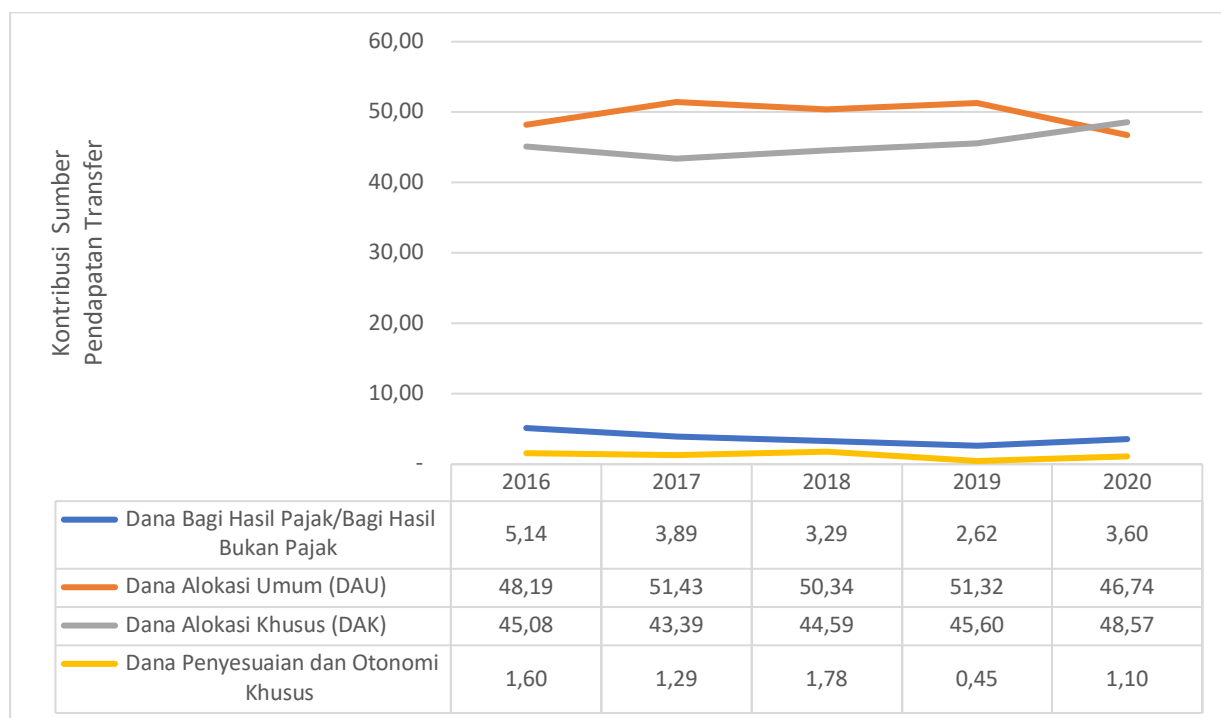
Grafik 3.5
Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber : BAPENDA Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

Akibat pertumbuhan DAK yang lebih tinggi sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka peranan DAU dan DAK dalam pembentukan Pendapatan Transfer mengalami perubahan, khususnya tahun 2020. Pada tahun 2016 peranan DAU lebih tinggi dari DAK, yaitu 48,19% berbanding 45,08%. Namun tahun 2020, peranan DAK lebih tinggi dibandingkan DAU, yaitu 48,57% berbanding 46,74%. Grafik perkembangan kontribusi Pendapatan Transfer dapat dilihat sebagai berikut:

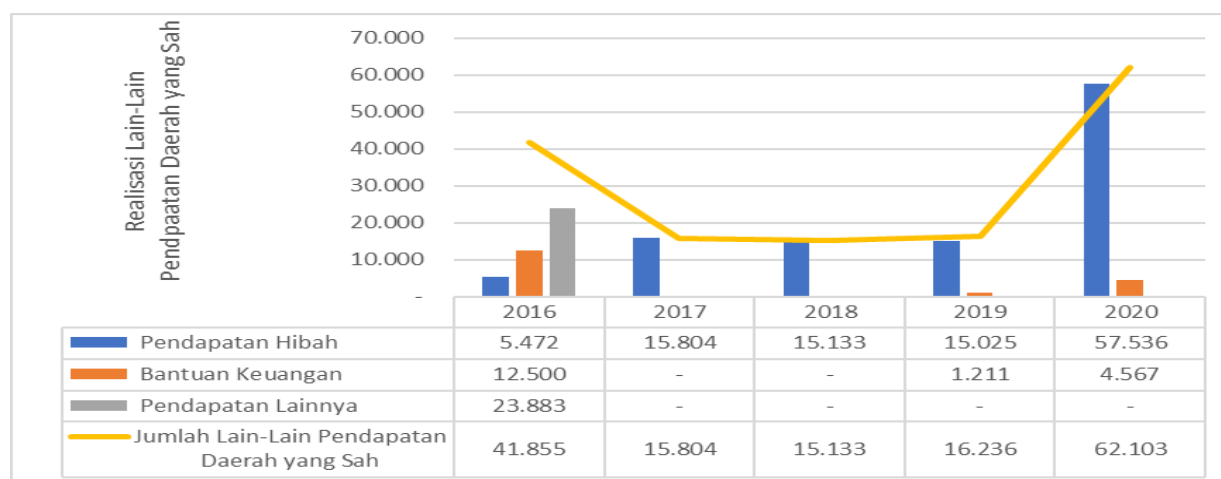
Grafik 3.6
Kontribusi Pendapatan Transfer
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

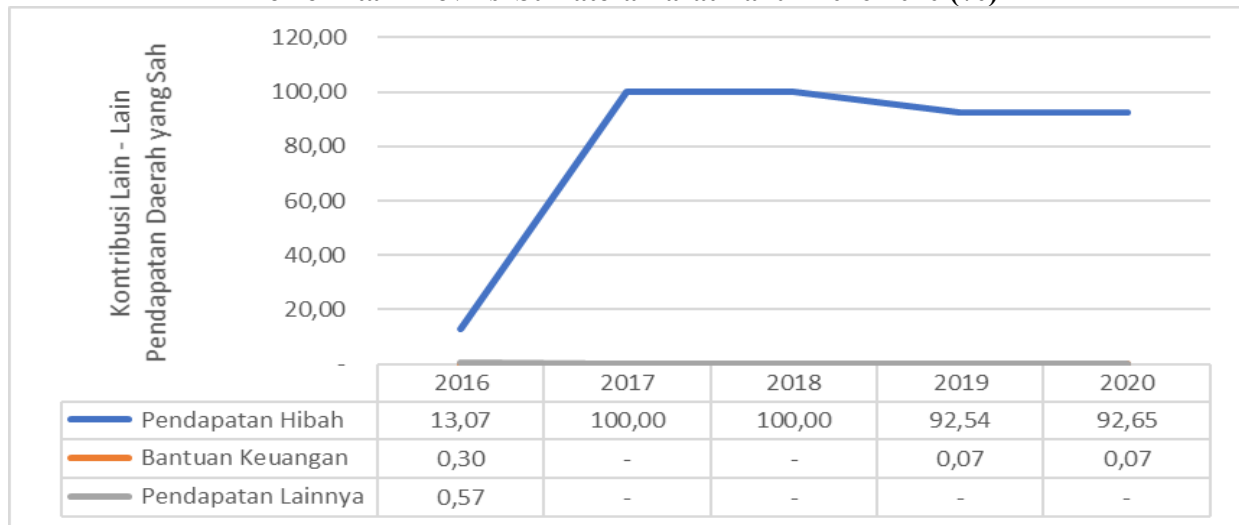
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dihasilkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun terakhir berfluktuasi dan tidak banyak berubah, baik jumlah maupun perkembangannya. Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah pun relatif kecil. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016 berjumlah Rp41.854,74 juta dan terus mengalami penurunan dalam 3 (tiga) tahun berikutnya, namun kembali mengalami peningkatan menjadi Rp62.102,58 juta tahun 2020, yang berasal dari Pendapatan Hibah. Grafik 3.7 menunjukkan perkembangan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan pada Grafik 3.8 dapat dilihat kontribusi sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Grafik 3.7
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

Grafik 3.8
Kontribusi Sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

3.1.1.2. Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 55, Belanja Daerah diklasifikasikan atas 4 kelompok, yaitu:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

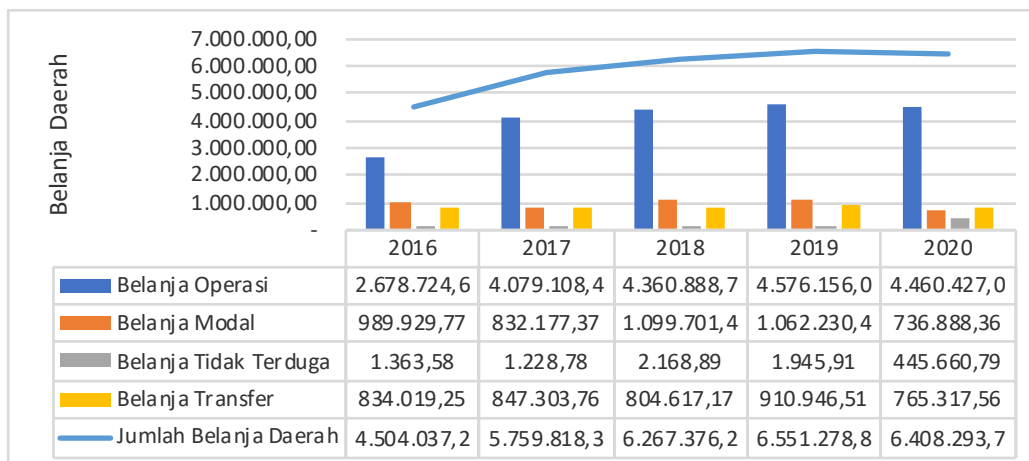
Sejalan dengan penambahan jumlah pegawai ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akibat implementasi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan di atas, maka Belanja Operasi tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 152,28% dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp2.678.724,66 juta menjadi Rp4.079.108,49 juta. Namun, tahun-tahun berikutnya relatif stabil, sehingga antara tahun 2017-2019 terjadi pertumbuhan sebesar 5,92% per tahun. Sedangkan tahun 2020, jumlah Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan menjadi Rp4.460.427,08 juta.

Dalam merespon Instruksi Presiden (INPRES) tentang *refocusing* kegiatan/realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19, maka Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan yang sangat signifikan tahun 2020. Belanja Modal tahun 2016 berjumlah Rp 989.929,77 juta dan meningkat menjadi Rp1.062.230,45 juta tahun 2019, tetapi turun menjadi Rp736.888,36 juta tahun 2020.

Sejalan dengan pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengalami peningkatan, maka Belanja Transfer (Bagi Hasil) ke kabupaten/kota juga mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020. Belanja Transfer tahun 2016 berjumlah Rp834.019,25 juta dan meningkat menjadi Rp910.946,51 juta tahun 2019 dan turun menjadi Rp765.317,56 juta tahun 2020.

Jumlah Belanja Tidak Terduga relatif kecil, dan tidak banyak berubah sampai tahun 2019. Namun akibat pandemi COVID-19, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Jumlah Belanja Tidak Terduga tahun 2016 hanya sebesar Rp1.363,58 juta dan meningkat signifikan menjadi Rp 445.660,79 juta tahun 2020. Perkembangan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.9
Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)

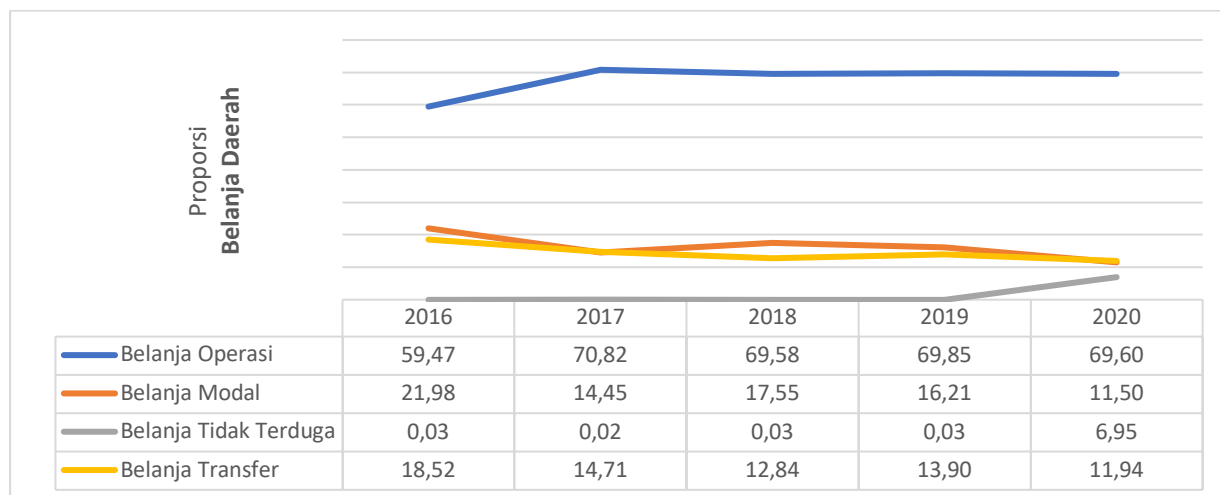


Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

Proporsi terbesar dari Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah untuk Belanja Operasi, di mana proporsi rata-rata tahun 2017-2019 sebesar 70,08%. Proporsi Belanja Operasi tersebut didominasi oleh Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa, masing-masing sebesar 48,00% dan 32,66% dan sisanya sebesar 19,34% merupakan Belanja Hibah.

Proporsi kedua terbesar dari Belanja Daerah adalah Belanja Modal, dengan proporsi rata-rata dalam tahun 2017-2019 sebesar 16,07%. Rendahnya Belanja Modal ini adalah karena terbatasnya sumber Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan Belanja Operasi. Proporsi ketiga terbesar adalah Belanja Bagi Hasil kepada Kota/Kabupaten, yaitu sebesar 13,82%. Perkembangan proporsi Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.10
Proporsi Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)



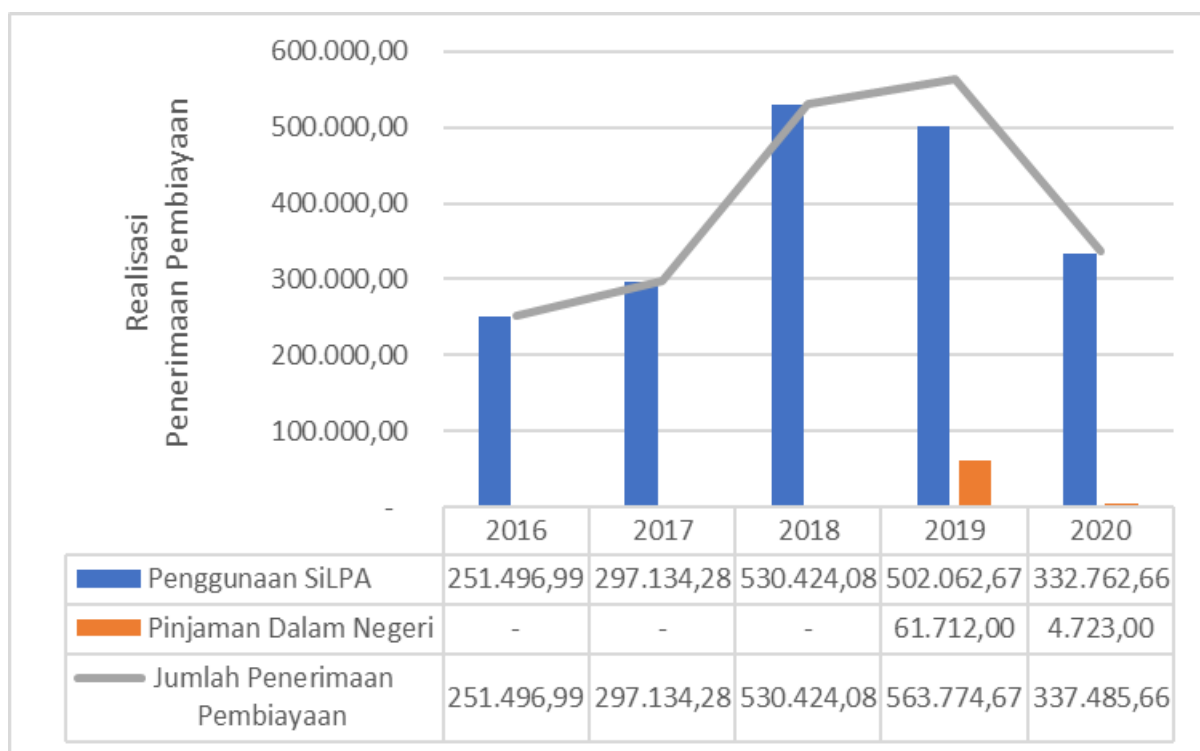
Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

Selama periode 2016-2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalami 3 kali surplus dan 2 kali defisit. Secara umum defisit yang terjadi menunjukkan efektifitas pelaksanaan APBD. Sebaliknya, surplus yang terjadi menunjukkan pelaksanaan APBD yang kurang efektif, kecuali ada kebijakan khusus untuk Pengeluaran Pembiayaan. Surplus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terjadi tahun 2016, 2017, dan 2018, masing-masing sebesar Rp120.637,29 juta, Rp307.008,46 juta, dan Rp24.911,40 juta. Sedangkan tahun 2019 dan 2020 berubah menjadi defisit sebesar Rp160.941,68 juta dan Rp44.228,03 juta.

C. PEMBIAYAAN

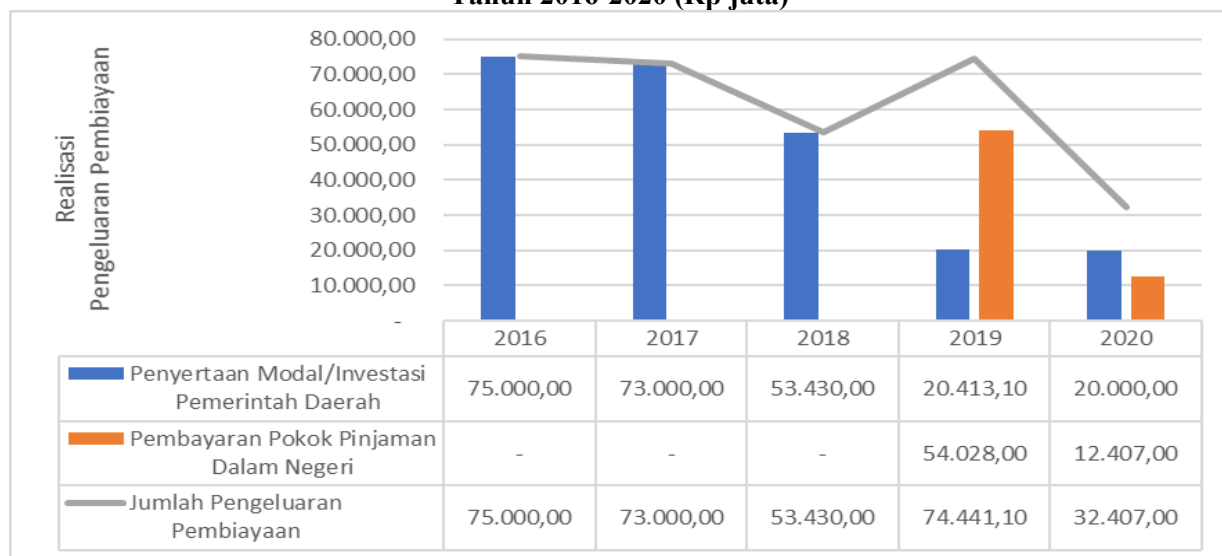
Pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama periode Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari Rp251.496,99 juta tahun 2016 menjadi Rp563.7744,67 juta tahun 2019, namun tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp337.485,66 juta atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,63 % per tahun. Penerimaan Pembiayaan tersebut terutama berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terutama digunakan untuk Penyertaan Modal pada BUMD, dan pada 2 tahun terakhir juga untuk Pembayaran Pokok Pinjaman. Namun demikian, dari tahun 2016-2020 terjadi penurunan Pengeluaran Pembiayaan dari Rp75.000,00 juta tahun 2016 menjadi Rp32.407,00 juta tahun 2020 atau mengalami penurunan sebesar 18,92% per tahun. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.11. Sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik 3.11
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

Grafik 3.12
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

Perbedaan realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana dijelaskan di atas, maka terjadi fluktuasi surplus atau defisit Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Setelah mempertimbangkan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016 sampai 2020 masih mengalami SiLPA. Kecenderungan SiLPA tersebut menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, khususnya dari tahun 2017. Pada tahun 2020, jumlah SiLPA Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berjumlah Rp260.580,62 juta. Tabel 3.3 berikut memperlihatkan perkembangan Surplus/Defisit dan SiLPA Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020.

Tabel 3.3
Realisasi Surplus/Defisit, Pembiayaan dan SiLPA Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2016-2020 (Rp juta)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
SURPLUS/DEFISIT	120.637,29	307.008,46	24.911,40	(160.941,68)	(44.228,03)	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	251.496,99	297.134,28	530.424,08	563.774,67	337.485,66	7,63
Penggunaan SiLPA	251.496,99	297.134,28	530.424,08	502.062,67	332.762,66	7,25
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	61.712,00	4.723,00	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	75.000,00	73.000,00	53.430,00	74.441,10	32.407,00	(18,92)
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	75.000,00	73.000,00	53.430,00	20.413,10	20.000,00	(28,14)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	54.028,00	12.407,00	
PEMBIAYAAN NETTO	176.496,99	224.134,28	476.994,08	489.333,57	305.078,66	14,66
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN Sebelum Koreksi	297.134,28	531.142,74	501.905,48	328.391,90	260.580,62	(3,65)
Koreksi SiLPA	(12.491,08)	(10.206,63)	-	-	-	(100,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	284.643,20	520.936,11	501.905,48	328.391,90	260.580,62	(2,61)

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

3.1.1.3. Analisis Kesehatan Fiskal Daerah

Salah satu analisis yang digunakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menilai Kesehatan Fiskal Daerah adalah konsep yang dikembangkan oleh Kenneth W. Brown (1993). Analisis fiskal ini menggunakan indikator rasio sederhana untuk menilai kondisi kesehatan fiskal

Pemerintah Daerah, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi, dan struktur hutang.

Berdasarkan data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi tahun 2017-2020, dapat dilakukan analisis perbandingan kesehatan fiskal seluruh Provinsi Indonesia tahun 2017-2019. Analisis perbandingan kesehatan fiskal seperti ini dilakukan karena data tahun 2016 dan 2020 yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Indonesia hanya dalam bentuk anggaran sehingga kurang mencerminkan capaian riil kinerja fiskal daerah.

1. Pendapatan Daerah Per Kapita

Rasio pendapatan daerah per kapita menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melayani penduduk dari daerah tersebut. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung, sehingga dibutuhkan dana (pendapatan) yang lebih besar. Rasio ini merupakan ukuran riil dari pendapatan daerah, dan diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah pada masa datang.

Analisis data penduduk dan pendapatan daerah provinsi se Indonesia tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat di atas rata-rata Indonesia, dan jumlah serta pertumbuhan rata-rata per tahun dari pendapatan daerah, jauh di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengakibatkan kemampuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam membiayai pelayanan kepada penduduknya jauh di bawah rata-rata nasional.

Secara nasional, rata-rata kemampuan provinsi se- Indonesia dalam membiayai pelayanan penduduknya tahun 2019 adalah Rp 2,05 Juta, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya mampu membiayai sebesar Rp1,17 Juta. Kemampuan membiayai pelayanan ini pun menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi se Indonesia. Laju pertumbuhan kemampuan membiayai pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya 1,34%, sedangkan secara rata-rata nasional adalah 7,42%.

Kemampuan membiayai pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menduduki Ranking 24 dari 34 provinsi di Indonesia. Untuk meningkatkan rasio ini, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus membuat berbagai kebijakan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan intensifikasi pemungutan berbagai sumber PAD serta meningkatkan sumber-sumber pendapatan lain guna meningkatkan Pendapatan Daerah. Perkembangan kemampuan membiayai pelayanan penduduk menurut provinsi di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Rasio Pendapatan Daerah Per Kapita Menurut Provinsi
Tahun 2017-2019 (Rp Juta)

No	Provinsi	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun (%)	Ranking Tahun 2019
1	A c e h	2,78	2,75	2,96	3,31	6
2	Sumatera Utara	0,86	0,88	0,89	2,22	29
3	Sumatera Barat	1,14	1,16	1,17	1,34	24
4	R i a u	1,20	1,26	1,27	3,11	22
5	J a m b i	1,23	1,25	1,28	1,94	21
6	Sumatera Selatan	0,99	1,09	1,09	5,02	25
7	Bengkulu	1,46	1,46	1,49	1,06	18
8	Lampung	0,82	0,85	0,86	2,28	31
9	Bangka Belitung	1,59	1,79	1,86	7,94	9
10	Kepulauan Riau	1,54	1,61	1,75	6,59	11
11	DKI Jakarta	6,26	5,87	5,93	(2,70)	2
12	Jawa Barat	0,67	0,70	0,74	4,66	34
13	Jawa Tengah	0,69	0,72	0,75	3,85	33
14	D I Yogyakarta	1,35	1,43	1,47	4,48	19
15	Jawa Timur	0,76	0,81	0,84	5,23	32

No	Provinsi	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun (%)	Ranking Tahun 2019
16	Banten	0,79	0,82	0,88	5,86	30
17	B a l i	1,41	1,45	1,52	4,02	16
18	Nusa Tenggara Barat	1,02	0,97	1,01	(0,37)	27
19	Nusa Tenggara Timur	0,89	0,89	0,98	5,20	28
20	Kalimantan Barat	1,09	1,14	1,18	3,70	23
21	Kalimantan Tengah	1,59	1,79	1,88	8,74	8
22	Kalimantan Selatan	1,36	1,58	1,60	8,36	13
23	Kalimantan Timur	2,31	2,99	3,25	18,62	5
24	Kalimantan Utara	3,32	3,55	3,75	6,33	4
25	Sulawesi Utara	1,52	1,53	1,58	1,92	14
26	Sulawesi Tengah	1,23	1,29	1,36	5,09	20
27	Sulawesi Selatan	1,04	1,06	1,09	1,97	26
28	Sulawesi Tenggara	1,37	1,44	1,56	6,92	15
29	Gorontalo	1,53	1,54	1,65	3,70	12
30	Sulawesi Barat	1,39	1,36	1,50	3,90	17
31	M a l u k u	1,63	1,76	1,76	3,91	10
32	Maluku Utara	1,89	2,04	2,18	7,18	7
33	Papua Barat	7,67	7,76	11,77	23,84	1
34	P a p u a	4,00	4,05	4,85	10,07	3
	Rata-Rata	1,78	1,84	2,05	7,42	

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Tahun 2017-2020 (diolah)

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan PAD mendanai belanja untuk memberikan pelayanan publik. Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah; semakin tinggi rasio kemandirian daerah akan semakin baik kinerja daerah. Kemandirian PAD inilah sejatinya yang menjadi dasar utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui penyerahan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah sesuai asas *money follows function* atau saat ini menekankan *money follows program*. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung berdasarkan perbandingan PAD dengan total Pendapatan Daerah.

Data tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Sumber Dana dari Pemerintah Pusat atau sumber lainnya masih pada batas rata-rata nasional. Jika dalam 3 tahun periode analisis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mampu menghasilkan PAD sebesar 35,92% dari Pendapatan Daerah, dan rata-rata nasional mampu menghasilkan 35,78%. Namun, pertumbuhan rata-rata per tahun dari rasio kemandirian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedikit di bawah rata-rata nasional, yaitu 1,78% berbanding 2,26%. Dengan demikian, jika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak berusaha secara optimal untuk meningkatkan penerimaan PAD pada tahun-tahun mendatang, maka kemandirian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan turun di bawah rata-rata nasional.

Kemandirian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 berada pada ranking 16 dari 34 provinsi di Indonesia. Perkembangan rasio kemandirian daerah se Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Rasio Kemandirian Daerah Menurut Provinsi
Tahun 2017-2019 (%)

No	Provinsi	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun	Ranking Tahun 2019
1	A c e h	15,86	16,35	17,13	3,93	30
2	Sumatera Utara	43,22	44,39	44,05	0,96	9
3	Sumatera Barat	35,18	36,16	36,44	1,78	16
4	R i a u	42,52	42,92	40,88	(1,94)	12
5	J a m b i	36,71	37,54	36,09	(0,85)	17
6	Sumatera Selatan	36,99	38,59	37,60	0,82	14

No	Provinsi	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun	Ranking Tahun 2019
7	Bengkulu	28,69	30,59	28,18	(0,90)	23
8	Lampung	40,37	40,35	41,53	1,43	11
9	Bangka Belitung	31,53	33,26	30,68	(1,36)	22
10	Kepulauan Riau	33,66	34,88	33,08	(0,87)	20
11	DKI Jakarta	67,72	70,75	73,37	4,08	1
12	Jawa Barat	56,22	57,91	58,95	2,40	4
13	Jawa Tengah	52,94	55,51	55,83	2,70	6
14	DI Yogyakarta	36,42	37,50	36,54	0,17	15
15	Jawa Timur	58,01	58,02	57,77	(0,21)	5
16	Banten	59,31	61,33	62,69	2,81	2
17	Bali	56,72	59,41	60,54	3,32	3
18	Nusa Tenggara Barat	33,14	33,60	34,77	2,44	19
19	Nusa Tenggara Timur	22,29	22,91	23,51	2,72	27
20	Kalimantan Barat	36,10	38,78	38,74	3,59	13
21	Kalimantan Tengah	32,73	34,53	35,59	4,28	18
22	Kalimantan Selatan	50,83	53,96	51,78	0,93	8
23	Kalimantan Timur	56,27	54,36	55,68	(0,53)	7
24	Kalimantan Utara	21,71	23,72	25,13	7,59	26
25	Sulawesi Utara	30,73	33,17	32,64	3,06	21
26	Sulawesi Tengah	26,34	26,19	26,42	0,17	25
27	Sulawesi Selatan	40,63	42,67	43,23	3,15	10
28	Sulawesi Tenggara	22,81	23,88	27,08	8,96	24
29	Gorontalo	19,64	21,36	22,33	6,62	28
30	Sulawesi Barat	16,21	16,57	16,97	2,31	31
31	Maluku	15,29	15,15	15,53	0,76	33
32	Maluku Utara	14,39	14,40	16,12	5,85	32
33	Papua Barat	6,62	6,28	4,27	(19,73)	34
34	Papua	7,81	6,92	18,60	54,32	29
	Rata-Rata	34,87	36,00	36,46	2,26	

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Tahun 2017-2020 (diolah)

3. Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal daerah merupakan konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu daerah. Semakin besar ruang fiskal, semakin leluasa pemerintah daerah dalam menyesuaikan penggunaan dana dengan prioritas daerah.

Ruang fiskal daerah dihitung berdasarkan pendapatan daerah selain yang sudah memiliki *earmark* (DAK, hibah, dana penyesuaian dan otsus, dan dana darurat) yang dapat digunakan untuk membiayai belanja diskresi (belanja selain belanja yang bersifat wajib seperti belanja pegawai dan belanja bunga). Rasio Ruang Fiskal Daerah dihitung berdasarkan perbandingan Ruang Fiskal Daerah dengan Total Pendapatan Daerah.

Tambahan kewenangan provinsi akibat implementasi UU 23 tahun 2014 telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dari dana *earmark* yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bahkan, dalam anggaran tahun 2021 terdapat peningkatan anggaran pendapatan *earmark* menjadi Rp2.173.959,17 juta. Sedangkan pendapatan DAU dan sumber pendapatan daerah lainnya tidak sebanding dengan tambahan jumlah PNS dari tambahan kewenangan provinsi. Akibatnya, fleksibilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyesuaikan penggunaan dana dengan prioritas daerah semakin berkurang.

Hasil olahan data Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan terjadinya penurunan Ruang Fiskal Daerah akibat tambahan kewenangan provinsi dari 58,23% menjadi 37,53%. Sedangkan

tahun-tahun berikutnya Ruang Fiskal Provinsi Sumatera Barat tidak jauh berbeda. Dengan demikian, kedepan perlu lebih selektif dan cermat dalam menentukan prioritas dan pengalokasian anggaran untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.6
Rasio Ruang Fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (%)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pendapatan Daerah	4.624.611,99	6.066.826,85	6.292.287,63	6.390.337,20	6.364.065,76
B1	Dana Alokasi Khusus	1.180.338,81	1.699.580,67	1.784.401,03	1.844.831,70	1.965.523,94
B2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41.853,29	50.348,95	71.250,00	18.319,45	44.421,31
B3	Pendapatan Hibah	5.472,27	15.804,15	15.133,35	15.024,97	57.535,78
B4	Belanja Pegawai	704.125,02	2.024.083,09	2.052.591,38	2.170.912,46	2.081.587,32
B	Selisih	2.692.822,60	2.277.010,00	2.368.911,87	2.341.248,62	2.214.997,41
C	Ruang Fiskal Daerah (%)	58,23	37,53	37,65	36,64	34,80

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

4. Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Indikator peningkatan pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah. Rasio yang semakin besar menunjukkan kemampuan daerah dalam mengkonversi potensi penerimaan menjadi realisasi penerimaan yang semakin besar. Indikator peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dihitung berdasarkan perbandingan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan PDRB berdasarkan harga berlaku.

Rasio tersebut juga dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui kira-kira seberapa besar peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam perekonomian daerah. Dengan demikian, pada hakikatnya rasio ini bisa dipergunakan untuk melihat indikasi besarnya beban pajak (*tax burden*) yang harus ditanggung masyarakat. Karena sifatnya yang demikian itu, maka sebenarnya *tax burden* terkait dengan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*), di mana orang yang lebih mampu seharusnya membayar pajak lebih banyak. *Tax burden* terkait pula dengan keadilan.

Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat relatif kecil; di bawah capaian nasional. Dalam 3 tahun periode analisis pun, kinerja ini tidak mengalami banyak perubahan, sekalipun pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan. Rasio yang dicapai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkisar 0,77% sedangkan rata-rata nasional adalah 0,85%. Sekalipun rata-rata nasional juga belum menggambarkan kondisi yang ideal, namun sebatas kewenangan provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak BPNKB, PBBKB, maka penegakan disiplin dan intensifikasi pemungutan perlu ditingkatkan.

Indikasi penyebab rendahnya capaian kinerja ini di antaranya adalah belum optimalnya unit pemungut pajak dan retribusi dalam melakukan intensifikasi pemungutan dan tingkat kesadaran dari pembayar pajak dan retribusi yang masih perlu ditngkatkan. Kebijakan dan penguatan terhadap peraturan terkait dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Barat juga perlu dilakukan agar penegakkan disiplin dan atau sanksi yang lebih keras dapat dilaksanakan secara efektif.

Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019 menunjukkan tren penurunan, dan tahun 2019 berada pada ranking 20 dari 34 provinsi di Indonesia. Perkembangan Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Menurut Provinsi di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.7
Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB
Menurut Provinsi Tahun 2017-2019 (%)

No	Provinsi	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun	Ranking Tahun 2019
1	A c e h	0,91	0,85	0,87	(2,18)	17
2	Sumatera Utara	0,71	0,71	0,64	(5,34)	28
3	Sumatera Barat	0,77	0,79	0,77	(0,22)	20
4	R i a u	0,39	0,41	0,39	0,00	34
5	J a m b i	0,70	0,67	0,63	(5,65)	29
6	Sumatera Selatan	0,74	0,76	0,71	(2,28)	24
7	Bengkulu	0,99	1,03	0,87	(6,49)	16
8	Lampung	0,80	0,77	0,73	(4,46)	23
9	Bangka Belitung	0,91	1,09	1,02	5,72	6
10	Kepulauan Riau	0,43	0,45	0,44	1,32	31
11	DKI Jakarta	1,57	1,47	1,44	(4,24)	2
12	Jawa Barat	0,93	0,93	0,93	0,05	12
13	Jawa Tengah	0,91	0,92	0,89	(1,38)	14
14	D I Yogyakarta	1,36	1,36	1,28	(2,97)	4
15	Jawa Timur	0,72	0,69	0,67	(3,78)	27
16	Banten	0,98	0,98	1,01	1,86	7
17	B a l i	1,37	1,40	1,38	0,53	3
18	Nusa Tenggara Barat	0,97	1,04	1,08	5,16	5
19	Nusa Tenggara Timur	0,92	0,90	0,91	(0,94)	13
20	Kalimantan Barat	0,96	1,01	0,94	(0,69)	11
21	Kalimantan Tengah	0,88	0,99	0,99	5,99	9
22	Kalimantan Selatan	1,42	1,66	1,55	4,61	1
23	Kalimantan Timur	0,60	0,74	0,77	13,50	21
24	Kalimantan Utara	0,40	0,45	0,43	4,44	33
25	Sulawesi Utara	0,96	0,95	0,89	(4,08)	15
26	Sulawesi Tengah	0,60	0,56	0,55	(4,32)	30
27	Sulawesi Selatan	0,80	0,77	0,74	(3,60)	22
28	Sulawesi Tenggara	0,59	0,60	0,69	8,12	25
29	Gorontalo	0,91	0,96	1,00	4,44	8
30	Sulawesi Barat	0,70	0,64	0,68	(1,58)	26
31	M a l u k u	1,01	1,03	0,95	(2,92)	10
32	Maluku Utara	0,95	0,76	0,84	(6,05)	18
33	Papua Barat	0,43	0,44	0,44	1,56	32
34	P a p u a	0,44	0,39	0,80	34,32	19
	Rata-Rata	0,85	0,86	0,85	0,84	

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Tahun 2017-2020 (diolah)

5. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah antara lain tercermin dari seluruh penerimaan daerah, baik Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh pengeluaran daerah; Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah, maka kemampuan mendanai belanja daerah akan semakin besar pula. Indikator kemampuan mendanai belanja daerah dihitung berdasarkan perbandingan penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah.

Kemampuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendanai Belanja Daerah relatif terkendali, namun dari tahun 2016-2020 cenderung menunjukkan tren penurunan. Jika tahun 2017 rasio kemampuan mendanai Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar 109,11% tetapi selama tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan sehingga menjadi 104,96% tahun 2019 dan 103,97 tahun 2020. Oleh sebab itu, penentuan prioritas pembangunan daerah menjadi sesuatu hal yang mutlak harus diupayakan secara maksimal, agar dana yang terbatas tersebut dapat digunakan secara efektif. Perkembangan rasio kemampuan mendanai Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Penerimaan Daerah	4.876.108,98	6.363.961,13	6.822.711,71	6.954.111,88	6.701.635,41
1	Pendapatan Daerah	4.624.611,99	6.066.826,85	6.292.287,63	6.390.337,20	6.364.149,76
2	Penerimaan Pembiayaan	251.496,99	297.134,28	530.424,08	563.774,67	337.485,66
B	Pengeluaran Daerah	4.579.037,26	5.832.818,39	6.320.806,23	6.625.719,98	6.445.606,79
1	Belanja Daerah	4.504.037,26	5.759.818,39	6.267.376,23	6.551.278,88	6.413.199,79
2	Pengeluaran Pembiayaan	75.000,00	73.000,00	53.430,00	74.441,10	32.407,00
Kemampuan Mendanai Belanja Daerah		106,49	109,11	107,94	104,96	103,97

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

6. Belanja Modal

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan proporsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk Belanja Modal. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif. Karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Di samping itu, Belanja Modal memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio Belanja Modal, diharapkan semakin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah rasio Belanja Modal, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Data tahun 2017-2019 menunjukkan penurunan dalam rasio Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rasio Belanja Modal tahun 2017 adalah 19,33% dan turun menjadi 16,21% tahun 2019. Di samping karena prioritas pembangunan nasional dan daerah, penurunan ini juga disebabkan keterbatasan Pendapatan Daerah sehingga analisis prioritas belanja yang ketat akan menjadi dasar utama menentukan Belanja Modal, khususnya jika kondisi Jalan atau infrastruktur lainnya sudah semakin mantap.

Apabila dibandingkan rasio Belanja Modal secara nasional, capaian kinerja rata-rata Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam 3 tahun periode analisis (2017-2019) sedikit di atas rata-rata nasional. Namun demikian, capaian kinerja ini perlu ditingkatkan karena tahun 2019 rasio Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menduduki ranking 19 dari 34 provinsi di Indonesia. Perkembangan rasio Belanja Modal menurut provinsi di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Rasio Belanja Modal Menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2017-2019 (%)

No	Provinsi	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun	Ranking Tahun 2019
1	A c e h	15,67	20,35	21,55	17,25	6
2	Sumatera Utara	15,33	12,46	9,30	(22,13)	30
3	Sumatera Barat	19,33	17,55	16,21	(8,42)	19
4	R i a u	21,13	12,36	13,36	(20,48)	25
5	J a m b i	21,67	18,69	17,96	(8,96)	14
6	Sumatera Selatan	21,49	19,36	17,11	(10,76)	17
7	Bengkulu	24,80	20,76	23,79	(2,06)	4
8	Lampung	20,89	22,94	14,36	(17,07)	24
9	Bangka Belitung	15,61	13,34	15,89	0,91	20
10	Kepulauan Riau	6,21	18,14	17,36	67,14	16
11	DKI Jakarta	21,63	22,99	17,79	(9,31)	15
12	Jawa Barat	7,07	9,44	7,06	(0,04)	34
13	Jawa Tengah	6,36	6,87	8,03	12,39	33
14	D I Yogyakarta	21,27	21,40	18,67	(6,32)	11
15	Jawa Timur	10,70	9,26	8,16	(12,69)	32
16	Banten	14,19	13,64	12,18	(7,35)	27
17	B a l i	10,88	7,35	8,54	(11,39)	31
18	Nusa Tenggara Barat	21,95	17,02	13,01	(23,01)	26
19	Nusa Tenggara Timur	10,42	10,93	15,13	20,49	22
20	Kalimantan Barat	18,16	12,66	15,35	(8,04)	21
21	Kalimantan Tengah	15,33	23,32	25,54	29,08	2
22	Kalimantan Selatan	19,05	24,59	19,03	(0,05)	9
23	Kalimantan Timur	11,39	19,57	10,61	(3,50)	28
24	Kalimantan Utara	26,04	24,11	21,69	(8,72)	5
25	Sulawesi Utara	21,17	19,73	21,49	0,78	7
26	Sulawesi Tengah	13,50	12,67	20,41	22,97	8
27	Sulawesi Selatan	11,82	11,60	10,21	(7,06)	29
28	Sulawesi Tenggara	25,41	22,17	28,94	6,72	1
29	Gorontalo	14,66	15,34	14,44	(0,75)	23
30	Sulawesi Barat	23,86	18,43	18,16	(12,76)	13
31	M a l u k u	19,26	19,60	18,29	(2,56)	12
32	Maluku Utara	24,86	21,05	25,26	0,79	3
33	Papua Barat	10,97	22,16	18,97	31,48	10
34	P a p u a	17,50	14,51	16,71	(2,27)	18
	Rata-Rata	17,05	16,95	16,49	(1,65)	

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Tahun 2017-2020 (diolah)

7. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Dalam konteks manajemen kinerja, Belanja Pegawai Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan atau program, yang berarti tidak berhubungan dengan target kinerja tertentu. Semakin kecil rasio belanja pegawai tidak langsung ini, maka akan semakin besar proporsi Belanja Daerah yang dapat dialokasikan untuk belanja langsung guna meningkatkan kinerja daerah.

Tambahan pegawai akibat pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan terjadinya peningkatan Belanja Pegawai Tidak Langsung di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Tambahan DAU tahun 2017 akibat tambahan pegawai tersebut adalah Rp752.730,78 juta, namun tambahan ini diikuti dengan tambahan Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp1.314.751,48 juta. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terpaksa harus mengatur ulang alokasi belanja untuk Perangkat Daerah lainnya.

Analisis data tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa proporsi rata-rata Belanja Pegawai Tidak Langsung seluruh pemerintahan provinsi di Indonesia adalah 24,61% dari Belanja Daerah. Sedangkan proporsi belanja ini di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah 34,73% dan menurun menjadi 32,59% tahun 2019. Proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat sebesar ini merupakan No. 3 terbesar di Indonesia, di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Bengkulu. Dalam beberapa tahun ke depan, sebaiknya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak melakukan penambahan pegawai, agar proporsi belanja ini tidak terus meningkat. Jika pun terpaksa maka harus dilakukan analisis yang rinci tentang kompetensi yang sangat dibutuhkan.

Tabel berikut memperlihatkan perkembangan dan perbandingan proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung seluruh pemerintahan provinsi di Indonesia.

Tabel 3.10
Proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung
Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2019 (%)

No	Provinsi	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun	Ranking
1	A c e h	16,18	18,30	16,45	0,83	30
2	Sumatera Utara	25,08	27,58	25,61	1,05	16
3	Sumatera Barat	34,73	32,31	32,59	(3,13)	3
4	R i a u	21,54	26,36	26,36	10,63	14
5	J a m b i	26,01	29,49	28,66	4,97	10
6	Sumatera Selatan	22,71	20,80	18,20	(10,47)	29
7	Bengkulu	33,44	34,18	32,95	(0,72)	2
8	Lampung	22,73	22,03	24,96	4,78	18
9	Bangka Belitung	26,32	27,90	27,73	2,65	11
10	Kepulauan Riau	26,95	19,16	23,85	(5,94)	21
11	DKI Jakarta	34,51	35,58	29,26	(7,92)	9
12	Jawa Barat	15,75	16,63	15,64	(0,35)	32
13	Jawa Tengah	24,59	23,53	22,45	(4,46)	24
14	D I Yogyakarta	25,57	24,23	23,37	(4,40)	22
15	Jawa Timur	19,66	19,01	21,13	3,68	25
16	Banten	17,27	17,41	19,05	5,01	28
17	B a l i	24,61	26,20	24,05	(1,14)	20
18	Nusa Tenggara Barat	24,41	25,59	26,98	5,11	13
19	Nusa Tenggara Timur	27,23	26,53	27,13	(0,17)	12
20	Kalimantan Barat	21,21	21,44	20,53	(1,61)	26
21	Kalimantan Tengah	30,25	25,70	23,16	(12,50)	23
22	Kalimantan Selatan	22,16	22,30	19,69	(5,73)	27
23	Kalimantan Timur	17,64	16,15	14,90	(8,08)	33
24	Kalimantan Utara	16,30	21,28	24,08	21,55	19
25	Sulawesi Utara	31,19	32,58	29,79	(2,28)	7
26	Sulawesi Tengah	30,65	33,44	29,44	(2,00)	8
27	Sulawesi Selatan	31,27	32,76	33,93	4,16	1
28	Sulawesi Tenggara	32,33	33,82	30,69	(2,57)	6
29	Gorontalo	31,73	32,33	31,56	(0,27)	5
30	Sulawesi Barat	24,62	29,26	26,31	3,37	15
31	M a l u k u	33,25	30,57	31,96	(1,95)	4
32	Maluku Utara	24,73	22,94	25,33	1,20	17
33	Papua Barat	6,63	7,98	7,28	4,75	34
34	P a p u a	8,35	12,22	15,70	37,11	31
	Rata-Rata	24,46	24,93	24,43	(0,05)	

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Tahun 2017-2020 (diolah)

8. Kemampuan Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga Daerah

Indikator kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga daerah menunjukkan proporsi pendapatan daerah yang digunakan untuk membayar pokok pinjaman beserta bunganya dalam satu periode. Semakin kecil rasionya, maka semakin tinggi jaminan pengembalian utang dari suatu Pemerintah Daerah.

Karena adanya peraturan dan pembatasan yang ketat dari Pemerintah Pusat, maka sampai saat ini tidak banyak daerah provinsi yang telah melakukan Pinjaman (Utang) Daerah. Utang yang terjadi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Utang Belanja dan Utang Lainnya. Utang Lainnya ini bukan Utang Riil, karena hanya merupakan kebijakan akuntansi atas Dana Rajawali. Dengan demikian, tidak ada pokok dan bunga utang yang harus dibayar secara berkala.

Tabel berikut memperlihatkan perkembangan dan perbandingan rasio Kemampuan Membayar Pokok Pinjaman dan Bunga Hutang seluruh pemerintahan provinsi di Indonesia.

Tabel 3.11
Rasio Kemampuan Membayar Pokok Pinjaman dan Bunga Hutang
Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2019 (%)

No	Provinsi	2017	2018	2019
1	A c e h	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-
4	R i a u	-	-	-
5	J a m b i	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-
8	Lampung	-	0,03	0,46
9	Bangka Belitung	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-
11	DKI Jakarta	0,05	0,07	0,10
12	Jawa Barat	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-
14	D I Yogyakarta	-	-	-
15	Jawa Timur	0,00	0,02	0,03
16	Banten	-	-	-
17	B a l i	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	0,10
26	Sulawesi Tengah	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	0,11	0,01	-
28	Sulawesi Tenggara	0,35	0,17	0,06
29	Gorontalo	-	-	-
30	Sulawesi Barat	0,65	1,02	0,93
31	M a l u k u	0,01	-	-
32	Maluku Utara	-	-	0,02
33	Papua Barat	0,02	-	-

No	Provinsi	2017	2018	2019
34	P a p u a	-	-	-
	Rata-Rata	0,04	0,04	0,05

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Tahun 2017-2020 (diolah)

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu, yang menggambarkan posisi Aset, Kewajiban (Utang), dan Ekuitas. Perkembangan jumlah Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,95% per tahun, dari Rp 8.159.703 juta tahun 2016 menjadi Rp 10.279.005,41 juta tahun 2020. Pertumbuhan ini relatif merata untuk Investasi Jangka Panjang, dan Aset Tetap, berkisar antara 4,14% sampai 6,97% per tahun. Tetapi laju pertumbuhan per tahun untuk Aset Lancar dan Aset Lainnya jauh lebih tinggi, yaitu 10,38% untuk Aset Lancar dan 12,02% untuk Aset Lainnya.

Aset Lancar selama periode Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari Rp 426.009,04 juta tahun 2016 menjadi Rp 632.469,73 juta tahun 2020, atau tumbuh rata-rata sebesar 10,38% per tahun. Sejalan dengan kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka jumlah Investasi Jangka Panjang pun meningkat. Tahun 2016, jumlah Investasi Jangka Panjang berjumlah Rp 1.080.844,37 juta dan meningkat menjadi Rp 1.271.030,02 juta tahun 2020, atau meningkat rata-rata sebesar 4,14% per tahun. Aset Tetap juga mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan kebijakan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2016, Aset Tetap berjumlah Rp 6.507.454,38 juta dan meningkat menjadi Rp 8.521.486,24 juta tahun 2020, atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,97% per tahun. Aset Lainnya meningkat dari Rp 145.395,33 juta tahun 2016 menjadi Rp 236.156,36 juta tahun 2020. Sedangkan dalam 5 tahun terakhir Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak membuat kebijakan Dana Cadangan.

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama periode 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 23,24% per tahun, dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar 15,29% per tahun. Tingginya rata-rata pertumbuhan jumlah Kewajiban selama periode tahun 2016-2020 disebabkan terjadinya lonjakan Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang tahun 2014 dan 2016. Namun secara keseluruhan jumlah Kewajiban (Utang) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Aset maupun jumlah Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan jumlah Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (Rp juta)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
ASET	8.159.703,12	10.746.879,60	10.618.211,43	10.896.093,67	10.661.142,35	6,91
ASET LANCAR	426.009,04	731.528,51	706.556,47	990.534,31	632.469,73	10,38
Kas dan Setara Kas	267.135,35	301.168,38	177.084,26	328.468,70	260.864,88	
- Kas di Kas Daerah	254.643,20	267.774,43	154.751,53	282.484,60	211.447,49	
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	132,06	11,71	12,03	0,00	
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	15,12	834,52	8,48	
- Kas di BLUD	12.491,08	10.206,63	7.149,39	4.882,12	13.127,39	
- Kas Lainnya	-	23.029,62	15.096,65	40.199,17	36.267,26	
- Setara Kas	1,07	25,64	59,86	56,26	14,26	
Investasi Jangka Pendek	30.000,00	230.000,00	325.000,00	-	-	
- Investasi dalam Deposito	30.000,00	230.000,00	325.000,00	-	-	
Piutang Pendapatan	40.187,97	87.228,04	73.401,14	73.871,13	127.607,32	
- Piutang Pajak Daerah	29.846,88	32.884,48	39.689,43	39.095,84	44.428,38	
- Penyisihan Piutang Pajak	(149,23)	(164,42)	(198,45)	(195,48)	(222,14)	
- Piutang Retribusi	675,33	1.247,21	503,09	1.916,92	1,71	
- Penyisihan Piutang Retribusi	(600,38)	(6,24)	(111,99)	(1.373,36)	(0,59)	
- Piutang Hasil PKD Yang Dipisahkan	-	787,79	1.000,86	213,07	81.478,87	
- Peny Piutang Hasil PKD Yg Dipisahkan	-	(3,94)	(5,00)	(1,07)	(213,07)	
- Piutang Lain2 PAD Yg Sah	15.550,67	58.496,31	40.275,42	48.656,21	18.390,89	
- Penyisihan Piutang Lain2 PAD Yg Sah	(5.135,30)	(6.013,15)	(7.752,22)	(14.441,00)	(16.256,73)	
- Beban Dibayar Dimuka	142,67	45,17	26,27	21.771,64	21.763,44	
- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1,82	0,52	-	-	-	
- Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	141,57	44,89	26,40	43.543,29	43.526,89	
- Penyisihan Bagian Lancar TGR	(0,71)	(0,22)	(0,13)	(21.771,64)	(21.763,44)	
- Persediaan	86.417,08	101.477,62	128.377,45	550.632,77	221.038,37	
INVESTASI JANGKA PANJANG	1.080.844,37	1.169.584,10	1.266.072,44	1.348.073,03	1.271.030,02	4,14
Investasi Non Permanen	2.902,04	2.811,10	2.640,99	2.813,16	2.632,04	

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
Dana Bergulir	10.461,89	10.461,89	10.461,89	10.589,88	10.589,88	
Penyisihan Dana Bergulir	(7.559,84)	(7.650,79)	(7.820,90)	(7.776,72)	(7.957,84)	
Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
Investasi Permanen	1.077.942,33	1.166.773,00	1.263.431,45	1.345.259,87	1.268.397,98	4,15
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.077.942,33	1.166.773,00	1.263.431,45	1.345.259,87	1.268.397,98	
ASET TETAP	6.507.454,38	8.699.269,42	8.447.779,63	8.368.236,46	8.521.486,24	6,97
ASET TETAP(Harga Perolehan)	9.951.461,28	13.047.725,05	13.595.387,08	14.235.523,32	14.956.540,93	
Tanah	1.607.559,87	2.067.381,38	2.103.530,08	2.089.076,39	2.097.949,34	
Peralatan dan Mesin	723.784,30	1.197.076,68	1.537.836,08	1.895.442,55	2.166.421,49	
Gedung dan Bangunan	1.266.534,56	3.016.192,80	3.518.268,54	3.719.735,12	3.869.702,03	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.508.513,88	4.819.969,71	5.201.866,40	5.477.892,12	5.657.824,04	
Aset Tetap Lainnya	1.188.870,77	1.339.602,69	829.093,44	394.325,39	309.006,98	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	656.197,90	607.501,80	404.792,55	659.051,74	855.637,05	
Akumulasi Penyusutan	(3.444.006,90)	(4.348.455,63)	(5.147.607,45)	(5.867.286,86)	(6.435.054,69)	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	(459.705,63)	(798.395,75)	(952.456,37)	(1.240.405,51)	(1.495.645,35)	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(243.037,20)	(556.866,12)	(650.181,82)	(736.303,32)	(834.217,53)	
Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(2.740.670,70)	(2.990.624,74)	(3.538.152,00)	(3.875.329,38)	(4.091.010,66)	
Akumulasi Penyusutan ASet Tetap Lainnya	(593,37)	(2.569,02)	(6.817,26)	(15.248,65)	(14.181,15)	
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
ASET LAINNYA	145.395,33	146.497,58	197.802,89	189.249,87	236.156,36	12,89
Tagihan Jangka Panjang	60.539,63	59.183,49	56.506,77	30.006,02	34.839,78	
- Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	50.028,72	49.478,32	49.451,92	5.908,63	13.125,68	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.518,15	1.518,15	1.518,15	19.856,94	19.856,94	
Aset Tidak Berwujud	27.507,37	30.729,34	30.113,67	31.708,64	31.826,71	

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(18.514,60)	(22.542,33)	(24.576,97)	(27.468,19)	(29.969,56)	
Aset Lain-lain	84.855,69	87.314,09	141.296,12	159.243,86	201.316,58	
Aset Yg Dibatasi Penggunaanya	75.431,67	80.888,44	113.857,82	135.601,46	133.254,29	
Aset Tidak Bermanfaat	2.360,59	14.072,81	108.030,48	90.230,63	119.604,79	
Akm Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	-	(10.490,12)	(83.241,47)	(69.514,97)	(68.344,16)	
Aset Dalam Penelusuran	3.517,46	2.403,75	1.784,28	2.093,51	15.415,33	
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	8.889,92	3.674,82	3.684,38	3.348,80	6.682,77	
Akm Penyusutan Aset Dimanfaatkan pihak lain.	(5.343,94)	(3.235,61)	(2.819,37)	(2.515,57)	(5.296,44)	
KEWAJIBAN & EKUITAS	8.159.703,12	10.746.879,60	10.618.211,43	10.896.093,67	10.661.142,35	6,91
KEWAJIBAN	183.339,62	224.544,60	293.281,94	289.469,83	382.136,93	20,15
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	107.907,95	143.656,17	179.424,13	153.868,37	248.882,64	23,24
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1,07	-	118,93	56,26	70,52	
Utang Bunga	-	-	-	-	-	
Bagian Lancar dari Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
Pendapatan Diterima Dimuka	154,73	107,58	154,75	1.204,75	1.123,50	
Utang Belanja	-	-	-	-	-	
Utang Belanja Pegawai	25.348,32	28.227,99	32.934,03	1,17	2.278,90	
Utang Belanja Barang dan Jasa	37.996,19	60.806,18	70.737,67	82.634,43	71.792,50	
Utang Belanja Modal	1.957,85	9.015,51	1.782,88	639,65	1.257,60	
Utang Transfer	41.886,78	44.935,90	72.659,89	61.085,11	171.796,62	
Utang Jangka Pendek Lainnya	563,00	563,00	1.035,99	8.247,00	563,00	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	75.431,67	80.888,44	113.857,82	135.601,46	133.254,29	15,29
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	
Utang Jangka Panjang Lainnya	75.431,67	80.888,44	113.857,82	135.601,46	133.254,29	
EKUITAS	7.976.363,50	10.522.335,00	10.324.929,48	10.606.623,84	10.279.005,41	6,55
Ekuitas	7.976.363,50	10.522.335,00	10.324.929,48	10.606.623,84	10.279.005,41	

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

Untuk mengetahui tingkat kualitas keuangan daerah (Neraca) dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok Akun Neraca yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah Rasio Lancar (*current ratio*), Rasio Kas (*cash ratio*) dan Rasio Cepat (*quick ratio*), rasio Total Utang terhadap Aset, rasio Utang terhadap Ekuitas/Modal.

Rasio likuiditas yang terdiri dari Rasio Lancar dan Rasio Cepat memperlihatkan kemampuan dalam memenuhi Kewajiban Jangka Pendek. Rasio Lancar tahun 2016 sebesar 394,79%, yang berarti kemampuan membayar Kewajiban Jangka Pendek hampir 4 (empat) kali lipat. Sedangkan Rasio Cepat (*quick ratio*) sebesar 314,71%, yang berarti bahwa kemampuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membayar Kewajiban Jangka Pendeknya dengan menggunakan aset yang lebih likuid sangat baik lebih dari 3 kali lipat. Pada tahun 2020 kemampuan melunasi kewajiban ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, masing-masing menjadi 254,12% untuk Rasio Lancar dan menjadi 165,31% untuk Rasio Cepat. Penurunan rasio ini masih dalam batas wajar. Penurunan ini secara tidak langsung menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi dampak negatif dari pandemi COVID-19, baik untuk aspek kesehatan maupun ekonomi Sumatera Barat, dengan lebih banyak menggunakan sumber dana yang tersedia sehingga saldo aset lancar (terutama saldo kas atau setara kas) menjadi rendah.

Rasio Solvabilitas memperlihatkan kemampuan suatu organisasi melunasi kewajibannya, baik Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Rasio Solvabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio total Utang terhadap total Aset dan rasio Total Utang terhadap Ekuitas/Modal. Rasio total Utang terhadap total Aset memperlihatkan seberapa besar Aset yang dimiliki dibiayai (didanai) dari Utang. Semakin besar nilainya berarti semakin besar pembiayaan yang berasal dari Utang. Dalam periode tahun 2016-2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat paling tinggi membiayai Asetnya hanya sebesar 3,58% dari Utang.

Kemampuan melunasi total Utang ini juga dapat dilihat dari perbandingan antara total Utang dengan Ekuitas/Modal. Rasio total Utang terhadap Ekuitas/Modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat paling tinggi hanya sebesar 3,72%, yang terjadi tahun 2020.

Utang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain berasal dari Utang Jangka Panjang Lainnya. Utang ini bukan Utang Riil pemerintah, karena hanya kebijakan akuntansi atas dana kompensasi PT. Rajawali. Pada awalnya dana kompensasi ini dicatat diluar catatan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tetapi tahun 2016 dimasukkan dalam Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan akuntansi sebagai berikut; Aset yang Dibatasi Penggunaannya (Debit) dan Utang Jangka Panjang Lainnya (kredit). Tabel 3.13 memperlihatkan Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020.

Tabel 3.13
Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016 – 2020 (%)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata Per tahun (%)
A	Rasio Likuiditas						
1	Rasio Lancar	394,79	509,22	393,79	643,75	254,12	(10,43)
2	Rasio Cepat	314,71	438,58	322,24	285,89	165,31	(14,87)
3	Rasio Kas	247,56	209,65	98,70	213,47	104,81	(19,33)
B	Solvabilitas						
1	Rasio Utang terhadap total aset	2,25	2,09	2,76	2,66	3,58	12,38
2	Rasio Utang terhadap Modal/Ekuitas	2,30	2,13	2,84	2,73	3,72	12,77

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat audited BPK-RI tahun Anggaran 2020, untuk aset tetap milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Nilai Perolehan Aset Tetap Tahun 2020 (Rp juta)

Nama Bidang Barang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	2.097.949,34		2.097.949,34
Peralatan dan Mesin	2.166.421,49	1.495.645,35	670.776,13
Gedung dan Bangunan	3.869.702,03	834.217,53	3.035.484,50
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.657.824,04	4.091.010,66	1.566.813,39
Aset Tetap Lainnya	309.006,98	14.181,15	294.825,83
Konstruksi Dalam Pekerjaan	855.637,05		855.637,05
Jumlah	14.956.540,93	6.435.054,69	8.521.486,24

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

Dari Total Nilai Perolehan Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat audited BPK-RI Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 14.956.540,93 juta setelah dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp. 106.517, juta diperoleh nilai bukunya sebesar Rp. 8.521.486, 24 juta

Aset tetap sebagaimana dimaksud digunakan dalam operasional SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD yakni terdiri dari :

- a. Tanah
Tanah Bangunan kantor, tanah jalan, tanah irigasi, tanah pertanian, tanah perkebunan, dll.
- b. Peralatan dan Mesin
Meubelier, kendaraan, komputer, printer, laptop dll
- c. Gedung dan bangunan
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. Aset Tetap lainnya :
Buku Pustaka, barang bercorak kesenian, binatang ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dari nilai perolehan aset tetap sebesar Rp14.956.540,93 juta di atas, yang tidak digunakan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD adalah sebesar Rp131.113,39 juta dikategorikan sebagai aset idle (aset menganggur/berlebih). Aset idle tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Aset yang berpotensi untuk disewakan dengan nilai perolehan Rp56.754,27 juta atau sebesar 43,29% dari nilai aset Idle
2. Aset berpotensi untuk menjadi objek retribusi dengan nilai perolehan Rp34.679,13 juta atau sebesar 26,45% dari aset idle
3. Aset dalam masa pinjam pakai dengan kabupaten/kota dan instansi vertikal lainnya dengan nilai perolehan sebesar Rp32.741,86 juta atau sebesar 24,97% dari aset idle.
4. Aset yang rencana akan dihibahkan kepada pihak lain dan aset untuk program program unggulan kepala Daerah dengan nilai perolehan sebesar Rp2.536,36 atau sebesar 1,93% dari nilai aset idle.
5. Aset dalam kondisi bermasalah dengan nilai perolehan sebesar Rp4.401,77- atau sebesar 3,36% dari nilai aset idle.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi Pendapatan Daerah, efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, khususnya Belanja Operasi. Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan berdasarkan perkembangan Belanja Aparatur dalam 5 tahun terakhir.

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama kurun waktu 2016–2020, menunjukkan terjadi kenaikan yang signifikan di tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh peningkatan belanja pegawai sebagai konsekuensi pelimpahan pegawai kabupaten/kota ke provinsi setelah implementasi pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam periode tahun 2016–2020, terjadi peningkatan Belanja Aparatur dari Rp944.129,52 juta tahun 2016 menjadi Rp2.279.217,67 juta tahun 2020, dengan kenaikan rata-rata sebesar 24,65% per tahun. Peningkatan Belanja Aparatur ini tentu juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam menjalankan pelaksanaan tugas sehari-hari untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Jika ditelusuri lebih jauh, peningkatan yang cukup tinggi juga terdapat pada Belanja Pegawai rumah sakit daerah (BLUD) untuk keperluan insentif pada jasa tindak medik yang terus mengalami kenaikan sejalan dengan terjadinya peningkatan pendapatan pada rumah sakit yang telah BLUD. Selain itu juga terdapat peningkatan belanja penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH serta peningkatan belanja tambahan penghasilan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

Tabel 3.15
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)

Uraian	Thn 2016	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Pertumbuhan Rata-Rata Tahun (%)
Belanja Operasi	822.242,94	2.117.204,02	2.163.703,76	2.174.311,21	2.085.813,12	26,20
- Belanja Pegawai	777.502,49	2.117.204,02	2.163.703,76	2.174.311,21	2.085.813,12	27,98
- Belanja Barang dan Jasa	44.740,44	57.024,89	67.122,73	31.561,67	27.811,30	(11,21)
Belanja Modal	121.886,59	164.821,58	377.650,64	302.340,49	165.593,26	7,96
- Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	121.886,59	164.821,58	377.650,64	302.340,49	165.593,26	7,96
Jumlah	944.129,52	2.339.050,49	2.608.477,12	2.508.213,37	2.279.217,67	24,65

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

Selanjutnya untuk mengetahui apakah kebijakan penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat semakin baik atau tidak, maka perlu dilakukan analisis proporsi Belanja untuk memenuhi kebutuhan Aparatur dengan total pengeluaran daerah. Di lihat dari proporsi Belanja Aparatur terhadap pengeluaran daerah mengalami peningkatan yang signifikan pada 2017, yaitu dari 20,62% tahun 2016 menjadi 40,10% tahun 2017, dan menjadi 41,27% tahun 2018. Namun tahun-tahun

berikutnya terjadi penurunan menjadi 37,86% tahun 2019 dan 35,39% tahun 2020. Penurunan proporsi ini sekaligus menunjukkan terjadinya peningkatan proporsi belanja untuk masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang lebih berpihak kepada masyarakat banyak. Hal ini harus dipertahankan dan diupayakan agar bisa ditingkatkan pada masa datang. Tabel berikut memperlihatkan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tahun 2016-2020.

Tabel 3.16
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 (Rp juta)

Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
2016	944.129,52	4.579.037,26	20,62
2017	2.339.050,49	5.832.818,39	40,10
2018	2.608.477,12	6.320.806,23	41,27
2019	2.508.213,37	6.625.719,98	37,86
2020	2.279.217,67	6.440.700,79	35,39

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/ defisit belanja daerah, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Di samping itu, untuk menutup surplus/defisit tersebut maka diperlukan pembiayaan daerah, sehingga dalam pembahasan ini juga diperlukan analisis pembiayaan daerah.

Surplus atau defisit riil yang terjadi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam periode tahun 2016-2020 sangat fluktuatif. Tahun 2016 terjadi surplus riil sebesar Rp 45.574,73 juta, dan naik menjadi Rp 234.008,46 juta tahun 2017, namun tahun berikutnya mengalami defisit sebesar Rp 28.518,60 juta. Bahkan tahun 2019 terjadi defisit yang lebih besar lagi, yaitu sebesar Rp 235.382,68 juta dan sebesar Rp76.635,03 juta tahun 2020.

Surplus riil yang terjadi tahun 2016-2017 dan ditambah dengan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya mengakibatkan SiLPA tahun yang berjalan semakin besar, yaitu menjadi Rp284.580,73 juta tahun 2016, Rp520.935,46 juta tahun 2017, dan Rp501.905,40 juta tahun 2018. Defisit yang terjadi tahun 2019 dan tahun 2020 telah mengakibatkan jumlah SiLPA pada akhir tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp328.392,32 juta tahun 2019 dan menjadi Rp260.850,97 juta tahun 2020. Di samping memanfaatkan SiLPA tahun sebelumnya, pada 2 tahun terakhir Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memanfaatkan dana pinjaman, yang merupakan bagian kebijakan pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, komposisi penerimaan pinjaman untuk menutupi defisit riil ini relatif kecil, hanya sebesar 12,29% tahun 2019 dan 1,42% tahun 2020. Perkembangan Penutup Defisit Riil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17.
Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016 – 2020 (Rp juta)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata Tahun (%)
Pendapatan	4.624.611,99	6.066.826,85	6.292.287,63	6.390.337,20	6.364.065,76	8,31
Dikurangi Realisasi:						
Belanja Daerah	4.504.037,26	5.759.818,39	6.267.376,23	6.551.278,88	6.408.293,79	9,22
Pengeluaran Pembiayaan	75.000,00	73.000,00	53.430,00	74.441,00	32.407,00	
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	75.000,00	73.000,00	53.430,00	20.413,00	20.000,00	(28,14)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	54.028,00	12.407,00	
Surplus/(Defisit) Riil	45.574,73	234.008,46	(28.518,60)	(235.382,68)	(76.635,03)	
Penerimaan Pembiayaan						
Penggunaan SiLPA	251.497,00	297.134,00	530.424,00	502.063,00	332.763,00	7,25
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	61.712,00	4.723,00	
Koreksi SiLPA	(12.491,00)	(10.207,00)	-	-	-	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	284.580,73	520.935,46	501.905,40	328.392,32	260.850,97	(2,15)

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021 dan BPS

Penyebab terjadinya SiLPA tersebut terutama karena adanya penghematan dan atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan juga karena pelampauan penerimaan PAD. Pelampaun penerimaan terjadi apabila realisasi penerimaan yang lebih besar daripada dianggarkan. Sebaliknya, kekurangan penerimaan terjadi apabila realisasi penerimaan lebih rendah daripada anggaran. Pelampaun penerimaan PAD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terjadi tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2020, masing-masing sebesar Rp69.521,31 juta, Rp71.235,23 juta, dan Rp80.454,84 juta. Sedangkan tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi kekurangan penerimaan PAD, yaitu masing-masing sebesar Rp68.478,57 juta dan Rp47.497,76 juta.

Penyebab lain dari SiLPA tersebut adalah adanya kekurangan penerimaan Pendapatan Transfer dalam periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 terjadi kekurangan penerimaan Pendapatan Transfer sebesar Rp70.629,68 juta, dan kekurangan ini cenderung meningkat tahun-tahun berikutnya, menjadi Rp127.206,51 juta tahun 2017, Rp101.844,11 juta tahun 2018, Rp157.724,48 tahun 2019, dan Rp128.516,73 tahun 2020.

Pada tahun 2016, penghematan dan atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan berjumlah Rp302.866,27 juta dan tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan. Penghematan dan atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yang paling banyak terjadi tahun 2018 yaitu sebesar Rp628.273,44 juta. Namun mengalami penurunan tahun 2020 menjadi Rp317.006,86 juta.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang digunakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka pada setiap akhir tahun ada kewajiban yang belum bisa dilunasi, terutama disebabkan karena sistem atau prosedur serta kebijakan pembayaran. Tahun 2016, jumlah kewajiban kepada pihak ketiga (belanja) sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan berjumlah Rp12.553,55 juta, dan turun menjadi Rp 3.312,90 juta tahun 2020.

Perkembangan penyebab realisasi sisa lebih perhitungan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016 – 2020 (Rp juta)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata Tahun (%)
Jumlah SiLPA	284.580,73	520.935,46	501.905,40	328.392,32	260.850,97	(2,61)
Pelampauan (kekurangan) penerimaan PAD	69.521,31	71.235,23	(68.478,57)	(47.497,76)	80.457,84	3,72
Pelampauan (kekurangan) penerimaan pendapatan transfer	(70.629,68)	(127.206,51)	(101.844,11)	(157.724,48)	(128.516,73)	16,14
Pelampauan (kekurangan) penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	(4.623,62)	(9.683,21)	(1.645,88)	(11.443,62)	(9.606,11)	20,06
Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	302.866,27	596.797,24	628.273,44	537.119,67	320.025,07	1,15
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	12.553,55	10.207,28	(45.600,52)	(7.938,52)	3.312,90	(28,33)
Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0	

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark*. Di samping dialokasikan untuk belanja program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Program Unggulan Kepala Daerah serta alokasi untuk Belanja Daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama dan *Earmark*

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark* merupakan belanja yang wajib dibayarkan dan tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak boleh menjadi Utang untuk tahun berikutnya. Hal ini berarti bahwa belanja yang menjadi prioritas utama dalam APBD seperti gaji, belanja bagi hasil pada kabupaten/kota yang merupakan kewajiban setiap penerimaan pendapatan provinsi yang harus dibagi kepada kabupaten/kota berdasarkan peraturan atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark* dimaksudkan untuk mengetahui atau memastikan jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak harus dikeluarkan karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena adanya perjanjian. Semakin tinggi jumlah pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark* berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat.

Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diketahui bahwa Belanja Daerah ada yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib :

1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena selama ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak membuat kebijakan Dana Cadangan, dan tidak memiliki kontrak sewa menyewa jangka panjang, maka pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark* terdiri pada belanja operasi; gaji dan tunjangan, belanja bagi hasil, belanja tidak terduga, dan belanja tenaga kesehatan seperti jasa tenaga medik dalam rumah sakit yang telah BLUD.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa sumber dana yang tergolong *earmark* diantaranya adalah berupa dana alokasi khusus, Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau, Program Hibah Jalan Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi, dan Dana Insentif Daerah.

Dari segi jumlah, Belanja Pegawai merupakan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark* paling besar (42,70%) dibandingkan belanja lainnya. Sedangkan dari segi tingkat pertumbuhan, Belanja Modal merupakan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark* yang memiliki pertumbuhan rata-rata per tahun paling tinggi (4,21%) dibandingkan belanja lainnya. Sekalipun pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark* berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun perkembangannya tidak banyak mengalami perubahan. Tahun 2017 pengeluaran ini berjumlah Rp 4.601.854,21 juta dan meningkat menjadi Rp 4.741.731,55 tahun 2020, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,00%. Perkembangan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19
Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan *Earmark*
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 (Rp juta)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata Tahun (%)
Belanja Pegawai	665.755,45	1.992.318,15	2.022.663,20	2.102.413,93	2.024.651,69	0,54
Belanja Barang dan Jasa	373.412,17	406.330,90	428.210,28	449.332,99	453.492,12	3,73
Belanja Hibah	1.040.163,64	802.489,82	793.328,57	846.105,66	908.292,51	4,21
Belanja Modal	528.143,28	555.000,97	766.969,52	790.842,78	589.977,67	2,06
Belanja Transfer	832.429,86	845.714,37	801.770,50	908.099,84	765.317,56	(3,27)
Jumlah	3.439.904,40	4.601.854,21	4.812.942,06	5.096.795,20	4.741.731,55	1,00

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

3.3.2. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Earmark

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 1 menjelaskan bahwa Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional. Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Kapasitas riil keuangan daerah yang dimaksud merupakan penerimaan/Pendapatan Daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran periodik wajib dan mengikat, serta prioritas utama termasuk *earmark*.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan, maka untuk lima tahun ke depan diperlukan peningkatan Pendapatan Daerah yang lebih besar. Peningkatan ini sangat dimungkinkan karena kinerja keuangan daerah selama periode tahun 2016-2020 memperlihatkan kecenderungan yang semakin baik dan terkendali. Oleh sebab itu berdasarkan potensi yang dimiliki dan untuk memastikan kemampuan keuangan daerah, perlu dibuat proyeksi Pendapatan Daerah dan proyeksi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta belanja prioritas utama dan *earmark*.

3.3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Pendapatan Daerah

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah akan menentukan hasil yang dapat dicapai daerah. Secara umum untuk peningkatan Pendapatan Daerah tersebut dibutuhkan berbagai kebijakan sesuai dengan kondisi riil sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa sumber utama PAD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berasal dari Pajak Daerah. Pemungutan terhadap sumber Pajak Daerah tersebut dilakukan berdasarkan *Self assessment system* dan *Official Assessment System*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, menyeter, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan. Sedangkan *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiscus (Kepala Daerah) atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

Dari 5 jenis Pajak Daerah provinsi, 3 jenis diantaranya dipungut berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan. Dengan demikian, potensi ketiga jenis Pajak Daerah ini dapat dihitung dengan pasti berdasarkan besaran ketetapan. Besar kecilnya peningkatan ketiga sumber pendapatan ini sangat dipengaruhi kondisi ekonomi dan kepatuhan wajib pajak. Seandainya perekonomian Indonesia segera pulih, maka masyarakat membutuhkan kendaraan baru dan PLN menggunakan Air Permukaan yang lebih banyak untuk menghasilkan listrik sehingga pajak dari ketiga sumber ini juga meningkat.

Kelemahan untuk meningkatkan sumber penerimaan dari ketiga sumber Pendapatan Asli Daerah ini mungkin hanya dalam proses pemungutan, terutama disebabkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan inilah yang harus ditingkatkan, antara lain dengan meningkatkan razia kendaraan bermotor dan memberikan ampunan denda atau pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak Daerah provinsi lainnya adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok yang dipungut berdasarkan *self assessment system*. Pajak rokok merupakan pajak daerah yang

pemungutannya bersamaan dengan pungutan cukai rokok yang dilakukan oleh kementerian keuangan c.q Dirjen Bea Cukai. Tarif pajak rokok adalah 10% dari cukai rokok yang pendistribusiannya ke daerah didasarkan pada koefisien jumlah penduduk. Sedangkan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Wajib Pungut. Dengan demikian, upaya peningkatan pendapatan daerah dari kedua sumber ini relatif terbatas karena sudah dipungut oleh wajib pungut yang kompeten dan terpercaya.

Potensi Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terutama berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Namun demikian, tidak banyak kekayaan daerah yang dapat digunakan untuk menghasilkan retribusi daerah. Karena, kebanyakan aset tersebut digunakan untuk operasional kegiatan pemerintahan sehingga tidak mungkin digunakan untuk meningkatkan Retribusi Daerah. Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menginventaris ulang seluruh aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pemanfaatan dan atau optimalisasi penggunaannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki 8 BUMD, namun tidak semua BUMD tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Bagaimana pun laba atau rugi yang dihasilkan BUMD tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian Indonesia. BUMD yang saat ini masih dapat memberikan PAD dalam masa pandemic-COVID 19 hanya dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT.Bank Nagari), Askrida, dan Jamkrida Sumatera Barat. Kecendrungan atau tren deviden yang diterima Provinsi Sumatera Barat pun mengalami penurunan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatkan kinerja, terutama BUMD yang belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, antara lain dengan meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan BUMD.

Lain-lain PAD yang Sah diharapkan dapat ditingkatkan melalui RSUD yang saat ini sudah dikelola sebagai BLUD. Walaupun peningkatan pendapatan RSUD terpengaruh dengan Sistem Rujukan Berjenjang yang diterapkan BPJS kesehatan saat ini, namun peningkatan pelayanan yang diberikan oleh RSUD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari pelayanan Kesehatan Non-BPJS.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya terbatas kepada pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan dana APBN, antara lain dengan menyusun usulan atau proposal untuk mendapatkan sumber dana DAK. Dengan demikian, arah kebijakan Pendapatan Daerah dalam 2021-2026 adalah:

1. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melalui :
 - a) Mengembangkan pelaksanaan *Payment Point System* bekerjasama dengan Bank Nagari, dan Bank Pemerintah lainnya pada seluruh kantor SAMSAT di Sumatera Barat dalam rangka Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak.
 - b) Mengoperasikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kantor-kantor SAMSAT Nagari di seluruh Kabupaten yang mempunyai wilayah jauh dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada pemilik kendaraan bermonotor atau wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
 - c) Mengoperasikan Mobil Pelayanan SAMSAT Keliling untuk menjangkau pelayanan Pembayaran PKB/BBNKB ke daerah yang jaraknya jauh dari Kantor SAMSAT.
 - d) Melakukan pembebasan Denda PKB/BBNKB untuk periode waktu tertentu.
 - e) Melakukan pembebasan BBNKB II bagi Kendaraan Bermotor luar Provinsi Sumatera Barat untuk periode waktu tertentu.
 - f) Melaksanakan Razia Terpadu PKB/BBNKB secara rutin dan berkesinambungan.
 - g) Meningkatkan koordinasi dengan Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dit Lantas Polda Sumatera Barat dan PT. Jasa Raharja

dan melibatkan PT. Bank Nagari, dalam rangka kelancaran urusan pelayanan kepada masyarakat pada seluruh kantor SAMSAT se Provinsi Sumatera Barat.

- h) Meningkatkan kinerja pelayanan pada kantor UPT/SAMSAT dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor UPT-UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara berkala dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan baik pelayanan *online* maupun pelayanan yang dilakukan secara *offline*.
 - i) Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas terkait tentang tugas pelayanan dilapangan.
 - j) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian secara rutin dan langsung terhadap semua tugas pada semua UPT.
 - k) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka inventarisasi aset kendaraan bermotor yang menjadi Objek Pajaknya.
 - l) Meningkatkan kualitas pemutakhiran data objek Pajak Kendaraan Bermotor melalui status objek pajak.
 - m) Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan seluruh kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Melakukan pendataan potensi, evaluasi penerimaan dan melakukan kajian dalam upaya memprediksi kondisi ekonomi tahun berikutnya untuk menghitung penetapan target APBD tahun anggaran berikutnya.
 3. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi pada seluruh OPD Dinas/Instansi pengelola pelayanan Retribusi serta menjaring potensi-potensi baru yang selama ini belum terpungut.
 4. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/Instansi pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala, dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
 5. Meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan jumlah deviden kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 6. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yg masih *idle* dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
 7. Meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh OPD Dinas/Instansi yang berkaitan dengan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terutama OPD Dinas/Instansi Pengelola BLUD, Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Pengelola Pelayanan Persampahan, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Pertanian dan Peternakan dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan penerimaan dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 8. Meningkatkan koordinasi, konfirmasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil.
 9. Meningkatkan Koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan penerimaan DID, IPDMIP, PHJD, Hibah dan lainnya serta sumbangan Pihak Ketiga.

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) aset idle yang dapat diprediksi memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan proyeksi 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Aset Potensi dari Sewa/KSP

Aset Idle yang mempunyai potensi untuk disewakan dengan nilai perolehan sebesar Rp. 56.754,27 juta atau sebesar 43,29% dari nilai aset idle keseluruhan (Rp.131.113,38 juta).

2. Potensi Retribusi

Aset Idle yang mempunyai potensi retribusi dengan nilai perolehan sebesar Rp. 34.679,13 juta atau sebesar 26,45% dari nilai aset idle keseluruhan (Rp.131.113,39 juta).

Target tahun 2021 dan proyeksi penerimaan sampai dengan tahun 2026 untuk aset potensi disewakan dari KSP dan aset potensi retribusi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.20
Potensi Aset Idle Untuk Peningkatan PAD (Rp juta)

No	Potensi Aset Idle	Nilai Perolehan	Persentase Aset Idle (%)	Proyeksi Potensi Peningkatan PAD					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Untuk Disewakan/ KSP	56.754,27	43,29	4.225,00	4.651,90	5.202,30	5.402,70	9.379,04	9.528,00
2	Untuk Retribusi	34.679,13	26,45	667,10	1.483,50	1.483,50	1.483,50	1.483,50	1.483,50

Sumber : BAPENDA Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

Proyeksi penerimaan atas optimalisasi pemanfaatan BMD untuk tahun 2021 sd 2026 menjadi dasar dalam penyusunan langkah langkah strategis dalam optimalisasi pemanfaatan BMD yakni:

1. Inventarisasi aset pada OPD dan Sekolah yang memiliki potensi pendapatan
2. Melakukan kajian analisis terhadap mekanisme pemanfaatan yang tepat untuk aset tersebut (sewa, KSP, BGS/BSH, KSPI)
3. Melakukan appraisal
4. Melakukan perjanjian Sewa atau MoU (untuk KSP, BGS/BSG atau KSPI)

Belanja Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Arah kebijakan Belanja Daerah dalam 2021-2026 adalah :

1. Pemenuhan pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama, yang merupakan belanja dasar bagi terlaksananya pemerintah daerah.
2. Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia
3. Selanjutnya direncanakan alokasi untuk pencapaian target dalam visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat, alokasi anggaran untuk program prioritas pembangunan diantaranya dibidang pendidikan, kesehatan, mendukung kedaulatan pangan, pengembangan pariwisata, perdagangan dan UMKM, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta prioritas lainnya yaitu pembangunan mental dan reformasi birokrasi.
4. Alokasi belanja untuk mendanai alokasi Belanja Operasi dan Belanja Transfer untuk mendukung program prioritas di provinsi yang bukan kewenangan provinsi seperti untuk bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa/nagari, belanja hibah dan bantuan sosial
5. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan Pendapatan Daerah.

Pembiayaan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan Kebutuhan Daerah, dan jumlah setiap Tahun Anggaran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah yang sebelumnya dilakukan analisis penyertaan modal.
3. Dalam rangka pembentukan dan atau memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan penyertaan modal dan atau menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
5. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

3.3.2.2. Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan *earmark*

Pendapatan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan peningkatan Pendapatan Daerah yang telah dikemukakan di atas dan mempertimbangkan jumlah Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2021, maka proyeksi Pendapatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah harus mempertimbangkan bahwa tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh wabah pandemi COVID-19. Namun demikian, laju pertumbuhan rata-rata penerimaan PAD selama periode 2016-2020 dapat dicapai sebesar 3,51%. Diperkirakan pandemi COVID-19 dapat berakhir tahun 2021 ini sehingga kondisi ekonomi diperkirakan sudah pulih pada tahun 2022, maka rata-rata pertumbuhan PAD tahun 2021-2026 sebesar 7,2% setiap tahunnya.
2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, DAU, Dana Alokasi Khusus, dana transfer lainnya dihitung berdasarkan tahun 2017-2019. Alasannya, karena tahun 2017 provinsi mendapatkan tambahan kewenangan sehingga terjadi peningkatan pendapatan signifikan dari tahun sebelumnya. Sedangkan tidak menggunakan realisasi tahun 2020 karena pada tahun 2020 tersebut terjadi pengurangan anggaran dari Pemerintah Pusat. Dengan pertimbangan perubahan kewenangan daerah provinsi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat,

maka untuk proyeksi penerimaan Pendapatan Transfer tahun 2021-2026 didasarkan laju pertumbuhan rata-rata yang dicapai dalam periode tahun 2017-2019 yaitu sebesar 1,63%.

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang juga merupakan Pendapatan dari Dana Hibah, baik Hibah Pemerintah maupun Hibah Organisasi dan Swasta, juga harus dengan mempertimbangkan bahwa APBD tahun 2020 juga mengalami koreksi. Dengan pertimbangan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat, maka untuk proyeksi penerimaan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tahun 2021-2026 digunakan pertumbuhan rata-rata yang dicapai dalam periode tahun 2017-2019 yaitu sebesar 1,36%.

Dorongan dan semangat kerja keras dari Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan pendanaan dari APBN, diharapkan menjadi dasar bagi semua Perangkat Kerja Daerah untuk membuat usulan atau proposal DAK sehingga “Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” lebih cepat diwujudkan. Hasil perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21
Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026 (Rp juta)

Uraian	2021*/	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan Asli Daerah	2.333.923	2.501.965	2.682.107	2.875.219	3.082.234	3.304.155
Pendapatan Transfer	4.153.832	4.221.539	4.290.351	4.360.283	4.431.356	4.503.587
Lain-lain Pendapatann Daerah yang Sah	92.369	93.625	94.899	96.189	97.497	98.823
Jumlah Pendapatan Daerah	6.580.124	6.817.130	7.067.356	7.331.691	7.611.088	7.906.566

Sumber : BAPENDA Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

*/ Sesuai dengan APBD 2021

Belanja Daerah

Berdasarkan arah kebijakan peningkatan Belanja Daerah yang telah dikemukakan di atas dan mempertimbangkan jumlah Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2021, maka proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 menggunakan pertimbangan sebagai berikut:

1. Proyeksi Belanja Daerah dan pengeluaran pembiayaan harus mempertimbangkan proyeksi Pendapatan Daerah dan penerimaan pembiayaan. Jumlah proyeksi Belanja Daerah dan pengeluaran pembiayaan tidak boleh melebihi Pendapatan Daerah dan pengeluaran pembiayaan.
2. Untuk menghindari bias penambahan kewenangan provinsi yang berakibat terhadap peningkatan Belanja Daerah yang signifikan pada tahun 2017, dan kebijakan refocusing anggaran untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 tahun 2020, maka dalam memproyeksikan Belanja Daerah tahun 2021-2026 mempertimbangkan laju pertumbuhan setiap jenis Belanja Daerah tahun 2017-2019.
3. Di samping proyeksi secara merata setiap tahun, juga mempertimbangkan peningkatan Belanja Daerah pada tahun-tahun tertentu sesuai dengan rencana kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seperti kebijakan peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai pada tahun 2022.
4. Belanja DAK Fisik, DAK Non Fisik, Belanja Bos, dan belanja lain yang sumber pendapatan *earmark* lainnya harus tidak melebihi jumlah pendapatan yang diterima.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hasil proyeksi Belanja Daerah 2021-2026 adalah seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.22
Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026 (Rp juta)

Uraian	2021*/	2022	2023	2024	2025	2026
BELANJA OPERASI	4.980.017	5.124.269	5.193.152	5.335.934	5.550.617	5.855.151
- Belanja Pegawai	2.163.633	2.470.658	2.496.118	2.581.956	2.628.823	2.739.125
- Belanja Barang dan Jasa	1.934.700	1.763.676	1.798.765	1.847.292	2.006.607	2.192.253
- Belanja Subsidi	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- Belanja Hibah	874.784	883.035	891.369	899.786	908.287	916.873
- Belanja Bantuan Sosial						
BELANJA MODAL	836.913	992.079	1.004.728,34	1.029.422,1	1.065.835,12	1.116.889,9
BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Belanja Tidak Terduga	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
BELANJA TRANSFER	913.195	919.931	928.751	937.659	946.656	955.744
- Belanja Bagi Hasil (wajib)	873.266	881.999	890.819	899.727	908.724	917.812
- Belanja Bantuan Keuangan	39.928	37.932	37.932	37.932	37.932	37.932
Jumlah Belanja Daerah	6.780.125	7.086.279	7.176.631	7.353.015	7.613.108	7.977.785

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

*/ Sesuai dengan APBD 2021

Pembiayaan Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini tidak memiliki Dana Cadangan sehingga tidak mungkin mendapatkan dana dari sumber pembiayaan ini. Sumber Penerimaan Pembiayaan utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanyalah dari penggunaan SiLPA.

Karena Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki Utang Jangka Panjang kepada pihak ketiga, maka tidak ada pembayaran pokok pinjaman yang harus dibayar setiap tahunnya. Pengeluaran Pembiayaan utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya Penyertaan Modal kepada BUMD yang dimiliki. Diproyeksikan dari tahun 2021-2026 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menambah Penyertaan Modal sebesar Rp20.000 juta.

Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat, Serta Prioritas Utama dan *Earmark*

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat, serta prioritas utama termasuk *earmark* merupakan bagian dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang sudah pasti pengeluaran dan penggunaannya. Oleh sebab itu, pengeluaran ini menjadi prioritas pertama yang harus dialokasikan dari pendapatan yang dihasilkan daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan pengeluaran periodik wajib dan mengikat, serta prioritas utama termasuk *earmark* yang dijelaskan di atas, dan laju pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir maka dapat disusun proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat, serta prioritas utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Hasil perhitungan proyeksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23
Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat, Serta Prioritas Utama dan *Earmark*
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Rp juta)

Uraian	2021*?	2022	2023	2024	2025	2026
BELANJA OPERASI	4.067.602	4.482.741	4.547.744	4.637.664	4.733.924	4.910.060
Belanja Pegawai	2.139.326	2.487.566	2.513.026	2.558.864	2.605.731	2.716.033
Belanja Barang dan Jasa	1.100.296	1.158.943	1.190.152	1.225.817	1.266.709	1.323.956
Belanja Hibah	827.980	836.232	844.565	852.983	861.484	870.070
BELANJA MODAL	308.600	312.296	316.379	320.742	325.429	330.498

Uraian	2021*?	2022	2023	2024	2025	2026
BELANJA TRANSFER	873.266	881.999	890.819	899.727	908.724	917.812
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	5.299.469	5.727.036	5.804.942	5.908.133	6.018.078	6.208.370

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

*/ Sesuai dengan APBD 2021

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang dicapai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam periode tahun 2021– 2026 serta perkiraan kondisi perekonomian yang dihadapi pada masa datang.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah akan dialokasikan untuk pengeluaran prioritas daerah. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark*. Kapasitas riil keuangan daerah dihitung dari hasil proyeksi Pendapatan Daerah yang dijelaskan pada tabel 3.21 dan proyeksi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark* yang telah dijelaskan pada tabel berikut. Dalam perhitungan penerimaan daerah, penggunaan SiLPA tahun 2020 pada anggaran 2021 diabaikan agar perhitungannya konsisten untuk 5 (lima) tahun ke depan. Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021– 2026 (Rp juta)

URAIAN	2021*/	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan	6.580.124,00	6.817.130,14	7.067.356,05	7.331.691,08	7.611.087,61	7.906.565,56
Pencairan Dana Cadangan						
Total Penerimaan	6.580.124,00	6.817.130,14	7.067.356,05	7.331.691,08	7.611.087,61	7.906.565,56
Dikurangi:						
Belanja Wajib & Pengeluaran Pembiayaan Yg Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Dan " <i>Earmark</i> "	5.299.469,00	5.727.036,00	5.804.942,00	5.908.133,00	6.018.078,00	6.208.370,00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.280.655,00	1.090.094,14	1.262.414,05	1.423.558,08	1.593.009,61	1.698.195,56

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

*/ Sesuai dengan APBD 2021

Berdasarkan kapasitas kemampuan keuangan daerah maka disusun rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah kedalam tiga prioritas berikutnya, yaitu :

- Prioritas I : dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- Prioritas II : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
- Prioritas III : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai dengan harapan. Selanjutnya berdasarkan permasalahan dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang.

4.1.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN SECARA MAKRO

Sumatera Barat menghadapi permasalahan pembangunan secara makro antara lain sebagai berikut :

1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat.

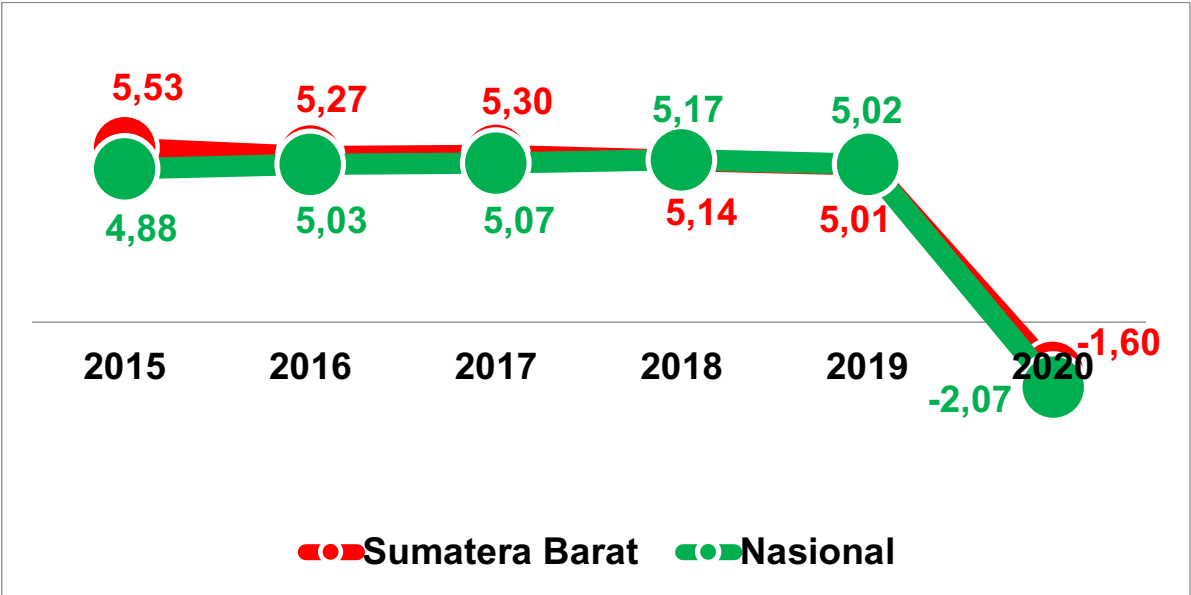
Tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, antara tahun 2016 sampai 2020, memperlihatkan kecenderungan yang semakin melambat. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 5,27 dan 5,30 persen menurun pada tahun 2018 dan 2019, berturut-turut menjadi 5,14 dan 5,01 persen, serta akibat pandemi berkontraksi -1,60 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat cenderung melambat, sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional meningkat tipis, sehingga pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Sumatera barat lebih rendah daripada nasional. Padahal sebelumnya 2016-2018 tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat lebih tinggi daripada nasional. Pada tingkat regional Sumatera, pada tahun 2020 Sumatera Barat berada pada rangking ketujuh dari 10 provinsi. Padahal selama empat tahun sebelumnya, tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berada dalam lima besar di regional Sumatera, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 2016-2020 (%)

PROVINSI/NASIONAL	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aceh	3,29	4,18	4,61	4,14	-0,37
2. Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,07
3. Sumatera Barat	5,27	5,30	5,14	5,01	-1,60
4. Riau	2,18	2,66	2,35	2,81	-1,12
5. Jambi	4,37	4,60	4,69	4,37	-0,46
6. Sumatera Selatan	5,04	5,51	6,01	5,69	-0,11
7. Bengkulu	5,28	4,98	4,97	4,94	-0,02
8. Lampung	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,67
9. Kep.Bangka Belitung	4,10	4,47	4,45	3,32	-2,30
10. Kep.Riau	4,98	1,98	4,47	4,84	-3,80
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka

Grafik 4.1
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

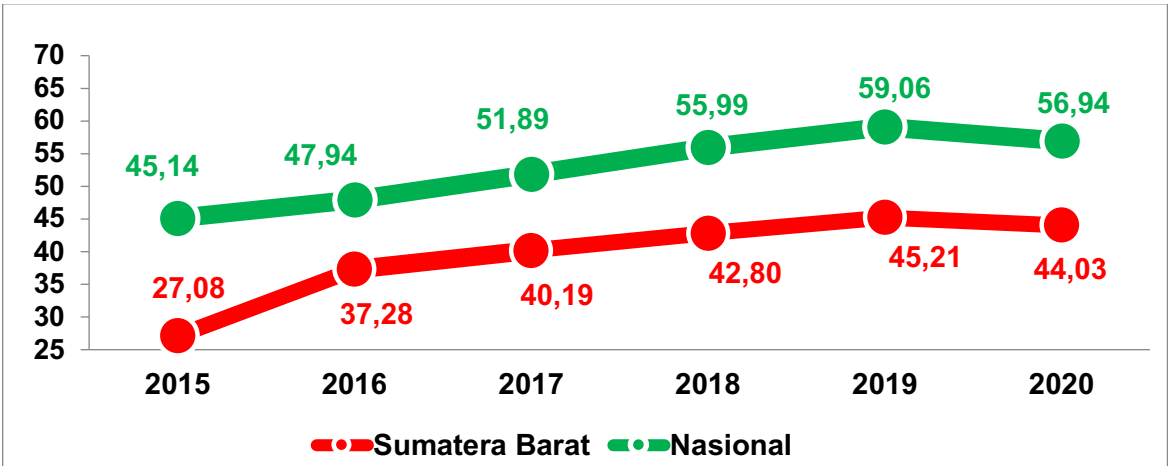
2. PDRB per kapita dan Pengeluaran Riil per kapita yang rendah

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Sumatera Barat selama lima tahun terakhir yang cenderung meningkat, yaitu dari Rp. 37, 28 juta pada 2016 menjadi Rp. 44,03 juta pada tahun 2020. Namun angka ini masih berada dibawah nasional sebesar Rp. 47,97 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 56,9 juta pada 2020. Kondisi ini menggambarkan masih rendahnya rata-rata pendapatan penduduk Sumatera Barat sebagai salahsatu ukuran kesejahteraan rakyat dibandingkan rata-rata nasional.

Hasil serupa ditunjukkan pula dengan menggunakan indikator pengeluaran riil per kapita sebagai salahsatu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengeluaran riil per kapita pada tahun 2016 sebesar Rp. 10,126 juta lebih rendah daripada angka nasional sebesar Rp. 10,420 juta per tahun. Begitupula pada tahun 2020, pengeluaran Sumatera Barat sebesar Rp. 10,733 juta dibandingkan rata-rata nasional sebesar Rp. 11,013. Hal ini menunjukkan masih rendahnya daya beli masyarakat Sumatera Barat.

Perbandingan PDRB Sumatera Barat dengan nasional memperlihatkan bahwa PDRB per kapita Sumatera Barat berada dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2020, rata-rata nasional telah mencapai Rp. 56,09 juta. Capaian penting dalam lima tahun terakhir yaitu terjadi konvergensi atau semakin mengecilnya selisih PDRB per kapita Sumatera Barat dengan rata-rata nasional.

Grafik 4.2
Perbandingan PDRB per Kapita (ADHB) Sumatera Barat dengan Nasional
Tahun 2015-2020 (Rp. Juta).



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Perbandingan PDRB per kapita secara regional di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi ke tujuh di atas Lampung, Bengkulu dan Aceh. Provinsi yang memiliki sumber minyak, gas, mineral dan pertambangan memiliki PDRB yang tinggi yang secara langsung berpengaruh terhadap PDRB per kapita seperti Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, yang terlihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi se Sumatera
Tahun 2016-2020 (Rp. Juta)

PROVINSI	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aceh	26,85	28,10	29,52	30,56	30,47
2. Sumatera Utara	44,39	48,00	51,43	54,91	55,18
3. Sumatera Barat	37,28	40,19	42,80	45,21	44,03
4. Riau	104,86	105,84	110,38	109,09	102,29
5. Jambi	49,49	53,99	58,22	59,88	56,24
6. Sumatera Selatan	43,36	46,31	50,10	53,55	53,50
7. Bengkulu	29,07	31,36	33,82	36,20	36,30
8. Lampung	34,05	37,00	39,72	42,23	41,62
9. Kep.Bangka Belitung	46,40	48,83	50,08	50,91	49,77
10. Kep.Riau	106,50	109,33	116,46	122,24	113,39

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka

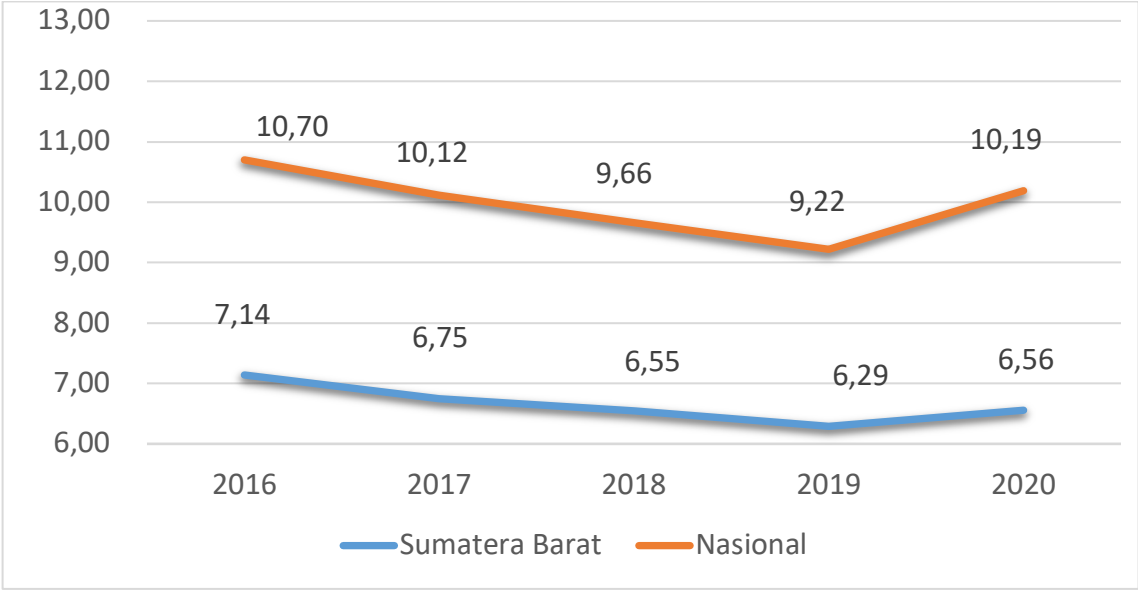
3. Ketimpangan Wilayah Yang Cenderung Meningkat

Indeks Williamson yang mengukur ketimpangan wilayah dalam ukuran pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan yang meningkat yaitu dari 0,2661 pada tahun 2016 menjadi 0,2736 pada tahun 2019. Rentang PDRB per kapita dari terendah dan tertinggi pada tahun 2016 berkisar dari Rp. 24,836 juta per kapita per tahun di Kabupaten Pesisir Selatan hingga Rp. 54,388 juta di Kota Bukittinggi. Selisih diantara keduanya mencapai Rp. 29,552 juta. Pada tahun 2020, rentang PDRB berkisar dari yang terendah di Pesisir Selatan sebesar Rp. 29,964 juta hingga yang tertinggi di Bukittinggi sebesar Rp. 65,004 juta. Sebagai gambaran, terjadi peningkatan selisih antara tertinggi terendah menjadi Rp. 35,04 juta. Ketimpangan wilayah yang semakin melebar ini perlu memberikan perhatian pada kebijakan-kebijakan afirmasi yang bertujuan untuk pemeratakan pembangunan antar daerah di Provinsi Sumatera Barat.

4. Lebih Tingginya Tingkat Kemiskinan Dan Kedalaman Kemiskinan Pedesaan Daripada Perkotaan.

Tingkat kemiskinan Sumatera Barat menurun dari 7,14 persen pada tahun 2016 menjadi 6,29 persen pada tahun 2019. Meskipun mengalami kenaikan menjadi 6,56 persen pada tahun 2020, relatif lebih rendah daripada kenaikan tingkat kemiskinan nasional, sehingga tingkat kemiskinan Sumatera Barat masih cukup jauh berada dibawah rata-rata nasional.

Grafik 4.3
Perbandingan Persentase Angka Kemiskinan Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2016 -2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dari persentase tingkat kemiskinan, capaian September 2020 yang sebesar 6,56% mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan September 2019 sebesar 6,29% atau sekitar 0,27 poin, dan jika dibandingkan dengan Maret 2020 dengan capaian 6,28 % atau naik sebesar 0,28 poin. Akan tetapi angka tingkat kemiskinan di Sumatera Barat ini selalu berada dibawah angka Nasional, dimana angka kemiskinan Nasional pada September 2020 sebesar 10,19 %.

Permasalahannya terlihat bila dipilah secara kewilayahan antara pedesaan dan perkotaan. Pada Maret 2020, tingkat kemiskinan pedesaan sebesar 7,43 persen yang cukup lebar dibandingkan perkotaan sebesar 4,97 persen. Hingga September 2020, jumlah penduduk miskin di pedesaan berjumlah 223,47 ribu orang dibandingkan perkotaan sebanyak 141,31 ribu jiwa.

Dengan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, wilayah pedesaan memiliki kedalaman dan keparahan kemiskinan yang lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) daerah pedesaan 1,171 dibandingkan daerah perkotaan sebesar 0,803. Angka ini mengindikasikan relatif lebih dalamnya penduduk miskin pedesaan untuk dari garis kemiskinan. Sekaligus mengimplikasikan perlunya upaya yang lebih serius dengan efektivitas sasaran dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di pedesaan.

5. Tantangan dalam Pembangunan Manusia

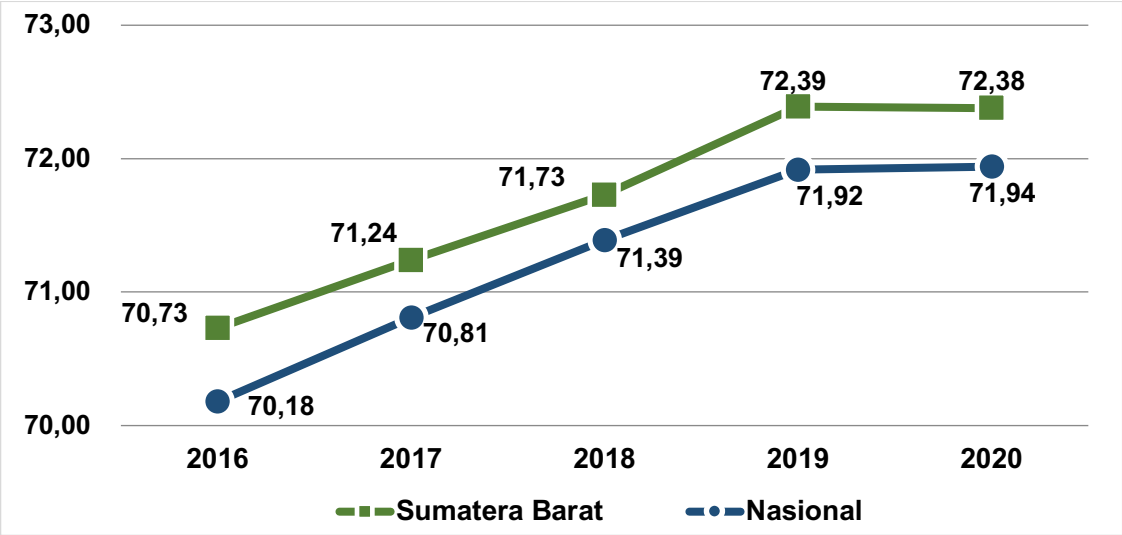
Pembangunan manusia Sumatera Barat selama 2016-2020 yang diindikasikan oleh indeks pembangunan manusia terus meningkat. Angkanya dari 70.73 persen pada tahun 2016 menjadi 72,38 pada 2020 (lihat tabel 2.31). Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat 9 secara nasional dan secara regional Pulau Sumatera berada pada peringkat 3 setelah Kepulauan Riau dan Riau, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
IPM Pulau Sumatera Tahun 2020

PROVINSI	TAHUN 2020
Aceh	71,99
Sumatera Utara	71,77
Sumatera Barat	72,38
Riau	72,71
Jambi	71,29
Sumatera Selatan	70,01
Bengkulu	71,40
Lampung	69,69
Kep. Bangka Belitung	71,47
Kep. Riau	75,59

IPM tertinggi di Sumatera Barat yakni Kota Padang sebesar 82,82 dan IPM terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 61,09. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan komponennya dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik 4.4
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat
Dibandingkan dengan Nasional Tahun 2016-2020

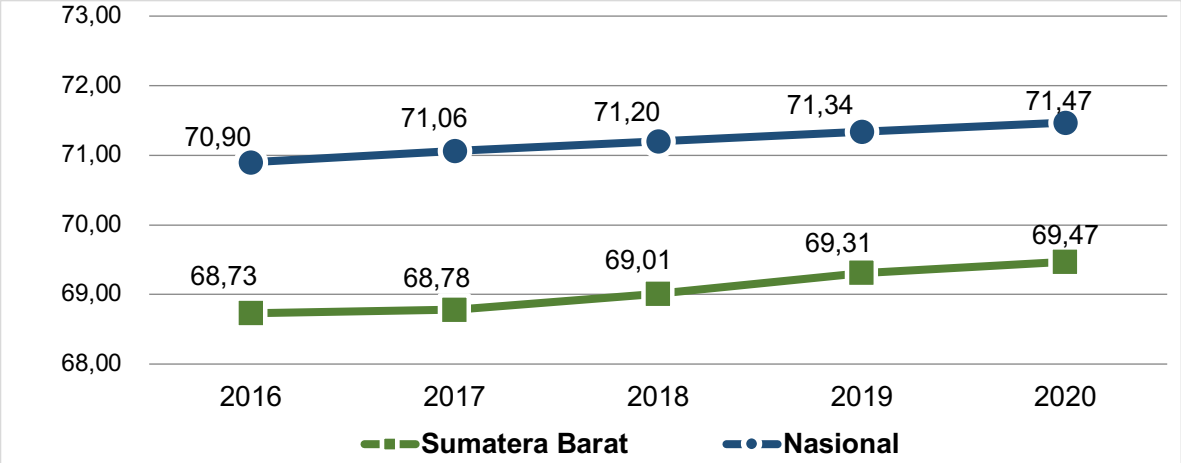


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Permasalahannya akan terlihat bila komponen IPM dibandingkan dengan angka nasional. Usia Harapan Hidup penduduk yang mencerminkan pembangunan manusia dalam bidang kesehatan, menunjukkan usia harapan hidup penduduk Sumatera Barat pada tahun 2020 dengan angka 69,47 tahun lebih rendah dibandingkan angka nasional yaitu 71,47 tahun (lihat grafik 2.18). Bahkan berada pada peringkat 8 dari 10 provinsi di Sumatera. Hanya lebih baik dari Bengkulu dan Sumatera Utara. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya akses dan kualitas layanan kesehatan.

Komponen pertama dalam pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan dalam UHH, sejalan dengan perkembangan secara nasional. Angka UHH Provinsi Sumatera Barat meningkat antara tahun 2016 hingga 2020 dari 68,73 menjadi 69,47 tahun. Namun angka ini masih di bawah nasional. Perkembangan UHH Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik 4.5
Perkembangan Umur Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional
Tahun 2016-2020 (Tahun)

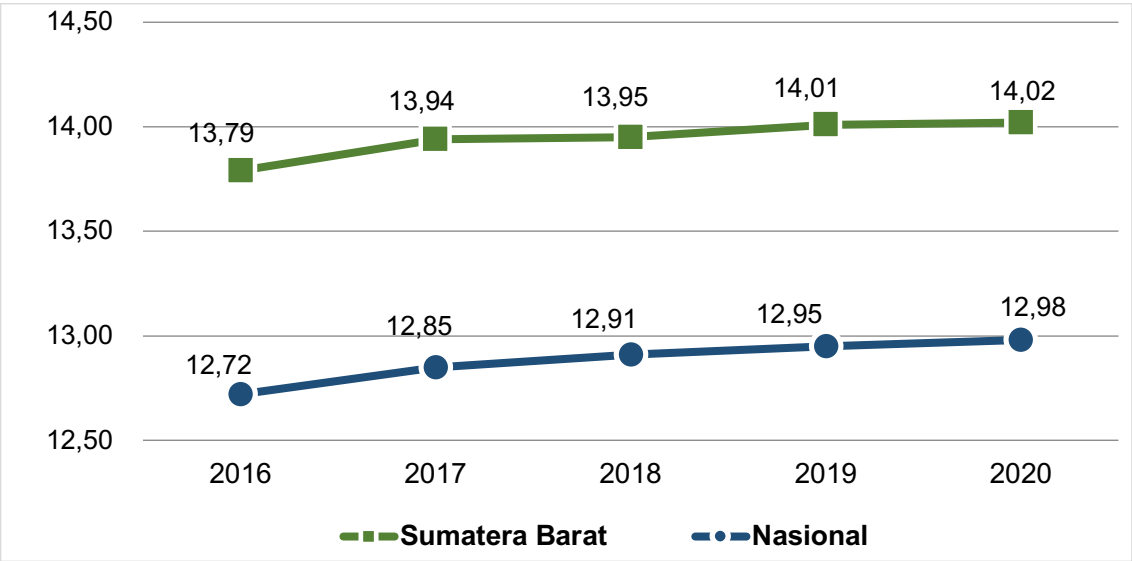


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Berbeda dalam indikator harapan lama sekolah sebesar 14,02 tahun yang berada pada peringkat 2 setelah Aceh di regional Sumatera, indikator rata-rata lama sekolah berada pada peringkat 4. Capaiannya sebesar yaitu 8,99 berada dibawah provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Aceh dan Riau. Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa ini dapat disebabkan oleh ketimpangan dalam akses dan kualitas dalam pelayanan pendidikan dan persekolahan antar daerah. Kemungkinan lainnya dapat disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Sumatera Barat sehingga penduduk dewasa setelah menamatkan pendidikan menengah melakukan migrasi ke provinsi lainnya. Ditambah dengan tradisi merantau sebagian besar penduduk Sumatera Barat.

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir meningkat, sejalan dengan perkembangan HLS secara nasional. HLS Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mencapai 14,02 tahun, angka ini di atas angka Nasional, yang terlihat pada grafik berikut.

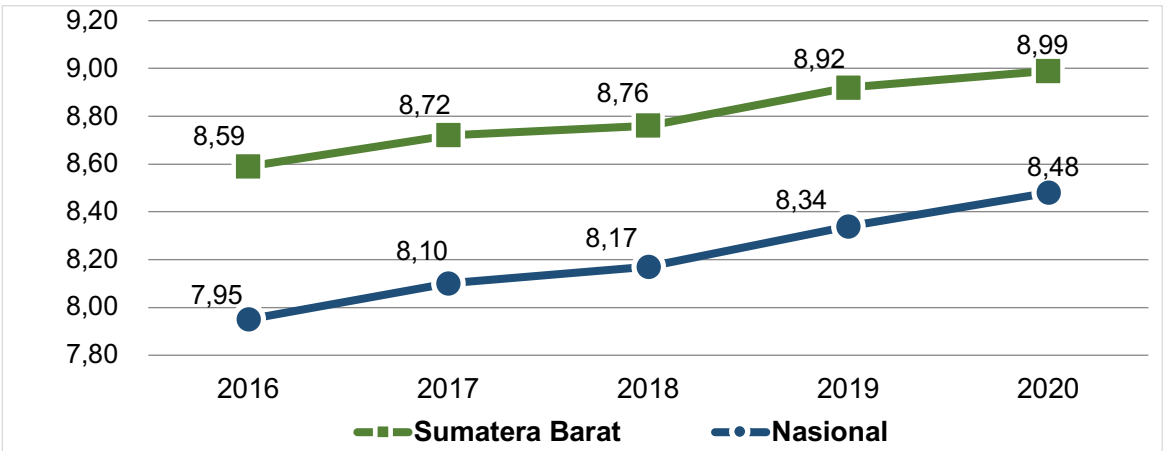
Grafik 4.6
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional
Tahun 2016-2020 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir meningkat, sejalan dengan perkembangan RLS secara nasional. RLS Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mencapai 8,99 tahun, angka ini di atas angka Nasional, seperti yang terlihat pada grafik berikut.

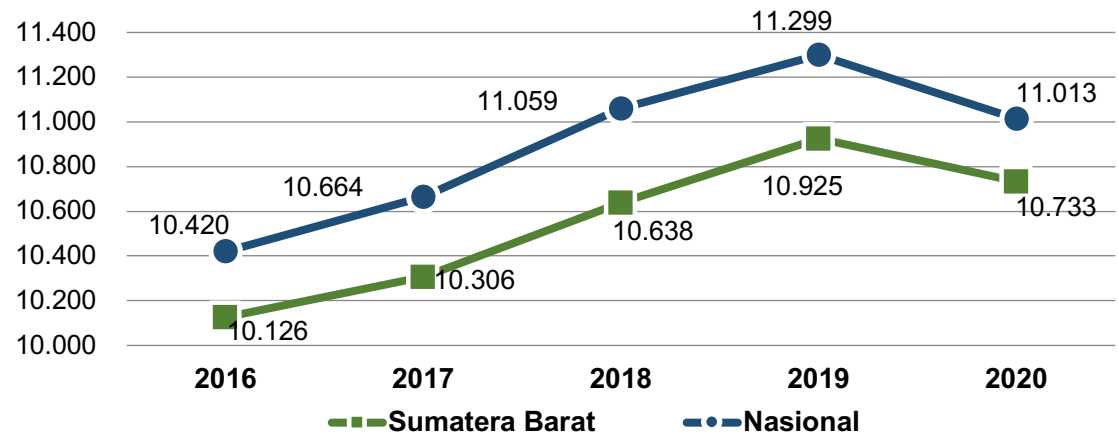
Grafik 4.7
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional
Tahun 2016-2020 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan pengeluaran Per Kapita disesuaikan Provinsi Sumatera Barat dalam tahun 2020 mengalami penurunan, sejalan dengan penurunan pengeluaran per kapita disesuaikan pada tahun 2020 secara nasional. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mencapai 10.733 (Ribu Rp/Org/Th), namun angka ini masih di bawah nasional sebesar 11.013 (Ribu Rp/Org/Th), seperti yang terlihat pada grafik berikut.

Grafik 4.8
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rp/Org/Th)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Pembangunan manusia terutama dalam kesehatan dan pendidikan serta penyediaan kesempatan kerja masih merupakan permasalahan pembangunan penting yang dihadapi Sumatera Barat. Akses kepada layanan kesehatan dasar dan pendidikan dan peningkatan kualitasnya serta dorongan bagi penciptaan lapangan kerja dan penumbuhan kewirausahaan merupakan agenda penting pemerintah dalam lima tahun ke depan.

6. Rendahnya Keterkaitan Antara Sektor Pertanian Dengan Sektor Industri.

Transformasi struktur perekonomian dari agraris ke industri seharusnya ditandai penurunan kontribusi pertanian yang diikuti dengan meningkatnya sektor industri pengolahan. Sektor pertanian yang meliputi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan perikanan merupakan sektor terbesar dalam kontribusinya membentuk struktur perekonomian Sumatera Barat hingga mencapai 22,38 persen pada tahun 2020. Bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 24,06 persen, maka proses transformasi dari sektor agraris ke sektor industri dan jasa tergolong relatif lambat.

Pada saat bersamaan, terjadi penurunan kontribusi sektor industri pengolahan dalam 5 tahun terakhir. Dari kontribusi awal pada tahun 2016 sebesar 10,09 persen menjadi 8,64 persen pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan tantangan pembangunan sektoral berupa rendahnya keterkaitan antara sektor Pertanian dengan sektor industri.

7. Kecenderungan Deindustrialisasi

Transformasi struktur perekonomian idealnya ditunjukkan oleh meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB. Perkembangan sektor industri pengolahan Provinsi Sumatera Barat justru menunjukkan kecenderungan deindustrialisasi. Hal ini diindikasikan oleh menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan dari 10.09 persen pada tahun 2016 menjadi 8,64 persen pada tahun 2020.

Terdapat ketidaksejajaran antara pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian dengan sektor industri. Sektor pertanian konsisten bertumbuh, bahkan saat krisis akibat pandemi pada tahun 2020, pada rata-rata 2,5 persen, serta mencapai puncaknya sebesar 3,52 persen pada tahun 2017. Namun sektor industri pengolahan pertumbuhannya cenderung menurun. Pertumbuhannya mulai dari 4,90 persen pada tahun 2016, terus menurun bahkan mencatat angka negatif sejak 2018 hingga 2020, bahkan pada 2019 sebelum krisis pandemi pertumbuhannya minus 1,98 persen.

Keadaan sektor industri ini menunjukkan tantangan yang kompleks diantaranya adalah perkembangan sektor industri pengolahan belum dikaitkan dengan sumberdaya yang tersedia atau belum berkembangnya agroindustri, terutama skala menengah. Disamping permasalahan-permasalahan masih rendahnya nilai tambah maupun efisiensi dan biaya produksi.

8. Melambatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum

Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang dapat digunakan sebagai proksi dari perkembangan pariwisata dapat berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Provinsi Sumatera Barat bersamaan dengan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi. Pertumbuhannya sebelum krisis pandemi covid-19 tercatat konsisten melebihi 8 persen. Namun permasalahannya, pertumbuhan sektoral lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum ini memiliki kecenderungan yang melambat. Pertumbuhannya terus menurun dari 9,62 persen pada tahun 2016 menjadi 8,11 persen pada tahun 2019. Bahkan pada tahun 2020, sektor ini terkena dampak yang besar sehingga pertumbuhannya minus 16,10 persen, terbesar kedua setelah sektor transportasi dan pergudangan.

Pengelolaan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum masih lemah integrasi bisnisnya dengan sektor-sektor lain seperti pertanian maupun transportasi. Pertumbuhan sektoral yang tinggi belum diikuti oleh kontribusi yang berarti bagi pendapatan daerah. Sumbangan sektor ini masih berkisar pada angka 1,2 hingga 1,4 persen terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan Pembangunan secara Makro, merupakan permasalahan utama yang akan menentukan kinerja 5 (lima) tahun mendatang, disertai dengan pemetaan permasalahan (pohon masalah) mulai dari masalah pokok dan masalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Pemetaan Permasalahan (Pohon Masalah)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang melambat	Kecenderungan deindustrialisasi	Rendahnya keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri
		Belum berkembangnya agroindustri
		Masih rendahnya nilai tambah produk industri
		Inefisiensi dan biaya produksi
	Melambatnya pertumbuhan lapangan usaha akomodasi dan makan minum	Masih lemahnya integrasi bisnis dengan sektor-sektor lain seperti pertanian maupun transportasi
Ketimpangan wilayah yang cenderung meningkat	Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Penyediaan infrastruktur yang belum merata dan berkelanjutan
	Lebih tingginya tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan perdesaan daripada perkotaan	Kecenderungan urbanisasi dan migrasi desa-kota
Tantangan dalam pembangunan manusia	Derajat kesehatan masyarakat masih dibawah rata-rata nasional	Masih rendahnya akses dan kualitas layanan kesehatan
	Derajat pendidikan masyarakat masih relatif belum optimal dalam skala regional	Ketimpangan dalam akses dan kualitas dalam pelayanan pendidikan dan persekolahan antar daerah
	PDRB per kapita dan pengeluaran riil per kapita yang rendah	Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga penduduk migrasi ke provinsi lain dan tradisi merantau sebagian besar penduduk

4.1.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

Banyak masalah pembangunan yang ditemui dalam pembangunan daerah di provinsi Sumatera Barat, dan akan diidentifikasi di bagian ini berdasarkan kriteria: (a) masalah memiliki cakupan yang luas dan berdampak negatif terhadap kualitas kehidupan masyarakat; (b) masalah cenderung meningkat dan menghambat proses dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan; serta (c) merupakan pendorong pembangunan Sumatera Barat secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk itu, permasalahan akan diidentifikasi berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

1. urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
2. urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. urusan pilihan;
4. unsur penunjang;
5. unsur pengawasan.

4.1.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat yang dilandasi kesadaran spiritualisme dan kebangsaan. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Sumatera Barat tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain :

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah.
- b. Kebutuhan kurikulum yang bermuatan kearifan lokal belum bersinergi antara pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- c. Masih belum meratanya kesejahteraan guru terutama yang berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
- d. Belum terpenuhinya kualitas, kuantitas dan distribusi guru dan tenaga kependidikan.
- e. Masih kurangnya SMK yang unggul berbasis potensi daerah maupun jurusan pendidikan yang ramah dunia kerja.
- f. Belum optimalnya pengembangan karakter berdasarkan minat, bakat dan kreativitas siswa.
- g. Masih kurangnya pendidikan kewirausahaan pada pendidikan vokasi secara berkelanjutan.
- h. Belum meratanya akses dan mutu sekolah luar biasa dan sekolah inklusi sehingga lulusan SLB belum terserap secara maksimal di dunia kerja.
- i. Masih lambatnya transformasi digital dalam implementasi proses belajar mengajar dan administrasi pendidikan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Sumatera Barat yang telah dilakukan selama ini, masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan antara lain :

- a. Masih tingginya angka prevalensi stunting di seluruh Kabupaten/Kota.
- b. Belum optimalnya kontijensi plan *COVID*-19 dan rendahnya kepatuhan masyarakat.
- c. Masih adanya kematian ibu hamil, melahirkan, nifas dan bayi baru lahir.
- d. Meningkatnya penyakit tidak menular dan masih tingginya kasus penyakit menular.
- e. Belum optimalnya pelayanan di rumah sakit rujukan provinsi.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Sumatera Barat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum meratanya konektivitas jalan antar daerah kabupaten/kota, /provinsi tetangga, jalan mitigasi bencana, jalan menuju kawasan strategis, dan akses jalan pesisir pantai barat Pulau Sumatera.
- b. Banyaknya jalan provinsi dalam kondisi rusak akibat muatan lebih, kejadian bencana alam, dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam pemanfaatan jalan
- c. Belum optimalnya pelayanan air minum disebabkan keterbatasan sumber air baku untuk SPAM Regional dan kurangnya koordinasi dan komunikasi antar Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Keterbatasan lahan untuk pembangunan TPA regional dan IPLT di beberapa Kab/Kota.
- e. Masih belum tuntasnya pembangunan beberapa bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi dan bangunan evakuasi sementara (shelter) pada daerah Kab/Kota yang berada di pesisir pantai barat Sumatera.
- f. Kurang Fokusnya pembangunan terhadap penataan bangunan dan lingkungannya pada Kawasan Strategis
- g. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan belum adanya dasar hukum yang kuat untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran (RRTR yang belum dibuat dan dilegalisasi).
- h. Belum optimalnya sinkronisasi pemanfaatan ruang yang disebabkan oleh tidak terintegrasinya RTRW dengan rencana pembangunan.

Air mempunyai peran strategis dalam aktivitas ekonomi, sosial maupun pertanian, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan pengairan lahan pertanian. Sehingga dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu diperhatikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penanganan penanggulangan banjir dan bencana alam akibat daya rusak air sungai yang berdampak kepada permukiman dan lahan pertanian.
- b. Belum optimalnya penanganan dan perbaikan jaringan irigasi yang berakibat kepada kurangnya produksi pertanian dan juga banyak lahan irigasi yang beralih fungsi.
- c. Belum optimalnya pengendalian abrasi pantai pada daerah yang berada pada kawasan pantai
- d. Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung air (embung) untuk kebutuhan penduduk.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah dengan lingkungan permukimannya yang sehat dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan permasalahan yaitu masih tingginya luasan Kawasan permukiman kumuh.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Beberapa tantangan dan permasalahan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang perlu perhatian antara lain sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pengurangan risiko bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan), kapasitas penanganan tanggap darurat serta pemulihan daerah pasca bencana
- b. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan masih terjadinya gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum.
- c. Belum optimalnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di destinasi wisata, fasilitas umum strategis dan Kawasan perdagangan.
- d. Masih rendahnya pembekalan bagi aparaturnya dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (NAPZA).
- e. Masih terbatasnya keikutsertaan Satpol PP dalam setiap pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana.
- f. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Satpol PP.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial termasuk subyek didalamnya lansia dan penyandang disabilitas. Pembangunan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat senantiasa dilakukan oleh pemerintah daerah, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain:

- a. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
- b. Belum optimalnya penanganan kenakalan remaja dan LGBT.
- c. Masih lemahnya ketahanan sosial masyarakat.
- d. Belum terpenuhinya kebutuhan dasar didalam panti (anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar).

4.1.2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Sebagai implikasi dari bonus demografi yang menciptakan banyak penduduk usia kerja, serta tantangan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi global, maka pembangunan ketenagakerjaan saat ini menjadi penting untuk perhatian berbagai pihak. Pemerintah Sumatera Barat telah berupaya melakukan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghadapi tantangan tersebut. Namun demikian, masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian kedepan antara lain:

- a. Tingkat pengangguran terbuka yang masih relative tinggi.
- b. Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja dari berbagai sektor per kabupaten/kota.
- c. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja.
- d. Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan (*entrepreneurship*).

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Disamping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a. Kurangnya keberdayaan ekonomi perempuan meliputi wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha.
- b. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
- c. Belumnya optimalnya pemenuhan hak-hak anak
- d. Belum optimalnya ketahanan keluarga untuk mewujudkan tatanan sosial yang berbasis adat dan budaya.
- e. Masih tingginya angka perceraian di Sumatera Barat.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Dalam mewujudkannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu

- a. Belum optimalnya pengawasan terhadap keamanan pangan.
- b. Masih belum terpenuhinya pemenuhan cadangan pangan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan proporsi yang ditetapkan.
- c. Masih ditemuinya daerah rawan pangan.

- d. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
- e. Peran kelembagaan pangan dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan belum maksimal.
- f. Pengembangan pangan alternatif dan teknologi industri pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal belum optimal.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Pembangunan membutuhkan adanya kepastian akan lahan termasuk pemanfaatannya terutama untuk mempertahankan fungsi sebagai lahan pertanian berkelanjutan, infrastruktur strategis dan lahan untuk investasi. Terkait hal tersebut permasalahan pertanian yang muncul diantaranya:

- a. Rendahnya pemanfaatan tanah.
- b. Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan.
- c. Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar.
- d. Masih banyaknya tanah negara (provinsi) yang belum di inventarisir.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup mencakup persampahan, pencemaran dan pengrusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi/pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian polusi yang ditimbulkannya. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan persampahan yang belum optimal karena tingkat layanan yang rendah (46%), sarana dan prasarana yang belum memadai dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan 4R (*Reduce, Recycle, Reuse, Replace*) dalam pengelolaan sampah Akibatnya tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir sampah tidak mampu menampung volume sampah yang ada.
- b. Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup belum terlaksana sebagaimana mestinya akibat pengawasan dan penataan hukum yang belum optimal.
- c. Penurunan kualitas air dan keanekaragaman hayati danau prioritas nasional (Danau Singkarak dan Danau Maninjau).
- d. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam belum optimal seperti konservasi daerah aliran sungai dan danau.
- e. Belum optimalnya perencanaan dan implementasi pembangunan Rendah Karbon untuk pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan intensitas Emisi.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyediaan data dan informasi kependudukan secara nasional dan terpadu sebagai rujukan dasar dalam perumusan kebijakan dan pembangunan, masih dihadapkan permasalahan meliputi :

- a. Data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal.
- b. Belum terintegrasinya data kependudukan berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik seperti perbankan, kesehatan, sosial, pajak dan pendidikan.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Perubahan paradigma dalam pembangunan Nagari dan desa yang menempatkannya sebagai subjek pembangunan bertujuan agar Nagari dan desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan cukup penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Proses tersebut tidaklah mudah, karena beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Masih rendahnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat.
- b. Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan kerjasama desa/nagari dalam rangka peningkatan asli desa dan pembentukan kawasan perdesaan
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Jumlah penduduk yang meningkat harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a. Menurunnya kepesertaan KB;
- b. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kependudukan.
- c. masih terdapat beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan Laju Pertumbuhan Penduduk tinggi dikarenakan tumbuhnya pusat perekonomian baru
- d. Belum tersedianya database kependudukan berbasis Keluarga dan perlunya pemanfaatan NIK pada database Kependudukan berbasis Keluarga hasil pendataan Keluarga
- e. tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan unmetneed antar wilayah
- f. tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria;
- g. belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- h. kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga
- i. masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia
- j. terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Sumatera Barat. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:

- a. Belum baiknya tingkat pelayanan terminal penumpang utamanya tipe B dari aspek jumlah, persebaran dan kondisi fisik fasilitas utama beserta pendukungnya;
- b. Pengembangan pelayanan angkutan belum optimal dalam mendukung aksesibilitas dan aglomerasi wilayah perkotaan, kawasan perbatasan dan kawasan strategis lainnya;
- c. Masih tingginya angka kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya dan perlintasan sebidang kereta api mengakibatkan belum tercapainya target penurunan kecelakaan.
- d. Masih Rendahnya Kualitas dan kuantitas sarana dan Prasarana Perhubungan

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Pemanfaatan aplikasi informatika dan website harus terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah. Upaya tersebut masih menemui beberapa permasalahan yang harus diselesaikan diantaranya:

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terintegrasi kedalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- c. Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet
- d. Belum optimalnya pelayanan, publikasi dan penyebaran informasi publik berbasis elektronik

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendominasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi dan UMKM masih ditemukan permasalahan yaitu:

- a. Lemahnya kemampuan SDM, manajemen kelembagaan dan pendampingan Koperasi UMKM

- b. Masih rendahnya kemampuan Koperasi UMKM dalam pemanfaatan teknologi dan digital
- c. Masih terbatasnya akses pembiayaan dan akses pasar bagi Koperasi UMKM
- d. Standarisasi produk UMKM masih rendah
- e. Masih minimnya generasi milenial sebagai pelaku Koperasi UMKM

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Investasi diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan investasi, yaitu :

- a. Banyaknya lokasi investasi yg belum diakomodir/tidak sesuai peruntukan ruangnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/kabupaten/kota.
- b. Sulitnya mengurus kerjasama atau pembebasan lahan untuk investasi disebabkan lahan berpotensi investasi pada umumnya adalah tanah ulayat.
- c. Masih terdapatnya izin prinsip yang telah dikeluarkan tidak terealisasi sehingga untuk mencapai realisasi investasi belum maksimal.
- d. Belum optimalnya promosi investasi daerah karena kurangnya jumlah SDM yg berkompeten terkait promosi investasi daerah
- e. Belum lengkapnya data kajian potensi dan peluang investasi yang siap untuk ditawarkan kepada calon investor.
- f. Belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah.
- g. Belum optimalnya promosi potensi daerah dan peluang investasi serta proses dan mekanisme perizinannya secara digital.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda dalam keikutsertaannya membangun dan menjadi tulang punggung pembangunan serta meningkatkan prestasi olahraga Sumatera Barat, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain :

- a. Terbatasnya ruang kreatif untuk menumbuhkan talenta pemuda pada berbagai bidang.
- b. belum optimalnya peran dan fungsi Organisasi Kepemudaan.
- c. Masih minimnya event yang bermuatan kompetisi kepemudaan.
- d. Masih minimnya sarana dan prasarana olah raga sesuai standar nasional dan internasional.
- e. Belum adanya jaminan kesejahteraan bagi atlet berprestasi termasuk mantan atlet.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Penyediaan data dan informasi yang *reliable, up to date*, dan relevan harus terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara terintegrasi. Beberapa permasalahan yang kerap dihadapi terkait dengan data dan informasi antara lain :

- a. Data dipublikasikan oleh BPS disemester dua setiap tahun, sementara kebutuhan data untuk perencanaan diperlukan pada diawal tahun, dan seringkali data yang dipublikasikan tidak sinkron dengan data dari OPD.
- b. Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi;
- c. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada masih rendahnya data terolah spasial dan aspasial.
- d. Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
- e. Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral dari OPD.
- f. Belum adanya peraturan daerah atau peraturan gubernur tentang pengelolaan data dan rencana induk statistik sektoral statistik sektoral.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi harus terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat berkembang.

Permasalahan yang dihadapi utamanya terkait dengan kuantitas dan kualitas personil, serta sistem dan sarana prasarana untuk menangkal dan menjaga keamanan sistem, beberapa permasalahan pada urusan persandian adalah :

- a. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan sebagai layanan persandian dalam komunikasi dan pengamanan informasi perangkat daerah
- b. Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah daerah;
- c. Belum meratanya kompetensi aparatur pemerintah daerah pengelola keamanan informasi;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi;

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Nilai-nilai budaya Sumatera Barat merupakan keunikan yang harus terus dijaga dan dipertahankan agar dapat semakin memperkuat daya tahan dan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan era industri 4.0. Hal ini tentunya tidak mudah untuk diwujudkan karena dalam implementasinya menjumpai berbagai persoalan antara lain :

- a. Lunturnya identitas dan nilai budaya masyarakat terutama di kalangan muda.
- b. Terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan sehingga belum terintegrasi dengan sektor lainnya.
- c. Belum teragendakannya event-event kebudayaan berskala nasional/internasional secara berkala.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Dalam rangka mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat di Sumatera Barat, permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah :

- a. belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat (Pengembangan perpustakaan berbasis digital/e-Book).
- b. Rendahnya tingkat budaya literasi

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya di Provinsi Sumatera Barat, penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain:

- a. Belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,
- b. Ketersediaan SDM pengelola kearsipan yang tidak sebanding dengan jumlah arsip yang harus diolah/lestarikan
- c. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

4.1.2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, dari sisi *off-farm* upaya peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:

- a. Masih rendahnya Penggunaan benih bersertifikat untuk peningkatan produksi komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura.
- b. Terbatasnya prasarana dan sarana produksi pertanian
- c. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani
- d. Belum optimalnya peningkatan produktifitas produksi pertanian
- e. Belum optimalnya pengelolaan dan kapasitas kelembagaan tani

- f. Belum optimalnya nilai tambah dan rendahnya daya saing produk pertanian
- g. Rendahnya akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi untuk hilirisasi pertanian.
- h. Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan
- i. Dampak perubahan iklim dan serangan OPT terhadap peningkatan produksi
- j. Masih tingginya tingkat kehilangan hasil dalam proses produksi, panen dan pasca panen
- k. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur serta prasarana dan sarana lahan dan air
- l. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas
- m. Penanganan Konflik / Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan, dan peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan lainnya melalui peningkatan teknologi dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan serta meningkatkan usaha penanganan dan pengolahan ikan sehingga mutu terjamin dan nilai tambah produk perikanan meningkat, serta menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap
- b. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya
- c. Masih terbatasnya prasarana dan sarana pelabuhan perikanan
- d. Masih belum terpenuhinya kebutuhan benih untuk usaha budidaya laut dan payau
- e. Masih rendahnya kemampuan manajerial usaha dan kualitas kelembangaan usaha
- f. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan
- g. Masih adanya kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan baik dilaut maupun perairan umum
- h. Terjadinya degradasi ekosistem laut dan pesisir dan juga perairan umum
- i. Pemanfaatan lahan usaha perikanan yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah

3. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Pengelolaan hutan secara lestari diperlukan dalam rangka meningkatkan daya dukung fungsi lindung dan fungsi produksi secara berkelanjutan. Berbagai permasalahan masih terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, yaitu:

- a. Sumber daya hutan Sumatera Barat belum terkelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Barat.
- b. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (*self-mobilization*).
- c. Rehabilitasi hutan dan lahan belum sebanding dengan luas lahan kritis di Sumatera Barat.
- d. Pengelolaan DAS belum terpadu.
- e. Perlindungan dan pengamanan hutan belum maksimal untuk menekan laju degradasi dan deforestasi.
- f. Perbenihan tanaman hutan belum berkembang untuk mendukung pengembangan tanaman unggulan lokal.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Tantangan dan permasalahan-permasalahan dalam urusan pariwisata yang teridentifikasi selama ini adalah:

- a. Pembangunan Destinasi Wisata belum berbasis keberlanjutan lingkungan dan aktivitas berbasis kearifan lokal dan budaya daerah;
- b. Promosi kepariwisataan masih belum efektif dan efisien.
- c. Belum tergalinya produk unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif di masing-masing kab/kota;
- d. Kerjasama antara pentahelix pariwisata serta hexahelix ekonomi kreatif belum optimal
- e. Pengembangan ekonomi kreatif belum mengacu kepada industri budaya lokal.
- f. Pembangunan Pariwisata masih belum Terpadu dan masih bersifat sektoral.
- g. Belum optimalnya pengembangan potensi dan pengelolaan pariwisata halal.

- h. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya, dan buatan;
- i. Belum terintegrasinya kawasan Geopark sebagai kawasan wisata tematik.
- j. Belum tersedianya aturan terkait standarisasi baku pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata.
- k. Masih rendahnya kapasitas SDM serta produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Kebutuhan energi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan industri. Pembangunan energi harus ditujukan untuk menjamin kemandirian dan ketersediaan energi daerah, sehingga diperlukan upaya diversifikasi energi terbarukan yang berlimpah di Sumatera Barat. Selain itu, pemerataan penyediaan energi untuk masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan juga diperlukan agar terciptanya pemanfaatan energi yang berkeadilan. Sementara itu pada sektor sumber daya mineral, kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur semakin meningkat sehingga perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tanpa ijin. Terkait hal tersebut, pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral masih menjadi tantangan dan menghadapi permasalahan yang memerlukan perhatian, yaitu:

- a. Masih adanya penambangan non logam tanpa ijin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat dan kurangnya pemahaman penambangan yang benar (*good mining practice*);
- b. Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses tenaga listrik secara layak,
- c. Masih tingginya investasi energi terbarukan dan harganya belum mencapai keekonomian, sehingga mengganggu keberlanjutan pemanfaatan energi terbarukan
- d. Terjadinya kecenderungan penurunan kualitas dan kuantitas air tanah.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan penting untuk terus dikembangkan mengingat sifat sektor perdagangan yang saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Belum optimalnya sistem distribusi dan tata niaga barang kebutuhan Pokok dan penting.
- b. Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan.
- c. Masih rendahnya pelaku usaha dalam memanfaatkan *e-commerce* dalam memasarkan produk.
- d. Masih rendahnya Pemahaman Konsumen terhadap Hak dan Kewajibannya.
- e. Belum Optimalnya Pengawasan Barang Beredar.
- f. Masih tingginya persentase ketidaksesuaian mutu komoditi potensial terhadap ketentuan berlaku.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Permasalahan dalam pembangunan sektor industri yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- a. Masih rendahnya diversifikasi, kualitas produk IKM, dan sertifikasi produk.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana sentra IKM.
- c. Belum optimalnya keterkaitan sektor pertanian dengan sektor industri pengolahan dan sektor industri pengolahan dengan sektor industri lainnya.
- d. Belum optimalnya kesesuaian Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dengan Rencana

- Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) terhadap prioritas pengembangan IKM.
- e. Terbatasnya kemampuan IKM dalam pengembangan/rekayasa teknologi dan desain produk terutama pembuatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - f. Masih kurangnya kesadaran pelaku industri untuk menerapkan Manajemen Mutu dalam proses produksi.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Pengembangan transmigrasi memiliki fungsi strategis tidak hanya semata-mata mengatasi permasalahan demografi, namun juga mempercepat pembangunan, mengentaskan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran. Masalah utama urusan transmigrasi yaitu :

- a. Alokasi penempatan bagi peserta program transmigrasi belum memadai dibandingkan jumlah masyarakat yang berminat terhadap program transmigrasi.
- b. Kuota penempatan transmigran asal yang diberikan oleh Pemerintah Pusat relatif terbatas karena keterbatasan lokasi penempatan transmigrasi yang telah siap. Hal ini dikarenakan prioritas program Pusat diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah penempatan, antara lain permasalahan lahan yang tidak kunjung tuntas.

4.1.2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Unsur Penunjang

1. Perencanaan Pembangunan

Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku OPD yang mengkoordinir urusan perencanaan namun dalam hal pada setiap tahapan evaluasi perencanaan pembangunan daerah masih adanya tantangan dan permasalahan dalam kurun waktu lima tahun belakangan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, diantaranya :

- a. Belum optimalnya Proses tahapan perencanaan.
- b. Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah;
- c. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

2. Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menjawab beberapa permasalahan pengelolaan keuangan antara lain:

- a. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.
- b. Masih rendahnya kontribusi pendapatan daerah diluar pajak dan retribusi daerah (non konvensional) untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
- c. Belum semua aset daerah dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

3. Kepegawaian

Dengan telah diterapkannya sistem merit sebagai pendukung Manajemen Sumberdaya Aparatur Sipil Negara. Terdapat beberapa permasalahan yang dirujuk dari aspek sistem merit sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN.
- b. Sistem penilaian kinerja ASN yang belum akurat.
- c. Rendahnya kualitas dan produktifitas kerja ASN.
- d. Masih terdapatnya ASN yang belum terdistribusi sesuai dengan beban kerja di perangkat daerah.
- e. Masih terdapatnya ASN yang belum kompeten dalam menangani tugas dan fungsi dibidangnya terkait dengan pelayanan publik.
- f. Belum terbangunnya sistem perencanaan dan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan, formasi jabatan dan standar kompetensi.
- g. Sistem informasi masih belum optimal terutama dalam pengelolaan manajemen ASN.
- h. Evaluasi kinerja ASN belum berlandaskan pada sistem penilaian kinerja berbasis Merit sistem.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Pengelolaan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang profesional dan handal, hal itu disebabkan :

- a. Masih belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang berjenjang dan berkelanjutan.
- b. Belum dilakukannya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan kepada ASN di lingkungan Pemerintahan Sumatera Barat

5. Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya kebutuhan terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dihadapkan permasalahan:

- a. Masih terbatasnya penyelenggaraan penelitian dan pengkajian
- b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan
- c. Belum optimalnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan institusi kelitbangan lainnya dalam penyelenggaraan kelitbangan
- d. Masih kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- e. Belum optimalnya perekayasaan dan inovasi teknologi untuk mendukung Daya Saing Produk
- f. Belum optimalnya uji coba, penerapan rancang bangun dan diseminasi hasil kelitbangan

6. Pengawasan

Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin responsif, transparan dan akuntabel. Permasalahan lain yang dihadapi antara lain tentang bagaimana kapabilitas Aparat. Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus selalu dapat meningkat, dan bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tetap terselenggara dengan baik dalam dinamika pergantian ASN untuk mencapai hal tersebut masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penerapan SPIP
- b. Belum optimalnya penanganan dalam Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Koordinasi antara APIP dan APH untuk menindaklanjuti Temuan Hasil Pengawasan baik internal maupun eksternal
- c. Belum optimalnya peran dan layanan APIP pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis juga merupakan kondisi yang berpotensi menjadi peluang daerah di masa datang.

Perumusan isu strategis dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan di Sumatera Barat serta arah kebijakan dan program pokok Rencana Jangka Panjang Daerah, Kebijakan Pembangunan Sektoral, Regional, Nasional dan Internasional/Global. Isu-isu strategis daerah tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.1. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat

Isu-isu strategis merupakan perkembangan kondisi terkini dan kecenderungannya di masa depan dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan yang akan mempengaruhi pencapaian misi, program dan kegiatan sehingga harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan. Isu-isu strategis disajikan menurut fokus pembangunan, mulai dari pertanian, perdagangan dan UMKM, serta pariwisata.

1. Pembangunan Manusia

Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia melalui pembangunan Manusia, sejumlah isu-isu strategis pada bidang kesehatan yaitu pandemi *COVID-19* yang belum mereda mengancam kondisi kesehatan dan risiko kematian bagi penduduk, namun berhadapan

dengan mulai melonggarnya penerapan protokol kesehatan meskipun pelaksanaan vaksinasi telah mulai meluas, menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi Sumatera Barat dalam melakukan *test, tracing dan treatment* (pengujian, pelacakan, dan penyembuhan).

Peningkatan akses kepada layanan dasar dan pemerataan layanan kesehatan, antar daerah masih menjadi persoalan yang membutuhkan upaya yang lebih giat. Relatif rendahnya usia harapan hidup penduduk Sumatera Barat memperlihatkan perlunya peningkatan layanan kesehatan untuk semua penduduk, baik bagi ibu, anak, remaja, pemuda dan lanjut usia. Perlindungan dan penanganan wabah penyakit tidak hanya dari penyakit tidak terduga seperti *COVID-19*, flu burung, namun juga berbagai penyakit terkait pola hidup yang tidak sehat, seperti penyakit jantung, diabetes, tuberculosis, juga HIV/AIDS. Pendekatan preventif melalui pola hidup bersih dan sehat dan kesehatan lingkungan yang belum sepenuhnya diterapkan masyarakat membutuhkan semakin giatnya promosi upaya kesehatan masyarakat.

Permasalahan gizi juga berdampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu masih tingginya prevalensi anak balita pendek (Stunting). Stunting adalah sebuah kondisi berdasarkan pengukuran Tinggi Badan menurut Umur seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan yang seusianya berdasarkan standar yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 (dua) tahun. Dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga menyebabkan gangguan pertumbuhan (pendek dan atau kurus) dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke.

Pada bidang pendidikan, sejumlah isu yang dapat diidentifikasi yaitu : meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi dipengaruhi oleh kebijakan daerah dalam manajemen pendidikan persekolahan pada jenjang Pendidikan Dasar sehingga membutuhkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi penduduk dan rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah di masa yang akan datang.

Arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan mengacu konsep merdeka belajar yang menghadirkan pendidikan bermutu tinggi yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pementapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan. Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat.

Meningkatnya kebutuhan lulusan pendidikan menengah yang terampil dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja, termasuk kesesuaiannya dengan kebutuhan di daerah membutuhkan pendirian SMK yang relevan dengan kebutuhan daerah dan dunia kerja. Persoalan yang perlu diantisipasi berkaitan dengan pendirian SMA/SMK berhadapan dengan penentuan pemilihan lokasi.

Isu penting dalam bidang pendidikan yaitu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru), peningkatan kuantitas, kualitas serta distribusi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tersebar luas di daerah.

Selain itu, struktur penduduk Sumatera Barat menunjukkan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif (15-64 thn) dibandingkan dengan penduduk berusia tidak produktif (< 15 dan > 64 thn) dan fenomena lainnya adalah semakin meningkatnya populasi lansia di Sumatera Barat.

2. Pembangunan Kebudayaan

Tata kehidupan masyarakat Minangkabau telah terpolakan dengan sebuah filosofi sosial yaitu *adaik basandi syara'-syara' basandi kitabullah*. Sebuah tatanan masyarakat yang mampu memadukan antara adat-budaya dengan nilai-nilai agama. Dalam sektor kepemimpinan, nilai ABS SBK tercermin dalam satu ungkapan *Tungku Tigo Sajarangan*, model kepemimpinan ini terdiri dari penghulu (*niniak mamak*), alim ulama, dan *cadiak pandai*. Demikian juga dengan infrastruktur dasar terbentuknya sebuah nagari, nagari yang ABS SBK ketika mampu menyediakan sarana dan prasarana adat dan agama berupa *balai- musajik*. Nilai-nilai ABS SBK dalam tatanan kehidupan sehari-hari terlihat dari perilaku dan tutur sapa ketika berinteraksi secara individu maupun secara sosial. Cepatnya perubahan dalam bidang teknologi informasi menyebabkan nilai-nilai di atas dari waktu-ke waktu tergerus oleh budaya asing sehingga generasi muda Sumatera Barat kurang mengetahui dan memahami nilai-nilai adat ABS SBK. Ada beberapa isu dalam pengimplementasian ABS SBK yaitu:

Pertama, perlunya peta jalan *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS SBK), peta jalan ini penting untuk dirumuskan agar pelaksanaan ABS SBK secara bertahap bisa diimplementasikan serta adanya keberlanjutan program antar satu pemimpin dengan pemimpin berikutnya.

Kedua, pengimplementasian ABS SBK sebagai pelajaran Muatan Kearifan Lokal yang sinergis antara Dikdas dan Dikmen. Pewarisan budaya pada usia dini penting agar dilakukan agar generasi Minangkabau mengetahui akar historis dan identitas kebudayaannya.

Ketiga, penguatan limbago adat berupa pelatihan terhadap pemangku adat sebagai sebuah upaya agar mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang komprehensif tentang ABS SBK.

Keempat, integrasi falsafah ABS SBK dalam proses pendidikan formal sehingga generasi muda milenial minang kurang memahami falsafah ABS SBK sehingga belum menggambarkan nilai ABS SBK.

Kelima, perlunya penguatan pembangunan keluarga terutama dalam menghadapi perubahan paradigma dalam membangun ketahanan keluarga terutama pada Generasi milenial dan generasi Z serta semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan ekonomi.

3. Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pembangunan sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dihadapkan dengan sejumlah isu-isu strategis. Pertama, gejolak harga komoditas pertanian sangat menentukan terhadap kesejahteraan petani yang tercermin dari nilai tukar petani. Nilai tukar petani pada tahun 2020 sedikit diatas 100, tepatnya 100,59. Namun antara 2016-2019 berada dibawah 100, yaitu dari 97,67 pada tahun 2016 hingga 95,99 pada tahun 2019. Nilai tukar petani yang rendah (< 100) terjadi pada subsektor hortikultura dan tanaman pangan, nilai tukar petani yang tinggi (>100) terjadi pada peternakan dan perikanan, perkebunan rakyat berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Begitupula dengan tingginya tingkat kemiskinan, kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah pedesaan dan lebih banyaknya rumah tangga pertanian yang miskin menimbulkan kompleksitas permasalahan yang menyertainya, sehingga isu-isu ini dapat direspon dalam kebijakan pembangunan secara umum, khususnya pada sektor pertanian.

Pembangunan sektor pertanian Sumatera Barat berhadapan pula dengan alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, baik untuk perumahan maupun komersial. Fragmentasi atau ukuran lahan yang semakin menyempit karena semakin panjang waris tanah akan mempengaruhi skala keekonomian usaha tani. Untuk itu, strategi pembangunan pertanian dapat diarahkan dengan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan melakukan diversifikasi kegiatan pertanian atau non-pertanian bagi petani berlahan sempit guna mengoptimalkan curahan waktunya. Peningkatan produktivitas melalui transformasi pertanian dari tanaman pangan ke campuran bahkan pertanian komersial terspesialisasi membutuhkan kebijakan yang bertahap dan terukur yang membutuhkan komitmen kuat dalam mengenalkan bibit unggul, pengolahan lahan secara produktif, dan penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian.

Peningkatan produktivitas maupun produksi tidak serta merta diiringi dengan peningkatan pendapatan petani. Berlimpahnya produksi justru menyebabkan jatuhnya harga beberapa komoditi pertanian. Kenaikan harga barang konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi dibanding harga hasil pertanian yang diterima petani juga menyumbang bagi rendahnya nilai tukar petani. Untuk meningkatkan secara signifikan harga yang diterima petani, peningkatan kualitas hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan agroindustri skala kecil pada sentra hasil-hasil pertanian membutuhkan perhatian yang memadai.

Kondisi infrastruktur irigasi dan daerah aliran sungai menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Banyaknya irigasi yang rusak membutuhkan biaya yang cukup besar untuk perbaikan, termasuk pula anggaran untuk perawatan dan operasional sehingga dapat berfungsi optimal. Keterlibatan tiga level pemerintahan, pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam pengelolaan irigasi membutuhkan peningkatan koordinasi dan sinergi antar tingkatan pemerintahan, termasuk antar organisasi perangkat daerah lingkup pertanian.

Sentra-sentra produksi pertanian belum dikelola dengan optimal dan secara jumlah masih belum mencukupi. Sentra-sentra produksi pertanian sangat bermanfaat sebagai *collective action* (tindakan bersama) untuk meningkatkan daya tawar petani dalam daya dukung transportasi, maupun keuntungan dalam biaya transportasi dan pemenuhan kebutuhan pasar.

Sektor pertanian berhadapan ketidakpastian berkaitan dengan lingkungan hidup, berupa bencana alam, perubahan iklim, maupun serangan hama. Mitigasi bencana alam dan pengembangan lahan pertanian semakin membutuhkan pertimbangan terhadap kerawanan bencana alam, termasuk banjir maupun longsor.

Sejumlah isu-isu penting terkait dengan produk pertanian yang juga perlu memperoleh perhatian, yaitu: (a) meningkatnya tuntutan kepada produk pertanian berkualitas, berstandar dan bersertifikasi, termasuk produk pertanian yang sehat dari pertanian organik, (b) mulai tumbuhnya pola konsumsi sehat yang meningkatkan permintaan terhadap produk-produk pertanian berupa buah-buahan, sayuran, tanaman obat. Diikuti pula perubahan gaya hidup yang meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian seperti kopi, teh, dan susu segar, (c) tumbuhnya angkatan kerja pedesaan yang harus disikapi dengan penciptaan agroindustri pedesaan, regenerasi petani menjadi petani muda atau milenial, dan pengembangan kewirausahaan pertanian di daerah pedesaan.

Sektor kelautan dan perikanan dihadapkan pada terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap terutama pada pelabuhan perikanan. Pengolahan hasil perikanan yang telah ada masih perlu ditingkatkan menjadi berbagai bentuk produk olahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Sejumlah isu lingkungan juga dihadapi oleh sektor kelautan dan perikanan diantaranya: Antisipasi terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu, Pencegahan terhadap kerusakan kawasan pesisir dan laut, pencemaran perairan umum seperti pada Danau Maninjau, Perkembangan usaha tambak udang vaname yang cukup cepat tanpa memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah dan sempadan pantai. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan produktifitas perikanan budidaya karena masih terbatasnya sarana usaha yang dimiliki nelayan dan pembudidaya ikan begitu juga dengan penguasaan teknologinya, sehingga yang menjadi permasalahan bukan produksinya akan tetapi keterbatasan sarana usaha dan teknologinya.

Sektor kehutanan akan semakin menguatnya tarik-menarik kepentingan sejumlah kawasan hutan lindung untuk tujuan konservasi atau tujuan ekonomi. Begitupula ancaman alih fungsi hutan untuk perkebunan, pertambangan dan galian, bahkan penebangan ilegal. Pada saat bersamaan, masyarakat miskin yang bermukim di sekitar hutan yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan penghidupan harus diarahkan dengan mengembangkan perhutanan sosial.

Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana sehingga perlu ditingkatkan ketersediaan, distribusi dan akses pangan agar tidak mengakibatkan kerawanan pangan. Sementara itu Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi pangan lokal yang beragam untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pendapatan kelompok pengolahan pangan lokal dan tuntutan masyarakat terhadap pangan segar yang sehat dan aman untuk dikonsumsi cukup tinggi, untuk itu perlu permasalahan pangan perlu dijadikan isu strategis daerah.

4. Berkembangnya Perdagangan Komersial dan Tumbuhnya Wirausahawan Muda

Perkembangan sektor perdagangan dan UMKM di Sumatera Barat berhadapan dengan tren tumbuh cepatnya perdagangan elektronik yang diperkirakan akan semakin meningkat dalam lima tahun ke depan. Keberadaan perdagangan elektronik melalui berbagai aplikasi belanja daring dengan berbagai strategi promosi dan pemasarannya dapat mengancam daya saing sektor perdagangan dan UMKM Sumatera Barat. Pada saat bersamaan juga dapat menjadi peluang bila dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk lokal. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi oleh pelaku usaha perdagangan termasuk UMKM dalam memasarkan produknya merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan daya saing. Terlebih bila mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi dengan mengembangkan aplikasi belanja daring lokal.

Akses permodalan dalam meningkatkan skala ekonomi usaha perdagangan dan UMKM masih menjadi prasyarat perlu. Namun akses permodalan saja tidak mencukupi bila belum didukung oleh peningkatan kemampuan manajerial melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan usaha.

Keterbatasan lapangan pekerjaan dan tumbuhnya semangat wirausaha di kalangan milenial merupakan isu penting untuk menumbuhkan dan mencetak memfasilitasi start up, wirausahawan milenial, women entrepreneur dalam berbagai jenis usaha termasuk ekonomi kreatif. Untuk itu, kebijakan untuk memfasilitasi kepada akses pengetahuan bersamaan, akses permodalan, serta pengembangan kolaborasi dapat menjadikan wirausahawan milenial ini menjadi pilar perekonomian di masa-masa mendatang.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kemitraan strategis di tingkat regional, perlu dilakukan kerjasama untuk mendorong ekonomi wilayah melalui kerjasama regional. Kerjasama diarahkan untuk hilirisasi industri agrikultur, pariwisata dan perikanan untuk menciptakan produk agrikultur dan industri proses yang bernilai tambah.

Salah satu kerjasama regional yang mempunyai nilai strategis adalah Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang meliputi kerjasama negara Indonesia (Provinsi di Pulau Sumatera), Malaysia dan Thailand. Diharapkan kerjasama ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dengan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

5. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor kepariwisataan bagi pembangunan daerah, beberapa isu strategis yang perlu ditindak lanjuti seperti:

1. Konsistensi penjabaran dan implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 – 2025.
2. Sinergi antara Pusat – Provinsi – Kabupaten dan stakeholder terkait dalam pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Pengembangan pariwisata berkualitas dan tematik sesuai dengan dinamika kepariwisataan *new normal*.
4. Efektifitas promosi dengan dukungan SDM dan produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing.

6. Infrastruktur yang handal dan Berkualitas

Pengembangan infrastruktur dan pengembangan konektivitas Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun ke depan berhadapan dengan sejumlah isu strategis. Penuntasan jalan tol menjadi strategis dalam membangun koneksi Sumatera Barat ke jaringan tol trans sumatera. Kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan dan akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan. Peningkatan infrastruktur ini dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil pertanian. Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata menjadi strategis dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata sekaligus menggerakkan sektor perekonomian.

Penuntasan pembangunan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi seperti Gedung Stadion Utama dan Gedung Kebudayaan serta penuntasan bangunan evakuasi sementara (shelter) pada daerah kabupaten /kota yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, antara lain;

Shelter Maligi (Kabupaten Pasaman Barat), Shelter Sasak Ranah Pasisia (Kabupaten Pasaman Barat), Shelter MTSs Darul Hikmah Sikilang (Kabupaten Pasaman Barat), Shelter SDN No. 12 Ulakan Tapakis (Kabupaten Padang Pariaman), menjadi penting untuk diselesaikan.

Isu penting lainnya yang perlu memperoleh perhatian, yaitu : (i) konektivitas, pemerataan antar daerah dan integrasi sistem transportasi, (ii) infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana dan pengembangan ketangguhan bencana berbasis komunitas, (iii) meningkatnya produksi timbunan sampah membutuhkan respon terhadap penambahan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan persampahan khususnya pengembangan pembangunan TPA Regional serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat. (iv) Penyediaan tenaga listrik untuk daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan serta kelompok masyarakat tidak mampu, (v) infrastruktur pelayanan dasar seperti pengembangan/pembangunan SPAM Regional dan IPLT Regional. (vi) pentaan bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis.

7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan pelayanan publik dan unsur birokrasi menghadapi tuntutan publik yang semakin meningkat terhadap tata kelola yang baik dalam pelaksanaan manajerial pemerintahan, dan tata kelola pelayanan publik.

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan organisasi sektor publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi meliputi usaha pembenahan pada delapan area perubahan yaitu area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan Sistem Manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbaikan terhadap delapan area tersebut masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan implementasi reformasi birokrasi yang ditandai dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi. Permasalahan yang harus menjadi perhatian terkait dengan implementasi reformasi birokrasi antara lain proses deregulasi kebijakan yang belum berjalan efektif, penyederhanaan birokrasi, penyusunan peta proses bisnis menyeluruh dan efektif, belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM, belum optimalnya implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan fungsi pengawasan yang masih belum optimal.

Salah satu hal mendasar terkait dengan tata kelola pemerintahan yakni bagaimana kinerja aparatur mampu menjawab secara cepat dan efektif pada setiap persoalan permasalahan pembangunan. Hingga saat ini sistem penggajian kepegawaian sangat berkait dengan kinerja aparatur pemerintah. Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan salah satu permasalahan utama yang harus dituntaskan penyelesaiannya dalam rangka optimalisasi penerapan manajemen ASN. Seringkali kita temukan keluhan ASN yang merasa penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya. Selain itu dengan pola pemberian TPP yang berlaku saat ini, dimana dilakukan penyeragaman penerimaan sesuai dengan tingkatan struktural, mengakibatkan munculkan jurang ketimpangan antara ASN yang memiliki beban kerja yang tinggi dan kompleksitas pelaksanaan tupoksi yang rumit dengan ASN yang memiliki beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tupoksi yang cenderung biasa saja.

Kondisi ini tidak sejalan dengan ketentuan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), menyatakan bahwa: (1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS, (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan. Selain itu, Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa : (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut serta memperhatikan agenda Korusupgah KPK dan Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kepmendagri ini secara khusus mengatur mekanisme penghitungan besaran TPP yang disusun berdasarkan Kelas Jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Dalam konteks pelaksanaannya di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebenarnya telah dapat memberlakukan pemberian TPP berdasarkan Kelas Jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, mengingat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal pelayanan publik, harapan masyarakat adalah memperoleh pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan yang bermutu dan berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat yang dapat diperbaiki secara terus menerus, dan pelayanan publik serta birokrasi akan menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat khususnya dalam tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik serta belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan dan investasi. Tata kelola pelayanan publik yang efisien dan efektif dalam perkembangan akan berkonsekuensi untuk memenuhi kebutuhan dalam transformasi digitalisasi dan otomatisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi yang lebih baik.

Tata Kelola Pelayanan publik juga mensyaratkan penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan dan investasi, pengendalian dan pengawasan bagi pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan berkualitas, dan untuk itu dibutuhkan kapasitas dan SDM Pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan publik secara elektronik, dan begitu pula pemanfaatan berbagai media termasuk kanal sosial media untuk keterbukaan informasi publik dalam kegiatan pemerintahan.

4.2.2. Isu Regional Antar Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan Konektivitas/Aksesibilitas jalan dan jembatan antar kabupaten kota dan provinsi tetangga.
- b. Peningkatan jalan dan jembatan lintas pantai barat Sumatera dari Kabupaten Pasaman Barat sampai Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Peningkatan jalan dan jembatan Padang Koto Gadang-Palembayan-Matur Agam.
- d. Peningkatan ruas jalan dan jembatan Palupuh-Pua gadih-Koto Tinggi.
- e. Peningkatan Jalan dan jembatan Teluk Bayur-Nipah-Purus & Purus BIM yang menghubungkan 2 simpul transportasi yaitu pelabuhan teluk Bayur dan BIM.
- f. Peningkatan jalan dan jembatan Simpang Duku (Ketaping) – Pariaman sebagai jalan alternatif dari Padang menuju Padang Pariaman/Agam/Pasaman/Pasaman Barat.
- g. Peningkatan Jalan dan jembatan Pasar Baru – Alahan Panjang – Tigo Lurah (Gerabak Data) – Kiliran Jao yang menghubungkan daerah Kab Pessel, Solok, Sijunjung.
- h. Pembangunan jalan dan jembatan Kambang – Muara Labuh yang menghubungkan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan =>(ctt: perlu dibicarakan pada rapat pansus dan pemda dikarenakan tidak sesuai RTRW dan melewati zona inti TNKS).
- i. Peningkatan Jalan dan jembatan Padang Simpang Aro- Lubuk Malako, Lubuk Malako-Abai Sangir dan Abai Sangir-Sungai Dareh.
- j. Peningkatan jalan dan jembatan Tapus - Muaro Sungai Lolo – Gelugur yang menghubungkan Kabupaten Pasaman menuju Kabupaten 50 Kota
- k. Rekonstruksi Jalan dan jembatan Batas Kota Payakumbuh-Sitangkai (melewati Lintau, Kabupaten Tanah Datar).

- l. Peningkatan Jalan dan jembatan Guguk Cino-Sawahlunto (Lapangan Segitiga), Batas Batusangkar (Bukit Gombak)-Guguk Cino, Baso-Batas Batusangkar (Balai Selasa) untuk pengembangan integrasi wisata sejarah tambang (Kota Sawahlunto) dengan wisata budaya (Istana Pagaruyung).
- m. Peningkatan Jalan dan jembatan Simpang SP II-Kantor Camat dan jalan Kantor Camat-Berkat, sebagai jalan penghubung daerah terluar di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- n. Pembangunan jalan dan jembatan Suliki-Bonjol.
- o. Pengembangan kawasan wisata geopark juga dapat diintegrasikan antara Geopark Sawahlunto dengan Kawasan Geopark Silokek (Kab. Sijunjung).
- p. Reaktivasi jalur kereta api Padang-Padang Pariaman-Padang Panjang-Ombilin (Tanah Datar)-Solok- Muara Kalaban (Sawahlunto).
- q. Penanganan terpadu danau prioritas nasional (Danau Maninjau dan Danau Singkarak).
- r. Mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana terminal type B.
- s. Mengupayakan penurunan angka kecelakaan lalu lintas, baik yang terjadi di Jalan Raya dan Perlintasan sebidang.
- t. Penyediaan infrastruktur pengendali daya rusak air berupa tanggul pengendali banjir, perkuatan tebing sungai, checkdam/ground sill, normalisasi sungai serta bangunan seawall/groind pengamanan garis pantai untuk wilayah sungai kewenangan provinsi yaitu Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yaitu Wilayah Sungai Masang-Pasaman (lintas Kabupaten Pasaman-Kab. Pasaman Barat-Kab. Agam-Kota Bukittinggi) dan Wilayah Sungai Silaut-Tarusan (lintas Kabupaten Kota Padang-Kab. Solok-Kab. Pesisir Selatan

4.2.3. Isu Regional Antar Provinsi yang berbatasan

- a. Sistem kompensasi hulu-hilir dalam pengelolaan DAS lintas provinsi perlu dibangun melalui kesepakatan antar Gubernur dan Bupati/Walikota lintas provinsi. Kompensasi dimaksudkan agar pengelolaan sumber daya hutan berbasis DAS dapat berjalan secara terpadu. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki sumber daya hutan (ekosistem DAS pada bagian hulu) yang mampu berkontribusi bagi pembangunan ekonomi pada provinsi/kabupaten/kota tetangga. Dengan mengembangkan pola kompensasi yang tepat, pengelolaan sumber daya hutan berbasis DAS di Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat berjalan optimal.
- b. Peningkatan Jalan dan jembatan Bungo Tanjung - Teluk Tapang yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara. Pemanfaatan bersama Pelabuhan Teluk Tapang untuk ekspor hasil perkebunan Provinsi Sumatera Utara bagian selatan khususnya kabupaten Mandahiling Natal.
- c. Peningkatan Jalan dan jembatan Rao Rokan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau, sebagai alternatif penghubung Jalan antar provinsi dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat menuju Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
- d. Peningkatan Jalan dan jembatan Pangkalan Koto Baru - Sialang Gelugur (Tanjung Jajaran) sebagai alternatif jalan penghubung lintas provinsi dari Kabupaten 50 Kota, Sumbar menuju Kab Rokan Hulu, Riau.
- e. Mendorong peningkatan peran Pulau Sumatera sebagai pendukung logistik komoditas pangan untuk Pulau Jawa.
- f. Peningkatan pengawasan dan pengamanan terhadap peredaran narkoba, *Human Trafficking* dan *Illegal Fishing*.
- g. Mendorong konektivitas Pulau Sumatera melalui pembangunan *feeder* (jalan penghubung) antara jalan lintas timur Pulau Sumatera (Selat Malaka), dan Jalan lintas barat Sumatera (Samudera Hindia), terutama pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.
- h. Mendukung pelaksanaan program tol laut dan angkutan perintis melalui pengembangan pelabuhan-pelabuhan di wilayah barat Sumatera, dan mendorong jalur pelayaran wilayah barat Pulau Sumatera sebagai jalur alternative pelayaran selain selat malaka.

- i. Mendorong penanggulangan bencana daerah yang mempunyai pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran penanggulangan bencana nasional
- j. Peningkatan jalan dan jembatan dari Rao Kabupaten Pasaman, Sumbar menuju Padang Lawas, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara untuk mendukung peningkatan ekonomi dan pariwisata.
- k. Peningkatan Jalan dan jembatan Simpang Dingin Kabupateßn Pasaman, Sumatera Barat menuju - Simpang Banyak Kabupaten Madina Sumatera Utara-
- l. Pembangunan jalan dan jembatan *exit* tol Kabupaten Dharmasraya masuk kedalam jalan tol Pekanbaru – Palembang di Kabupaten Kuansing, Riau
- m. Pembukaan Akses Jalan dan jembatan Buluh Kasok Kabupaten 50 Kota menuju ke Lipek Kain Kabupaten Kampar, Riau.
- n. Pembangunan Jalan dan jembatan Tanjung Balik Kabupaten 50 Kota menuju Balung, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
- o. Kerjasama Pembangunan Utilitas Wilayah berupa Jaringan Listrik, Jaringan Air Bersih, Drainase, Telekomunikasi, Persampahan, Air Limbah.
- p. Kerjasama dan sinkronisasi penetapan kawasan perbatasan.
- q. Kerjasama untuk penetapan fungsi komoditi yang akan diangkut dari Pelabuhan Teluk Tapang dan Pelabuhan Parlimbunan Ketek dimana fungsi pelabuhan tersebut sama-sama pelabuhan pengumpul.
- r. Mendorong reaktivasi dan konektivitas jalur kereta api Sumatera Barat dan Riau.
- s. Kerjasama pengelolaan Wilayah Sungai Lintas Provinsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Wilayah Sungai Natal-Batahan (lintas Prov. Sumbar-Sumut), Wilayah Sungai Rokan (Lintas Prov. Sumbar-Riau); Wilayah Sungai Kampar (Lintas Prov. Sumbar-Riau); Wilayah Sungai Inderagiri-Akuaman (lintas Prov. Sumbar-Riau); dan Wilayah Sungai Batang Hari (Lintas Prov. Sumbar-Jambi).

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021-2026 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

5.1 VISI RPJPD 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dan dapat dicapai oleh masyarakat Sumatera Barat pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini, prediksi untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai Sumatera Barat.

Memperhatikan kondisi umum daerah Provinsi Sumatera Barat, prediksi 20 (dua puluh) tahun mendatang dan berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat, maka visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2025 mendatang dapat diformulasikan secara ringkas sebagai berikut:

“MENJADI PROVINSI TERKEMUKA BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA YANG AGAMAIS PADA TAHUN 2025”

5.2. MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Misi pada dasarnya adalah merupakan kondisi yang harus dilaksanakan agar visi yang telah ditetapkan di atas dapat diwujudkan dengan memperhatikan kondisi objektif yang terdapat di daerah dewasa ini. Dengan kata lain misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan semula yakni:

1. Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi ”Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”,
2. Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik,
3. Mewujudkan sumber daya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi,
4. Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global,
5. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Misi untuk mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya yang berdasarkan falsafah: ”Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” adalah landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, yang dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga ke depan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Ciri-ciri tata kehidupan yang demikian antara lain adalah taat beragama, berakhlak mulia, jujur, peduli sesama manusia,

menerapkan tata kehidupan beragama dan berbudaya yang baik, rukun dengan agama lain, serta peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Tuhan.

Sasaran Pokok pada misi ini adalah Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, Meningkatkan pengelolaan dana zakat, infak dan wakaf secara profesional, Meningkatkan pelaksanaan Sistem Ekonomi Islam pada koperasi dan UKM, dan Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama, serta berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat).

Misi untuk mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

Sasaran pokok pada misi kedua ini adalah Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat, dan Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat.

Misi untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, amanah dan berdaya saing merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumber Daya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu pendidikan yang bermutu tinggi di semua strata, pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender.

Sasaran pokok misi ketiga ini adalah Meningkatkan kualitas manajemen ASN, Meningkatkan kompetensi ASN, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Memantapkan integrasi penerapan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (Revolusi industri), Meningkatkan keterpaduan sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan, Terlaksananya kerjasama pembangunan antar daerah, antar provinsi dan antar pelaku pembangunan, Meningkatkan inovasi penyelenggaraan Indeks Inovasi Daerah pemerintah daerah, Terselenggaranya kebijakan penyelenggaraan pembangunan berbasis riset, dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Misi untuk mewujudkan usaha ekonomi yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Kondisi tersebut diwujudkan melalui pengembangan ekonomi agribisnis (agroindustri) dan industri jasa. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta ketidakadilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas secara merata keseluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

Sasaran pokok untuk misi keempat adalah Meningkatkan ketahanan dan keamanan konsumsi pangan, Meningkatkan kualitas pangan masyarakat; meningkatnya ketahanan pangan, Meningkatkan usaha pertanian dengan sistem agribisnis, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Meningkatkan nilai

tambah produk pertanian, Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman, Terlaksananya peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha perikanan, Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah, Meningkatnya nilai ekspor Sumatera Barat, Meningkatnya investasi di Sumatera Barat, Meningkatnya pengelolaan sentra-sentra UMKM, Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, Terlaksananya KEK Mandeh dan Siberut Khusus Mentawai, Menurunnya jumlah penduduk miskin, Menurunnya tingkat pengangguran terbuka, Menurunkan daerah tertinggal, dan Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial

Misi untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan juga tidak kalah pentingnya untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara dan pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata ruang secara konsekuen, termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.

Sasaran pokok untuk misi ini adalah Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi, Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi, Meningkatnya keselamatan lalu lintas, Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan dan bangunan gedung, meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang, Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola kawasan hutan, Berkurangnya resiko bencana, Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana, Meningkatnya kualitas pengelolaan Sumber daya air yang lebih baik, Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut, Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan dan sumber daya kelautan

Melalui penataan lingkungan hidup, penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pemeliharaan/konservasi lingkungan hidup, dan mengembangkan kapasitas lingkungan hidup dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup. Termasuk dalam hal ini mengintegrasikan muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Berbasis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem.

Berlandaskan kemajuan pelaksanaan dan pencapaian dari RPJMD ke-3 maka pada periode RPJMD ke-4 lebih dititikberatkan pada upaya untuk mewujudkan kondisi Sumatera Barat yang maju dan agamais sesuai dengan visi yang telah ditetapkan terdahulu.

5.3. ARAH KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJPN) 2005-2025.

Prioritas Pembangunan Nasional yang dirumuskan ke dalam 3 Dimensi Pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, terdiri dari :

- a) Pendidikan,
- b) Kesehatan,
- c) Perumahan,
- d) Mental / Karakter.

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan terdiri dari :

- a) Kedaulatan Pangan,
- b) Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan,
- c) Kemaritiman dan Kelautan,
- d) Pariwisata dan Industri.

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, terdiri dari :

- a) Antar Kelompok Pendapatan,
- b) Antar Wilayah, Desa, pembangunan luar jawa dan kawasan timur.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”** Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai **Nawacita Kedua**, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu *Indonesia Maju*. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Selanjutnya visi dan misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

5.4. RPJMD PROVINSI TETANGGA

Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan tidak dapat berdiri sendiri dan perlu memperhatikan keselarasan pembangunan dengan Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan wilayah Sumatera Barat. Guna menjamin keselarasan tersebut perlu memperhatikan visi dan misi keempat provinsi tetangga tersebut:

1. RPJMD Provinsi Riau

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, dengan Visi “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”, dengan Misi 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya, 2) Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, 3) Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, 4) Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing, dan 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

2. RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, dengan Visi “Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”, dengan Misi 1) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, 2) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik, 3) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan, 4) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan, dan 5) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan.

3. RPJMD Provinsi Jambi (proses penyusunan)

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 masih dalam proses penyusunan, rumusan Visi dalam rancangan tersebut adalah Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera Jambi Tuntas 2021, dengan Misi Pembangunan 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamais dan berkesetaraan gender, 3) Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, 4) Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, 5) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, 6) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

4. RPJMD Provinsi Bengkulu

Rancangan RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 masih dalam proses pembahasan, rumusan Visi dalam rancangan tersebut adalah Terwujudnya Bengkulu maju, sejahtera, dan sejahtera, dengan misi: 1) Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. 2) Mewujudkan pengelolaan

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan. 3) Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik. 4) Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religius. 5) Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta kelompok disabilitas secara terpadu.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka arah kebijakan pembangunan Sumatera Barat sudah sejalan dan selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan empat provinsi tetangga. Dalam implementasinya program pembangunan yang dilakukan terutama pada daerah perbatasan perlu saling mendukung dan melengkapi di dalam pencapaian visi dan pelaksanaan misi di masing-masing provinsi yang secara umum diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dengan demikian koordinasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup ke empat provinsi perlu ditingkatkan dimasa yang akan datang dan dilakukan penyesuaian sesuai dengan arah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat.

5.5. RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

5.5.1. Visi

Visi Pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka Visi Provinsi Sumatera Barat untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Masyarakat Madani

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. **Pertumbuhan ekonomi**, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, **Keberlanjutan sosial**, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, **Keberlanjutan lingkungan**, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

5.5.2 Misi

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing

Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional.

Kualitas pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkreativitas, berinovasi dan berdaya saing. Era globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi.

Selain pendidikan berkualitas, misi pertama yang ingin mewujudkan sumber daya manusia yang terampil yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan akal/pikiran/ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna, sehingga mampu berdaya saing. Kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik.

Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat diyakini akan meningkat dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*

Falsafah budaya Minangkabau dalam *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal – vertikal maupun horizontal – horizontal.

Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pengumpulan tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling topang menopang membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

Nilai-nilai filosofis ABS SBK akan terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat jika nilai-nilai tersebut secara masif disosialisasikan serta diajarkan kepada seluruh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya nilai-nilai ABS SBK tersebut menjadi kurikulum lokal yang diajarkan di setiap jenjang Sekolah dasar dan Menengah.

3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pertanian dalam arti luas menjadi sektor strategis dalam pembangunan di Sumatera Barat karena beberapa alasan bahwa : a) sektor ini berperan dalam penyediaan suplai bahan pangan (tidak hanya untuk daerah Sumatera Barat tetapi juga provinsi tetangga), b) Potensi pengembangan agroindustri, didukung oleh kemampuan menghasilkan bahan baku yang dapat mendukung pengembangan dalam jangka panjang.

Fokus perhatian perlu diarahkan kepada upaya peningkatan efisiensi kegiatan produksi dan peningkatan nilai tambah (melalui pengembangan agroindustri) dengan mengaplikasikan pendekatan pembangunan kawasan, peningkatan aplikasi teknologi dan upaya membuka peluang pasar yang lebih besar. Dalam kaitan dengan aplikasi teknologi ini ada kecenderungan bahwa tingkat aplikasi teknologi oleh petani/pelaku usaha masih rendah sementara ada banyak produk teknologi yang sudah disediakan atau dihasilkan.

Dalam kaitan ini perlu menjadi perhatian upaya penyuluhan dan alih teknologi pertanian yang memungkinkan petani mengatasi permasalahan usaha dan memanfaatkan sumberdaya lokal.

4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.

Misi keempat ini bertujuan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan Industri Kecil di Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang

tergabung dalam *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.

5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang diharapkan menjadi industri dan salah satu basis pembangunan Sumatera Barat untuk lima tahun mendatang disamping pertanian. Dalam konteks inilah kita akan meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan.

Yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan. Pariwisata yang nyaman dan berkesan ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan berwisata yang dirasakan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Lima tahun ini kita melihat dan merasakan kemajuan ekonomi dari sektor pariwisata, untuk itu kita harus memperkuat melalui pembangunan pariwisata berbasis Pariwisata Halal dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), dengan pembenahan destinasi wisata baik kelas lokal, nasional dan internasional dengan cara meningkatkan atraksi, aksesibilitas dan amenitas di Destinasi Wisata sekaligus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terutama di wilayah-wilayah destinasi wisata.

6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek *non-fisik* (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi).

Penyediaan infrastruktur tersebut seperti sarana permukiman, kelistrikan, sanitasi, pendidikan, transportasi, persampahan dan lainnya merupakan infrastruktur yang wajib disediakan pemerintah Sumatera Barat. Pembangunan infrastruktur juga wajib memperhatikan penataan ruang, lingkungan dan *green energy* agar tercipta Sumatera Barat yang bersih, tertib dan teratur.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan ini akan bermanfaat optimal dan berkelanjutan jika di tengah potensi bencana alam geologis dan hidrometeorologis yang besar, dapat diantisipasi risikonya melalui usaha PRB (Pengurangan Risiko Bencana). Usaha PRB ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Karena itu penting sekali untuk dibangun Sumatera Barat yang tangguh bencana melalui kota/kabupaten serta desa/nagari tangguh bencana.

7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima adalah misi pemerintah Sumatera Barat dengan maksud untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan

kualitas pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian. Tentu tidak hanya sekedar mengubah model pelayanan publik dengan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (eGovernment), namun hanya baru sekedar menyediakan informasi tentang pelayanan publik. Oleh karena itu, sudah saatnya pelayanan publik tersebut ditingkatkan menjadi kegiatan eGovernment yang mengarah pada adanya interaksi dan transaksi dengan masyarakat terkait dengan layanan publik yang dibutuhkannya. Selama ini pemanfaatan eGovernment oleh SKPD yang ada belum sampai pada tahapan ini. Walaupun sudah diterbitkan Perda No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta didukung oleh Perda No.10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, implementasi kedua Perda ini perlu mendapat perhatian SKPD yang ada. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga akan mengupayakan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia ASN yang dapat memahami, melaksanakan dan mengembangkan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan perkembangan masyarakat Sumatera Barat yang terus berubah.

Untuk itu dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien yang berlandaskan dalam prinsip *good and clean government*. Penataan kelembagaan ini termasuk bagaimana menyesuaikan jenis, ukuran dan jumlah SKPD yang relevan dengan SDM dan keuangan yang tersedia untuk melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah agar efektif dan efisien. Tidak kalah pentingnya, upaya pencapaian misi ini adalah dengan cara peningkatan penerapan sistem nilai melalui pembentukan pola pikir dan budaya kerja serta integritas birokrasi, peningkatan kualitas pengawasan yang independen, profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta peningkatan kualitas kepatuhan, transparansi dan profesionalisme aparatur.

Begitu juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berkualitas ini harus dimulai dengan mengintegrasikan semua program dan kegiatan ke dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang terintegrasi ke dalam sistem yang berbasis pada SPBE. Karena bagaimana pun, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dapat dilihat dari proses perencanaan dan penganggaran serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Hal lain yang penting adalah bagaimana melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mengawasi bagaimana pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sehingga ada sinergitas dalam rangka memperbaiki kelemahan dalam upaya melaksanakan misi ini.

Di samping itu, ke depannya tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja yang berorientasi hasil atau *outcome*. Bahkan dalam perkembangannya, pemerintah daerah juga harus bisa mengembangkan orientasi kinerja ini pada manfaat dan dampak kepada kualitas hidup yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi proses perencanaan berbasis program yang mendukung pencapaian visi dan misi serta program untuk menyediakan standar pelayanan minimum yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan lainnya, maka arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman dan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Keselarasan Visi Dan Misi RPJPD 2005 – 2025 Dan RPJMD 2021 – 2026

RPJPD 2005 - 2025	RPJMD 2021 - 2026
VISI	
Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025	Terwujudnya Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan
MISI	
1. Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi "Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS SBK
2. Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik	Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas
3. Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi	Misi 1 : Meningkatkan SDM yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
4. Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global	Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
5. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Tabel 5.2
Keselarasan Visi Dan Misi RPJMN 2020 – 2024 Dan RPJMD 2021 – 2026

RPJMN 2020 - 2024	RPJMD 2021 - 2026
VISI	
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan
MISI	
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 1 : Meningkatkan SDM yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

RPJMN 2020 - 2024	RPJMD 2021 - 2026
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan	Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS SBK
6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga	Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS SBK
8. Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

5.5.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021-2026

5.5.3.1. Tujuan Umum

Tujuan pembangunan secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergambar dari pendapatan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan merata, penurunan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran pembangunan ekonomi secara makro dalam RPJMD provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat dikemukakan melalui proyeksi sejumlah indikator ekonomi makro dan indikator kesejahteraan sosial. Untuk indikator ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Baseline		Outlook	Target ¹				
		2019	2020		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,01	-1,60	3,44	3,40	4,57	4,60	4,70	4,84
2	PDRB ADHK ² Per Kapita (Rp. Juta)	31,65	30,82	31,45	32,00	32,97	34,09	35,29	36,58
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	45,21	44,03	46,09	48,29	50,60	53,69	56,13	59,30
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,38	6,88	6,70	6,60	6,45	6,31	6,13	5,94
5	IPM	72,39	72,38	72,56	72,74	73,23	73,70	74,16	74,60
	- Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,31	69,47	69,62	69,80	69,98	70,17	70,35	70,53
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,01	14,02	14,04	14,05	14,06	14,08	14,09	14,10

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Baseline		Outlook	Target ¹				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,92	8,99	9,09	9,18	9,28	9,38	9,47	9,57
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	10.925	10.733	10.865	10.916	11.108	11.342	11.592	11.863
6	Tingkat Kemiskinan (%) ²	6,42	6,56	6,40	6,28	6,16	6,03	5,90	5,77
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	348,22	364,79	358,76	356,45	353,68	350,62	347,27	343,62
8	Gini Rasio	0,306	0,301	0,299	0,298	0,296	0,293	0,289	0,284
9	Indeks Williamson	0,274	0,312	0,311	0,310	0,309	0,308	0,307	0,306

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

¹ Target 2022 – 2026 didasarkan pada kondisi pandemi Covid-19 pada triwulan 1 Tahun 2021

² Tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin dan Gini Ratio tahun 2020 menggunakan data bulan September 2020 untuk melihat efek pandemi Covid-19

5.5.3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menurut Misi

Dalam memberikan arah kebijakan dan saran pokok RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 pada periode keempat ini, visi dan misi Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 selanjutnya dijabarkan dalam tujuan sasaran pembangunan jangka menengah. Penyusunan dan perumusan tujuan dan sasaran ini merupakan operasionalisasi dari visi dan misi pembangunan jangka menengah sehingga menjadikan kebijakan-kebijakan pembangunan lebih terarah dalam implementasinya.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Sumatera Barat 2021-2026 yang mengemban 7 (tujuh) misi dijabarkan menjadi 7 (tujuh) tujuan dan 27 sasaran, yaitu :

1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.

Misi pertama ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai meliputi: (i) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, (ii) menurunnya prevalensi stunting, (iii) meningkatnya kualitas Pendidikan, dan (iv) meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat.

2. Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK)

Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari : (i) meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK, (ii) meningkatnya budaya Literasi, dan (iii) meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3. Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Misi ketiga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sasaran yang ingin dicapai, yaitu : (i) meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan), (iii) meningkatnya pendapatan petani hutan.

4. Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.

Misi keempat ini bertujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing. Terdapat 6 Sasaran yang akan dicapai pada misi ini, yaitu : (i) Sumatera Barat Sebagai pusat perdagangan; (ii) terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera, (iii) terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor, (iv) meningkatnya pertumbuhan investasi, (v) Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah, dan (vi) meningkatnya peran ekonomi digital

5. Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

Tujuan yang diupayakan dari misi 5 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran dari misi ini meliputi : (i) meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat, (ii) meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat.

6. Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Tujuan yang akan dicapai dari misi 6 yaitu terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata. Misi ini diuraikan menjadi 5 sasaran,, yaitu : (i) meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, (ii) meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, (iii) mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, (iv) meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian, (vi) meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan

7. Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Misi ketujuh ini memiliki tujuan berupa terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Selanjutnya dirinci 3 sasaran yaitu : (i) terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, (ii) meningkatnya kapabilitas birokrasi, (iii) meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tujuan dan sasaran tersebut juga dilengkapi dengan indikator kinerja dan target sebagai alat dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja pembangunan. Indikator kinerja ini selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi alat ukur pencapaian dan keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Selanjutnya indikator dan target kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 untuk setiap misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai disajikan pada Tabel 5.4

TABEL 5.4
Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing											
Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,62	69,80	69,98	70,17	70,35	70,53	70,53	- Dinas Kesehatan - RSAM - RSUD M. Natsir - RSJ. Hb. Saanin - RSUD Pariaman - Dispora - Dinas Sosial
IK : Indeks Pembangunan manusia (IPM)	2. Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	21,45	18,44	15,43	14,00	12,50	10,60	10,60	- Dinas Kesehatan - Dinas Bina Marga, Cipta karya, Tata Ruang - Dinas Perkimtan - Dinas Sosial - Dinas Pendidikan - DP3AP2KB - Dinas Pangan - DPMD - Dinas Pertanian - Dinas Peternakan - DKP - Dinas Kominfo - Dinas Perindag
	3. Meningkatnya kualitas Pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,09	9,18	9,28	9,38	9,47	9,57	9,57	- Dinas Pendidikan
		2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,04	14,05	14,06	14,08	14,09	14,10	14,10	- Dinas Pendidikan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
	4. Meningkatnya daya saing masyarakat	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas (Sakernas BPS)	%	49,60	49,70	49,75	49,80	49,85	49,90	49,90	<ul style="list-style-type: none"> - Disnakertrans - Dinas Pendidikan - Dinas Koperasi dan UKM - Dinas Perindag - Balitbang - DPMD - Dinas Sosial
Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah											
Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat IK : Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	Indeks	62,78	62,80	62,80	62,80	62,90	62,90	62,90	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Kesbangpol - Satpol PP - Biro Kesra - Dinas Sosial - Dinas Kebudayaan
	2. Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	Indeks	11,05	13	14	15	16	17	17	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kearsipan & Perpustakaan - Dinas Kebudayaan - Dinas Pendidikan
	3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan keluarga	Indeks	57,22	59,30	61,38	63,46	65,54	67,62	67,62	-DP3AP2KB
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,09	94,11	94,25	94,60	95,00	95,08	95,08	-DP3AP2KB
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59,09	59,12	60,01	61,20	61,75	62,42	62,42	- DP3AP2KB

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	66,25	- DP3AP2KB
Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan											
Meningkatkan kesejahteraan petani IK: Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	1. Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	100,79	100,99	100,19	101,40	101,60	101,80	101,80	- Dinas Pangan - Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura - Dinas Peternakan dan Keswan - Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	%	102,95	103,47	103,98	104,50	105,03	105,55	105,55	- Dinas Pangan - Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura - Dinas Peternakan dan Keswan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Biro Perekonomian
		Pendapatan pembudidaya ikan	Rp. Jt	45.800	47.175	48.590	50.048	51.549	53.096	53.096	Dinas Kelautan dan Perikanan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
		Pendapatan nelayan	Rp. Jt	39.995	40.795	41.611	42.443	43.292	44.158	44.158	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pendapatan Peternak	Rp. Jt	45.592	47.872	50.265	52.779	55.418	58.199	58.199	Dinas Peternakan dan Keswan
		Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	%	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
	2. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Indeks ketahanan Pangan	Indeks	78,64	79,13	80,21	81,60	82,05	83,22	83,22	- Dinas Pangan - Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura - Dinas Peternakan dan Keswan - Dinas Kelautan dan Perikanan
	3. Meningkatnya pendapatan Petani Hutan	Peningkatan pendapatan petani hutan	%	5	5	5	5	5	5	5	- Dinas Kehutanan
	Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital										
Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang	1. Sumatera barat sebagai pusat perdagangan	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	%	-1,14	-1,10	-1,00	1,00	1,01	1,02	1,02	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi dan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
tangguh dan berdaya saing IK: - Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) - Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)											UKM
	2. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	sentra	358	368	379	390	401	413	413	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3. Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi	%	1,94	2,14	2,18	2,23	2,28	2,33	2,33	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	%	1,7	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2	4,2	- Dinas Koperasi dan UKM
	4. Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor	Jumlah enterpreneur baru tercipta	orang	97.633	112.594	130.482	150.658	173.711	197.703	197.703	- Dinas Pangan - Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura - Dinas Peternakan dan Keswan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Koperasi dan UKM - Dinas perindustrian dan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
											perdagangan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat - Dinas Pariwisata - Disnakertrans - Dispora - DP3AP2KB
	5. Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase peningkatan Investasi di provinsi	%	6,00	6,00	8,00	9,50	10,50	11,50	11,50	- DPMPTSP
	6. Meningkatnya peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital	%	6,44	6,54	6,70	7,10	7,25	7,65	7,65	- Dinas Koperasi dan UKM - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Kominfo dan Statistik
Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan											
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif IK: Persentase	1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)	%	1,24	1,24	1,24	1,25	1,26	1,27	1,27	- Dinas Pariwisata

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2. Meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase kontribusi ekraf pada PDRB	%	6,02	6,02	6,02	6,10	6,18	6,26	6,26	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi dan UKM - Dinas Kebudayaan
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan											
Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata IK: Indeks Kinerja Infrastruktur	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	Rasio konektivitas	Rasio	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695	0,695	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perhubungan - Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Kemantapan Jalan	%	73,92	75,00	77,00	79,00	81,00	82,00	82,00	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	2. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indeks ketahanan daerah	Indeks	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66	<ul style="list-style-type: none"> - BPBD
	3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks kualitas Lingkungan hidup	Indeks	76,94	77,43	77,95	78,41	78,81	79,25	79,25	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kehutanan - Dinas Perkimtan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
											<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas ESDM - Dinas Pehubungan - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
	4. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	Akses air minum	%	80,04	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan tata Ruang - Dinas Perkimtan - Dinas Kesehatan - Dinas Lingkungan Hidup
		Akses sanitasi layak	%	81,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan tata Ruang - Dinas Perkimtan - Dinas Kesehatan - Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
		Presentase bangunan strategis terbangun	%	38,05	40,22	55,55	66,67	83,33	100	100	- Dinas Bina Marga, Cipta karya dan tata Ruang
		Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	68,80	70,36	71,92	73,48	75,04	76,60	76,60	- Dinas Sumber Daya air dan bina Konstruksi
		Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	%	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	59,78	- Dinas Sumber Daya air dan bina Konstruksi
		Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,55	73,55	- Dinas Sumber Daya air dan bina Konstruksi
	5. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	84,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00	- Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan tata Ruang
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas											
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	BB (76,50)	BB (77,00)	BB (78,00)	BB (78,50)	BB (79,00)	A (80,01)	A (80,01)	- Biro Organisasi - Bappeda - Inspektorat
		Nilai EPPD	Skor	3,0000	3,0010	3,0020	3,0030	3,0040	3,0050	3,0050	- Biro Pemerintahan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
IK : indeks reformasi birokrasi		Opini laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	- BPKAD - Inspektorat
		Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	%	35,47	37,84	38,25	39,56	40,75	41,00	41,00	- Bapenda
	2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE	Indeks	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,60	- Diskominfo
		Indeks Profesionalitas ASN	indeks	71,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	82,00	- BKD - BPSDM
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks persepsi kualitas pelayanan	Indeks	84	85	86	87	88	89	89	- Biro Organisasi

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MENURUT TUJUAN DAN SASARAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan melalui tujuh Misi. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan terhadap aspek yang memberikan dampak besar dan mempunyai daya ungkit untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Strategi umum yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan pada semua aspek kehidupan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima manfaat atau tujuan pembangunan yang dilakukan.
- b. Mendayagunakan nilai-nilai gotong royong dan kerjasama yang melibatkan semua komponen masyarakat baik di daerah maupun di rantau dengan pendekatan pembangunan terpadu yang bersifat holistik dan integratif.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- d. Menekan kesenjangan pembangunan antar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan hasilnya baik di bidang infrastruktur maupun di bidang sosial dan ekonomi.
- e. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan guna menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Selanjutnya arah kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran pada masing-masing Misi dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya saing			
Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian covid-19.	Meningkatkan kemampuan SDM dan fasilitas dan laboratorium kesehatan dalam melakukan pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19.
		2. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan ibu dan bayi berkesinambungan di fasilitas layanan kesehatan 2. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan 3. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan postnatal bagi ibu dan bayi baru lahir, termasuk imunisasi 4. Penguatan dan pengembangan pelaksanaan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) 5. Perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) 6. Peningkatan cakupan ASI eksklusif 7. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil 8. Penguatan puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk dan wasting 9. Penguatan sistem surveilans gizi 10. Revitalisasi posyandu, posbindu, UKS, dan UKBM lainnya untuk edukasi kesehatan, skrining, dan deteksi dini kasus 11. Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 12. Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan termasuk laboratorium kesehatan 13. Penguatan kemampuan RS Khusus 14. Penguatan pelayanan kesehatan primer 15. Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM 16. Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat 17. Peningkatan akses air bersih dan perilaku higienis 18. Peningkatan pelayanan dasar anak terlantar, disabilitas terlantar dan lanjut usia terlantar di dalam panti 19. Penguatan sistem laboratorium kesehatan daerah 20. Penguatan <i>reporting</i> dan <i>real time surveillance</i> untuk penyakit berpotensi wabah dan penyakit baru muncul (<i>new emerging diseases</i>) 21. Membangun sistem kewaspadaan dini. 22. Meningkatkan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan untuk respon cepat

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			23. Revitalisasi peralatan kesehatan rumah sakit milik provinsi 24. Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru
		3. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan	1. perencanaan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan provinsi 2. Pengembangan Mutu dan kompetensi teknis sumberdaya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi
		4. Penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	1. Memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan, 2. Menjalankan program promotif preventif melalui pemberdayaan masyarakat, terutama untuk meningkatkan penggunaan obat rasional. 3. Memastikan ketersediaan alat kesehatan dan makanan minum
		5. Menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan	1. Mendorong kegiatan Germas, kampanye makan ikan, makan buah dan sayur, serta kampanye diet seimbang (isi piringku). 2. Meningkatkan metode/cara promosi kesehatan, melalui TV <i>spot</i> , <i>leaflets</i> , <i>booklet</i> , media sosial, dan sebagainya 3. Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, UKS dan lingkungan kerja sehat. 4. Promosi pembudayaan hidup sehat 5. Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari komponen APBD, khususnya terkait Upaya Kesehatan Masyarakat 6. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan aktifitas kebugaran 7. Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai adaptasi kebiasaan baru
		6. Pemenuhan Standar pelayanan minimal bidang kesehatan	1. Memprioritaskan Pemenuhan SPM bidang kesehatan 2. Optimalisasi layanan kesehatan di RSUD dan Rumah Sakit Khusus Pemprov
	2. Menurunnya prevalensi stunting	1. Intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan	1. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) 2. Pemberian suplementasi tablet tambah darah 3. Promosi dan konseling pemberian ASI eksklusif 4. Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA) 5. Penatalaksanaan gizi buruk 6. Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang 7. Pemantauan dan promosi pertumbuhan 8. Pemasyarakatan Gemar Makan Ikan

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 bulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian suplementasi tablet tambah darah 2. Penatalaksanaan gizi buruk 3. Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang 4. Pemantauan dan promosi pertumbuhan 5. Fasilitasi pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1.000 Hari pertama Kelahiran (HPK)
		3. Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi 2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan Kesehatan 3. Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak 4. Peningkatan akses pangan bergizi 5. Peningkatan pelayanan dasar anak terlantar di dalam panti 6. Penyediaan PSU Kawasan Permukiman yang aman nyaman berkelanjutan 7. Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan; 8. Pemberdayaan kelompok-kelompok pengolahan pangan lokal; 9. Advokasi, edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 10. Advokasi dan sosialisasi konsumsi pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) 11. Penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen 12. Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga
		4. Peningkatan Komitmen Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan tentang percepatan pencegahan stunting ditingkat Provinsi 2. Pelaksanaan Rembuk stunting pada tahapan perencanaan Program/Kegiatan 3. Mobilisasi sumber daya dan mendorong partisipasi secara aktif dalam percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat serta dunia usaha, universitas/akademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/kelompok masyarakat lainnya
		5. Komunikasi Perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan 2. Memperkuat komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran melalui pengembangan pesan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK, wanita usia subur, dan remaja putri untuk

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti Posyandu, kelas pengasuhan, kelas ibu hamil, pusat pembelajaran keluarga, kunjungan rumah, konseling pra-pernikahan, konseling reproduksi remaja</p> <p>3. Memastikan advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan</p> <p>4. Mengembangkan kapasitas pengelola program, dengan memberikan pengetahuan dan meningkatkan kapasitas bagi penyelenggara kegiatan komunikasi perubahan perilaku yang efektif dan efisien</p>
		6. Pelaksanaan aksi Konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas melalui penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat	<p>1. Memastikan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi gizi prioritas</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan program untuk memastikan sasaran prioritas (Rumah Tangga 1.000 HPK) memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan</p> <p>3. Memperkuat koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintah, sampai dengan desa untuk memastikan keselarasan penyediaan dan penyelenggaraan pelaksanaan program</p> <p>4. Membagi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan untuk menyelenggarakan konvergensi</p>
	3. Meningkatnya kualitas pendidikan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	<p>1. Memprioritaskan pemenuhan SPM bidang pendidikan</p> <p>2. Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen</p>
		Optimalisasi pengelolaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan	<p>1. Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru SMA dan SMK</p> <p>2. Melaksanakan penambahan ruang kelas baru SMA dan SMK</p> <p>3. Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMA, dan SMK</p> <p>4. Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus</p> <p>5. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah SMA dan SMK</p> <p>6. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah pendidikan khusus (SLB).</p> <p>7. Pembangunan sekolah baru di zona perbatasan</p> <p>8. Revitalisasi SMK sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja</p> <p>9. Penguatan karakter melalui pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa.</p> <p>10. Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan terutama yang berada pada daerah 3T secara bertahap.</p> <p>10. Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri</p>

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pengembangan Kurikulum berbasis kearifan lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau di sekolah 2. Mendorong Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
		Peningkatan pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota 2. Melaksanakan Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota 3. Peningkatan kualitas kompetensi guru
		Pelaksanaan Pengendalian perizinan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat 2. Melaksanakan pembinaan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
		Penguatan Pengembangan bahasa dan sastra	Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah
	4. Meningkatnya daya saing masyarakat	1. Meningkatkan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan Vokasi, penguatan BLK dan lembaga produktivitas.	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing melalui pelatihan vokasi, penguatan BLK dan Peningkatan Lembaga produktivitas.
		2. Mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan 2. Peningkatan kopetensi lulusan SMK yang mampu diterima di dunia usaha dan dunia industri
		3. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas Pengawasan Ketenagakerjaan	Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
		4. Meningkatkan suasana Ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial yang harmonis	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
		5. Meningkatkan hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan sebagai naskah akademik atau rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi (<i>research based policy</i>). 2 Pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang berfokus pada hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan dengan melibatkan mahasiswa dan dosen perguruan tinggi dan swasta

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		6. Optimalisasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pelaksanaan Inovasi dan Teknologi melalui Penelitian, Pengembangan dan perekayasaan, serta Diseminasi Hasil Kelitbangan, dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif.
		7. Optimalisasi perekayasaan Inovasi dan Teknologi	Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan perekayasaan melalui kerjasama dengan Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi
		8. Optimalisasi uji coba, penerapan rancang bangun dan diseminasi hasil kelitbangan	Penyelenggaraan uji coba dan rancang bangun teknologi dan diseminasi untuk optimalisasi pemanfaatan hasil perekayasaan
		9. Optimalisasi Pengembangan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif.
		10. Penciptaan iklim investasi	1. Kemudahan dan fasilitas investasi serta pengembangan layanan investasi berbasis teknologi informasi 2. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha 3. penyusunan regulasi peningkatan layanan investasi yang lebih efisien, transparan dan akuntabel 4. Peningkatan upaya promosi investasi
Misi 2 : Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS SBK			
Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan dan pengembangan bina spiritual masyarakat sebagai landasan utama dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan	1. Meningkatkan fasilitasi dalam upaya revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan keagamaan 2. Meningkatkan pemberdayaan sarana keagamaan sebagai sentra aktifitas, ekonomi, sosial dan kemasyarakatan 3. Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga keagamaan dalam menunjang pembangunan daerah 4. Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan, rumah ibadah , lembaga pendidikan agama
		2. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi kebijakan dalam penigkatan Kesejahteraan Rakyat	1. Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial 2. Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan. 3. Optimalisasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
		3. Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran perda	Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan pemberdayaan PPNS
		4. Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait	Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		5. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat	Peningkatan keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kab/Kota
		6. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur serta peningkatan kuantitas dan kualitas Aparatur	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur serta kuantitas dan kualitas aparatur
		7. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Peningkatan keaktifan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran di Kab/Kota
		8. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat	Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial
		9. Penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat	Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penanganan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek)

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		10. Penguatan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai -nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
		11. Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya konflik antar umat beragama	Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama
		12. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya	Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya
		13. Terwujudnya Ketahanan sosial budaya masyarakat yang berladaskan ABS SBK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Peta jalan ABS SBK 2. Pembentukan kurikulum yang bermuatan kearifan lokal sinergis antara Dikdas dan dikmen. 3. Menyelenggarakan sekolah adat/pelatihan pemangku adat. 4. Meningkatkan kehidupan harmoni, gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan ditengah-tengah masyarakat. 5. Peningkatan kualitas kompetensi guru
		14. Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Kebudayaan masyarakat dan Pembinaan lembaga adat yang Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 4. Pembinaan kepada budayawan secara reguler dan komprehensif 5. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional
		15. Meningkatkan Pengembangan Kesenian Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembinaan kepada seniman secara reguler dan komprehensif
		16. Meningkatkan Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
		17. Meningkatkan Pelestarian Dan Pengelolaan Warisan Budaya (Cagar Budaya)	Penetapan dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, serta Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
		18. Meningkatkan Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Provinsi
	2. Meningkatnya Budaya Literasi	1. Penguatan Pengembangan bahasa dan sastra	Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah
		2. Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Budaya Gemar Membaca Tingkat Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	3. Menjadikan Perpustakaan, Museum dan Taman Budaya sebagai pusat Pendidikan dan wisata Ipteks	1. Meningkatkan fungsi Perpustakaan, Museum dan Taman Budaya. 2. Meningkatkan pelayanan Perpustakaan, Museum dan Taman Budaya berbasis digital 3. Mengintegrasikan bangunan Perpustakaan, Museum dan Taman Budaya.
		1. Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
		2. Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal. 2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		3. Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	1. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		5. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		6. Peningkatan perlindungan hak perempuan,	1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		7. peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 3. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		8. Optimalisasi Pengelolaan Sistem data gender dan Anak untuk penyusunan perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
		9. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya	1. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
		10. Peningkatan perlindungan khusus anak,	1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			
Tujuan Meningkatkan kesejahteraan petani	1. Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan	1. Optimalisasi Kelembagaan bidang pertanian (BUMD pertanian)	Mendorong pengelolaan dan pembentukan BUMD profesional bidang Pertanian
		2. Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan	1. Meningkatkan penyediaan dan benih bersertifikat pada pelaku utama dalam berusaha tani 2. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan 3. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani 4. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian 5. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) 6. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM petani dan petugas 8. Pengawasan pupuk bersubsidi

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			9. Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura 10. meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada 11. Rehabilitasi lahan dan air 12. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jalan usaha tani 13. Meningkatkan produksi padi dan jagung serta beberapa komunitas ternak 14. Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan
		3. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna	1. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian, peternakan dan perikanan 2. Mendorong tumbuh petani milenial 3. Penerapan Inovasi dan Teknologi Pertanian
		4. Mengembangkan Usaha - Usaha Ekonomi Berbasis kelautan dan Perikanan	1. Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan sarana lainnya serta pengawasan perikanan
		5. Pengembangan <i>system value chain</i>	1. Meningkatkan akses permodalan 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan tani 3. Peningkatan pengawasan Agro input 4. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas pertanian, peternakan dan perikanan 5. Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian ,perkebunan dan Perikanan 6. Meminimalisir resiko kerugian usaha tani 7. Pengintegrasian program pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lingkungan hidup
		6. Fasilitasi pembangunan industri hilir pertanian, perikanan, peternakan dan hasil kehutanan	1. Memfasilitasi pembangunan industri benih tanaman pangan dan perkebunan 2. Memfasilitasi pembangunan pasca panen tanaman pangan, perkebunan dan produk kehutanan non kayu 3. Memfasilitasi pembangunan pemrosesan hasil perikanan dan peternakan
	2. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	1. Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok;	1. Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau. 2. Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis
		2. Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat;	Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat;

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pangan lokal;	1. Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan; 2. Pemberdayaan kelompok-kelompok pengolahan pangan lokal;
		4. Pemberdayaan daerah rentan pangan	Pemberdayaan kelompok-kelompok tani/KWT di Nagari/desa/kelurahan yang terindikasi rentan pangan untuk mengembangkan potensinya agar mandiri pangan;
		5. Peningkatan keamanan pangan	1. Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen; 2. Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar ditingkat produsen dan konsumen 3. Pengawasan peredaran sarana pertanian 4. Pengendalian kesehatan dan keamanan produk hewan 5. Pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan
	3. Meningkatnya pendapatan petani hutan	1. Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan sosial dalam bentuk HTR, HN dan HKm	1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 2. Peningkatan kapasitas SDM petani hutan
		2. Peningkatan Kinerja perusahaan dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan	1. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mekanisme perhutanan sosial 2. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 3. Perbenihan Tanaman Hutan 4. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 5. Penegakan hukum dalam pengamanan dan perlindungan hutan Peningkatan pengelolaan kawasan hutan pada tingkat tapak /pengembangan KPH
Misi 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi berbasis Digital			
Tujuan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	1. Sumatera Barat Sebagai pusat perdagangan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan	1. Penataan,pembinaan dan pengembangan pasar 2. Pengembangan sistem pedagang digital 3. Penguatan kelembagaan perdagangan
		2. Peningkatan perlindungan konsumen dan Pengawasan perdagangan, dan standardisasi mutu komoditi potensial	1. Peningkatan pengawasan barang dan jasa yang beredar 2. Peningkatan kuantitas penyelesaian sengketa konsumen 3. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan konsumen 4. Peningkatan pengawasan komoditi potensial, sarana dan prasarana pengujian komoditi potensial
		3. Pengembangan pasar ekspor	1. Peningkatan nilai tambah dan produk ekspor 2. Penguatan kerjasama perdagangan regional dan internasional

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah	1. Peningkatan daya saing produk IKM	1. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan produk 2. Peningkatan kualitas, kontinuitas produksi, dan sertifikasi produk 3. Peningkatan promosi dan pemasaran produk 4. Peningkatan kapasitas pelaku IKM
		2. Pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah	1. Peningkatan sarana dan prasarana untuk sentra IKM 2. Peningkatan Kerjasama pengembangan sentra IKM 3. Pendampingan dan fasilitasi sentra IKM
	3. Terwujudnya Pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera	1. Peningkatan kapasitas UMKM dan wirausaha	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku Koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital 2. Fasilitasi penumbuhan <i>millenial enterpreuner</i> dan <i>Women enterpreuner</i> 3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan usaha, promosi dan pemasaran produk UMKM 4. Peningkatan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk UMKM 5. Pengembangan usaha dan diversifikasi produk UMKM 6. Peningkatan Kemitraan UMKM dengan pengusaha besar 7. Fasilitasi penerbitan sertifikat hak paten terhadap produk UMKM 8. Fasilitasi pelatihan berkelanjutan
		1. Peningkatan akses pembiayaan koperasi dan UMKM	1. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui KUR, ZISWAF dan skema pembiayaan lainnya 2. Membentuk Lembaga waqaf pemandu 3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang waqaf 4. Meningkatkan kompetensi nadzir dalam bidang usaha bisnis secara profesional 5. Memperkuat sinergi antar pengelola zakat, infaq, waqaf dan sedekah
		2. Penguatan kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UMKM	Penguatan kelembagaan pengawasan Koperasi dan UMKM
	4. Terciptanya 100.000 <i>entrepreneur</i> dari berbagai sektor	1. Penumbuhan dan Peningkatan SDM <i>entrepreneur</i>	1. Penumbuhan dan Peningkatan kualitas SDM <i>entrepreneur</i> 2. Peningkatan pemberdayaan dan pendampingan <i>entrepreneur</i>
		2. Peningkatan fasilitasi <i>entrepreneur</i>	1. Peningkatan kolaborasi melalui sinergisitas dalam rangka pemberdayaan <i>entrepreneur</i> 2. Peningkatan fasilitasi akses pembiayaan dan akses pasar bagi <i>entrepreneur</i> 3. Peningkatan inovasi, branding dan sertifikasi produk 4. Peningkatan digitalisasi produk bagi pelaku <i>entrepreneur</i>

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5. Meningkatnya pertumbuhan investasi	1. Peningkatan layanan investasi dan penanaman modal	1. Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3. Pengembangan Layanan Investasi Yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha 4. Pembentukan produk hukum daerah / regulasi daerah untuk kemudahan perizinan dan kemudahan berinvestasi
		2. Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat	1. Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi 2. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Peningkatan Upaya Promosi Investasi
	6. Meningkatnya peran ekonomi digital	Meningkatkan kontribusi ekonomi digital	1. Peningkatan industri kecil dan menengah, UMKM yang berkompeten dan melek teknologi digital 2. Penumbuhan dan pengembangan <i>marketplace</i> 3. Fasilitasi penumbuhan pelaku <i>e-commerce</i>
Misi 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata			
Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	1. Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata berbasis aglomerasi	1. Membangun industri pariwisata melalui 1 (satu) destinasi wisata berkelas internasional dan 19 (sembilan belas) destinasi wisata unggulan 2. Memfasilitasi peningkatan destinasi wisata yang memenuhi aspek 3A (Amenitas, Aksesibilitas, Atraksi) dan 2P (Pemasaran dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah) 3. Mengembangkan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya dan buatan (Agrowisata, Ekowisata, Geopark, OCMH, Desa Wisata, dan Wisata Halal) 4. Memfasilitasi pengusulan KEK pariwisata 5. Mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata 6. Mengintensifkan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Environment Sustainability)
		2. Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata	1. Meningkatkan sinergi promosi di bidang pariwisata dengan sektor terkait di dalam dan luar negeri 2. Meningkatkan efektivitas dan kualitas pemasaran dan promosi pariwisata melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
		3. Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia Pariwisata	1. Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan 2. Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi SDM pelaku wisata

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	1. Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif	1. Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat 2. Mendorong pemanfaatan dan perlindungan HKI produk ekraf 3. Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
		2. Meningkatkan kerjasama dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	1. Memperkuat kemitraan kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam pengembangan ekonomi kreatif 2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif.
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	1. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	1. Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi 2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan Provinsi
		2. Mengintegrasikan sistem transportasi antar intermoda	3. Pengembangan dan pengawasan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi, kawasan aglomerasi perkotaan, dan pelayanan angkutan perintis pada daerah – daerah terpencil 4. Dukungan keterpaduan transportasi antar moda (bandara, Pelabuhan, Terminal dan Stasiun Kereta Api) 5. Pengembangan jaringan pelayanan angkutan 6. Penataan sistem perijinan transportasi 7. Perbaikan sarana dan prasarana terminal Tipe B 8. Pengendalian angka kecelakaan melalui pengawasan, penyediaan sarana fasilitas keselamatan dan peningkatan kesadaran masyarakat 9. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
		3. Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis	10. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan baru dan jalan lama termasuk lintas pantai barat sumatera barat, sesuai master plan yang telah ada dan interkoneksi dan koneksi antar daerah 11. Dukungan akses transportasi ke sentra produksi pertanian dan perikanan, destinasi wisata, industri das UMKM
		4. Pemenuhan kebutuhan energi dan insfrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah	12. Peningkatan Penyediaan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan 13. Peningkatkan tata kelola ketenagalistrikan yang aman, andal dan akrab lingkungan
		5. Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional	14. Meningkatnya dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan aparaturnya dan masyarakat dalam mitigasi bencana	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mitigasi bencana
		2. Meningkatkan kualitas kelembagaan aparaturnya dan masyarakat dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana	1. Pengembangan nagari dan desa siaga bencana 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat
		3. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1. Penyediaan dan perluasan informasi kebencanaan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
		4. Peningkatan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana	1. Penanganan bencana banjir, longsor, gempa bumi, yang berefek pada infrastruktur jalan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Pemulihan daerah pasca bencana
	3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	1. Peningkatan Pelestarian dan pengelolaan lingkungan	1. Pemulihan media lingkungan yang rusak/tercemar 2. Pencegahan terjadinya degradasi lahan/sumber daya alam 3. Pengendalian dan pengurangan beban pencemaran 4. Penanganan limbah B3 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan 6. Rehabilitasi Hutan dan lahan 7. Peningkatan upaya Adaptasi mitigasi perubahan iklim 8. Optimalisasi penanganan sampah sebagai sumber energi alternatif (<i>waste to energy</i>) 9. Optimalisasi pengurangan sampah dan meningkatkan efektifitas pengolahan sampah 10. Penanganan terpadu untuk penyelamatan danau prioritas nasional (Danau Maninjau dan Danau Singkarak) 11. Meningkatkan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat 12. Meningkatkan pengawasan pemakaian air tanah pada Zona Konservasi
		2. Pengarusutamaan perencanaan dan implementasi pembangunan rendah karbon	1. Peningkatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan pendukung penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2. Rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan dan perlindungan hutan 3. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 4. Pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			5 Pengelolaan sampah dan limbah yang akrab lingkungan 6 Peningkatan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi 7 Peningkatan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi
		3. Implementasi valuasi ekonomi lingkungan	Pengembangan ekosistem esensial dan kawasan konservasi
		4. Peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman	1. Penyediaan PSU Kawasan Permukiman yang aman nyaman berkelanjutan 2. Fasilitasi penyediaan perumahan layak huni 3. Mengurangi luasan kawasan kumuh
		5. Peningkatan pemanfaatan Energi Terbarukan pada Bauran energi daerah	1. peningkatan ketersediaan infrastruktur pemanfaatan Energi Terbarukan 2. Peningkatan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi
	4. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	1. Melaksanakan pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Gedung Strategis dan Penataan Bangunan	1. Pembangunan gedung untuk kepentingan strategis 2. Penataan bangunan dan lingkungan 3. Pembangunan SPAM Regional 4. Pembangunan dan pengelolaan TPA Regional 5. Pembangunan Drainase primer 6. Pembangunan IPLT Regional 7. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan konflik pertanahan 8. Penyediaan PSU Kawasan Permukiman yang aman nyaman berkelanjutan 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		2. Pembangunan Infrastruktur Pertanian	1. Pengembangan dan rehabilitasi Irigasi dan pengairan kewenangan provinsi serta peningkatan pengelolaan sistem irigasi partisipatif 2. Peningkatan daya tampung air (pembangunan embung)
	5. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	1. Tersusunnya Rencana Tata Ruang yang berkualitas	1. Penyusunan RTR Provinsi dan fasilitasi penyusunan RRTR Kab/Kota 2. Pembinaan perencanaan tata ruang
		2. Terlaksananya sinkronisasi rencana pembangunan dengan program penataan ruang	1. Pengendalian pemanfaatan ruang 2. Penyusunan regulasi RTR tingkat provinsi (Perda, Pergub) 3. Penyebaran informasi perencanaan tata ruang 4. Peningkatan pengelolaan penggunaan tanah yang sesuai dengan RTRW

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas			
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan peran dari Perangkat Daerah yang menjadi pengampu pelaksanaan 8 area perubahan (area penataan organisasi, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan, penguatan ketatalaksanaan, manajemen perubahan dan peraturan perundang-undangan dan penataan Sumber Daya Aparatur).
		2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi) sesuai Peraturan yang berlaku
		3. Menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas.	Mengoptimalkan Pelaksanaan Musrenbang
		4. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial	1. Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan. 2. Mengoptimalkan Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman indikator sesuai bidang urusan
		5. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	1. Peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah 2. Penerapan Kerangka Belanja Kegiatan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 3. Pemanfaatan data & informasi yang valid, mudah diakses dan mutakhir berbasis Satu Data
		6. Peningkatan kuantitas APIP	Meningkatkan pemenuhan Rasio Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui penerimaan CPNS, Impassing, dan pengangkatan pejabat fungsional baru.
		7. Peningkatan kualitas APIP	Meningkatkan kompetensi APIP melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi dan Kerjasama Pengawasan
		8. Optimalisasi SPIP	Meningkatkan Implementasi SPIP melalui pendampingan dan asistensi

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		9. Meningkatkan peran dan layanan APIP	Peningkatan kegiatan pengawasan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah
		10. Meningkatkan pelaksanaan TLHP internal dan eksternal	Peningkatan pembahasan TLHP internal dan eksternal APIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara periodik
		11. Meningkatkan validasi data keuangan dan aset daerah	Peningkatan efektifitas dan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi Perda/Pergub/Kebijakan
		12. Meningkatkan Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah	Peningkatan pengawasan aset daerah
		13. Meningkatkan asistensi dan rekonsinasi data anggaran	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
		14. Meningkatkan Pelatihan/bimtek pengelolaan keuangan dan aset daerah	Sosialisasi peraturan/kebijakan pengelolaan keuangan daerah
		15. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal	Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dan stakeholder terkait
		16. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas daerah
		17. Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis bagi ASN yang berkelanjutan
		18. Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan	Mengoptimalkan pelaksanaan rekonsiliasi belanja langsung
		19. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan	Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
		20. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Otonomi Daerah terkait fasilitasi admintrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan serta evaluasi dan penyelenggaran pemerintahan 2. Fasilitasi Kerjasama Daerah terkait fasilitasi kerjasama antar pemerintah , fasilitasi kerjasama badan usaha/swasta dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		21. Mewujudkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Mewujudkan PAD untuk mendukung tata kelola pemerintahan 3. Melaksanakan pengawasan terintegrasi antar SKPD berbasis teknologi informasi dan komunikasi 4. Melaksanakan pemberian penghargaan dan pembinaan kepada ASN 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi 6. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang mendukung tata kelola birokrasi yang bebas KKN
		22. Meningkatkan layanan perizinan dan investasi di daerah	Penataan produk hukum daerah / regulasi daerah untuk kemudahan perizinan dan kemudahan berinvestasi
		23. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akurasi data objek pajak kendaraan 2. Menyesuaikan besaran nilai jual kendaraan bermotor 3. Penegakan hukum terhadap regulasi pemungutan pajak daerah 4. Mendorong <i>stackholder</i> dalam evaluasi terhadap regulasi terkait pemungutan pajak daerah 5. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) 6. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi 7. Meningkatkan kinerja BUMD melalui pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) 8. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yg masih <i>idle</i> dan berpotensi sebagai sumber penerimaan 9. Meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh OPD Dinas/Instansi yang berkaitan dengan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 10. Konversi Bank Nagari menjadi bank Syariah
	2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi	1. Pembentukan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Melaksanakan penataan Organisasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tepat fungsi, tepat proses dan akuntabel yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Optimalisasi Pelaksanaan Sistem Merit	1. Menetapkan dokumen analisis Jabatan dan analisis Beban Kerja 2. Menetapkan Dokumen Kelas Jabatan 3. Menetapkan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan
		3. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatkan penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
		4. Peningkatan Koordinasi dalam pengelolaan SPBE	Meningkatkan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah
		5. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang berkualitas	1. Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral 2. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral berdasarkan Prinsip Satu Data 3. Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		6. Peningkatan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Pembangunan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah mendukung SPBE
		7. Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Kepegawaian Daerah	1. Peningkatan profesionalitas ASN melalui penerapan Sistem Merit dengan aspek perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan karir, promosi dan mutasi. Manajemen Kinerja, Penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan serta Sistem Informasi 2. Penguatan implementasi manajemen ASN melalui penerapan manajemen talenta
		8. Peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mewujudkan ASN dan stakeholder yang profesionalitas dan berkompeten	1. Pengembangan Kompetensi Teknis 2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
		9. Terwujudnya kinerja birokrasi	1. Mewujudkan transformasi pemerintah daerah menuju <i>e-Government</i> 2. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi 3. Meningkatkan produktivitas kerja ASN 4. Meningkatkan kualitas dan capaian perencanaan

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1 Terwujudnya kualitas pelayanan Publik	1. Meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik terkait dengan kebijakan dan proses pelayanan publik 2. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berdasarkan elektronik dan teknologi informasi 3. Meningkatkan inovasi kerja ASN di SKPD
		2 Meningkatkan Ketatalaksanaan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan penataan proses bisnis unit kerja pelayanan 2. Meningkatkan penataan Standar Pelayanan Publik 3. Meningkatkan Penataan SOP Pelayanan Publik

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan				
Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2023)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengelolaan BUMD yang sudah ada dan pendirian BUMD profesional di bidang pertanian 2. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian 3. Dukungan pengembangan pertanian organik 4. Fasilitasi mendorong penumbuhan petani milenial 5. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mekanisme perhutanan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengelolaan BUMD yang sudah ada dan pengelolaan BUMD profesional di bidang pertanian 2. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian 3. Dukungan pengembangan pertanian organik pada kawasan sentra pertanian dan pemanfaatan hasil pertanian organik 4. Fasilitasi mendorong penumbuhan petani milenial 5. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mekanisme perhutanan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengelolaan BUMD yang sudah ada dan pengelolaan BUMD profesional di bidang pertanian 2. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian 3. Dukungan pengembangan pertanian organik pada kawasan sentra pertanian dan pemanfaatan hasil pertanian organik 4. Fasilitasi mendorong penumbuhan petani milenial 5. Optimalisasi PAD dari sektor kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengelolaan BUMD yang sudah ada dan pengelolaan BUMD profesional di bidang pertanian 2. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian 3. Fasilitasi mendorong tumbuh petani milenial 4. Fasilitasi mendorong penumbuhan petani milenial 5. Optimalisasi PAD dari sektor kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengelolaan BUMD yang sudah ada dan pengelolaan BUMD profesional di bidang pertanian 2. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian 3. Fasilitasi mendorong penumbuhan petani milenial 4. Optimalisasi PAD dari sektor kehutanan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar dalam negeri dan pasar digital. 2. Penguatan perlindungan konsumen, dan standarisasi mutu komoditi potensial 3. Peningkatan kualitas layanan, diversifikasi komoditi ekspor dan negara tujuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar dalam negeri dan pasar digital. 2. Penguatan perlindungan konsumen, dan standarisasi mutu komoditi potensial 3. Peningkatan kualitas layanan, diversifikasi komoditi ekspor dan negara tujuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar dalam negeri dan pasar digital. 2. Penguatan perlindungan konsumen, dan standarisasi mutu komoditi potensial 3. Peningkatan kualitas layanan, diversifikasi komoditi ekspor dan negara tujuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar dalam negeri dan pasar digital. 2. Penguatan perlindungan konsumen, dan standarisasi mutu komoditi potensial 3. Peningkatan kualitas layanan, diversifikasi komoditi ekspor dan negara tujuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar dalam negeri dan pasar digital. 2. Penguatan perlindungan konsumen, dan standarisasi mutu komoditi potensial 3. Peningkatan kualitas layanan, diversifikasi komoditi ekspor dan negara tujuan

Arah Kebijakan				
Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2023)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)
4. Fasilitas Penumbuhan Wirausahaan Pemula 5. Dukungan sarana dan prasarana untuk sentra IKM 6. Penguatan SDM pelaku IKM dan UMKM 7. Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi	4. Fasilitas Penumbuhan Wirausahaan Pemula 5. Dukungan sarana dan prasarana untuk sentra IKM 6. Penguatan SDM pelaku IKM dan UMKM 7. Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi	4. Fasilitas Penumbuhan Wirausahaan Pemula 5. Dukungan sarana dan prasarana untuk sentra IKM 6. Penguatan SDM pelaku IKM dan UMKM 7. Pemberian Kemudahan dan fasilitas Investasi	4. Fasilitas Penumbuhan Wirausahaan Pemula 5. Dukungan sarana dan prasarana untuk sentra IKM 6. Penguatan SDM pelaku IKM dan UMKM 7. Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi	4. Fasilitas Penumbuhan Wirausahaan Pemula 5. Terbentuknya Sentra IKM skala Nasional 6. Penguatan SDM pelaku IKM dan UMKM 7. Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi
1. Membangun industri pariwisata melalui 1 (satu) destinasi wisata berkelas internasional dan 19 (sembilan belas) destinasi wisata unggulan 2. Memfasilitasi peningkatan destinasi wisata yang memenuhi aspek 3A (Amenitas, Aksesibilitas, Aktraksi) dan 2P (Pemasaran dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah) 3. Mengembangkan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya dan buatan (Agrowisata, Ekowisata, Geopark, OCMH, Desa Wisata, dan Wisata Halal) 4. Memfasilitasi pengusulan KEK Pariwisata 5. Mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata 6. Mengintensifkan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (<i>Cleanliness, Healthy, Safety, Environment Sustainability</i>)	1. Membangun industri pariwisata melalui 1 (satu) destinasi wisata berkelas internasional dan 19 (sembilan belas) destinasi wisata unggulan 2. Memfasilitasi peningkatan destinasi wisata yang memenuhi aspek 3A (Amenitas, Aksesibilitas, Aktraksi) dan 2P (Pemasaran dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah) 3. Mengembangkan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya dan buatan (Agrowisata, Ekowisata, Geopark, OCMH, Desa Wisata, dan Wisata Halal) 4. Memfasilitasi pengusulan KEK pariwisata 5. Mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata 6. Mengintensifkan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (<i>Cleanliness, Healthy, Safety, Environment Sustainability</i>) 7. Meningkatkan sinergi promosi di bidang pariwisata dan	1. Membangun industri pariwisata melalui 1 (satu) destinasi wisata berkelas internasional dan 19 (sembilan belas) destinasi wisata unggulan 2. Memfasilitasi peningkatan destinasi wisata yang memenuhi aspek 3A (Amenitas, Aksesibilitas, Aktraksi) dan 2P (Pemasaran dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah) 3. Mengembangkan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya dan buatan (Agrowisata, Ekowisata, Geopark, OCMH, Desa Wisata, dan Wisata Halal) 4. Mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata 5. Mengintensifkan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (<i>Cleanliness, Healthy, Safety, Environment Sustainability</i>)	1. Membangun industri pariwisata melalui 1 (satu) destinasi wisata berkelas internasional dan 19 (sembilan belas) destinasi wisata unggulan 2. Memfasilitasi peningkatan destinasi wisata yang memenuhi aspek 3A (Amenitas, Aksesibilitas, Aktraksi) dan 2P (Pemasaran dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah) 3. Mengembangkan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya dan buatan (Agrowisata, Ekowisata, Geopark, OCMH, Desa Wisata, dan Wisata Halal) 4. Meningkatkan sinergi promosi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan sektor terkait di dalam dan luar negeri 5. Meningkatkan efektivitas dan kualitas pemasaran dan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui	1. Membangun industri pariwisata melalui 1 (satu) destinasi wisata berkelas internasional dan 19 (sembilan belas) destinasi wisata unggulan 2. Memfasilitasi peningkatan destinasi wisata yang memenuhi aspek 3A (Amenitas, Aksesibilitas, Aktraksi) dan 2P (Pemasaran dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah) 3. Mengembangkan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya dan buatan (Agrowisata, Ekowisata, Geopark, OCMH, Desa Wisata, dan Wisata Halal) 4. Meningkatkan sinergi promosi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan sektor terkait di dalam dan luar negeri 5. Meningkatkan efektivitas dan kualitas pemasaran dan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui

Arah Kebijakan				
Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2023)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)
<p><i>Safety, Environment Sustainability</i>)</p> <p>7. Meningkatkan sinergi promosi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan sektor terkait di dalam dan luar negeri</p> <p>8. Meningkatkan efektivitas dan kualitas pemasaran dan promosi pariwisata melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi</p> <p>9. Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata</p> <p>10. Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif</p> <p>11. Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat melalui pemanfaatan dan perlindungan HKI produk ekraf</p> <p>12. Memperkuat kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam pengembangan ekonomi kreatif</p>	<p>ekonomi kreatif dengan sektor terkait di dalam dan luar negeri</p> <p>8. Meningkatkan efektivitas dan kualitas pemasaran dan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi</p> <p>9. Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata</p> <p>10. Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif</p> <p>11. Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat melalui pemanfaatan dan perlindungan HKI produk ekraf</p> <p>12. Memperkuat kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam pengembangan ekonomi kreatif</p>	<p>6. Meningkatkan sinergi promosi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan sektor terkait di dalam dan luar negeri</p> <p>7. Meningkatkan efektivitas dan kualitas pemasaran dan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi</p> <p>8. Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata</p> <p>9. Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif</p> <p>10. Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat melalui pemanfaatan dan perlindungan HKI produk ekraf</p> <p>11. Memperkuat kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam pengembangan ekonomi kreatif</p>	<p>pemanfaatan teknologi dan sistem informasi</p> <p>6. Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata</p> <p>7. Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif</p> <p>8. Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat melalui pemanfaatan dan perlindungan HKI produk ekraf</p> <p>9. Memperkuat kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam pengembangan ekonomi kreatif</p>	<p>dalam pengembangan Kepariwisata</p> <p>7. Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif</p> <p>8. Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat melalui pemanfaatan dan perlindungan HKI produk ekraf</p> <p>9. Memperkuat kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam pengembangan ekonomi kreatif</p>
<p>1. Melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</p>	<p>1. Melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</p>	<p>1. Mewujudkan transformasi pemerintah daerah menuju <i>e-Government</i></p> <p>2. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan berbasis</p>	<p>1. Meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik terkait dengan kebijakan dan proses pelayanan publik</p>	<p>1. Meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik terkait dengan kebijakan dan proses pelayanan publik</p>

Arah Kebijakan				
Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2023)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)
2. Mewujudkan PAD untuk mendukung tata kelola pemerintahan 3. Melaksanakan pengawasan terintegrasi antar SKPD berbasis teknologi informasi dan komunikasi 4. Melaksanakan pemberian penghargaan dan pembinaan kepada ASN 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi 6. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang mendukung tata kelola birokrasi yang bebas KKN 7. Mewujudkan transformasi pemerintah daerah menuju <i>e-Government</i> 8. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi 9. Meningkatkan produktivitas kerja ASN 10. Meningkatkan kualitas dan capaian perencanaan 11. Meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik	2. Mewujudkan PAD untuk mendukung tata kelola pemerintahan 3. Melaksanakan pengawasan terintegrasi antar SKPD berbasis teknologi informasi dan komunikasi 4. Melaksanakan pemberian penghargaan dan pembinaan kepada ASN 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi 6. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang mendukung tata kelola birokrasi yang bebas KKN 7. Mewujudkan transformasi pemerintah daerah menuju <i>e-Government</i> 8. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi 9. Meningkatkan produktivitas kerja ASN Meningkatkan kualitas dan capaian perencanaan	teknologi informasi dan komunikasi 3. Meningkatkan produktivitas kerja ASN 4. Meningkatkan kualitas dan capaian perencanaan 5. Meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik terkait dengan kebijakan dan proses pelayanan publik 6. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berdasarkan elektronik dan teknologi informasi 7. Meningkatkan inovasi kerja ASN di SKPD 8. Meningkatkan kompetensi ASN sesuai dengan tugas dan wewenangnya	2. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berdasarkan elektronik dan teknologi informasi 3. Meningkatkan inovasi kerja ASN di SKPD Meningkatkan kompetensi ASN sesuai dengan tugas dan wewenangnya	2. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berdasarkan elektronik dan teknologi informasi 3. Meningkatkan inovasi kerja ASN di SKPD Meningkatkan kompetensi ASN sesuai dengan tugas dan wewenangnya

Arah Kebijakan				
Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2023)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)
terkait dengan kebijakan dan proses pelayanan publik 12. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berdasarkan elektronik dan teknologi informasi 13. Meningkatkan inovasi kerja ASN di SKPD Meningkatkan kompetensi ASN sesuai dengan tugas dan wewenangnya				
1. Memfasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 2. Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial 3. Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja,	1. Memfasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 2. Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial 3. Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi	1. Memfasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 2. Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial 3. Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi	1. Memfasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 2. Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial 3. Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi	1. Memfasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 2. Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial 3. Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi

Arah Kebijakan				
Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2023)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)
<p>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan.</p> <p>4. Optimalisasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)</p> <p>5. Pengelolaan Kebudayaan masyarakat dan Pembinaan lembaga adat yang Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provi</p> <p>6. Perumusan dan penyusunan peta jalan implementasi ABS SBK.</p> <p>7. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>8. Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</p> <p>9. Penetapan dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, serta Penerbitan Izin Membawa Cagar</p>	<p>dan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan.</p> <p>4. Perumusan dan penyusunan peta jalan implementasi ABS SBK.</p> <p>5. Penetapan dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, serta Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi</p> <p>6. Pengelolaan Museum Provinsi</p> <p>7. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan pemberdayaan PPNS</p> <p>8. Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p> <p>9. Peningkatan keaktifan penyelenggaraan</p>	<p>dan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan.</p> <p>4. Penetapan dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, serta Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi</p> <p>5. Pengelolaan Museum Provinsi</p> <p>6. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan pemberdayaan PPNS</p> <p>7. Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p> <p>8. Peningkatan keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kab/Kota</p> <p>9. Peningkatan keaktifan penyelenggaraan</p>	<p>dan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan.</p> <p>4. Penetapan dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, serta Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi</p> <p>5. Pengelolaan Museum Provinsi</p> <p>6. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan pemberdayaan PPNS</p> <p>7. Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p> <p>8. Peningkatan keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kab/Kota</p> <p>9. Peningkatan keaktifan penyelenggaraan</p>	<p>dan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan.</p> <p>4. Penetapan dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, serta Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi</p> <p>5. Pengelolaan Museum Provinsi</p> <p>6. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan pemberdayaan PPNS</p> <p>7. Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p> <p>8. Peningkatan keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kab/Kota</p> <p>9. Peningkatan keaktifan penyelenggaraan</p>

Arah Kebijakan				
Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2023)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)
Budaya Ke Luar Daerah Provinsi 10. Pengelolaan Museum Provinsi 11. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan pemberdayaan PPNS 12. Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 13. Peningkatan keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kab/Kota 14. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur serta kuantitas dan kualitas aparatur 15. Peningkatan keaktifan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran di Kab/Kota 16. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial 17. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),	perlindungan masyarakat di Kab/Kota 10. Peningkatan keaktifan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran di Kab/Kota 11. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial 12. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penangan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan	pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran di Kab/Kota 10. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial 11. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penangan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek) 12. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan	pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran di Kab/Kota 10. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial 11. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penangan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek) 12. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan	pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran di Kab/Kota 10. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial 11. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penangan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek) 12. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan

Arah Kebijakan				
Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2023)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)
<p>Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penanganan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek)</p> <p>18. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur</p> <p>19. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur</p>	<p>Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek)</p> <p>13. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur</p> <p>14. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya</p> <p>15. Meningkatkan kehidupan harmoni, gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan ditengah-tengah masyarakat.</p> <p>16. Peningkatan kualitas kompetensi guru</p> <p>17. Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah</p> <p>18. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>19. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>20. Meningkatkan fungsi Perpustakaan, Museum dan Taman Budaya.</p> <p>21. Meningkatkan pelayanan Perpustakaan, Museum dan Taman Budaya berbasis digital</p>	<p>mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur</p> <p>13. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya</p> <p>14. Meningkatkan kehidupan harmoni, gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan ditengah-tengah masyarakat.</p> <p>15. Peningkatan kualitas kompetensi guru</p> <p>16. Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah</p> <p>17. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</p>	<p>mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur</p> <p>13. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya</p> <p>14. Meningkatkan kehidupan harmoni, gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan ditengah-tengah masyarakat.</p> <p>15. Peningkatan kualitas kompetensi guru</p> <p>16. Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah</p> <p>17. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</p>	<p>mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur</p> <p>13. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya</p> <p>14. Meningkatkan kehidupan harmoni, gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan ditengah-tengah masyarakat.</p> <p>15. Peningkatan kualitas kompetensi guru</p> <p>16. Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah</p> <p>17. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</p>

Arah Kebijakan				
Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2023)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)
20. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya 21. Membuat Peta jalan ABS SBK 22. Pembentukan kurikulum yang bermuatan kearifan lokal sinergis antara Dikdas dan dikmen. 23. Menyelenggarakan sekolah adat/pelatihan pemangku adat. 24. Meningkatkan kehidupan harmoni, gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan ditengah-tengah masyarakat. 25. Peningkatan kualitas kompetensi guru 26. Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah 27. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 28. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 29. Meningkatkan fungsi Perpustakaan, Museum dan Taman Budaya. 30. Meningkatkan pelayanan Perpustakaan, Museum dan	22. Menjadikan Perpustakaan, Museum dan Taman Budaya sebagai pusat Pendidikan dan wisata ipteks			

Arah Kebijakan				
Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2023)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)
<p>Taman Budaya berbasis digital</p> <p>31. Mengintegrasikan bangunan Perpustakaan, Museum dan Taman Budaya.</p> <p>32. Menjadikan Perpustakaan, Museum dan Taman Budaya sebagai pusat Pendidikan dan wisata Ipteks.</p>				
<p>1. Dukungan transportasi untuk produksi pertanian dan perikanan</p> <p>2. Dukungan lanjutan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan</p> <p>3. Dukungan lanjutan pembangunan gedung strategis provinsi</p> <p>4. Dukungan proyek strategis nasional</p> <p>5. Optimalisasi penanganan sampah</p> <p>6. Peningkatan mitigasi kesiapsiagaan bencana</p> <p>7. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pemanfaatan energi terbarukan</p> <p>8. Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan</p>	<p>1. Dukungan lanjutan pembangunan gedung strategis provinsi</p> <p>2. Dukungan lanjutan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan</p> <p>3. Dukungan Lanjutan proyek strategis nasional</p> <p>4. Dukungan infrastruktur transportasi mendukung destinasi wisata</p> <p>5. Peningkatan mitigasi kesiapsiagaan bencana</p> <p>6. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pemanfaatan energi terbarukan</p> <p>7. Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan</p> <p>8. Pengembangan dan rehabilitasi irigasi dan pengairan</p>	<p>1. Dukungan lanjutan pembangunan gedung strategis provinsi</p> <p>2. Dukungan lanjutan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan</p> <p>3. Dukungan Lanjutan proyek strategis nasional</p> <p>4. Peningkatan mitigasi kesiapsiagaan bencana</p> <p>5. Dukungan infrastruktur transportasi untuk sentra industri dan UMKM</p> <p>6. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pemanfaatan energi terbarukan</p> <p>7. Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan</p>	<p>1. Dukungan lanjutan pembangunan gedung strategis provinsi</p> <p>2. Dukungan lanjutan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan</p> <p>3. Dukungan Lanjutan proyek strategis nasional</p> <p>4. Peningkatan mitigasi kesiapsiagaan bencana</p> <p>5. Optimalisasi kualitas lingkungan dan permukiman</p> <p>6. Peningkatan tata Kelola ketenagalistrikan yang aman, andal dan akrab lingkungan</p> <p>7. Peningkatan tata Kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi</p> <p>8. Pengembangan dan rehabilitasi irigasi dan pengairan</p>	<p>1 Terwujudnya Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan</p> <p>2 Dukungan Lanjutan proyek strategis nasional</p> <p>3 Peningkatan mitigasi kesiapsiagaan bencana</p>

Arah Kebijakan				
Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2023)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)
9. Pengembangan dan rehabilitasi irigasi dan pengairan 10. Peningkatan daya tampung air (pembangunan embung) 11. Optimalisasi kualitas lingkungan dan permukiman	9. Peningkatan daya tampung air (pembangunan embung) 10. Optimalisasi kualitas lingkungan dan permukiman	8. Pengembangan dan rehabilitasi irigasi dan pengairan 9. Peningkatan daya tampung air (pembangunan embung) 10. Optimalisasi kualitas lingkungan dan permukiman	9. Peningkatan daya tampung air (pembangunan embung)	

Tabel 6.3
Program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif tahun 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing															
	Tujuan : Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing															
	Sasaran 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat															
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	%	73,8	74,8	160.475.174.000	76	162.521.277.000	78	166.515.651.000	80	172.405.692.000	82	180.664.131.000	82	DINAS KESEHATAN
		Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	Per 100.000	252	231		211		190		190		190		190	DINAS KESEHATAN
		Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)	daerah	2	2		2		2		2		2		2	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA	kabupaten/kota	4	4		6		6		8		8		8	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	kabupaten/kota	17	17		18		18		18		19		19	DINAS KESEHATAN
		Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	%	34,4	35		37		38		39		40		40	DINAS KESEHATAN
		Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	%	90	92		94		96		98		100		100	DINAS KESEHATAN
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	kabupaten/kota	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		8,5	DINAS KESEHATAN
		Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	%	78,6	79,6		81		83		85		87		87	DINAS KESEHATAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	%	85,53	86,84		88,16		89,47		90,79		92,11		92,11	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	91	92	11.516.389.000	93	11.663.226.000	94	11.949.880.000	95	12.372.575.000	96	12.965.236.000	96	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	86	3.433.164.000	87	3.476.938.000	88	3.562.392.000	89	3.688.402.000	90	3.865.081.000	90	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit	%	81	82	16.602.193.000	83	16.813.875.000	84	17.227.119.000	85	17.836.482.000	86	18.690.871.000	86	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	91	92		93		94		95		96		96	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	92	92	6.101.200.000	93	6.178.992.000	94	6.330.856.000	95	6.554.793.000	96	6.868.775.000	96	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Akreditasi Institusi pelatihan	strata	B	B	1.691.829.000	B	1.713.401.000	A	1.755.512.000	A	1.817.608.000	A	1.904.674.000	A	DINAS KESEHATAN
		Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	652	420		480		530		580		630		630	DINAS KESEHATAN
		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	%	68,7	73,7		79,9		87		95		100		100	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya	%	42	44	150.000.000	46	151.913.000	48	155.646.000	50	161.152.000	52	168.871.000	52	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	%	42	44	150.000.000	46	151.913.000	48	155.646.000	50	161.152.000	52	168.871.000	52	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DAYA MANUSIA KESEHATAN															
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	%	42	44	150.000.000	46	151.913.000	48	155.646.000	50	161.152.000	52	168.871.000	52	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	%	44	44	150.000.000	46	151.913.000	48	155.646.000	50	161.152.000	52	168.871.000	52	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	%	100	100	158.691.000	100	160.714.000	100	164.664.000	100	170.489.000	100	178.655.000	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	kabupaten/kota	5	8	2.341.013.000	11	2.370.862.000	14	2.429.132.000	17	2.515.056.000	19	2.635.530.000	19	DINAS KESEHATAN
		Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gernas hidup sehat	kabupaten/kota	5	8		11		14		17		19		19	DINAS KESEHATAN
		Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM	kabupaten/kota	5	8		11		14		17		19		19	DINAS KESEHATAN
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	157.961.787.000	100	159.975.843.000	100	163.907.657.000	100	169.705.447.000	100	177.834.541.000	100	DINAS SOSIAL
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS SOSIAL
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS SOSIAL
		Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS SOSIAL

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah medali emas dalam event nasional	medali	14	26	13.287.713.000	26	13.457.135.000	41	13.787.879.000	29	14.275.588.000	29	14.959.405.000	29	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan	%	0,8	0,85		0,9		0,95		1		1,05		1,05	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Sasaran 2 : Menurunnya prevalensi stunting															
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	%	73,8	74,8	160.475.174.000	76	162.521.277.000	78	166.515.651.000	80	172.405.692.000	82	180.664.131.000	82	DINAS KESEHATAN
		Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	Per 100.000	252	231		211		190		190		190		190	DINAS KESEHATAN
		Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)	daerah	2	2		2		2		2		2		2	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA	kabupaten/kota	4	4		6		6		8		8		8	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	kabupaten/kota	17	17		18		18		18		19		19	DINAS KESEHATAN
		Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	%	34,4	35		37		38		39		40		40	DINAS KESEHATAN
		Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	%	90	92		94		96		98		100		100	DINAS KESEHATAN
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	kabupaten/kota	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		8,5	DINAS KESEHATAN
		Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	%	78,6	79,6		81		83		85		87		87	DINAS KESEHATAN
		Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	%	85,53	86,84		88,16		89,47		90,79		92,11		92,11	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	91	92	11.516.389.000	93	11.663.226.000	94	11.949.880.000	95	12.372.575.000	96	12.965.236.000	96	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	86	3.433.164.000	87	3.476.938.000	88	3.562.392.000	89	3.688.402.000	90	3.865.081.000	90	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit	%	81	82	16.602.193.000	83	16.813.875.000	84	17.227.119.000	85	17.836.482.000	86	18.690.871.000	86	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	91	92		93		94		95		96		96	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	92	92	6.101.200.000	93	6.178.992.000	94	6.330.856.000	95	6.554.793.000	96	6.868.775.000	96	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	kabupaten/kota	5	8	2.341.013.000	11	2.370.862.000	14	2.429.132.000	17	2.515.056.000	19	2.635.530.000	19	DINAS KESEHATAN
		Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gernas hidup sehat	kabupaten/kota	5	8		11		14		17		19		19	DINAS KESEHATAN
		Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM	kabupaten/kota	5	8		11		14		17		19		19	DINAS KESEHATAN
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	%	82	82	4.188.865.000	84	4.242.274.000	86	4.346.539.000	88	4.500.286.000	90	4.715.855.000	90	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional	%	81	83	707.627.000	85	716.650.000	87	734.263.000	88	760.236.000	90	796.652.000	90	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	%	1	20	1.619.879.000	20	1.640.533.000	20	1.680.853.000	20	1.740.309.000	20	1.823.672.000	20	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	157.961.787.000	100	159.975.843.000	100	163.907.657.000	100	169.705.447.000	100	177.834.541.000	100	DINAS SOSIAL
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS SOSIAL

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		kebutuhan dasarnya di dalam panti														
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS SOSIAL
		Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS SOSIAL
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras)	Kg/Kap/Tahun	290,59	291,79	9.557.421.000	292,98	9.679.280.000	294,15	9.917.173.000	295,31	10.267.966.000	296,4	10.759.814.000	296,4	DINAS PANGAN
		Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	%	82	82,5		83		84		84,5		85		85	DINAS PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	%	21	22	23.013.958.000	24	23.307.392.000	27	23.880.231.000	28	24.724.929.000	30	25.909.283.000	30	DINAS PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat	%	82	83	10.194.762.000	83,5	10.324.748.000	84	10.578.505.000	84,5	10.952.691.000	85	11.477.338.000	85	DINAS PANGAN
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Mandiri	Dasawisma	10.800	11.300	3.120.920.000	11.800	3.160.713.000	12.300	3.238.395.000	12.800	3.352.945.000	13.300	3.513.555.000	13.300	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah KAN yang aktif	lembaga adat	299	350		400		450		500		544		544	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah LPM Mandiri	LPM	0	7		15		25		37		50		50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah Posyandu Mandiri	Posyandu	2.319	2.400		2.500		2.600		2.700		2.800		2.800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga	indeks	51,74	59,30	296.223.000	61,38	300.000.000	63,46	307.373.000	65,54	318.246.000	67,62	333.490.000	67,62	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP	%	5	5	42.220.051.000	5	42.758.368.000	5	43.809.264.000	5	45.358.898.000	5	47.531.644.000	30	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging	%	1,40	1,45	76.436.090.000	1,51	77.410.671.000	1,57	79.313.236.000	1,62	82.118.727.000	1,68	86.052.312.000	1,68	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%	70	72	3.218.479.000	74	3.259.516.000	76	3.339.627.000	78	3.457.757.000	80	3.623.388.000	80	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%	22,35	23		25		26		26		26,5		26,5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%	88	88		89		89		90		90		90	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan															
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah	%	91,70	93,22	594.049.855.000	94,70	601.624.153.000	96,20	616.410.600.000	97,70	638.214.457.000	99,20	668.785.694.000	99,20	DINAS PENDIDIKAN
		APM Pendidikan Menengah	%	73,13	73,42		73,49		73,56		73,65		73,72		73,72	DINAS PENDIDIKAN
		APK SLB	%	52,87	53,8		54,72		55,65		56,57		57,50		57,50	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	dokumen	27	33	317.382.000	39	321.428.000	45	329.328.000	51	340.977.000	57	357.311.000	57	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan	%	69,07	71,07	527.009.000	74,07	533.729.000	77,07	546.847.000	80	566.190.000	83,02	593.311.000	83,02	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi	%	6	21	496.040.000	36	502.364.000	51	514.711.000	66	532.918.000	81	558.445.000	81	DINAS PENDIDIKAN
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun	dokumen	N/A	3	496.040.000	6	502.364.000	9	514.711.000	12	532.918.000	15	558.445.000	15	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah	Orang	N/A	6		12		18		24		30		30	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Sasaran 4 : Meningkatkan daya saing masyarakat															
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah	%	91,70	93,22	594.049.855.000	94,70	601.624.153.000	96,20	616.410.600.000	97,70	638.214.457.000	99,20	668.785.694.000	99,20	DINAS PENDIDIKAN
		APM Pendidikan Menengah	%	73,13	73,42		73,49		73,56		73,65		73,72		73,72	DINAS PENDIDIKAN
		APK SLB	%	52,87	53,8		54,72		55,65		56,57		57,50		57,50	DINAS PENDIDIKAN
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	28,62	31,4	1.893.564.000	35,72	1.917.708.000	36,04	1.964.840.000	36,34	2.034.341.000	36,68	2.131.789.000	36,68	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase serapan tenaga kerja	%	31,77	35,52	240.222.000	36,01	243.285.000	36,5	249.265.000	36,99	258.082.000	37,97	270.444.000	37,97	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	10,69	11,26	192.193.000	11,83	194.644.000	12,41	199.428.000	12,98	206.482.000	13,56	216.372.000	13,56	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	%	8,14	20	677.104.000	40	685.737.000	60	702.591.000	80	727.443.000	100	762.288.000	100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	%	100	100	1.005.042.000	100	1.017.857.000	100	1.042.873.000	100	1.079.762.000	100	1.131.484.000	100	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat	dokumen pernyataan minat	4	4	793.454.000	4	803.571.000	5	823.321.000	5	852.444.000	5	893.277.000	23	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/Rasio	82,60 / 3,40	82,60 / 3,40	1.476.581.000	82,75 / 3,41	1.495.408.000	82,90 / 3,43	1.532.162.000	83,05 / 3,45	1.586.358.000	83,20 / 3,47	1.662.346.000	83,20 / 3,47	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	85	85		85,52		86,38		87,27		88,13		88,13	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	%	15	20	68.766.000	40	69.643.000	60	71.354.000	80	73.878.000	100	77.417.000	100	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	%	42,85	50	8.232.677.000	50	8.337.646.000	62,5	8.542.565.000	62,5	8.844.735.000	62,5	9.268.409.000	62,5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PENGEMBANGAN DAERAH															
		Persentase SKPD yang terinovatif	%	20	30		30		40		40		50		50	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	jumlah	2	10		10		10		12		12		12	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah															
	Tujuan : Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat															
	Sasaran 1 : Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK															
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah	%	91,70	93,22	594.049.855.000	94,70	601.624.153.000	96,20	616.410.600.000	97,70	638.214.457.000	99,20	668.785.694.000	99,20	DINAS PENDIDIKAN
		APM Pendidikan Menengah	%	73,13	73,42		73,49		73,56		73,65		73,72		73,72	DINAS PENDIDIKAN
		APK SLB	%	52,87	53,8		54,72		55,65		56,57		57,50		57,50	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	dokumen	27	33	317.382.000	39	321.428.000	45	329.328.000	51	340.977.000	57	357.311.000	57	DINAS PENDIDIKAN
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	%	77	79	2.334.846.000	81	2.364.616.000	83	2.422.732.000	85	2.508.430.000	87	2.628.587.000	87	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75	77		79		81		83		85		85	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	42,11	52,63	524.385.000	52,63	531.071.000	63,16	544.123.000	63,16	563.370.000	73,68	590.356.000	73,68	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Anak yang difasilitasi perlindungan sosial (dalam pengangkatan anak)	orang	25	25	892.531.000	25	903.911.000	25	926.127.000	25	958.886.000	25	1.004.818.000	25	DINAS SOSIAL

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Data Fakir Miskin yang valid	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS SOSIAL
		Persentase Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif	persen	N/A	30		35		40		50		60		60	DINAS SOSIAL
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Karya Budaya	5	8	2.168.775.000	8	2.196.427.000	8	2.250.410.000	8	2.330.012.000	8	2.441.623.000	8	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	Kesenian Tradisional	5	21	3.231.343.000	23	3.272.544.000	23	3.352.975.000	23	3.471.577.000	23	3.637.870.000	23	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	dokumen	2	3	2.487.284.000	4	2.518.997.000	5	2.580.908.000	6	2.672.201.000	7	2.800.203.000	7	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Cagar Budaya	6	11	2.480.198.000	16	2.511.821.000	21	2.573.555.000	26	2.664.588.000	31	2.792.225.000	31	DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	Cagar Budaya	6	15		15		15		15		15		15	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah aktivitas masyarakat di museum	kali	10	15	1.685.508.000	15	1.706.999.000	15	1.748.953.000	15	1.810.817.000	15	1.897.558.000	15	DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	orang	25000	30000		35000		40000		45000		50000		50000	DINAS KEBUDAYAAN
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	dokumen	6	6	10.013.475.000	6	10.141.150.000	6	10.390.395.000	6	10.757.927.000	6	11.273.244.000	30	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	Lembaga	4	8		12		13		13		13		13	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	nilai	2,70	2,71	275.064.000	2,72	278.571.000	2,73	285.418.000	2,74	295.514.000	2,75	309.669.000	2,75	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	nilai	3,09	3,10	317.382.000	3,11	321.428.000	3,12	329.328.000	3,13	340.977.000	3,14	357.311.000	3,14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	nilai	3	3,01	592.446.000	3,02	600.000.000	3,03	614.746.000	3,04	636.491.000	3,05	666.980.000	3,05	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PENANGANAN KONFLIK SOSIAL															
	Sasaran 2 : Meningkatkan Budaya Literasi															
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun	dokumen	N/A	3	496.040.000	6	502.364.000	9	514.711.000	12	532.918.000	15	558.445.000	15	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah	Orang	N/A	6		12		18		24		30		30	DINAS PENDIDIKAN
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Karya Budaya	5	8	2.168.775.000	8	2.196.427.000	8	2.250.410.000	8	2.330.012.000	8	2.441.623.000	8	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah aktivitas masyarakat di museum	kali	10	15	1.685.508.000	15	1.706.999.000	15	1.748.953.000	15	1.810.817.000	15	1.897.558.000	15	DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	orang	25000	30000		35000		40000		45000		50000		50000	DINAS KEBUDAYAAN
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	%	1,31	1,41	1.126.705.000	1,52	1.141.071.000	1,62	1.169.115.000	1,72	1.210.470.000	1,82	1.268.453.000	1,82	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Sasaran 3 : Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak															
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	%	11,54	11,54	262.261.000	13,2	265.604.000	13,2	272.132.000	15,09	281.758.000	15,09	295.255.000	15,09	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	81	84	486.925.000	88	493.133.000	92	505.253.000	96	523.125.000	100	548.184.000	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	indeks	69,5	70	112.406.000	70,50	113.839.000	71	116.637.000	71,50	120.763.000	72	126.548.000	72	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)	%	80	90,62	136.421.000	90,62	138.161.000	93,75	141.556.000	93,75	146.563.000	93,75	153.584.000	93,75	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	Kabupaten/Kota	2	3	348.115.000	4	352.553.000	5	361.218.000	6	373.995.000	7	391.910.000	7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	%	81	84	785.344.000	88	795.357.000	92	814.905.000	96	843.730.000	100	884.146.000	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya	%	80	80	211.588.000	85	214.286.000	90	219.552.000	90	227.318.000	90	238.207.000	90	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB	%	54,44	55,12	211.588.000	55,46	214.286.000	55,89	219.552.000	56,32	227.318.000	56,75	238.207.000	56,75	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	Indeks pembangunan keluarga	indeks	51,74	59,30	296.223.000	61,38	300.000.000	63,46	307.373.000	65,54	318.246.000	67,62	333.490.000	67,62	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	KELUARGA SEJAHTERA (KS)															ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan															
	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan petani															
	Sasaran 1 : Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)															
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	28,62	31,4	1.893.564.000	35,72	1.917.708.000	36,04	1.964.840.000	36,34	2.034.341.000	36,68	2.131.789.000	36,68	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.000	1.100	3.025.536.000	1.250	3.064.113.000	1.500	3.139.421.000	1.650	3.250.469.000	1.800	3.406.171.000	7.300	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	45	100	1.258.947.000	120	1.274.999.000	125	1.306.336.000	130	1.352.544.000	140	1.417.332.000	615	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat	dokumen pernyataan minat	4	4	793.454.000	4	803.571.000	5	823.321.000	5	852.444.000	5	893.277.000	23	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektivitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	%	41,18	47,06	5.580.628.000	52,94	5.651.783.000	58,82	5.790.690.000	64,71	5.995.520.000	70,59	6.282.712.000	70,59	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	kawasan	7	7		7		7		7		7		7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem	batang	20.000	20.000		25.000		25.000		25.000		30.000		30.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	M2	250	250		300		350		350		350		350	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	0,93	0,99	37.620.310.000	1,07	38.099.979.000	1,09	39.036.383.000	1,11	40.417.189.000	1,17	42.353.221.000	1,17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah sarana penangkapan ikan	unit	1.400	1.423		1.590		1.739		1.768		1.800		1.800	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	unit	3	3		3		3		3		3		3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	dokumen	100	100		100		100		100		100		100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	220.615	222.693		225.081		227.546		230.081		232.762		232.762	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	3,32	3,33	10.701.053.000	3,39	10.837.494.000	3,71	11.103.853.000	3,78	11.496.622.000	3,97	12.047.324.000	3,97	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	256.747	262.256		274.280		284.467		295.226		306.934		306.934	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB	unit	5	20		40		60		80		100		100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan	kab/kota	17	17		17		19		19		19		19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah produksi perikanan budidaya laut	ton	52	67		72		79		85		93		93	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	80	82	4.781.884.000	84	4.842.854.000	86	4.961.880.000	90	5.137.393.000	92	5.383.480.000	92	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	%	6,30	6,49	8.463.056.000	7,26	8.570.962.000	7,95	8.781.615.000	8,05	9.092.241.000	11	9.527.770.000	11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton	15.633	16.652		17.861		19.280		20.832		22.742		22.742	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Tingkat konsumsi ikan	Kg/kap/th	39,27	40		40,5		41,6		42,4		43,5		44	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP	%	5	5	42.220.051.000	5	42.758.368.000	5	43.809.264.000	5	45.358.898.000	5	47.531.644.000	30	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging	%	1,40	1,45	76.436.090.000	1,51	77.410.671.000	1,57	79.313.236.000	1,62	82.118.727.000	1,68	86.052.312.000	1,68	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	%	5	5	42.527.793.000	5	43.070.034.000	5	44.128.590.000	5	45.689.519.000	5	47.878.102.000	30	DINAS PERKEBUNAN,

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN															TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan	%	20	20	8.518.724.000	20	8.627.340.000	20	8.839.379.000	20	9.152.048.000	20	9.590.442.000	100	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	%	0,1	3,41	18.135.328.000	4,71	18.366.558.000	4,94	18.817.963.000	5,19	19.483.598.000	5,48	20.416.885.000	5,48	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	%	0,65	0,63	2.761.221.000	0,6	2.796.427.000	0,57	2.865.156.000	0,54	2.966.503.000	0,53	3.108.603.000	0,53	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	%	3	5	264.485.000	7	267.857.000	8	274.440.000	10	284.148.000	12	297.759.000	12	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	%	3	3	476.073.000	3	482.143.000	3	493.992.000	3	511.466.000	3	535.966.000	15	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	orang	1.000	1.000	22.075.611.000	1.000	22.357.082.000	1.000	22.906.564.000	1.000	23.716.821.000	1.000	24.852.886.000	6.000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya	%	20	20	2.142.326.000	20	2.169.642.000	20	2.222.966.000	20	2.301.598.000	20	2.411.847.000	100	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan	indeks	61,41	60,98	22.226.299.000	60,55	22.509.690.000	60,12	23.062.923.000	59,69	23.878.712.000	59,26	25.022.531.000	59,26	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	unit	20	20		20		20		20		20		20	DINAS KEHUTANAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	juta US\$	1393,13	1.420,99	417.029.000	1.449,41	422.346.000	1.478,4	432.727.000	1.507,97	448.033.000	1.538,12	469.495.000	1.538,12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%	70	72	3.218.479.000	74	3.259.516.000	76	3.339.627.000	78	3.457.757.000	80	3.623.388.000	80	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%	22,35	23		25		26		26		26,5		26,5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%	88	88		89		89		90		90		90	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	5	793.454.000	5	803.571.000	5	823.321.000	5	852.444.000	5	893.277.000	5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	%	5	5,1	2.525.139.000	5,1	2.557.336.000	5,2	2.620.189.000	5,2	2.712.871.000	5,3	2.842.820.000	5,3	BIRO PEREKONOMIAN
		Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	kebijakan	7	7		7		7		7		7		7	BIRO PEREKONOMIAN
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	%	42,85	50	8.232.677.000	50	8.337.646.000	62,5	8.542.565.000	62,5	8.844.735.000	62,5	9.268.409.000	62,5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Persentase SKPD yang terinovatif	%	20	30		30		40		40		50		50	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	jumlah	2	10		10		10		12		12		12	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Sasaran 2 : Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan															
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras)	Kg/Kap/Tahun	290,59	291,79	9.557.421.000	292,98	9.679.280.000	294,15	9.917.173.000	295,31	10.267.966.000	296,4	10.759.814.000	296,4	DINAS PANGAN
		Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	%	82	82,5		83		84		84,5		85		85	DINAS PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	%	21	22	23.013.958.000	24	23.307.392.000	27	23.880.231.000	28	24.724.929.000	30	25.909.283.000	30	DINAS PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat	%	82	83	10.194.762.000	83,5	10.324.748.000	84	10.578.505.000	84,5	10.952.691.000	85	11.477.338.000	85	DINAS PANGAN
	Sasaran 3 : Meningkatkan pendapatan petani hutan															

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan	indeks	61,41	60,98	22.226.299.000	60,55	22.509.690.000	60,12	23.062.923.000	59,69	23.878.712.000	59,26	25.022.531.000	59,26	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	unit	20	20		20		20		20		20		20	DINAS KEHUTANAN
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	lokasi	1	10	21.840.703.000	10	22.119.178.000	10	22.662.814.000	10	23.464.449.000	10	24.588.425.000	10	DINAS KEHUTANAN
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	hektar	50.000	50.000	22.147.952.000	50.000	22.430.345.000	50.000	22.981.628.000	50.000	23.794.540.000	50.000	24.934.327.000	50.000	DINAS KEHUTANAN
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi	Daerah Aliran Sungai	1	3	2.327.466.000	3	2.357.142.000	3	2.415.074.000	3	2.500.501.000	3	2.620.278.000	3	DINAS KEHUTANAN
	Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital															
	Tujuan : Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing															
	Sasaran 1 : Sumatera Barat Sebagai pusat perdagangan															
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	%	5	5,5	370.279.000	5,8	375.000.000	6,2	384.216.000	6,5	397.807.000	6,8	416.862.000	6,8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	juta US\$	1393,13	1.420,99	417.029.000	1.449,41	422.346.000	1.478,4	432.727.000	1.507,97	448.033.000	1.538,12	469.495.000	1.538,12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%	70	72	3.218.479.000	74	3.259.516.000	76	3.339.627.000	78	3.457.757.000	80	3.623.388.000	80	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%	22,35	23		25		26		26		26,5		26,5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%	88	88		89		89		90		90		90	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	5	793.454.000	5	803.571.000	5	823.321.000	5	852.444.000	5	893.277.000	5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Sasaran 2 : Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah															
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan	%	73,92	75	198.648.582.000	77	201.181.406.000	79	206.125.951.000	81	213.417.099.000	82	223.640.034.000	82	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan	Sentra	15	20	6.721.298.000	20	6.806.996.000	25	6.974.296.000	25	7.220.992.000	30	7.566.887.000	30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	%	70	72	168.406.000	74	170.553.000	76	174.745.000	78	180.926.000	80	189.592.000	80	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Sasaran 3 : Terwujudnya Pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera															
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	28,62	31,4	1.893.564.000	35,72	1.917.708.000	36,04	1.964.840.000	36,34	2.034.341.000	36,68	2.131.789.000	36,68	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	1,81	1,94	65.592.000	2,58	66.429.000	3,25	68.061.000	3,95	70.469.000	4,03	73.844.000	4,03	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	%	60	60	402.017.000	63	407.143.000	65	417.149.000	67	431.905.000	69	452.593.000	69	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.000	1.100	3.025.536.000	1.250	3.064.113.000	1.500	3.139.421.000	1.650	3.250.469.000	1.800	3.406.171.000	7.300	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modem	koperasi	50	50	1.329.829.000	60	1.346.785.000	70	1.379.886.000	80	1.428.695.000	90	1.497.132.000	90	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	45	100	1.258.947.000	120	1.274.999.000	125	1.306.336.000	130	1.352.544.000	140	1.417.332.000	615	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	1,9	2	1.280.106.000	3	1.296.428.000	3,5	1.328.291.000	4,2	1.375.276.000	5	1.441.153.000	5	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	%	14	15	3.681.628.000	16	3.728.569.000	17	3.820.208.000	18	3.955.338.000	20	4.144.803.000	20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Jumlah wirausaha muda baru	orang	230	268		348		348		348		348		1890	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Sasaran 4 : Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor															
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	28,62	31,4	1.893.564.000	35,72	1.917.708.000	36,04	1.964.840.000	36,34	2.034.341.000	36,68	2.131.789.000	36,68	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga	indeks	51,74	59,30	296.223.000	61,38	300.000.000	63,46	307.373.000	65,54	318.246.000	67,62	333.490.000	67,62	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.000	1.100	3.025.536.000	1.250	3.064.113.000	1.500	3.139.421.000	1.650	3.250.469.000	1.800	3.406.171.000	7.300	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	45	100	1.258.947.000	120	1.274.999.000	125	1.306.336.000	130	1.352.544.000	140	1.417.332.000	615	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	1,9	2	1.280.106.000	3	1.296.428.000	3,5	1.328.291.000	4,2	1.375.276.000	5	1.441.153.000	5	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	%	14	15	3.681.628.000	16	3.728.569.000	17	3.820.208.000	18	3.955.338.000	20	4.144.803.000	20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Jumlah wirausaha muda baru	orang	230	268		348		348		348		348		1890	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	%	6,30	6,49	8.463.056.000	7,26	8.570.962.000	7,95	8.781.615.000	8,05	9.092.241.000	11	9.527.770.000	11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PEMASARAN HASIL PERIKANAN															
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton	15.633	16.652		17.861		19.280		20.832		22.742		22.742	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Tingkat konsumsi ikan	Kg/kap/th	39,27	40		40,5		41,6		42,4		43,5		44	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	196	296	6.202.250.000	396	6.281.330.000	496	6.435.710.000	596	6.663.356.000	696	6.982.538.000	696	DINAS PARIWISATA
		Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2	4		6		8		10		12		12	DINAS PARIWISATA
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	%	3	5	264.485.000	7	267.857.000	8	274.440.000	10	284.148.000	12	297.759.000	12	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	%	3	3	476.073.000	3	482.143.000	3	493.992.000	3	511.466.000	3	535.966.000	15	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	hektar	50.000	50.000	22.147.952.000	50.000	22.430.345.000	50.000	22.981.628.000	50.000	23.794.540.000	50.000	24.934.327.000	50.000	DINAS KEHUTANAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	5	793.454.000	5	803.571.000	5	823.321.000	5	852.444.000	5	893.277.000	5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan	Sentra	15	20	6.721.298.000	20	6.806.996.000	25	6.974.296.000	25	7.220.992.000	30	7.566.887.000	30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPU	%	70	72	168.406.000	74	170.553.000	76	174.745.000	78	180.926.000	80	189.592.000	80	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Sasaran 5 : Meningkatkan pertumbuhan investasi															
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	%	100	100	1.005.042.000	100	1.017.857.000	100	1.042.873.000	100	1.079.762.000	100	1.131.484.000	100	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat	dokumen pernyataan minat	4	4	793.454.000	4	803.571.000	5	823.321.000	5	852.444.000	5	893.277.000	23	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/Rasio	82,60 / 3,40	82,60 / 3,40	1.476.581.000	82,75 / 3,41	1.495.408.000	82,90 / 3,43	1.532.162.000	83,05 / 3,45	1.586.358.000	83,20 / 3,47	1.662.346.000	83,20 / 3,47	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	85	85		85,52		86,38		87,27		88,13		88,13	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Rp (triliun)	4,8	5,1	774.826.000	5,6	784.705.000	6,1	803.992.000	6,7	832.431.000	7,5	872.305.000	7,5	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	%	15	20	68.766.000	40	69.643.000	60	71.354.000	80	73.878.000	100	77.417.000	100	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Sasaran 6 : Meningkatkan peran ekonomi digital															
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (Skala 1-5)	indeks	3	3,2	16.085.853.000	3,3	16.290.952.000	3,4	16.691.344.000	3,5	17.281.755.000	3,6	18.109.572.000	3,6	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	45	100	1.258.947.000	120	1.274.999.000	125	1.306.336.000	130	1.352.544.000	140	1.417.332.000	615	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	1,9	2	1.280.106.000	3	1.296.428.000	3,5	1.328.291.000	4,2	1.375.276.000	5	1.441.153.000	5	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	5	793.454.000	5	803.571.000	5	823.321.000	5	852.444.000	5	893.277.000	5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan															
	Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif															

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Sasaran 1 : Meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat															
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	%	52,28	53,78	139.275.433.000	55,28	141.051.233.000	56,78	144.517.926.000	58,28	149.629.857.000	59,78	156.797.306.000	59,78	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
		Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	68,80	70,36		71,92		73,48		75,04		76,6		76,6	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
		Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	64,75	66,51		68,27		70,03		71,79		73,5		73,5	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan	%	73,92	75	198.648.582.000	77	201.181.406.000	79	206.125.951.000	81	213.417.099.000	82	223.640.034.000	82	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	%	55	60	3.993.720.000	65	4.044.641.000	70	4.144.048.000	75	4.290.632.000	80	4.496.159.000	80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang	kali	4	6	10.896.771.000	10	11.035.708.000	12	11.306.939.000	15	11.706.891.000	17	12.267.665.000	17	DINAS PARIWISATA
		Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya	DTW	11	19		19		19		19		19		19	DINAS PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	%	1	2,5	4.602.034.000	4	4.660.712.000	5,5	4.775.261.000	7	4.944.172.000	8,5	5.181.004.000	8,5	DINAS PARIWISATA
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	%	1,5	3		4,5		6		7,5		9		9	DINAS PARIWISATA
		Rata-rata lama tinggal wisman	hari	3,19	3,21		3,23		3,25		3,27		3,29		3,29	DINAS PARIWISATA
		Rata-rata lama tinggal wisnus	hari	1,58	1,64		1,7		1,76		1,82		1,88		1,88	DINAS PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	196	296	6.202.250.000	396	6.281.330.000	496	6.435.710.000	596	6.663.356.000	696	6.982.538.000	696	DINAS PARIWISATA
		Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2	4		6		8		10		12		12	DINAS PARIWISATA
	Sasaran 2 : Meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat															

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	45	100	1.258.947.000	120	1.274.999.000	125	1.306.336.000	130	1.352.544.000	140	1.417.332.000	615	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	1,9	2	1.280.106.000	3	1.296.428.000	3,5	1.328.291.000	4,2	1.375.276.000	5	1.441.153.000	5	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Karya Budaya	5	8	2.168.775.000	8	2.196.427.000	8	2.250.410.000	8	2.330.012.000	8	2.441.623.000	8	DINAS KEBUDAYAAN
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI	produk	0	50	2.576.081.000	100	2.608.927.000	150	2.673.048.000	200	2.767.600.000	250	2.900.171.000	250	DINAS PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	196	296	6.202.250.000	396	6.281.330.000	496	6.435.710.000	596	6.663.356.000	696	6.982.538.000	696	DINAS PARIWISATA
		Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2	4		6		8		10		12		12	DINAS PARIWISATA
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan	Sentra	15	20	6.721.298.000	20	6.806.996.000	25	6.974.296.000	25	7.220.992.000	30	7.566.887.000	30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan															
	Tujuan : Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata															
	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi															
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan	%	73,92	75	198.648.582.000	77	201.181.406.000	79	206.125.951.000	81	213.417.099.000	82	223.640.034.000	82	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	%	39,07	40,27	3.789.134.000	41,51	3.837.446.000	42,17	3.931.761.000	43,65	4.070.837.000	44,81	4.265.834.000	44,81	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	ANGKUTAN JALAN (LLAJ)															
		Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	%	2,45	2,45		2,45		2,45		2,45		2,45		2,45	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi	Rekomendasi	1	1	1.168.373.000	1	1.183.270.000	1	1.212.352.000	1	1.255.236.000	1	1.315.363.000	5	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	Trayek	4	4		4		4		4		5		5	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	dokumen	1	1	154.459.000	1	156.428.000	1	160.273.000	1	165.942.000	1	173.891.000	5	DINAS PERHUBUNGAN
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	%	99,3	99,50	626.723.000	99,60	634.714.000	99,70	650.314.000	99,80	673.317.000	99,90	705.569.000	99,90	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Sasaran 2 : Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana															
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	%	52,28	53,78	139.275.433.000	55,28	141.051.233.000	56,78	144.517.926.000	58,28	149.629.857.000	59,78	156.797.306.000	59,78	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
		Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	68,80	70,36		71,92		73,48		75,04		76,6		76,6	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
		Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	64,75	66,51		68,27		70,03		71,79		73,5		73,5	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	unit	10	3	22.787.495.000	7	23.078.042.000	2	23.645.244.000	3	24.481.630.000	2	25.654.330.000	27	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	kawasan	2	1	1.577.454.000	1	1.597.567.000	1	1.636.831.000	2	1.694.729.000	3	1.775.909.000	10	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan	%	73,92	75	198.648.582.000	77	201.181.406.000	79	206.125.951.000	81	213.417.099.000	82	223.640.034.000	82	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	%	70	71	7.992.339.000	72	8.094.244.000	73	8.293.180.000	74	8.586.529.000	75	8.997.834.000	75	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman	%	0,65	0,63	2.761.221.000	0,6	2.796.427.000	0,57	2.865.156.000	0,54	2.966.503.000	0,53	3.108.603.000	0,53	DINAS PERKEBUNAN,

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	pangan hortikultura dan perkebunan														TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Sasaran 3 : Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas															
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah TPA Regional yang dibangun	lokasi	2	2	634.975.000	3	643.071.000	3	658.876.000	3	682.182.000	3	714.859.000	3	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	%	0	8	11.363.910.000	8	11.508.803.000	8	11.791.661.000	8	12.208.759.000	8	12.793.573.000	8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	%	1	20	1.619.879.000	20	1.640.533.000	20	1.680.853.000	20	1.740.309.000	20	1.823.672.000	20	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan merusak lingkungan yang dikendalikan	%	60	60	1.803.786.000	65	1.826.785.000	70	1.871.683.000	75	1.937.888.000	80	2.030.715.000	80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan Limbah B3	%	100	100	2.835.276.000	100	2.871.427.000	100	2.942.000.000	100	3.046.065.000	100	3.191.975.000	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	%	50	50	158.691.000	50	160.714.000	50	164.664.000	50	170.489.000	50	178.655.000	50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	100	100	48.559.000	100	49.179.000	100	50.387.000	100	52.170.000	100	54.669.000	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	TERKAIT DENGAN PPLH															
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	75	75	317.382.000	75	321.428.000	75	329.328.000	75	340.977.000	75	357.311.000	75	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup	%	10	10	100.000.000	10	101.275.000	10	103.764.000	10	107.434.000	10	112.581.000	10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%	90	90	105.794.000	90	107.143.000	90	109.776.000	90	113.659.000	90	119.104.000	90	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	%	55	60	3.993.720.000	65	4.044.641.000	70	4.144.048.000	75	4.290.632.000	80	4.496.159.000	80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	%	39,07	40,27	3.789.134.000	41,51	3.837.446.000	42,17	3.931.761.000	43,65	4.070.837.000	44,81	4.265.834.000	44,81	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	%	2,45	2,45		2,45		2,45		2,45		2,45		2,45	DINAS PERHUBUNGAN
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektivitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	%	41,18	47,06	5.580.628.000	52,94	5.651.783.000	58,82	5.790.690.000	64,71	5.995.520.000	70,59	6.282.712.000	70,59	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	kawasan	7	7		7		7		7		7		7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem	batang	20.000	20.000		25.000		25.000		25.000		30.000		30.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	M2	250	250		300		350		350		350		350	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	%	0,65	0,63	2.761.221.000	0,6	2.796.427.000	0,57	2.865.156.000	0,54	2.966.503.000	0,53	3.108.603.000	0,53	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan	indeks	61,41	60,98	22.226.299.000	60,55	22.509.690.000	60,12	23.062.923.000	59,69	23.878.712.000	59,26	25.022.531.000	59,26	DINAS KEHUTANAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	unit	20	20		20		20		20		20		20	DINAS KEHUTANAN
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	lokasi	1	10	21.840.703.000	10	22.119.178.000	10	22.662.814.000	10	23.464.449.000	10	24.588.425.000	10	DINAS KEHUTANAN
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase luasan daerah konservasi air tanah	%	29,37	37,5	264.485.000	55	267.857.000	67	274.440.000	83	284.148.000	100	297.759.000	100	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambangan sesuai Peraturan Perundang Undangan	%	NA	NA	0.000	40	25.836.000	55	26.471.000	70	27.407.000	90	28.720.000	90	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	%	28	29	359.699.000	33,3	364.286.000	35,7	373.239.000	51,7	386.441.000	51,8	404.952.000	51,8	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Sasaran 4 : Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian															
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	%	52,28	53,78	139.275.433.000	55,28	141.051.233.000	56,78	144.517.926.000	58,28	149.629.857.000	59,78	156.797.306.000	59,78	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
		Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	68,80	70,36		71,92		73,48		75,04		76,6		76,6	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
		Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	64,75	66,51		68,27		70,03		71,79		73,5		73,5	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	%	82	82	4.188.865.000	84	4.242.274.000	86	4.346.539.000	88	4.500.286.000	90	4.715.855.000	90	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah TPA Regional yang dibangun	lokasi	2	2	634.975.000	3	643.071.000	3	658.876.000	3	682.182.000	3	714.859.000	3	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional	%	81	83	707.627.000	85	716.650.000	87	734.263.000	88	760.236.000	90	796.652.000	90	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Jumlah drainase kewenangan provinsi yang dikelola	Km	1	2	529.075.000	10	535.821.000	15	548.990.000	25	568.409.000	36	595.637.000	36	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	unit	10	3	22.787.495.000	7	23.078.042.000	2	23.645.244.000	3	24.481.630.000	2	25.654.330.000	27	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	kawasan	2	1	1.577.454.000	1	1.597.567.000	1	1.636.831.000	2	1.694.729.000	3	1.775.909.000	10	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih	%	2,01	7,91	4.231.756.000	13,81	4.285.712.000	19,72	4.391.044.000	25,62	4.546.366.000	31,52	4.764.142.000	31,52	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
		Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
		Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	%	5	10		15		20		25		30		30	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang telah difasilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal	%	65	70	95.215.000	75	96.429.000	80	98.798.000	85	102.293.000	90	107.193.000	90	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Sasaran 5 : Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan															
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	84	86	1.989.116.000	87	2.014.478.000	88	2.063.989.000	89	2.136.997.000	90	2.239.362.000	90	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan	%	80	85	370.279.000	90	375.000.000	95	384.216.000	95	397.807.000	95	416.862.000	95	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi dapat digunakan untuk pembangunan	%	65	70	95.215.000	75	96.429.000	80	98.798.000	85	102.293.000	90	107.193.000	90	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti	%	65	70	42.318.000	75	42.857.000	80	43.910.000	85	45.464.000	90	47.641.000	90	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang	%	75	80	52.897.000	85	53.571.000	90	54.888.000	95	56.830.000	95	59.552.000	95	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah														PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Luas Tanah Kosong yang difasilitasi dapat dimanfaatkan sesuai fungsi/peruntukannya	%	65	70	52.897.000	75	53.571.000	80	54.888.000	85	56.830.000	90	59.552.000	90	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas rencana penggunaan tanah yang dapat dijadikan acuan	%	50	55	52.897.000	60	53.571.000	70	54.888.000	75	56.830.000	80	59.552.000	80	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas															
	Tujuan : Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani															
	Sasaran 1 : Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel															
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah perusahaan yang didata	jumlah usaha	5.360	5.450	185.139.000	5.540	187.500.000	5.630	192.108.000	5.720	198.903.000	5.810	208.431.000	5.810	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan	Sentra	15	20	6.721.298.000	20	6.806.996.000	25	6.974.296.000	25	7.220.992.000	30	7.566.887.000	30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	100	3.752.962.000	100	3.800.813.000	100	3.894.227.000	100	4.031.975.000	100	4.225.112.000	100	BIRO ORGANISASI
		Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	100		100		100		100		100		100	BIRO ORGANISASI
		Penataan Jabatan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100	BIRO ORGANISASI
		Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	Perangkat Daerah	8	12		16		18		20		22		22	BIRO ORGANISASI
		Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	Perangkat Daerah	7	8		10		12		14		16		16	BIRO ORGANISASI
		Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	5	7		9		11		13		15		15	BIRO ORGANISASI

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Dokumen LPPD	dokumen	1	1	3.349.329.000	1	3.392.034.000	1	3.475.402.000	1	3.598.335.000	1	3.770.699.000	1	BIRO PEMERINTAHAN
		Persentase fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah/ Luar Negeri/ Pihak ketiga	%	100	100		100		100		100		100		100	BIRO PEMERINTAHAN
		Persentase fasilitasi usulan penataan Nagari/ desa	%	100	100		100		100		100		100		100	BIRO PEMERINTAHAN
		Persentase usulan gubernur tentang penegasan batas daerah	%	75	80		85		90		95		100		100	BIRO PEMERINTAHAN
		Rekomendasi kebijakan tentang implementasi SPM kepada pengambilan kebijakan	dokumen	1	1		1		1		1		1		1	BIRO PEMERINTAHAN
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	%	90	90	2.054.223.000	90	2.080.415.000	90	2.131.547.000	90	2.206.944.000	90	2.312.660.000	90	BIRO HUKUM
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	%	5	5,1	2.525.139.000	5,1	2.557.336.000	5,2	2.620.189.000	5,2	2.712.871.000	5,3	2.842.820.000	5,3	BIRO PEREKONOMIAN
		Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	kebijakan	7	7		7		7		7		7		7	BIRO PEREKONOMIAN
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	%	NA	85	4.549.391.000	87	4.607.397.000	90	4.720.636.000	92	4.887.615.000	95	5.121.738.000	95	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPd yang mendukung sasaran RPJMD	%	50	55	7.327.212.000	60	7.420.636.000	70	7.603.018.000	75	7.871.954.000	80	8.249.030.000	80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausahaan Dan LKPD	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	1.244.409.590.000	tepat waktu	1.260.276.153.000	tepat waktu	1.291.250.652.000	tepat waktu	1.336.925.148.000	tepat waktu	1.400.965.466.000	tepat waktu	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi barang milik daerah	persen	90	91	2.327.466.000	92	2.357.142.000	93	2.415.074.000	94	2.500.501.000	95	2.620.278.000	95	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD	%	3,4	7,2	6.952.008.000	7,2	7.040.649.000	7,2	7.213.690.000	7,2	7.468.855.000	7,2	7.826.622.000	7,2	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai penerapan sistem Merit	Nilai	270	300	7.353.632.000	325	7.447.393.000	340	7.630.431.000	350	7.900.337.000	370	8.278.773.000	370	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	%	85	86	7.072.106.000	87	7.162.278.000	88	7.338.309.000	89	7.597.882.000	90	7.961.829.000	90	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi	JP/Tahun	20	20		22		22		24		24		24	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	75	75	6.023.337.000	78	6.100.136.000	79	6.250.063.000	80	6.471.142.000	80	6.781.117.000	80	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	%	65	70	4.960.395.000	75	5.023.642.000	80	5.147.111.000	85	5.329.176.000	90	5.584.450.000	90	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	Sasaran 2 : Meningkatkan kapabilitas birokrasi															
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	5	10	9.424.751.000	20	9.544.919.000	30	9.779.510.000	40	10.125.434.000	50	10.610.454.000	50	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (Skala 1-5)	indeks	3	3,2	16.085.853.000	3,3	16.290.952.000	3,4	16.691.344.000	3,5	17.281.755.000	3,6	18.109.572.000	3,6	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	%	50	60	881.282.000	70	892.519.000	80	914.455.000	90	946.801.000	100	992.154.000	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	50	60		70		80		90		100		100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	%	44	45	881.282.000	47	892.519.000	50	914.455.000	55	946.801.000	60	992.154.000	60	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	100	3.752.962.000	100	3.800.813.000	100	3.894.227.000	100	4.031.975.000	100	4.225.112.000	100	BIRO ORGANISASI

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	100		100		100		100		100		100	BIRO ORGANISASI
		Penataan Jabatan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100	BIRO ORGANISASI
		Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	Perangkat Daerah	8	12		16		18		20		22		22	BIRO ORGANISASI
		Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	Perangkat Daerah	7	8		10		12		14		16		16	BIRO ORGANISASI
		Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	5	7		9		11		13		15		15	BIRO ORGANISASI
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	%	NA	85	4.549.391.000	87	4.607.397.000	90	4.720.636.000	92	4.887.615.000	95	5.121.738.000	95	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPd yang mendukung sasaran RPJMD	%	50	55	7.327.212.000	60	7.420.636.000	70	7.603.018.000	75	7.871.954.000	80	8.249.030.000	80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai penerapan sistem Merit	Nilai	270	300	7.353.632.000	325	7.447.393.000	340	7.630.431.000	350	7.900.337.000	370	8.278.773.000	370	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	%	85	86	7.072.106.000	87	7.162.278.000	88	7.338.309.000	89	7.597.882.000	90	7.961.829.000	90	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi	JP/Tahun	20	20		22		22		24		24		24	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan Publik															
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	5	10	9.424.751.000	20	9.544.919.000	30	9.779.510.000	40	10.125.434.000	50	10.610.454.000	50	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN	Indeks SPBE (Skala 1-5)	indeks	3	3,2	16.085.853.000	3,3	16.290.952.000	3,4	16.691.344.000	3,5	17.281.755.000	3,6	18.109.572.000	3,6	DINAS KOMUNIKASI,

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021))	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	APLIKASI INFORMATIKA															INFORMATIKA DAN STATISTIK
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	100	3.752.962.000	100	3.800.813.000	100	3.894.227.000	100	4.031.975.000	100	4.225.112.000	100	BIRO ORGANISASI
		Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	100		100		100		100		100		100	BIRO ORGANISASI
		Penataan Jabatan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100	BIRO ORGANISASI
		Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	Perangkat Daerah	8	12		16		18		20		22		22	BIRO ORGANISASI
		Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	Perangkat Daerah	7	8		10		12		14		16		16	BIRO ORGANISASI
		Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	5	7		9		11		13		15		15	BIRO ORGANISASI
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai penerapan sistem Merit	Nilai	270	300	7.353.632.000	325	7.447.393.000	340	7.630.431.000	350	7.900.337.000	370	8.278.773.000	370	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	%	85	86	7.072.106.000	87	7.162.278.000	88	7.338.309.000	89	7.597.882.000	90	7.961.829.000	90	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi	JP/Tahun	20	20		22		22		24		24		24	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

6.2. PROGRAM UNGGULAN

Visi dan Misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 juga didukung dengan Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Sumbang Sehat dan Cerdas

Pembangunan Sumatera Barat menjadikan keunggulan sumberdaya manusia sebagai pondasi pembangunan. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembangunan manusia menempatkan pendidikan dan kesehatan dalam makna pusat perhatian dalam kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini dibangun ditengah suasana pandemi covid-19. Pada saat bersamaan, pembangunan manusia Sumatera Barat menghadapi tantangan dalam pembangunan kesehatan yang diindikasikan oleh masih rendahnya usia harapan hidup. Kesehatan diartikan sebagai kondisi kesejahteraan fisik, mental serta sosial, bukan sekedar bebas dari penyakit dan kelemahan fisik.

Pembangunan pendidikan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang meliputi pencapaian tujuan ranah afeksi, kognisi dan psikomotor yaitu pendidikan untuk mengembangkan karakter yang beriman, bertakwa dan berakhlak, berpengetahuan, cerdas secara intelektual, emosional dan sosial, serta terampil dan memiliki etos kerja dan daya saing.

Sumbang sehat dan cerdas ditandai dengan : Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru, Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai adaptasi kebiasaan baru, Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta rupiah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen, Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses pendidikan, Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri, Memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan.

2. Sumbang Religius dan Berbudaya

Masyarakat Sumatera Barat memiliki keunggulan budaya dalam membangun konsensus sosial yang mampu memadukan antara adat dan budaya dalam filosofi Adai Basandi Syara' - Syara' basandi kitabullah. Masyarakat Sumatera Barat dikenal pula sebagai masyarakat yang agamais. Keunggulan budaya ini dapat menjadi modal dasar yang kuat sebagai pilar pembangunan yang berakar dari jati diri masyarakat. Sumatera Barat telah berkembang sebagai masyarakat yang majemuk secara suku, agama dan ras yang dapat hidup secara harmonis dan toleransi dengan tetap menguatkan jati diri budayanya masing-masing. Perkembangan globalisasi turut mempengaruhi budaya masyarakat yang membutuhkan ketahanan budaya yang dapat menggerus nilai-nilai budaya masyarakat terutama bagi generasi muda saat ini dan masa mendatang

Sumbang religius dan berbudaya ditujukan untuk : Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat (Mesjid Raya, gedung LKAAM dan gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dan wisata religi, Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan, rumah ibadah, lembaga pendidikan agama, Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (*education tourism*), Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan.

3. Sumbar Sejahtera

Kesejahteraan merupakan tujuan hakiki dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi semakin kuat apabila didasarkan pada potensi sumberdaya yang dimiliki. Sumatera Barat merupakan daerah yang berbasis kepada agraris, baik sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang ditunjukkan oleh peran terbesar dalam perekonomian. Diikuti oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian merupakan yang terbesar dan separuh penduduk menggantungkan hidupnya dari pertanian. Pembangunan pertanian diupayakan untuk mencapai kesejahteraan petani melalui upaya peningkatan nilai tambah dan produktivitas.

Pengembangan sektor perdagangan, UMKM dan kewirausahaan terutama wirausahawan muda yang telah dikenal sebagai keunggulan masyarakat Sumatera Barat, baik di ranah maupun rantau ditingkatkan dengan perkembangan-perkembangan baru dalam pemanfaatan teknologi digital. Bersamaan dengan pengembangan pariwisata dengan ragam potensi alam dan budaya yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk pembangunan ekonomi yang berskala luas bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Sumbar sejahtera ditujukan untuk : Meningkatkan pendapatan petani & nelayan serta mengalokasikan 10% anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian, Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak, Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian, Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif, Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula, Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital, Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan, Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional.

4. Sumbar Berkeadilan

Pembangunan di berbagai bidang mensyaratkan daya dukung infrastruktur dan lingkungan hidup untuk mempercepat pergerakan orang dan barang untuk pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan. Penyediaan infrastruktur memiliki keberlanjutan secara sosial dengan memperhatikan unsur keadilan. Infrastruktur berkeadilan meliputi dimensi antar ruang atau wilayah-wilayah dan daerah, dimensi waktu antar tahun dan antar generasi, serta keadilan antar sektor baik sektor ekonomi dan sosial, serta lingkungan hidup. Berkeadilan juga dalam penyediaan layanan pemerintah yang berkualitas dan menjangkau lapisan masyarakat secara luas

Sumbar berkeadilan ditujukan untuk : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan, percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, Mengembangkan kota dan kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat & komunitas, Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy), dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik (*e-government*).

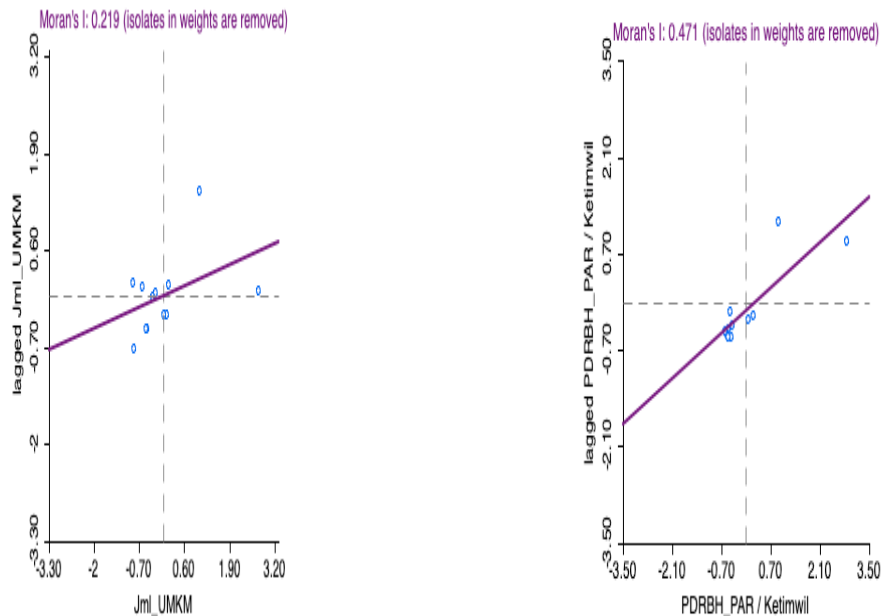
6.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan yang berorientasi kepada proses perencanaan itu sendiri dan berorientasi pada substansi. Pendekatan yang berorientasi pada proses terdiri dari pendekatan teknokratik; dengan melibatkan kelompok akademisi di perguruan tinggi, agar mampu menganalisis permasalahan dan isu strategis yang akan menjadi arahan pembangunan daerah ke depannya. Pendekatan partisipatif, yang mengharuskan keterlibatan semua pemangku kepentingan pembangunan mulai dari pemerintah, pihak swasta, masyarakat. Pendekatan politis lebih melibatkan pengambilan keputusan kebijakan publik termasuk pendanaan pembangunan yang prosesnya itu dilakukan pada Lembaga politik yakni dewan perwakilan daerah (DPRD) provinsi Sumatera Barat. Pendekatan bawah-atas dan pendekatan atas-bawah (*Bottom-up dan Top-down*), melibatkan semua pengambil kebijakan (*decision makers*) dan semua Lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama ini, seperti organisasi Bundo Kandung, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Pada sisi lain, pendekatan pembangunan daerah yang berorientasi kepada substansi terdiri dari pendekatan Tematik, Holistik, integratif, dan spasial (THIS).

Kebijakan pembangunan berdimensi kewilayahan berkaitan dengan pendekatan pembangunan daerah berorientasi substansi terutama pendekatan spasial. Ukuran keberhasilan pembangunan daerah yang berorientasi substansi itu meliputi: terjadinya perubahan struktur perekonomian daerah, terjadi keterkaitan antar sektor dalam pembangunan daerah, terciptanya aglomerasi ekonomi dan terbangunnya kedekatan antar wilayah tetangga (*Queen and Rock contiguity*). Artinya pembangunan pada satu wilayah akan mempengaruhi wilayah sekelilingnya. Ukuran kedekatan wilayah pembangunan itu dapat menggunakan Moran Index; mengukur spasial autokorelasi yang didasarkan atas hukum geografi pertama (Tobler law's): "suatu wilayah akan memiliki koneksi yang lebih besar, apabila wilayah itu berdekatan satu sama lain" Jadi Moran Index atau global Moran Index adalah mengukur saling keterkaitan antar wilayah dalam aktifitas (variable) tertentu, semakin besar Moran Index, semakin terkoneksi aktifitas ekonomi suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

Pada gambar 1, dapat memberikan ilustrasi bahwa peningkatan jumlah usaha UMKM terutama pada bidang usaha pariwisata dan PDRB sub sektor Pariwisata memiliki nilai Moran Index sebesar 0,219, dan 0,471, yang berarti peningkatan jumlah usaha UMKM dan peningkatan porsi PDRB sub sektor pariwisata Sumatera Barat akan mendorong terjadinya saling keterkaitan antar wilayah (spasial autokorelasi) di Sumatera Barat. berbeda halnya dengan upaya peningkatan pendapatan perkapita, yang memiliki nilai Moran index yang rendah dan negatif, berimplikasi kepada semakin tinggi ketimpangan antar wilayah pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan Sumatera Barat ke depan haruslah lebih menitik beratkan kepada sektor atau kegiatan ekonomi yang memiliki dimensi spasial sebagaimana ditunjukkan oleh Moran index di atas.

Gambar 6.1
Nilai Indeks Moran UMKM dan PDRB Sektor Pariwisata Sumatera Barat



Sumber: Hasil Analisis (2020).

Ukuran lain dari dimensi kewilayahan dalam rencana pembangunan dalam RPJMD Sumatera Barat tahun 2021-2026 ini adalah mempertimbangkan ukuran terciptanya aglomerasi ekonomi diantara sektor sektor ekonomi yang ada. Pembangunan ekonomi wilayah dikatakan menjadi lebih kuat dan berada pada arah yang benar adalah apabila mengarah kepada terjadinya aglomerasi dari aktifitas ekonomi (Frenken, Van Oort and Verburg, 2007), Aglomerasi ekonomi merupakan salah satu strategi peningkatan pertumbuhan untuk pembangunan ekonomi wilayah, aglomerasi ekonomi merupakan konsentrasi spasial dari aktifitas ekonomi dalam suatu wilayah, (Kuchiki, 2019). Pengelompokan aktifitas ekonomi terjadi karena setiap perusahaan atau wilayah produksi memiliki aliran keuntungan yang berlangsung lama, sebagai akibat kedekatan lokasi satu sama lain. Aglomerasi ekonomi adalah terpusatnya aktifitas ekonomi dari sebuah atau beberapa perusahaan atau wilayah produksi yang mendatangkan keuntungan satu sama lain dengan bertempat tinggal di lokasi yang sama.

Menurut Kuchiki (2019) penciptaan aglomerasi ekonomi dalam satu wilayah harus memiliki bagian tahapan kondisi sebagai syarat perlu yang terdiri dari: 1). Membangun fasilitas infrastruktur fisik wilayah seperti Pelabuhan dan jalan raya (jalan toll). 2). Membangun kelembagaan ekonomi yang kuat, yang menurut World Bank, (1993) itu adalah mengembangkan *export push strategy* dari suatu wilayah pembangunan. 3). Membangun sumberdaya manusia yang terampil, 4). Pemenuhan kondisi kehidupan dengan lingkungan yang menyenangkan, sehingga tercipta kondisi dimana perusahaan yang menghasilkan produk yang berguna bagi massa, sehingga dapat merencanakan investasinya. Apabila persyaratan ekonomi ini belum dapat dipenuhi, maka penciptaan agglomeration ekonomi akan mengalami *diseconomies* dalam suatu wilayah.

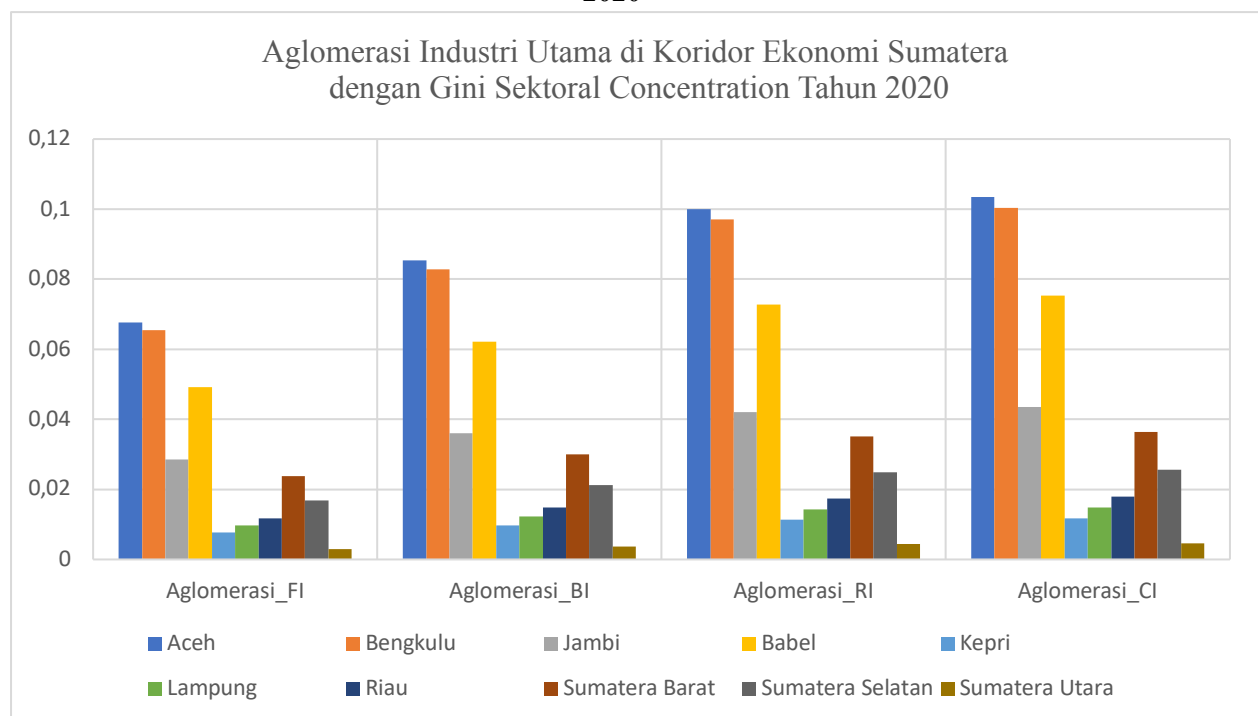
Terdapat empat sumber terciptanya aglomerasi, yang telah dikembangkan selama ini dalam penelitian aglomerasi ekonomi ini, yakni: Pertama: *Internal increasing return to scale*; aglomerasi terjadi dalam *single firm* karena biaya produksi yang efisien, yang ditandai dengan besarnya cakupan layanan pasarnya (Krugman, 1991). Dalam konteksnya, tidak ada konsep spasial dari pengertian ini, selain keberadaan perusahaan tunggal yang besar dalam satu ruang ekonomi, dengan implikasi kepada

besarnya konsentrasi tenaga kerja secara lokal. Kedua: *External economies* tersedia bagi semua perusahaan lokal di dalam sektor yang sama, berimplikasi kepada lokalisasi ekonomi, (Feser, 2002) dan (Henderson, 2003). Ketiga: *External economies* tersedia pada semua perusahaan lokal tanpa memandang sektor dan aglomerasi berasal dari *urban size* dan *density*, berimplikasi kepada urbanisasi ekonomi. Keempat: Eksternal economies tersedia untuk semua perusahaan lokal dari berbagai sektor: Jacobs Externality, (1969).

Lokalisasi ekonomi biasanya mengambil bentuk Marshallian externality, yang muncul dari tiga sumber yakni: penyatuan pasar tenaga kerja (*labor market pooling*), penciptaan *specialisasi supply* barang (*the creation of specialized suppliers*), dan kemunculan dari penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (*the emergence of knowledge spillover*), menurut (Henderson, 2003) eksternalitas ekonomi dari perusahaan lain dalam suatu lokalisasi industri yang sama, ini disebut dengan “lokalisasi ekonomi”.

Grafik 6.1

Aglomerasi Industri Utama Sumatera Barat Relatif Terhadap provinsi lain di Sumatera tahun 2020



Sumber: Hasil Analisis Sendiri (2020)

Penciptaan aglomerasi industri pengolahan yang paling tinggi pada sub sektor industri pengolahan di Sumatera Barat terdapat pada jenis industri pengolahan karet, industri komputer dan elektronik, industri pengolahan minuman dan industri pengolahan makanan. Namun jika dibandingkan dengan penciptaan aglomerasi industri pengolahan utama Sumatera Barat ini dengan provinsi lain, masih belum mampu bersaing terutama dengan provinsi Riau Kepulauan, Bangka Belitung, Sumatera Utara dan Sumatera selatan. Oleh sebab itu, dalam rencana pengembangan industri pengolahan andalan Sumatera Barat ke depan seperti industri makanan ringan, industri minuman dan industri pengolahan karet serta industri komputer dan elektronik harus sudah memperhatikan dimensi kewilayahannya dengan penciptaan aglomerasi industri. Setiap pengembangan industri pengolahan terutama pada wilayah kabupaten dan kota seharusnya menghitung indek aglomerasinya.

Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Untuk memanfaatkan potensi keragaman dan kesamaan aspek pembangunan serta memperhatikan arah pembangunan pengembangan wilayah, maka pembangunan berdimensi kewilayahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

6.3.1. Pengembangan Sistem Perkotaan

Pengembangan wilayah perkotaan di Sumatera Barat terutama diarahkan kepada melayani kegiatan yang berskala kota yang meliputi sistem jaringan prasarana, antara lain, mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem air minum dan sanitasi, serta sistem jaringan sumber daya air.

Rencana pengembangan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat juga mengacu pada kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Padang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Sawahlunto, Muara Siberut, Bukittinggi, Payakumbuh, dan Solok merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pada Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 telah ditetapkan pengembangan pusat kegiatan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Painan, Lubuk Alung, Parik Malintang, Lubuk Basung, Lubuk Sikaping, Sarilamak, Kota Padang Panjang, Batusangkar, Muaro Sijunjung, Aro Suka, Padang Aro, dan Tuapejat. Menurut RTRW Provinsi Sumatera Barat 2012-2032, untuk Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh provinsi di sebut PKWp. Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan yang telah dijelaskan, maka rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2032 terdiri dari 1 (satu) kota PKN, 5 (lima) kota PKW, 4 (empat) kota PKWp, dan 12 (duabelas) kota PKL seperti yang diperlihatkan pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4
Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RTRW 2012-2032

PKN	PKW	PKWp	PKL
Kota Padang	1. Kota Bukittinggi 2. Pariaman 3. Sawahlunto 4. Kota Solok 5. Muara Siberut	1. Kota Payakumbuh 2. Kota Pulau Punjung 3. Tapan 4. Kota Simpang Empat	1. Painan 2. Kota Padang Panjang 3. Lubuk Sikaping 4. Sari Lamak 5. Batusangkar 6. Padang Aro 7. Tuapejat 8. Lubuk Basung 9. Muaro Sijunjung 10. Lubuk Alung 11. Aro Suka 12. Parik Malintang

Sumber : PP 26 Tahun 2008, dan Hasil Analisis, 2008.

6.3.2. Kawasan Lindung

Berdasarkan Penjelasan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah disebutkan bahwa pada dasarnya kelompok utama dari kawasan lindung adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;

- b. Kawasan perlindungan setempat, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka marga satwa, serta kawasan cagar budaya, dan ilmu pengetahuan;
- d. Kawasan rawan bencana alam, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
- e. Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Kawasan lindung diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan. Pengembangan kawasan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat bahaya bencana alam seperti banjir, erosi, longsor, kekeringan, pendangkalan waduk dan lain sebagainya. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga kerusakan bencana sosial akibat hilangnya aset hidup yang seharusnya diperoleh masyarakat.

Sebaran luas hutan lindung yang telah ditetapkan menurut daerah diperlihatkan pada Tabel 6.5. yang harus dijaga kelestariannya.

Tabel 6.5
Luas dan Perubahan Luas Hutan Lindung Provinsi Sumatera Barat
Menurut RTRW 2012-2032 per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Luas Hutan Lindung			Rencana Perubahan Luas		
			Sk. 422 th 1999	Sk. 35 th 2013	Rencana th 2028	Ha	% 1)	% 2)
A	Kabupaten							
1	Agam	223.230	32.134	26.563	22.451	-9.683	-30,13	5,08
2	Dharmasraya	296.113	12.336	5.548	8.660	-3.676	-29,80	1,93
3	Kep. Mentawai	13.533,86	4.614	183.351	6.406	1.792	38,84	-0,94
4	Lima Puluh Kota	335.430	121.118	20.390	99.022	-22.096	-18,24	12,59
5	Padang Pariaman	132.879	22.268	16.148	13.334	-8.934	-40,12	4,69
6	Pasaman	444.763	237.044	32.793	196.275.70	-78.589	49,68	41,24
7	Pasaman Barat	338.777	95.461	60	78.264	-17.197	-18,01	9,03
8	Pesisir Selatan	604.933	41.672	285.764	23.096	-18.576	-44,58	9,75
9	Sijunjung	317.178	88.262	40.123	78.015	-10.247	-11,61	5,38
10	Solok	373.800	119.646	48.070	118.603	-1.043	-0,87	0,55
11	Solok Selatan	334.620	89.286	65.779	80.040	-9.246	-10,36	4,85
12	Tanah Datar	133.600	29.208	20.163	18.480	-10.728	-36,73	5,63
B	Kota							
13	Bukittinggi	2.523.900	-	-	-	-	-	-
14	Padang	69.496	13.778	24.247	13.433	-345	-2,50	0,18
15	Padang Panjang	2.300	36	601,77*	-	-36	-100,00	0,02
16	Pariaman	7.336	-	-	-	-	-	-
17	Payakumbuh	8.043	148	-	295	147	99,32	-0,08
18	Sawahlunto	27.345	496	-	294	-202	-40,73	0,11
19	Solok	5.764	1.141	771	1.141	-	-	-
Jumlah		4.229.730	910.532	749.384	719.989	-190.544	-20,93	100,00

Sumber : Hasil rencana, 2008

Keterangan :

- 1) Terhadap luas hutan lindung per kabupaten/kota

2) Terhadap jumlah perubahan luas hutan lindung provinsi

SK No. 35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Juni 2013* = Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8089/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018

Selanjutnya juga telah ditetapkan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk, kawasan sekitar mata air dan kawasan hijau perkotaan seperti diperlihatkan pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6
Sebaran Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi Sumatera Barat
Dirinci Menurut Kabupaten /Kota

NO	KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT	DAERAH
1	Sempadan Pantai	Kabupaten Pesisir Selatan
		Kota Padang
		Kabupaten Padang Pariaman
		Kota Pariaman
		Kabupaten Agam
		Kabupaten Pasaman Barat
		Kabupaten Kepulauan Mentawai
2	Sempadan Sungai	Seluruh Kota dan Kabupaten
3	Kawasan Sekitar Danau dan Waduk	Kabupaten Agam
		Kabupaten Tanah Datar
		Kabupaten Solok
		Kab. Lima Puluh Kota (Kawasan sekitar waduk; Data berdasarkan Draft Revisi Perda RTRW Kab. Lima Puluh Kota tahun 2012-2032)
4	Kawasan Sekitar Mata Air	Seluruh Kabupaten dan Kota
5	Kawasan Terbuka Hijau perkotaan	Kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kota Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Provinsi Sumatera Barat
6	Kawasan Sempadan Jalan Tol	Kabupaten Lima Puluh Kota (Data berdasarkan Draft Revisi Perda RTRW Kab. Lima Puluh Kota tahun 2012-2032).
7	Kawasan Sempadan Rel Kereta Api	
8	Sempadan SUTT dan SUTM	
9	Kawasan Perumahan	Bukittinggi
10	Kawasan Perdagangan dan jasa dan Perkantoran	Bukittinggi

Sumber : Hasil rencana, 2008

Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan ini ditujukan memiliki fungsi sebagai kawasan pemeliharaan kelestarian kawasan lindung itu sendiri. Pada kawasan perencanaan, kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat adalah kawasan Ngarai Sianok yang membentang pada batas barat kawasan perencanaan.

1. Kawasan Ngarai Sianok

Penetapan kawasan ini sebagai kawasan lindung didasarkan pada kondisi fisik dasarnya yang unik dan rentan/rawan bencana alam longsor dan gempa, serta kekhasan alamnya yang memiliki nilai yang sangat tinggi, baik keindahannya, maupun keunikannya.

2. Sempadan Ngarai Sianok

Sempadan ngarai merupakan zona rawan gerakan tanah tinggi yang sensitif terhadap gempa bumi tektonik yang berakibat terjadinya gerakan jenis reruntuhan, longsor tanah dan batuan dengan sempadan 50 meter.

3. Sempadan Sungai

Sempadan sungai merupakan jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya. Rencana penetapan kawasan sempadan sungai adalah pada seluruh aliran sungai yang ada di kabupaten, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan.

6.3.3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pembangunan berkembang dengan pesat, dan perlu dilakukan pengendalian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun bagi kelestarian alam. Mengingat pentingnya kelestarian alam bagi makhluk hidup, maka RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 menetapkan kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam PP no 13 tahun 2017 tentang perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, meliputi :

a. Cagar Alam berlokasi di :

- Kabupaten Lima Puluh Kota (29.224 Ha),

Kawasan Suaka Alam Cagar Alam berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki luas kurang lebih 20.799 Ha yang terdiri dari 1.) Kawasan Cagar Alam lembah Harau 298 Ha, status kawasan berdasarkan Besluit Van Der Gouverneur General Van Netherlanch Indie No 15 Stbl 1933 tanggal 10 Januari 1933 adalah sebagai *nature Reserve* (Cagar Alam). Kemudian dengan diterbitkannya keputusan Menteri Pertanian No. 478/Kpts/Um/8/1979 seluas 27,5 Ha dari kawasan cagar alam dialih fungsikan menjadi taman wisata alam dengan nama sama sehingga luasan kawasan yang tetap berfungsi sebagai kawasan cagar alam menjadi 270,5 Ha.

- Kabupaten Tanah Datar (99.856 Ha),
- Kabupaten Sijunjung (41.466,72 Ha)
- Kabupaten Padang Pariaman (92.125 Ha),
- Kabupaten Pasaman (34.469 Ha), Kawasan Cagar Alam Rimbo Panti yang terdapat di Kecamatan Panti dengan luas 2.597,60 Ha,
- Kabupaten Solok (99.998 Ha),
- Kota Padang (80.189 Ha) dan
- Kabupaten Agam (36.635 Ha).

b. Kawasan Suaka Marga Satwa Kawasan dan Suaka Marga Satwa Laut berlokasi di :

- Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai (24.952 Ha),
- pulau Penyu Kabupaten Pesisir Selatan (450 Ha),
- Pulau Panjang Kabupaten Padang Pariaman (1.980 Ha);
- Suaka Margasatwa Rimbang Baling seluas 6.023,91 Ha.
- Kawasan Suaka Marga Satwa ditetapkan di Malampah Alahan Panjang yang terdapat di Kecamatan Simpang Alahan Mati, Tigo Nagari, Bonjol dan Lubuk Sikaping dengan luas 29.620,04 Ha.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 593/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016 tentang penetapan fungsi dalam fungsi pokok kawasan

suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagai suaka margasatwa Rimbang Baling di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar

- Kawasan Suaka Margasatwa Alahan Panjang seluas 6.977,61 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.597/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016 tentang Penetapan fungsi dalam fungsi pokok kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagai suaka margasatwa alahan panjang di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat seluas 39.208,07 Ha,
 - Secara nomenklatur kehutanan, Taman Wisata Alam yang ada di Kabupaten Tanah Datar adalah TWA Mega Mendung, TWA Marapi, TWA Singgalang – Tandikek dan TWA Sago Malintang.
- c. Kawasan Suaka Alam dengan ekosistem khas, merupakan habitat alami yang memberi perlindungan bagi perkembangan flora, fauna yang khas dan beraneka ragam, yaitu Suaka Alam Selasih Talang (6.150) Ha di Kabupaten Solok
 - d. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, kawasan ini ditetapkan di Batang Tomak, Air Bangis, dan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat; Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan; sebagian besar kawasan pantai Kepulauan Mentawai; Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Bungus Teluk Kabung di Kota Padang.
 - e. Kawasan Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) wilayah Sumatera Barat (227.130 Ha), yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, dan Taman Nasional Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas sekitar 190.500 Ha.
 - f. Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), ditetapkan di wilayah Kota Padang yaitu Taman Hutan Raya Bung Hatta dengan luas lebih kurang 240 Ha.
 - g. Kawasan Taman Wisata Alam, meliputi Taman Wisata Alam Mega Mendung (12,50 Ha) di Kabupaten Tanah Datar, TWA Marapi, TWA Singgalang – Tandikek dan TWA Sago Malintang, Taman Wisata Alam Lembah Harau (27,50 Ha) di Kabupaten Limapuluh Kota, Taman Wisata Alam Rimbo Panti (570 Ha) di Kabupaten Pasaman, Taman Wisata Alam Bukit Batu Patah (500 Ha) di Kabupaten Tanah Datar, serta taman wisata alam di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi;
 - h. Kawasan Taman Wisata Alam Laut di Pulau Pieh (39.000 Ha) Kabupaten Padang Pariaman dan Teluk Saibi Sarabua (21.200 Ha) Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - i. Kawasan Cagar Budaya yang tersebar pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat termasuk di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain Kawasan cagar alam budaya & ilmu pengetahuan adalah kawasan dimana rawan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas berada. Arah pengembangan kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi Bangunan PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) merupakan kawasan bersejarah berupa bangunan museum yang berlokasi di Kec. Gunung Omeh, serta Situs Menhir di Kecamatan Harau dan Kecamatan Bukik Barisan merupakan batu yang merupakan sejarah suku-suku di Kabupaten lima Puluh Kota.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang memiliki warisan budaya berupa arsitektur bangunan yang khas yang tidak ditemukan di kota lain. Sebagai tindak lanjut UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan & Pariwisata Nomor PM.05/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sumatera Barat sebagai Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan Cagar Budaya dan Peraturan Walikota Bukittinggi No. 2 Tahun 2012.

Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Sawahlunto, di samping memiliki kekayaan kesenian yang multietnis, juga memiliki Warisan Budaya Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto atau disebut WBTBOS, yang merupakan bukti dampak revolusi industri dunia Barat di wilayah Hindia Belanda. Walaupun operasi penambangan batu bara telah berhenti, namun jejak-jejak Kota tambang dengan segala peninggalannya masih terjaga dengan asri dan menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki Kota Sawahlunto.

Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dijaga dan dilestarikan, sekaligus sebagai salah satu aset pusaka yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai kota yang telah eksis sejak zaman Belanda, Sawahlunto memiliki banyak benda cagar budaya yang perlu dikelola dengan baik dan dijadikan sebagai salah satu keunggulan lokal yang dimiliki. Pemerintah Kota Sawahlunto telah melakukan berbagai upaya agar bukti-bukti peninggalan tersebut tetap terawat dengan baik dan dilestarikan. Sebagai komitmen, Pemerintah Daerah telah menetapkan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs peninggalan tersebut sebagai Cagar Budaya.

6.3.4. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kemungkinan bencana terhadap kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta kegiatan lainnya. Berdasarkan PP No 13 tahun 2017 tentang perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, disebutkan bahwa yang termasuk kawasan bencana alam meliputi: rawan tanah longsor, rawan gelombang pasang, rawan banjir, rawan letusan gunung berapi, rawan gempa bumi, rawan gerakan tanah, zona patahan aktif, rawan tsunami, rawan abrasi dan rawan bahaya gas beracun.

Arah kebijakan pada kawasan rawan bencana adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan menekan kerugian terhadap masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah.

Kawasan rawan bencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Kawasan Rawan Tanah Longsor dan Gerakan Tanah tersebar hampir merata di seluruh Sumatera Barat terutama pada sepanjang jalur patahan semangko, pada zona ini banyak terdapat morfologi dan relief yang terjal serta banyak daerah hancuran menjadi zona rentan gerakan tanah karena terkena patahan. Selain itu pada kawasan gunung api, hal ini disebabkan oleh batuan produk gunung api kuarter merupakan batuan yang tidak solid, menempati morfologi perbukitan sehingga mudah longsor akibat curah hujan tinggi maupun akibat getaran gempa bumi. Lebih 50% dari luas Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah dengan zona kerentanan gerakan tanah tinggi dan Zona gerakan tanah menengah. Kawasan ini tersebar mulai dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat (Pasaman Barat memiliki kawasan dengan potensi kawasan rawan tanah longsor dan Gerakan tanah dengan zona kerentanan Gerakan tanah tinggi dan zona Gerakan tanah menengah) sampai pada perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai wilayah perbatasan dengan Provinsi Riau, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan hingga ke perbatasan Propinsi Bengkulu.
- b. Kawasan Rawan Banjir, Kawasan Rawan Kekeringan dan Banjir Bandang di Sumatera Barat terdapat di kawasan-kawasan yang bercirikan: daerah berlereng landai, pertemuan dua sungai besar, banyak terdapat meander sungai, adanya perubahan kelerengan yang tiba-tiba, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul. Wilayah dengan ciri-ciri seperti ini terdapat di Kinali, Air Bangis, dan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat; Kabupaten Pasaman,

Painan, Air Haji, dan sekitar Lunang Silaut, di Kabupaten Pesisir Selatan; Kota Solok, Kota Padang, Kabupaten Solok dan Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam, sedangkan Kawasan Banjir Bandang berpotensi di seluruh Kawasan Provinsi Sumatera Barat, tetapi yang sering terjadi di daerah perbukitan seperti Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- c. Kawasan Potensi Tsunami terdapat di 7 (tujuh) kawasan disepanjang pantai Barat Sumatera meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- d. Kawasan Potensi Gempa Darat (dan terdampak gempa) terdapat di sepanjang Patahan Semangko yang dimulai dari Kabupaten Pasaman, Agam, sebagian Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Kabupaten Solok, kota Solok, kota Sawalunto, Kab. Sijunjung sampai ke Kabupaten Solok Selatan, serta kawasan potensi (terdampak) gempa laut di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di pantai barat Sumatera.

Gempa Darat mempunyai 4 segmen yang terdiri atas:

1. Segmen Sumpur, terdapat di kawasan Rao Lubuk Sikaping Pasaman dengan panjang patahan ± 35 km, segmen ini terjadi dengan kisaran 23-24 tahun, dimana terakhir terjadi tahun 1977 dengan kekuatan 5,5 SR.
2. Segmen Sianok, panjang ± 90 km terletak di Ngarai Sianok Kota Bukittinggi sampai ke Danau Singkarak bagian Timur, dengan pergeseran ± 23 MM/tahun, terakhir terjadi pada tanggal 6 Maret 2007 dengan magnitude 6,4 SR.
3. Segmen Sumani, panjang ± 60 km terdapat di ujung Utara Danau Singkarak mengarah ke Kota Solok, Slayo, berakhir di Utara Danau Diatas, sebelah tenggara Gunung Talang, terakhir terjadi pada 6 Maret 2007 dengan 7,4 SR
4. Segmen Suliti, panjang ± 90 km, terdapat di Danau Diatas dan Danau Dibawah dengan kisaran pergeseran 23 mm/Tahun, patahannya menelusuri Suliti ke Arah Barat Laut Gunung Kerinci. (Sumber : D.Hilaman Natawijaya dkk, 1995)

6.3.5. Kawasan Lindung Geologi

Berdasarkan Penjelasan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah disebutkan bahwa pada dasarnya kelompok utama dari kawasan lindung adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
- b. Kawasan perlindungan setempat, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka marga satwa, serta kawasan cagar budaya, dan ilmu pengetahuan;
- d. Kawasan rawan bencana alam, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
- e. Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memiliki keunikan baik dari jenis bebatuan, bentang alam, proses geologi maupun kawasan imbuhan air tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. Kawasan lindung geologi hanya mencakup kawasan cagar alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan lindung geologi yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas kawasan rawan gempa bumi terdapat di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kawasan rawan tsunami terdapat di seluruh wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kebijakan kawasan lindung geologi diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan guna mempertahankan fungsinya sebagai kawasan lindung. Kawasan lindung geologi di Sumatera Barat tersebar di beberapa kabupaten/kota, diantaranya:

a. Kawasan cagar alam geologi

Kawasan lindung Kars terdapat di Kubah Batusangkar, bukit-bukit kars di Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung, Kars di Kabupaten Tanah Datar terdapat di Kecamatan Lintau Buo dan Lintau Buo Utara

Kota Bukittinggi terdapat beberapa kawasan yang termasuk dalam kawasan dengan fungsi lindung, antara lain:

1. Kawasan perlindungan setempat;
2. Ruang terbuka hijau; dan
3. Kawasan cagar budaya.

b. Kawasan rawan bencana alam geologi, meliputi:

- 1) Kawasan rawan gempa tektonik, dengan sumber gempa penunjaman Jawa-Sumatra yang berpusat di laut sebelah barat sepanjang pantai barat Sumatera, dengan tingkat intensitas kerusakan pada skala VI-IX MMI tingkat resiko sedang tingkat tiga, yaitu mencakup Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kawasan rawan gempa tektonik dengan sumber pada zona patahan aktif Sumatra yaitu sepanjang patahan Semangko dengan tingkat intensitas kerusakan mencapai skala VIII-IX MMI, dengan tingkat resiko besar satu yang mencakup wilayah Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Agam. Sedangkan kawasan rawan gempa bumi dengan skala V-VII dengan tingkat resiko kecil yang disebabkan oleh guncangan akibat gempa tektonik dan vulkanik yang mencakup hampir seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kawasan ini terjadi umumnya pada daerah yang berada di sepanjang pantai barat Sumatera: Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah gempa tektonik yang berpusat di laut. Sedangkan kawasan rawan gempa tektonik yang berada zona sepanjang patahan Semangko meliputi mulai dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Solok, sampai Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

- 2) Kawasan Rawan Letusan Gunung Api terdapat di kawasan gunung api aktif yaitu kawasan sekitar Gunung Merapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci dengan klasifikasi: kawasan bahaya I dengan radius 3 km dari puncak gunung, kawasan bahaya II dengan radius 3-7 km dari puncak gunung, dan kawasan bahaya III dengan radius 8-14 km dari puncak gunung. Kawasan rawan letusan gunung api terdapat juga pada daerah sekitar lembah sungai yang berhulu di lereng atas gunung api memanjang hingga ke lereng bawah,

sebagai akibat adanya aliran lahar, dan abu vulkanik. Kawasan ini umumnya terjadi di Kabupaten dan Kota yang berada < 10 Km dari pusat erupsi gunung api pada Kawasan gunung api aktif yaitu Gunung Merapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci.

- 3) Kawasan Rawan Bencana Tsunami meliputi seluruh kawasan pesisir pantai Pulau Sumatera dan Kepulauan Mentawai beserta pulau-pulau kecil lainnya. Kawasan rawan tsunami di pesisir Provinsi Sumatera Barat dapat dikelompokkan dalam tiga kategori zona kerawanan tsunami yaitu
 - Zona Kerawanan tinggi, wilayah dengan jarak garis pantai 50 m, sepanjang pantai dengan ketinggian kontur kurang dari 10 m dpl.
 - Zona Kerawanan menengah yaitu daerah sepanjang pantai dengan kontur ketinggian 10 – 15 m dpl, dengan kemiringan lereng cukup terjal.
 - Zona kerawanan rendah yaitu wilayah sepanjang pantai dengan ketinggian 15 – 30m dpl, dengan morfologi curam dan relief tinggi atau berbukit, dan daerah ini dapat dimanfaatkan untuk evakuasi dan lokasi pengungsian.
- 4) Kawasan Rawan Abrasi Pantai terjadi pada daerah pantai dengan komposisi batuan sedimen lunak yang dicirikan oleh pantai landai dan berhadapan langsung dengan laut lepas. Terdapat mulai dari Kota Padang, hingga Kota Pariaman. Termasuk yang ada di Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan serta Kepulauan Mentawai.
- 5) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Kawasan ini termasuk kawasan Tuf Ngarai Sianok, danau Dibawah, dan kaldera Gunung Api Maninjau. Berdasarkan data yang bersumber dari Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Pasaman terdapat enam sumber mata air yang telah dikelola dan dimanfaatkan. Ke enam sumber mata air tersebut berada di Kecamatan Lubuk Sikaping (Sumber Bulakan), Kecamatan Bonjol (Sumber Air Muruh dan Sumber Batu Balah, sumber tanjung Bungo), Kecamatan Simpang Alahan Mati (sumber toboh, sumber alahan tugak). Selain yang telah dikelola ada satu potensi sumber mata air yang rencananya akan dimanfaatkan sebagai sumber air di Kecamatan Simpang Alahan Mati. Sehingga mata air sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah diperlukan adanya sempadan mata air.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 bahwa Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air. Secara keseluruhan luas kawasan sempadan mata air 21,96 Ha.

6.3.6. Pengembangan Kawasan Budidaya

a. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi, berdasarkan PP 26 tahun 2008 terdiri dari hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat di konversi serta hutan rakyat. Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi hutan produksi yang cukup luas dan tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Untuk rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sesuai RTRW Provinsi Sumatera Barat 2012-2032 adalah seluas 796.424 Ha. Pengembangan hutan produksi di arahkan di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok Selatan dan Kota Sawahlunto. Penetapan kawasan budidaya hingga tahun 2030 didasarkan pada Peraturan Menteri ATR Nomor 01 Tahun 2018 tentang pedoman

penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasil kesepakatan antar wilayah pada Ditjen Penataan Ruang yang menyangkut klasifikasi pemanfaatan ruang kabupaten. Luas keseluruhan kawasan budidaya mencapai 162.429,14 Ha atau 41,12 % (direncanakan sampai tahun 2030) dari luas wilayah administrasi. Untuk rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sampai dengan tahun 2030 seluas 34.648,80 Ha yang terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 29.760,91 ha dan kawasan hutan produksi konversi dengan luas 4887,89 Ha.

b. Kawasan Sentra Produksi (KSP) Pertanian

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian diarahkan untuk mengoptimalkan sumberdaya pembangunan berdasarkan keunggulan wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing produk hasil pertanian agar dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi. Kawasan hutan rakyat disebut juga sebagai hutan milik, adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik baik secara perseorangan/kelompok atau badan hukum sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup hayati beserta lingkungannya. Rencana sebaran kawasan hutan rakyat dikembangkan di seluruh wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Rencana pengembangan budidaya tanaman pangan diarahkan untuk pemanfaatan secara intensif lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Selain itu, juga akan ditetapkan lahan-lahan pertanian tanaman pangan abadi untuk mendukung ketahanan pangan.

Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diperlihatkan sebagai berikut :

Tabel 6.7
Kawasan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KOMODITI	LOKASI KAWASAN
1	Padi	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan;
2	Jagung	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kab. Agam, Kabupaten Solok Selatan, Kab. Sijunjung, Dharmasraya ;
3	Ubi Kayu	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021), Kota Payakumbuh
4	Ubi Jalar	Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kab. Pasaman Barat ;
5	Jeruk	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021 yaitu Jeruk Siam Gunuang Omeh), Kabupaten Agam, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Dharmasraya ;

NO	KOMODITI	LOKASI KAWASAN
6	Pisang	Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman Barat, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Kep. Mentawai
7	Manggis	Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021), Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Pasaman Barat, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok ;
8	Sayuran	Kab. Agam, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kota Payakumbuh
9	Kentang	Kab. Agam dan Kab. Solok, Kab. Tanah Datar
10	Bawang Merah	Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam , Kab. Solok Selatan
11	Tomat	Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Agam
12	Cabe	Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021), Kab. Solok, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok Selatan, Kab. Pesisir Selatan, Kota Payakumbuh.
13	Tanaman Hias (Bunga)	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kab. Tanah Datar
14	Durian	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar
15	Tanaman Buah Lainnya (Mangga)	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kep. Mentawai
16	Tanaman Sayuran Lainnya	Kab. Pesisir Selatan
17	Nangka	Kab. Kep. Mentawai

Selanjutnya Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan Perkebunan di Provinsi Sumatera Barat diarahkan pada lokasi sebagaimana diperlihatkan sebagai berikut .:

Tabel 6.8
Kawasan Pengembangan Komoditi Unggulan Perkebunan

NO	KOMODITI PERKEBUNAN	LOKASI KAWASAN
1	Kelapa Sawit	Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kab. Pasaman ;
2	Karet	Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Pasaman Barat ;
3	Kelapa Dalam	Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Pasaman barat, Kab. Solok, Kab. 50 Kota, Kab. Kep. Mentawai ;
4	Kakao	Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan

NO	KOMODITI PERKEBUNAN	LOKASI KAWASAN
		Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021), Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman.
5	Kopi	Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Pasaman.
6	Gambir	Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021), Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Pasaman
7	Tebu	Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok
8	Enau	Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021), Kabupaten Pasaman
9	Jahe	Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021)
10	Pala	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kep. Mentawai
11	Cengkeh	Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok
12	Nilam	Kab. Pasaman Barat

Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya, dan menghindarkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dengan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri, dan kawasan permukiman. Rencana pengembangan kawasan perkebunan hampir meliputi di seluruh kecamatan dengan luas kawasan 74.150,82 Ha.

Pengembangan Kawasan Komoditi Peternakan di Provinsi Sumatera Barat diarahkan pada lokasi sebagaimana diperlihatkan Tabel berikut.

Tabel 6.9
Kawasan Pengembangan Komoditi Peternakan

NO	KAWASAN/KOMODITI PETERNAKAN	LOKASI KAWASAN
1.	Kawasan Sentra Produksi	
	Sapi	Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kab. Kep. Mentawai

NO	KAWASAN/KOMODITI PETERNAKAN	LOKASI KAWASAN
	Kerbau	Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kab. Agam
	Unggas	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021 yaitu berupa Telur ayam Ras), Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kab. Kep. Mentawai, Kota Sawahlunto
	Kambing	Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota
2.	Kawasan Integrasi Ternak Sapi dan Tanaman Perkebunan	
	Sapi, Sawit dan Kakao	Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Pasaman
	Sapi dan Kakao	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar dan kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota

Namun demikian, bukan berarti kegiatan peternakan hanya dianggap sebagai kegiatan pelengkap saja. Hal ini mengingat potensi pengembangan sektor peternakan yang cukup besar dan dapat diandalkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Berdasarkan pemikiran tersebut serta atas dasar potensi yang dimilikinya, maka ditetapkan kebijakan pengembangan peternakan melalui upaya mewujudkan kawasan sentra pengembangan peternakan di seluruh wilayah kecamatan.

c. Kawasan Sentra Produksi (KSP) Perikanan

Perikanan Tangkap

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 pasal 3, bahwa wilayah provinsi, sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1, terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Sesuai dengan undang-undang tersebut maka batas wilayah laut termasuk kawasan perikanan tangkap yang pengelolaannya menjadi wewenang provinsi adalah sejauh 12 mil.

Sumatera Barat memiliki luas perairan laut sampai dengan 12 mil yaitu 51.060 km². Dengan kondisi laut tersebut maka potensi perikanan laut masih cukup besar. Berdasarkan karakteristik habitat/lingkungan hidup ikan, Sumatera Barat memiliki potensi sumberdaya ikan pelagis besar yang cukup menjanjikan, antara lain tuna, cakalang, tongkol dan tenggiri.

Kawasan pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Sumatera Barat berada di dua kota dan lima kabupaten yang mempunyai wilayah pesisir dan laut yaitu Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Luas lahan perairan umum di Sumatera Barat sebesar 69.806,78 ha yang terdiri dari danau, sungai, telaga, rawa dan lain - lain dan tersebar pada 19 Kabupaten/Kota. Dari luas perairan umum tersebut diatas yang mempunyai potensi untuk perikanan budidaya adalah sebesar 3.100 ha. Semua

lahan perairan umum tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk usaha penangkapan ikan dalam skala kecil dan baru sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk budidaya ikan.

Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya dikelompokkan menjadi tiga yaitu budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar. Kriteria untuk kawasan pengembangan budidaya air tawar dan tambak adalah sebagai berikut :

- Kelerengan lahan < 8 %
- Persediaan air cukup
- Jauh dari sumber pencemaran, baik pencemaran domestik maupun industri.
- Kualitas air baik (memenuhi kriteria kualitas air untuk budidaya perikanan).

Budidaya laut dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat serta Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan komoditi budidaya rumput laut, kerang mutiara, ikan kerapu serta tambak udang.

Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan panjang garis pantai 1.402,66 km memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Kawasan laut Mentawai masih ditutupi oleh hutan mangrove dan hamparan terumbu karang, sehingga biota laut yang ada di dalamnya dengan suburnya berkembang biak. Topografi wilayah Kepulauan Mentawai yang dikelilingi oleh laut, maka daerah ini memiliki potensi yang menjanjikan dari sektor perikanan. Sebanyak 3.843 orang masyarakat Kepulauan Mentawai berprofesi sebagai nelayan, dengan rincian 1.777 merupakan nelayan penuh (*full time*) sedangkan sisanya sebanyak 1.100 orang merupakan nelayan sambilan utama (paruh waktu) dan 966 merupakan nelayan sambilan tambahan. Pada tahun 2016 produksi ikan Kepulauan Mentawai sebanyak 6.920 ton atau meningkat 31,81% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 5.252 ton. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi lestari perikanan laut sebesar 269.682 ton/tahun.

Pengembangan perikanan darat budidaya tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan sentra di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya komoditi dan kawasan pengembangan perikanan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.10
Kawasan Pengembangan dan Komoditi Perikanan Budidaya

NO	KOMODITI PERIKANAN	LOKASI KAWASAN PENGEMBANGAN PADA KABUPATEN/KOTA
1	Ikan Nila	Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung , Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman
2	Ikan Mas	Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh
3	Ikan Lele	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh
4	Ikan Kerapu	Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Mentawai
5	Lobster	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Mentawai
6	Ikan Bandeng	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan
7	Kerang Mutiara	Kabupaten Pesisir Selatan
8	Ikan Gurami	Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab.

NO	KOMODITI PERIKANAN	LOKASI KAWASAN PENGEMBANGAN PADA KABUPATEN/KOTA
		Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021 yaitu Ikan Gurami Sago)
9	Ikan Sidat	Kabupaten Pesisir Selatan
10	Ikan Gurami	Kota Payakumbuh

d. Kawasan Agribisnis

Pengembangan kawasan agribisnis diarahkan untuk membangun keterkaitan dari hulu sampai hilir yang bertujuan untuk mencapai multiplier efek secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pendekatan pengembangan kawasan agribisnis dari komoditi unggulan secara terpadu mencakup sub sistem agribisnis hulu, sub sistem usaha tani/pertanian primer, sub sistem agribisnis hilir dengan mengembangkan industri-industri pengolahan dan pemasarannya serta sub sistem jasa-jasa penunjang seperti perkreditan, penyuluhan, infrastruktur, pengangkutan, teknologi tepat guna dan lain-lain.

Pengembangan kawasan agribisnis Provinsi Sumatera Barat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.11
Kawasan Pengembangan Agribisnis

NO	KOMODITI/PRODUK	LOKASI KAWASAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS
1	Daging	Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh kota , Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung.
2	Sayuran Dataran Tinggi	Kabupaten Agam, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh
3	Kakao	Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021), Kota Payakumbuh

e. Kawasan Pertambangan

Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah yang kaya akan hasil tambang, terutama tambang bahan galian dan berbagai sumberdaya mineral. Hampir semua wilayah administrasi merupakan areal penambangan, karena 17 dari 19 wilayah administrasi kabupaten/kota mengandung bahan mineral yang berpotensi untuk dieksploitasi. Kawasan pertambangan di Sumatera Barat berada di Kota Sawahlunto (pertambangan batubara), Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pesisir Selatan untuk batubara; Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok untuk pertambangan Galena; Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk pertambangan minyak dan gas; serta Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat terdapat potensi bahan galian seperti batubara, emas, semen (bukit kapur) dan geothermal (panas bumi) dan tambang pasir besi.

f. Kawasan dan Sentra Industri

Rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatera Barat berlokasi di perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang berupa Kawasan *Padang Industrial Park* (PIP).

Pengembangan industri tidak hanya pada kawasan tersebut, tetapi lebih diarahkan pada pengembangan sentra-sentra industri seperti ditunjukkan pada tabel berikut .

Tabel 6.12
Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri di Provinsi Sumatera Barat

NO	SENTRA INDUSTRI	KABUPATEN/KOTA
1.	Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Kep. Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman
2.	Industri Pengolahan Kakao	Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto
3.	Industri Pengolahan Makanan	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung, Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Pariaman
4.	Industri Pengolahan Gambir	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam
5.	Industri Pengolahan Minyak Atsiri	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok, Kab. Dharmasraya, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Solok
6.	Industri Pengolahan Semen	Kota Padang, Kab. Solok, Kab. Sijunjung
7.	Industri Pengolahan Kulit	Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang
8.	Industri Pengolahan Tekstil dan Produk Tekstil	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman
9.	Industri Alat dan Mesin Pertanian	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Sijunjung, Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya
10.	Industri Maritim	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kota Padang
11.	Industri Kelapa	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Kep. Mentawai
12.	Industri Kelapa Sawit	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Dharmasraya

g. Kawasan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi :

- a. Pusat Pelayanan Primer (Kota Padang) dan Sekunder (Bukittinggi, Batusangkar dan Sawahlunto) Pariwisata;
- b. Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) terdiri dari :

1. DPP Padang dan sekitarnya mencakup wilayah Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman dengan tema utama kawasan pengembangan destinasi pantai dan pulau (*Marine Tourism*);
 2. DPP Bukittinggi dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Taman Bumi (*Geopark*);
 3. DPP Tanah Datar dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kab. Solok, Kota Solok dan Kab. Solok Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Minangkabau Tempo Dulu (*Ancient Minangkabau Tourism*);
 4. DPP Sawahlunto dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Wisata Warisan Budaya Tambang Batu Bara (*Coal Mining Heritage Tourism*);
 5. DPP Kepulauan Mentawai dan sekitarnya yang mencakup wilayah Sipora, Siberut, Pagai Utara dan Pagai Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Destinasi Selancar dan Ombak (*Whitesand Tourism*).
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), meliputi : KSPP Mandeh dan sekitarnya, KSPP Bukittinggi dan Sekitarnya, KSPP Maninjau dan sekitarnya, KSPP Singkarak dan sekitarnya, KSPP Danau Kembar dan sekitarnya, KSPP Siberut dan sekitarnya; dan KSPP Sawahlunto dan sekitarnya.
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), meliputi :
1. Kawasan pariwisata bahari dan budaya Pantai Padang – Kota Tua dan sekitarnya;
 2. Kawasan pariwisata bahari Bungus – Mandeh – Carocok Painan dan sekitarnya;
 3. Kawasan pariwisata bahari Pantai Gandoriah – Tiram dan sekitarnya;
 4. Kawasan geowisata Ngarai Sianok – Maninjau – Tarusan Kamang dan sekitarnya;
 5. Kawasan geowisata dan budaya Silokek – Kampung Padang Ranah – Candi Padang Roco dan sekitarnya;
 6. Kawasan geowisata Harau – Kelok Sembilan – Ngalau Indah dan sekitarnya;
 7. Kawasan geowisata dan budaya Pantai Sasak – Talamau dan sekitarnya;
 8. Kawasan geowisata dan budaya Saribu Rumah Gadang- Goa Batu Kapal – TNKS dan sekitarnya;
 9. Kawasan ekowisata Malibo Anai – Nyarai dan sekitarnya;
 10. Kawasan heritage Istano Basa Pagaruyung – Nagari Tuo Pariangan – PDIKM dan sekitarnya;
 11. Kawasan pariwisata alam dan geowisata Singkarak – Pulau Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya;
 12. Kawasan pariwisata alam dan sains Taman Equator – Rimbo Panti dan sekitarnya;
 13. Kawasan gastrowisata Payakumbuh dan sekitarnya;
 14. Kawasan Warisan Budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin meliputi Kota Sawahlunto, Kab Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang.

h. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman sesuai dengan RTRW Provinsi Sumatera Barat 2012-2032 seluas 61.682 ha. Kawasan tersebut terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Arah pengembangan kawasan permukiman adalah:

- a. Secara teknis aman sebagai permukiman dan jauh dari bahaya bencana alam.
- b. Sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha.

- c. Pengaturan terhadap luas lahan terbangun dengan tak terbangun pada kawasan pengembangan permukiman.
- d. Pengelompokan kawasan permukiman untuk penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang lebih efisien dan efektif.
- e. Penegasan batas kawasan terhadap kawasan non permukiman.
- f. Penetapan tinggi bangunan pada kawasan pengembangan permukiman.
- g. Pengembangan sarana prasarana perumahan dan permukiman berupa jalan poros, jalan lingkungan, drainase, Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM)

6.3.7. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pada saat ini masih terdapat satu kabupaten di kategorikan tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sementara itu, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan telah dinyatakan entas pada Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2015-2019. Ketertinggalan nagari dan desa pada daerah tertinggal ini pada umumnya disebabkan oleh aksesibilitas yang masih terbatas baik berupa akses jalan ke pusat-pusat pertumbuhan, terbatasnya akses pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, terbatasnya potensi sumberdaya alam, kapasitas sumberdaya yang masih terbatas. Untuk mengatasi ketertinggalan ini arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai berikut:

- a. Memperkuat kelembagaan pembangunan di daerah tertinggal untuk mengatasi persoalan koordinasi pembangunan lintas sektoral dan lintas wilayah.
- b. Menyusun rencana aksi yang lebih detail tentang penguatan konektifitas di wilayah tertinggal, terutama rencana aksi untuk pembangunan infrastruktur dasar bagi kepentingan peningkatan usaha sesuai dengan potensi yang dapat dikembangkan.
- c. Merencanakan zona pengolahan komoditi unggulan untuk menciptakan terjadinya aglomerasi diantara perusahaan yang bergerak dalam perdagangan dan industri pengolahan.
- d. Meningkatkan aksesibilitas daerah tertinggal dengan daerah lainnya dan dengan pusat-pusat pertumbuhan, melalui pembangunan infrastruktur dasar.
- e. Meningkatkan arus perjalanan orang dan barang melalui pembangunan simpul pergerakan orang dan barang seperti terminal, pelabuhan, dermaga di daerah tertinggal.
- f. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.

6.3.8. Wilayah Perbatasan dengan Provinsi Lain

Provinsi Sumatera Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah utara, dengan Provinsi Riau dan Jambi di sebelah timur, dengan Provinsi Bengkulu sebelah Selatan, dan dengan Samudera Hindia di sebelah barat. Kondisi wilayah perbatasan relatif tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini terjadi karena wilayah perbatasan mempunyai keterbatasan aksesibilitas, keterbatasan infrastruktur pendidikan, kesehatan, komunikasi dan transportasi, pasar, serta energi. Persoalan selanjutnya adalah lokasi permukiman yang menyebar sehingga sulit menyediakan sarana dan prasarana secara efektif.

Jumlah kabupaten dan kecamatan yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.13
Kabupaten/Kota dan Jumlah Kecamatan Yang berbatasan dengan Provinsi Tetangga

NO	PROVINSI PERBATASAN	KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	REGULASI
1.	Sumatera Utara	Pasaman	5	1). Dua Koto 2). Rao 3). Rao Selatan 4). Rao Utara 5). Mapat Tunggal	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53,54, dan 55 Tahun 2018
		Pasaman Barat	6	1). Sungai Baremas 2). Lembah Melintang 3). Ranah Batahan 4). Koto Balingka 5). Sungai Aur 6). Gunung Tuleh	
2.	Riau	Pasaman	2	1). Mapat Tunggu 2). Mapat Tunggul Selatan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2013
		Lima Puluh Kota	4	1). Kapur IX 2). Pangkalan Koto Baru 3). Harau 4). Lareh Sagon Halaban	
		Sijunjung	3	1). Sumpur Kudus 2). Sijunjung 3). Kamang Baru	
		Dharmasraya	2	1). Timpeh 2). Padang Laweh	
3.	Jambi	Dharmasraya	6	1). Padang Laweh 2). Tiumang 3). Koto Salak 4). Sungai Rumbai 5). Koto Besar 6). Asam Jujuhan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70, 71, 72 dan 73 Tahun 2018
		Solok Selatan	3	1). Sangir Balai 2). Sangir Balai Janggo 3). Pauh Duo	
		Pesisir Selatan	7	Linggo Sari Baganti Air Pura Pancung Soal Basa Ampek Balai Tapan Ranah Ampek Hulu Tapan Lunang Silaut	
4.	Bengkulu	Pesisir Selatan	1	1). Silaut	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017

Arah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan sebagai berikut:

- Pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum meliputi transportasi, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur perekonomian.
- Pengembangan dan penyelamatan ekosistem, kesepakatan antar wilayah hulu, hilir, provinsi, dan pusat dalam rangka menjaga kelestarian alam dan antisipasi terhadap bencana.
- Pengembangan potensi ekonomi berupa sumberdaya alam, wisata dan sumber ekonomi lainnya dilakukan dengan pola meningkatkan kerjasama antar provinsi maupun antar kabupaten tetangga.
- Pengembangan sosial budaya, pertalian sosial budaya masyarakat di wilayah perbatasan biasanya mempunyai keterkaitan persaudaraan, kekerabatan karena interaksi masyarakat antar wilayah perbatasan sudah lama terjadi.
- Peningkatan sumberdaya manusia dan regulasi mendukung pengembangan daerah perbatasan.

6.3.9. Proyeksi Indikator Makro Kabupaten/Kota

- Proyeksi pertumbuhan ekonomi (%)

Tabel 6.14

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (%)

No	Kabupaten/Kota	Baseline		Outlook	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kab. Kep. Mentawai	4,73	-1,85	2,31	2,64	3,93	4,27	4,37	4,50
2	Kab. Pesisir Selatan	4,78	-1,11	2,55	2,89	4,17	4,52	4,62	4,75
3	Kab. Solok	5,04	-1,12	2,69	3,18	4,47	4,81	4,91	5,05
4	Kab. Sijunjung	4,81	-1,10	2,58	2,92	4,21	4,55	4,66	4,79
5	Kab. Tanah Datar	4,99	-1,13	2,38	2,72	4,00	4,34	4,45	4,58
6	Kab. Padang Pariaman	2,4	-10,46	5,30	8,36	7,82	4,04	4,14	4,27
7	Kab. Agam	4,78	-1,38	2,59	2,94	4,23	4,57	4,68	4,81
8	Kab. Lima Puluh Kota	5,06	-1,16	2,39	2,99	4,28	4,62	4,72	4,86
9	Kab. Pasaman	4,8	-0,87	2,30	2,73	4,01	4,36	4,46	4,59
10	Kab. Solok Selatan	4,86	-1,24	2,40	2,79	4,07	4,41	4,52	4,65
11	Kab. Dharmasraya	4,94	-1,39	2,89	3,09	4,38	4,72	4,83	4,96
12	Kab. Pasaman Barat	4,45	-1,34	2,81	2,97	4,26	4,60	4,71	4,84
13	Kota Padang	5,65	-1,86	2,81	3,14	4,43	4,77	4,88	5,01
14	Kota Solok	5,49	-1,42	2,96	3,29	4,59	4,93	5,03	5,16
15	Kota Sawahlunto	5,31	-1,27	2,90	3,24	4,53	4,88	4,98	5,11
16	Kota Padang Panjang	5,56	-1,44	2,77	3,11	4,4	4,74	4,85	4,98
17	Kota Bukittinggi	5,84	-1,74	2,67	3,00	4,29	4,63	4,74	4,87
18	Kota Payakumbuh	5,89	-1,66	2,74	3,07	4,36	4,71	4,81	4,94
19	Kota Pariaman	5,3	-1,32	2,86	3,20	4,49	4,83	4,94	5,07
	Provinsi Sumatera Barat	5,01	-1,6	3,44	3,40	4,57	4,60	4,70	4,84

Sumber : Data diolah oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat

- Proyeksi PDRB Per kapita ADHK (Rp. Juta)

Tabel 6.15

Proyeksi PDRB per Kapita ADHK Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (Rp. Juta)

No	Kabupaten/Kota	Baseline		Outlook	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kab. Kep. Mentawai	32,73	31,59	32,91	33,26	34,04	34,96	35,95	37,02
2	Kab. Pesisir Selatan	20,64	20,28	19,69	20,05	20,66	21,37	22,12	22,94

No	Kabupaten/Kota	Baseline		Outlook	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Kab. Solok	26,53	26,07	25,93	26,53	27,48	28,57	29,72	30,97
4	Kab. Sijunjung	28,47	27,74	28,38	28,79	29,57	30,48	31,45	32,50
5	Kab. Tanah Datar	27,81	27,45	26,97	27,56	28,51	29,59	30,75	31,99
6	Kab. Padang Pariaman	32,08	28,58	29,36	31,59	33,81	34,93	36,12	37,40
7	Kab. Agam	29,74	29,13	28,47	29,00	29,92	30,98	32,10	33,32
8	Kab. Lima Puluh Kota	29,24	28,66	29,24	29,85	30,85	31,99	33,21	34,52
9	Kab. Pasaman	21,96	21,57	21,12	21,43	22,02	22,71	23,44	24,23
10	Kab. Solok Selatan	23,25	22,60	22,13	22,35	22,85	23,45	24,10	24,80
11	Kab. Dharmasraya	30,54	29,41	31,30	31,62	32,35	33,23	34,17	35,20
12	Kab. Pasaman Barat	25,72	24,93	25,79	26,11	26,78	27,56	28,40	29,31
13	Kota Padang	46,76	45,35	47,50	48,47	50,09	51,93	53,90	56,03
14	Kota Solok	40,51	39,33	39,32	39,91	41,03	42,32	43,72	45,22
15	Kota Sawahlunto	44,73	43,81	43,76	44,71	46,25	48,00	49,87	51,89
16	Kota Padang Panjang	48,06	46,74	44,51	44,07	44,26	44,66	45,16	45,79
17	Kota Bukittinggi	47,04	45,55	48,47	49,32	50,82	52,54	54,39	56,38
18	Kota Payakumbuh	33,11	32,10	32,10	32,60	33,53	34,60	35,75	36,99
19	Kota Pariaman	40,59	39,65	39,06	39,78	41,03	42,47	44,01	45,67
	Provinsi Sumatera Barat	31,65	30,82	31,36	32,04	33,12	34,24	35,44	36,74

Sumber : Data diolah oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat

3) Proyeksi PDRB Per kapita ADHB (Rp. Juta)

Tabel 6.16
Proyeksi PDRB per Kapita ADHB Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (Rp. Juta)

No	Kabupaten/Kota	Baseline		Outlook	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kab. Kep. Mentawai	50,44	49,46	53,65	56,00	58,47	61,82	64,41	67,82
2	Kab. Pesisir Selatan	30,25	29,96	30,23	31,70	33,26	35,33	36,97	39,10
3	Kab. Solok	36,36	35,96	37,10	39,01	41,01	43,66	45,79	48,53
4	Kab. Sijunjung	38,46	37,87	40,23	42,03	43,92	46,47	48,46	51,07
5	Kab. Tanah Datar	37,58	37,34	38,18	40,26	42,46	45,33	47,69	50,69
6	Kab. Padang Pariaman	51,14	42,95	44,63	46,98	49,46	52,71	55,35	58,72
7	Kab. Agam	41,8	41,19	41,79	43,85	46,02	48,9	51,20	54,17
8	Kab. Lima Puluh Kota	40,79	40,24	42,71	44,88	47,17	50,18	52,61	55,73
9	Kab. Pasaman	31,66	31,32	31,94	33,45	35,03	37,15	38,82	41,00
10	Kab. Solok Selatan	32,57	31,81	32,40	33,74	35,16	37,09	38,56	40,52
11	Kab. Dharmasraya	41,78	40,41	44,51	46,24	48,07	50,60	52,50	55,05
12	Kab. Pasaman Barat	34,69	33,75	36,17	37,71	39,33	41,53	43,22	45,46
13	Kota Padang	65,65	64,67	70,18	73,62	77,23	82,04	85,86	90,81
14	Kota Solok	57,00	56,05	57,98	60,40	62,95	66,43	69,09	72,62
15	Kota Sawahlunto	58,85	58,02	59,99	62,93	66,03	70,14	73,42	77,66
16	Kota Padang Panjang	64,71	63,82	62,98	64,13	65,41	67,63	68,99	71,20
17	Kota Bukittinggi	66,49	65,00	71,76	75,16	78,73	83,51	87,28	92,18
18	Kota Payakumbuh	50,34	49,63	51,45	53,75	56,16	59,41	61,94	65,26
19	Kota Pariaman	56,56	55,86	56,97	59,62	62,41	66,13	69,06	72,88
	Provinsi Sumatera Barat	45,21	44,03	46,09	48,29	50,6	53,69	56,13	59,30

Sumber : Data diolah oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat

4) Proyeksi Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%)

Tabel 6.17
Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (%)

No	Kabupaten/Kota	Baseline		Outlook	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kab. Kep. Mentawai	2,92	3,98	3,98	3,97	3,91	3,86	3,80	3,71
2	Kab. Pesisir Selatan	6,02	7,00	6,93	6,85	6,73	6,61	6,46	6,30
3	Kab. Solok	4,72	4,65	4,59	4,53	4,42	4,32	4,19	4,05
4	Kab. Sijunjung	3,64	5,30	5,08	5,00	4,86	4,74	4,58	4,40
5	Kab. Tanah Datar	3,20	4,79	4,68	4,63	4,54	4,45	4,34	4,22
6	Kab. Padang Pariaman	6,08	8,13	7,91	7,81	7,68	7,55	7,38	7,21
7	Kab. Agam	4,78	4,61	4,38	4,30	4,15	4,02	3,86	3,67
8	Kab. Lima Puluh Kota	2,30	3,03	2,82	2,73	2,57	2,44	2,27	2,07
9	Kab. Pasaman	5,28	5,04	4,89	4,84	4,74	4,66	4,55	4,42
10	Kab. Solok Selatan	4,91	5,62	5,44	5,38	5,26	5,17	5,03	4,89
11	Kab. Dharmasraya	5,06	5,31	5,06	4,95	4,78	4,62	4,42	4,20
12	Kab. Pasaman Barat	4,74	4,69	4,44	4,35	4,19	4,06	3,89	3,69
13	Kota Padang	8,74	13,64	13,50	13,3	13,09	12,86	12,57	12,31
14	Kota Solok	7,06	8,35	8,16	8,01	7,80	7,61	7,36	7,11
15	Kota Sawahlunto	6,84	8,20	8,12	8,01	7,87	7,72	7,54	7,35
16	Kota Padang Panjang	4,38	7,22	7,10	6,98	6,80	6,62	6,41	6,18
17	Kota Bukittinggi	6,20	7,51	7,35	7,18	6,96	6,74	6,48	6,20
18	Kota Payakumbuh	4,13	6,68	6,48	6,30	6,05	5,81	5,52	5,21
19	Kota Pariaman	5,48	5,73	5,62	5,51	5,34	5,19	5,00	4,79
	Provinsi Sumatera Barat	5,38	6,88	6,70	6,60	6,45	6,31	6,13	5,94

Sumber : Data diolah oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat

5) Proyeksi Indeks pembangunan manusia

Tabel 6.18
Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026

No	Kabupaten/Kota	Baseline		Outlook	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kab. Kep. Mentawai	61,26	61,09	61,29	61,49	61,98	62,48	62,99	63,39
2	Kab. Pesisir Selatan	70,08	69,90	70,06	70,21	70,59	70,98	71,39	71,68
3	Kab. Solok	69,08	69,08	69,53	69,99	70,54	71,11	71,69	72,16
4	Kab. Sijunjung	67,66	67,74	68,12	68,51	69,02	69,54	70,08	70,51
5	Kab. Tanah Datar	72,14	72,33	73,03	73,72	74,45	75,19	75,95	76,59
6	Kab. Padang Pariaman	70,59	70,61	71,07	71,53	72,19	72,85	73,52	74,09
7	Kab. Agam	72,37	72,46	73,06	73,65	74,33	75,02	75,73	76,31
8	Kab. Lima Puluh Kota	69,67	69,47	70,05	70,63	71,18	71,74	72,31	72,77
9	Kab. Pasaman	66,46	66,64	66,73	66,82	67,22	67,63	68,05	68,35
10	Kab. Solok Selatan	68,94	69,04	69,44	69,83	70,37	70,92	71,47	71,93
11	Kab. Dharmasraya	71,52	71,51	71,84	72,16	72,64	73,13	73,63	74,02
12	Kab. Pasaman Barat	68,21	68,49	68,95	69,41	70,07	70,73	71,41	71,97
13	Kota Padang	82,68	82,82	83,13	83,43	84,11	84,65	85,14	85,52
14	Kota Solok	78,38	78,29	78,75	79,21	79,73	80,27	80,81	81,24
15	Kota Sawahlunto	72,39	72,64	73,01	73,37	73,89	74,41	74,94	75,36
16	Kota Padang Panjang	78,00	77,93	78,23	78,54	78,97	79,42	79,87	80,21
17	Kota Bukittinggi	80,71	80,58	80,86	81,14	81,57	82,00	82,45	82,79
18	Kota Payakumbuh	78,95	78,90	79,21	79,52	79,96	80,41	80,87	81,22
19	Kota Pariaman	76,70	76,90	77,04	77,18	77,60	78,04	78,49	78,83

No	Kabupaten/Kota	Baseline		Outlook	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Provinsi Sumatera Barat	72,39	72,38	72,56	72,74	73,18	73,62	74,07	74,42

Sumber : Data diolah oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat

6) Proyeksi angka harapan hidup (tahun)

Tabel 6.19
Proyeksi Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (tahun)

No	Kabupaten/Kota	Baseline		Outlook	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kab. Kep. Mentawai	64,68	64,73	64,9	65,05	65,19	65,34	65,49	65,64
2	Kab. Pesisir Selatan	70,73	70,86	71,04	71,22	71,39	71,57	71,74	71,92
3	Kab. Solok	68,34	68,58	68,91	69,21	69,52	69,83	70,13	70,44
4	Kab. Sijunjung	66,02	66,21	66,37	66,53	66,69	66,86	67,02	67,18
5	Kab. Tanah Datar	69,73	69,94	70,23	70,50	70,78	71,05	71,33	71,60
6	Kab. Padang Pariaman	68,58	68,79	69,08	69,35	69,63	69,90	70,18	70,45
7	Kab. Agam	72,17	72,37	72,55	72,74	72,92	73,10	73,29	73,47
8	Kab. Lima Puluh Kota	69,7	69,79	69,75	69,82	69,89	69,96	70,03	70,10
9	Kab. Pasaman	67,18	67,4	67,59	67,78	67,97	68,17	68,36	68,55
10	Kab. Solok Selatan	67,58	67,81	68,01	68,21	68,41	68,61	68,81	69,01
11	Kab. Dharmasraya	71,10	71,33	71,64	71,93	72,23	72,53	72,83	73,13
12	Kab. Pasaman Barat	67,67	67,82	67,77	67,87	67,97	68,07	68,17	68,27
13	Kota Padang	73,57	73,65	73,55	73,60	73,64	73,68	73,72	73,76
14	Kota Solok	73,45	73,61	73,85	74,08	74,30	74,53	74,76	74,98
15	Kota Sawahlunto	69,87	70,00	69,96	70,06	70,16	70,25	70,35	70,45
16	Kota Padang Panjang	72,77	72,82	72,75	72,79	72,82	72,85	72,89	72,92
17	Kota Bukittinggi	74,22	74,38	74,62	74,85	75,07	75,30	75,53	75,76
18	Kota Payakumbuh	73,61	73,74	73,89	74,03	74,18	74,32	74,47	74,61
19	Kota Pariaman	70,15	70,28	70,21	70,30	70,38	70,46	70,55	70,63
	Provinsi Sumatera Barat	69,31	69,47	69,62	69,80	69,98	70,17	70,35	70,53

Sumber : Data diolah oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat

7) Proyeksi Harapan lama sekolah (tahun)

Tabel 6.20
Proyeksi Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (tahun)

No	Kabupaten/Kota	Baseline		Outlook	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kab. Kep. Mentawai	12,76	12,82	12,91	13,00	13,09	13,18	13,28	13,37
2	Kab. Pesisir Selatan	13,31	13,32	13,36	13,40	13,45	13,49	13,53	13,57
3	Kab. Solok	13,03	13,04	13,31	13,42	13,53	13,64	13,75	13,86
4	Kab. Sijunjung	12,36	12,37	12,82	12,99	13,17	13,35	13,53	13,71
5	Kab. Tanah Datar	14,32	14,33	14,68	14,93	15,18	15,44	15,69	15,94
6	Kab. Padang Pariaman	13,62	13,67	13,82	13,97	14,12	14,27	14,42	14,57
7	Kab. Agam	13,86	13,87	14,09	14,31	14,53	14,76	14,98	15,20
8	Kab. Lima Puluh Kota	13,28	13,29	13,84	14,06	14,29	14,51	14,73	14,96
9	Kab. Pasaman	12,79	12,80	12,81	12,82	12,83	12,84	12,85	12,86
10	Kab. Solok Selatan	12,70	12,71	12,97	13,08	13,20	13,31	13,43	13,54
11	Kab. Dharmasraya	12,42	12,43	12,44	12,45	12,46	12,47	12,48	12,49
12	Kab. Pasaman Barat	13,40	13,61	13,93	14,22	14,50	14,79	15,08	15,37

No	Kabupaten/Kota	Baseline		Outlook	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	Kota Padang	16,51	16,52	16,73	16,93	17,14	17,35	17,55	17,76
14	Kota Solok	14,31	14,32	14,42	14,51	14,61	14,70	14,80	14,89
15	Kota Sawahlunto	13,16	13,17	13,44	13,56	13,68	13,80	13,92	14,04
16	Kota Padang Panjang	15,05	15,06	15,07	15,08	15,09	15,10	15,11	15,12
17	Kota Bukittinggi	14,96	14,97	14,98	14,99	15,00	15,01	15,02	15,03
18	Kota Payakumbuh	14,25	14,26	14,27	14,28	14,29	14,30	14,31	14,32
19	Kota Pariaman	14,53	14,54	14,55	14,56	14,57	14,58	14,59	14,60
	Provinsi Sumatera Barat	14,01	14,02	14,04	14,05	14,06	14,08	14,09	14,10

Sumber : Data diolah oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat

8) Proyeksi rata-rata lama sekolah (tahun)

Tabel 6.21
Proyeksi Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (tahun)

No	Kabupaten/Kota	Baseline		Outlook	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kab. Kep. Mentawai	7,08	7,09	7,18	7,27	7,36	7,45	7,54	7,63
2	Kab. Pesisir Selatan	8,25	8,26	8,29	8,32	8,35	8,38	8,40	8,43
3	Kab. Solok	7,85	7,86	7,93	7,99	8,06	8,12	8,19	8,25
4	Kab. Sijunjung	8,10	8,11	8,15	8,19	8,23	8,27	8,31	8,35
5	Kab. Tanah Datar	8,45	8,61	8,72	8,84	8,95	9,06	9,18	9,29
6	Kab. Padang Pariaman	7,86	7,87	7,91	8,03	8,16	8,29	8,41	8,54
7	Kab. Agam	8,85	8,96	9,03	9,16	9,30	9,43	9,57	9,70
8	Kab. Lima Puluh Kota	7,98	7,99	8,16	8,23	8,30	8,37	8,44	8,52
9	Kab. Pasaman	7,86	8,09	8,13	8,20	8,26	8,32	8,38	8,44
10	Kab. Solok Selatan	8,16	8,28	8,39	8,48	8,57	8,66	8,76	8,85
11	Kab. Dharmasraya	8,46	8,47	8,57	8,66	8,75	8,84	8,92	9,01
12	Kab. Pasaman Barat	8,06	8,19	8,27	8,38	8,48	8,58	8,68	8,79
13	Kota Padang	11,34	11,58	11,68	11,72	11,77	12,01	12,12	12,16
14	Kota Solok	11,02	11,03	11,21	11,29	11,38	11,46	11,54	11,63
15	Kota Sawahlunto	9,97	10,17	10,32	10,43	10,55	10,67	10,78	10,90
16	Kota Padang Panjang	11,45	11,62	11,94	12,11	12,28	12,46	12,63	12,80
17	Kota Bukittinggi	11,32	11,33	11,40	11,47	11,54	11,61	11,69	11,76
18	Kota Payakumbuh	10,72	10,73	10,90	11,02	11,14	11,26	11,39	11,51
19	Kota Pariaman	10,37	10,59	10,73	10,87	11,02	11,17	11,31	11,46
	Provinsi Sumatera Barat	8,92	8,99	9,09	9,18	9,28	9,38	9,47	9,57

Sumber : Data diolah oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat

9) Proyeksi Pengeluaran per kapita (Rp. ribu)

Tabel 6.22
Proyeksi Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (Rp. ribu)

No	Kabupaten/Kota	Baseline		Outlook	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kab. Kep. Mentawai	6.429	6.281	6.358	6.388	6.501	6.637	6.784	6.942
2	Kab. Pesisir Selatan	9.444	9.212	9.325	9.369	9.534	9.734	9.949	10.182
3	Kab. Solok	10.309	10.171	10.296	10.344	10.527	10.748	10.985	11.242
4	Kab. Sijunjung	10.395	10.361	10.488	10.538	10.723	10.949	11.190	11.452
5	Kab. Tanah Datar	10.709	10.588	10.718	10.769	10.958	11.188	11.435	11.703
6	Kab. Padang Pariaman	11.158	10.998	11.133	11.186	11.382	11.622	11.878	12.156

No	Kabupaten/Kota	Baseline		Outlook	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	Kab. Agam	9.780	9.651	9.770	9.816	9.988	10.198	10.423	10.667
8	Kab. Lima Puluh Kota	9.842	9.596	9.714	9.760	9.931	10.140	10.364	10.606
9	Kab. Pasaman	8.599	8.425	8.529	8.569	8.719	8.903	9.099	9.312
10	Kab. Solok Selatan	10.505	10.325	10.452	10.501	10.686	10.910	11.151	11.412
11	Kab. Dharmasraya	11.431	11.273	11.411	11.465	11.667	11.912	12.175	12.460
12	Kab. Pasaman Barat	9.180	9.047	9.158	9.201	9.363	9.560	9.771	9.999
13	Kota Padang	14.728	14.481	14.659	14.728	14.987	15.302	15.640	16.006
14	Kota Solok	12.337	12.117	12.266	12.324	12.541	12.804	13.086	13.393
15	Kota Sawahlunto	10.238	10.182	10.307	10.356	10.538	10.759	10.997	11.254
16	Kota Padang Panjang	11.013	10.734	10.866	10.917	11.109	11.343	11.593	11.864
17	Kota Bukittinggi	13.586	13.282	13.445	13.509	13.746	14.035	14.345	14.680
18	Kota Payakumbuh	13.464	13.281	13.444	13.507	13.745	14.034	14.344	14.679
19	Kota Pariaman	12.958	12.796	12.953	13.014	13.243	13.522	13.820	14.143
	Provinsi Sumatera Barat	10.925	10.733	10.865	10.916	11.108	11.342	11.592	11.863

Sumber : Data diolah oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat

10) Proyeksi tingkat kemiskinan (%)

Tabel 6.23
Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (%)

No	Kabupaten/Kota	Baseline		Outlook	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kab. Kep. Mentawai	14,43	14,35	14,83	14,71	14,57	14,44	14,31	14,17
2	Kab. Pesisir Selatan	7,88	7,61	7,79	7,67	7,55	7,42	7,29	7,16
3	Kab. Solok	7,98	7,81	8,00	7,88	7,75	7,62	7,49	7,36
4	Kab. Sijunjung	7,04	6,78	6,93	6,81	6,69	6,56	6,43	6,30
5	Kab. Tanah Datar	4,66	4,40	4,44	4,32	4,19	4,06	3,93	3,79
6	Kab. Padang Pariaman	7,10	6,95	7,11	6,99	6,87	6,74	6,61	6,48
7	Kab. Agam	6,75	6,75	6,90	6,78	6,66	6,53	6,40	6,27
8	Kab. Lima Puluh Kota	6,97	6,86	7,02	6,90	6,77	6,65	6,52	6,39
9	Kab. Pasaman	7,21	7,16	7,33	7,20	7,08	6,95	6,81	6,68
10	Kab. Solok Selatan	7,33	7,15	7,32	7,20	7,07	6,94	6,81	6,68
11	Kab. Dharmasraya	6,29	6,23	6,36	6,24	6,12	6,00	5,87	5,74
12	Kab. Pasaman Barat	7,14	7,04	7,21	7,09	6,96	6,84	6,71	6,58
13	Kota Padang	4,48	4,40	4,45	4,33	4,22	4,10	3,98	3,85
14	Kota Solok	3,24	2,77	2,74	2,63	2,51	2,39	2,26	2,14
15	Kota Sawahlunto	2,17	2,16	2,10	2,05	2,01	1,98	1,96	1,95
16	Kota Padang Panjang	5,60	5,24	5,32	5,20	5,08	4,96	4,83	4,71
17	Kota Bukittinggi	4,60	4,54	4,59	4,48	4,36	4,24	4,12	3,99
18	Kota Payakumbuh	5,68	5,65	5,75	5,64	5,52	5,41	5,29	5,16
19	Kota Pariaman	4,76	4,10	4,13	4,01	3,89	3,76	3,64	3,51
	Provinsi Sumatera Barat	6,42	6,28	6,40	6,28	6,16	6,03	5,90	5,77

¹Tingkat kemiskinan tahun 2020 menggunakan data bulan September 2020 untuk melihat efek pandemi Covid-19

Sumber : Data diolah oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat

11) Proyeksi jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)

Tabel 6.24
Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 (Ribuan jiwa)

No	Kabupaten/Kota	Baseline		Outlook	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kab. Kep. Mentawai	13,22	13,37	13,63	13,72	13,81	13,90	13,97	14,04
2	Kab. Pesisir Selatan	36,51	35,46	38,43	38,25	38,03	37,78	37,51	37,21
3	Kab. Solok	29,74	29,28	31,04	30,82	30,58	30,33	30,05	29,76
4	Kab. Sijunjung	16,65	16,28	16,75	16,70	16,63	16,55	16,46	16,34
5	Kab. Tanah Datar	16,20	15,34	16,14	15,78	15,40	15,00	14,58	14,16
6	Kab. Padang Pariaman	29,48	28,98	30,45	30,15	29,83	29,49	29,13	28,75
7	Kab. Agam	33,10	33,31	35,83	35,58	35,29	34,97	34,62	34,25
8	Kab. Lima Puluh Kota	26,64	26,43	27,17	26,95	26,71	26,44	26,16	25,86
9	Kab. Pasaman	20,22	20,29	21,73	21,63	21,50	21,36	21,21	21,04
10	Kab. Solok Selatan	12,50	12,39	13,30	13,31	13,31	13,30	13,27	13,23
11	Kab. Dharmasraya	15,49	15,70	15,59	15,61	15,61	15,60	15,56	15,51
12	Kab. Pasaman Barat	31,53	31,64	32,34	32,35	32,32	32,25	32,16	32,03
13	Kota Padang	42,44	42,17	41,98	41,36	40,67	39,94	39,15	38,32
14	Kota Solok	2,29	1,99	2,04	1,99	1,93	1,87	1,80	1,73
15	Kota Sawahlunto	1,35	1,36	1,36	1,35	1,33	1,33	1,33	1,33
16	Kota Padang Panjang	3,00	2,84	3,12	3,18	3,23	3,27	3,31	3,33
17	Kota Bukittinggi	6,00	6,01	5,88	5,81	5,72	5,63	5,53	5,43
18	Kota Payakumbuh	7,68	7,74	8,12	8,09	8,04	7,98	7,91	7,84
19	Kota Pariaman	4,20	3,66	3,85	3,79	3,73	3,65	3,57	3,49
	Provinsi Sumatera Barat	348,22	344,23	358,76	356,45	353,69	350,62	347,27	343,63

¹Jumlah penduduk miskin tahun 2020 menggunakan data bulan September 2020 untuk melihat efek pandemi Covid-19

Sumber : Data diolah oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat

12) Proyeksi Rasio Gini

Tabel 6.25
Proyeksi Gini Ratio Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026¹

No	Kabupaten/Kota	Baseline		Outlook	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kab. Kep. Mentawai	0,336	0,273	0,332	0,328	0,323	0,316	0,309	0,300
2	Kab. Pesisir Selatan	0,246	0,264	0,244	0,243	0,239	0,235	0,229	0,223
3	Kab. Solok	0,285	0,277	0,279	0,277	0,273	0,268	0,262	0,255
4	Kab. Sijunjung	0,293	0,269	0,288	0,287	0,284	0,279	0,274	0,268
5	Kab. Tanah Datar	0,278	0,273	0,270	0,268	0,263	0,258	0,252	0,244
6	Kab. Padang Pariaman	0,297	0,257	0,299	0,298	0,294	0,290	0,285	0,280
7	Kab. Agam	0,251	0,278	0,247	0,246	0,243	0,238	0,234	0,228
8	Kab. Lima Puluh Kota	0,238	0,222	0,238	0,237	0,234	0,230	0,225	0,220
9	Kab. Pasaman	0,330	0,310	0,324	0,321	0,317	0,312	0,305	0,298
10	Kab. Solok Selatan	0,295	0,307	0,297	0,295	0,291	0,286	0,280	0,274
11	Kab. Dharmasraya	0,278	0,280	0,273	0,272	0,270	0,267	0,263	0,258
12	Kab. Pasaman Barat	0,283	0,258	0,279	0,278	0,275	0,271	0,267	0,261
13	Kota Padang	0,312	0,312	0,307	0,309	0,308	0,307	0,305	0,302
14	Kota Solok	0,271	0,286	0,261	0,262	0,26	0,259	0,256	0,252
15	Kota Sawahlunto	0,289	0,300	0,281	0,280	0,278	0,274	0,269	0,264
16	Kota Padang Panjang	0,322	0,394	0,309	0,309	0,307	0,305	0,301	0,296
17	Kota Bukittinggi	0,267	0,265	0,262	0,264	0,263	0,261	0,259	0,256
18	Kota Payakumbuh	0,276	0,325	0,275	0,277	0,277	0,276	0,274	0,272

No	Kabupaten/Kota	Baseline		Outlook	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19	Kota Pariaman	0,300	0,310	0,291	0,291	0,289	0,285	0,281	0,276
	Provinsi Sumatera Barat	0,306	0,305	0,299	0,298	0,296	0,293	0,289	0,284

¹Gini Ratio tahun 2020 menggunakan data bulan September 2020 untuk melihat efek pandemi Covid-19

Sumber : Data diolah oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat

6.4. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINTAS PEMERINTAH DAERAH

Kerjasama Antar Daerah merupakan hal yang krusial dilakukan karena setiap kabupaten/kota memiliki keterbatasan dalam aspek yang berbeda satu sama lain. Karakteristik *smart city* yang berdaya tahan (*resilient*), efisien, berkelanjutan (*sustainable*), ramah lingkungan, dan layak huni belum dapat dipenuhi jika hanya mengandalkan sumber daya lokal yang ada di suatu daerah.

Dilihat dari potensi dan permasalahan yang ada, beberapa kabupaten kota berpotensi untuk pelaksanaan Kerjasama antar daerah, seperti Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar atau lebih dikenal dengan nama Kawasan BUKAPALIPATAR. Pada Kawasan ini terdapat Kawasan Strategis Nasional Danau Maninjau, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bukittinggi dan juga Destinasi Pengembangan Pariwisata Padang- Bukittinggi.

Kawasan Bukapalipatar ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, terutama dilihat dari Luas dan Jumlah Penduduk, dimana luas kawasan 16,29% dari luas wilayah Sumatera Barat dan jumlah penduduk 28,93 % dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat. Potensi pariwisata pada kawasan ini sangat banyak dengan berbagai aktrasi wisata yang ada. Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 Kawasan Bukapalipatar masuk dalam Destinasi Pariwisata Provinsi Bukittinggi dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Taman Bumi (Geopark) serta DPP Tanah Datar dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kab. Solok, Kota Solok dan Kab. Solok Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Minangkabau Tempo Dulu (*Ancient Minangkabau Tourism*). Potensi lainnya yang sangat penting pada kawasan ini adalah Industri dan perdagangan. Kawasan Bukapalipatar menjadi pusat pengembangan Industri Tekstil dan Produk tekstil (tenunan, bordiran, Sulaman, songket, Konveksi,/Garmen), serta pengembangan industri Makanan ringan (Gula tebu, aneka olahan umbi-umbian, Rendang, susu). Pada sektor pertanian, kawasan ini juga memiliki potensi yang besar terutama untuk tanaman padi, jagung, ubi kayu, kentang, sayur cabe, dan buah-buah seperti jeruk dan manggis. Kawasan ini juga merupakan sentra perikanan budidaya darat, terutama di Agam, Limapuluh Kota dan Tanah Datar. Ikan yang dikembangkan adalah Ikan mas dan ikan nila, disamping itu juga budidaya ikan hias. Potensi peternakan berada di daerah Lima Puluh Kota , Agam dan Tanah Datar dengan komoditas ternak adalah ayam petelur dan Sapi, itik, kambing.

Beberapa isu yang mengemuka pada kawasan Bukapalipatar antara lain terkait dengan rencana pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru, peningkatan aksesibilitas dan waktu tempuh antar kabupaten/kota dalam kawasan, pengelolaan sampah, pengendalian banjir/genangan, pemenuhan kebutuhan air bersih, pengembangan sumberdaya manusia dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan dalam kawasan BUKAPALIPATAR.

Untuk optimalisasi pengembangan kawasan Bukapalipatar perlu dilakukan Kerjasama antar kabupaten/kota dalam kawasan BUKAPALIPATAR, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi

dan efektifitas penggunaan anggaran, optimalisasi sinkronisasi kebijakan dan pembangunan daerah serta peningkatan daya daya saing daerah.

6.5. RENCANA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN

Kesejahteraan merupakan tujuan hakiki dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi semakin kuat apabila didasarkan pada potensi sumberdaya yang dimiliki. Karakteristik geografis Sumatera Barat sangat mendukung pengembang sektor agraris yang ditunjukkan oleh peran besarnya dalam perekonomian daerah. Hal ini juga diikuti oleh fakta bahwa lebih dari sepertiga penduduk bekerja di sektor agraris. Di sisi lain secara historis penduduk Sumatera Barat terkenal dengan budaya dagangnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan fakta bahwa lebih dari 18 persen penduduk Sumatera Barat bekerja di sektor perdagangan. Untuk itu pengembangan sektor ini menjadi prioritas penting dalam pembangunan jangka menengah ke depan.

Pengembangan sektor perdagangan yang mayoritas didominasi oleh UMKM dikemas dalam kerangka Sumbar Sejahtera dimana salah satu targetnya adalah mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif. Dalam pentahapan RPJMD ini target 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif dijabarkan ke masing-masing kabupaten kota sebagai bentuk keterpaduan dan sinergi serta kolaborasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Secara bertahap penumbuhan sektor kewirausahaan ini ditargetkan meningkat setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2022 sebanyak 14.961 orang, Tahun 2023 sebanyak 17.888 orang, Tahun 2024 sebanyak 20.176 orang, Tahun 2025 sebanyak 23.053 orang, dan Tahun 2026 sebanyak 23.992 orang. Adapun rinciannya untuk kabupaten kota terlampir pada tabel berikut.

Tabel 6.26
Rencana Penumbuhan Milenial Entrepreneur dan Women Entrepreneur

Kab/Kota	Kondisi Awal		Target (orang)					Kondisi Akhir
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Kab. Kepulauan Mentawai	324	315	363	421	486	560	637	637
Kab. Pesisir Selatan	5.827	7.523	8.676	10.054	11.609	13.385	15.228	15.228
Kab. Solok	4.070	5.278	6.087	7.054	8.145	9.391	10.684	10.684
Kab. Sijunjung	5.602	4.562	5.261	6.097	7.040	8.117	9.235	9.235
Kab. Tanah Datar	4.192	4.784	5.517	6.394	7.383	8.513	9.685	9.685
Kab. Padang Pariaman	4.272	5.508	6.352	7.361	8.499	9.800	11.150	11.150
Kab. Agam	7.182	7.607	8.773	10.167	11.739	13.535	15.399	15.399
Kab. Lima Puluh Kota	10.583	10.499	12.108	14.032	16.202	18.681	21.253	21.253

Kab/Kota	Kondisi Awal		Target (orang)					Kondisi Akhir
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Kab. Pasaman	3.839	3.616	4.170	4.833	5.580	6.434	7.320	7.320
Kab. Solok Selatan	2.426	2.056	2.371	2.748	3.173	3.659	4.163	4.163
Kab. Dharmasraya	4.833	4.845	5.587	6.475	7.476	8.620	9.807	9.807
Kab. Pasaman Barat	9.065	9.307	10.733	12.438	14.361	16.558	18.838	18.838
Kota Padang	15.641	15.815	18.238	21.136	24.404	28.138	32.013	32.013
Kota Solok	1.145	1.831	2.112	2.448	2.826	3.258	3.707	3.707
Kota Sawahlunto	558	989	1.141	1.322	1.526	1.760	2.002	2.002
Kota Padang Panjang	1.568	1.504	1.734	2.009	2.320	2.675	3.043	3.043
Kota Bukittinggi	4.499	3.974	4.583	5.311	6.132	7.070	8.044	8.044
Kota Payakumbuh	4.936	5.825	6.718	7.785	8.989	10.364	11.791	11.791
Kota Pariaman	2.071	1.795	2.070	2.399	2.770	3.194	3.634	3.634
Jumlah	92.633	97.633	112.594	130.482	150.658	173.711	197.633	197.633

6.6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26% (dengan upaya sendiri) dan 41% (dengan dukungan internasional) pada tahun 2020 dibandingkan dengan garis dasar pada kondisi BAU (*Business as Usual*). Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 61 Tahun 2011. Dalam lingkup provinsi, komitmen ini tercermin dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Provinsi Sumatera Barat telah berkomitmen terhadap upaya penurunan emisi GRK melalui berbagai strategi dan rencana aksi mitigasi hingga tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam dokumen RAD-GRK yang telah disahkan melalui Peraturan Gubernur No. 80 tahun 2012.

Dokumen perencanaan Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) adalah dokumen yang menyediakan arahan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan penurunan emisi, baik berupa kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi GRK dalam kurun waktu tertentu. Dasar hukum utama bagi Pemerintah Provinsi untuk menyusun dokumen ini adalah peraturan Presiden No. 61/2011 tentang RAN-GRK yang menjabarkan target penurunan emisi GRK

nasional pada tahun 2020 dapat tercapai dengan kontribusi dari pemerintah daerah. Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK. RAD-GRK dapat dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan daerah dan nasional serta perkembangan yang ada, dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten-Kota (RTRWP/K) yang selanjutnya diharapkan menjadi masukan dan dasar penyusunan dokumen-dokumen rencana strategis daerah seperti : Renstra, SKPD, RPJMD, RKPD dan APBD

Saat ini Pemerintah mengembangkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) merupakan inisiatif pembangunan yang berupaya untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan serta penurunan emisi. PRK dikembangkan dari serangkaian program, kebijakan dan komitmen pemerintah terkait penanganan perubahan iklim baik di tingkat nasional maupun internasional. Inisiatif PPRK tercantum dalam prioritas pembangunan nasional pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dan inisiatif ini juga akan dikembangkan ke dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi aksi mitigasi emisi GRK, telah dilakukan pelaksanaan kaji ulang terhadap dokumen RAD-GRK Provinsi Sumatera Barat sebagai evaluasi implementasi RAD-GRK dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2030. Dokumen kaji ulang RAD-GRK merupakan langkah awal transformasi menuju dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD). Dokumen kaji ulang RAD-GRK berisi empat hal utama, yaitu: Penghitungan ulang BAU Baseline hingga tahun 2030, Penyesuaian target penurunan emisi GRK Provinsi, Evaluasi dan penambahan kegiatan aksi mitigasi provinsi hingga tahun 2030. Kegiatan-kegiatan untuk penurunan emisi GRK yang dilakukan atau difasilitasi oleh pemerintah menggunakan judul program dan kegiatan yang sesuai dengan RPJMN, RPJMD, dan RKP/RKPD.

Sasaran agenda lintas bidang pembangunan rendah karbon, diarahkan pada upaya penurunan emisi GRK dan intensitas emisi (tingkat emisi per satuan GDP) pada bidang-bidang utama, yakni bidang berbasis lahan (kehutanan lahan gambut, dan pertanian, *blue carbon*), bidang berbasis energi (energi, industri, transportasi), dan bidang pengelolaan limbah. Selama ini *Blue Carbon* ini belum menjadi bagian dari RAD-GRK Provinsi Sumatera Barat. Namun kondisi terbaru, sesuai dinamika internasional, ada penambahan sektor emisi yang harus dihitung, yaitu Sektor *Blue Carbon* atau disebut juga sektor pesisir dan laut. Alasan dari penambahan sektor dimaksud karena memiliki emisi yang cukup besar yang berasal dari sedimen tanah dan padang lamun. Dengan penambahan sektor *blue carbon*, sektor prioritas yang harus dihitung adalah :Sektor kehutanan dan lahan gambut, Sektor pertanian, Sektor energi, Sektor pengolahan limbah, Sektor industri-transportasi, dan Sektor *Blue Carbon* .

Hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) upaya pengurangan emisi GRK Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan melalui sistem AKSARA dan menunjukkan pencapaian potensi penurunan emisi GRK mencapai 16,46 juta ton CO₂eq sampai dengan tahun 2020. Potensi capaian tersebut berdasarkan aksi mitigasi yang telah dilaksanakan sanakan oleh Provinsi Sumatera Barat pada 5 (lima) sektor prioritas dalam rencana penurunan emisi GRK, yaitu sektor kehutanan dan lahan gambut, sektor pertanian (Berbasis lahan dengan pengurangan emisi sampai 2020 sekitar 16,37 juta ton CO₂eq) energi, industri transportasi (Berbasis energi dengan pengurangan emisi sampai 2020 sekitar 0,04 juta ton CO₂eq) dan pengolahan limbah (berbasis pengelolaan limbah dengan pengurangan emisi masih kecil sekali. Untuk mendukung kelima sektor prioritas tersebut ditetapkan pula beberapa kegiatan pendukung yang bertujuan untuk memperkuat kerangka kebijakan, meningkatkan kapasitas dan penelitian yang relevan. Rencana aksi yang disusun dalam RAD-GRK juga mempertimbangkan prioritas dan prinsip-prinsip pembangunan nasional, potensi mitigasi dan kelayakan dalam masing-

masing sektor serta sumber pembiayaan. Selain itu juga memperhatikan prinsip pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Grafik 6.2
Kumulatif Emisi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2020



Hasil perhitungan nilai baseline dan perkiraan penurunan emisi pada tahun 2030 menunjukkan bahwa dari berbagai kegiatan mitigasi yang diusulkan diproyeksikan dapat menurunkan emisi hingga **9,72% dari BAU baseline pada tahun 2030**. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Sumatera Barat dalam menangani perubahan iklim di daerah. Adapun hasil rekapitulasi nilai baseline dan estimasi penurunan emisi GRK tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.27
Nilai baseline dan perkiraan penurunan emisi pada tahun 2030

Bidang Mitigasi	BAU Baseline 2030 (tonCO ₂ eq)	Estimasi Penurunan Emisi GRK pada tahun 2030	
		tonCO ₂ eq	%
Pertanian	1.533.653	369.772	24,11
Kehutanan	132.184.477	11.117.529	8,41
Energi & Transportasi	10.960.000	2.625.018	23,95
Limbah	1.175.300	62.500	5,32
Total	145.178.490	14.112.319	9,72

Sumber: Pengolahan data oleh Pokja RAD GRK

Dalam rangka usaha menurunkan besarnya emisi GRK tersebut, secara keseluruhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merencanakan beberapa aksi mitigasi penurunan emisi GRK, diantaranya :

1. Bidang Pertanian dapat menurunkan emisi sebesar 24,11% melalui pelaksanaan aksi mitigasi pada kelompok kegiatan Intervensi pada: (1) Sistem Pemupukan; (2) Teknologi Budidaya dan (3) Pengelolaan Ternak.
2. Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut dapat menurunkan emisi sebesar 8,41% melalui pelaksanaan aksi mitigasi yang terdiri dari kelompok kegiatan sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan
 - b. Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPH (DAK dan pendukung)
 - c. Pengamanan dan Perlindungan Hutan
 - d. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan (DAK dan Pendukung)

- e. Pengayaan hutan lindung dan Reboisasi di wilayah kelola KPH (DAK dan Pendukung)
3. Kelompok Bidang Energi dapat menurunkan emisi sebesar 23,95% melalui implementasi kebijakan berikut:
 - a. Pembangunan EBT *On Grid* Swasta
 - b. Pemanfaatan EBT untuk meningkatkan Rasio elektrifikasi
 - c. Substitusi Bahan Bakar Fosil
4. Bidang Pengelolaan Limbah dapat menurunkan emisi sebesar 5,32% melalui pelaksanaan aksi mitigasi baik dalam upaya pengelolaan sampah maupun pengelolaan limbah.

Dengan demikian Emisi GRK setelah pelaksanaan aksi mitigasi secara keseluruhan dapat turun 9,72% atau sebesar 14.112.319 ton CO₂ eq pada tahun 2030.

6.7. RENCANA PENGEMBANGAN SEKTOR STRATEGIS

Dalam rangka percepatan pengembangan sektor strategis meliputi pertanian, industri dan pariwisata, ditetapkan Kawasan pengembangan pertanian, industri dan pariwisata pada 19 Kabupaten/Kota.

6.7.1 PERTANIAN

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 521-849-2019 tanggal 13 November 2019 tentang penetapan kawasan pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan provinsi ditetapkan Kawasan sentra produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 6.28
Kawasan Pertanian Tanaman Padi, Jagung Dan Ubi Jalar

NO.	LOKASI KAWASAN	KABUPATEN/KOTA
I	TANAMAN PADI	
1	Kawasan Panti Rao	Kabupaten Pasaman
2	Kawasan Bonjol	Kabupaten Pasaman
3	Kawasan Simpati	Kabupaten Pasaman
4	Kawasan Talamau	Kabupaten Pasaman Barat
5	Kawasan Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
6	Kawasan Lembah Melintang	Kabupaten Pasaman Barat
7	Kawasan Ranah Batahan	Kabupaten Pasaman Barat
8	Kawasan Situjuan	Kawasan Lima Puluh Kota
9	Kawasan Luhak	Kawasan Lima Puluh Kota
10	Kawasan Ampek Angkek	Kabupaten Agam
11	Kawasan Lubuk Basung	Kabupaten Agam
12	Kawasan Sungai Tarab	Kabupaten Tanah Datar
13	Kawasan Pariangan	Kabupaten Tanah Datar
14	Kawasan Lintau	Kabupaten Tanah Datar
15	Kawasan Batang Anai	Kabupaten Padang Pariaman
16	Kawasan Sicaung	Kabupaten Padang Pariaman

NO.	LOKASI KAWASAN	KABUPATEN/KOTA
17	Kawasan Tapakis	Kabupaten Padang Pariaman
18	Kawasan Gunung Talang	Kabupaten Solok
19	Kawasan Bukit Sundi	Kabupaten Solok
20	Kawasan Singkarak	Kabupaten Solok
21	Kawasan Sungai Pagu	Kabupaten Solok Selatan
22	Kawasan KPGD/Pantai Cermin	Kabupaten Solok Selatan/Kabupaten Solok
23	Kawasan Tanjung Gadang	Kabupaten Sijunjung
24	Kawasan Pulau Punjung	Kabupaten Dharmasraya
25	Kawasan Koto Baru	Kabupaten Dharmasraya
26	Kawasan Lengayang	Kabupaten Pesisir Selatan
27	Kawasan Linggo Sari Baganti	Kabupaten Pesisir Selatan
28	Kawasan Pancung Soal	Kabupaten Pesisir Selatan
29	Kawasan Bayang	Kabupaten Pesisir Selatan
II	KAWASAN JAGUNG	
1	Kawasan Tigo Nagari	Kabupaten Pasaman
2	Kawasan Rao	Kabupaten Pasaman
3	Kawasan Duo Koto	Kabupaten Pasaman
4	Kawasan Pasaman	Kabupaten Pasaman Barat
5	Kawasan Lembah Melintang	Kabupaten Pasaman Barat
6	Kawasan Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
7	Kawasan Luhak Nan Duo	Kabupaten Pasaman Barat
8	Kawasan Guguak Lareh	Kabupaten Lima Puluh Kota
9	Kawasan Ampek Nagari	Kabupaten Agam
10	Kawasan Lubuk Basung	Kabupaten Agam
11	Kawasan Rambatan	Kabupaten Tanah Datar
12	Kawasan Lintau	Kabupaten Tanah Datar
13	Kawasan Sangir	Kabupaten Solok Selatan
14	Kawasan Linggo Sari Baganti	Kabupaten Pesisir Selatan
15	Kawasan Pancung Soal	Kabupaten Pesisir Selatan
16	Kawasan Kamang Baru	Kabupaten Sijunjung
17	Kawasan Aie Tajun	Kabupaten Padang Pariaman
18	Kawasan Sungai Geringging	Kabupaten Padang Pariaman
19	Kawasan Koto Salak	Kabupaten Dharmasraya
III	TANAMAN UBI JALAR	
1	Kawasan Tilatang Kamang	Kabupaten Agam
2	Kawasan Pariangan	Kabupaten Tanah Datar
3	Kawasan Talamau	Kabupaten Pasaman Barat
4	Kawasan Lembang Jaya	Kabupaten Solok

Tabel 6.29
Kawasan Pertanian Hortikultura

NO	LOKASI KAWASAN	KABUPATEN/KOTA
I	TANAMAN JERUK	
1	Kawasan Gunuang Omeh	Kabupaten Lima Puluh Kota
2	Kawasan Gunung Sago	Kabupaten Lima Puluh Kota
3	Kawasan Palupuh	Kabupaten Agam
4	Kawasan Baso	Kabupaten Agam
5	Kawasan Magek	Kabupaten Agam
6	Kawasan Matur	Kabupaten Agam
7	Kawasan Sangir	Kabupaten Solok Selatan
8	Kawasan Sungai Pagu	Kabupaten Solok Selatan
9	Kawasan Koto Parik Gadang Diateh	Kabupaten Solok Selatan
10	Kawasan Pauh Duo	Kabupaten Solok Selatan
11	Kawasan Koto XI Tarusan	Kabupaten Pesisir Selatan
12	Kawasan Bayang	Kabupaten Pesisir Selatan
13	Kawasan Air Pura	Kabupaten Pesisir Selatan
14	Kawasan X Koto	Kabupaten Tanah Datar
15	Kawasan Sitiung	Kabupaten Dharmasraya
16	Kawasan Tonang	Kabupaten Pasaman
17	Kawasan Pasaman	Kabupaten Pasaman Barat
18	Kawasan Lembah Melintang	Kabupaten Pasaman Barat
II	KAWASAN PISANG	
1	Kawasan Salimpaung	Kabupaten Tanah Datar
2	Kawasan Batipuh	Kabupaten Tanah Datar
3	Kawasan Pauh Duo	Kabupaten Solok Selatan
4	Kawasan Sangir	Kabupaten Solok Selatan
5	Kawasan Koto Parik Gadang Diateh	Kabupaten Solok Selatan
6	Kawasan VII Koto	Kabupaten Padang Pariaman
7	Kawasan Lubuk Sikaping	Kabupaten Pasaman
8	Kawasan Duo Koto	Kabupaten Pasaman
9	Kawasan IV Koto	Kabupaten Agam
10	Kawasan Pagai Utara Selatan	Kabupaten Kepulauan Mentawai
11	Kawasan Sipora	Kabupaten Kepulauan Mentawai
12	Kawasan Siberut Selatan	Kabupaten Kepulauan Mentawai
13	Kawasan Timpeh	Kabupaten Dharmasraya
14	Kawasan Guguk	Kabupaten Solok
15	Kawasan Situjuh	Kabupaten Lima Puluh Kota
16	Kawasan Pasaman	Kabupaten Pasaman Barat
17	Kawasan Talamau	Kabupaten Pasaman Barat
18	Kawssan Sungai Rumbai	Kota Pariaman
19	Kawasan Sikapak Barat	Kota Pariaman

NO	LOKASI KAWASAN	KABUPATEN/KOTA
III	TANAMAN MANGGIS	
1	Kawasan Bukit Barisan	Kabupaten Lima Puluh Kota
2	Kawasan Gunung Bungsu	Kabupaten Lima Puluh Kota
3	Kawasan Parit Malintang	Kabupaten Padang Pariaman
4	Kawasan Lubuak Tarok	Kabupaten Sijunjung
5	Kawasan Tanjung Gadang	Kabupaten Sijunjung
6	Kawasan VII Koto	Kabupaten Sijunjung
7	Kawasan Bawan	Kabupaten Agam
8	Kawasan Palembayan	Kabupaten Agam
9	Kawasan Kamang	Kabupaten Agam
10	Kawasan Malalak	Kabupaten Agam
11	Kawasan Sangir Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan
12	Kawasan Koto Parik Gadang Diatch	Kabupaten Solok Selatan
13	Kawasan Sangir	Kabupaten Solok Selatan
14	Kawasan Pauh Duo	Kabupaten Solok Selatan
15	Kawasan Linggo Sari Baganti	Kabupaten Pesisir Selatan
16	Kawasan Sutera	Kabupaten Pesisir Selatan
17	Kawasan Lengayang	Kabupaten Pesisir Selatan
18	Kawasan Silaut	Kabupaten Pesisir Selatan
19	Kawasan Pauh	Kota Padang
20	Kawasan Tanjung Emas	Kabupaten Tanah Datar
21	Kawasan Talang Babungo	Kabupaten Solok
22	Kawasan Sungai Lasi	Kabupaten Solok
23	Kawasan Rao MT	Kabupaten Pasaman
24	Kawasan Lubuk Sikaping	Kabupaten Pasaman
25	Kawasan IX Koto	Kabupaten Dharmasraya
26	Kawasan Gunung Tuleh	Kabupaten Pasaman Barat
27	Kawasan Talamau	Kabupaten Pasaman Barat
IV	TANAMAN DURIAN	
1	Kawasan Kayu Tanam	Kabupaten Padang Pariaman
2	Kawasan Patamuan	Kabupaten Padang Pariaman
3	Kawasan Batang Anai	Kabupaten Padang Pariaman
4	Kawasan Koto XI Tarusan	Kabupaten Pesisir Selatan
5	Kawasan Sutera	Kabupaten Pesisir Selatan
6	Kawasan Kamang Magek	Kabupaten Agam
7	Kawasan Tanjung Raya	Kabupaten Agam
8	Kawasan Ampek Nagari	Kabupaten Agam
9	Kawasan Sungayang	Kabupaten Tanah Datar
10	Kawasan IX Koto	Kabupaten Dharmasraya
11	Kawasan Arian	Kabupaten Solok
12	Kawasan Lurah Nan Tigo	Kabupaten Solok

NO	LOKASI KAWASAN	KABUPATEN/KOTA
13	Kawasan Sangir Jujuan	Kabupaten Solok Selatan
14	Kawasan Simpati	Kabupaten Pasaman
15	Kawasan Kampung Durian	Kota Solok
V	TANAMAN BUAH LAINNYA	
1	Kawasan Luhak Nan Duo (alpukat)	Kabupaten Pasaman Barat
2	Kawasan Gunung Tuleh (Salak)	Kabupaten Pasaman Barat
3	Kawasan Salak Kurnia (Salak)	Kabupaten Dharmasraya
4	Kawasan Duku Koto Baru (Duku)	Kabupaten Dharmasraya
5	Kawasan Batipuh Selatan (Sawo)	Kabupaten Tanah Datar
6	Kawasan Tanjung Emas (Sawo)	Kabupaten Tanah Datar
7	Kawasan Lubuk Basung	Kabupaten Agam
8	Kawasan Tarusan (Mangga)	Kabupaten Pesisir Selatan
9	Kawasan Koto Gaek (alpukat)	Kabupaten Solok
10	Kawasan Lubuk Sikaping (Salak)	Kabupaten Pasaman
VI	TANAMAN ANEKA CABAI	
1	Kawasan Banuhampu	Kabupaten Agam
2	Kawasan Sungai Puar	Kabupaten Agam
3	Kawasan Danau Kembar	Kabupaten Solok
4	Kawasan Mersi (Merapi Singgalang)	Kabupaten Tanah Datar
5	Kawasan Lentera	Kabupaten Pesisir Selatan
6	Kawasan Sangir	Kabupaten Solok Selatan
7	Kawasan Pauh Duo	Kabupaten Solok Selatan
8	Kawasan Lubuk Alung	Kabupaten Padang Pariaman
9	Kawasan Mudiak	Kabupaten Lima Puluh Kota
10	Kawasan Hilia	Kabupaten Lima Puluh Kota
11	Kawasan Talamau	Kabupaten Pasaman Barat
VII	TANAMAN ANEKA BAWANG	
1	Kawasan Solok Sakato	Kabupaten Solok
2	Kawasan Sungai Puar	Kabupaten Agam
3	Kawasan Koto Parik Gadang Diatch	Kabupaten Solok Selatan
4	Kawasan Sago	Kabupaten Lima Puluh Kota
5	Kawasan X Koto	Kabupaten Tanah Datar
6	Kawasan Salimpaung	Kabupaten Tanah Datar
VIII	TANAMAN HIAS	
1	Kawasan Lubuk Minturun	Kota Padang
2	Kawasan Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang
3	Kawasan Koto Tangah	Kota Payakumbuh
4	Kawasan Tigo Koto Diatch	Kota Payakumbuh
5	Kawasan Arosuka	Kabupaten Solok
6	Kawasan Panorama Baru	Kota Bukittinggi

NO	LOKASI KAWASAN	KABUPATEN/KOTA
7	Kawasan Bukit Apit Puhun	Kota Bukittinggi
8	Kawasan Lembah Harau	Kabupaten Lima Puluh Kota
9	Kawasan Matur	Kabupaten Agam
10	Kawasan Camintoran	Kabupaten Solok Selatan
11	Kawasan Batipuh	Kabupaten Tanah Datar
12	Kawasan Tanaman Hias (Krisan)	Kota Solok
IX	KAWASAN SAYUR LAINNYA	
1	Kawasan Banuhampu Sungai Puar	Kabupaten Agam
2	Kawasan Alahan Panjang	Kabupaten Solok
3	Kawasan Salimpaung	Kabupaten Tanah Datar
4	Kawasan X Koto	Kabupaten Tanah Datar
5	Kawasan Sutera	Kabupaten Pesisir Selatan
6	Kawasan Bayang Utara	Kabupaten Pesisir Selatan
7	Kawasan Luhak Nan Duo	Kabupaten Pasaman Barat
8	Kawasan Ranah Batahan	Kabupaten Pasaman Barat
9	Kawasan Talamau	Kabupaten Pasaman Barat
10	Kawasan Sangir	Kabupaten Solok Selatan
11	Kawasan Pauh Duo	Kabupaten Solok Selatan
12	Kawasan Koto Parik Gadang Diateh	Kabupaten Solok Selatan

Tabel 6.30
Kawasan Pertanian Perkebunan

NO	LOKASI KAWASAN	KABUPATEN/KOTA
KAWASAN TANAMAN PERKEBUNAN		
I	TANAMAN KOPI	
1	Kawasan Talamau	Kabupaten Pasaman Barat
2	Kawasan Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
3	Kawasan Gunung Tuleh	Kabupaten Pasaman Barat
4	Kawasan IV Koto	Kabupaten Agam
5	Kawasan Candung	Kabupaten Agam
6	Kawasan Palupuh	Kabupaten Agam
7	Kawasan Palembayan	Kabupaten Agam
8	Kawasan Surian	Kabupaten Solok
9	Kawasan Aia Dingin	Kabupaten Solok
10	Kawasan Danau Tuo	Kabupaten Solok
11	Kawasan Batu Bajanjang	Kabupaten Solok
12	Kawasan Sangir	Kabupaten Solok Selatan
13	Kawssan Pauh Duo	Kabupaten Solok Selatan
14	Kawasan Salimpaung	Kabupaten Tanah Datar
15	Kawasan Andaleh	Kabupaten Tanah Datar
16	Kawasan Bukit Barisan	Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	LOKASI KAWASAN	KABUPATEN/KOTA
17	Kawasan Gunung Sago	Kabupaten Lima Puluh Kota
18	Kawasan Rahul	Kabupaten Pesisir Selatan
19	Kawasan Lengayang	Kabupaten Pesisir Selatan
20	Kawasan IV Jurai	Kabupaten Pesisir Selatan
21	Kawasan Lubuk Sikaping	Kabupaten Pasaman
22	Kawasan Rao	Kabupaten Pasaman
23	Kawasan Dua Koto	Kabupaten Pasaman
II	TANAMAN KAKAO	
1	Kawasan Simpati	Kabupaten Pasaman
2	Kawasan Panti	Kabupaten Pasaman
3	Kawasan Padang Gelugur	Kabupaten Pasaman
4	Kawasan Lubuk Sikaping	Kabupaten Pasaman
5	Kawasan Luhak Nan Duo	Kabupaten Pasaman Barat
6	Kawasan Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
7	Kawasan Talamau	Kabupaten Pasaman Barat
8	Kawasan Ranah Batahan	Kabupaten Pasaman Barat
9	Kawasan Sei Geringging	Kabupaten Padang Pariaman
10	Kawasan Lubuk Alung	Kabupaten Padang Pariaman
11	Kawasan Kampung Dalam	Kabupaten Padang Pariaman
12	Kawasan Enam Lingkung	Kabupaten Padang Pariaman
13	Kawasan Rambatan	Kabupaten Tanah Datar
14	Kawasan Sungayang	Kabupaten Tanah Datar
15	Kawasan Salayo	Kabupaten Solok
16	Kawasan Payung Sakaki	Kabupaten Solok
17	Kawasan Singkarak	Kabupaten Solok
18	Kawasan Guguak	Kabupaten Lima Puluh Kota
19	Kawasan Akabiluru	Kabupaten Lima Puluh Kota
III	KAWASAN KELAPA SAWIT	
1	Kawasan Luhak Nan Duo	Kabupaten Pasaman Barat
2	Kawasan Pasaman	Kabupaten Pasaman Barat
3	Kawasan Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
4	Kawasan Sasak Ranah Pasisia	Kabupaten Pasaman Barat
5	Kawasan Gunung Tuleh	Kabupaten Pasaman Barat
6	Kawasan Sungai Aur	Kabupaten Pasaman Barat
7	Kawasan Lembah Melintang	Kabupaten Pasaman Barat
8	Kawasan Koto Balingka	Kabupaten Pasaman Barat
9	Kawasan Ranah Batahan	Kabupaten Pasaman Barat
10	Kawasan Sungai Beremas	Kabupaten Pasaman Barat
11	Kawasan Talamau	Kabupaten Pasaman Barat
12	Kawasan Sungai Rumbai	Kabupaten Dharmasraya
13	Kawasan Koto Baru	Kabupaten Dharmasraya

NO	LOKASI KAWASAN	KABUPATEN/KOTA
14	Kawasan Sitiung	Kabupaten Dharmasraya
15	Kawasan Pulau Punjung	Kabupaten Dharmasraya
16	Kawasan Sangir Balai Janggo	Kabupaten Solok Selatan
17	Kawasan Sangir Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan
18	Kawasan Sangir Jujuan	Kabupaten Solok Selatan
19	Kawasan Rahul	Kabupaten Pesisir Selatan
20	Kawasan Lunang	Kabupaten Pesisir Selatan
21	Kawasan Lengayang	Kabupaten Pesisir Selatan
22	Kawasan Air Pura	Kabupaten Pesisir Selatan
23	Kawasan Tanjung Mutiara	Kabupaten Agam
24	Kawasan Lubuk Basung	Kabupaten Agam
25	Kawasan Ampek Nagari	Kabupaten Agam
26	Kawasan Palembayan	Kabupaten Agam
27	Kawasan Tigo Nagari	Kabupaten Pasaman
28	Kawasan Panti	Kabupaten Pasaman
29	Kawasan Rao MT	Kabupaten Pasaman
IV	TANAMAN KARET	
1	Kawasan Rao MT	Kabupaten Pasaman
2	Kawasan Duo Koto	Kabupaten Pasaman
3	Kawasan Sumpur Kudus	Kabupaten Sijunjung
4	Kawasan Koto VII	Kabupaten Sijunjung
5	Kawasan Lubuk Tarok	Kabupaten Sijunjung
6	Kawasan Sijunjung	Kabupaten Sijunjung
7	Kawasan Sangir Balai Janggo	Kabupaten Solok Selatan
8	Kawasan Sangir Batang Hari	Kabupaten Solok Selatan
9	Kawasan Koto Baru	Kabupaten Dharmasraya
10	Kawasan Pulau Punjung	Kabupaten Dharmasraya
11	Kawasan Koto Besar	Kabupaten Dharmasraya
12	Kawasan Bukik Mantobak	Kabupaten Tanah Datar
13	Kawasan Sungai Aur	Kabupaten Pasaman Barat
14	Kawasan Gunung Tuleh	Kabupaten Pasaman Barat
15	Kawasan Talamau	Kabupaten Pasaman Barat
16	Kawasan Ranah Batahan	Kabupaten Pasaman Barat
17	Kawasan BAB Tapan	Kabupaten Pesisir Selatan
18	Kawasan Bukit Tandang	Kabupaten Solok
19	Kawasan Tanjung Alai	Kabupaten Solok
V	TANAMAN KELAPA	
1	Kawasan Lubuk Sikaping	Kabupaten Agam
2	Kawasan Tanjung Mutiara	Kabupaten Agam
3	Kawasan IV Nagari	Kabupaten Agam
4	Kawasan Palembayan	Kabupaten Agam

NO	LOKASI KAWASAN	KABUPATEN/KOTA
5	Kawasan Ranah Pesisir	Kabupaten Pesisir Selatan
6	Kawasan Sutera	Kabupaten Pesisir Selatan
7	Kawasan Padang Sago	Kabupaten Padang Pariaman
8	Kawasan Kampung Dalam	Kabupaten Padang Pariaman
9	Kawasan Lubuk Alung	Kabupaten Padang Pariaman
10	Kawasan Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
11	Kawasan Paninggahan	Kabupaten Solok
12	Kawasan Cupak	Kabupaten Solok
13	Kawasan Guguak	Kabupaten Lima Puluh Kota
14	Kawasan Harau	Kabupaten Lima Puluh Kota
15	Kawasan Siberut Barat	Kabupaten Kepulauan Mentawai
16	Kawasan Siberut Barat Daya	Kabupaten Kepulauan Mentawai
17	Kawasan Sipora	Kabupaten Kepulauan Mentawai
VI	TANAMAN GAMBIR	
1	Kawasan Pangkalan	Kabupaten Lima Puluh Kota
2	Kawasan Maek	Kabupaten Lima Puluh Kota
3	Kawasan Mungka	Kabupaten Lima Puluh Kota
4	Kawasan Koto XI Tarusan	Kabupaten Pesisir Selatan
5	Kawasan Sutera	Kabupaten Pesisir Selatan
6	Kawasan Batang Kapas	Kabupaten Pesisir Selatan
7	Kawasan Palupuh	Kabupaten Agam
8	Kawasan Mapat Tunggul	Kabupaten Pasaman
VII	TANAMAN PERKEBUNAN LAINNYA	
1	Kawasan Matur (Tebu)	Kabupaten Agam
2	Kawasan Candung (Tebu)	Kabupaten Agam
3	Kawasan Puncak Pato (Tebu)	Kabupaten Tanah Datar
4	Kawasan Tabek Patah (Tebu)	Kabupaten Tanah Datar
5	Kawasan Kinali (Nilam)	Kabupaten Pasaman Barat
6	Kawasan Talamau (Nilam)	Kabupaten Pasaman Barat
7	Kawasan Mentawai (Cengkeh)	Kabupaten Kepulauan Mentawai
8	Kawasan Tanjung Balik (Cengkeh)	Kabupaten Solok
9	Kawasan Koto Anau (Cengkeh)	Kabupaten Solok
10	Kawasan Aia Batumbuak (Teh)	Kabupaten Solok
11	Kawasan Dilam (Sereh Wangi)	Kabupaten Solok
12	Kawasan Lengayang (Pala)	Kabupaten Pesisir Selatan
13	Kawasan Bayang (Pala)	Kabupaten Pesisir Selatan
14	Kawasan V Koto Timur (Pinang)	Kabupaten Padang Pariaman
15	Kawasan Bukit Barisan (Pinang)	Kabupaten Padang Pariaman
16	Kawasan Panti (Sereh Wangi)	Kabupaten Pasaman
17	Kawasan Rao MT (Sereh Wangi)	Kabupaten Pasaman
18	Kawasan Lubuk Sikaping (Sereh Wangi)	Kabupaten Pasaman

NO	LOKASI KAWASAN	KABUPATEN/KOTA
19	Kawasan Duo Koto (Sereh Wangi)	Kabupaten Pasaman
20	Kawasan Aua Sarumpun (Sereh Wangi)	Kabupaten Tanah Datar
21	Kawasan Siberut (sagu)	Kabupaten Kepulauan Mentawai
22	Kawasan Koto Parik Gadang Diateh (Sereh Wangi)	Kabupaten Solok Selatan
23	Kawasan Pinang Sungai Rumbai (Pinang)	Kabupaten Dharmasraya

6.7.2 PETERNAKAN

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 524-978-2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang penetapan kawasan pengembangan peternakan provinsi Sumatera Barat ditetapkan Kawasan pengembangan peternakan di Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 6.31
Kawasan Pengembangan Peternakan Provinsi Sumatera Barat

NO	LOKASI KAWASAN	TITIK SENTRA KAWASAN	KOMODITI
1	Kabupaten Agam	Kec. Baso Kec. Ampek Angkek Kec. Banuhampu	Sapi Potong/Klaster Tri Arga
	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kec. Luak Kec. Guguk Kec. Situjuh V Nagari Kec. Gunuang Omen	
2	Kota Payakumbuh	Kec. Payakumbuh Timur Kec. Lampasi Tigo Nagari	Sapi Potong/Klaster Tri Arga
	Kabupaten Tanah Datar	Kec. Sungayang Kec. Salimpaung Kec. Rambatan	
	Kota Padang Panjang	Kec. Padang Panjang Timur	
3	Kabupaten Padang Pariaman	Kec. Kayu Tanam Kec. :Lubuk Alung Kec. 2 x 11 Enam Lingkung	Ayam Potong
	Kota Padang	Kec. Koto Tengah Kec. Pauh Kec. Kuranji	
4	Kabupaten Pasaman Barat	Kec. Kinali Kec. Luhak Nan Duo	Sapi Potong/Sapi Bali
	Kabupaten Agam	Kec. Lubuk Basung Kec. IV Nagari	
	Kabupaten Padang Pariaman	Kec. Sei. Geringging Kec. Padang Sago Kec. VIII Koto Sei Sariaik	
5	Kabupaten Sijunjung	Kec. Kamang Baru Kec. Koto VII	Sapi Potong/Sapi Bali
	Kabupaten Dharmasraya	Kec. Sitiung Kec. Timpeh Kec. Koto Besar	
	Kabupaten Solok Selatan	Kec. Sangir Kec. Sangir Jujuhan Kec. Sangir Balai Janggo	

NO	LOKASI KAWASAN	TITIK SENTRA KAWASAN	KOMODITI
6	Kabupaten Agam	Kec. Palupuh Kec. Lubuk Basung Kec. Tilatang Kamang	Sapi Potong/Sapi PO
	Kabupaten Pasaman Barat	Kec. Pasaman Kec. Sasak Ranah Pasisia	
	Kabupaten Pasaman	Kec. Lubuk Sikaping Kec. Panti	
7	Kabupaten Tanah Datar	Kec. Pariangan Kec. Batipuah Kec. X Koto	Sapi Potong/Sapi PO
	Kabupaten Solok	Kec. Lembang Jaya Kec. Lembah Gumanti Kec. X Koto Singkarak	
8.	Kabupaten Agam	Kec. IV Angkek Kec. Candung	Sapi Potong/Sapi Simenthal
	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kec. Luhak Kec. Lareh Sago Halaban Kec. Gunung Omeh	
	Kota Payakumbuh	Kec. Payakumbuh Barat Kec. Payakumbuh Selatan	
9	Kabupaten Tanah Datar	Kec. Pariangan Kec. Rambatan Kec. Tanjung Baru	Sapi Potong/Sapi Simenthal
	Kabupaten Solok	Kec. Lembang Jaya Kec. Bukit Sundi	
10	Kota Padang Panjang	Kec. Padang Panjang Timur Kec. Padang Panjang Barat	Sapi Perah
	Kabupaten Tanah Datar	Kec. Lintau Buo Utara Kec. X Koto	
	Kabupaten Agam	Kec. Tilatang Kamang Kec. Sungai Puar	
	Kabupaten Padang Pariaman	Kec. 2 x 11 Kayu Tanam Kec. IV Koto Malintang	
11	Kabupaten Tanah Datar	Kec. Tanjung Baru Kec. Batipuh Selatan Kec. Rambatan Kec. Sungai Tarab Kec. Lintau Buo	Kambing
	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kec. Harau Kec. Situjuh V Nagari	
12	Kabupaten Padang Pariaman	Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Kec. Pasaman Kec. IV Koto Aur Malintang Kec. VII Koto	Kambing
	Kabupaten Agam	Kec. Kamang Magek Kec. Palupuh Kec. Candung	
13	Kabupaten Padang Pariaman	Kec. V Koto Kampung Dalam Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Kec. IV Koto Aur Malintang	Ayam Buras
	Kota Padang	Kec. Koto Tangah	

NO	LOKASI KAWASAN	TITIK SENTRA KAWASAN	KOMODITI
	Kabupaten Pesisir Selatan	Kec. IV Jurai Kec. Ranah Pasisia Kec. Linggo Sari Baganti	
14	Kabupaten Tanah Datar	Kec. Padang Ganting Kec. Tanjung Emas	Ayam Buras
	Kota Sawahlunto	Kec. Talawi	
15	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kec. Gunung Omeh Kec. Situjuh V Nagari	Ayam Buras
	Kota Payakumbuh	Kec. Payakumbuh Barat Kec. Payakumbuh Selatan	
16	Kabupaten Pasaman	Kec. Lubuk Sikaping Kec. Padang Gelugur	Itik
	Kabupaten Pasaman Barat	Kec. Talamau	
17	Kabupaten Agam	Kec. Kamang Magek Kec. Tilatang Kamang Kec. Lubuk Basung	Itik
	Kota Payakumbuh	Kec. Payakumbuh Barat Kec. Payakumbuh Timur	
	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kec. Payakumbuh Kec. Harau Kec. Akabiluru	
18	Kabupaten Pesisir Selatan	Kec. Bayang	Itik
	Kota Padang	Kec. Koto Tengah Kec. Kuranji	
	Kabupaten Padang Pariaman	Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Kec. Batang Anai Kec. Sungai Limau	
19	Kabupaten Tanah Datar	Kec. Batipuh Kec. Pariangan	Itik
	Kabupaten Solok	Kec. Kubung Kec. Bukit Sundi	
20	Kabupaten Sijunjung	Kec. Lubuk Tarok	Ternak - Sawit
	Kabupaten Dharmasraya	Kec. Koto Baru Kec. Pulau Punjung Kec. Timpeh Kec. Koto Besar	
21	Kabupaten Solok Selatan	Kec. Sangir Balai Janggo Kec. Sangir Jujuhan	Ternak - Sawit
	Kabupaten Pesisir Selatan	Kec. Lunang Silaut Kec. Basa IV Balai Kec. Pancung Soal	
22	Kabupaten Agam	Kec. IV Nagari Kec. Tanjung Mutiara Kec. Palembayan	Ternak - Sawit
	Kabupaten Pasaman Barat	Kec. Kinali Kec. Luhak Nan Duo Kec. Pasaman Kec. Simpati Kec. Tigo Nagari	
23	Kabupaten Agam	Kec. Palupuh Kec. Malalak	Ternak - Kakao

NO	LOKASI KAWASAN	TITIK SENTRA KAWASAN	KOMODITI
	Kabupaten Padang Pariaman	Kec. Patamuhan Kec. VII Koto Sei Sariak	
24	Kabupaten Tanah Datar	Kec. Batipuh Selatan Kec. Rambatan	Ternak - Kakao
	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kec. Guguk Kec. Suliki Kec. Harau	

6.7.3 INDUSTRI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2038, Perwilayahan Berbasis Sentra bahan baku dan sentra Produksi pada Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel 6.32
Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2038

No	Kabupaten /Kota	Jenis industri	Sentra Produksi	Sentra Bahan Baku
Kabupaten				
1	Kab. Pesisir Selatan	1. Industri pengolahan hasil laut dan perikanan	1.1. Pengalengan ikan dan hasil laut lainnya	Ikan laut
			1.2. Pengeringan ikan	Ikan air tawar
		2. Industri pengolahan makanan	2.1. Pengolahan kedele	Kedele
			2.2. Pengolahan pisang	Pisang
			2.3. Pengolahan jagung	Jagung
		3. Industri Pengolahan Gambir	3.1. Gambir mentah	Tanaman gambir
			3.2. Gambir murni	
			3.3. Katekin	
			3.4. Penyamak kulit	
			3.5. Biofarmaka	
		4. Industri minyak Atsiri	Pengolahan nilam	nilam
		5. Industri pengolahan tekstil dan produk tekstil	5.1 Bordiran	
			5.2 Batik	
		6. Industri maritim	6.1 Kapal tangkap	
			6.2 Kapal penumpang	
			6.3 Komponen kapal	
		7. Industri alsintan (slat dan mesin pertanian)	7.1 Alat dan mesin pertanian	
			7.2 Alat pengupas	
			7.3 Alat penyuling	
			7.4 Alat pengering	
			7.5 Alat dan mesin rumah tangga	
		8. Industri Minyak Kelapa	VCO	Buah Kelapa

No	Kabupaten /Kota	Jenis industri	Sentra Produksi	Sentra Bahan Baku
2	Kab. Pasarnan Barat	9. Industri Kelapa sawit	9.1 Minyak Makes	CPO
			9.2 Margarin	CPO
			9.3 Sabun	CPO
		1. Industri pengotahan hasil laut dan perikanan	1.1. Pembekuan ikan dan hasil laut lain	Ikan laut
			1.2. Pengalengan ikan dan basil laut lainnya	
			1.3. Pengasapan Ikan	Ikan air tawar
			1.4. Pengeringan ikan	
		2. Industri pengolahan kakao		Kakao
		3. Industri pengolahan makanan	Pengolahan jagung	Jagung
		4. Industri pengolahan minyak atsiri	Minyak atsiri terstandarisasi	Minyak atsiri
		5. Industri maritim	5.1 Kapal tangkap	
			5.2 Kapal penumpang	
			5.3 Komponen kapal	
		6. Industri alsintan (alat dan mesin pertanian)	6.1 Alat dan mesin pertanian	
			6.2 Alat pengupas	
			6.3 Alat penyuling	
			6.4 Alat pengcring	
			6.5 Alat dan mesin rumah tangga	
		7. Industri Minyak Kelapa	VCO	Buah Kelapa
		8. Industri Kelapa sawit	8.1 Minyak Malan	CPO
			8.2 Margarin	CPO
			8.3 Sabun	CPO
3	Kab. Pasaman	1. Industri pengolahan hasil laut dan perikanan	1.1 Pengasapan Ikan	Ikan air tawar
			1.2 Pengalengan Ikan dan hasil laut lain	Ikan air tawar
		2. Industri pengolahan kakao	2.1. Fermentasi biji kakao	Kakao
			2.2. Pasta	
			2.3. Bubuk dan konsentrat kakao	
			2.4. Makanan ringan berbahan baku kakao	
		3. Industri pengolahan makanan	3.1. Pengolahan Jagung	Jagung
			3.2. Pengolahan Kacang	Kacang Tanah
			3.3. Pengolahan Biji-Bijian	Beras ketan

No	Kabupaten /Kota	Jenis industri	Sentra Produksi	Sentra Bahan Baku
		4. Industri pengolahan gambir	4.1. Gambir mentah	Tanaman Gambir
			4.2. Gambir Mumi	
			4.3. Penyamak kulit	
			4.4. Katekin	
		5. Industri pengolahan minyak atsiri	Minyak atsiri terstandarisasi	Minyak nilam
		6. Industri alsintan (alat dan mesin pertanian)	6.1. Alat dan mesin pertanian	
			6.2. Alat pengupas	
			6.3. Alat penyuling	
			6.4. Alat pengering	
			6.5. Alat dan mesin rumah tangga	
4	Kab. Padang Pariaman	1. Industri pengolahan hasil laut dan perikanan	1.1. Pembekuan ikan dan hasil laut lain	Ikan laut
			1.2. Pengalengan ikan dan hasil laut lainnya	
		2. Industri pengolahan kakao	2.1. Fermentasi biji kakao	Kakao
			2.2. Pasta, bubuk dan konsentrat kakao	
			2.3. Makanan ringan berbahan baku kakao	
		3. Industri pengolahan makanan	3.1. Pengolahan kacang	Kacang tanah
			3.2. Pengolahan pisang	Pisang
			3.3. Pengolahan beras	Pepaya
			3.4. Pengolahan sayur dan buah	Jambu biji merah
		4. Industri pengolahan minyak atsiri	4.1 Kosmetik	Minyak atsiri
			4.2 Biofarmaka	
		5. Industri pengolahan kulit	5.1 Alas kaki	
			5.2 Tas dan ikat pinggang	
			5.3 Cendramata	
		6. Industri pengolahan tekstil dan produk tekstil	6.1 Sulaman	
			6.2 Bordiran	
		7. Industri alsintan (alat dan mesin pertanian)	7.1. Alat dan mesin pertanian	
			7.2. Alat pengupas	
			7.3. Alat penyuling	
			7.4. Alat pengering	
			7.5. Alat dan mesin rumah tangga	

No	Kabupaten /Kota	Jenis industri	Sentra Produksi	Sentra Bahan Baku
		8. Industri Kelapa	8.1 Minyak Kelapa	Buah Kelapa
			8.2. Kerajinan	Buah Kelapa dan Daun Kelapa
			8.3. VCO	Buah Kelapa
5	Kab. Lima Puluh Kota	1. Industri pengolahan hasil laut dan perikanan	1.1 Pengasapan Ikan	Ikan air tawar
			1.2 Pengeringan Ikan	
		2. Industri pengolahan kakao	2.1. Fermentasi biji kakao	Kakao
			2.2. Pasta, bubuk dan konsentrat kakao	
			2.3. Makanan ringan berbahan baku kakao	
		3. Industri pengolahan makanan	3.1. Pengolahan umbi	Ubi kayu
			3.2. Pengolahan biji - bijian	Beras ketan
				Susu sapi
				Daging sapi dan kulit sapi
		4. Industri Pengolahan Gambir	4.1. Gambir mentah	Tanaman gambir
			4.2. Gambir murni	
			4.3. Katekin	
			4.4. Penyamak kulit	
			4.5. Biofarmaka	
		5. Industri pengolahan minyak atsiri	Minyak atsiri terstandarisasi	Nilam
		6. Industri pengolahan kulit		Kulit sapi /kulit kerbau
		7. Industri tekstil dan produk tekstil	7.1 Tenunan	
			7.2 Sulaman	
			7.3 Bordiran	
6	Kabupaten Agam	1. Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan		Ikan Laut
			Pengasapan Ikan	Ikan air tawar
		2. Industri pengolahan makanan		Ubi kayu
			Pengolahan Pisang	Pisang
			Pengolahan Jagung	Jagung
			Pengolahan Kacang	Kacang
			Pengolahan susu	Susu kerbau
			Pengolahan buah dan sayur	Tomat, Wortel, Kol
				Jeruk
		3. Industri Pengolahan Kakao	a. Fermentasi biji kakao	Kakao
			b. Pasta, bubuk dan konsentrat kakao	
			c. Makanan ringan berbahan	

No	Kabupaten /Kota	Jenis industri	Sentra Produksi	Sentra Bahan Baku
			baku kakao	
		4. Industri Pengolahan Gambir	4.1 Gambir mineral	Tanaman gambir
			4.2 Gambir murni	
			4.3 Katekin	
			4.4 Penyamak kulit	
			4.5 Biofarmaka	
		5. Industri pengolahan tekstil dan produk tekstil	5.1 Sulaman	
			5.2 Bordiran	
		6. Industri Kelapa	6.1. Kerajinan	Buah Kelapa dan Daun Kelapa
			6.2. VCO	Buah Kelapa
		7. Industri Kelapa sawit	7.1 Minyak Makan	CPO
			7.2 Margarin	CPO
			7.3 Sabun	CPO
7	Kab. Tanah Datar	1. Industri pengolahan kakao		Kakao
		2. Industri makanan ringan	2.1. Pengolahan kacang	Kacang tanah
			2.2. Pengolahan pisang	Pisang
			2.3. Pengolahan daging dan kulit	Daging sapi dan kulit sapi
		3. Industri kulit dan alas kaki	Penyamakan kulit	Kulit sapi dan kulit kerbau
				Kulit setengah jadi
		4. Industri tekstil dan produk tekstil	Tenunan	
8	Kab. Sijunjung	I. Industri pengolahan makanan	Pengolahan pisang	Pisang
			Pengolahan buah dan sayur	Nangka
				Kandis
				Gelugur
			Pengolahan susu	Susu kerbau
		2. Industri alsintan (alat dan mesin pertanian)	2.1. Alat dan mesin pertanian	
			2.2. Alat pengupas	
			2.3. Alat penyuling	
			2.4. Alat pengering	
			2.5. Alat dan mesin rumah tangga	
9	Kab. Kepulauan Mentawai	I. Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	Pengalengan ikan dan hasil laut lainnya	ikan laut
		2. Industri pengolahan makanan	Pengolahan pisang	Pisang
			Pengolahan buah dan sayur	Nangka

No	Kabupaten /Kota	Jenis industri	Sentra Produksi	Sentra Bahan Baku
		3. Industri alsintan (alat dan mesin pertanian)	3.1. Alat dan mesin pertanian	
			3.2. Alat pengupas	
			3.3. Mat penyuling	
			3.4. Mat pengering	
			3.5. Alat dan mesin rumah tangga	
		4. Industri Kelapa	VCO	Buah Kelapa
10	Kabupaten Solok	1. Industri pengolahan makanan	1.1. Pengolahan umbi	Kentang
				Bawang merah
				Ubi Jalar
			1.2. Pengolahan susu	Susu kerbau
		2. Industri pengolahan minyak atsiri	Minyak atsiri terstandarisasi	Sereh wangi
		3. Industri pengolahan tekstil dan produk tekstil	3.1. Tenunan	
			3.2. Sulaman	
			3.3. Bordiran	
11	Kabupaten Solok Selatan	1. Industri pengolahan makanan	1.1. Pengolahan Umbi	
			1.2. Pengolahan Kacang	
			1.3. Pengolahan Pisang	
			1.4. Pengolahan Daging dan kulit	
		2. Industri pengolahan tekstil dan produk tekstil	2.1. Sulaman	
			2.2. Bordiran	
		3. Industri alsintan (alat dan mesin pertanian)	3.1. Alat dan mesin pertanian	
			3.2. Alat pengupas	
			3.3. Alat penyuling	
			3.4. Alat pengering	
			3.5. Alat dan mesin rumah tangga	
12	Kab. Dharmasraya	1. Industri pengolahan makanan	Pengolahan kacang	Kedelai
		2. Industri pengolahan minyak atsiri	Minyak atsiri terstandarisasi	Nilam
		3. Industri alsintan (alat dan mesin pertanian)	3.1. Alat dan mesin pertanian	
			3.2. Alat pengupas	
			3.3. Alat penyuling	
			3.4. Alat pengering	
			3.5. Alat dan mesin rumah tangga	
		4. Industri Kelapa sawit	4.1 Minyak Kelapa	CPO
			4.2 Margarin	CPO

No	Kabupaten /Kota	Jenis industri	Sentra Produksi	Sentra Bahan Baku
			4.3 Sabun	CPO
Kota				
1	Kota Padang	1. Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	1.1. Pembekuan ikan dan hasil laut lainnya	Ikan laut
		2. Industri pengolahan kakao	2.1. Fermentasi biji kakao	Kakao
			2.2. Pasta, bubuk dan konsentrat kakao	
			2.3. Makanan ringan berbahan baku kakao	
		3. Industri pengolahan makanan	Pengolahan daging sepi	
		4. Industri pengolahan minyak atsiri	4.1. Kosmetik	Minyak atsiri
			4.2. Biofarmaka	
		5. Industri pengolahan semen	Bata ringan	Semen
		6. Industri pengolahan kulit	6.1. Alas kaki	
			6.2. Tas dan ikat pinggang	
			6.3. Cendramata	
		7. Industri tekstil dan produk tekstil	7.1. Bordiran	
			7.2. Sulaman	
		8. Industri maritim	8.1. Kapal tangkap	
			8.2. Kapal penumpang	
			8.3. Komponen kapal	
2	Kota Payakumbuh	1. Industri pengolahan kakao	1.1. Fermentasi biji kakao	
			1.2. Pasta, bubuk dan konsentrat kakao	
			1.3. Makanan ringan berbahan baku kakao	
		2. Industri pengolahan makanan	Pengolahan daging dan kulit sapi	Daging sapi
				Kulit sapi
		3. Industri tekstil dan produk tekstil	3.1. Sulaman	
			3.2. Bordiran	
3	Kota Sawahlunto	1. Industri pengolahan kakao	1.1. Fermentasi biji kakao	Kakao
			1.2. Pasta, bubuk dan konsentrat kakao	
			1.3. Makanan ringan berbahan baku kakao	
		2. Industri pengolahan minyak atsiri	Minyak atsiri terstandarisasi	Sereh wangi

No	Kabupaten /Kota	Jenis industri	Sentra Produksi	Sentra Bahan Baku
		3. Industri Tekstil dan produk tekstil	Tenunan	
4	Kota Bukittinggi	1 . Industri pengolahan makanan	1.1. Pengolahan umbi	Ubi kayu
			1.2. Pengolahan susu	
			1.3. Pengolahan daging dan kulit	
		2. Industri Pengolahan kulit	2.1. Alas Kaki	
			2.2 Tas dan Ikat Pinggang	
			2.3 Cendramata	
		3. Industri tekstil dan produk tekstil	3.1 Sulaman	
			3.2 Bordiran	
5	Kota Padang Panjang	I. Industri pengolahan makanan	1.1. Pengolahan susu	Susu sapi
			1.2. Pengolahan daging dan kulit	Daging sapi
				Kulit sapi
		2. Industri pengolahan semen	2.1. Bata ringan	
			2.2. Keramik	Semen
		3. Industri pengolahan kulit	Penyamakan kulit	Kulit sapi dan kulit kerbau
				Kulit setengah jadi
		6	Kota Solok	1. Industri pengolahan makanan
2. Industri pengolahan minyak atsiri	Minyak atsiri terstandarisasi			Sereh wangi
				Minyak atsiri
				7

Pentahapan pembangunan industri unggulan provinsi Sumatera Barat dilaksanakan tahun 2018 - 2038 dan dibagi kedalam 4 periode tahapan pembangunan dengan jangka waktu lima tahunan untuk setiap periode . Untuk tahapan RPJMD 2021 - 2026 masuk ke Tahap I dan Tahap II dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap I (2018-2023) adalah penguasaan teknologi yang dilakukan dengan strategi yang difokuskan pada:
 - a. Membangun peta potensi sumber daya bahan baku bagi industri unggulan;
 - b. Meningkatkan kapasitas industri alat dan mesin pertanian untuk peningkatan efisiensi produksi;
 - c. Merumuskan kebijakan penanaman modal yang lebih progresif untuk menumbuhkan industri hilir baru;
 - d. Membangun sistem rantai pasokan dari setiap industri unggulan.
2. Tahap II (2023 - 2028) adalah pembangunan industri bahan dasar yang padat modal dan berkelanjutan dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Memperkuat daya saing IKM dengan berbagai fasilitas perdagangan;
 - b. Membangun sistem transportasi antar moda untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah;
 - c. Membangun *e-commerce* industri unggulan;
 - d. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi praktik industri yang ramah lingkungan;

6.7.4 PARIWISATA

Dalam upaya pengembangan destinasi untuk menuju destinasi berstandar nasional, ditetapkan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 6.33
Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

NO	KAB/KOTA	DAYA TARIK WISATA UNGGULAN	PERWILAYAHAN
1.	Kota Bukittinggi	Kawasan Ngarai Sianok	KSPP Bukittinggi dskt.
2.	Kota Padang	Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang	KPPP Pantai Padang Kota Tua dskt.
3.	Kota Sawahlunto	Kawasan OCMH (Wisata Kandih)	KSPP Sawahlunto dskt.
4.	Kota Padang Panjang	Kawasan PDIKM	KPPP Istano Basa Pagaruyuang – Nagari Tuo Pariangan - PDIKM dskt.
5.	Kota Payakumbuh	Kawasan Wisata Kuliner Dan Kota Randang	Gastrowisata Payakumbuh dskt.
6.	Kota Solok	Kawasan Pulau Belibis	KPPP Singkarak – Pulau Belibis – Danau Kembar dskt.
7.	Kota Pariaman	Kawasan Pulau Angso Duo	KPPP Pantai Gandoriah – Tiram – dskt.
8.	Kab. Agam	Kawasan Wisata Danau Maninjau	KSPP Maninjau dskt.
9.	Kab. Pesisir Selatan	Kawasan Kesultanan Indrapura	KSPP Mandeh dskt.
10.	Kab. Lima puluh Kota	Kawasan Geopark Harau	KPPP Harau – Kelok Sembilan – Ngalau Indah dskt.
11.	Kab. Solok	Kawasan Geopark Singkarak (Geosite Gunung Talang)	KSPP Danau Kembar dskt.
12.	Kab. Padang Pariaman	Kawasan Wisata Lubuk Nyarai	KPPP Malibo Anai – Nyarai dskt.
13.	Kab. Sijunjung	Kawasan Geopark Silokek	KPPP Silokek – Kampung Padang Ranah – Cando Padang Roco dskt.
14.	Kab. Tanah Datar	Kawasan Geopark Singkarak (Istano Basa Pagaruyuang)	KSPP Singkarak dskt
15.	Kab. Solok Selatan	Kawasan Saribu Rumah Gadang	KPPP Saribu Rumah Gadang – Goa Batu Kapal – TNKS dskt.
16.	Kab. Dharmasraya	Kawasan Wisata Sehiliran batang hari	KPPP Silokek – Kampung Padang Ranah – Cando Padang Roco dskt.
17.	Kab. Pasaman	Kawasan Wisata Equator Bonjol	KPPP Taman Equator – Rimbo Panti dskt.
18.	Kab. Pasaman Barat	Kawasan Gunung Talamau	KPPP Pantai Sasak – Talamau dskt.
19.	Kab. Mentawai	Kawasan wisata 3M1K	KSPP Siberut dskt.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026 (Rp juta)

Uraian	2021*/	2022	2023	2024	2025	2026
BELANJA OPERASI	4.980.017	5.124.269	5.193.152	5.335.934	5.550.617	5.855.151
- Belanja Pegawai	2.163.633	2.470.658	2.496.118	2.581.956	2.628.823	2.739.125
- Belanja Barang dan Jasa	1.934.700	1.763.676	1.798.765	1.847.292	2.006.607	2.192.253
- Belanja Subsidi	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- Belanja Hibah	874.784	883.035	891.369	899.786	908.287	916.873
- Belanja Bantuan Sosial						
BELANJA MODAL	836.913	992.079	1.004.728,34	1.029.422,1	1.065.835,12	1.116.889,9
BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Belanja Tidak Terduga	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
BELANJA TRANSFER	913.195	919.931	928.751	937.659	946.656	955.744
- Belanja Bagi Hasil (wajib)	873.266	881.999	890.819	899.727	908.724	917.812
- Belanja Bantuan Keuangan	39.928	37.932	37.932	37.932	37.932	37.932
Jumlah Belanja Daerah	6.780.125	7.086.279	7.176.631	7.353.015	7.613.108	7.977.785

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

*/ Sesuai dengan APBD 2021

Tabel 7.2
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk
Mendanai Pembangunan Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021– 2026 (Rp juta)

URAIAN	2021*/	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan	6.580.124,00	6.817.130,14	7.067.356,05	7.331.691,08	7.611.087,61	7.906.565,56
Pencairan Dana Cadangan						
Total Penerimaan	6.580.124,00	6.817.130,14	7.067.356,05	7.331.691,08	7.611.087,61	7.906.565,56
Dikurangi:						
Belanja Wajib & Pengeluaran Pembiayaan Yg Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Dan "Earmark"	5.299.469,00	5.727.036,00	5.804.942,00	5.908.133,00	6.018.078,00	6.208.370,00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.280.655,00	1.090.094,14	1.262.414,05	1.423.558,08	1.593.009,61	1.698.195,56

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021

*/ Sesuai dengan APBD 2021

Tabel 7.3
Uraian Pendapatan dan Belanja SKPD Tahun 2021

Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	290.207.343.000	3.687.900.527.583	777.317.873.344	0	0	4.465.218.400.927
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	15.000.000	2.813.277.652.235	189.419.903.900	0	0	3.002.697.556.135
DINAS PENDIDIKAN	15.000.000	2.813.277.652.235	189.419.903.900	0	0	3.002.697.556.135
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	288.579.840.000	568.524.844.256	59.536.510.702	0	0	628.061.354.958
DINAS KESEHATAN	12.075.340.000	159.256.148.342	15.406.119.111	0	0	174.662.267.453
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTARBUKITTINGI	100.000.000.000	158.222.418.880	12.025.000.000	0	0	170.247.418.880
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	21.886.500.000	42.081.221.003	3.131.607.591	0	0	45.212.828.594
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	89.100.000.000	120.461.006.159	19.574.765.000	0	0	140.035.771.159
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	65.518.000.000	88.504.049.872	9.399.019.000	0	0	97.903.068.872
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.612.503.000	185.291.943.143	482.821.466.849	0	0	668.113.409.992
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.612.503.000	112.998.118.337	365.716.397.706	0	0	478.714.516.043
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	0	72.293.824.806	117.105.069.143	0	0	189.398.893.949
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	14.233.975.618	40.424.008.229	0	0	54.657.983.847
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0	14.233.975.618	40.424.008.229	0	0	54.657.983.847
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	42.296.170.760	2.949.399.268	0	0	45.245.570.028

Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0	14.452.096.444	116.553.800	0	0	14.568.650.244
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	27.844.074.316	2.832.845.468	0	0	30.676.919.784
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	64.275.941.571	2.166.584.396	0	0	66.442.525.967
DINAS SOSIAL	0	64.275.941.571	2.166.584.396	0	0	66.442.525.967
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16.598.574.780	316.988.099.040	19.456.608.788	0	0	336.444.707.828
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	550.000.000	38.280.393.613	690.900.000	0	0	38.971.293.613
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	550.000.000	38.280.393.613	690.900.000	0	0	38.971.293.613
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	11.797.038.555	86.500.000	0	0	11.883.538.555
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	11.797.038.555	86.500.000	0	0	11.883.538.555
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	30.159.017.665	4.273.282.640	0	0	34.432.300.305
DINAS PANGAN	0	30.159.017.665	4.273.282.640	0	0	34.432.300.305
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	615.344.608	0	0	0	615.344.608
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0	615.344.608	0	0	0	615.344.608
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	12.627.074.780	18.668.171.432	2.485.255.000	0	0	21.153.426.432
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.627.074.780	18.668.171.432	2.485.255.000	0	0	21.153.426.432
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	10.553.086.611	732.969.050	0	0	11.286.055.661
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, KEPENDUDUKAN DAN	0	10.553.086.611	732.969.050	0	0	11.286.055.661

Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
PENCATATAN SIPIL						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	70.000.000	25.522.376.008	243.453.908	0	0	25.765.829.916
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	70.000.000	25.522.376.008	243.453.908	0	0	25.765.829.916
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	274.950.000	0	0	0	274.950.000
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	0	0	0	0	0
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	274.950.000	0	0	0	274.950.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	510.000.000	18.892.441.300	702.849.000	0	0	19.595.290.300
DINAS PERHUBUNGAN	510.000.000	18.892.441.300	702.849.000	0	0	19.595.290.300
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	28.939.078.002	7.937.234.390	0	0	36.876.312.392
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	28.939.078.002	7.937.234.390	0	0	36.876.312.392
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	250.000.000	27.267.331.154	351.164.000	0	0	27.618.495.154
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	250.000.000	27.267.331.154	351.164.000	0	0	27.618.495.154
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1.500.000.000	14.620.456.868	244.240.000	0	0	14.864.696.868
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.500.000.000	14.620.456.868	244.240.000	0	0	14.864.696.868
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	836.500.000	47.582.403.957	453.990.500	0	0	48.036.394.457
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	836.500.000	47.582.403.957	453.990.500	0	0	48.036.394.457
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	0	689.607.711	0	0	0	689.607.711

Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
STATISTIK						
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	689.607.711	0	0	0	689.607.711
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	1.039.496.915	0	0	0	1.039.496.915
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	1.039.496.915	0	0	0	1.039.496.915
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	250.000.000	27.434.285.554	287.496.400	0	0	27.721.781.954
DINAS KEBUDAYAAN	250.000.000	27.434.285.554	287.496.400	0	0	27.721.781.954
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.000.000	905.815.000	430.000.000	0	0	1.335.815.000
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.000.000	905.815.000	430.000.000	0	0	1.335.815.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	13.746.804.087	537.273.900	0	0	14.284.077.987
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	13.746.804.087	537.273.900	0	0	14.284.077.987
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5.434.657.112	474.700.028.348	23.483.338.183	0	0	498.183.366.531
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.908.650.000	55.360.967.464	10.296.302.773	0	0	65.657.270.237
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.908.650.000	55.360.967.464	10.296.302.773	0	0	65.657.270.237
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.948.084	50.679.902.074	357.283.500	0	0	51.037.185.574
DINAS PARIWISATA	3.948.084	50.679.902.074	357.283.500	0	0	51.037.185.574
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	2.939.408.500	232.960.326.492	6.806.575.336	0	0	239.766.901.828
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1.127.886.000	131.993.761.839	5.163.783.189	0	0	137.157.545.028
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.811.522.500	100.966.564.653	1.642.792.147	0	0	102.609.356.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	100.000.000	86.622.254.545	3.757.593.900	0	0	90.379.848.445
DINAS KEHUTANAN	100.000.000	86.622.254.545	3.757.593.900	0	0	90.379.848.445

Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.750.528	21.170.360.043	886.800.324	0	0	22.057.160.367
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.750.528	21.170.360.043	886.800.324	0	0	22.057.160.367
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	478.900.000	22.487.178.616	525.752.880	0	0	23.012.931.496
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	478.900.000	22.487.178.616	525.752.880	0	0	23.012.931.496
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	4.982.193.239	853.029.470	0	0	5.835.222.709
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	4.982.193.239	853.029.470	0	0	5.835.222.709
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0	436.845.875	0	0	0	436.845.875
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	436.845.875	0	0	0	436.845.875
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.727.500.000	286.478.131.444	10.339.041.270	0	0	296.817.172.714
SEKRETARIAT DAERAH	4.727.500.000	133.235.570.576	8.996.228.270	0	0	142.231.798.846
SEKRETARIAT DAERAH	4.727.500.000	133.235.570.576	8.996.228.270	0	0	142.231.798.846
SEKRETARIAT DPRD	0	153.242.560.868	1.342.813.000	0	0	154.585.373.868
SEKRETARIAT DPRD	0	153.242.560.868	1.342.813.000	0	0	154.585.373.868
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.263.156.279.846	183.241.770.431	6.206.728.390	50.000.000.000	913.194.662.849	1.152.643.161.670
PERENCANAAN	0	26.210.544.895	601.516.935	0	0	26.812.061.830
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	26.210.544.895	601.516.935	0	0	26.812.061.830
KEUANGAN	6.261.527.779.846	95.796.029.992	3.344.799.100	50.000.000.000	913.194.662.849	1.062.335.491.941
SEKRETARIAT DAERAH	0	2.750.000.000	0	0	0	2.750.000.000
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	0	0	0
BADAN KEUANGAN DAERAH	6.261.527.779.846	93.046.029.992	3.344.799.100	50.000.000.000	913.194.662.849	1.059.585.491.941
KEPEGAWAIAN	0	18.506.082.057	958.693.620	0	0	19.464.775.677
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	18.506.082.057	958.693.620	0	0	19.464.775.677

Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.085.000.000	20.463.049.063	257.354.396	0	0	20.720.403.459
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.085.000.000	20.463.049.063	257.354.396	0	0	20.720.403.459
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	9.268.634.884	500.109.660	0	0	9.768.744.544
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	9.268.634.884	500.109.660	0	0	9.768.744.544
PENGHUBUNG	543.500.000	12.997.429.540	544.254.679	0	0	13.541.684.219
BADAN PENGHUBUNG	543.500.000	12.997.429.540	544.254.679	0	0	13.541.684.219
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	18.664.473.154	3.000.000	0	0	18.667.473.154
INSPEKTORAT DAERAH	0	18.664.473.154	3.000.000	0	0	18.667.473.154
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	0	18.664.473.154	3.000.000	0	0	18.667.473.154
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	12.043.515.724	106.556.190	0	0	12.150.071.914
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	12.043.515.724	106.556.190	0	0	12.150.071.914
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	12.043.515.724	106.556.190	0	0	12.150.071.914
TOTAL	6.580.124.354.738	4.980.016.545.724	836.913.146.165	50.000.000.000	913.194.662.849	6.780.124.354.738

Tabel 7.4
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sumatera Barat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.360.416.889.000		1.377.762.580.000		1.411.624.600.000		1.461.557.006.000		1.531.567.335.000		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					595.886.326.000		603.484.038.000		618.316.197.000		640.187.460.000		670.853.206.000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah	%	91,70	93,22	594.049.855.000	94,70	601.624.153.000	96,20	616.410.600.000	97,70	638.214.457.000	99,20	668.785.694.000	99,20	DINAS PENDIDIKAN
		APM Pendidikan Menengah	%	73,13	73,42		73,49		73,56		73,65		73,72		73,72	DINAS PENDIDIKAN
		APK SLB	%	52,87	53,8		54,72		55,65		56,57		57,50		57,50	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	dokumen	27	33	317.382.000	39	321.428.000	45	329.328.000	51	340.977.000	57	357.311.000	57	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan	%	69,07	71,07	527.009.000	74,07	533.729.000	77,07	546.847.000	80	566.190.000	83,02	593.311.000	83,02	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi	%	6	21	496.040.000	36	502.364.000	51	514.711.000	66	532.918.000	81	558.445.000	81	DINAS PENDIDIKAN
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun	dokumen	N/A	3	496.040.000	6	502.364.000	9	514.711.000	12	532.918.000	15	558.445.000	15	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah	Orang	N/A	6		12		18		24		30		30	DINAS PENDIDIKAN
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					202.919.653.000		205.506.937.000		210.557.790.000		218.005.705.000		228.448.437.000		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	%	73,8	74,8	160.475.174.000	76	162.521.277.000	78	166.515.651.000	80	172.405.692.000	82	180.664.131.000	82	DINAS KESEHATAN
		Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	Per 100.000	252	231		211		190		190		190		190	DINAS KESEHATAN
		Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan	daerah	2	2		2		2		2		2		2	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		bergerak (PKB)														
		Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA	kabupaten/kota	4	4		6		6		8		8		8	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	kabupaten/kota	17	17		18		18		18		19		19	DINAS KESEHATAN
		Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	%	34,4	35		37		38		39		40		40	DINAS KESEHATAN
		Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	%	90	92		94		96		98		100		100	DINAS KESEHATAN
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	kabupaten/kota	9	8,9		8,8		8,7		8,6		8,5		8,5	DINAS KESEHATAN
		Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	%	78,6	79,6		81		83		85		87		87	DINAS KESEHATAN
		Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	%	85,53	86,84		88,16		89,47		90,79		92,11		92,11	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	91	92	11.516.389.000	93	11.663.226.000	94	11.949.880.000	95	12.372.575.000	96	12.965.236.000	96	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	86	3.433.164.000	87	3.476.938.000	88	3.562.392.000	89	3.688.402.000	90	3.865.081.000	90	RUMAH SAKIT Jiwa PROF. HB. SAANIN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit	%	81	82	16.602.193.000	83	16.813.875.000	84	17.227.119.000	85	17.836.482.000	86	18.690.871.000	86	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	91	92		93		94		95		96		96	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																NATSIR
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	92	92	6.101.200.000	93	6.178.992.000	94	6.330.856.000	95	6.554.793.000	96	6.868.775.000	96	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Akreditasi Institusi pelatihan	strata	B	B	1.691.829.000	B	1.713.401.000	A	1.755.512.000	A	1.817.608.000	A	1.904.674.000	A	DINAS KESEHATAN
		Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	652	420		480		530		580		630		630	DINAS KESEHATAN
		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	%	68,7	73,7		79,9		87		95		100		100	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya	%	42	44	150.000.000	46	151.913.000	48	155.646.000	50	161.152.000	52	168.871.000	52	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	%	42	44	150.000.000	46	151.913.000	48	155.646.000	50	161.152.000	52	168.871.000	52	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	%	42	44	150.000.000	46	151.913.000	48	155.646.000	50	161.152.000	52	168.871.000	52	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	%	44	44	150.000.000	46	151.913.000	48	155.646.000	50	161.152.000	52	168.871.000	52	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	%	100	100	158.691.000	100	160.714.000	100	164.664.000	100	170.489.000	100	178.655.000	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	%	100	100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN	
1.02.05	PROGRAM	Jumlah Kab/Kota yang	kabupaten/kota	5	8	2.341.013.000	11	2.370.862.000	14	2.429.132.000	17	2.515.056.000	19	2.635.530.000	19	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota																		
		Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	kabupaten/kota	5	8		11		14		17		19		19	DINAS KESEHATAN				
		Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM	kabupaten/kota	5	8		11		14		17		19		19	DINAS KESEHATAN				
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					374.570.378.000		379.346.254.000		388.669.653.000		402.417.791.000		421.694.086.000						
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	%	52,28	53,78	139.275.433.000	55,28	141.051.233.000	56,78	144.517.926.000	58,28	149.629.857.000	59,78	156.797.306.000	59,78	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI				
		Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	68,80	70,36										71,92	73,48	75,04	76,6	76,6	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
		Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	64,75	66,51										68,27	70,03	71,79	73,5	73,5	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	%	82	82	4.188.865.000	84	4.242.274.000	86	4.346.539.000	88	4.500.286.000	90	4.715.855.000	90	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG				
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah TPA Regional yang dibangun	lokasi	2	2	634.975.000	3	643.071.000	3	658.876.000	3	682.182.000	3	714.859.000	3	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG				
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional	%	81	83	707.627.000	85	716.650.000	87	734.263.000	88	760.236.000	90	796.652.000	90	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG				
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Jumlah drainase kewenangan provinsi yang dikelola	Km	1	2	529.075.000	10	535.821.000	15	548.990.000	25	568.409.000	36	595.637.000	36	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG				
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	unit	10	3	22.787.495.000	7	23.078.042.000	2	23.645.244.000	3	24.481.630.000	2	25.654.330.000	27	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG				
1.03.09	PROGRAM PENATAAN	Jumlah kawasan	kawasan	2	1	1.577.454.000	1	1.597.567.000	1	1.636.831.000	2	1.694.729.000	3	1.775.909.000	10	DINAS BINA MARGA,				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya														CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan	%	73,92	75	198.648.582.000	77	201.181.406.000	79	206.125.951.000	81	213.417.099.000	82	223.640.034.000	82	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih	%	2,01	7,91	4.231.756.000	13,81	4.285.712.000	19,72	4.391.044.000	25,62	4.546.366.000	31,52	4.764.142.000	31,52	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
		Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik	%	100	100		100		100		100		100			
		Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	%	5	10		15		20		25		30			
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	84	86	1.989.116.000	87	2.014.478.000	88	2.063.989.000	89	2.136.997.000	90	2.239.362.000	90	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					14.679.513.000		14.866.681.000		15.232.067.000		15.770.860.000		16.526.303.000		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	%	0	3	1.695.724.000	3	1.717.345.000	3	1.759.553.000	3	1.821.792.000	3	1.909.058.000	3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	%	0	8	11.363.910.000	8	11.508.803.000	8	11.791.661.000	8	12.208.759.000	8	12.793.573.000	8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	%	1	20	1.619.879.000	20	1.640.533.000	20	1.680.853.000	20	1.740.309.000	20	1.823.672.000	20	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN	Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	10	20	0.000	20	0.000	20	0.000	20	0.000	20	0.000	20	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					10.851.570.000		10.989.931.000		11.260.035.000		11.658.329.000		12.216.777.000		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	%	77	79	2.334.846.000	81	2.364.616.000	83	2.422.732.000	85	2.508.430.000	87	2.628.587.000	87	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75	77		79		81		83		85		85	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	%	70	71	7.992.339.000	72	8.094.244.000	73	8.293.180.000	74	8.586.529.000	75	8.997.834.000	75	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	42,11	52,63	524.385.000	52,63	531.071.000	63,16	544.123.000	63,16	563.370.000	73,68	590.356.000	73,68	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					161.509.449.000		163.568.739.000		167.588.858.000		173.516.861.000		181.828.526.000		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU)	nilai	N/a	0,687	2.022.783.000	0,687	2.048.574.000	0,687	2.098.923.000	0,687	2.173.167.000	0,687	2.277.264.000	0,687	DINAS SOSIAL
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan/ Orang Terlantar yang mendapatkan penanganan	orang	35	35	0.000	35	0.000	35	0.000	35	0.000	35	0.000	35	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	157.961.787.000	100	159.975.843.000	100	163.907.657.000	100	169.705.447.000	100	177.834.541.000	100	DINAS SOSIAL
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		dasarnya di dalam panti														
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS SOSIAL
		Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Anak yang difasilitasi perlindungan sosial (dalam pengangkatan anak)	orang	25	25	892.531.000	25	903.911.000	25	926.127.000	25	958.886.000	25	1.004.818.000	25	DINAS SOSIAL
		Persentase Data Fakir Miskin yang valid	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS SOSIAL
		Persentase Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif	persen	N/A	30		35		40		50		60		60	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100	100	507.215.000	100	513.682.000	100	526.307.000	100	544.924.000	100	571.027.000	100	DINAS SOSIAL
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman makam Pahlawan yang dipelihara	%	100	100	125.133.000	100	126.729.000	100	129.844.000	100	134.437.000	100	140.876.000	100	DINAS SOSIAL
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					142.996.664.000		144.819.908.000		148.379.223.000		153.627.740.000		160.986.693.000		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.003.295.000		3.041.588.000		3.116.344.000		3.226.575.000		3.381.131.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro	dokumen	0	2	212.000	1	214.000	1	220.000	1	227.000	1	238.000	1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	28,62	31,4	1.893.564.000	35,72	1.917.708.000	36,04	1.964.840.000	36,34	2.034.341.000	36,68	2.131.789.000	36,68	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase serapan tenaga kerja	%	31,77	35,52	240.222.000	36,01	243.285.000	36,5	249.265.000	36,99	258.082.000	37,97	270.444.000	37,97	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	10,69	11,26	192.193.000	11,83	194.644.000	12,41	199.428.000	12,98	206.482.000	13,56	216.372.000	13,56	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	%	8,14	20	677.104.000	40	685.737.000	60	702.591.000	80	727.443.000	100	762.288.000	100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					2.131.472.000		2.158.647.000		2.211.701.000		2.289.934.000		2.399.627.000		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	%	11,54	11,54	262.261.000	13,2	265.604.000	13,2	272.132.000	15,09	281.758.000	15,09	295.255.000	15,09	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	81	84	486.925.000	88	493.133.000	92	505.253.000	96	523.125.000	100	548.184.000	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	indeks	69,5	70	112.406.000	70,50	113.839.000	71	116.637.000	71,50	120.763.000	72	126.548.000	72	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																KELUARGA BERENCANA
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)	%	80	90,62	136.421.000	90,62	138.161.000	93,75	141.556.000	93,75	146.563.000	93,75	153.584.000	93,75	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	Kabupaten/Kota	2	3	348.115.000	4	352.553.000	5	361.218.000	6	373.995.000	7	391.910.000	7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	%	81	84	785.344.000	88	795.357.000	92	814.905.000	96	843.730.000	100	884.146.000	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					42.766.141.000		43.311.420.000		44.375.909.000		45.945.586.000		48.146.435.000		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras)	Kg/Kap/Tahun	290,59	291,79	9.557.421.000	292,98	9.679.280.000	294,15	9.917.173.000	295,31	10.267.966.000	296,4	10.759.814.000	296,4	DINAS PANGAN
		Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	%	82	82,5		83		84		84,5		85		85	DINAS PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	%	21	22	23.013.958.000	24	23.307.392.000	27	23.880.231.000	28	24.724.929.000	30	25.909.283.000	30	DINAS PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat	%	82	83	10.194.762.000	83,5	10.324.748.000	84	10.578.505.000	84,5	10.952.691.000	85	11.477.338.000	85	DINAS PANGAN
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					761.718.000		771.428.000		790.386.000		818.347.000		857.545.000		
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH	Persentase Luas Penetapan Lokasi	%	80	85	370.279.000	90	375.000.000	95	384.216.000	95	397.807.000	95	416.862.000	95	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan														PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang telah difasilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal	%	65	70	95.215.000	75	96.429.000	80	98.798.000	85	102.293.000	90	107.193.000	90	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi dapat digunakan untuk pembangunan	%	65	70	95.215.000	75	96.429.000	80	98.798.000	85	102.293.000	90	107.193.000	90	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti	%	65	70	42.318.000	75	42.857.000	80	43.910.000	85	45.464.000	90	47.641.000	90	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah	%	75	80	52.897.000	85	53.571.000	90	54.888.000	95	56.830.000	95	59.552.000	95	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Luas Tanah Kosong yang difasilitasi dapat dimanfaatkan sesuai fungsi/peruntukannya	%	65	70	52.897.000	75	53.571.000	80	54.888.000	85	56.830.000	90	59.552.000	90	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas rencana penggunaan tanah yang dapat dijadikan acuan	%	50	55	52.897.000	60	53.571.000	70	54.888.000	75	56.830.000	80	59.552.000	80	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					9.709.135.000		9.832.930.000		10.074.598.000		10.430.959.000		10.930.616.000		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi	%	100	100	211.588.000	100	214.286.000	100	219.552.000	100	227.318.000	100	238.207.000	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	%	60	60	1.803.786.000	65	1.826.785.000	70	1.871.683.000	75	1.937.888.000	80	2.030.715.000	80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya	Kabupaten/Kota	19	19	134.339.000	19	136.052.000	19	139.396.000	19	144.327.000	19	151.240.000	19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan Limbah B3	%	100	100	2.835.276.000	100	2.871.427.000	100	2.942.000.000	100	3.046.065.000	100	3.191.975.000	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	%	50	50	158.691.000	50	160.714.000	50	164.664.000	50	170.489.000	50	178.655.000	50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	100	100	48.559.000	100	49.179.000	100	50.387.000	100	52.170.000	100	54.669.000	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	75	75	317.382.000	75	321.428.000	75	329.328.000	75	340.977.000	75	357.311.000	75	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup	%	10	10	100.000.000	10	101.275.000	10	103.764.000	10	107.434.000	10	112.581.000	10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%	90	90	105.794.000	90	107.143.000	90	109.776.000	90	113.659.000	90	119.104.000	90	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	%	55	60	3.993.720.000	65	4.044.641.000	70	4.144.048.000	75	4.290.632.000	80	4.496.159.000	80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					1.695.877.000		1.717.499.000		1.759.712.000		1.821.956.000		1.909.229.000		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	26,66	40	491.942.000	50	498.214.000	60	510.459.000	70	528.515.000	80	553.831.000	80	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	%	97,16	97,75		98		98,25		98,5		99		99	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	91,47	94	491.942.000	95	498.214.000	96	510.459.000	97	528.515.000	98	553.831.000	98	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	%	100	100		100		100		100		100		100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	inovasi	3	6	510.985.000	9	517.500.000	12	530.219.000	15	548.974.000	18	575.270.000	18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah	%	1,5	1,4		1,3		1,2		1,1		1		1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	%	100	100	201.008.000	100	203.571.000	100	208.575.000	100	215.952.000	100	226.297.000	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6.083.149.000		6.160.712.000		6.312.126.000		6.535.401.000		6.848.455.000		
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa Adat yang terbentuk	Desa	0	1	105.794.000	1	107.143.000	2	109.776.000	2	113.659.000	3	119.104.000	3	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama Desa	dokumen kerjasama	118	130	1.586.908.000	145	1.607.142.000	160	1.646.642.000	180	1.704.887.000	200	1.786.553.000	200	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa/Nagari dan Kelurahan Cepat berkembang	Desa/Nagari/Kelurahan	381	410	1.269.527.000	450	1.285.714.000	500	1.317.313.000	550	1.363.910.000	600	1.429.243.000	600	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Mandiri	Dasawisma	10.800	11.300	3.120.920.000	11.800	3.160.713.000	12.300	3.238.395.000	12.800	3.352.945.000	13.300	3.513.555.000	13.300	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah KAN yang aktif	lembaga adat	299	350		400		450		500		544		544	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah LPM Mandiri	LPM	0	7		15		25		37		50		50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah Posyandu Mandiri	Posyandu	2.319	2.400		2.500		2.600		2.700		2.800		2.800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					719.399.000		728.572.000		746.477.000		772.882.000		809.904.000		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya	%	80	80	211.588.000	85	214.286.000	90	219.552.000	90	227.318.000	90	238.207.000	90	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB	%	54,44	55,12	211.588.000	55,46	214.286.000	55,89	219.552.000	56,32	227.318.000	56,75	238.207.000	56,75	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga	indeks	51,74	59,30	296.223.000	61,38	300.000.000	63,46	307.373.000	65,54	318.246.000	67,62	333.490.000	67,62	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					5.111.966.000		5.177.144.000		5.304.386.000		5.492.015.000		5.755.088.000		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	%	39,07	40,27	3.789.134.000	41,51	3.837.446.000	42,17	3.931.761.000	43,65	4.070.837.000	44,81	4.265.834.000	44,81	DINAS PERHUBUNGAN
Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas		%	2,45	2,45	2,45		2,45		2,45		2,45		DINAS PERHUBUNGAN			
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi	Rekomendasi	1	1	1.168.373.000	1	1.183.270.000	1	1.212.352.000	1	1.255.236.000	1	1.315.363.000	5	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	Trayek	4	4		4		4		4		5		5	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	dokumen	1	1	154.459.000	1	156.428.000	1	160.273.000	1	165.942.000	1	173.891.000	5	DINAS PERHUBUNGAN
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					25.510.604.000		25.835.871.000		26.470.854.000		27.407.189.000		28.720.026.000		
2.16.02	PROGRAM	Persentase Masyarakat	%	5	10	9.424.751.000	20	9.544.919.000	30	9.779.510.000	40	10.125.434.000	50	10.610.454.000	50	DINAS KOMUNIKASI,

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi														INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03	PROGRAM PENGLOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (Skala 1-5)	indeks	3	3,2	16.085.853.000	3,3	16.290.952.000	3,4	16.691.344.000	3,5	17.281.755.000	3,6	18.109.572.000	3,6	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					7.409.634.000		7.504.111.000		7.688.543.000		7.960.505.000		8.341.822.000		
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	1,81	1,94	65.592.000	2,58	66.429.000	3,25	68.061.000	3,95	70.469.000	4,03	73.844.000	4,03	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	%	60	60	402.017.000	63	407.143.000	65	417.149.000	67	431.905.000	69	452.593.000	69	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi sehat	koperasi	38	40	47.607.000	41	48.214.000	43	49.399.000	45	51.147.000	50	53.597.000	50	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.000	1.100	3.025.536.000	1.250	3.064.113.000	1.500	3.139.421.000	1.650	3.250.469.000	1.800	3.406.171.000	7.300	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern	koperasi	50	50	1.329.829.000	60	1.346.785.000	70	1.379.886.000	80	1.428.695.000	90	1.497.132.000	90	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	45	100	1.258.947.000	120	1.274.999.000	125	1.306.336.000	130	1.352.544.000	140	1.417.332.000	615	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	1,9	2	1.280.106.000	3	1.296.428.000	3,5	1.328.291.000	4,2	1.375.276.000	5	1.441.153.000	5	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.118.669.000		4.171.184.000		4.273.702.000		4.424.873.000		4.636.829.000		
2.18.02	PROGRAM	Persentase	%	100	100	1.005.042.000	100	1.017.857.000	100	1.042.873.000	100	1.079.762.000	100	1.131.484.000	100	DINAS PENANAMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal														MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat	dokumen pernyataan minat	4	4	793.454.000	4	803.571.000	5	823.321.000	5	852.444.000	5	893.277.000	23	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/Rasio	82,60 / 3,40	82,60 / 3,40	1.476.581.000	82,75 / 3,41	1.495.408.000	82,90 / 3,43	1.532.162.000	83,05 / 3,45	1.586.358.000	83,20 / 3,47	1.662.346.000	83,20 / 3,47	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	85	85		85,52		86,38		87,27		88,13		88,13	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Rp (triliun)	4,8	5,1	774.826.000	5,6	784.705.000	6,1	803.992.000	6,7	832.431.000	7,5	872.305.000	7,5	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	%	15	20	68.766.000	40	69.643.000	60	71.354.000	80	73.878.000	100	77.417.000	100	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					18.069.598.000		18.299.989.000		18.749.758.000		19.412.981.000		20.342.885.000		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	%	14	15	3.681.628.000	16	3.728.569.000	17	3.820.208.000	18	3.955.338.000	20	4.144.803.000	20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Jumlah wirasaha muda baru	orang	230	268		348		348		348		348		1890	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah medali emas dalam event nasional	medali	14	26	13.287.713.000	26	13.457.135.000	41	13.787.879.000	29	14.275.588.000	29	14.959.405.000	29	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan	%	0,8	0,85		0,9		0,95		1		1,05		1,05	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi	%	4,44	4,84	1.100.257.000	5,04	1.114.285.000	5,24	1.141.671.000	5,44	1.182.055.000	5,64	1.238.677.000	5,64	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	KEPRAMUKAAN	kepramukaan														
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					881.282.000		892.519.000		914.455.000		946.801.000		992.154.000		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	%	50	60	881.282.000	70	892.519.000	80	914.455.000	90	946.801.000	100	992.154.000	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	50	60		70		80		90		100		100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					881.282.000		892.519.000		914.455.000		946.801.000		992.154.000		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	%	44	45	881.282.000	47	892.519.000	50	914.455.000	55	946.801.000	60	992.154.000	60	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					12.053.108.000		12.206.788.000		12.506.801.000		12.949.195.000		13.569.479.000		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Karya Budaya	5	8	2.168.775.000	8	2.196.427.000	8	2.250.410.000	8	2.330.012.000	8	2.441.623.000	8	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	Kesenian Tradisional	5	21	3.231.343.000	23	3.272.544.000	23	3.352.975.000	23	3.471.577.000	23	3.637.870.000	23	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	dokumen	2	3	2.487.284.000	4	2.518.997.000	5	2.580.908.000	6	2.672.201.000	7	2.800.203.000	7	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Cagar Budaya	6	11	2.480.198.000	16	2.511.821.000	21	2.573.555.000	26	2.664.588.000	31	2.792.225.000	31	DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	Cagar Budaya	6	15				15				15			15
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah aktivitas masyarakat di museum	kali	10	15	1.685.508.000	15	1.706.999.000	15	1.748.953.000	15	1.810.817.000	15	1.897.558.000	15	DINAS KEBUDAYAAN
		Jumlah masyarakat yang mengapresiasi	orang	25000	30000				35000				40000			45000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		museum														
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					1.594.112.000		1.614.437.000		1.654.115.000		1.712.626.000		1.794.663.000		
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	%	1,31	1,41	1.126.705.000		1.141.071.000		1.169.115.000		1.210.470.000		1.268.453.000	1,82	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	jumlah	223	223	467.407.000		473.366.000		485.000.000		502.156.000		526.210.000	223	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					496.223.000		502.550.000		514.901.000		533.114.000		558.651.000		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	%	71	71,5	258.691.000		261.989.000		268.428.000		277.923.000		291.236.000	73,5	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	%	76,66	76,66	168.766.000		170.918.000		175.119.000		181.313.000		189.998.000	76,66	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Regulasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi	regulasi	1	1	68.766.000		69.643.000		71.354.000		73.878.000		77.417.000	1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					389.621.071.000		394.614.684.000		404.313.345.000		418.614.833.000		438.666.984.000		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					67.146.931.000		68.003.072.000		69.674.421.000		72.138.965.000		75.594.507.000		
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	%	41,18	47,06	5.580.628.000		5.651.783.000		5.790.690.000		5.995.520.000		6.282.712.000	70,59	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	kawasan	7	7		7		7		7		7		7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem	batang	20.000	20.000		25.000		25.000		25.000		30.000		30.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	M2	250	250		300		350		350		350		350	350	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	0,93	0,99	37.620.310.000	1,07	38.099.979.000	1,09	39.036.383.000	1,11	40.417.189.000	1,17	42.353.221.000	1,17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah sarana penangkapan ikan	unit	1.400	1.423		1.590		1.739		1.768		1.800		1.800	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	unit	3	3		3		3		3		3		3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	dokumen	100	100		100		100		100		100		100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	220.615	222.693		225.081		227.546		230.081		232.762		232.762	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	3,32	3,33	10.701.053.000	3,39	10.837.494.000	3,71	11.103.853.000	3,78	11.496.622.000	3,97	12.047.324.000	3,97	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	256.747	262.256		274.280		284.467		295.226		306.934		306.934	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB	unit	5	20		40		60		80		100		100	100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan	kab/kota	17	17		17		19		19		19		19	19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah produksi perikanan budidaya laut	ton	52	67		72		79		85		93		93	93	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	80	82	4.781.884.000	84	4.842.854.000	86	4.961.880.000	90	5.137.393.000	92	5.383.480.000	92	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	%	6,30	6,49	8.463.056.000	7,26	8.570.962.000	7,95	8.781.615.000	8,05	9.092.241.000	11	9.527.770.000	11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton	15.633	16.652		17.861		19.280		20.832		22.742		22.742	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Tingkat konsumsi ikan	Kg/kap/th	39,27	40		40,5		41,6		42,4		43,5		44	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					24.277.136.000		24.586.677.000		25.190.958.000		26.082.019.000		27.331.378.000		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang	kali	4	6	10.896.771.000	10	11.035.708.000	12	11.306.939.000	15	11.706.891.000	17	12.267.665.000	17	DINAS PARIWISATA
		Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya	DTW	11	19		19		19		19		19		19	DINAS PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	%	1	2,5	4.602.034.000	4	4.660.712.000	5,5	4.775.261.000	7	4.944.172.000	8,5	5.181.004.000	8,5	DINAS PARIWISATA
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	%	1,5	3		4,5		6		7,5		9		9	DINAS PARIWISATA
		Rata-rata lama tinggal wisman	hari	3,19	3,21		3,23		3,25		3,27		3,29		3,29	DINAS PARIWISATA
		Rata-rata lama tinggal wisnus	hari	1,58	1,64		1,7		1,76		1,82		1,88		1,88	DINAS PARIWISATA
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI	produk	0	50	2.576.081.000	100	2.608.927.000	150	2.673.048.000	200	2.767.600.000	250	2.900.171.000	250	DINAS PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	196	296	6.202.250.000	396	6.281.330.000	496	6.435.710.000	596	6.663.356.000	696	6.982.538.000	696	DINAS PARIWISATA
		Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2	4		6		8		10		12		12	DINAS PARIWISATA
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					215.557.702.000		218.306.122.000		223.671.550.000		231.583.326.000		242.676.446.000		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP	%	5	5	42.220.051.000	5	42.758.368.000	5	43.809.264.000	5	45.358.898.000	5	47.531.644.000	30	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	SARANA PERTANIAN															DAN HOLTIKULTURA
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging	%	1,40	1,45	76.436.090.000	1,51	77.410.671.000	1,57	79.313.236.000	1,62	82.118.727.000	1,68	86.052.312.000	1,68	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	%	5	5	42.527.793.000	5	43.070.034.000	5	44.128.590.000	5	45.689.519.000	5	47.878.102.000	30	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan	%	20	20	8.518.724.000	20	8.627.340.000	20	8.839.379.000	20	9.152.048.000	20	9.590.442.000	100	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	%	0,1	3,41	18.135.328.000	4,71	18.366.558.000	4,94	18.817.963.000	5,19	19.483.598.000	5,48	20.416.885.000	5,48	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	%	0,65	0,63	2.761.221.000	0,6	2.796.427.000	0,57	2.865.156.000	0,54	2.966.503.000	0,53	3.108.603.000	0,53	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	%	3	5	264.485.000	7	267.857.000	8	274.440.000	10	284.148.000	12	297.759.000	12	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	%	3	3	476.073.000	3	482.143.000	3	493.992.000	3	511.466.000	3	535.966.000	15	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	orang	1.000	1.000	22.075.611.000	1.000	22.357.082.000	1.000	22.906.564.000	1.000	23.716.821.000	1.000	24.852.886.000	6.000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya	%	20	20	2.142.326.000	20	2.169.642.000	20	2.222.966.000	20	2.301.598.000	20	2.411.847.000	100	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN					68.542.420.000		69.416.355.000		71.122.439.000		73.638.202.000		77.165.561.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	BIDANG KEHUTANAN															
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan	indeks	61,41	60,98	22.226.299.000	60,55	22.509.690.000	60,12	23.062.923.000	59,69	23.878.712.000	59,26	25.022.531.000	59,26	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	unit	20	20		20		20		20		20		20	DINAS KEHUTANAN
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	lokasi	1	10	21.840.703.000	10	22.119.178.000	10	22.662.814.000	10	23.464.449.000	10	24.588.425.000	10	DINAS KEHUTANAN
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	hektar	50.000	50.000	22.147.952.000	50.000	22.430.345.000	50.000	22.981.628.000	50.000	23.794.540.000	50.000	24.934.327.000	50.000	DINAS KEHUTANAN
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi	Daerah Aliran Sungai	1	3	2.327.466.000	3	2.357.142.000	3	2.415.074.000	3	2.500.501.000	3	2.620.278.000	3	DINAS KEHUTANAN
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					1.250.907.000		1.292.693.000		1.324.464.000		1.371.313.000		1.437.000.000		
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase luasan daerah konservasi air tanah	%	29,37	37,5	264.485.000	55	267.857.000	67	274.440.000	83	284.148.000	100	297.759.000	100	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambangan sesuai Peraturan Perundang Undangan	%	NA	NA	0.000	40	25.836.000	55	26.471.000	70	27.407.000	90	28.720.000	90	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	%	28	29	359.699.000	33,3	364.286.000	35,7	373.239.000	51,7	386.441.000	51,8	404.952.000	51,8	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	%	99,3	99,50	626.723.000	99,60	634.714.000	99,70	650.314.000	99,80	673.317.000	99,90	705.569.000	99,90	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					5.487.251.000		5.557.215.000		5.693.798.000		5.895.201.000		6.177.588.000		
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah perusahaan yang didata	jumlah usaha	5.360	5.450	185.139.000	5.540	187.500.000	5.630	192.108.000	5.720	198.903.000	5.810	208.431.000	5.810	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat	%	5	5,5	370.279.000	5,8	375.000.000	6,2	384.216.000	6,5	397.807.000	6,8	416.862.000	6,8	DINAS PERINDUSTRIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	yang sudah direvitalisasi														DAN PERDAGANGAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	6	6	502.871.000	6	509.282.000	6	521.799.000	6	540.257.000	6	566.135.000	6	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	juta US\$	1393,13	1.420,99	417.029.000	1.449,41	422.346.000	1.478,4	432.727.000	1.507,97	448.033.000	1.538,12	469.495.000	1.538,12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%	70	72	3.218.479.000	74	3.259.516.000	76	3.339.627.000	78	3.457.757.000	80	3.623.388.000	80	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%	22,35	23		25		26		26		26,5		26,5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%	88	88		89		89		90		90		90	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	5	793.454.000	5	803.571.000	5	823.321.000	5	852.444.000	5	893.277.000	5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					6.970.624.000		7.059.501.000		7.233.007.000		7.488.854.000		7.847.579.000		
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	15	20	6.721.298.000	20	6.806.996.000	25	6.974.296.000	25	7.220.992.000	30	7.566.887.000	30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	%	70	72	168.406.000	74	170.553.000	76	174.745.000	78	180.926.000	80	189.592.000	80	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri	unit usaha	39.403	41.373	80.920.000	43.263	81.952.000	45.363	83.966.000	47.673	86.936.000	50.193	91.100.000	50.193	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					388.100.000		393.049.000		402.708.000		416.953.000		436.925.000		
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	%	100	100	40.640.000	100	41.158.000	100	42.169.000	100	43.661.000	100	45.752.000	100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.03	PROGRAM	Indeks Perkembangan	indeks	36,07	38,04	185.774.000	40	188.143.000	42	192.767.000	46	199.585.000	51	209.146.000	51	DINAS TENAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	satuan pemukiman (IPSP)														KERJA DAN TRANSMIGRASI	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Indeks Perkembangan Kawasan transmigrasi (IPK Trans)	Indeks	64,05	68,07	161.686.000	72,08	163.748.000	76,1	167.772.000	77	173.707.000	79	182.027.000	79	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					68.953.456.000		69.832.633.000		71.548.948.000		74.079.799.000		77.628.309.000			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					26.074.382.000		26.406.839.000		27.055.854.000		28.012.882.000		29.354.732.000			
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	100	3.752.962.000	100	3.800.813.000	100	3.894.227.000	100	4.031.975.000	100	4.225.112.000	100	BIRO ORGANISASI	
		Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	100		100		100		100		100		100	BIRO ORGANISASI	
		Penataan Jabatan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100	BIRO ORGANISASI	
		Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	Perangkat Daerah	8	12		16		18		20		22		22	BIRO ORGANISASI	
		Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	Perangkat Daerah	7	8		10		12		14		16		16	BIRO ORGANISASI	
		Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	5	7		9		11		13		15		15	BIRO ORGANISASI	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Dokumen LPPD	dokumen	1	1	3.349.329.000	1	3.392.034.000	1	3.475.402.000	1	3.598.335.000	1	3.770.699.000	1	BIRO PEMERINTAHAN	
		Persentase fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah/Luar Negeri/Pihak ketiga	%	100	100		100		100		100		100		100	100	BIRO PEMERINTAHAN
		Persentase fasilitasi usulan penataan Nagari/desa	%	100	100		100		100		100		100		100	100	BIRO PEMERINTAHAN
		Persentase usulan gubernur tentang penegasan batas daerah	%	75	80		85		90		95		100		100	100	BIRO PEMERINTAHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rekomendasi kebijakan tentang implementasi SPM kepada pengambilan kebijakan	dokumen	1	1		1		1		1		1		1	BIRO PEMERINTAHAN
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	dokumen	6	6	10.013.475.000	6	10.141.150.000	6	10.390.395.000	6	10.757.927.000	6	11.273.244.000	30	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	Lembaga	4	8		12		13		13		13		13	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	%	90	90	2.054.223.000	90	2.080.415.000	90	2.131.547.000	90	2.206.944.000	90	2.312.660.000	90	BIRO HUKUM
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	%	5	5,1	2.525.139.000	5,1	2.557.336.000	5,2	2.620.189.000	5,2	2.712.871.000	5,3	2.842.820.000	5,3	BIRO PEREKONOMIAN
		Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	kebijakan	7	7		7		7		7		7		7	BIRO PEREKONOMIAN
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks Pengadaan Barang dan Jasa minimal Baik	skor	NA	93	1.973.056.000	93	1.998.213.000	97	2.047.324.000	97	2.119.743.000	97	2.221.281.000	97	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD	%	90	91	2.406.198.000	92	2.436.878.000	93	2.496.770.000	94	2.585.087.000	95	2.708.916.000	95	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN	%	90	91		92		93		94		95		95	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Kebijakan administrasi pembangunan yang dihasilkan	Peraturan Gubernur	4	2		1		1		1		1		10	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.02	SEKRETARIAT DPRD					42.879.074.000		43.425.794.000		44.493.094.000		46.066.917.000		48.273.577.000		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi	%	100	100	42.879.074.000	100	43.425.794.000	100	44.493.094.000	100	46.066.917.000	100	48.273.577.000	100	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi	%	100	100		100		100		100		100		100	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang	%	100	100		100		100		100		100		100	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		difasilitasi														
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					1.292.135.708.000		1.308.610.794.000		1.340.773.239.000		1.388.199.463.000		1.454.695.882.000		
5.01	PERENCANAAN					11.876.603.000		12.028.033.000		12.323.654.000		12.759.569.000		13.370.768.000		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	%	NA	85	4.549.391.000		4.607.397.000		4.720.636.000		4.887.615.000		5.121.738.000	95	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	%	50	55	7.327.212.000		7.420.636.000		7.603.018.000		7.871.954.000		8.249.030.000	80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.02	KEUANGAN					1.253.689.064.000		1.269.673.944.000		1.300.879.416.000		1.346.894.504.000		1.411.412.366.000		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausahaan Dan LKPD	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	1.244.409.590.000		1.260.276.153.000		1.291.250.652.000		1.336.925.148.000		1.400.965.466.000	tepat waktu	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi barang milik daerah	persen	90	91	2.327.466.000		2.357.142.000		2.415.074.000		2.500.501.000		2.620.278.000	95	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan PAD	%	3,4	7,2	6.952.008.000		7.040.649.000		7.213.690.000		7.468.855.000		7.826.622.000	7,2	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03	KEPEGAWAIAN					7.353.632.000		7.447.393.000		7.630.431.000		7.900.337.000		8.278.773.000		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai penerapan sistem Merit	Nilai	270	300	7.353.632.000		7.447.393.000		7.630.431.000		7.900.337.000		8.278.773.000	370	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					7.072.106.000		7.162.278.000		7.338.309.000		7.597.882.000		7.961.829.000		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	%	85	86	7.072.106.000		7.162.278.000		7.338.309.000		7.597.882.000		7.961.829.000	90	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi	JP/Tahun	20	20										24	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					8.232.677.000		8.337.646.000		8.542.565.000		8.844.735.000		9.268.409.000		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN	Persentase	%	42,85	50	8.232.677.000		8.337.646.000		8.542.565.000		8.844.735.000		9.268.409.000	62,5	BADAN PENELITIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian														DAN PENGEMBANGAN
		Persentase SKPD yang terinovatif	%	20	30		30		40		40		50		50	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	jumlah	2	10		10		10		12		12		12	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG					3.911.626.000		3.961.500.000		4.058.864.000		4.202.436.000		4.403.737.000		
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan penghubung	%	100	100	3.911.626.000	100	3.961.500.000	100	4.058.864.000	100	4.202.436.000	100	4.403.737.000	100	BADAN PENGHUBUNG
		Persentase promosi daerah yang dilaksanakan	%	100	100		100		100		100		100		100	BADAN PENGHUBUNG
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					10.983.732.000		11.123.778.000		11.397.174.000		11.800.318.000		12.365.567.000		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					10.983.732.000		11.123.778.000		11.397.174.000		11.800.318.000		12.365.567.000		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	75	75	6.023.337.000	78	6.100.136.000	79	6.250.063.000	80	6.471.142.000	80	6.781.117.000	80	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	%	65	70	4.960.395.000	75	5.023.642.000	80	5.147.111.000	85	5.329.176.000	90	5.584.450.000	90	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					4.491.098.000		4.548.360.000		4.660.148.000		4.824.988.000		5.056.112.000		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.491.098.000		4.548.360.000		4.660.148.000		4.824.988.000		5.056.112.000		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	nilai	2,70	2,71	275.064.000	2,72	278.571.000	2,73	285.418.000	2,74	295.514.000	2,75	309.669.000	2,75	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	nilai	3,26	3,27	3.226.861.000	3,28	3.268.004.000	3,29	3.348.324.000	3,30	3.466.762.000	3,31	3.632.824.000	3,31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	%	100	100	79.345.000	100	80.357.000		82.332.000	100	85.244.000	100	89.328.000	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	nilai	3,09	3,10	317.382.000	3,11	321.428.000	3,12	329.328.000	3,13	340.977.000	3,14	357.311.000	3,14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	nilai	3	3,01	592.446.000	3,02	600.000.000	3,03	614.746.000	3,04	636.491.000	3,05	666.980.000	3,05	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X	PENUNJANG URUSAN					3.816.680.384.000		3.865.318.271.000		3.960.318.318.000		4.100.403.854.000		4.296.818.119.000		
X.XX	PENUNJANG URUSAN					3.816.680.384.000		3.865.318.271.000		3.960.318.318.000		4.100.403.854.000		4.296.818.119.000		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	2.475.985.671.000	100	2.507.555.167.000	100	2.569.184.727.000	100	2.660.062.682.000	100	2.787.482.873.000	100	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	61.575.175.000	100	62.360.276.000	100	63.892.938.000	100	66.152.978.000	100	69.321.785.000	100	DINAS KESEHATAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	167.879.516.000	100	170.020.026.000	100	174.198.701.000	100	180.360.509.000	100	188.999.993.000	100	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
		Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	%	42	44		46		48		50		52		52	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase ketercapaian	%	100	100	46.474.754.000	100	47.067.320.000	100	48.224.119.000	100	49.929.917.000	100	52.321.620.000	100	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi														
		Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	%	42	44		46		48		50		52		52	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	133.534.974.000	100	135.237.582.000	100	138.561.390.000	100	143.462.624.000	100	150.334.656.000	100	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
		Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	%	50,50	52		56		58		63		65		65	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	97.622.830.000	100	98.867.548.000	100	101.297.470.000	100	104.880.594.000	100	109.904.500.000	100	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
		Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	%	42	44		46		48		50		52		52	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	43.370.337.000	100	43.923.321.000	100	45.002.848.000	100	46.594.702.000	100	48.826.644.000	100	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	23.412.462.000	100	23.710.977.000	100	24.293.735.000	100	25.153.060.000	100	26.357.922.000	100	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	9.358.078.000	100	9.477.396.000	100	9.710.327.000	100	10.053.803.000	100	10.535.393.000	100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	9.760.576.000	100	9.885.026.000	100	10.127.976.000	100	10.486.225.000	100	10.988.528.000	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	31.273.122.000	100	31.671.862.000	100	32.450.279.000	100	33.598.120.000	100	35.207.510.000	100	DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	26.064.470.000	100	26.396.799.000	100	27.045.567.000	100	28.002.231.000	100	29.343.572.000	100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	10.343.868.000	100	10.475.755.000	100	10.733.223.000	100	11.112.882.000	100	11.645.202.000	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	16.383.816.000	100	16.592.714.000	100	17.000.523.000	100	17.601.870.000	100	18.445.021.000	100	DINAS PANGAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	12.300.623.000	100	12.457.459.000	100	12.763.633.000	100	13.215.112.000	100	13.848.132.000	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	7.808.437.000	100	7.907.997.000	100	8.102.356.000	100	8.388.955.000	100	8.790.796.000	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	9.349.961.000	100	9.469.175.000	100	9.701.905.000	100	10.045.083.000	100	10.526.255.000	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	14.087.454.000	100	14.267.073.000	100	14.617.723.000	100	15.134.785.000	100	15.859.759.000	100	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	7.503.449.000	100	7.599.120.000	100	7.785.888.000	100	8.061.293.000	100	8.447.438.000	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	12.603.796.000	100	12.764.498.000	100	13.078.218.000	100	13.540.824.000	100	14.189.446.000	100	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	9.251.795.000	100	9.369.758.000	100	9.600.043.000	100	9.939.619.000	100	10.415.739.000	100	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	16.335.596.000	100	16.543.879.000	100	16.950.487.000	100	17.550.065.000	100	18.390.734.000	100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	8.213.229.000	100	8.317.950.000	100	8.522.385.000	100	8.823.841.000	100	9.246.513.000	100	DINAS KEBUDAYAAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	13.645.446.000	100	13.819.429.000	100	14.159.076.000	100	14.659.915.000	100	15.362.143.000	100	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	27.228.914.000	100	27.576.090.000	100	28.253.843.000	100	29.253.246.000	100	30.654.511.000	100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	11.452.663.000	100	11.598.688.000	100	11.883.755.000	100	12.304.111.000	100	12.893.493.000	100	DINAS PARIWISATA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	61.637.521.000	100	62.423.417.000	100	63.957.631.000	100	66.219.959.000	100	69.391.975.000	100	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	24.459.019.000	100	24.770.878.000	100	25.379.686.000	100	26.277.424.000	100	27.536.144.000	100	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	58.422.508.000	100	59.167.411.000	100	60.621.601.000	100	62.765.926.000	100	65.772.490.000	100	DINAS KEHUTANAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	12.853.018.000	100	12.991.061.000	100	13.310.350.000	100	13.781.167.000	100	14.441.302.000	100	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		provinsi														
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	17.556.575.000	100	17.780.426.000	100	18.217.425.000	100	18.861.818.000	100	19.765.321.000	100	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	22.807.865.000	100	23.098.672.000	100	23.666.381.000	100	24.503.515.000	100	25.677.263.000	100	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	13.942.611.000	100	14.120.383.000	100	14.467.428.000	100	14.979.174.000	100	15.696.694.000	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	14.659.247.000	100	14.846.156.000	100	15.211.038.000	100	15.749.087.000	100	16.503.487.000	100	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	11.700.294.000	100	11.849.476.000	100	12.140.707.000	100	12.570.151.000	100	13.172.277.000	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	14.989.147.000	100	15.180.263.000	100	15.553.356.000	100	16.103.514.000	100	16.874.892.000	100	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	7.844.834.000	100	7.944.858.000	100	8.140.123.000	100	8.428.058.000	100	8.831.772.000	100	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	11.619.253.000	100	11.767.402.000	100	12.056.616.000	100	12.483.086.000	100	13.081.041.000	100	BADAN PENGHUBUNG
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	1.798.496.000	100	1.821.428.000	100	1.866.194.000	100	1.932.205.000	100	2.024.760.000	100	BIRO PEMERINTAHAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Indeks kepuasan stakeholder terhadap	Nilai	76,65	78,85	10.610.167.000	80,15	10.745.450.000	82,35	11.009.547.000	84,55	11.398.979.000	86,75	11.945.004.000	86,75	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	layanan keprotokolan														
		Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan administrasi kepegawaian	Nilai	76,65	78,85		80,15		82,35		84,55		86,75		86,75	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	%	80	80		80		80		80		80		80	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	1.143.418.000	100	1.157.997.000	100	1.186.458.000	100	1.228.426.000	100	1.287.269.000	100	BIRO HUKUM
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	569.861.000	100	577.127.000	100	591.311.000	100	612.227.000	100	641.554.000	100	BIRO PEREKONOMIAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	649.736.000	100	658.021.000	100	674.193.000	100	698.041.000	100	731.478.000	100	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	1.073.707.000	100	1.087.397.000	100	1.114.123.000	100	1.153.532.000	100	1.208.787.000	100	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	782.580.000	100	792.558.000	100	812.037.000	100	840.760.000	100	881.034.000	100	BIRO ORGANISASI
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	61.114.211.000	100	61.893.434.000	100	63.414.623.000	100	65.657.743.000	100	68.802.828.000	100	BIRO UMUM
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	1.248.410.000	100	1.264.328.000	100	1.295.402.000	100	1.341.223.000	100	1.405.469.000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase ketercapaian penunjang urusan	%	100	100	68.899.891.000	100	69.778.383.000	100	71.493.365.000	100	74.022.249.000	100	77.568.004.000	100	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DAERAH PROVINSI	pemerintahan daerah provinsi														
		Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi	%	100	100		100		100		100		100		100	100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	7.183.767.000	100	7.275.362.000	100	7.454.172.000	100	7.717.843.000	100	8.087.537.000	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	8.211.695.000	100	8.316.396.000	100	8.520.793.000	100	8.822.193.000	100	9.244.786.000	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	78.081.541.000	100	79.077.102.000	100	81.020.623.000	100	83.886.508.000	100	87.904.773.000	100	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan umum menggambarkan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Kebijakan umum pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
2. Peningkatan peran semua stakeholders (pemangku kepentingan) termasuk masyarakat rantau dalam pengelolaan pembangunan daerah dengan mengembangkan pengelolaan pembangunan yang bersifat partisipatif, sinergis, transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga memiliki etos kerja, disiplin, santun dan berintegritas, serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi perubahan tatanan ekonomi yang semakin terbuka sesuai dengan perkembangan regional, nasional dan global.
5. Pengembangan sektor-sektor unggulan dalam percepatan dan peningkatan ekonomi seperti pariwisata, pertanian dengan sistem agribisnis, industri, kemaritiman dan kelautan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
6. Pemanfaatan potensi sumber energi dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
7. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan program prioritas (*money follow programme*).
8. Peningkatan pendapatan daerah.

7.2. PENYELARASAN RPJMN TAHUN 2020-2024 DENGAN RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

Untuk mencapai keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah, maka dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Untuk itu dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 10 (sepuluh) prioritas, telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan. Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Prioritas pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat secara nasional, selaras dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, mental dan karakter. Sedangkan untuk perumahan dan pemukiman selaras dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat pada prioritas pembangunan infrastruktur.

Prioritas pada dimensi pembangunan sektor unggulan nasional, juga selaras dan menjadi prioritas pembangunan daerah karena merupakan potensi unggulan daerah yang diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi yang terkait dengan kedaulatan pangan, pengembangan energi, pengembangan kemaritiman dan kelautan, serta pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi.

Prioritas pada dimensi pemerataan dan kewilayahan yang terkait dengan pembangunan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah secara nasional, selaras dengan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengentaskan daerah tertinggal, pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran. Selanjutnya keselarasan antara prioritas berdasarkan dimensi pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.5
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Pembangunan Nasional Berdasarkan 3 Dimensi Pembangunan	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
1.	Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat a. Pendidikan b. Kesehatan c. Perumahan d. Mental dan Karakter e. Peningkatan Kualitas Kependudukan	a. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS SBK dalam kehidupan masyarakat d. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
2.	Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan a. Kedaulatan Pangan b. Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan c. Kemaritiman dan Kelautan d. Pariwisata dan Industri	a. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis b. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur c. Pengembangan kemaritiman dan kelautan d. Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi e. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam
3	Dimensi pemerataan dan kewilayahan a. Antar kelompok Pendapatan b. Antar wilayah: (Desa, Pinggiran, Luar Jawa, Kawasan Timur)	Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal

Indikasi rencana program prioritas merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh dan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah langsung dalam pencapaian Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan indikator kinerja tersebut dikelompokkan ke dalam 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Sedangkan untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan : Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Arsip. Terkait dengan urusan pilihan adalah urusan

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yaitu Urusan : Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama dengan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan untuk mencapai target tersebut. Pada target kinerja diperkirakan output dan outcome yang akan dihasilkan dari masing-masing program. Penulisan outcome selain output pada indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada Perangkat Daerah dalam merumuskan kegiatan-kegiatan pada setiap program prioritas pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sedangkan pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target tersebut serta Perangkat Daerah penanggung jawab.

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2024 meskipun periodeisasi RPJMD Tahap IV dari RPJPD 2005-2025 adalah Tahun 2021-2026.

8.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO

Indikator Makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial di Sumatera Barat yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, PDRB ADHK2 Per Kapita, PDRB (ADHB) per kapita, Indeks Gini, Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), Tingkat Kemiskinan, Penduduk Miskin, Tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan untuk menggerakkan pembangunan didaerah namun demikian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga diiringi dengan peningkatan Indeks Membangunan Manusia, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka serta penurunan Tingkat Kemiskinan. adapapun proyeksi indikator kinerja makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1

Indikator Kinerja Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Makro	Sumber Data	Kondisi kinerja awal RPJMD (2021)	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Data diolah	3,44	3,40	4,57	4,60	4,70	4,84	4,84
2	PDRB ADHK2 Per Kapita (Rp. Juta)	Data diolah	31,45	32,00	32,97	34,09	35,29	36,58	36,58
3	PDRB (ADHB) per kapita (Rp. Juta)	Data diolah	46,09	48,29	50,60	53,69	56,13	59,30	59,30
4	Indeks Gini (Ratio)	Data diolah	0,299	0,298	0,296	0,293	0,289	0,284	0,284
5	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Data diolah	0,311	0,310	0,309	0,308	0,307	0,306	0,306
6	Tingkat Kemiskinan (%)	Data diolah	6,40	6,28	6,16	6,03	5,90	5,77	5,77
7	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Data diolah	358,76	356,45	353,68	350,62	347,27	343,62	343,62
8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	Data diolah	6,70	6,60	6,45	6,31	6,13	5,94	5,94
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Data diolah	72,56	72,74	73,23	73,70	74,16	74,60	74,60
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	Data diolah	69,62	69,80	69,98	70,17	70,35	70,53	70,53
	b. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Data diolah	14,04	14,05	14,06	14,08	14,09	14,10	14,10
	c. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Data diolah	9,09	9,18	9,28	9,38	9,47	9,57	9,57
	d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	Data diolah	10.865	10.916	11.108	11.342	11.592	11.863	11.863

8.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah

ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No	INDIKATOR	TARGET					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing							
1	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	72,56	72,74	73,23	73,70	74,16	74,60
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,62	69,80	69,98	70,17	70,35	70,53
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	21,45	18,44	15,43	14,00	12,50	10,60
4	Rata-rata lama sekolah	9,09	9,18	9,28	9,38	9,47	9,57
5	Harapan Lama Sekolah	14,04	14,05	14,06	14,08	14,09	14,10
6	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas	49,60	49,70	49,75	49,80	49,85	49,90
Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah							
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,30	59,10	60,90	62,70	63,10	64,50
2	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	62,78	62,80	62,80	62,80	62,90	62,90
3	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	11,05	13	14	15	16	17
4	Indeks Pembangunan keluarga	51,74	59,30	61,38	63,46	65,54	67,62
5	Indek Pembangunan Gender (IPG)	94,09	94,11	94,25	94,60	95,00	95,08
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,09	59,12	60,01	61,20	61,75	62,42
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25
Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan							
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani (%)	5	5	5	5	5	5
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,79	100,99	101,19	101,40	101,60	101,80
3	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	102,95	103,47	103,98	104,50	105,03	105,55
4	Pendapatan pembudidaya ikan (Rp. Jt)	45.800	47.175	48.590	50.048	51.549	53.096
5	Pendapatan nelayan (Rp. Jt)	39.995	40.795	41.611	42.443	43.292	44.158
6	Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	45.592	47.872	50.265	52.779	55.418	58.199
7	Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	5	5	5	5	5	5
8	Indeks Ketahanan Pangan	78,64	79,13	80,21	81,60	82,05	83,22
9	Peningkatan Pendapatan Petani Hutan (%)	5	5	5	5	5	5
Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industrikecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital							
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	15,85	16,25	16,70	17,35	17,65	18,15
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	8,62	8,75	8,88	9,02	9,15	9,29
3	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	-1,14	-1,10	-1,00	1,00	1,01	1,02
4	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	358	368	379	390	401	413
5	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	1,94	2,14	2,18	2,23	2,28	2,33
6	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	1,7	2,4	3,1	3,8	4,5	5,2
7	Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	97.633	112.594	130.482	150.658	173.711	197.703
8	Persentase peningkatan Investasi di provinsi (%)	6,00	6,00	8,00	9,50	10,50	11,50
9	Kontribusi Ekonomi Digital (%)	6,44	6,54	6,70	7,10	7,25	7,65
Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan							
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11,24	12,62	13,89	15,25	16,85	17,37
2	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	1,24	1,24	1,24	1,25	1,26	1,27
3	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB (%)	6,02	6,02	6,02	6,10	6,18	6,26

No	INDIKATOR	TARGET					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan							
1	Indeks Kinerja Infrastruktur	0,689	0,702	0,731	0,756	0,786	0,805
2	Rasio Konektivitas (Rasio)	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695
3	Kemantapan Jalan (%)	73,92	75,00	77,00	79,00	81,00	82,00
4	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	76,94	77,43	77,95	78,41	78,81	79,25
6	Akses Air Minum (%)	80,04	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
7	Akses Sanitasi Layak (%)	81,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
8	Persentase Bangunan Strategis Terbangun (%)	38,05	40,22	55,55	66,67	83,33	100
9	Peresentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	68,80	70,36	71,92	73,48	75,04	76,60
10	Persentase Volume tampungan sumber-sumber air (%)	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78
11	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,55
12	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW (%)	84,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas							
1	Indeks reformasi birokrasi	67,50	68,50	69,50	70,50	71,00	71,87
2	Nilai SAKIP (predikat)	BB (76,50)	BB (77,00)	BB (78,00)	BB (78,50)	BB (79,00)	A (80,01)
3	Nilai EPPD (skor)	3,0000	3,0010	3,0020	3,0030	3,0040	3,0050
4	Opini laporan keuangan (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	35,47	37,84	38,25	39,56	40,75	41,00
6	Indeks SPBE (indeks)	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60
7	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	71,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00
8	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	84	85	86	87	88	89

8.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
I.	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.	Urusan Pendidikan								
	a. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (%)	Disdik	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72	73,72
	b. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (%)	Disdik	52,87	53,80	54,72	55,65	56,57	57,50	57,50
	c. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Disdik	N/A	58,2	58,51	58,82	59,13	59,45	59,45
	d. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Disdik	N/A	27,4	27,70	28,01	28,32	28,63	28,63
	e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat (%)	Disdik	91,70	93,22	94,70	96,20	97,70	99,20	99,20
	f. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA (%)	Disdik	50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	58,38
	g. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK (%)	Disdik	31,27	32,77	34,27	35,77	37,27	38,77	38,77
	h. Persentase SMA Negeri terakreditasi (%)	Disdik	85,45	87,46	89,47	91,48	93,49	95,50	95,50
	i. Persentase SMK Negeri terakreditasi (%)	Disdik	83,33	85,02	86,70	88,38	90,07	91,75	91,75
	j. Persentase SLB Negeri terakreditasi (%)	Disdik	51,72	53,38	55,03	56,69	58,34	60,00	60,00
2.	Urusan Kesehatan								
	a. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (RSAM, RS M.Natsir, RSUD Pariaman, RSJ HB Sa'anin Padang)	Dinas Kesehatan	1:875	1:875	1:875	1:875	1:875	1:875	1:875
	b. Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi (%)	Dinas Kesehatan, RSAM, RS,M. Natsir, RSJ HB Sa'anin Padang, RSUD Solok	100	100	100	100	100	100	100
	c. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
	d. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
	e. Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	Dinas Kesehatan	97,4	97,8	98,2	98,5	98,9	100	100
	f. Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes	Dinas Kesehatan	77,3	78,5	80	82	84	86	86

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
	(%)								
	g. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	Dinas Kesehatan	14,5	13	11,5	10	8,5	7	7
	h. Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	Dinas Kesehatan	83	86	89	92	95	100	100
	i. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	Dinas Kesehatan	70	75	80	85	90	95	95
	j. Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	Dinas Kesehatan	82,48	86,1	88,2	90,3	92,4	95	95
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	a. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)	Dinas SDA dan Bina Konstruksi	6,015	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	3,45
	b. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai kewenangan provinsi (%)	Dinas SDA dan Bina Konstruksi	0,81	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	3,32
	c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	Dinas SDA dan Bina Konstruksi	48,95	4,03	0,19	0,79	0,75	0,89	6,65
	d. Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%)	Dinas SDA dan Bina Konstruksi	5,56	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	55,55
	e. Persentase volume tampungan sumber-sumber air	Dinas SDA dan Bina Konstruksi	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	59,78
	f. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota (%)	Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang	100	100	100	100	100	100	100
	g. Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang	100	100	100	100	100	100	100
	h. Rasio kemantapan jalan provinsi	Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang	73,92	75	77	79	81	82	82
	i. Akses Air Minum Layak (%)	Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang	80,04	82	84	86	88	90	90
	j. Akses Sanitasi Layak (%)	Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang	80,04	82	84	86	88	90	90
	k. Persentase penataan bangunan pada Kawasan strategis (%)	Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang	NA	20	40	60	80	100	100
	l. Persentase kesesuaian rencana pembangunan	Dinas Bina Marga Cipta	84	86	87	88	89	90	90

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
	dengan RTRW (%)	Karya Tata Ruang							
4.	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	a. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	Dinas Perkimtan	100	100	100	100	100	100	100
	b. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	Dinas Perkimtan	100	100	100	100	100	100	100
	c. Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani (%)	Dinas Perkimtan	2,02	7,09	14,18	21,27	28,35	35,44	35,44
	d. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	Dinas Perkimtan	2	4	6	8	10	12	12
	e. Persentase Peningkatan PSU Permukiman (%)	Dinas Perkimtan	8,71	17,26	34,51	51,77	69,03	86,28	86,28
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
	a. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	Satpol PP	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	85,00
	b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	Satpol PP	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	85,00
	c. Indeks Penegakan Peraturan Daerah	Satpol PP	74	76	78	80	82	84	84
	d. Persentase Kabupaten/Kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (%)	Satpol PP	84,21	84,21	84,21	89,47	89,47	89,47	89,47
	e. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap (%)	Satpol PP	50	53	56	59	62	65	65
	f. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	BPBD	6,2	25	43,7	62,5	87,5	100	100
	g. Persentase penanganan pra bencana (%)	BPBD	100	100	100	100	100	100	100
	h. Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	BPBD	100	100	100	100	100	100	100
6.	Urusan Sosial								
	a. Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	Dinas Sosial	100	100	100	100	100	100	100
	b. Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	Dinas Sosial	100	100	100	100	100	100	100
	c. Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	Dinas Sosial	100	100	100	100	100	100	100
	d. Persentase Korban bencana alam dan sosial yang	Dinas Sosial	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
	terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)								
	e. Indeks Partisipasi Sosial (indeks)	Dinas Sosial	NA	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687
II.	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
7.	Urusan Ketenagakerjaan								
	a. Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja. (%)	Dinas Nakertrans	100	100	100	100	100	100	100
	b. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	Dinas Nakertrans	28,62	31,04	35,72	36,04	36,34	36,68	36,68
	c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans	1,20	4,91	8,55	8,57	8,60	8,62	8,62
	d. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Nakertrans	37,61	41,95	46,29	50,63	59,31	61,92	61,92
	e. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	Dinas Nakertrans	31,77	35,52	36,10	36,50	36,99	37,97	37,97
	f. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Dinas Nakertrans	8,14	12,36	16,58	20,80	25,01	29,23	29,23
	g. Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan (%)	Dinas Nakertrans	45,76	54,31	62,87	71,42	84,32	91,14	91,14
	h. Persentase Serapan tenaga Kerja	Dinas Nakertrans	31,77	35,52	36,01	36,50	36,99	37,97	37,97
8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	a. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	Dinas P3AP2KB	4,00	4,15	4,30	4,45	4,60	4,75	4,75
	b. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100.000 penduduk perempuan)	Dinas P3AP2KB	17	16	15	14	13	12	12
	c. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (rasio)	Dinas P3AP2KB	2,16	2,12	2,08	2,04	2,00	1,96	1,96
	d. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	Dinas P3AP2KB	17	17	18	18	19	19	19
	e. Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat)	Dinas P3AP2KB	Utama	Utama	Utama	Utama	Mentor	Mentor	Mentor
	f. Persentase perempuan di legislative (%)	Dinas P3AP2KB	10,76	10,76	10,76	12,30	12,30	12,30	12,30
	g. Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	Dinas P3AP2KB	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	15,09

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
	h. Persentase Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	Dinas P3AP2KB	37,60	37,65	37,70	37,75	37,80	37,85	37,85
	i. Indeks pemenuhan hak anak	Dinas P3AP2KB	64,73	66,03	67,53	69,13	70,83	72,63	72,63
	j. Jumlah kasus perceraian baru	Dinas P3AP2KB	6.325	6.225	6.125	6.025	5.925	5.825	5.825
9.	Urusan Pangan								
	a. Persentase cadangan pangan (%)	Dinas Pangan	86	92	94	96	98	100	100
	b. Ketersediaan pangan utama (ton)	Dinas Pangan	820.798	833.110	845.607	858.291	871.165	884.233	884.233
	c. Skor Pola Pangan Harapan (skor)	Dinas Pangan	82	82,5	83	84	84,5	85	85
	d. Persentase Keamanan pangan yang beredar di masyarakat (%)	Dinas Pangan	82	83	83,5	84	84,5	85	85
	e. Coevisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV)								
	- Beras	Dinas Pangan	CV ≤10	CV ≤10	CV ≤10	CV ≤10	CV ≤10	CV ≤10	CV ≤10
	- Cabe Merah	Dinas Pangan	CV ≤25	CV ≤25	CV ≤25	CV ≤25	CV ≤25	CV ≤25	CV ≤25
	- Bawang Merah	Dinas Pangan	CV ≤25	CV ≤25	CV ≤25	CV ≤25	CV ≤25	CV ≤25	CV ≤25
10.	Urusan Pertanahan								
	a. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	Dinas Perkimtan	N.A	1	2	3	4	5	5
	b. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)	Dinas Perkimtan	100	100	100	100	100	100	100
	c. Persentase lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota yang tersedia (%)	Dinas Perkimtan	N.A	1	2	3	4	5	5
	d. Persentase permasalahan pertanahan yang difasilitasi (%)	Dinas Perkimtan	100	100	100	100	100	100	100
11.	Urusan Lingkungan Hidup								
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Dinas LH	76,94	77,43	77,95	78,41	78,81	79,25	79,25
	b. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)	Dinas LH	75	76	77	78	79	80	80
	c. Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	Dinas LH	55	60	65	70	75	80	80
	- Persentase pengurangan sampah (%)	Dinas LH	15	17	19	21	23	25	25
	- Persentase penanganan sampah (%)	Dinas LH	54	56	58	60	62	64	64
	- Jumlah LB3 yang dikelola (ton/tahun)	Dinas LH	237.536	261.290	287.419	316.160	347.776	382.554	382.554

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
	d. Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan pengkapan lingkungan (%)	Dinas LH	75	77	82	93	96	99	99
	e. Persentase penurunan beban pencemaran (%)	Dinas LH	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	f. Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan (%)	Dinas LH	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
12.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
	a. Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	Dinas Dukcapil	3	3	3	3	3	3	3
	b. Pemanfaatan data kependudukan (%)	Dinas Dukcapil	50	100	100	100	100	100	100
	c. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (%)	Dinas Dukcapil	100	100	100	100	100	100	100
13.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	a. Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	Dinas PMD	43,47	8,6	10,43	13,04	14,78	9,5	99,82
	b. Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	Dinas PMD	0,60	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	10,7
	c. Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju	Dinas PMD	41	51	61	71	81	91	91
	d. Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	Dinas PMD	381	410	450	500	550	600	600
	e. Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif	Dinas PMD							
	- Kerapatan Adat Nagari (KAN)	Dinas PMD	299	350	400	450	500	544	544
	- Posyandu Mandiri	Dinas PMD	2.319	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	- LPM mandiri	Dinas PMD	NA	7	15	25	37	50	50
	- Dasa Wisma Mandiri	Dinas PMD	10.800	11.300	11.800	12.300	12.800	13.300	13.300
14.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	a. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) (indeks)	Dinas P3AP2KB	2,73	2,70	2,67	2,64	2,61	2,58	2,58
	b. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	Dinas P3AP2KB	62,18	62,58	63,00	63,41	63,92	64,32	64,32
	c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Dinas P3AP2KB	13,00	12,44	11,22	10,66	10,00	9,34	9,34
	d. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	Dinas P3AP2KB	19,60	19,10	18,60	18,10	17,60	17,10	17,10
	e. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Dinas P3AP2KB	21,60	21,80	22,00	22,20	22,40	22,60	22,60
15.	Urusan Perhubungan								
	a. Rasio konektivitas Provinsi	Dinas Perhubungan	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695	0,695

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
	b. Kinerja lalu lintas provinsi	Dinas Perhubungan	0,54	0,52	0,50	0,48	0,47	0,45	0,45
	c. Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	Dinas Perhubungan	18.000.000	19.000.000	20.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	24.000.000
16.	Urusan Komunikasi dan Informatika								
	a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	Diskominfo	100	100	100	100	100	100	100
	b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%) (75 UKPP)	Diskominfo	50	55	60	65	70	75	75
	c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	Diskominfo	NA	10	20	30	40	50	50
	d. Indeks domain kebijakan internal SPBE	Diskominfo	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5
	e. Indeks domain Tata Kelola SPBE	Diskominfo	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5
	f. Indeks domain Manajemen SPBE	Diskominfo	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5
	g. Indeks domain Layanan SPBE	Diskominfo	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5
17.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
	a. Persentase Koperasi yang berkualitas	Dinas Koperasi dan UKM	16,43	17,94	20,49	24,39	29,21	35,01	35,01
	b. Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Dinas Koperasi dan UKM	1,90	2	3	3,7	4,2	5	5
18.	Urusan Penanaman Modal								
	Persentase peningkatan investasi di provinsi (%)	DPMPSTP	6,00	6,00	8,00	9,50	10,50	11,50	11,50
19.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga								
	a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,0518	0,078	0,104	0,130	0,156	0,182	0,182
	b. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	Dinas Pemuda dan Olahraga	4,70	4,93	5,16	5,39	5,62	5,85	5,85
	c. Peningkatan prestasi olahraga (medali)	Dinas Pemuda dan Olahraga	27	26	26	41	29	29	29
20.	Urusan Statistik								
	a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	Diskominfo	50	60	70	80	90	100	100
	b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	Diskominfo	50	60	70	80	90	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
21.	Urusan Persandian								
	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	Diskominfotik	44	45	47	50	55	60	60
22.	Urusan Kebudayaan								
	a. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	Dinas Kebudayaan	100	100	100	100	100	100	100
	b. Persentase warisan budaya takbenda yang dilestarikan (%)	Dinas Kebudayaan	80,5	81	86	86,4	86,7	87,0	87,0
23.	Urusan Perpustakaan								
	a. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (nilai)	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	58.05	63.30	64.30	65.30	66.30	67.30	67,30
	b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	11.05	13	14	15	16	17	17
24.	Urusan Kearsipan								
	a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	71	71.50	72	72.50	73	73.50	73.50
	b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66
III.	URUSAN PILIHAN								
25.	Urusan Kelautan dan Perikanan								
	a. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Prov. (sumber data: one data KKP)	DKP	467.082	477.362	487.949	499.311	512.013	525.307	525.307
	b. Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	DKP	80	82	84	86	90	92	92
26.	Urusan Pariwisata								
	a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	Dinas Pariwisata	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	8,5
	b. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	Dinas Pariwisata	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	9
	c. Tingkat hunian akomodasi (%)	Dinas Pariwisata	25,87	30,80	40,32	50,30	55,25	58,67	58,67

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
27.	Urusan Pertanian								
	a. Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	8,42	8,39	8,77	9,12	9,48	9,68	9,68
	b. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan (%)	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	2,5	2,6	2,75	2,8	2,9	2,95	2,95
	c. Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura (%)	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	d. Persentase peningkatan produksi tanaman Perkebunan (%)	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	1	1	1	1	1	1
	e. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	Dinas Peternakan dan Keswan	0,1	3,41	4,71	4,94	5,19	5,48	5,48
	f. Persentase peningkatan produksi peternakan (%)	Dinas Peternakan	1,35	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68	1,68
28.	Urusan Kehutanan								
	a. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	Dishut	20	20	20	20	20	20	20
	b. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	Dishut	0,79	1,29	1,79	2,29	2,79	3,29	3,29
	c. Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	Dishut	1,90	2,85	3,81	4,76	5,71	6,66	6,66
	d. Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	Dishut	20	40	60	80	100	120	120
	e. Indeks tutupan hutan (Indeks)	Dishut	61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26	59,26
29.	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral								
	a. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda (%)	Dinas ESDM	NA	NA	45	60	75	90	90
	b. Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	Dinas ESDM	99,91	100	100	100	100	100	100
	c. Rasio Elektrifikasi	Dinas ESDM	99,30	99,50	99,60	99,70	99,80	99,90	99,90
	d. Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	Dinas ESDM	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8	51,8
	e. Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%)	Dinas ESDM	NA	37,3	55	67	83	100	100
30.	Urusan Perdagangan								
	a. Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp. Juta)	Dinas Perindag	1393,13	1420,99	1449,41	1478,40	1507,97	1538,12	1538,12
	b. Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	Dinas Perindag	88	88	89	89	90	90	90
	c. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	Dinas Perindag	22,35	23	25	26	26	26,5	26,5
	d. Tertib Usaha	Dinas Perindag	60	63	64	67	68	70	70
	e. Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	Dinas Perindag	28	28	27,5	27,5	27	27	27

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
	f. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	Dinas Perindag	70	72	74	76	78	80	80
	g. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	Dinas Perindag	6	6	6	6	6	6	6
	h. Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp. Triliun)	BPS	39,30	41,27	44,16	48,57	53,43	58,78	58,78
31.	Urusan Perindustrian								
	a. Persentase pertambahan jumlah industri besar di provinsi (%)	Dinas Perindag	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	b. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (%)	Dinas Perindag	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	c. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	Dinas Perindag	59	82	84	86	88	90	90
	d. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	Dinas Perindag	90	90	92	92	94	94	94
	e. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	Dinas Perindag	90	90	90	90	90	90	90
	f. Persentase informasi industri yang tersedia secara lengkap dan terkini (%)	Dinas Perindag	90	90	90	90	90	90	90
	g. Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp. Triliun)	Dinas Perindag	15,4	15,7	16	16,3	16,7	17	17
	h. Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	Dinas Perindag	39.403	41.373	43.263	45.363	47.673	50.193	50.193
32.	Urusan Transmigrasi								
	a. Indeks perkembangan satuan permukiman transmigrasi	Dinas Nakertrans	36,70	38,08	40,00	42,00	46,00	51,00	51,00
	b. Indeks perkembangan kawasan transmigrasi	Dinas Nakertrans	64,05	68,07	72,08	76,10	77,00	79,00	79,00
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
33.	Unsur Sekretariat Daerah								
	a. IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH / WKDH (nilai)	Biro Umum	88,31	88,50	88,70	88,90	90,20	90,40	90,40
	b. IKM Pelayanan Pimpinan (nilai)	Biro Umum	88,31	88,50	88,70	88,90	90,20	90,40	90,40
	c. IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah (nilai)	Biro Umum	88,31	88,50	88,70	88,90	90,20	90,40	90,40
	d. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan (nilai)	Biro Administrasi Pimpinan	76,65	78,85	80,15	82,35	84,55	86,75	86,75
	e. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian (nilai)	Biro Administrasi Pimpinan	76,65	78,85	80,15	82,35	84,55	86,75	86,75
	f. Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (%)	Biro Administrasi Pimpinan	80	80	80	80	80	80	80
	g. Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel (%)	Biro Pemerintahan dan Otda	100	80	85	90	95	100	100
	h. Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama (%)	Biro Pemerintahan dan Otda	100	100	100	100	100	100	100
	i. Persentase Kabupaten/Kota yang tertib administrasi kewilayahannya (%)	Biro Pemerintahan dan Otda	75	80	85	90	95	100	100
	j. Persentase usulan Nagari/Desa/Kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya (%)	Biro Pemerintahan dan Otda	100	100	100	100	100	100	100
	k. Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi (%)	Biro Pemerintahan dan Otda	100	100	100	100	100	100	100
	l. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (tender dini dan tahun jamak) (%)	Biro PBJ	NA	1,02	2,04	3,06	4,08	5,1	5,1
	m. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	Biro PBJ	15,32	14	14,16	14,20	14,20	41	41
	n. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (belanja pengadaan dibagi dengan paket melalui penyedia pada RUP) (%)	Biro PBJ	NA	15	30	50	60	75	75
	o. Indeks pengadaan barang dan jasa minimal baik (skor)	Biro PBJ	91	93	93	97	97	97	97
	p. Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan (dokumen)	Biro Perekonomian	7	7	7	7	7	7	7
	q. Persentase Kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh pemprov (%)	Biro Perekonomian	90	91	92	93	94	95	95
	r. Persentase Kebijakan perekonomian pusat dan pemprov yang diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten/kota (%)	Biro Perekonomian	90	91	92	93	94	95	95
	s. Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang aktif (Lembaga)	Biro Kesra	2	2	3	4	4	4	4
	t. Indeks kepuasan layanan embarkasi haji	Biro Kesra	B	B	B	B	B	B	B

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
	u. Peringkat dalam event keagamaan nasional	Biro Kesra	1	1	1	1	1	1	1
	v. Jumlah Kebijakan daerah pada pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang dirumuskan (dokumen)	Biro Kesra	6	6	6	6	6	6	30
	w. Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan (%)	Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	100
	x. Persentase penanganan perkara yang diselesaikan (%)	Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	100
	y. Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	100
	z. Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	Biro Organisasi	100	100	100	100	100	100	100
	aa. Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	Biro Organisasi	100	100	100	100	100	100	100
	bb. Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah)	Biro Organisasi	7	8	10	12	14	16	16
	cc. Nilai Komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah (Nilai)	Biro Organisasi	11,7	12,5	12,7	12,9	13,1	13,3	13,3
	dd. Hasil penilaian mandiri area manajemen perubahan (nilai)	Biro Organisasi	1,71	1,78	1,85	1,89	1,93	2	2
	ee. Jumlah Inovasi pelayanan Publik yang lolos seleksi saringan kompetisi secara nasional (inovasi)	Biro Organisasi	5	7	9	11	13	15	15
	ff. Jumlah Perangkat daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan (Perangkat Daerah)	Biro Organisasi	8	12	16	18	20	22	22
	gg. Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan (%)	Biro Administrasi Pembangunan	90	91	92	93	94	95	95
34	Unsur Sekretariat DPRD								
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	Set DPRD	90	90	90	90	90	90	90
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
35	Unsur Perencanaan								
	Indeks kualitas perencanaan	Bappeda	70	73	77	81	85	89	89
36	Unsur Keuangan								
	a. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	BPKAD	8,59	8,51	8,43	8,35	8,27	8,19	8,19

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
	b. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	BPKAD	5	4,6	4,2	3,8	3,6	3	3
	c. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	BPKAD	3,6	3,58	3,56	3,55	3,54	3,53	3,53
	d. Manajemen Aset	BPKAD	100	100	100	100	100	100	100
	e. Rasio anggaran SiLPA terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	BPKAD	3,68	3,64	3,61	3,57	3,53	3,50	3,50
	f. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	BPKAD	100	100	100	100	100	100	100
	g. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	BPKAD	86,53	87,01	87,05	87,24	87,55	88,61	88,61
	h. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	BPKAD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	i. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (%)	BPKAD	100	100	100	100	100	100	100
	j. Rasio PAD terhadap PDRB (%)	Bapenda	1,81	1,83	1,85	1,85	1,88	1,89	1,89
	k. Persentase Peningkatan PAD (%)	Bapenda	3,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
37	Unsur Kepegawaian								
	a. Rasio PNS berpendidikan Perguruan Tinggi dibanding Pendidikan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	BKD	200	202	204	206	208	210	210
	b. Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	BKD	12	40	50	60	70	75	75
	c. Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	BKD	62	64	66	68	70	72	72
	d. Nilai penerapan sistem merit	BKD	270	300	325	340	350	370	370
38	Unsur Pendidikan dan Pelatihan								
	a. Persentase ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran per tahun	BPSDM	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,0
	b. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal memuaskan	BPSDM	84	85	86	87	88	89	89
	c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BPSDM	80	81	82	83	84	85	85
39	Unsur Penelitian dan Pengembangan								
	a. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan pengkajian (%)	Balitbang	42,85	50	50	62,5	62,5	62,5	62,5
	b. Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah produk)	Balitbang	2	10	10	10	12	12	12

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
	c. Persentase SKPD yang terinovatif (%)	Balitbang	20	30	30	40	40	50	50
40	Unsur Penghubung								
	a. Persentase koordinasi dengan baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain (%)	Badan Penghubung	100	100	100	100	100	100	100
	b. Promosi potensi daerah Sumatera Barat dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan baik (bidang urusan)	Badan Penghubung	5	5	5	5	5	5	5
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
41	Inspektorat Daerah								
	a. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	Inspektorat	3	3	3	4	4	4	4
	b. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Inspektorat	3	3	3	3	4	4	4
VII	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
42	Kesatuan Bangsa dan Politik								
	a. Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus)	Badan Kesbangpol	4	3	3	2	2	2	2
	b. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	Badan Kesbangpol	67,69	68,01	68,50	68,75	69,25	70	70


BAB IX

PENUTUP

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran tahapan keempat RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 untuk terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan, serta menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan bagi kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Sumatera Barat.

Perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini dapat diwujudkan dengan baik dengan didukung komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan peran serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dalam rangka menjamin pelaksanaan RPJMD diperlukan penjabaran secara teknis dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan dengan periodisasi yang bersamaan dengan RPJMD 2021-2026. Adapun pelaksanaan tahunan dilakukan 5 (lima) tahapan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) secara sinergis dan berkesinambungan.

 GUBERNUR SUMATERA BARAT
MAHYELDI

PENYELARASAN TARGET INDIKATOR MAKRO NASIONAL DAN PROVINSI SUMATERA BARAT

[illegible]

Lampiran 2

Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Dan Kabupaten/Kota Terhadap Program Prioritas Nasional

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan														
		Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (Persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68	68	68,8	69,2	70,3	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8
									PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9
		Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m³)	4	4,4	4,7	5,1	5,4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)	61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26
										Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)	20	20	20	20	20	20
									PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi (Daerah Aliran Sungai)	1	3	3	3	3	3
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94	95,2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)	82	82,5	83	84	84,5	85
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/hari)	2100	2100	2100	2100	2100	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
									KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)	82	82,5	83	84	84,5	85
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57	57	57	57	57	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)	82	82,5	83	84	84,5	85
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under[1]nourishment/PoU)	6,2	5,8	5,5	5,2	5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)	82	82,5	83	84	84,5	85
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)	5,2	4,8	4,5	4,2	4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)	82	82,5	83	84	84,5	85
									PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%)	21	22	24	27	28	30
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)	82	83	83,5	84	84,5	85
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)	6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11
										Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)	15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742
										Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)	39,27	40	40,5	41,6	42,4	44
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan SDM Petani dan Petugas Pertanian (orang)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
										Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan (%)	20	20	20	20	20	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (Juta ha)	23,4	24,2	25,1	26	26,9	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektivitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59
										Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)	7	7	7	7	7	7
										Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000
										Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)	250	250	300	350	350	350
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (Persen)	<64	<64	<72	<76	780	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektivitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59
										Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)	7	7	7	7	7	7
										Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000
										Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)	250	250	300	350	350	350
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97
										Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	256.747	262.256	274.280	284.467	295.226	306.934
										Meningkatnya Pemnfaatan Teknologi tepat guna (unit)	5	20	40	60	80	100
										Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota)	17	17	17	19	19	19
										Meningkatnya produksi budidaya laut (ton)	52	67	72	79	85	93
									PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	80	82	84	86	90	92
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)	6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)	15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742
										Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)	39,27	40	40,5	41,6	42,4	44
		Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,6	3,7	3,8	3,9	4	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)	60	60	63	65	67	69
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61	62	63	64	65	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)	60	60	63	65	67	69
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,2	5,2	5,3	5,4	5,5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern (koperasi)	50	50	60	70	80	90
									PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi (produk)	45	100	120	125	130	615
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)	82	83	83,5	84	84,5	85
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30
										Peningkatan Produksi Daging (%)	1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30
										Peningkatan Prasarana Peternakan (%)	20	20	20	20	20	100
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)	0,65	0,63	0,6	0,57	0,54	0,53
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	0,93	0,99	1,07	1,09	1,11	1,17
										Meningkatnya sarana prasaranan penangkapan ikan (unit)	1.400	1.423	1.590	1.739	1.768	1.800

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Meningkatnya sarpras UPTD Pelabuhan Perikanan (unit)	3	3	3	3	3	3
										Meningkatnya Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (dokumen)	100	100	100	100	100	100
										Meningkatnya Pro duksi Perikanan Tangkap (ton)	220.615	222.693	225.081	227.546	230.081	232.762
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97
										Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	256.747	262.256	274.280	284.467	295.226	306.934
										Meningkatnya Pemnfaatan Teknologi tepat guna (unit)	5	20	40	60	80	100
										Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota)	17	17	17	19	19	19
										Meningkatnya produksi budidaya laut (ton)	52	67	72	79	85	93
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)	6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11
										Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)	15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742
										Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)	39,27	40	40,5	41,6	42,4	44
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (Persen)	5	5,5	6,5	7,5	8,1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan (Sentra)		20	20	25	25	
									PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI (%)		72	74	76	78	
									PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri (unit usaha)		41.373	43.263	45.363	47.673	
			Kontribusi PDB pariwisata (Persen)	4,8	5	5,2	5,3	5,5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)	4	6	10	12	15	17

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)	11	19	19	19	19	19
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)	1	2,5	4	5,5	7	8,5
										Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	1,5	3	4,5	6	7,5	9
										Rata-rata lama tinggal wisman (hari)	3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29
										Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)	1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439 - 1.452	1.564-1.570	1.689	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk)	0	50	100	150	200	250
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang)	196	296	396	496	596	696
										Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	2	4	6	8	10	12
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal (%)	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat (dokumen pernyataan minat)	4	4	4	5	5	23
									PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) (Rp (triliun))	4,8	5,1	5,6	6,1	6,7	7,5
									PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Teknologi Informasi (%)	15	20	40	60	80	100
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro (dokumen)	0	2	1	1	1	1
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)	28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
									PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase serapan tenaga kerja (%)	31,77	35,52	36,01	36,5	36,99	37,97
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)	28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68
			Kontribusi tenaga kerja industri (Persen)	14,2	14,6	15	15,2	15,7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan (Sentra)		20	20	25	25	
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan (Sentra)		20	20	25	25	
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (Juta orang)	13	13,5	14	14,5	15	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)	4	6	10	12	15	17
										Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)	11	19	19	19	19	19
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)	1	2,5	4	5,5	7	8,5
										Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	1,5	3	4,5	6	7,5	9
										Rata-rata lama tinggal wisman (hari)	3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29
										Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)	1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	19	20	20	21	21	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk)	0	50	100	150	200	250
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang)	196	296	396	496	596	696
										Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	2	4	6	8	10	12

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor (juta US\$)		1.420,99	1.449,41	1.478,40	1.507,97	
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,3	1	3	7,5	15	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi (%)		5,5	5,8	6,2	6,5	
									PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)		6	6	6	6	
			Nilai devisa pariwisata (USD miliar) (USD miliar)	21	23	25	27,5	30	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)	4	6	10	12	15	17
										Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)	11	19	19	19	19	19
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)	1	2,5	4	5,5	7	8,5
										Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	1,5	3	4,5	6	7,5	9
										Rata-rata lama tinggal wisman (hari)	3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29
										Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)	1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88
		Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4								
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18								
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)	4	6	10	12	15	17
										Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)	11	19	19	19	19	19
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)	1	2,5	4	5,5	7	8,5

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	1,5	3	4,5	6	7,5	9
										Rata-rata lama tinggal wisman (hari)	3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29
										Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)	1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88
2		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan														
		Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah	0		0				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30
										Peningkatan Produksi Daging (%)	1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30
										Peningkatan Prasarana Peternakan (%)	20	20	20	20	20	100
		Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	0		0				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan (%)	73,92	75	77	79	81	82
		Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif	0		0											
		Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah	0		0				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%)	42,85	50	50	62,5	62,5	62,5
										Persentase SKPD yang terinovatif (%)	20	30	30	40	40	50
										Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)	2	10	10	10	12	12
		Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.	0		0				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah (%)	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2
										APM Pendidikan Menengah (%)	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72
										APM SLB (%)	52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)	69,07	71,07	74,07	77,07	80	83,02
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap	78,6	79,6	81	83	85	87

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										(KNL) Sesuai Standar (%)						
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)	82	82	84	86	88	90
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)	81	83	85	87	88	90
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)	0	3	3	3	3	3
									PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti (%)	77	79	81	83	85	87
										Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	75	77	79	81	83	85
									PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	70	71	72	73	74	75
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100
										Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100
										Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100
									PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)		100	100	100	100	100
3		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
		Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	0			0			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	26,66	40	50	60	70	80
										Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)	97,16	97,75	98	98,25	98,5	99
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun (%)	91,47	94	95	96	97	98
										Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan (%)	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data (inovasi)	3	6	9	12	15	18
										Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah (%)	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1
									PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun (dokumen)	3	3	3	3	3	3
									PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya (%)	80	80	85	90	90	90
									PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)	54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)	51,74	59,3	61,38	63,46	65,54	67,62
		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7		0		98	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)		0,687	0,687	0,687	0,687	0,687
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65,2		0		80	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)		0,687	0,687	0,687	0,687	0,687
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial/Pengangkatan Anak (orang)		25	25	25	25	25
										Tersedianya Data Fakir Miskin yang valid (%)		100	100	100	100	100
										Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif (persen)		30	35	40	50	
		Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230	217	205	194	183	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11
										Persentase terselenggaranya sistem informasi	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										kesehatan secara terintegrasi (%)						
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96
										Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11	10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96
										Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai	17	17	18	18	18	19

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										eliminasi malaria (kabupaten/kota)						
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)	54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75
			Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6	8,3	8	7,7	7,4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)	54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25	24	21	20	18	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)	54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)	51,74	59,3	61,38	63,46	65,54	67,62

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16	14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87
										Persentase pencapaian standar sarana	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										pelayanan kesehatan (%)						
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gernas hidup sehat (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)	82	82	84	86	88	90
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)	81	83	85	87	88	90
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)	1	20	20	20	20	20
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100
										Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100
										Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar		100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)						
										Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)		100	100	100	100	100
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)	290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)	82	82,5	83	84	84,5	85
									PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%)	21	22	24	27	28	30
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)	82	83	83,5	84	84,5	85
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Mandiri (Dasawisma)	10.800	11.300	11.800	12.300	12.800	13.300
										Jumlah KAN yang aktif (lembaga adat)	299	350	400	450	500	544
										Jumlah LPM Mandiri (LPM)	0	7	15	25	37	50
										Jumlah Posyandu Mandiri (Posyandu)	2.319	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)	51,74	59,3	61,38	63,46	65,54	67,62
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	5	10	20	30	40	50
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan	6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PEMASARAN HASIL PERIKANAN	dan pemasaran hasil perikanan (%)						
										Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)	15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742
										Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)	39,27	40	40,5	41,6	42,4	44
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30
										Peningkatan Produksi Daging (%)	1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)	0,65	0,63	0,6	0,57	0,54	0,53
									PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen)		4	8	12	16	
									PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi (%)		100	100	100	100	
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2
										Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase Rumah sakit yang	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)						
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	252	231	211	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96
										Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori	4	4	6	6	8	8

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										WISTARA (kabupaten/kota)						
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6
			Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,1	9	8,9	8,8	8,7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap	78,6	79,6	81	83	85	87

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										(KNL) Sesuai Standar (%)						
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gernas hidup sehat (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Jumlah daerah terpencil yang	2	2	2	2	2	2

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)						
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan		8	11	14	17	19

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										germas hidup sehat (kabupaten/kota)						
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19
			Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96
										Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gernas hidup sehat (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6
			Persentase rumah sakit terakreditasi	80	85	90	95	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
									UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96
										Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)	2	2	2	2	2	2
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										untuk penilaian akreditasi (%)						
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6
		Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA: 1. Membaca, 2. Matematika, 3. Sains	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 399,1; 2. 388,7; 3. 400,4	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 399,7; 2. 392,3; 3. 406,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah (%)	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2
										APM Pendidikan Menengah (%)	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72
										APM SLB (%)	52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): 1.Membaca, 2. Matematika, 3. Sains	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 34,4; 2. 46,6; 3. 49	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 35,6; 2. 47,4; 3. 51	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah (%)	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2
										APM Pendidikan Menengah (%)	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72
										APM SLB (%)	52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah (%)	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2
										APM Pendidikan Menengah (%)	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72
										APM SLB (%)	52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13,41	13,6	13,79	13,97	14,16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah (%)	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2
										APM Pendidikan Menengah (%)	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72
										APM SLB (%)	52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57
									PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (dokumen)	27	33	39	45	51	57
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)	69,07	71,07	74,07	77,07	80	83,02
									PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi (%)	6	21	36	51	66	81
		Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal	2	3	4	5	6	7

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)						
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)	81	84	88	92	96	100
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)	2	3	4	5	6	7
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)	81	84	88	92	96	100
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,2116475	91,27794284	91,27896233	91,33469578	91,38627023	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,24481017	73,50050042	73,74051922	73,96592027	74,17747551	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,512	53,134	53,756	54,378	55	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	81	84	88	92	96	100
									PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga (indeks)	69,5	70	70,5	71	71,5	72
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5	56,5	58,17	57,67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan (%)	14	15	16	17	18	20
										Jumlah wirausaha muda baru (orang)	230	268	348	348	348	1890
		Pengentasan kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9		0		40	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)		0,687	0,687	0,687	0,687	0,687

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha	25,6		0		50	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)		0,687	0,687	0,687	0,687	0,687
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630000	1600000	1850000	1350000	1100000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)	61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26
										Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)	20	20	20	20	20	20
									PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hektar)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Bidang tanah yang didistribusi	750000		0		7750000	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti (%)	65	70	75	80	85	90
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6286087		0		56286087	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%)	80	85	90	95	95	95
									PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah (%)	75	80	85	90	95	95
									PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas rencana penggunaan tanah yang dapat dijadikan acuan (%)	50	55	60	70	75	80
		Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah (%)	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2
										APM Pendidikan Menengah (%)	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72
										APM SLB (%)	52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)	28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University : 1. Top 200, 2. Top 300, 3. Top 500	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 1; 2. 2; 3. 3.								
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43	45	47	48	50	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)	28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
4		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan														
		Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	0		0				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi (nilai)	2,7	2,71	2,72	2,73	2,74	2,75
		Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	0		0				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan (Karya Budaya)		8	8	8	8	
									PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan (Kesenian Tradisional)		21	23	23	23	
									PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan (Cagar Budaya)		11	16	21	26	
										Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (Cagar Budaya)		15	15	15	15	
									PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah aktivitas masyarakat di museum (kali)		15	15	15	15	
										Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum (orang)		30000	35000	40000	45000	
		Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama			0			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen)		4	8	12	16	
									PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)	3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
									EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							
		Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter	0		0				PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun (dokumen)	N/A	3	6	9	12	15
										Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah (Orang)	N/A	6	12	18	24	30
									PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP (%)		1,41	1,52	1,62	1,72	
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%)	42,85	50	50	62,5	62,5	62,5
										Persentase SKPD yang terinovatif (%)	20	30	30	40	40	50
										Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)	2	10	10	10	12	12
5		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar														
		Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94	94,63	95	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)	0	3	3	3	3	3
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86	87	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)	0	3	3	3	3	3
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah (%)	75	80	85	90	95	95
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,05	3,1	3,3	3,6	4								
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian	78,1% akses layak (termasuk	79,43% akses layak (termasuk	82,07% akses layak (termasuk	86,03% akses layak (termasuk	90% akses layak (termasuk	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)	81	83	85	87	88	90

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	9,65% akses aman	11% akses aman	13% akses aman)	14% akses aman	15% akses aman)	PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)	1	20	20	20	20	20
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gernas hidup sehat (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72.92% penanganan; 3.70% pengurangan	73.70% penanganan; 5.51% pengurangan	75.28% penanganan; 9.13% pengurangan	77.64% penanganan; 14.57% pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)	1	20	20	20	20	20
									PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (%)	75	75	75	75	75	75
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4% BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1% BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)	73,8	74,8	76	78	80	82
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	85	86	87	88	89	90
										Akreditasi Rumah Sakit (%)	81	82	83	84	85	86
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	92	92	93	94	95	96
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)	252	231	211	190	190	190
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	91	92	93	94	95	96
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan	2	2	2	2	2	2

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)						
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)	4	4	6	6	8	8
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	17	17	18	18	18	19
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)	34,4	35	37	38	39	40
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)	90	92	94	96	98	100
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)	78,6	79,6	81	83	85	87
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)	85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)	21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan		8	11	14	17	19

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										germas hidup sehat (kabupaten/kota)						
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)		8	11	14	17	19
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)	1	20	20	20	20	20
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)	82	82	84	86	88	90
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)	0	3	3	3	3	3
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52,50189621	55,18146289	57,05999842	58,10498273	58,49863205	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber- sumber air (%)	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber- sumber air (%)	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5
			Luas lahan pertanian padi dan non[1]padi yang beririgasi meningkat (Hektare)	45229,16667	115942,7083	116142,7083	116342,7083	116342,7083	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber- sumber air (%)	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	70	71	72	73	74	75
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	11,4325	11,4325	11,4325	11,4325	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5
									PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Fasilitasi kawasan hutan yang dikonservasi (lokasi)	1	10	10	10	10	10
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53	55	57	60	65	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)	39,07	40,27	41,51	42,17	43,65	44,81
										Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
		Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)			0			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%)	80	85	90	95	95	95
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)			0										
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)			0										
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)			0			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Tersusunnya Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi (dokumen)	1	1	1	1	1	5
		Infrastruktur Perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)			0			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)	39,07	40,27	41,51	42,17	43,65	44,81
										Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Energi Dan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8
		Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (Skala 1-5) (indeks)	3	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
			Persentase pengguna internet (Persentase)	72,6	74,2	79,2	80,7	82,3								
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97,5	98	98,5	99	100								
			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)	70	72	73	74	75,7								
6		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim														
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)	60	60	65	70	75	80
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)	60	60	65	70	75	80
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,5	59	59,5	60	60,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)	60	60	65	70	75	80
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,6	62,5	63,5	64,5	65,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)	60	60	65	70	75	80
									PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman	19	19	19	19	19	19

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
										hayatinya (Kabupaten/Kota)						
		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1								
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	0,34	0,59	0,81	1	1,15								
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5	4,5	4	3,5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	70	71	72	73	74	75
		Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11,8	12,5	12,8	12,8	13,2	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45,8	50,7	53,1	57,2	58,3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30
										Peningkatan Produksi Daging (%)	1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)	5	5	5	5	5	30
										Peningkatan Prasarana Pernakan (%)	20	20	20	20	20	100
									PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	0,1	3,41	4,71	4,94	5,19	5,48
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)	0,65	0,63	0,6	0,57	0,54	0,53
									PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian (%)	3	5	7	8	10	12
										Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian (%)	3	3	3	3	3	15
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)	61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26
										Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)	20	20	20	20	20	20
									PROGRAM PENGELOLAAN	Jumlah DAS yang difasilitasi (Daerah Aliran Sungai)	1	3	3	3	3	3

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Konsolidasi Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	75,3	75,35	75,4	75,45	75,5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik (nilai)	3,26	3,27	3,28	3,29	3,3	3,31
		Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	95,07	95,27	95,47	95,67	95,67								
		Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas	70	75	80	85	85								
			PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas	50	60	70	80	85	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk (%)	100	100	100	100	100	100
										Penataan Jabatan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100
										Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis (Perangkat Daerah)	8	12	16	18	20	22
										Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) (Perangkat Daerah)	7	8	10	12	14	16
										Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik (Perangkat Daerah)	5	7	9	11	13	15
									PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai (%)	65	70	75	80	85	90
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas	30	35	45	55	70								
		Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0,2								
			Global Terrorism Index	04.44	04.39	04.34	04.29	04.24	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)	3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
									KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendiri	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)	3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)	3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI